LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA.022)

TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED

2022

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP : (021) 3811308, 35035006
FAX. : 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub 1A
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BAGIAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA. 022)

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022 (*AUDITED*)

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.029.493.587.448,00 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak atau mencapai 102,49 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp8.810.369.418.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp32.821.361.951.275,00 atau mencapai 98,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.478.235.915.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp618.148.270.422.213,00 yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar Rp8.675.178.014.086,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp592.987.031.623.954,00, Properti Investasi (neto) sebesar Rp1.543.914.417.562,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp8.673.223.179,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.933.473.143.432,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp618.148.270.422.213,00 yang terdiri atas Kewajiban sebesar Rp116.637.659.053.082,00 dan Ekuitas sebesar Rp501.510.611.369.131,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.909.857.557.720,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp41.165.815.648.755,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp32.255.958.091.035,00, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.520.212.666.746,00, dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp33.776.170.757.781,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp512.142.042.910.783,00, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp33.776.170.757.781,00 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.236.138.206.150,00 dan ditambah transaksi antar entitas senilai total Rp24.380.877.422.279,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp501.510.611.369.131,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022 *(AUDITED)*		% TERHADAP ANGGARAN	31 DESEMBER 2021 *(AUDITED)*
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	8.810.369.418.000,00	9.029.493.587.448,00	102,49	7.990.998.058.209,00
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		**8.810.369.418.000,00**	**9.029.493.587.448,00**	**102,49**	**7.990.998.058.209,00**
BELANJA NEGARA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.848.829.860.000,00	3.751.478.398.033,00	97,47	3.481.049.826.162,00
Belanja Barang	B.2.2	14.284.720.210.000,00	14.123.842.578.689,00	98,87	12.660.029.970.660,00
Belanja Modal	B.2.3	15.344.685.845.000,00	14.946.040.974.553,00	97,40	17.550.074.754.387,00
Jumlah Belanja Negara		**33.478.235.915.000,00**	**32.821.361.951.275,00**	**98,04**	**33.691.154.551.209,00**

Jakarta, Mei 2023

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

N E R A C A

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (*AUDITED*)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2021 *(AUDITED)*
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	665.013.496,00	1.531.781.543,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	297.629.855,00	90.453.800,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	162.963.569.007,00	93.947.869.730,00
Kas pada BLU	C.1.4	1.062.525.699.253,00	946.063.926.981,00
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.1.5	95.390.180.846,00	98.000.000.000,00
Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)	C.1.6	78.358.116.107,00	12.964.799.240,00
Uang Muka Belanja (*Prepayment*)		0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.7	357.732.653.069,00	139.646.321.569,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	631.777.656.653,00	604.821.281.778,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.9	(127.961.440.492,00)	(241.082.732.301,00)
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.10	24.000.000,00	24.000.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.1.11	(120.000,00)	(120.000,00)
Piutang dari KUN		0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.12	43.561.177.292,00	37.700.066.100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.13	(7.960.056.869,00)	(8.973.302.468,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.14	18.583.808.600,00	22.884.546.135,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	(11.520.400.387,00)	(11.751.822.502,00)
Persediaan	C.1.16	6.370.740.527.656,00	9.718.253.417.892,00
Persediaan Belum Diregister		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		**8.675.178.014.086,00**	**11.414.120.487.497,00**
ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	307.301.505.375.165,00	309.532.832.185.545,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	58.451.192.236.464,00	56.436.648.269.102,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	34.891.139.031.065,00	31.433.348.474.321,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	173.583.679.666.367,00	164.048.192.127.498,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.950.468.974.056,00	2.848.293.517.447,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	30.970.455.120.230,00	33.668.678.869.868,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(132.969.858.513.693,00)	(112.621.726.293.204,00)
Aset Konsesi Jasa	C.2.8	119.875.070.711.161,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.2.9	(2.066.620.976.861,00)	0,00
Aset Tetap yang Belum Diregister		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**592.987.031.623.954,00**	**485.346.267.150.577,00**
PROPERTI INVESTASI	**C.3**		
Properti Investasi	C.3.1	1.549.596.748.840,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(5.682.331.278,00)	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**1.543.914.417.562,00**	**0,00**

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2021 (*AUDITED*)
PIUTANG JANGKA PANJANG	**C.4**		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.4.1	1.455.392.629,00	8.884.123.688,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2	(7.269.963,00)	(212.575.618,00)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.3	7.261.407.551,00	8.671.548.070,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.4	(36.307.038,00)	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**8.673.223.179,00**	**8.671.548.070,00**
ASET LAINNYA	**C.5**		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.5.1	14.578.416.669.218,00	13.965.872.508.966,00
Aset Tidak Berwujud	C.5.2	2.511.098.992.560,00	2.627.734.446.365,00
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.5.3	287.057.697.628,00	151.433.848.624,00
Aset Lainnya yang belum diregister		0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C.5.4	3.279.226.674.105,00	4.399.527.929.227,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.5.5	(5.722.326.890.079,00)	(5.561.393.929.183,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**14.933.473.143.432,00**	**15.583.174.803.999,00**
JUMLAH ASET		**618.148.270.422.213,00**	**512.352.233.990.143,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.6**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	195.445.674.549,00	171.196.107.245,00
Utang yang Belum Ditagihkan		0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.6.2	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.6.3	36.730.849.092,00	37.463.190.572,00
Uang Muka dari KPPN	C.6.4	665.013.496,00	1.531.781.543,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.5	18.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**232.841.555.137,00**	**210.191.079.360,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**C.7**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa	C.7.1	116.404.817.497.945,00	0,00
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**116.404.817.497.945,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**116.637.659.053.082,00**	**210.191.079.360,00**
EKUITAS	**C.8**	501.510.611.369.131,00	512.142.042.910.783,00
EKUITAS	**C.8**	**501.510.611.369.131,00**	**512.142.042.910.783,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**618.148.270.422.213,00**	**512.352.233.990.143,00**

Jakarta, Mei 2023

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2021 *(AUDITED)*
KEGIATAN OPERASIONAL	**D.1**		
PENDAPATAN			
PENDAPATAN OPERASIONAL	**D.1.1**		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		8.909.857.557.720,00	8.527.892.857.724,00
JUMLAH PENDAPATAN		**8.909.857.557.720,00**	**8.527.892.857.724,00**
BEBAN OPERASIONAL	**D.1.2**		
Beban Pegawai	D.1.2.1	4.287.773.407.778,00	3.938.418.143.717,00
Beban Persediaan	D.1.2.2	605.930.349.443,00	524.997.328.384,00
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	8.884.932.961.930,00	7.887.701.345.900,00
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	2.367.891.970.456,00	3.168.276.757.794,00
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	1.495.340.262.318,00	1.021.901.017.850,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.1.2.6	2.693.738.464.505,00	408.099.735.612,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	20.766.701.258.548,00	20.360.932.545.566,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8	63.506.973.777,00	97.213.064.812,00
Beban Lain-lain	D.1.2.9	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**41.165.815.648.755,00**	**37.407.539.939.635,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**D.1.2.10**	**(32.255.958.091.035,00)**	**(28.879.647.081.911,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D.2**		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	**D.2.1**	**(2.357.257.011.577,00)**	**(1.098.479.567.882,00)**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		96.414.567.322,00	29.400.290.126,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.453.671.578.899,00	1.127.879.858.008,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**D.2.2**	**837.044.344.831,00**	**150.798.655.024,00**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		915.199.908.145,00	152.763.794.982,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		78.155.563.314,00	1.965.139.958,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D.2.3**	**(1.520.212.666.746,00)**	**(947.680.912.858,00)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(33.776.170.757.781,00)**	**(29.827.327.994.769,00)**

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	**D.3**	**(33.776.170.757.781,00)**	**(29.827.327.994.769,00)**

Jakarta, Mei 2023

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2022 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2021 *(AUDITED)*
EKUITAS AWAL	**E.1**	**512.142.042.910.783,00**	**517.472.969.484.329,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	**E.2**	**(33.776.170.757.781,00)**	**(29.827.327.994.769,00)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	**E.3**	**0,00**	**0,00**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**E.4**	**(1.236.138.206.150,00)**	**(2.028.445.125.180,00)**
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	77.090.109.398,00	(254.517.565.050,00)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	7.536.400.947,00	973.732.066.800,00
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	0,00	34.684.707.171,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	(3.078.705.342.988,00)	(2.557.734.885.646,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	1.757.940.626.493,00	(224.609.448.455,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E.5**	**24.380.877.422.279,00**	**26.524.846.546.403,00**
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)	E.5.1	(7.348.647.418.840,00)	(6.674.742.050.411,00)
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)	E.5.1	31.229.553.401.525,00	32.434.636.022.874,00
TRANSFER MASUK	E.5.2	20.726.633.661.872,00	17.259.624.056.892,00
TRANSFER KELUAR	E.5.2	(20.727.700.358.059,00)	(17.298.557.398.903,00)
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	E.5.3	478.656.852.281,00	789.624.381.080,00
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL	E.5.4	22.381.283.500,00	15.540.859.420,00
SETORAN SURPLUS BLU	E.5.5	0,00	(1.279.324.549,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**E.6**	**(10.631.431.541.652,00)**	**(5.330.926.573.546,00)**
EKUITAS AKHIR	**E.7**	**501.510.611.369.131,00**	**512.142.042.910.783,00**

Jakarta, Mei 2023
Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELAS-AN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang transportasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.

A.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Visi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".* Visi tersebut selaras dengan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2020-2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan menjadi landasan dalam Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024, yakni: *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2020-2025, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 serta untuk mendukung Visi Pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dimaksud, maka ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut: *"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"*.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan 9 (sembilan) misi pemerintah sebagaimana tersebut di atas, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi dimaksud, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, diharapkan telah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden. Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024.

Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
   a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
   b. Capaian *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran/fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

Sedangkan, 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi yang menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

A.1.2. UNIT KERJA DAN JUMLAH SATKER

Kementerian Perhubungan terdiri atas sembilan Unit Eselon I, yaitu:

a. Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

g. Badan Kebijakan Transportasi:
Badan Kebijakan Transportasi merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.

h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

i. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Tabel A.1. Rincian Jumlah Satker pada Masing-Masing Eselon I

No	Unit Eselon I	Jumlah Satuan Kerja Aktif	Jumlah Satuan Kerja Inaktif
1.	Sekretariat Jenderal	20	-
2.	Inspektorat Jenderal	1	-
3.	Ditjen Perhubungan Darat	33	-
4.	Ditjen Perhubungan Laut	302	-
5.	Ditjen Perhubungan Udara	173	4
6.	Ditjen Perkeretaapian	16	-
7.	Badan Kebijakan Transportasi	5	-
8.	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	32	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1	-
	JUMLAH TOTAL	**583**	**4**

Termasuk di dalam jumlah Satker pada Kementerian Perhubungan di atas adalah 35 satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) Satker di bawah Unit Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 6 (enam) Satker di bawah Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Udara, 1 (satu) satker di bawah Ditjen Perhubungan Darat, 1 (satu) satker di bawah Ditjen Perhubungan Laut, dan 2 (dua) Satker di bawah Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI terdiri dari Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul GLP. SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan Laporan Sub Ledger serta laporan manajerial lainnya. Hasil rekonsiliasi pada Aplikasi

SAKTI yang di-*input* oleh setiap satker ditampilkan pada aplikasi MonSAKTI. Data MonSAKTI menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat konsolidasian (UAPPA/B-W, UAPPA/B-E1, dan UAPA/B).

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Perhubungan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

1. Pendapatan- LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

2. Pendapatan- LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :
    1) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
    2) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
3) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka pendek yang dilakukan oleh satker BLU dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan kas melalui pemanfaatan surplus kas BLU. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen keuangan dengan risiko rendah, seperti deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Perlakuan atas investasi dimaksud pada Laporan Keuangan SAP satker BLU terbagi menjadi 2 yaitu diakui sebagai setara kas untuk yang diinvestasikan dalam surat berharga berjangka waktu maksimal 3 bulan dan diakui sebagai investasi jangka pendek BLU untuk yang diinvestasikan pada surat berharga berjangka waktu di atas 3 s.d. 12 bulan.
4) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100

5) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

7) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Tahun 2015) hingga Tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode Harga Peroleh Terakhir (HPT) dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020, Pemerintah menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai Tahun 2021.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
2) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
   a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
   a) Tanah;
   b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
   c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;

d) Aset Tetap Lainnya selain Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern (PMK 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan BMN).

3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Konsesi Jasa

d. Aset Konsesi Jasa

Menunjuk pada PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Kerja, Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, merupakan aset yang dimiliki oleh mitra dan/atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Aset Partisipasi Pemerintah, yaitu aset yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi dioperasikan oleh pihak swasta atau badan usaha tertentu yang mendapatkan hak konsesi tersebut.
2) Aset Partisipasi Mitra, yaitu aset yang dimiliki bersama antara pemerintah dan mitra kerja yang melakukan pengerjaan atau pengoperasian proyek atau infrastruktur yang diberikan hak konsesi.

Kedua jenis aset konsesi jasa ini dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada PSAP 16. Aset Partisipasi Pemerintah harus dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya, sedangkan Aset Partisipasi Mitra harus dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan diamortisasi sesuai dengan masa perjanjian yang ditetapkan.

Selain itu, ada juga jenis aset konsesi jasa yang masih dalam pengerjaan atau konstruksi, yang disebut Aset Konsesi Jasa Pertisipasi Mitra dalam Pengerjaan dimana aset tersebut dicatat dengan akun terpisah dalam laporan keuangan pemerintah tanpa dilakukan penyusutan, dan harus diakui sebagai aset tetap setelah selesai dan siap digunakan.

Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sostematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Properti Investasi

e. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Piutang Jangka Panjang

f. Piutang Jangka Panjang

1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

g. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

5) Aset Lain-lain berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi.

Kewajiban

6. Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban Konsesi Jasa

7. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban konsesi jasa merupakan kewajiban yang diakui pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa untuk selama umur aset. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa dan disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Amortisasi kewajiban konsesi jasa adalah pengakuan pengurangan nilai kewajiban yang timbul dari pemberian hak konsesi atau perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta yang terkait dengan penyediaan jasa publik, seperti jasa transportasi, energi, air minum, atau jasa lainnya.

Amortisasi kewajiban konsesi jasa dilakukan untuk mencerminkan pengurangan nilai kewajiban seiring dengan berjalannya waktu dan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam praktiknya, amortisasi kewajiban konsesi jasa dapat menjadi rumit dan memerlukan pemantauan dan pengelolaan yang cermat untuk memastikan bahwa pengakuan amortisasi kewajiban yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Ekuitas

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi PC-PEN

9. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur kebijakan akuntansi pelaporan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi isu sentral sejak 2020 mengingat dampaknya luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan serta mengguncang stabilitas sistem keuangan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis demi menangani pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan memulihkan perekonomian nasional.

Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang luar biasa perlu direspon dengan kebijakan yang luar biasa (*extraordinary policy*) pula. Untuk itu, diperlukan fleksibilitas agar APBN mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk penguatan *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan fleksibilitas ini diharapkan proses penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat. diakselerasi. Di antara langkah strategis yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020). UU 2/2020 menjadi landasan bagi Pemerintah, termasuk otoritas moneter dan perbankan untuk melakukan langkah-langkah preventif yang bersifat luar biasa secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap sejumlah aspek, seperti kesehatan, sosial, serta fundamental perekonomian nasional.

Secara umum, UU 2/2020 tersebut mengatur tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran

mandatory spending, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan Lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement* (Repo) SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

B. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh Kementerian/Lembaga maupun oleh Bendahara Umum Negara.

C. Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 13 UU 2 / 2020 menyatakan bahwa "Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat".
Untuk menjalankan amanat ketentuan di atas yaitu pelaporan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, bentuk penggunaan anggaran maupun kebijakan keuangan negara secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Penggunaan anggaran melalui Bagian Anggaran K/L, maupun Bagian Anggaran BUN yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA, dan direalisasikan sesua1 mekanisme perbendaharaan yang berlaku.
2) Kebijakan keuangan negara yang bukan bersifat secara langsung sebagai penggunaan anggaran atau tidak ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sehingga tidak melalui mekanisme perbendaharaan. Kebijakan keuangan Negara ini antara lain berupa pemberian insentif perpajakan.
3) Kebijakan-kebijakan terkait keuangan negara yang diambil pemerintah pusat sebagai bagian dari perumusan kebijakan fiskal selama penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain penyesuaian batasan besaran defisit anggaran dan pergeseran anggaran.

Dalam kerangka pelaporan, pada prinsipnya apapun bentuk dari kebijakan yang diambil pemerintah pusat, mekanisme pertanggungjawaban melalui LKPP tetap mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat secara umum maupun ketentuan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Hal ini sesuai dengan publikasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menyatakan bahwa KSAP tidak menerbitkan pernyataan standar akuntansi yang bersifat khusus/tersendiri terkait dengan transaksi keuangan pemerintah selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga semua PSAP yang telah ada dapat menjadi pedoman pemerintah dalam mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan melalui Laporan Keuangan. Untuk itu, prinsip mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam pos-pos di laporan keuangan, baik itu Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan tetap mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berlaku dan melalui mekanisme yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Psuat (SAPP).

Namun demikian, untuk kecukupan informasi pada Laporan Keuangan, diperlukan pengungkapan yang dapat menggambarkan keseluruhan penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan Negara yang diambil pemerintah dalam

rangka menjalankan Program PEN terkait. Pengungkapan pada LKPP dituangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan pengungkapan tambahan pada penjelasan pendahuluan terkait kebijakan fiskal maupun pada Catatan Penting Lainnya yang merupakan bagian dari CaLK yang menjelaskan LRA.

D. Pengembalian Sisa Dana PC PEN dan Penggunaan Kembali Sisa PC PEN Tahun Sebelumnya

Kebijakan penggunaan sisa dana penerbitan SBN PG - NPG (SBN *Public Goods - Non - Public Goods*) pada rekening khusus PC PEN PG - NPG setelah laporan keuangan terbit, adalah:

1) PG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG;
2) NPG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG; dan
3) Apabila terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan PC PEN pada Tahun Anggaran (TA) berikutnya, maka pengembalian tersebut merupakan PNBP dari Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan menambah sisa dana PC PEN PG - NPG pada rekening khusus.

Selanjutnya, kebijakan penggunaan dana pada rekening khusus PG – NPG TAYL di TA berikutnya, sebagai berikut:

1) Penggunaan atas dana dari pengembalian belanja dan pembiayaan PG - NPG TAYL:
   a) Pengembalian belanja dan pembiayaan PG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG; dan
   b) Pengembalian belanja dan pembiayaan NPG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG.
2) Penggunaan atas dana dari pengembalian penempatan dana Program PEN ditentukan oleh Menteri Keuangan.
3) Kriteria penentuan kegiatan PC-PEN PG - NPG yang dinyatakan telah selesai ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan, masih terdapat sisa dana pada rekening khusus PC-PEN PG - NPG, maka sisa dana dipindahbukukan ke rekening kas umum negara.
4) Dalam hal terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan dari kegiatan PC PEN PG - NPG yang telah

dinyatakan selesai, pengaturan pengembalian belanja dan pembiayaan adalah disetor ke kas negara dan diakui sebagai PNBP TAYL dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sesuai mekanisme pengelolaan APBN yang berlaku.

E. Kebijakan atas Transaksi Kontribusi Bank Indonesia pada Surat Berharga Negara Program PEN

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Program PEN), yang dikelompokkan berdasarkan penggunaan sebagai berikut:

1) *Public Goods*; dan
2) *Non-Public Goods*.

Transaksi belanja bunga/imbalan oleh Pemerintah atas SBN dan kontribusi Bank Indonesia dilaksanakan dalam kerangka skema *burden sharing*, yang dimaksudkan agar alokasi anggaran untuk pembayaran belanja bunga tidak terlalu membebani APBN dan menyediakan *fiscal space* untuk menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya yang timbul di masa depan dari penerbitan SBN masa kini dalam rangka penanganan PC-PEN.

Mekanisme skema *burden sharing* dilakukan dengan basis kas sehubungan adanya:

1) arus kas keluar atas transaksi jatuh tempo pembayaran kupon bunga atau imbalan SUN dan/atau SBSN Program PEN, baik *Public Goods* maupun *Non-Public Goods*; dan
2) arus kas masuk atas transaksi kontribusi perhitungan *burden sharing* yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Perlakuan transaksi pembayaran jatuh tempo kupon belanja bunga/imbalan SBN dan kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan *public goods* skema *burden sharing* dalam rangka PC-PEN, sebagai berikut:

1) Pemerintah melakukan pembayaran saat jatuh tempo bunga/imbalan SBN sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan *public goods* skema *burden sharing* dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan program PEN.

2) Pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D sebesar perhitungan jatuh tempo kupon bunga atau imbalan SBN dengan menggunakan pertanggungjawaban alokasi anggaran pada masing-masing akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.

3) Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan *public goods* skema *burden sharing*, terdapat aliran kas masuk pada periode tahun anggaran yang sama sebagai kontribusi Bank Indonesia yang merupakan rangkaian satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SBN dalam skema *burden sharing*. Berdasarkan hal tersebut, maka aliran kas masuk ke rekening kas umum negara dari kontribusi Bank Indonesia ini diperhitungkan/dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Rupiah dan akun Belanja Pembayaran lmbalan SBSN - Jangka Panjang.

4) Penyesuaian untuk pemulihan pagu DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Perlakuan transaksi kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan *non-public goods* skema *burden sharing* dalam rangka PC-PEN, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia, terdapat pembagian beban keuangan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik beban yang timbul atas penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia maupun kepemilikan SBN oleh investor secara umum. Pada saat jatuh tempo kupon pembayaran bunga/imbalan SBN, disepakati perhitungan kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN untuk pembiayaan *non public goods* berdasarkan perhitungan rampung.

2) Berdasarkan perhitungan rampung, Bank Indonesia melakukan pembayaran kontribusi kepada pemerintah yang melibatkan aliran kas masuk ke rekening kas umum

negara, dengan menggunakan akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah dan akun Belanja Pembayaran lmbalan SBSN - Jangka Panjang.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, dilakukan jurnal penyesuaian sehubungan dengan:

1) Pengakuan beban pembayaran bunga SBN sebesar nilai realisasi belanja sesuai SPM/SP2D (menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D) dan pengakuan pendapatan dari kontribusi Bank Indonesia (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-Lain) sebesar nilai yang sama secara bruto untuk penyajian di Laporan Operasional.

2) Perhitungan beban kewajiban bunga sampai dengan tanggal laporan keuangan yang belum jatuh tempo berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS), dicatat sebagai pengakuan beban bunga dan pengakuan kewajiban jangka pendek bunga berjalan.

3) Perhitungan pendapatan bunga berjalan dari kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN untuk anggaran kesehatan dalam skema *burden sharing* berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi DMFAS, dicatat sebagai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan pengakuan pendapatan bunga berjalan (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-Lain).

A.6. KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, SERTA ANTISIPASI KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL

Kebijakan penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Adanya kekhawatiran pandemi Covid-19 kembali tidak terkendali di tahun 2022, serta ketidakpastian perekonomian nasional sebagai dampak situasi global yang tidak menentu, Pemerintah mengambil langkah antisipatif dalam bentuk *Automatic adjustment* dan Realokasi

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ke Anggaran Bendahara Umum Negara, sebagai berikut:

1. *Automatic adjustment*

Sebagai langkah penyesuaian postur belanja akibat kondisi terkini penanganan pandemi COVID-19 dan antisipasi dampak memburuknya perekonomian nasional sebagai dampak situasu global yang tidak menentu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan melakukan *Automatic adjustment* sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

a. *Automatic adjustment* pertama sesuai dengan Surat Menteri keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 hal *Automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L).
Kegiatan yang diprioritaskan untuk dicadangkan dalam mekanisme *automatic adjustment* adalah:
   1) Tunjangan Kinerja (Tunkin) yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR.
   2) 10 akun Belanja Barang (BB), yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket *meeting* (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219).
   3) Kegiatan yang sudah tercantum dalam catatan halaman IV DIPA yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2022.

   Pada *Automatic adjustment* tahap pertama, Kementerian Perhubungan melakukan pencadangan belanja senilai Rp979.845.413.000,00 atau 5% dari Pagu APBN Rupiah Murni Kementerian Perhubungan senilai Rp19.596.908.259.000,00

b. *Automatic adjustment* kedua sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 Hal Penambahan *Automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 sebagai antisipasi gangguan terhadap momentum pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik. Tambahan *Automatic adjustment* dilakukan terhadap Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum direalisasikan/dikontrakkan sebesar Rp24,5 Triliun, tersebar ke seluruh Kementerian/Lembaga, denga kriteria sebagai berikut :

1) Sumber Dana Rupiah Murni (RM);
2) Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional;
3) Di luar belanja Anggaran Pendidikan;
4) Di luar belanja Perlinsos PBI, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako (Program untuk melindungi masyarakat miskin);
5) Dapat mencakup Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
6) Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022

Pada *Automatic adjustment* tahap kedua, Kementerian Perhubungan melakukan pencadangan belanja senilai Rp1.174.486.913.000,00.

2. Realokasi Anggaran ke BA BUN

Dalam rangka menghadapi kondisi perekonomian global terkini dan proyeksi outlook belanja s.d. akhir tahun 2022 serta dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak di akhir tahun, Pemerintah melakukan realokasi terhadap sisa anggaran yang masih diblokir (*Automatic adjustment* maupun *non Automatic adjustment*) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebagai berikut.

a. Realokasi anggaran ke BA BUN sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari blokir *Automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun. Kementerian Perhubungan merealoksi anggaran terblokir ke BA BUN sebesar Rp154.119.889.000,00.
b. Realokasi anggaran ke BA BUN sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Realokasi tersebut mengurangi Pagu Kementerian diperhitungkan dalam kinerja pelaksanaan anggaran TA 2022. Kementerian Perhubungan merealoksi anggaran terblokir ke BA BUN sebesar Rp956.391.216.000,00 dengan rincian :
    1) Blokir *Automatic adjustment* sebesar Rp955.391.216.000,00
    2) Blokir *Non Automatic adjustment* sebesar Rp1.000.000.000,00

3. Perkembangan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional, selain melalui pelaksanaan *Automatic adjustment*, dan Realokasi anggaran ke BA BUN, terdapat pula kebijakan-kebijakan lain dalam rangka pencapaian kinerja anggaran Kementerian Perhubungan yang optimal, sebagai berikut:

a. Rekomposisi anggaran antar Eselon I dalam rangka dukungan manajemen sebesar Rp11.558.902.000,00
b. Luncuran SBSN sebesar Rp191.933.653.000,00
c. Luncuran PHLN sebesar Rp290.075.778.000,00
d. Penggunaan Saldo Awal BLU 486.490.644.000,00
e. Alokasi Anggaran PEN dari BA BUN 569.428.584.000,00
f. Hibah Luar Negeri sebesar Rp17.651.866.000,00
g. Pencantuman Pagu Pengadaan Tanah PSN dari LMAN sebesar Rp372.587.637.000,00
h. Pergeseran anggaran BKT ke BRIN sebesar Rp67.216.875.000,00 (mengurangi pagu Kemenhub)
i. Pengurangan Pagu Belanja dari Sumber Dana BLU sebesar Rp210.524.630.000,00 (mengurangi pagu Kemenhub)

Rincian perkembangan anggaran Kementerian Perhubungan selama tahun 2022 secara rinci disajikan dalam Tabel A.5.

Tabel A.5 - Rincian Perkembangan Pagu Anggaran

(dalam Ribuan Rupiah)

URAIAN	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDMP	BPTJ	JUMLAH
PAGU AWAL	505.368.589,00	87.604.744,00	5.395.244.597,00	8.954.904.496,00	7.035.785.248,00	6.728.720.521,00	174.302.325,00	3.771.559.511,00	284.830.332,00	**32.938.320.363,00**
REKOMPOSISI DUKMAN	447.148,00	9.476.245,00	0,00	(4.626.648,00)	0,00	(5.296.745,00)	0,00	(1.188.361,00)	1.188.361,00	**0,00**
LUNCURAN SBSN DAN PHLN	0,00	0,00	0,00	146.288.797,00	112.586.158,00	223.134.476,00	0,00	0,00	0,00	**482.009.431,00**
SALDO AWAL BLU/PNBP	0,00	0,00	0,00	271.179.903,00	47.282.601,00	0,00	0,00	168.028.140,00	0,00	**486.490.644,00**
PENAMBAHAN ANGGARAN PEN DARI BA	0,00	0,00	0,00	0,00	569.428.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**569.428.584,00**
HIBAH LUAR NEGERI	0,00	0,00	0,00	17.651.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.651.866,00**
REALOKASI ANGGARAN TANAH PSN DARI LMAN	0,00	0,00	0,00	170.000.598,00	0,00	202.587.039,00	0,00	0,00	0,00	**372.587.637,00**
PERGESERAN KE BABUN	(20.692.888,00)	(9.944.546,00)	(30.347.257,00)	(270.336.904,00)	(210.078.653,00)	(341.008.825,00)	(9.785.827,00)	(176.440.655,00)	(41.875.550,00)	**(1.110.511.105,00)**
PERGESERAN ANGGARAN BKT KE BRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.216.875,00)	0,00	0,00	**(67.216.875,00)**
PENGURANGAN PAGU PNBP/BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.398.413,00)	0,00	0,00	(174.126.217,00)	0,00	**(210.524.630,00)**
PAGU AKHIR	**485.122.849,00**	**87.136.443,00**	**5.364.897.340,00**	**9.285.062.108,00**	**7.518.605.525,00**	**6.808.136.466,00**	**97.299.623,00**	**3.587.832.418,00**	**244.143.143,00**	**33.478.235.915,00**

3. Realisasi Anggaran Program Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Realisasi anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kementerian Perhubungan pada Tahun 2022 adalah sebesar

Rp267.998.138.365,00. Perincian akun, pagu, dan realisasinya sebagaimana tabel berikut.

Tabel A.6 Rincian Akun, Pagu, dan Realisasi Anggaran Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu DIPA	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	94.633.739.000,00	92.296.758.960,00	97,53%
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	75.795.802.000,00	73.739.621.931,00	97,29%
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.068.163.000,00	41.413.252.038,00	98,44%
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13.779.462.000,00	12.163.144.652,00	88,27%
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.052.686.000,00	1.038.286.478,00	98,63%
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	253.805.000,00	225.024.456,00	88,66%
7	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.630.587.000,00	3.395.043.377,00	93,51%
8	525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	811.100.000,00	711.264.000,00	87,69%
9	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	80.032.000,00	65.716.439,00	82,11%
10	526132	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.491.259.000,00	2.491.259.000,00	100,00%
11	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	162.884.000,00	151.942.042,00	93,28%
12	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19	623.400.000,00	597.238.000,00	95,80%
13	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19	42.274.897.000,00	39.709.586.992,00	93,93%
JUMLAH			**277.657.816.000,00**	**267.998.138.365,00**	**96,52%**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Perhubungan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pencadangan *Automatic Adjustment* (AA) atau pencadangan belanja oleh Bendahara Umum Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. *Automatic Adjustment* dilakukan dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan dilaksanakan dengan mencantumkan beberapa KRO/RO kegiatan K/L dalam catatan halaman IV DIPA (blokir). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel B.1. Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Semula dan Setelah Revisi

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.810.369.418.000,00	8.810.369.418.000,00
Penerimaan Hibah		
Jumlah Pendapatan	**8.810.369.418.000,00**	**8.810.369.418.000,00**
Belanja		
Belanja Pegawai	4.092.601.150.000,00	3.848.829.860.000,00
Belanja Barang	14.460.510.012.000,00	14.284.720.210.000,00
Belanja Modal	14.385.209.201.000,00	15.344.685.845.000,00
Jumlah Belanja	**32.938.320.363.000,00**	**33.478.235.915.000,00**

Sedangkan apabila dilihat dari program-program Kementerian Perhubungan, maka perubahannya adalah sebagai berikut.

Tabel B.2. Uraian Pagu Anggaran Semula dan Setelah Revisi Berdasarkan Program

(*dalam Rupiah*)

KODE	URAIAN PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2022 *(AUDITED)*		
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	SELISIH
01.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	9.829.205.621.000,00	10.144.986.867.000,00	315.781.246.000
01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	94.882.583.000,00	0,00	(94.882.583.000)
01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.310.984.995.000,00	7.849.691.918.000,00	(461.293.077.000)
01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.361.835.060.000,00	1.272.166.609.000,00	(89.668.451.000)
02.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.220.419.120.000,00	1.604.846.004.000,00	384.426.884.000
04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	3.421.482.844.000,00	3.672.625.483.000,00	251.142.639.000
04.WA	Program Dukungan Manajemen	48.841.887.000,00	72.470.511.000,00	23.628.624.000
04.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	25.594.359.000,00	27.810.304.000,00	2.215.945.000
06.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	198.085.207.000,00	209.489.760.000,00	11.404.553.000
06.WA	Program Dukungan Manajemen	469.724.058.000,00	528.951.978.000,00	59.227.920.000
06.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	922.578.519.000,00	850.924.852.000,00	(71.653.667.000)
11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	0,00	17.651.866.000,00	17.651.866.000
20.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.974.686.110.000,00	7.166.619.763.000,00	191.933.653.000
20.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
Total Belanja		**32.938.320.363.000,00**	**33.478.235.915.000,00**	**539.915.552.000**

Jumlah penurunan anggaran terbesar yaitu Program Dukungan Manajemen dari sumber dana rupiah murni (Kode : 01.WA) terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut. Penurunan pagu Program Dukungan Manajemen dari sumber dana rupiah murni berupa pengurangan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting* kegiatan.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp9,03 triliun

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.029.493.587.448,00 atau mencapai 102,49% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.810.369.418.000,00.

Perincian anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut.

Tabel B.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)		
		Anggaran	Realisasi (*Netto*)	%
PNBP Non BLU				
1	Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	71.506.905.000,00	230.880.662.581,00	322,88
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	154.271.467.000,00	141.225.940.602,00	91,54
3	Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	43.272.429.000,00	43.808.491.858,00	101,24
4	Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	7.111.006.686.000,00	6.661.018.266.164,00	93,67
5	Pendapatan Jasa Lainnya	500.000.000,00	17.137.828.280,00	3427,57
6	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	196.177.000,00	243.413.780,00	124,08
7	Pendapatan Denda	0,00	37.852.528.521,00	-
8	Pendapatan Lain-lain	1.200.000.000,00	216.480.287.054,00	18040,02
Total PNBP Non BLU (*Netto*)		**7.381.953.664.000,00**	**7.348.647.418.840,00**	**99,55**
PNBP BLU				
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.376.791.775.000,00	1.310.206.103.586,00	95,16
10	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	41.042.541.000,00	115.034.343.658,00	280,28
11	Pendapatan dari Alokasi APBN	0,00	81.323.921.195,00	-
12	Pendapatan BLU Lainnya	10.581.438.000,00	174.281.800.169,00	1647,05
Total PNBP BLU (*Netto*)		**1.428.415.754.000,00**	**1.680.846.168.608,00**	**117,67**
JUMLAH		**8.810.369.418.000,00**	**9.029.493.587.448,00**	**102,49**

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 mencapai 102,49% dari estimasi, hal ini disebabkan karena optimalnya pencapaian pendapatan pada Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,00% dibandingkan 31 Desember 2021. Realisasi PNBP Non-BLU meningkat 10,09% dan PNBP BLU meningkat 27,70% dari tahun sebelumnya. Rincian PNBP per jenis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi PNBP Per Jenis
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
PNBP Non BLU					
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	230.880.662.581,00	133.829.055.344,00	97.051.607.237,00	72,52
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	141.225.940.602,00	153.145.700.037,00	(11.919.759.435,00)	(7,78)
3	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	43.808.491.858,00	33.629.193.946,00	10.179.297.912,00	30,27
4	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	6.661.018.266.164,00	6.109.436.482.860,00	551.581.783.304,00	9,03
5	Pendapatan Jasa Lainnya	17.137.828.280,00	1.017.278.000,00	16.120.550.280,00	1.584,68
6	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	243.413.780,00	435.977.621,00	(192.563.841,00)	(44,17)
7	Pendapatan Denda	37.852.528.521,00	129.841.224.337,00	(91.988.695.816,00)	(70,85)
8	Pendapatan Lain-lain	216.480.287.054	113.407.138.266,00	103.073.148.788,00	90,89
Total PNBP Non BLU (Netto)		**7.348.647.418.840,00**	**6.674.742.050.411,00**	**673.905.368.429,00**	**10,09**
PNBP BLU					
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.310.206.103.586,00	1.057.405.955.706,00	252.800.147.880,00	23,91
11	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	115.034.343.658,00	77.160.050.541,00	37.874.293.117,00	49,09
12	Pendapatan dari Alokasi APBN	81.323.921.195,00	82.531.788.437,00	(1.207.867.242,00)	(1,46)
13	Pendapatan BLU Lainnya	174.281.800.169,00	99.158.213.114,00	75.123.587.055,00	75,76
Total PNBP BLU (Netto)		**1.680.846.168.608,00**	**1.316.256.007.798,00**	**364.590.160.810,00**	**27,70**
JUMLAH		**9.029.493.587.448,00**	**7.990.998.058.209,00**	**1.038.495.529.239,00**	**13,00**

Beberapa faktor naiknya realisasi PNBP tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, antara lain:

1. Adanya relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemi COVID-19 yang berdampak pada meningkatnya layanan di sektor transportasi dan pendidikan;
2. Peningkatan layanan atas angkutan barang dari layanan Kepelabuhanan dan Kenavigasian Laut;
3. Meningkatnya jasa kepelabuhanan seiring meningkatnya penumpang jasa transportasi laut.

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Pendapatan jasa lainnya dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp15.162.150.000,00 terdapat pada 2 satker:

1. Direktorat Bandar Udara sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan pendapatan dari PT. Cinta Flores Nyes atas penggantian uang garansi pengakhiran perjanjian KPBU Labuan Bajo sesuai surat Direktur Bandar Udara no. KU.102/12/1/DBU-2022 tanggal 29 November 2022.
2. UPBU Wamena sebesar Rp162.150.000,00 yang merupakan pendapatan atas penjualan drum kosong BBM perintis yang disetorkan ke Kas Negara.

Pendapatan Lain-Lain terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan, dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan lain-lain dengan nilai paling signifikan yaitu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp181.517.929.246,00 yang terdapat pada seluruh Eselon I Kementerian Perhubungan dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut.

Pendapatan BLU Lainnya terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Penerimaan Kembali Belanja BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan TP/TGR, Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa, dan Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU. Pendapatan BLU Lainnya paling signifikan yakni Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang merupakan pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum senilai Rp30.251.875.753,00 dan Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU yang merupakan Pendapatan Klaim Asuransi Pesawat Udara pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan senilai Rp73.551.900.500,00.

Realisasi PNBP Non BLU yang paling signifikan adalah Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp4.432.189.415.960,00 berupa jasa labuh, jasa *ship to ship*, jasa dermaga, jasa kontribusi tunda, jasa sewa perairan dan jasa fungsional lainnya.

Sedangkan nilai realisasi PNBP BLU yang paling signifikan adalah Pendapatan Jasa Layanan Umum pada unit Eselon I BPSDM Perhubungan sebesar Rp1.108.135.410.879,00 berupa pendapatan layanan pendidikan pada Satker-Satker BLU BPSDM Perhubungan. Rincian perbandingan realisasi PNBP per Eselon I per 31 Desember 2022 diuraikan dalam **Lampiran B.1.**

Realisasi Belanja Rp32,82 triliun

B.2 BELANJA

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp32.821.361.951.275,00 atau 98,04% dari anggaran belanja sebesar Rp33.478.235.915.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel B.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.848.829.860.000,00	3.752.703.961.021,00	97,50%
Belanja Barang	14.284.720.210.000,00	14.126.226.386.542,00	98,89%
Belanja Modal	15.344.685.845.000,00	14.947.856.394.031,00	97,41%
Total Belanja Kotor	**33.478.235.915.000,00**	**32.826.786.741.594,00**	**98,05%**
Pengembalian Belanja	0,00	5.424.790.319,00	-
Total Belanja	**33.478.235.915.000,00**	**32.821.361.951.275,00**	**98,04%**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

(*dalam Rupiah*)

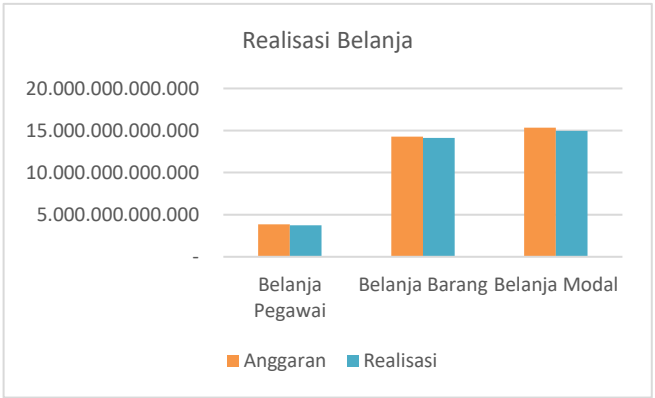

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel B.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2022		
		ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI (NETTO)	%
01.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	10.144.986.867.000,00	10.053.699.388.333,00	99,10
01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.849.691.918.000,00	7.705.133.111.891,00	98,16
01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.272.166.609.000,00	1.265.739.429.816,00	99,49
02.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.604.846.004.000,00	1.495.191.028.413,00	93.17
04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	3.672.625.483.000,00	3.612.407.357.782,00	98,36
04.WA	Program Dukungan Manajemen	72.470.511.000,00	71.974.105.713,00	99,32
04.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	27.810.304.000,00	27.483.547.480,00	98,83
06.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	209.489.760.000,00	202.390.315.848,00	96,61
06.WA	Program Dukungan Manajemen	528.951.978.000,00	523.968.244.331,00	99,06
06.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	850.924.852.000,00	847.799.223.617,00	99,63
11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	17.651.866.000,00	17.650.765.954,00	99,99
20.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	7.166.619.763.000,00	6.937.925.432.097,00	96,81
20.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100
Total Belanja		**33.478.235.915.000,00**	**32.821.361.951.275,00**	**98,04**

Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Pegawai	3.751.478.398.033,00	3.481.049.826.162,00	270.428.571.871,00	7,77
Belanja Barang	14.123.842.578.689,00	12.660.029.970.660,00	1.463.812.608.029,00	11,56
Belanja Modal	14.946.040.974.553,00	17.550.074.754.387,00	(2.604.033.779.834,00)	(14,84)
Jumlah	**32.821.361.951.275,00**	**33.691.154.551.209,00**	**(869.792.599.934,00)**	**(2,58)**

Pencapaian realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.821.361.951.275,00 atau lebih rendah 2,58% dibandingkan realisasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp33.691.154.551.209,00. Penurunan signifikan terdapat pada realisasi Belanja Modal yaitu sebesar Rp2.604.033.779.834,00 seiring dengan penurunan pagu pada Belanja Modal.

Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN dan Program Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut.

Tabel B.8. Total Belanja Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2022

(*dalam Rupiah*)

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu DIPA	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	94.633.739.000,00	92.296.758.960,00	97.53
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	75.795.802.000,00	73.739.621.931,00	97.29
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.068.163.000,00	41.413.252.038,00	98.44
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13.779.462.000,00	12.163.144.652,00	88.27

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu DIPA	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.052.686.000,00	1.038.286.478,00	98.63
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	253.805.000,00	225.024.456,00	88.66
7	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.630.587.000,00	3.395.043.377,00	93.51
8	525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	811.100.000,00	711.264.000,00	87.69
9	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	80.032.000,00	65.716.439,00	82.11
10	526132	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.491.259.000,00	2.491.259.000,00	100
11	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	162.884.000,00	151.942.042,00	93.28
12	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	623.400.000,00	597.238.000,00	95.8
13	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.274.897.000,00	39.709.586.992,00	93.93
Jumlah			**277.657.816.000,00**	**267.988.138.365,00**	**96.52**

Tabel B.9. Total Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2022

(*dalam Rupiah*)

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu DIPA	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
1	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30.240.000	30.240.000	100,00
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	86.908.193.000	76.557.206.975	88,09
3	521211	Belanja Bahan	80.000.000	80.000.000	100,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.045.775.000	4.705.939.819	93,26
5	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.183.115.172.000	1.810.966.811.022	82,95
6	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	25.161.000	25.160.500	100,00
7	522111	Belanja Langganan Listrik	721.000.000	719.960.355	99,86
8	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13.077.000	13.077.000	100,00
9	522131	Belanja Jasa Konsultan	1.806.418.000	1.804.726.200	99,91
10	522151	Belanja Jasa Profesi	34.100.000	34.100.000	100,00
11	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107.578.577.000	95.226.489.707	88,52
12	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000	64.975.000	99,96
13	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	989.550.000	976.161.978	98,65
14	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.648.000.000	19.502.874.049	99,26
15	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	798.758.000	797.298.586	99,82
16	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	48.691.204.000	47.065.290.355	96,66
17	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	127.640.000	127.550.000	99,93
18	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	21.929.116.000	20.971.968.607	95,64
19	523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	95.880.000	95.830.000	99,95
20	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.785.479.000	4.526.009.462	94,58
21	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	357.679.000	357.679.000	100,00
22	525114	Belanja Pemeliharaan	450.000.000	447.437.912	99,43
23	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	90.328.249.000	90.236.632.764	99,90
24	526113	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	182.041.345.000	138.625.157.277	76,15
25	526132	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID19	2.491.259.000	2.491.259.000	100,00
26	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3.220.297.000	3.218.507.984	99,94
27	531111	Belanja Modal Tanah	22.323.070.000	22.058.815.363	98,82
28	531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	57.600.000	57.600.000	100,00
29	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.913.475.000	337.167.636.198	99,48
30	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.646.016.336.000	1.261.871.820.657	76,66

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu DIPA	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
31	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	402.281.000	401.880.000	99,90
32	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	110.953.286.000	110.948.584.082	100,00
33	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.210.977.606.000	3.203.074.370.947	99,75
34	534121	Belanja Modal Irigasi	140.000.000	139.997.000	100,00
35	534131	Belanja Modal Jaringan	688.173.751.000	687.600.891.535	99,92
36	536111	Belanja Modal Lainnya	62.548.218.000	62.505.357.701	99,93
Jumlah			**8.841.882.792.000**	**8.005.495.297.035**	**90,54**

Belanja Pegawai Rp3,75 triliun

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.751.478.398.033,00 dan Rp3.481.049.826.162,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,77% karena adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan tunjangan pegawai pada Tahun 2022. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dirinci sebagai berikut.

Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.966.303.237.820,00	1.887.024.003.700,00	79.279.234.120,00	4,20
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3.667.860.000,00	672.351.800,00	2.995.508.200,00	445,53
Belanja Honorarium	774.354.146,00	0,00	774.354.146,00	-
Belanja Lembur	140.225.188.381,00	119.253.776.168,00	20.971.412.213,00	17,59
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	1.641.733.320.674,00	1.475.502.880.190,00	166.230.440.484,00	11,27
Jumlah Belanja Kotor	**3.752.703.961.021**	**3.482.453.011.858,00**	**270.250.949.163,00**	**7,76**
Pengembalian Belanja Pegawai	1.225.562.988,00	1.403.185.696,00	(177.622.708,00)	(12,66)
Jumlah Belanja Pegawai	**3.751.478.398.033**	**3.481.049.826.162,00**	**270.428.571.871,00**	**7,77**

Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.2.**

Belanja Barang Rp14,12 triliun

B.2.2 Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.123.842.578.689,00 dan Rp12.660.029.970.660,00. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 11,56%. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Barang Operasional	1.881.175.956.315,00	1.756.582.886.399,00	124.593.069.916,00	7,09
Belanja Barang Non Operasional	5.233.319.513.967,00	4.554.690.032.343,00	678.629.481.624,00	14,90
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	52.517.174.707,00	0,00	52.517.174.707,00	-
Belanja Barang Persediaan	383.955.217.338,00	356.652.579.508,00	27.302.637.830,00	7,66
Belanja Jasa	1.132.453.222.001,00	1.070.870.811.063,00	61.582.410.938,00	5,75
Belanja Pemeliharaan	2.296.008.045.061,00	2.375.362.632.120,00	(79.354.587.059,00)	(3,34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.407.178.141.974,00	970.531.032.858,00	436.647.109.116,00	44,99
Belanja Perjalanan Luar Negeri	30.342.984.799,00	5.332.299.652,00	25.010.685.147,00	469,04
Belanja Barang BLU	1.435.854.921.029,00	1.179.942.685.715,00	255.912.235.314,00	21,69
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	270.050.759.325,00	385.772.459.238,00	(115.721.699.913,00)	(30,00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.370.450.026,00	7.586.296.348,00	(4.215.846.322,00)	(55,57)
Jumlah Belanja Kotor	**14.126.226.386.542,00**	**12.663.323.715.244,00**	**1.462.902.671.298,00**	**11,55**
Pengembalian Belanja	2.383.807.853,00	3.293.744.584,00	(909.936.731,00)	(27,63)
Jumlah Belanja	**14.123.842.578.689,00**	**12.660.029.970.660,00**	**1.463.812.608.029,00**	**11,56**

Rincian perbandingan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2022 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.3**.

B.2.2.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp234.759.519.000,00 dimana untuk pagu Belanja Barang Non BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp230.237.800.000,00 dan Belanja Barang BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.521.719.000,00. Sedangkan total realisasi bersih Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp227.691.313.373,00 dengan realisasi Belanja Barang Non BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp223.519.289.557,00 dan realisasi Belanja Barang BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.172.023.816,00.

Realiasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 diantaranya adalah terkait pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh, biaya pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan 1 tahun, biaya penyemprotan desinfektan, pengadaan masker, *hand sanitizer*, dan alat *rapid test* yang tidak memenuhi kriteria peralatan dan mesin/persediaan. Adapun rincian Belanja Barang Non BLU Penanganan Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut.

Tabel B.12. Belanja Barang Non BLU untuk Penanganan Pandemi COVID-19

(*dalam Rupiah*)

No	Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap Angg.
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	94.633.739.000,00	92.296.758.960,00	97.53
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	75.795.802.000,00	73.739.621.931,00	97.29
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.068.163.000,00	41.413.252.038,00	98.44
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13.779.462.000,00	12.163.144.652,00	88.27
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.052.686.000,00	1.038.286.478,00	98.63
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	253.805.000,00	225.024.456,00	88.66
7	526132	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.491.259.000,00	2.491.259.000,00	100
8	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	162.884.000,00	151.942.042,00	93.28
Jumlah			**230.237.800.000,00**	**223.519.289.557,00**	**97.08**

Realisasi belanja barang operasional - penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp92.296.758.960,00 merupakan belanja barang operasional untuk penanganan COVID-19 antara lain berupa pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh, biaya pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan 1 tahun, biaya penyemprotan desinfektan, serta pengadaan masker, *hand sanitize*r, yang diperuntukan bagi kegiatan tertentu yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Alokasi Belanja Barang BLU untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp4.521.719.000,00. Anggaran tersebut terserap dengan realisasi sebesar Rp4.172.023.816,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.13. Belanja Barang BLU untuk Penanganan Pandemi COVID-19

(*dalam Rupiah*)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.630.587.000,00	3.395.043.377,00	93,51
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	811.100.000,00	711.264.000,00	87,69
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	80.032.000,00	65.716.439,00	82,11
Jumlah Belanja Kotor		**4.521.719.000,00**	**4.172.023.816,00**	**92,27**
Pengembalian Belanja		-	0,00	-
Jumlah Belanja Bersih		**4.521.719.000,00**	**4.172.023.816,00**	**92,27**

Realisasi Belanja Barang BLU untuk penanganan COVID-19 paling besar terdapat pada Satker BLU Balai Kesehatan Penerbangan sebesar Rp1.046.680.055,00 berupa pengadaan alat dan perlengkapan penanganan dampak pandemi COVID-19 baik untuk keperluan internal maupun layanan kesehatan BLU Satker.

B.2.2.2 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Realisasi Kementerian Perhubungan Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah

sebesar Rp1.880.937.734.011,00 dan Rp1.756.124.626.115,00. Rincian uraian jenis Belanja Barang Operasional adalah sebagai berikut.

Tabel B.14. Uraian Jenis Belanja Barang Operasional

(*dalam Rupiah*)

No	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang Operasional					
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.142.394.689.168,00	1.020.624.042.667,00	121.770.646.501,00	11,93
2	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	20.623.698.435,00	12.577.820.595,00	8.045.877.840,00	63,97
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.509.421.942,00	31.693.965.447,00	(1.184.543.505,00)	(3,74)
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.398.347.617,00	8.102.733.960,00	(1.704.386.343,00)	(21,03)
5	Belanja Honor Operasional Satker	181.766.993.231,00	192.177.280.714,00	(10.410.287.483,00)	(5,42)
6	Belanja Barang Operasional Lainnya	407.173.499.079,00	374.810.891.156,00	32.362.607.923,00	8,63
7	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	9.540.000,00	19.080.000,00	(9.540.000,00)	(50,00)
8	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	92.299.766.843,00	116.577.071.860,00	(24.277.305.017,00)	(20,83)
Jumlah Belanja Kotor		**1.881.175.956.315,00**	**1.756.582.886.399,00**	**124.593.069.916,00**	**7,09**
Pengembalian Belanja		238.222.304,00	458.260.284,00	(220.037.980,00)	(48,02)
Jumlah Belanja Bersih		**1.880.937.734.011,00**	**1.756.124.626.115,00**	**124.813.107.896,00**	**7,11**

Dari rincian jenis Belanja Operasional pada tabel di atas, nilai Belanja Keperluan Perkantoran merupakan nilai yang paling signifikan yaitu sebesar Rp1.142.394.689.168,00. Dari nilai tersebut yang terbesar terdapat pada Eselon I Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp393.318.773.020,00. Belanja Keperluan Perkantoran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Belanja atas Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi pegawai, satpam, petugas kebersihan, pramubakti, dan pengemudi; Honor PPNPN; Uang Lembur; Konsumsi Jamuan Rapat. Belanja Keperluan Perkantoran terdapat pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp1.142.394.689.168,00 tersebut terdapat pada 569 Satker. Realisasi terbesar antara lain pada:

1. Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebesar Rp46.324.621.736,00 berupa pengadaan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas upacara, belanja rapat-rapat koordinasi, pajak bumi dan bangunan, honor PPNPN, pengamanan khusus, pengemudi, satpam, honor Pegawai Tidak Tetap *Daycare*, dan biaya dukungan layanan *Call Centre* 151.
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp35.483.907.685,00 antara lain berupa realisasi belanja honor-honor pramubakti dan petugas kebersihan/keamanan, pembelian obat-obatan, dan belanja keperluan rumah tangga kantor.
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Timur sebesar Rp21.525.613.759,00 antara lain berupa belanja keperluan rumah tangga, honor-honor pramubakti dan petugas kebersihan/keamanan, honor jasa keahlian teknis dan administrasi bidang transportasi darat.
4. Satker BPTJ sebesar Rp17.742.272.125,00 antara lain berupa belanja keperluan sehari-hari perkantoran, biaya konsumsi rapat kerja rapat koordinasi, honorarium PPNPN, honorarium tenaga pengamanan, honorarium tenaga pengemudi, honorarium tenaga penunjang, honorarium tenaga kebersihan, uang lembur dan uang makan tenaga pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, serta peralatan dan perlengkapan kantor BPTJ.

B.2.2.3 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Pada Kementerian Perhubungan Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp5.232.264.424.258,00 dan Rp4.553.030.938.120,00. Rincian uraian jenis Belanja Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel B.15. Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional

(*dalam Rupiah*)

No	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang Non Operasional					
1	Belanja Bahan	226.432.884.268,00	128.212.370.190,00	98.220.514.078,00	76,61
2	Belanja Honor Output Kegiatan	264.077.537.194,00	254.821.882.913,00	9.255.654.281,00	3,63
3	Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	15.864.714,00	2.373.649,00	13.491.065,00	568,37
4	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.664.553.644.603,00	3.979.931.539.858,00	684.622.104.745,00	17,20
5	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	2.875.908.000,00	2.743.980.000,00	131.928.000,00	4,81
6	Belanja Barang Pemberian Bantuan Opr. dlm bentuk uang	0,00	21.750.000,00	(21.750.000,00)	(100,00)
7	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	73.742.281.931,00	188.956.135.733,00	(115.213.853.802,00)	(60,97)
8	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	878.486.697,00	0,00	878.486.697,00	-
9	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel	329.246.560,00	0,00	329.246.560,00	-
10	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	413.660.000,00	0,00	413.660.000,00	-
Jumlah Belanja Kotor		**5.233.319.513.967,00**	**4.554.690.032.343,00**	**678.629.481.624,00**	**14,90**
Pengembalian Belanja		1.055.089.709,00	1.659.094.223,00	(604.004.514,00)	(36,41)
Jumlah Belanja Bersih		**5.232.264.424.258,00**	**4.553.030.938.120,00**	**679.233.486.138,00**	**14,92**

Dari rincian jenis Belanja Non Operasional pada tabel di atas, nilai Belanja Barang Non Operasional Lainnya merupakan nilai yang paling signifikan yaitu sebesar Rp4.664.553.644.603,00. Atas nilai Belanja Barang Non Operasional Lainnya tersebut realisasi terbesar terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.833.946.033.734,00 yang tersebar di 188 satker, dimana Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat memiliki nilai terbesar Rp1.055.329.583.936,00 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan besar yaitu Belanja Subsidi Perintis dan Belanja Subsidi Tol Laut.

Subsidi perintis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas transportasi angkutan laut di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Tertinggal). Sedangkan Tol laut merupakan program nasional Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang dilatarbelakangi karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.

Adapun Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat adalah sebesar Rp1.514.842.682.192,00 pada 32 Satker. Realisasi terbesar terdapat

pada 2 (dua) Satker yaitu Satker Direktorat Angkutan Jalan Rp718.016.693.747,00 dan Satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Rp465.742.269.465,00. Pada Satker Direktorat Angkutan Jalan merupakan realisasi program pemberian layanan angkutan umum melalui skema *Buy The Services* (BTS) pada 10 kota besar di Indonesia, sedangkan pada Satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan antara lain berupa subsidi pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis (subsidi ro-ro *long distance*, subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, subsidi angkutan penyeberangan perintis, dan subsidi pengoperasian kapal angkutan perintis).

Skema *Buy The Service* atau BTS untuk angkutan massal perkotaan adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator dengan mekanisme lelang berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau *Quality Licensing* yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek kesehatan. Jadi dalam skema ini, pemerintah hanya memfokuskan diri untuk mengevaluasi kinerja layanan yang dijalankan oleh operator. BTS merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu *Bus Rapid Transit* (BRT), di mana pemerintah membeli bus yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Skema ini diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang kemudian diubah dengan PM Nomor 2 Tahun 2022.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp704.201.541.427,00 pada 110 Satker. Realisasi terbesar terdapat pada Bandar Udara Mozes Kilangin-Timika sebesar Rp90.006.535.136,00, berupa belanja subsidi angkutan udara perintis, subsidi angkutan kargo perintis, dan subsidi operasi angkutan udara kargo.

Ruang lingkup kegiatan angkutan udara perintis dibagi menjadi 2:

1. Angkutan Udara Perintis, merupakan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan (termasuk daerah yang terkena bencana) dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara. Angkutan Udara Perintis dibagi lagi menjadi 2, yaitu Angkutan Udara Perintis Penumpang dan Angkutan Udara Perintis Kargo.
2. Subsidi Angkutan Udara Kargo, merupakan kegiatan angkutan udara kargo dalam negeri yang melayani rute penerbangan dari dan ke bandar udara yang ditetapkan dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara. Selain itu juga terdapat Kegiatan Pendukung berupa Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan Kegiatan yang mendukung program perintis penumpang dan perintis kargo dengan memberikan subsidi biaya angkut BBM di lokasi yang tidak terdapat depo pengisian Avtur.

Kriteria Rute Perintis antara lain:

1. Sulit Aksesbilitas (ketersediaan moda lain, waktu tempuh lebih dari 8jam, dan jadwal yang tidak berkesinambungan);
2. Daerah Perbatasan;
3. Pulau-pulau kecil terluar berdasarkan penetapan Presiden.

Subsidi Biaya Operasi Angkutan Udara Perintis diberikan untuk kegiatan angkutan penumpang dan kargo. Untuk kegiatan penumpang diberikan setelah dikurangi pendapatan dari target penumpang. Sedangkan untuk Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak diberikan untuk mengompensasi ongkos angkut pada bandara yang tidak memiliki depo pengisian bahan bakar sehingga harganya sama dengan bandara yang memiliki depo.

Adapun realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp73.742.281.931,00 merupakan biaya konsumsi rapat serta pengadaan Alat Uji Medis/Rapid test dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria persediaan atau peralatan dan mesin.

B.2.2.4 Belanja Kontribusi dan Kompensasi

Realisasi Belanja Kontribusi dan Kompensasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp52.517.174.707,00 dan Rp0,00.

Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund* terdapat pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp467.614.590,00 merupakan realisasi belanja kontribusi tahunan pada organisasi internasional yaitu Tokyo MoU dan *International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (IALA). Tokyo MoU merupakan organisasi *Port State Control* (PSC) yang terdiri dari 20 negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. IALA adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.

Sedangkan Belanja Kompensasi adalah Belanja Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebesar Rp52.049.560.117,00 merupakan realisasi belanja barang kewajiban pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Avaibility Payment*) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Makassar-Pare-Pare.

B.2.2.5 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan merupakan pengeluaran belanja dalam rangka membeli barang persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Realisasi Belanja Barang Persediaan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp383.955.217.338,00 dan Rp356.631.641.857,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel B.16. Uraian Jenis Belanja Barang Persediaan

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang Persediaan					
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	340.018.859.842,00	292.717.724.363,00	47.301.135.479,00	16,16
2	Belanja Barang Amunisi	99.100.800,00	0,00	99.100.800,00	-
3	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges	571.169.000,00	544.483.034,00	26.685.966,00	4,90
4	Belanja Barang Persediaan bahan baku	434.000,00	0,00	434.000,00	-
5	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1.852.401.658,00	20.813.515.112,00	(18.961.113.454,00)	(91,10)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
6	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	41.413.252.038,00	42.576.856.999,00	(1.163.604.961,00)	(2,73)
Jumlah Belanja Kotor		**383.955.217.338,00**	**356.652.579.508,00**	**27.302.637.830,00**	**7,66**
Pengembalian Belanja		0,00	20.937.651,00	(20.937.651,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Bersih		**383.955.217.338,00**	**356.631.641.857,00**	**27.323.575.481,00**	**7,66**

Belanja Barang Persediaan paling signifikan adalah Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp340.018.859.842,00, dimana nilai yang paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat yaitu Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp70.034.277.451,00, berupa pengadaan blanko Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Kartu Uji (Kartu Pintar), dan Tanda Uji (Stiker). Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi pada Satker-Satker Kementerian Perhubungan umumnya berupa Alat Tulis Kantor, bahan cetakan, dan perlengkapan kantor lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari.

B.2.2.6 Belanja Jasa

Belanja Jasa merupakan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka pembelian atas layanan suatu jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Realisasi Belanja Jasa Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.132.416.844.451,00 dan Rp1.070.779.791.034,00. Rincian uraian jenis Belanja Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel B.17. Uraian Jenis Belanja Jasa

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Jasa					
1	Belanja Langganan Listrik	288.531.989.689,00	248.808.451.882,00	39.723.537.807,00	15,97
2	Belanja Langganan Telepon	13.691.749.796,00	14.109.044.439,00	(417.294.643,00)	(2,96)
3	Belanja Langganan Air	16.756.274.963,00	15.123.370.064,00	1.632.904.899,00	10,80
4	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	92.416.667.585,00	74.472.640.888,00	17.944.026.697,00	24,09
5	Belanja Jasa Pos dan Giro	3.342.561.789,00	2.239.056.480,00	1.103.505.309,00	49,28
6	Belanja Jasa Konsultan	313.557.461.499,00	322.388.928.996,00	(8.831.467.497,00)	(2,74)
7	Belanja Sewa	182.800.326.168,00	162.546.298.217,00	20.254.027.951,00	12,46
8	Belanja Jasa Profesi	42.002.510.387,00	44.611.159.589,00	(2.608.649.202,00)	(5,85)
9	Belanja Jasa kpd BLU dalam Satu Kementerian	472.376.700,00	0,00	472.376.700,00	-
10	Belanja Jasa Lainnya	166.718.158.773,00	147.473.784.016,00	19.244.374.757,00	13,05
11	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.163.144.652,00	39.098.076.492,00	(26.934.931.840,00)	(68,89)
Jumlah Belanja Kotor		**1.132.453.222.001,00**	**1.070.870.811.063,00**	**61.582.410.938,00**	**5,75**
Pengembalian Belanja		36.377.550,00	91.020.029,00	(54.642.479,00)	(60,03)
Jumlah Belanja Bersih		**1.132.416.844.451,00**	**1.070.779.791.034,00**	**61.637.053.417,00**	**5,76**

Belanja Jasa yang paling signifikan adalah Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp313.557.461.499,00 dimana nilai yang paling signifikan terdapat pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp159.741.272.165,00 antara lain berupa jasa konsultansi Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Infrastructure Maintenance Operation* / IMO).

B.2.2.7 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas,

kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Kementerian Perhubungan realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.295.650.528.444,00 dan Rp2.375.082.196.819,00. Berikut uraian jenis Belanja Pemeliharaan sebagai berikut.

Tabel B.18. Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Pemeliharaan					
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	541.978.251.340,00	475.740.512.776,00	66.237.738.564,00	13,92
2	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.186.005.583,00	3.514.237.334,00	671.768.249,00	19,12
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.038.286.478,00	4.594.915.012,00	(3.556.628.534,00)	(77,40)
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.697.857.255,00	2.933.768.636,00	(1.235.911.381,00)	(42,13)
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	811.484.473.297,00	822.583.869.607,00	(11.099.396.310,00)	(1,35)
6	Belanja BBM dan Pelumas Khusus Non Pertamina	9.651.770.845,00	1.714.372.517,00	7.937.398.328,00	462,99
7	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.514.363.855,00	161.457.523.014,00	(2.943.159.159,00)	(1,82)
	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/APung/ Udara Bermotor	26.982.774,00	0,00	26.982.774,00	-
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.475.276.370,00	6.068.991.023,00	(593.714.653,00)	(9,78)
9	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	587.941.287.350,00	721.573.791.669,00	(133.632.504.319,00)	(18,52)
10	Belanja Pemeliharaan Irigasi	783.639.494,00	827.688.000,00	(44.048.506,00)	(5,32)
11	Belanja Pemeliharaan Jaringan	141.477.531.973,00	149.680.570.584,00	(8.203.038.611,00)	(5,48)
12	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	95.830.000,00	22.081.000,00	73.749.000,00	333,99
13	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	604.750.000,00	0,00	604.750.000,00	-
14	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	455.245.658,00	758.450,00	454.487.208,00	59.923,16
15	Belanja Pemeliharaan Lainnya	30.596.492.789,00	24.649.552.498,00	5.946.940.291,00	24,13
Jumlah Belanja Kotor		**2.296.008.045.061,00**	**2.375.362.632.120,00**	**(79.354.587.059,00)**	**(3,34)**
Pengembalian Belanja		357.516.617,00	280.435.301,00	77.081.316,00	27,49
Jumlah Belanja Bersih		**2.295.650.528.444,00**	**2.375.082.196.819,00**	**(79.431.668.375,00)**	**(3,34)**

Belanja Pemeliharaan paling signifikan yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp811.484.473.297,00 pada 578 satker. Realisasi terbesar terdapat pada Satker Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok sebesar Rp39.343.003.536,00 berupa perawatan dan pengoperasian sarana dan prasarana angkutan laut. Selanjutnya untuk Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp587.941.287.350,00 tersebar pada 289 Satker, dimana realisasi terbesar terdapat pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp514.774.732.200,00 berupa Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Infrastructure Maintenance Operation* / IMO).

Sedangkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.038.286.478,00 merupakan pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel atau permanen.

B.2.2.8 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada Kementerian Perhubungan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.406.514.379.626,00 dan Rp969.931.909.738,00. Dengan perincian sebagai berikut.

Tabel B.19. Uraian Jenis Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Perjalanan Biasa	1.044.574.278.530,00	718.523.245.875,00	326.051.032.655,00	45,38
2	Belanja Perjalanan Tetap	605.820.597,00	694.823.605,00	(89.003.008,00)	(12,81)
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.744.114.641,00	62.632.195.170,00	17.111.919.471,00	27,32
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.637.400.712,00	52.249.216.225,00	29.388.184.487,00	56,25
5	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	225.024.456,00	1.576.055.006,00	(1.351.030.550,00)	(85,72)
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.391.503.038,00	134.855.496.977,00	65.536.006.061,00	48,60
Jumlah Belanja Kotor		**1.407.178.141.974,00**	**970.531.032.858,00**	**436.647.109.116,00**	**44,99**
Pengembalian Belanja		663.762.348,00	599.123.120,00	64.639.228,00	10,79
Jumlah Belanja Bersih		**1.406.514.379.626,00**	**969.931.909.738,00**	**436.582.469.888,00**	**45,01**

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri paling signifikan berupa Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp1.044.574.278.530,00 pada 610 satker. Belanja perjalanan biasa terbesar terdapat pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp27.489.886.000,00.

Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp225.024.456,00 merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka penanganan COVID-19 untuk ASN yang melaksanakan tugas dalam rangka penanganan COVID-19, di antaranya untuk Perjalanan Dinas bagi Tenaga Kesehatan (nakes) dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.

B.2.2.9 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas negara dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada Kementerian Perhubungan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp30.341.411.247,00 dan Rp5.332.299.652,00. Dengan rincian adalah sebagai berikut.

Tabel B.20. Uraian Jenis Belanja Perjalanan Luar Negeri

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Perjalanan Luar Negeri					
1	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	25.884.806.617,00	5.187.593.279,00	20.697.213.338,00	398,98
2	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.458.178.182,00	144.706.373,00	4.313.471.809,00	2.980,84
Jumlah Belanja Kotor		**30.342.984.799,00**	**5.332.299.652,00**	**25.010.685.147,00**	**469,04**
Pengembalian Belanja		1.573.552,00	0,00	1.573.552,00	-
Jumlah Belanja Bersih		**30.341.411.247,00**	**5.332.299.652,00**	**25.009.111.595,00**	**469,01**

Belanja Perjalanan Luar Negeri paling signifikan berupa Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri sebesar Rp25.883.233.065,00 pada 34 satker, dimana nilai yang paling signifikan terdapat pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

B.2.2.10 Belanja Barang BLU

Belanja Barang BLU merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. Pada Kementerian Perhubungan realisasi bersih Belanja Barang BLU Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.435.837.645.329,00 dan Rp1.179.759.922.623,00. Rincian uraian jenis Belanja BLU adalah sebagai berikut.

Tabel B.21. Uraian Jenis Belanja Barang BLU

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang BLU					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	534.148.233.939,00	460.308.732.235,00	73.839.501.704,00	16,04
2	Belanja Barang	477.669.701.091,00	370.783.277.869,00	106.886.423.222,00	28,83
3	Belanja Jasa	107.400.462.600,00	95.662.077.048,00	11.738.385.552,00	12,27
4	Belanja Pemeliharaan	74.250.827.205,00	77.736.137.888,00	(3.485.310.683,00)	(4,48)
5	Belanja Perjalanan	65.071.870.972,00	46.924.024.749,00	18.147.846.223,00	38,67
6	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	413.997.874,00	861.400.500,00	(447.402.626,00)	(51,94)
7	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	97.229.558.302,00	55.328.574.634,00	41.900.983.668,00	75,73
8	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	61.961.274.593,00	52.857.268.349,00	9.104.006.244,00	17,22
9	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	10.721.357.425,00	8.930.578.680,00	1.790.778.745,00	20,05
10	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.788.827.444,00	1.401.157.417,00	387.670.027,00	27,67
11	Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0,00	27.427.500,00	(27.427.500,00)	(100,00)
12	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	123.339.500,00	131.389.500,00	(8.050.000,00)	(6,13)
13	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.395.043.377,00	5.405.613.740,00	(2.010.570.363,00)	(37,19)
14	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	711.264.000,00	1.989.676.899,00	(1.278.412.899,00)	(64,25)
15	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	65.716.439,00	1.388.948.707,00	(1.323.232.268,00)	(95,27)
16	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	206.400.000,00	(206.400.000,00)	(100,00)
17	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel BLU	886.446.268,00	0,00	886.446.268,00	-
18	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel BLU	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-
Jumlah Belanja Kotor		**1.435.854.921.029,00**	**1.179.942.685.715,00**	**255.912.235.314,00**	**21,69**
Pengembalian Belanja		17.275.700,00	182.763.092,00	(165.487.392,00)	(90,55)
Jumlah Belanja Bersih		**1.435.837.645.329,00**	**1.179.759.922.623,00**	**256.077.722.706,00**	**21,71**

Belanja Barang BLU paling signifikan adalah Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp534.148.233.939,00 pada 24 satker. Jumlah satker BLU di Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 sebanyak 31 satker. Terdapat 7 satker yang tidak menggunakan akun Belanja Gaji dan Tunjangan (525111) dikarenakan belum mengimplementasikan remunerasi sehingga tidak membayar P1 yang sumber dananya berasal dari BLU. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan terbesar adalah pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebesar Rp70.097.536.504,00 berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. Sedangkan Belanja Barang BLU – Penanganan COVID-19 sebesar Rp3.395.043.377,00 merupakan pengadaan masker/*hand*

sanitizer/alat rapid test dan sejenisnya dalam rangka mendukung kegiatan kantor, pengadaan lisensi *video conference*, serta biaya penyemprotan disinfektan.

B.2.2.11 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp270.036.769.252,00 dan Rp385.772.459.238,00. Rincian uraian jenis Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda adalah sebagai berikut.

Tabel B.22. Uraian Jenis Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda					
1	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	113.682.916.285,00	216.822.877.482,00	(103.139.961.197,00)	(47,57)
2	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	152.882.683.177,00	92.108.584.297,00	60.774.098.880,00	65,98
3	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	993.900.863,00	0,00	993.900.863,00	-
4	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalan bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.491.259.000,00	76.840.997.459,00	(74.349.738.459,00)	(96,76)
Jumlah Belanja Kotor		**270.050.759.325,00**	**385.772.459.238,00**	**(115.721.699.913,00)**	**(30,00)**
Pengembalian Belanja		13.990.073,00	0,00	13.990.073,00	-
Jumlah Belanja Bersih		**270.036.769.252,00**	**385.772.459.238,00**	**(115.735.689.986,00)**	**(30,00)**

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang paling signifikan adalah Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp152.882.683.177,00 pada 8 satker, dimana nilai yang paling signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp50.827.335.472,00 yang merupakan pembangunan Dermaga Sri Menanti dan dermaga-dermaga di Sungai Musi 16 Ilir yang nantinya akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pemerintah Kota Palembang.

B.2.2.12 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada Kementerian Perhubungan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.370.450.026,00 dan Rp7.584.185.464,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.23. Uraian Jenis Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda					
1	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.218.507.984,00	7.184.791.716,00	(3.966.283.732,00)	(55,20)
2	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	151.942.042,00	401.504.632,00	(249.562.590,00)	(62,16)
Jumlah Belanja Kotor		**3.370.450.026,00**	**7.586.296.348,00**	**(4.215.846.322,00)**	**(55,57)**
Pengembalian Belanja		0,00	2.110.884,00	(2.110.884,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Bersih		**3.370.450.026,00**	**7.584.185.464,00**	**(4.213.735.438,00)**	**(55,56)**

Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang paling signifikan adalah Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311) sebesar Rp3.218.507.984,00 pada 2 satker yakni Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp2.592.498.176,00 pada BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY merupakan Bantuan Teknis Alat Penerangan Jalan Konvensional di Kabupaten Pati. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Sebesar Rp626.009.808,00 pada BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Belanja Modal Rp14,95 Triliun

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp14.946.040.974.553,00 dan Rp17.550.074.754.387,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 14,84% dari realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021. Perbandingan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel B.24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Tanah	1.176.733.425.887,00	2.168.757.618.495,00	(992.024.192.608,00)	(45,74)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.769.162.427.679,00	2.957.252.574.589,00	(1.188.090.146.910,00)	(40,18)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.755.921.301.837,00	3.027.528.359.465,00	(271.607.057.628,00)	(8,97)
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	8.604.227.337.278,00	8.787.853.369.176,00	(183.626.031.898,00)	(2,09)
5	Belanja Modal Lainnya	503.491.762.883,00	540.894.566.337,00	(37.402.803.454,00)	(6,91)
6	Belanja Modal BLU	138.320.138.467,00	69.763.647.712,00	68.556.490.755,00	98,27
Jumlah Belanja Modal Bruto		**14.947.856.394.031,00**	**17.552.050.135.774,00**	**(2.604.193.741.743,00)**	**(14,84)**
Pengembalian Belanja Modal		1.815.419.478,00	1.975.381.387,00	(159.961.909,00)	(8,10)
Jumlah Belanja Modal Netto		**14.946.040.974.553,00**	**17.550.074.754.387,00**	**(2.604.033.779.834,00)**	**(14,84)**

Rincian perbandingan realisasi belanja modal per 31 Desember 2022 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.4**

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp1,18 trilliun

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.509.307.157,00 dan Rp2.168.204.295.595,00. Realisasi Belanja Modal Tanah mengalami penurunan 45,74% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut :

Tabel B.25. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Tanah	793.251.542.866,00	604.435.666.969,00	188.815.875.897,00	31,24
2	Belanja Modal Pembebasan Tanah	62.180.926.570,00	22.391.153.911,00	39.789.772.659,00	177,70
3	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	1.070.485.510,00	(1.070.485.510,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	435.058.460,00	471.410.830,00	(36.352.370,00)	(7,71)
5	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	42.571.771.945,00	533.406.185.165,00	(490.834.413.220,00)	(92,02)
6	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	-
7	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN	278.236.526.046,00	1.006.982.716.110,00	(728.746.190.064,00)	(72,37)
Jumlah Belanja Kotor		**1.176.733.425.887,00**	**2.168.757.618.495,00**	**(992.024.192.608,00)**	**(45,74)**
Pengembalian Belanja Modal		224.118.730,00	553.322.900,00	(329.204.170,00)	(59,50)
Jumlah Belanja Bersih		**1.176.509.307.157,00**	**2.168.204.295.595,00**	**(991.694.988.438,00)**	**(45,74)**

Realisasi Belanja Modal Tanah paling signifikan adalah Belanja Modal Tanah (531111) sebesar Rp793.251.542.866,00 pada 22 satker, dimana nilai paling besar terdapat pada Kantor UPBU Rokot sebesar Rp220.455.138.900,00 yang merupakan Pembangunan Bandara Baru Mentawai.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1,77 trilliun

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.767.953.400.496,00 dan Rp2.957.041.437.737,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 40,21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel B.26. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.748.140.236.953,00	2.798.991.197.783,00	(1.050.850.960.830,00)	(37,54)
2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	8.000.000,00	14.500.000,00	(6.500.000,00)	(44,83)
3	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	314.400.000,00	(314.400.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	270.265.000,00	514.557.000,00	(244.292.000,00)	(47,48)
5	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	197.974.000,00	342.300.000,00	(144.326.000,00)	(42,16)
6	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0,00	6.405.294.000,00	(6.405.294.000,00)	(100,00)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun)	
7	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	12.210.000,00	301.609.246,00	(289.399.246,00)	(95,95)
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	597.238.000,00	112.957.802.045,00	(112.360.564.045,00)	(99,47)
9	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	19.936.503.726,00	37.410.914.515,00	(17.474.410.789,00)	(46,71)
Jumlah Belanja Kotor		**1.769.162.427.679,00**	**2.957.252.574.589,00**	**(1.188.090.146.910,00)**	**(40,18)**
Pengembalian Belanja Modal		1.209.027.183,00	211.136.852,00	997.890.331,00	472,63
Jumlah Belanja Bersih		**1.767.953.400.496,00**	**2.957.041.437.737,00**	**(1.189.088.037.241,00)**	**(40,21)**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang paling signifikan adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) yaitu sebesar Rp1.748.140.236.953,00 pada 500 satker, dimana satker yang memiliki nilai yang paling besar adalah Satker Direktorat Navigasi Penerbangan sebesar Rp233.490.680.131,00 antara lain berupa:

- Pengadaan peralatan penunjang Navigasi Penerbangan antara lain berupa *drone*, LIDAR, *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, Penunjang Inspektur Navigasi Penerbangan
- Pengadaan dan Pemasangan Sistem *Monitoring* Fasilitas *Surveillance* dan Navigasi Penerbangan Terintegrasi
- Pengadaan *Air Traffic Situational Awareness*.

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2,75 trilliun

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.755.865.764.420,00 dan Rp3.027.056.876.637,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 8,96% dibandingkan Tahun Anggaran. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel B.27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.551.390.953.546,00	2.579.585.106.934,00	(28.194.153.388,00)	(1,09)
2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bagunan	9.491.620.768,00	5.577.433.350,00	3.914.187.418,00	70,18
4	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	149.985.650,00	9.553.638.735,00	(9.403.653.085,00)	(98,43)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	39.709.586.992,00	254.755.283.950,00	(215.045.696.958,00)	(84,41)
6	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	155.179.154.881,00	178.024.896.496,00	(22.845.741.615,00)	(12,83)
Jumlah Belanja Kotor		**2.755.921.301.837,00**	**3.027.528.359.465,00**	**(271.607.057.628,00)**	**(8,97)**
Pengembalian Belanja Modal		55.537.417,00	471.482.828,00	(415.945.411,00)	(88,22)
Jumlah Belanja		**2.755.865.764.420,00**	**3.027.056.876.637,00**	**(271.191.112.217,00)**	**(8,96)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang paling signifikan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) yaitu sebesar Rp2.551.390.953.546,00 pada 136 satker, dimana nilai paling besar terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat, Kota Sorong sebesar Rp201.400.580.679,00 yang merupakan pembangunan beberapa pelabuhan

penyeberangan di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Salawati, Batanta, Dermaga Pelabuhan Sungai Akat, Pelabuhan Ewer, Pelabuhan Sawaerma, dan lain-lain.

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp8,60 triliun

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan ,Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing Rp8.603.900.601.130,00 dan Rp8.787.113.930.369,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 2,09% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel B.28. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.803.186.495.299,00	6.882.614.800.524,00	(79.428.305.225,00)	(1,15)
2	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	0,00	1.004.850.000,00	(1.004.850.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	12.980.000,00	28.400.000,00	(15.420.000,00)	(54,30)
4	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	7.479.518.146,00	5.272.701.310,00	2.206.816.836,00	41,85
5	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	181.491.250,00	0,00	181.491.250,00	-
6	Belanja Modal Irigasi	39.656.732.300,00	44.185.638.837,00	(4.528.906.537,00)	(10,25)
7	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	9.584.392,00	0,00	9.584.392,00	-
8	Belanja Modal Jaringan	1.753.700.535.891,00	1.853.333.343.505,00	(99.632.807.614,00)	(5,38)
9	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0,00	1.116.431.000,00	(1.116.431.000,00)	(100,00)
10	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	297.204.000,00	(297.204.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		**8.604.227.337.278,00**	**8.787.853.369.176,00**	**(183.626.031.898,00)**	**(2,09)**
Pengembalian Belanja Modal		326.736.148,00	739.438.807,00	(412.702.659,00)	(55,81)
Jumlah Belanja		**8.603.900.601.130,00**	**8.787.113.930.369,00**	**(183.213.329.239,00)**	**(2,09)**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111) yaitu sebesar Rp6.803.186.495.299,00 pada 83 satker, dimana nilai paling besar terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat sebesar Rp1.021.348.511.907,00 yang antara lain berupa:

- Belanja modal persinyalan perkeretaapian sebesar Rp132.957.231.708,00
- Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage – Haurpugur sebesar Rp178.109.462.698,00
- Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Haurpugur – Cicalengka sebesar Rp314.611.659.888,00
- Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor – Sukabumi sebesar Rp239.670.162.616,00
- Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor – Yogyakarta sebesar Rp155.999.994.997,00

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp503,49 milliar

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp503.491.762.883,00 dan Rp540.894.566.337,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,91% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2021. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel B.29. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Lainnya	502.294.911.883,00	465.708.092.999,00	36.586.818.884,00	7,86
2	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	74.732.072.172,00	(74.732.072.172,00)	(100,00)
3	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.196.851.000,00	454.401.166,00	742.449.834,00	163,39
Jumlah Belanja Kotor		**503.491.762.883,00**	**540.894.566.337,00**	**(37.402.803.454,00)**	**(6,91)**
Pengembalian Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja		**503.491.762.883,00**	**540.894.566.337,00**	**(37.402.803.454,00)**	**(6,91)**

Belanja Modal Lainnya yang signifikan adalah Belanja Modal Lainnya (536111) sebesar Rp502.294.911.883,00 pada 75 satker, dimana nilai yang paling besar terdapat pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat dengan nilai sebesar Rp95.003.529.508,00 yang antara lain berupa:

- Studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan DLKR DLKP Rp28.939.123.718,00
- Pekerjaan DED Rehabilitasi/pengembangan Pelabuhan Rp27.287.015.775,00
- Studi SID Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Rp16.450.805.880,00
- Studi Penyusunan dokumen lingkungan UKL UPL Pelabuhan Laut Rp15.020.544.235,00
- Biaya Lainnya Rp7.306.039.900,00

Belanja Modal BLU Rp138,32 miliar

B.2.3.6 Belanja Modal Badan Layanan Umum

Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp138.320.138.467,00 dan Rp69.763.647.712,00. Belanja Modal BLU Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,27% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2021. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut.

Tabel B.30. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Belanja Modal Tanah - BLU	212.400.000,00	3.640.612.385,00	(3.428.212.385,00)	(94,17)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	110.989.536.114,00	46.107.085.526,00	64.882.450.588,00	140,72
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	21.549.456.027,00	14.890.565.006,00	6.658.891.021,00	44,72
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	861.654.000,00	1.437.784.541,00	(576.130.541,00)	(40,07)
5	Belanja Modal Lainnya BLU	4.707.092.326,00	2.370.840.804,00	2.336.251.522,00	98,54
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID 19	0,00	1.316.759.450,00	(1.316.759.450,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		**138.320.138.467,00**	**69.763.647.712,00**	**68.556.490.755,00**	**98,27**
Pengembalian Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja		**138.320.138.467,00**	**69.763.647.712,00**	**68.556.490.755,00**	**98,27**

Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) yang paling signifikan adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU yaitu sebesar Rp110.989.536.114,00, dimana nilai yang paling besar terdapat pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebesar Rp51.542.639.422,00 yang merupakan Pengadaan Pesawat Udara *Surveillance* Tipe *Medium Jet*.

B.2.3.7 Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19

Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19 Rp40,31 miliar

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp42.898.297.000,00 dimana untuk pagu Belanja Modal Peralatan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp623.400.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp42.274.897.000,00. Sedangkan total realisasi bersih Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp40.306.824.992,00 dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp597.238.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp39.709.586.992,00. Adapun rincian Belanja Modal Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut.

Tabel B.31. Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19

(*dalam Rupiah)*

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	623.400.000,00	597.238.000,00	95,80
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	42.274.897.000,00	39.709.586.992,00	93,93
Jumlah Kotor		**42.898.297.000,00**	**40.306.824.992,00**	**93,96**
Pengembalian		0	0	-
Jumlah Bersih		**42.898.297.000,00**	**40.306.824.992,00**	**93,96**

Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp597.238.000,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 seperti pengadaan alat kesehatan (yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin), pengadaan *thermogun*/*thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, serta pengadaan bilik desinfektan permanen/portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp39.709.586.992,00 diantaranya pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muntok sebesar Rp 24.637.597.072,00 yang merupakan belanja pembangunan fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Ular yang bersumber dari SBSN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinjai merupakan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kambuno.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp8,67 Triliun

C. 1. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp8.675.178.014.086,00 dan Rp11.414.120.487.497,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Perincian Aset Lancar pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel C.1. Perincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	665.013.496,00	1.531.781.543,00	(866.768.047,00)	(56,59)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	297.629.855,00	90.453.800,00	207.176.055,00	229,04
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	162.963.569.007,00	93.947.869.730,00	69.015.699.277,00	73,46
4	Kas pada Badan Layanan Umum	1.062.525.699.253,00	946.063.926.981,00	116.461.772.272,00	12,31
5	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	95.390.180.846,00	98.000.000.000,00	(2.609.819.154,00)	(2,66)
6	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	78.358.116.107,00	12.964.799.240,00	65.393.316.867,00	504,39
7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	357.732.653.069,00	139.646.321.569,00	218.086.331.500,00	156,17
8	Piutang Bukan Pajak	631.777.656.653,00	604.821.281.778,00	26.956.374.875,00	4,46
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	(127.961.440.492,00)	(241.082.732.301,00)	113.121.291.809,00	(46,92)
10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(120.000,00)	(120.000,00)	-	0,00
12	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	43.561.177.292,00	37.700.066.100,00	5.861.111.192,00	15,55
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(7.960.056.869,00)	(8.973.302.468,00)	1.013.245.599,00	(11,29)
14	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	18.583.808.600,00	22.884.546.135,00	(4.300.737.535,00)	(18,79)
15	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(11.520.400.387,00)	(11.751.822.502,00)	231.422.115,00	(1,97)
16	Persediaan	6.370.740.527.656,00	9.718.253.417.892,00	(3.347.512.890.236,00)	(34,45)
TOTAL		**8.675.178.014.086,00**	**11.414.120.487.497,00**	**(2.738.942.473.411,00)**	**(24,00)**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp665,01 Juta

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp665.013.496,00 dan Rp1.531.781.543,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP dan sisa TUP. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel C.2. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	644.707.996,00	1.065.014.726,00	(420.306.730,00)
2	Ditjen Hubdat	0,00	454.548.990,00	(454.548.990,00)
3	Ditjen Hubla	20.305.500,00	12.112.827,00	8.192.673,00
4	Ditjen Hubud	0,00	105.000,00	(105.000,00)
Total		**665.013.496,00**	**1.531.781.543,00**	**(866.768.047,00)**

Atas saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 masih terdapat sisa saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang belum disetor pada 8 (delapan) satker di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp644.707.996,00 dan 5 (lima) Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp20.305.500,00. Adapun penyebab masih terdapat sisa saldo Kas Bendahara Pengeluaran diantaranya adalah karena berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker adalah sebagai berikut ini.

Tabel C.3. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran 2022 (*Audited*) per Satker

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nama Satker	Tanggal Setor	Nomor NTPN	Saldo
1	Setjen	Atase Tokyo	06/01/2023	700BD45IQMCTB64Q	192.233.300,00
2	Setjen	Atase Kuala Lumpur	17/01/2023	CFC547N8Q0MQ4PF6	193.381.340,00
			17/01/2023	057FC2CNR18FINN4	
3	Setjen	Atase Singapura	26/01/2023	C88F145IQMDH2CPC	18.152.986,00
			21/02/2023	E6B038JM9RC947R5	
4	Setjen	Atase Montreal	11/01/2023	103A98JM9R8UE567	59.058.130,00
5	Setjen	Atase Washington	16/02/2023	B624F7N8Q0PMD842	78.093.624,00
6	Setjen	Atase London	13/01/2023	BDD931GAB6LOFH2F	81.809.976,00
			13/01/2023	103A98JM9R8UE567	
7	Setjen	Atase Jeddah	26/01/2023	F35B445IQMDH6A5S	13.362.501,00
			26/01/2023	2F81A0JSRC3V65OM	
8	Setjen	Atase Denhaag	26/01/2023	105438JM9R9FA3C3	8.616.139,00
9	Ditjen Hubla	Disnav Sorong	05/01/2023	99D536QRA642606T	9.996.500,00
10	Ditjen Hubla	KSOP Malahayati	03/01/2023	F688E395AROEFKS3	2.614.000,00
11	Ditjen Hubla	KSOP Bengkalis	04/01/2023	CD9208JM9R8POOE7	4.000.000,00
12	Ditjen Hubla	KSOP Tembilahan	05/01/2023	4BB35520AGV915LP	3.145.000,00
13	Ditjen Hubla	UPP Geser	06/01/2023	CE1147N8Q0MF1LCS	550.000,00
Total					**665.013.496,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp297,63 Juta

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp297.629.855,00 dan Rp90.453.800,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Perincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.4. Perincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Darat	215.537.200,00	0,00	215.537.200,00
2	Ditjen Perhubungan Laut	82.092.655,00	90.453.800,00	(8.361.145,00)
	Total	**297.629.855,00**	**90.453.800,00**	**207.176.055,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 terdapat pada Eselon I Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp215.537.200,00 yaitu pada Direktorat Angkutan Jalan yang merupakan layanan angkutan jalan berbasis perkotaan dengan skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*), dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara Adapun pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp82.092.655,00 yang merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank atas PNBP yang diterima oleh satker UPP Babang, UPP Soa Sio, UPP Geser, dan UPP Laiwui yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara setelah tanggal neraca. Berikut adalah Perincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 per satker.

Tabel C.5. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Satker

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nama Satker	Tanggal Setor	Nomor NTPN	Saldo
1	Ditjen Perhubungan Darat	Direktorat Angkutan Jalan	02/01/2023	AFF8A55DEVLSGQ9L	103.293.300
			02/01/2023	8A4483CIFAH3N3J3	15.407.500
			03/01/2023	12B920N9VQPUG3OK	18.087.300
			03/01/2023	1562255DEVLSH475	2.143.600
			03/01/2023	6D1732G4VFUO8LFI	76.605.500
2	Ditjen Perhubungan Laut	UPP Babang	13/01/2023	F8DB348VV53MLDRO	9.734.000,00
3	Ditjen Perhubungan Laut	UPP Soa Siu	03/01/2023	56BDE2G4VFUO9KRK	41.972.000,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	UPP Geser	05/01/2023	FF7CF55DEVLTHKNL; 8BF2455DEVLTHKU3; D7EB92G4VFUOAL56	23.724.075,00
5	Ditjen Perhubungan Laut	UPP Laiwui	05/01/2023	ACA7B6U8EKQKA2AN	6.662.580,00
Total					**297.629.855,00**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp162,96 Miliar

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp162.963.569.007,00 dan Rp93.947.869.730,00. Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.6. Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Setara Kas Lainnya	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	43.135.100,00	180.338.526,00	(137.203.426,00)
3	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5.013.034.109,00	20.701.471.289,00	(15.688.437.180,00)
4	Kas Lainnya di BLU	142.907.399.798,00	73.066.059.915,00	69.841.339.883,00
	Total	**162.963.569.007,00**	**93.947.869.730,00**	**69.015.699.277,00**

Adapun penjelasan Perincian kas dimaksud sebagai berikut.

1. Setara Kas Lainnya sebesar Rp15.000.000.000,00 terdapat pada PIP Makassar yang merupakan Deposito yang berasal dari rekening dana kelolaan BLU;
2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp43.135.100,00 merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai.
3. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah terdapat pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kenavigasian berupa nilai saldo pada rekening Hibah sebesar Rp5.013.034.109,00 (saldo USD 318.672,31 dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2022 Rp15.731,00). Hibah tersebut berasal dari *Aids to Navigation Fund* (ANF) merupakan salah satu Komponen Cooperative Mechanism yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari User States dan Stakeholders dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di selat Malaka & Singapura.
4. Kas Lainnya di BLU sebesar Rp142.907.399.798,00 merupakan saldo yang terdapat pada rekening Dana Kelolaan Satker BLU yang belum menjadi hak Satker BLU karena kegiatan belum dilaksanakan yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Perincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker dapat dilihat di **Lampiran C.1.**

Kas pada BLU Rp1,03 Trilliun

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.062.525.699.253,00 dan Rp946.063.926.981,00. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan pada 35 (tiga puluh lima) Satker BLU Kementerian Perhubungan. Saldo Kas pada BLU juga termasuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan yang berasal dari rekening dana operasional penerimaan BLU. Posisi Saldo Kas pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.7. Saldo Kas BLU per Satker BLU
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Nama satker	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	STIP Jakarta	166.625.267.723,00	137.612.469.870,00	29.012.797.853,00
2	BP3IP Jakarta	71.611.116.874,00	75.079.003.748,00	(3.467.886.874,00)
3	PIP Semarang	44.658.620.598,00	63.816.926.302,00	(19.158.305.704,00)
4	PIP Makassar	38.808.499.194,00	421.824.710,00	38.386.674.484,00
5	PKTJ Tegal	27.343.867.103,00	42.880.534.309,00	(15.536.667.206,00)
6	Poltekbang Surabaya	26.834.025.103,00	30.412.808.175,00	(3.578.783.072,00)
7	Poltekpel Surabaya	80.569.750.021,00	73.676.539.172,00	6.893.210.849,00
8	Poltekbang Makassar	33.031.866.222,00	33.508.706.476,00	(476.840.254,00)
9	PPI Curug	8.542.781.212,00	8.128.946.333,00	413.834.879,00
10	Poltekpel Barombong	21.814.551.008,00	23.567.130.254,00	(1.752.579.246,00)
11	Poltekpel Banten	27.811.573.876,00	15.796.641.937,00	12.014.931.939,00
12	PPI Madiun	1.765.209.731,00	15.578.349.045,00	(13.813.139.314,00)
13	PTDI – STTD	36.534.560.218,00	34.765.464.121,00	1.769.096.097,00
14	Poltekbang Medan	19.151.835.103,00	23.770.100.912,00	(4.618.265.809,00)
15	Poltekbang Jayapura	5.850.978.620,00	5.074.428.770,00	776.549.850,00
16	Poltrada Bali	16.019.261.183,00	10.272.561.395,00	5.746.699.788,00
17	Poltekpel Sorong	16.722.375.283,00	12.582.600.376,00	4.139.774.907,00
18	Poltektrans SDP Palembang	8.642.768.587,00	4.719.268.837,00	3.923.499.750,00
19	BPPTL Jakarta	12.610.605.547,00	9.586.356.870,00	3.024.248.677,00
20	Poltekpel Malahayati	42.399.880.125,00	27.496.529.526,00	14.903.350.599,00
21	BP3 Curug	5.846.888.427,00	5.081.799.012,00	765.089.415,00
22	API Banyuwangi	6.744.508.738,00	8.370.071.345,00	(1.625.562.607,00)
23	Poltekbang Palembang	10.781.214.516,00	9.831.582.738,00	949.631.778,00
24	UPBU Juwata	11.659.408.594,00	24.142.515.959,00	(12.483.107.365,00)
25	UPBU Jalaluddin	7.439.874.667,00	7.618.134.329,00	(178.259.662,00)
26	UPBU Mutiara Sis-Al Jufri	18.400.217.417,00	17.592.237.441,00	807.979.976,00
27	UPBU Kalimarau	926.147.670,00	1.420.492.381,00	(494.344.711,00)
28	Balai Kesehatan Penerbangan	66.708.091.968,00	68.833.357.220,00	(2.125.265.252,00)
29	Balai Besar Kalibrasi FP	193.695.216.895,00	146.760.107.000,00	46.935.109.895,00
30	BP KAR Sumatera Selatan	6.152.994.504,00	3.993.871.572,00	2.159.122.932,00
31	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	2.658.642.690,00	3.672.566.846,00	(1.013.924.156,00)
32	Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	4.768.990.725,00	0,00	4.768.990.725,00
33	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	4.787.658.774,00	0,00	4.787.658.774,00
34	Balai Pengujian Perkeretaapian	10.050.227.100,00	0,00	10.050.227.100,00
35	BPLJSKB	4.556.223.237,00	0,00	4.556.223.237,00
TOTAL		**1.062.525.699.253,00**	**946.063.926.981,00**	**116.461.772.272,00**

Adapun Perincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per Akun dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

Investasi Jangka Pendek BLU Rp95,39 Miliar

C.1.5. Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing sebesar Rp95.390.180.846,00 dan Rp98.000.000.000,00. Investasi Jangka Pendek Satker BLU ini berjangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan dengan sifat deposito diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits).*

Perincian Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdapat pada Eselon I Ditjen Perhubungan Laut dan BPSDM Perhubungan, posisi saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.8. Perincian Investasi Jangka Pendek BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2022

(*dalam Rupiah*)

No	Satker	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	3.672.566.846,00	0,00	3.672.566.846,00
2	BPSDM Perhubungan	91.717.614.000,00	98.000.000.000,00	(6.282.386.000,00)
Jumlah Deposito/Investasi Jangka Pendek		**95.390.180.846,00**	**98.000.000.000,00**	**(2.609.819.154,00)**

Adapun Perincian Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum dapat dilihat di **Lampiran C.3.**

Belanja Dibayar Dimuka Rp78,36 Miliar

C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited)* adalah sebesar Rp78.358.116.107,00 dan Rp12.964.799.240.00 merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan atau perjanjian. Perincian Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)* adalah sebagai berikut.

Tabel C.9. Perincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Darat	60.745.208.813,00	0,00	60.745.208.813,00
2	Ditjen Perhubungan Laut	2.416.305.243,00	0,00	2.416.305.243,00
3	Ditjen Perhubungan Udara	5.680.757.590,00	12.956.736.240,00	(7.275.978.650,00)
4	Ditjen Perkeretaapian	5.435.166,00	0,00	5.435.166,00
5	BPSDM Perhubungan	8.119.431.704,00	8.063.000,00	8.111.368.704,00
6	BPTJ	1.390.977.591,00	0,00	1.390.977.591,00
Total		**78.358.116.107,00**	**12.964.799.240,00**	**65.393.316.867,00**

Nilai Belanja Dibayar Dimuka signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp60.745.208.813,00 yaitu terdiri dari Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp21.117.939.549,00 dan Belanja Modal Dibayar Dimuka (Prepaid) sebesar Rp39.627.269.264. Belanja Dibayar Dimuka ini muncul karena progres penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2022 belum selesai 100% namun pembayarannya sudah dilakukan secara penuh atau 100% menggunakan Jaminan /Bank Garansi.

Jenis pekerjaan yang menggunakan jaminan/bank garansi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1) Termin 3 Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang RORO 500GT Lintas Bombanna-Tanjung Phising (KMP Oputa Yi Koo) sebesar Rp9.166.476.000,00
2) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap III sebesar Rp.9.012.406.976,00;
3) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kabupaten Raja Ampat Tahap II sebesar Rp5.687.090.780,00.

Adapun Perincian Belanja Dibayar Dimuka Ditjen Perhubungan Darat dapat dilihat di **Lampiran C.4**.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp357,73 Milliar

C.1.7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp357.732.653.069,00 dan Rp139.646.321.569,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih (belum jatuh tempo).

Tabel C.10. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I

(*dalam Rupiah)*

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	0,00	140.495.400,00	(140.495.400,00)
2	Ditjen Perhubungan Laut	88.227.104.053,00	138.685.185.515,00	(50.458.081.462,00)
3	Ditjen Perhubungan Udara	150.608.598.587,00	249.308.040,00	150.359.290.547,00
4	Ditjen Perkeretaapian	118.859.399.687,00	430.514.000,00	118.428.885.687,00
5	BPSDM Perhubungan	37.550.742,00	140.818.614,00	(103.267.872,00)
Total		**357.732.653.069,00**	**139.646.321.569,00**	**218.086.331.500,00**

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima signifikan diantaranya adalah terdapat pada Ditjen Perkeretaapian yaitu sebesar Rp118.859.399.687,00 yang berasal dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebesar Rp807.241.000,00 yang berupa Pendapatan tiket LRT Sumsel tanggal 23 s.d. 31 Desember 2022 yang baru disetorkan pada tanggal 12 Januari 2023, dan dari Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api sebesar Rp117.680.209.126,00 berupa Pendapatan yang Masih Harus Diterima dari TAC TW III dan TW IV tahun 2022 PT. KCI, dan PT. Railink.

Adapun Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perhubungan Laut adalah sebesar Rp88.227.104.053,00 merupakan pendapatan atas jasa pemanduan penundaan kapal dan jasa konsesi. Pendapatan jasa konsesi tersebut diakui berdasarkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga *existing* maupun *non-existing* untuk periode Triwulan IV Tahun 2022.

Sedangkan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp150.608.598.587,00, dimana diantaranya nilai yang siginifikan terdapat pada Direktorat Bandar Udara sebesar Rp112.319.478.191,00 yang merupakan koreksi atas kurang pencatatan atas denda pokok konsesi Angkasa Pura I tahun 2017 sebesar Rp52.096.095.011,00 dan denda pokok konsesi Angksa Pura II tahun 2017 sebesar Rp60.223.383.180,00. Lalu yang lain terdapat pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp5.581.152.071,00 merupakan relaksasi penyesuaian KSP BMN UPBU Tjilik Riwut yang akan jatuh tempo tahun 2023 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-135/MK.6/2022 tanggal 17 Maret 2022. Lalu terpada Kantor UPBU Kalimarau sebesar Rp219.796.641,00 merupakan pelayanan yang telah diberikan per 31 Desember 2022 namun belum diterbitkan nota tagihan, serta pada Balai Kesehatan Penerbangan sebesar Rp74.794.521,00 merupakan bunga deposito yang masih harus diterima terhitung tanggal 4 s.d. 31 Desember 2022.

Piutang Bukan Pajak Rp631,77 Milliar

C.1.8. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp631.777.656.653,00 dan Rp604.821.281.778,00 yang merupakan semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Perincian Piutang Bukan Pajak disajikan berikut.

Tabel C.11. Piutang Bukan Pajak Menurut Jenisnya

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Piutang PNBP	603.141.738.404,00	562.399.295.301,00	40.742.443.103,00
2	Piutang Lainnya	28.635.918.249,00	42.421.986.477,00	(13.786.068.228,00)
	Jumlah	**631.777.656.653,00**	**604.821.281.778,00**	**26.956.374.875,00**

Adapun Perincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.12. Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	8.688.587,00	7.026.258,00	1.662.329,00
2	Ditjen Perhubungan Darat	6.523.825.000,00	9.009.297.384,00	(2.485.472.384,00)
3	Ditjen Perhubungan Laut	29.420.246.893,00	41.148.744.975,00	(11.728.498.082,00)
4	Ditjen Perhubungan Udara	163.388.367.531,00	539.820.168.967,00	(376.431.801.436,00)
5	Ditjen Perkeretaapian	427.194.137.755,00	0,00	427.194.137.755,00
6	BPSDMP	5.242.390.887,00	14.836.044.194,00	(9.593.653.307,00)
Total		**631.777.656.653,00**	**604.821.281.778,00**	**26.956.374.875,00**

Nilai Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp427.194.137.755,00 terdapat pada Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api berupa Piutang Bukan Pajak atas penggunaan prasarana perkeretaapian pada PT. KAI sebesar Rp423.193.536.000,00 dan PT. Railink sebesar Rp4.000.601.755,00.

Adapun Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp163.388.367.531,00 terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya. Nilai Piutang PNBP sendiri sebesar Rp140.678.725.620,00 merupakan piutang atas pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah diberikan berdasarkan PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP Kementerian Perhubungan (PNBP fungsional). Nilai Piutang PNBP Ditjen Perhubungan Udara yang paling signifikan terdapat pada Direktorat Navigasi Penerbangan sebesar Rp140.678.725.620,00 yang merupakan Merupakan piutang dari LPPNPI dan *Civil Aviation Authority of Singapore* (CAAS) atas penggunaan ruang udara Indonesia oleh penerbangan sipil Singapura. Sedangkan serta Piutang Lainnya sebesar Rp22.709.641.911,00 atas pengembalian kelebihan belanja modal dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah atas pemeriksaan BPK RI.

Nilai Piutang Lainnya paling signifikan terdapat pada Kantor UPBU H. Aroepala sebesar Rp9.018.678.144,00 yang merupakan Piutang atas pengembalian belanja modal pekerjaan kontraktual Pemenuhan Standar Runway Strip yang dilaksanakan oleh PT. Nur Pasimbungan Jaya sebesar Rp7.403.234.300 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 29c/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Perintis oleh PT. SMAC sebesar Rp1.615.443.844,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp237,16 Miliar

C.1.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp127.961.440.492,00 dan Rp241.082.732.301,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretaris Jenderal	868.859,00	702.626,00	166.233,00
2	Ditjen Perhubungan Darat	6.442.573.300,00	487.928.987,00	5.954.644.313,00
3	Ditjen Perhubungan Laut	25.456.160.634,00	20.496.266.240,00	4.959.894.394,00
4	Ditjen Perhubungan Udara	92.337.295.380,00	218.959.887.126,00	(126.622.591.746,00)
5	Ditjen Perkeretaapian	2.516.027.856,00	-	2.516.027.856,00
6	BPSDMP	1.208.514.463,00	1.137.947.322,00	70.567.141,00
	Total	**127.961.440.492,00**	**241.082.732.301,00**	**(113.121.291.809,00)**

Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak berdasarkan pengelompokan kualitas piutang adalah sebagai berikut.

Tabel C.14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Eselon I per Kualitas Piutang

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Kualitas Piutang					Jumlah Piutang
		0-30 hari (lancar)	31-60 hari (kurang lancar)	31-90 hari (ragu-ragu)	>91 hari (macet)	Kesalahan Penyisihan/Tidak Disisihkan	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	Setjen	0,00	8.688.587,00	0,00	0,00	0,00	8.688.587,00
2	Ditjen Hubdat	81.660.000,00	0,00	0,00	6.442.165.000,00	0,00	6.523.825.000,00
3	Ditjen Hubla	3.591.434.250,00	431.787.979,00	4.000.000,00	25.393.024.664,00	0,00	29.420.246.893,00
4	Ditjen Hubud	65.951.717.722,00	5.391.135.346,00	1.058.365.261,00	90.939.240.623,00	47.908.579,00	163.388.367.531,00
5	DJKA	423.193.536.000,00	4.000.601.755,00	0,00	0,00	0,00	427.194.137.755,00
6	BPSDMP	4.054.147.115,00	0,00	0,00	1.188.243.772,00	0,00	5.242.390.887,00
	Total Piutang	**496.872.495.087,00**	**9.832.213.667,00**	**1.062.365.261,00**	**123.962.674.059,00**	**47.908.579,00**	**631.777.656.653,00**
% Penyisihan		**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**		**Jumlah Penyisihan Piutang**
1	Setjen	0,00	868.858,70	0,00	0,00		868.858,70
2	Ditjen Hubdat	408.300,00	0,00	0,00	6.442.165.000,00		6.442.573.300,00
3	Ditjen Hubla	17.957.171,25	43.178.797,90	2.000.000,00	25.393.024.664,00		25.456.160.633,15
4	Ditjen Hubud	329.758.588,61	539.113.534,60	529.182.630,50	90.939.240.623,00		92.337.295.376,71
5	DJKA	2.115.967.680,00	400.060.175,50	0,00	0,00		2.516.027.855,50
6	BPSDMP	20.270.735,58	0,00	0,00	1.188.243.772,00		1.208.514.507,58
	Total Penyisihan	**2.484.362.475,44**	**983.221.366,70**	**531.182.630,50**	**123.962.674.059,00**		**127.961.440.531,64**

Perbedaan nilai total penyisihan sebesar Rp39,64 antara nilai total penyisihan piutang di Monsakti sebesar Rp127.961.440.492,00 (Tabel C.13) dan perhitungan penyisihan piutang secara manual sebesar Rp127.961.440.531,64 (Tabel C.14) disebabkan karena kesalahan perhitungan penyisihan pada saat jurnal di periode 14 di BPSDM Perhubungan.

Untuk Nilai Piutang Macet pada Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar Rp90.939.240.623,00 dimana yang paling signifikan terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp54.348.062.633,00 dengan komposisi terbesar berasal dari hasil serah terima empat satker yang akan dilikuidasi karena pengalihan ke PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II melalui mekanisme kerja sama pemaanfaatan. Nilai terbesar penyisihan piutang macet Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara berasal dari debitur berikut:

- PT. Nayag Citra Baliem sebesar Rp46.934.554.802,00 merupakan piutang atas kerja sama dengan Kantor UPBU Sentani berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: KU.005/01.02.I/BU.STN-2008 adendum Nomor KU.003/20.10.X/UPBU.STN-2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang sewa menyewa tanah UPBU Sentani untuk pembangunan gedung kargo angkutan udara. PT. Nayag Citra Baliem telah mengajukan permohonan penghapusan denda piutang dan atas usulan tersebut Ditjen Perhubungan udara telah membuat kajian dengan kesimpulan permohonan dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penghapusan Piutang PNBP merupakan kewenangan presiden, mengingat denda piutang yang akan dihapuskan lebih dari Rp10.000.000.000 yang bisa diproses melalui pengusulan kepada Kementerian Keuangan;
- Maskapai dan debitur dari piutang hasil serah terima empat bandara (Kantor UPBU Tjilik Riwut, UPBU Hanandjoeddin, UPBU Radin Inten II, UPBU Sentani dan UPBU Fatmawati Soekarno) yang dilikuidasi karena pengalihan ke PT. Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II melalui mekanisme kerja sama pemaanfaatan.

Adapun Piutang Macet pada Ditjen Perhubungan Laut adalah sebesar Rp25.393.024.664,00, di mana nilai signifikan terdapat pada UPP Tarempa sebesar Rp15.507.665.493,00 untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Pertalahan Arnebatara Natuna yang pada tanggal 15 November 2022 UPP Tarempa menyampaikan telah berkoordinasi terkait tindak lanjut piutang PNBP PT.PAN kepada Kepala Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (surat nomor UM.002/8/4/UPP.TPA/2022).

Sedangkan Piutang Macet pada BPSDM Perhubungan adalah sebesar Rp1.188.243.772,00, dimana nilai signifikan terdapat pada PIP Makassar yang merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian kapal latih atas temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal. Piutang ini akan dilunasi oleh debitur dengan mekanisme dicicil selama 24 bulan sesuai dengan surat dari Direktur Utama PT.Stedfast Marine Tbk nomor: 219/STF-FN/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp24 juta

C.1.10. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp24.000.000,00. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah porsi lancar dari Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 (*Audited*) terdapat pada BPSDM Perhubungan yaitu pada Kantor Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat yang merupakan tuntutan ganti rugi kendaraan dinas terhadap pegawai pada kantor tersebut. Total TP/TGR atas pegawai pada Kantor Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.000.000.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp120.000,00

C.1.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp120.000,00 dan Rp120.000,00. Penyisihan Piutang ini merupakan penyisihan atas Piutang Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp24.000.000,00 yang masuk kategori/klasifikasi piutang lancar.

Piutang Kegiatan Operasional BLU Rp43,56 Miliar

C.1.12. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp43.561.177.292,00 dan Rp37.700.066.100,00 yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan BPSDM Perhubungan. Perincian Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.15. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	1.650.000,00	63.035.000,00	(61.385.000,00)
2	Ditjen Perhubungan Udara	20.177.913.903,00	11.906.284.919,00	8.271.628.984,00
3	BPSDMP	23.381.613.389,00	25.730.746.181,00	(2.349.132.792,00)
	Total	**43.561.177.292,00**	**37.700.066.100,00**	**5.861.111.192,00**

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.650.000,00 adalah Piutang BLU Layanan Kesehatan pada Satker BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP).

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada BPSDM Perhubungan sebesar Rp23.381.613.389,00, dimana nilai yang paling signifikan terdapat Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebesar Rp9.338.945.471,00 merupakan piutang atas jasa layanan pendidikan kepada taruna/peserta diklat sebesar Rp4.200.736.000,00 dan piutang atas penyedia barang dan jasa lainnya sebesar Rp5.138.209.471,00.

Sedangkan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp20.177.913.903,00,00, dimana nilai signifikan terdapat pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yaitu Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional sebesar Rp15.133.731.882,00 yang merupakan piutang atas pelayanan kalibrasi yang dilakukan oleh pesawat dan personil Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp7,96 Miliar

C.1.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan per 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp7.960.056.869,00 dan Rp8.973.302.468,00 yang terdapat pada satker BLU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan BPSDM Perhubungan. Adapun pePerincian Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	8.250,00	744.575,00	(736.325,00)
2	Ditjen Perhubungan Udara	2.117.833.289,00	2.550.609.080,00	(432.775.791,00)
3	BPSDMP	5.842.215.330,00	6.421.948.813,00	(579.733.483,00)
	Total	**7.960.056.869,00**	**8.973.302.468,00**	**(1.013.245.599,00)**

Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional BLU berdasarkan pengelompokan kualitas piutang adalah sebagai berikut.

Tabel C.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I per Kualitas Piutang

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Umur Piutang (Kualitas)				Jumlah Piutang
		0-30 hari (lancar)	31-60 hari (kurang lancar)	31-90 hari (ragu-ragu)	>91 hari (macet)	
1	Ditjen Hubla	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2	Ditjen Hubud	17.487.004.480,00	713.047.147,00	37.537.446,00	1.940.324.830,00	20.177.913.903,00
3	BPSDMP	12.458.021.845,18	3.966.077.527,00	3.148.393.100,00	3.809.120.917,00	23.381.613.389,18
Total Piutang		**29.946.676.325,18**	**4.679.124.674,00**	**3.185.930.546,00**	**5.749.445.747,00**	**43.561.177.292,18**
% Penyisihan		**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
Total Penyisihan		**149.733.381,63**	**467.912.467,40**	**1.592.965.273,00**	**5.749.445.747,00**	**7.960.056.869,03**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU yang paling signifikan terdapat pada BPSDM Perhubungan, dengan nilai Piutang Macet sebesar Rp3.809.120.917,00 atas layanan pendidikan program diklat kerja sama, diklat pembentukan, dan diklat keterampilan penerbang, serta uang makan taruna yang sudah *drop out*.

Adapun nilai Piutang Macet pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp1.940.324.830,00 pada UPBU Kalimarau Berau dan UPBU Juwata Tarakan. Piutang macet pada UPBU Kalimarau Berau diantaranya merupakan piutang jasa kebandarudaraan dan sewa aset pada PT. Kalstar Aviation, PT. Lion Air, PT. Wings Air, PT. Kalimarau Jaya, Koperasi Avia Jasa Mandiri, dan Café Banuanta. Sedangkan UPBU Juwata Tarakan antara lain berupa sewa aset dan jasa kebandarudaraan pada PT. Travel Express, PT. Kalstar, Merpati Airlines, dan PT. ASI Pudjiastuti Aviation.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp18,58 Miliar

C.1.14. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah Piutang-piutang yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan aktivitas bisnis utama BLU. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan per 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp18.583.808.600,00 dan Rp22.884.546.135,00. Perincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.18. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	16.226.540.512,00	20.076.045.284,00	(3.849.504.772,00)
3	Ditjen Perkeretaapian	300.000,00	0,00	300.000,00
4	BPSDMP	2.351.968.088,00	2.808.500.851,00	(456.532.763,00)
	Total	**18.583.808.600,00**	**22.884.546.135,00**	**(4.300.737.535,00)**

Nilai Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp5.000.000,00 merupakan piutang atas sewa tanah pada Satker BLU Balai BKKP.

Adapaun nilai Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp16.226.540.512,00 yang paling signifikan terdapat pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebesar Rp6.249.052.932,00 yang merupakan atas charter pesawat dengan Perincian sebagai berikut.

1) Piutang dari internal Kementerian Perhubungan (Sesditjen Perhubungan Udara, Sesditjen Perkeretapian, dan Biro Umum) sebesar Rp619.246.262,00;
2) Piutang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.076.278.250,00;
3) Piutang dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp343.749.120,00;
4) Piutang dari PT. Avia Mandiri Sejahtera sebesar Rp799.038.696,00;
5) Piutang dari PT. Nusa Cakra Aviation sebesar Rp2.833.901.942,00.

Sedangkan Nilai Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU pada BPSDM Perhubungan sebesar Rp2.351.968.088,00 diantaranya yang paling signifikan terdapat pada Politeknik Transportasi Darat – STTD sebesar Rp576.000.000,00 merupakan denda keterlambatan kontribusi tetap melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Topotels Investama.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp11,52 Miliar

C.1.15. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp11.520.400.387,00 dan Rp11.751.822.502,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.19. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	25.000,00	0,00	25.000,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	9.944.509.428,00	9.639.202.390,00	305.307.038,00
3	Ditjen Perkeretaapian	1.500,00	0,00	1.500,00
4	BPSDMP	1.575.864.459,00	2.112.620.112,00	(536.755.653,00)
Total		**11.520.400.387,00**	**11.751.822.502,00**	**(231.422.115,00)**

Nilai penyisihan paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp9.944.509.428,00, yang merupakan penyisihan atas piutang sewa tanah sebesar Rp471.908.030,00, sewa ruangan Rp5.990.205.227,00, sewa peralatan mesin BLU Rp3.009.368.718,00, dan dari kegiatan non operasional lainnya Rp473.027.453,00.
Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Non Operasional BLU berdasarkan pengelompokan kualitas piutang adalah sebagai berikut.

Tabel C.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon I per Kualitas Piutang

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Umur Piutang (Kualitas)				Jumlah Piutang
		0-30 hari (lancar)	31-60 hari (kurang lancar)	31-90 hari (ragu-ragu)	>91 hari (macet)	
1	Ditjen Hubla	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	Ditjen Hubud	4.955.260.796,00	1.059.350.318,00	796.262.612,00	9.415.666.786,00	16.226.540.512,00
3	DJKA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4	BPSDMP	691.604.643,00	97.267.345,00	832.800,00	1.562.263.300,00	2.351.968.088,00
Total Piutang		**5.652.165.439,00**	**1.156.617.663,00**	**797.095.412,00**	**10.977.930.086,00**	**18.583.808.600,00**
% Penyisihan		**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
Total Penyisihan		**28.260.827,20**	**115.661.766,30**	**398.547.706,00**	**10.977.930.086,00**	**11.520.400.385,50**

Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Macet pada Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar Rp9.415.666.786,00 yang paling signifikan diantaranya terdapat pada UPBU Juwata Tarakan sebesar Rp5.783.370.807,00 yang merupakan Piutang Sewa Ruangan BLU yang disebabkan oleh dominasi piutang yang timbul dari layanan sebelum ditetapkan menjadi BLU, selain itu pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 berdampak pada penundaan pembayaran oleh mitra wajib bayar serta penghentian sementara aktivitas usaha beberapa mitra wajib bayar. Sedangkan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU macet lain yang masih signifikan yaitu terdapat pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebesar Rp2.833.901.942,00 yang merupakan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU dari debitur PT. Nusa Cakra Aviation atas charter pesawat.

Adapun Piutang Macet pada BPSDMP adalah sebesar 1.562.263.300,00, dimana nilai yang paling signifikan terdapat pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD sebesar Rp1.526.008.700,00 yang merupakan piutang macet atas kontribusi tetap sewa gedung BLU melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Topotels Hotel sebesar Rp950.008.700,00 serta denda keterlambatannya sebesar Rp576.000.000,00.

Persediaan sebesar Rp6,37 Trilliun

C.1.16. Persediaan

Jumlah Persediaan Kementerian Perhubungan per tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp6.370.740.527.656,00 dan Rp9.718.253.417.892,00. Adapun Perincian Persediaan pada Kementerian Perhubungan per jenis tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.21. Perincian Persediaan per Jenis

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)
Barang Konsumsi	117.444.866.690,00	117.124.873.498,00
Amunisi	116.458.803,00	99.534.665,00
Bahan untuk Pemeliharaan	3.567.418.197,00	3.631.387.214,00
Suku Cadang	1.549.682.442.378,00	2.188.880.004.478,00
Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	1.814.722.044.794,00	3.261.508.663.508,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.681.056.006.731,00	2.155.591.208.870,00
Jalan Irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.073.731.242.151,00	1.668.627.207.994,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	20.669.339.000,00	84.732.118.799,00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.136.809.876,00	9.911.050.130,00
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses	0,00	67.079.580.439,00
Bahan Baku	59.777.072.754,00	99.685.776.979,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	148.721.600,00	1.030.392.052,00
Persediaan Lainnya	48.688.104.682,00	60.351.619.266,00
Jumlah	**6.370.740.527.656,00**	**9.718.253.417.892,00**

Nilai Persediaan paling signifikan adalah Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.814.722.044.794,00. Nilai tersebut terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp1.801.855.496.485,00 dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp12.866.548.309,00.

Adapun Perincian Persediaan per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.22. Perincian Persediaan per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	1.257.847.893,00	2.694.577.497,00	(1.436.729.604,00)
2	Inspektorat Jenderal	109.765.989,00	8.878.100,00	100.887.889,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	4.532.136.040.559,00	7.218.731.363.007,00	(2.686.595.322.448,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	225.621.882.943,00	237.983.381.698,00	(12.361.498.755,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	144.795.896.931,00	158.521.693.426,00	(13.725.796.495,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	1.354.039.132.309,00	1.996.325.291.949,00	(642.286.159.640,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	10.675.131,00	21.219.400,00	(10.544.269,00)
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	96.870.303.762,00	100.441.462.560,00	(3.571.158.798,00)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	15.898.982.139,00	3.525.550.255,00	12.373.431.884,00
	JUMLAH	**6.370.740.527.656,00**	**9.718.253.417.892,00**	**(3.347.512.890.236,00)**

Berdasarkan tabel di atas nilai saldo persediaan yang signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Persediaan pada Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp4.532.136.040.559,00,00 merupakan persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel C.23. Perincian Persediaan pada Ditjen Perhubungan Darat

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)
Barang Konsumsi	41.150.048.991,00	27.779.212.782,00
Bahan untuk Pemeliharaan	413.115.364,00	122.971.895,00
Suku Cadang	44.132.578,00	28.771.150,00
Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	1.801.855.496.485,00	3.261.508.663.508,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.590.474.649.260,00	2.143.910.253.702,00
Jalan Irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.073.731.242.151,00	1.668.627.207.994,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	20.669.339.000,00	84.732.118.799,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.136.809.876,00	9.911.050.130,00
Bahan Baku	1.983.630.065,00	6.744.940.789,00
Persediaan Lainnya	677.576.789,00	15.366.172.258,00
Jumlah	**4.532.136.040.559,00**	**7.218.731.363.007,00**

2. Untuk nilai Persediaan signifikan yang lain terdapat pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.354.039.132.309,00 dengan Perincian sebagai berikut.

Tabel C.24. Perincian Persediaan pada Ditjen Perkeretaapian

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)
Barang Konsumsi	1.043.937.327,00	905.416.293,00
Suku Cadang	1.348.709.551.382,00	1.968.376.479.856,00
Bahan Baku	0,00	21.616.881.000,00
Persediaan Lainnya	4.285.643.600,00	5.426.514.800,00
Jumlah	**1.354.039.132.309,00**	**1.996.325.291.949,00**

Persediaan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang paling signifikan adalah Suku cadang yaitu berupa rel, bantalan beton dan wesel. Suku Cadang dimaksud dipergunakan untuk penunjang kegiatan perkantoran dan pembangunan Infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Aset Tetap Rp592,99 Triliun

C.2. ASET TETAP

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan per 31 Desember 2021 *(Audited)* sebesar Rp592.987.031.623.954,00 dan Rp485.346.267.150.577,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Perincian Aset Tetap Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* adalah sebagai berikut.

Tabel C.25. Perincian Aset Tetap

(*dalam Rupiah*)

No	Akun	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	307.301.505.375.165,00	309.532.832.185.545,00	(2.231.326.810.380,00)
2	Peralatan dan Mesin	58.451.192.236.464,00	56.436.648.269.102,00	2.014.543.967.362,00
3	Gedung dan Bangunan	34.891.139.031.065,00	31.433.348.474.321,00	3.457.790.556.744,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	173.583.679.666.367,00	164.048.192.127.498,00	9.535.487.538.869,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.950.468.974.056,00	2.848.293.517.447,00	102.175.456.609,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.970.455.120.230,00	33.668.678.869.868,00	(2.698.223.749.638,00)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(132.969.858.513.693,00)	(112.621.726.293.204,00)	(20.348.132.220.489,00)
8	Konsesi Jasa	119.875.070.711.161,00	0,00	119.875.070.711.161,00
9	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa	(2.066.620.976.861,00)	0,00	(2.066.620.976.861,00)
	Total Aset Tetap	**592.987.031.623.954,00**	**485.346.267.150.577,00**	**107.640.764.473.377,00**

Perincian Aset Tetap Per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.26. Perincian Aset Tetap Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	2.994.094.025.811,00	3.190.305.213.100,00	(196.211.187.289,00)
2	Inspektorat Jenderal	28.146.021.997,00	26.706.524.372,00	1.439.497.625,00
3	Ditjen Hub. Darat	21.798.407.654.789,00	19.928.045.415.446,00	1.870.362.239.343,00
4	Ditjen Hub. Laut	77.670.607.981.387,00	75.219.619.483.959,00	2.450.988.497.428,00
5	Ditjen Hub. Udara	179.492.752.792.208,00	176.606.982.631.542,00	2.885.770.160.666,00
6	Ditjen Perkeretaapian	297.473.151.811.622,00	294.858.527.607.322,00	2.614.624.204.300,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	124.525.768.325,00	129.642.508.237,00	(5.116.739.912,00)
8	BPSDM Perhubungan	27.867.456.978.274,00	27.367.721.447.405,00	499.735.530.869,00
9	BPTJ	699.297.368.934,00	640.442.612.398,00	58.854.756.536,00
	Nilai Aset Tetap Bruto	**608.148.440.403.347,00**	**597.967.993.443.781,00**	**10.180.446.959.566,00**
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(132.969.858.513.693,00)	(112.621.726.293.204,00)	(20.348.132.220.489,00)
	Konsesi Jasa	119.875.070.711.161,00	0,00	119.875.070.711.161,00
	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa	(2.066.620.976.861,00)	0,00	(2.066.620.976.861,00)
	Total	**592.987.031.623.954,00**	**485.346.267.150.577,00**	**107.640.764.473.377,00**

Tabel C.27. Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Eselon I per 31 Desember 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nilai Aset Tetap Sebelum Konsesi Jasa	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Konsesi Jasa	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa	Nilai Aset Tetap Neto
1	Sekretariat Jenderal	2.994.094.025.811,00	(788.149.848.141,00)	0,00	0,00	2.205.944.177.670,00
2	Inspektorat Jenderal	28.146.021.997,00	(19.558.103.788,00)	0,00	0,00	8.587.918.209,00
3	Ditjen Hub. Darat	21.798.407.654.789,00	(8.242.128.334.663,00)	0,00	0,00	13.556.279.320.126,00
4	Ditjen Hub. Laut	77.670.607.981.387,00	(19.628.756.334.751,00)	29.316.019.140.545,00	(1.684.047.220.550,00)	85.673.823.566.631,00
5	Ditjen Hub. Udara	179.492.752.792.208,00	(31.371.597.161.410,00)	0,00	0,00	148.121.155.630.798,00
6	Ditjen Perkeretaapian	297.473.151.811.622,00	(63.745.217.064.150,00)	90.559.051.570.616,00	(382.573.756.311,00)	323.904.412.561.777,00
7	Badan Kebijakan Trans.	124.525.768.325,00	(52.949.890.761,00)	0,00	0,00	71.575.877.564,00
8	BPSDM Perhubungan	27.867.456.978.274,00	(8.887.416.983.925,00)	0,00	0,00	18.980.039.994.349,00
9	BPTJ	699.297.368.934,00	(234.084.792.104,00)	0,00	0,00	465.212.576.830,00
	Total	**608.148.440.403.347,00**	**(132.969.858.513.693,00)**	**119.875.070.711.161,00**	**(2.066.620.976.861,00)**	**592.987.031.623.954,00**

C.2.1. Tanah

Tanah Rp307,30 Triliun

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp307.301.505.375.165,00. Sedangkan nilai Tanah per 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp309.532.832.185.545,00 dengan rincian per kelompok barang sebagai berikut:

Tabel C.28. Perincian Tanah Per Kelompok Barang

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Kuantitas	Saldo Per 31 Desember 2022 (*Audited*)
Tanah Persil	36.723.338 m2	47.991.909.481.198,00
Tanah Non Persil	8.056.236 m2	2.862.348.690.150,00
Lapangan	235.511.169 m2	256.447.247.203.817,00
JUMLAH	**280.290.743 m2**	**307.301.505.375.165,00**

Tanah tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Eselon I. Perincian Tanah per Unit Eselon I sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel C.29. Perincian Tanah Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	1.479.238.155.500,00	1.479.941.370.800,00	(703.215.300,00)
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	2.505.701.130.519,00	2.321.144.264.579,00	184.556.865.940,00
4	Ditjen Hub. Laut	12.410.302.003.427,00	12.439.770.127.861,00	(29.468.124.434,00)
5	Ditjen Hub. Udara	120.355.093.942.289,00	120.425.554.721.864,00	(70.460.779.575,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	159.305.992.416.188,00	161.621.243.973.199,00	(2.315.251.557.011,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	11.092.317.770.607,00	11.092.317.770.607,00	0,00
9	BPTJ	152.859.956.635,00	152.859.956.635,00	0,00
	Total	**307.301.505.375.165,00**	**309.532.832.185.545,00**	**(2.231.326.810.380,00)**

Penurunan nilai paling signifikan dari tahun anggaran 2021 (*Audited*) ke tahun anggaran 2022 (*Audited*) terdapat pada Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp2.315.251.557.011,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel C.30. Mutasi Aset Tanah
pada Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 *Audited*

(*dalam Rupiah*)

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
a	b	***c***
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	353.362.692.436,00
101	Pembelian	347.762.791.015,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	155.228.303.531,00
100	Saldo Awal	28.283.106.407,00
112	Perolehan Lainnya	17.176.553.846,00
102	Transfer Masuk	2.689.095.900,00
103	Hibah Masuk	2.689.095.900,00
	Mutasi Tambah	**907.191.639.035,00**
302	Transfer Keluar	(2.689.095.900,00)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(3.888.161.704,00)
305	Koreksi Pencatatan	(531.013.723.415,00)
421	Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	(1.324.473.899.027,00)
431	Perubahan BMN Ke PI	(1.360.378.316.000,00)
	Mutasi Kurang	**(3.222.443.196.046,00)**

Mutasi tanah signifikan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain berupa:

a. Mutasi tanah terdiri atas mutasi tambah transaksi tahun berjalan sebesar Rp907.191.639.035,00 dan mutasi kurang transaksi tahun berjalan sebesar Rp3.222.443.196.046,00

b. Mutasi tambah Tanah pada Ditjen Perkeretaapian paling signifikan antara lain berupa:
   1) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp353.362.692.436,00 terdapat pada:
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara senilai Rp6.474.890.330,00
      - Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp3.643.335.400,00 berupa Penambahan Nilai Tanah ke NUP 230
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp341.537.721.010,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat senilai Rp1.706.745.696,00
   2) Pembelian senilai Rp347.762.791.015,00 terdapat pada:
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp50.854.116.955,00 berupa biaya operasional BOBP dan pembebasan tanah
      - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp91.108.168.374,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp81.024.916.519,00 berupa:
        - BOPP Tanah BTP Jawa Tengah senilai Rp71.402.133.652,00
        - Supervisi pembangunan Depo Perawatan Kereta Rel Listrik (MYC 2020 – 2022) senilai Rp354.669.379,00

- pembangunan Depo Perawatan Kereta Rel Listrik (MYC 2020 – 2022) senilai Rp9.268.113.488,00

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara senilai Rp88.701.267.133,00
- Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp5.395.972.034,00 berupa Pembelian/Pembayaran Ganti Rugi – LMAN
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Senilai Rp30.678.350.000,00 berupa Pengadaan Tanah LMAN Wonokromo – Jombang

c. Mutasi kurang Aset Tanah paling signifikan pada Ditjen Perkeretaapian berupa:
   1) Perubahan BMN ke Properti Investasi senilai Rp1.360.378.316.000,00 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian berupa tanah Depo Depok
   2) Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa senilai Rp1.324.473.899.027,00 terdapat pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian berupa Aset Tanah yang termasuk Aset Pemerintah yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Jalur LRT Jabodebek dan Fasilitas Pengoperasian)

Pada Ditjen Perhubungan Laut, terdapat kasus pencatatan ganda atas aset berupa tanah seluas 59.750m2 dengan total nilai Rp64.207.250.000,00 pada satker Pangkalan Penjagaan Laut dan pantai Kelas II Tanjung Uban dengan rincian sebagai berikut:

1)	Tanah dan bangunan Kantor PLP Kelas II Tanjung Uban seluas	46.844m2
2)	Kantor Pelabuhan Tanjung Uban seluas	4.296m2
3)	Navigasi Srop Tanjung Uban seluas	1.440m2
4)	PT. Pelindo I (Rumah Pandu) seluas	7.170m2
		59.750m2

Yang merupakan hasil ganti rugi Djawatan Pelajar tanggal 14 Oktober 1954 kepada masyarakat yang menguasai tanah dan kebun dan belum dilakukan pensertifikatan atas tanah tersebut, namun pada tahun 1994 telah disertifikatkan oleh TNI-AL dengan nomor : 05.06.09.04.4.00008 tanggal 16 Agustus 1994 An. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI tanpa melalui koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menguasai tanah tersebut.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp58,45 Triliun

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp58.451.192.236.464,00. Sedangkan Nilai per 31 Desember 2021 *(Audited)* sebesar Rp56.436.648.269.102,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel C.31. Peralatan dan Mesin Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	685.004.382.426,00	707.291.519.592,00	(22.287.137.166,00)
2	Inspektorat Jenderal	28.146.021.997,00	26.706.524.372,00	1.439.497.625,00
3	Ditjen Hub. Darat	10.285.289.766.925,00	9.427.477.452.797,00	857.812.314.128,00

4	Ditjen Hub. Laut	20.745.284.158.356,00	19.922.462.370.481,00	822.821.787.875,00
5	Ditjen Hub. Udara	11.536.234.061.109,00	11.363.071.974.935,00	173.162.086.174,00
6	Ditjen Perkeretaapian	5.985.699.510.287,00	5.789.587.417.329,00	196.112.092.958,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	59.425.783.061,00	65.826.805.591,00	(6.401.022.530,00)
8	BPSDM Perhubungan	8.810.451.739.613,00	8.863.632.432.158,00	(53.180.692.545,00)
9	BPTJ	315.656.812.690,00	270.591.771.847,00	45.065.040.843,00
	Nilai Bruto	**58.451.192.236.464,00**	**56.436.648.269.102,00**	**2.014.543.967.362,00**
	Akumulasi Penyusutan	(41.738.194.536.926,00)	(37.745.410.731.489,00)	(3.992.783.805.437,00)
	Total	**16.712.997.699.538,00**	**18.691.237.537.613,00**	**(1.978.239.838.075,00)**

Peralatan dan Mesin tersebut merupakan perlengkapan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja. Perincian Peralatan dan Mesin per kelompok barang dapat dilihat pada **Lampiran C.5**.

Kenaikan paling signifikan dari tahun anggaran 2021 (*Audited*) ke tahun anggaran 2022 (*Audited*) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp857.812.314.128,00 dengan perincian mutasi adalah sebagai berikut:

Tabel C.32. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
pada Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 *Audited*

(*dalam Rupiah*)

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
a	b	***c***
0	**Saldo Awal TAYL**	**9.427.477.452.797**
112	Perolehan Lainnya	3.981.732.973.321
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	361.210.767.799
102	Transfer Masuk	213.849.356.003
	Penyesuaian Kode BMN pada Aset Tetap	308.697.632.582
101	Pembelian	163.633.847.256
193	Batal Transfer Keluar	108.428.761.166
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	85.055.717.476
100	Saldo Awal	83.249.238.931
107	Reklasifikasi Masuk	54.864.836.950
208	Pengembangan Melalui KDP	12.238.771.292
103	Hibah Masuk	8.049.896.949
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.022.966.947
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	6.707.758.743
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.764.532.823
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.774.259.250
922	Internal Transfer Masuk	521.533.849
299	Normalisasi BMN	9.518.062
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	1
	Mutasi Tambah	**5.404.812.369.400**
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(45.065.754)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(346.542.374)
921	Internal Transfer Keluar	(521.533.849)

301	Penghapusan	(1.565.720.950)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.403.042.200)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(42.362.272.223)
304	Reklasifikasi Keluar	(54.864.836.950)
303	Hibah Keluar	(112.861.060.565)
302	Transfer Keluar	(336.959.161.205)
305	Koreksi Pencatatan	(3.995.070.819.202)
	Mutasi Kurang	**(4.547.000.055.272)**
	Saldo 31 Desember 2022 Audited	**10.285.289.766.925**

a. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin pada Ditjen Perhubungan Darat terdiri atas mutasi tambah transaksi tahun berjalan sebesar Rp5.404.812.369.400,00 dan mutasi kurang transaksi tahun berjalan sebesar Rp 4.547.000.055.272,00.
b. Beberapa Transaksi Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin pada Ditjen Perhubungan Darat paling signifikan antara lain berupa:
   1) Perolehan Lainnya sebesar Rp3.981.732.973.321,00 merupakan transaksi yang diakibatkan karena adanya transaksi koreksi pencatatan. Pada aplikasi SAKTI, transaksi reklasifikasi masuk dari jumlah dan nilai barang yang berbeda belum diakomodir. Transaksi Perolehan Lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat berupa Transaksi Pemecahan Perlengkapan Jalan. Nilai yang signifikan sebesar Rp3.615.230.659.967,00 terdapat pada BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur diakibatkan karena adanya kesalahan penginputan nilai transaksi perolehan Perlengkapan Jalan. Satker BPTD Wilayah XIII telah melakukan koreksi atas kesalahan nilai tersebut.
   2) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Sebesar Rp361.210.767.799,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
      - Sebesar Rp42.006.891.810,00 pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan penyelesaian Pengadaan Alat Penguji Kendaraan (Alat Uji Statis Kendaraan) yang diserahkan kepada satker BPLJSB dan satker BPTD;
      - Sebesar Rp9.328.491.600,00 pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan penyelesaian pembangunan Timbangan Jembatan 10 Ton;
      - Sebesar Rp40.176.820.881,00 pada Direktorat Lalu Lintas Jalan merupakan Penyelesaian Pembangunan Alat Penerangan Jalan di KSPN Tanjung Lesung, Jalur Selatan dan Utara Pulau Jawa, dan Pembangunan Arterial Transport Management di Jalur Pantura (Indramayu-Brebes);
      - Sebesar Rp2.025.261.991,00 pada Satker BPLJSKB Bekasi merupakan pengadaan Engine Stand dan Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi;
      - Sebesar Rp267.673.301.517,00 merupakan penyelesaian pembangunan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Nasional pada seluruh Satker BPTD di lingkungan Ditjen Hubdat;
   3) Transfer Masuk sebesar Rp213.849.356.003,00 merupakan transaksi Transfer Masuk Aset Terminal dan UPPKB hasil P3D yang berasal dari satker Setditjen

Perhubungan Darat kepada satker Penerima (BPTD), serta Transfer Masuk Alat Pengujian Statis pada satker Penerima (BPLJSKB, BPTD Wilayah III, BPTD Wilayah VII, BPTD Wilayah VIII, BPTD Wilayah IX, BPTD Wilayah X, BPTD Wilayah XI, BPTD Wilayah XV, dan BPTD Wilayah XVIII) dari satker Pengirim Direktorat Sarana Transportasi Jalan;

c. Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin pada Ditjen Perhubungan Darat paling signifikan antara lain berupa:
   1) Koreksi Pencatatan senilai Rp3.995.070.819.202,00. Koreksi Pencatatan diantaranya merupakan transaksi reklasifikasi aset berupa perlengkapan jalan sesuai dengan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 yang tidak dapat diakomodir melalui menu transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar pada aplikasi SAKTI. Selain itu nilai koreksi pencatatan yang signifikan disebabkan adanya kesalahan pemilihan kode akun barang pada Modul Komitmen.
   2) Transfer Keluar sebesar Rp336.959.161.205,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
      - Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp51.460.092.310,00, dimana nilai sebesar Rp51.408.092.310,00 merupakan transfer keluar BMN berupa Alat Uji NonStatis dan Supervisi, serta sebesar Rp52.000.000,00 merupakan transaksi alih status Parkiran Sepeda Selis kepada 17 K/L;
      - Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp25.533.350.785,00 merupakan transaski keluar Alat Kantor Lainnya (CCTV, Personal Komputer, Meubelair) kepada Satker BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Aset untuk Terminal dan UPPKB)
      - Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp104.086.178.908,00 yang merupakan transaksi penyerahan bus melalui mekanisme alih status aset yang diserahkan kepada Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan sekolah tinggi di bawah Kementerian Agama.
      - Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp332.070.428,00, dengan nilai sebesar Rp49.020.428,00 merupakan transaksi keluar berupa Tablet PC dan Laptop karena adanya mutasi pegawai, dan sebesar Rp283.050.000.- merupakan transfer keluar station wagon kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan;
      - Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp11.609.876.148,00 merupakan transaksi keluar Aset P3D yang diserahkan kepada Satker BPTD Pengelola;
      - BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp129.178.155.721,00 merupakan transaksi keluar aset peralatan dan mesin yang diserahkan kepada Satker KSOP Danau Toba;
      - BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp9.250.506.446,00 merupakan transaksi keluar aset yang diserahkan

kepada Kantor KSOP Pulang Pisau berupa *Moveable Bridge*, SBNP Rambu LPJU, dan Genset Dermaga Bahaur

d. Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp597.238.000,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 seperti pengadaan alat kesehatan (yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin), pengadaan thermogun/thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, serta pengadaan bilik desinfektan permanen/portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Perincian mutasi tambah tersebut per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.33. Peralatan dan Mesin dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Per Satker

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Satker	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	Ditjen Hub. Laut	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	48.400.000,00
2	Ditjen Hub. Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Waikelo	104.000.000,00
3	Ditjen Hub. Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu	37.840.000,00
4	Ditjen Hub. Laut	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kairatu	9.000.000,00
5	Ditjen Hub. Udara	Kantor Upbu Matahora	397.998.000,00
	Total		**597.238.000,00**

e. Pada tahun 2022 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan dengan Hyundai Motor Asia Pasifik dimana Pihak Hyundai Motor Asia Pasifik menghibahkan 2 (dua) aset yang salah satunya berupa Mobil listrik Hyundai Ioniq 5 yang dipergunakan sebagai pajangan koleksi di Museum Transportasi kepada Kementerian Perhubungan melalui Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) – STTD sebagai pengelola Museum Transportasi. Untuk hibah masuk tersebut belum dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan dikarenakan belum tertuang nilai perolehan atas aset tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Aset.

C.2.1. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp34,89 Triliun

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* sebesar Rp34.891.139.031.065,00 dan Rp31.433.348.474.321,00 dengan perincian Gedung dan Bangunan per kelompok barang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel C.34. Perincian Gedung dan Bangunan Per Kelompok Barang

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Kuantitas	Saldo Per 31 Desember 2022 (*Audited*)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.219 m2	25.170.117.019.022,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.404 m2	3.206.112.459.297,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	55 m2	27.309.506.495,00
Bangunan Menara Perambuan	3.291 m2	3.701.458.283.599,00
Tugu/Tanda Batas	2.374 m2	2.786.141.762.652,00
JUMLAH	**24.343 m2**	**34.891.139.031.065,00**

Gedung dan Bangunan tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Eselon I. perincian Gedung dan Bangunan per Eselon I sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.35. Gedung dan Bangunan Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	764.384.953.701,00	940.976.075.364,00	(176.591.121.663,00)
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	4.964.654.385.794,00	4.095.896.949.002,00	868.757.436.792,00
4	Ditjen Hub. Laut	7.728.594.716.784,00	7.253.596.177.429,00	474.998.539.355,00
5	Ditjen Hub. Udara	9.798.565.170.143,00	9.073.330.706.232,00	725.234.463.911,00
6	Ditjen Perkeretaapian	5.652.254.280.226,00	4.525.856.531.467,00	1.126.397.748.759,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	47.890.137.643,00	46.605.855.025,00	1.284.282.618,00
8	BPSDM Perhubungan	5.731.498.996.938,00	5.307.579.505.659,00	423.919.491.279,00
9	BPTJ	203.296.389.836,00	189.506.674.143,00	13.789.715.693,00
	Nilai Bruto	**34.891.139.031.065,00**	**31.433.348.474.321,00**	**3.457.790.556.744,00**
	Akumulasi Penyusutan	(4.401.932.878.990,00)	(3.698.625.450.393,00)	(703.307.428.597,00)
	Total	**30.489.206.152.075,00**	**27.734.723.023.928,00**	**2.754.483.128.147,00**

Kenaikan saldo Gedung dan Bangunan dengan nilai paling signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.126.397.748.759,00 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.652.254.280.226,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut:

Tabel C.36. Mutasi Gedung dan Bangunan Ditjen Perkeretaapian

(*dalam Rupiah*)

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
a	b	*c*
102	Transfer Masuk	2.148.100.450.892
112	Perolehan Lainnya	630.475.275.078
107	Reklasifikasi Masuk	572.054.013.269
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	506.768.434.353
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	247.455.621.465
101	Pembelian	42.783.701.528
193	Batal Transfer Keluar	176.615.000
304	Reklasifikasi Keluar	(370.731.800)
431	Perubahan BMN Ke PI	(61.622.462.000)
209	Koreksi Manual	(79.543.215.653)
305	Koreksi Pencatatan	(731.602.887.481)
302	Transfer Keluar	(2.148.277.065.892)
	Jumlah	**1.126.397.748.759**

a. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perkeretaaian terdiri atas mutasi tambah transaksi tahun berjalan sebesar Rp 4.147.814.111.585,00 dan mutasi kurang transaksi tahun berjalan sebesar Rp3.021.416.362.826,00.

b. Beberapa Transaksi Mutasi tambah Aset Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perkeretaapian paling signifikan antara lain berupa:

1) Transfer Masuk senilai Rp2.148.100.450.892 terdapat pada:

- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp34.661.449.021 berupa Bangunan Depo Depok Dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten
- Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp2.073.202.592.871 berupa Bangunan Halte/Shelter dan Bangunan Depo Kereta Api
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp2.723.073.000 berupa Gedung Pos Jaga Permanen Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat senilai Rp5.503.630.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp3.040.424.000 berupa Bangunan Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur senilai Rp5.539.262.000 berupa Bangunan Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat senilai Rp673.489.000 berupa Bangunan Permanen Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan senilai Rp22.124.759.000 berupa Bangunan Permanen Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara senilai Rp493.652.000 berupa Bangunan Permanen Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari Satker Kantor Pusat
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp138.120.000 berupa Gedung Pos Jaga Permanen

2) Perolehan Lainnya sebesar Rp630.475.275.078 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp478.985.877.584 berupa:
  - Bangunan Gedung Manggarai Sisi Barat senilai Rp278.175.985.904
  - Bangunan Gedung Stasiun Matraman senilai Rp21.753.581.508
  - Bangunan Gedung Stasiun Jatinegara senilai Rp147.720.696.852
  - Bangunan Gedung OCC Manggarai senilai Rp31.335.613.320
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara senilai Rp140.788.758.894 berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Halte/Shelter, Pagar Permanen, Bangunan Rumah Genset dan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat senilai Rp10.700.638.600 berupa Bangunan Halte/Shelter 5 unit (Stasiun Alai, Stasiun Air Tawar, Stasiun Lubuk Buaya, Stasiun Pasar Usang, Stasiun Cimparuh

c. Transaksi Mutasi kurang Aset Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perkeretaapian paling signifikan antara lain berupa:

1) Transfer Keluar senilai Rp2.148.277.065.892 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp34.799.569.021 berupa Bangunan Depo Depok Ke Balai Perawatan Perkeretaapian
- Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp2.073.202.592.871 berupa Bangunan Depo Kereta Api dan Bangunan Halte/Shelter (Transfer ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel)
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp40.274.904.000 berupa Hasil Inventarisasi 2010 Ke Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian

2) Koreksi Pencatatan sebesar Rp731.602.887.481 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp534.714.437.066 berupa Pecah Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai S/D Jatinegara) "Pekerjaan Bangunan Gedung Senilai Rp531.790.999.999, di Kapitalisasi ke Konstruksinya Senilai Rp2.442.990.000 dan Rp480.447.067
- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp181.665.414.955 berupa Bangunan Depo Kereta Api senilai Rp178.913.696.955 dan Bangunan Halte/Shelter senilai Rp. 2.751.718.000

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp3.084.081.550 berupa Kapitalisasi Biaya Supervisi Pembangunan Depo Perawatan Kereta Rel Listrik (Myc 2020 - 2022)
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat senilai Rp12.138.953.910 berupa Bangunan Gudang Lainnya (Bangunan Operasional) Senilai Rp7.549.921.950 Bangunan Halte/Shelter 5 Unit (Stasiun Alai, Stasiun Air Tawar, Stasiun Lubuk Buaya, Stasiun Pasar Usang, Stasiun Cimparuh) Senilai Rp4.589.031.960

d. Pada tahun 2022, terdapat pencatatan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi kedalam kategori Aset Properti Invertasi senilai Rp1.549.596.748.840,00 yang masuk dalam kriteria PSAP 17 tentang Properti Investasi halaman 9 paragraf 37, Properti Investasi merupakan properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

e. Terdapat transaksi BMN transfer Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal berupa kompleks Bangunan Museum Transportasi di TMII senilai Rp178.996.884.880,00 yang dialihkan pengelolaannya kepada satker BLU Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor BA 273 Tahun 2022.

f. Pada tahun 2022 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan dengan Hyundai Motor Asia Pasifik dimana Pihak Hyundai Motor Asia Pasifik menghibahkan 2 (dua) aset yang salah satunya berupa Hyundai Mobility Exhibition Center di Museum Transportasi kepada Kementerian Perhubungan melalui Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) – STTD sebagai pengelola Museum Transportasi. Untuk hibah masuk tersebut belum dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan dikarenakan belum tertuang nilai perolehan atas aset tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Aset.

C.2.2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp173,58 Triliun

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp173.583.679.666.367,00. Sedangkan per 31 Desember 2021 *(Audited)* sebesar Rp164.048.192.127.498,00. Perincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per kelompok barang sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.37. Perincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Kelompok Barang

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Kuantitas	Saldo Per 31 Desember 2022 (*Audited*)
Jalan Dan Jembatan	**406.408.864**	**147.088.929.139.583,00**
Jalan	404.792.898	112.408.909.787.982,00
Jembatan	1.615.966	34.680.019.351.601,00
Irigasi	**7.159**	**12.046.413.228.979,00**
Bangunan Air Irigasi	3.957	1.974.950.947.533,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	53	137.598.261.447,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	77	189.188.752.184,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	1.245	8.601.123.137.639,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air	322	199.153.183.892,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	712	137.971.690.452,00
Bangunan Air Kotor	793	806.427.255.832,00
Jaringan	**6.227**	**14.448.337.297.805,00**
Instalasi Air Bersih / Air Baku	1.299	82.027.935.018,00
Instalasi Air Kotor	54	10.509.176.927,00
Instalasi Pengolahan Sampah	45	3.267.503.356,00
Instalasi Pembangkit Listrik	328	189.939.522.344,00
Instalasi Gardu Listrik	609	1.123.276.725.825,00
Instalasi Pertahanan	1.058	13.075.286.025,00
Instalasi Gas	1	24.530.000,00
Instalasi Pengaman	62	1.716.036.934.713,00
Instalasi Lain	583	137.760.672.425,00
Jaringan Air Minum	201	1.723.167.742.308,00
Jaringan Listrik	1.288	4.573.898.337.630,00
Jaringan Telepon	556	4.860.239.793.870,00
Jaringan Gas	143	15.113.137.364,00
JUMLAH	**406.422.250**	**173.583.679.666.367,00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan perlengkapan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja. Perincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.38. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	61.660.941.335,00	58.441.989.695,00	3.218.951.640,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	2.674.269.281.076,00	2.673.427.283.243,00	841.997.833,00
4	Ditjen Hub. Laut	25.135.234.878.657,00	23.454.869.690.705,00	1.680.365.187.952,00
5	Ditjen Hub. Udara	32.944.809.922.422,00	31.678.171.490.673,00	1.266.638.431.749,00
6	Ditjen Perkeretaapian	110.770.930.684.478,00	104.218.437.271.850,00	6.552.493.412.628,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	13.687.694.174,00	13.687.694.174,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	1.955.649.203.202,00	1.923.719.646.135,00	31.929.557.067,00
9	BPTJ	27.437.061.023,00	27.437.061.023,00	0,00
	Nilai Bruto	**173.583.679.666.367,00**	**164.048.192.127.498,00**	**9.535.487.538.869,00**
	Akumulasi Penyusutan	(86.761.506.061.397,00)	(71.115.958.178.982,00)	(15.645.547.882.415,00)
	Total	**86.822.173.604.970,00**	**92.932.233.948.516,00**	**(6.110.060.343.546,00)**

Kenaikan saldo Jalan Irigasi dan Jaringan dengan nilai paling signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp6.552.493.412.628,00 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.770.930.684.478,00 berupa instalasi jaringan teknologi informasi dengan perincian mutasi sebagai berikut:

Tabel C.39. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Ditjen Perkeretaapian

(*dalam Rupiah*)

Uraian Transaksi	Jalan Dan Jembatan	Irigasi	Jaringan	Total Jalan Irigasi dan Jaringan
Transfer Masuk	34.749.128.741.799,00	286.805.246.276,00	2.886.060.080.531,00	37.921.994.068.606,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.782.097.884.073,00	22.933.373.223,00	117.987.534.979,00	6.923.018.792.275,00
Perolehan Lainnya	1.689.675.060.583,00	72.060.950.908,00	0,00	1.761.736.011.491,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	785.742.582.439,00	1.164.794.839,00	87.232.223.739,00	874.139.601.017,00
Pembelian	274.327.074.115,00	0,00	7.591.503.280,00	281.918.577.395,00
Batal Transfer Keluar	69.146.068.441,00	147.103.000,00	0,00	69.293.171.441,00
Hibah Masuk	1.249.790.000,00	0,00	0,00	1.249.790.000,00
Koreksi Manual	0,00	171.410.941,00	0,00	171.410.941,00
Saldo Awal	1,00	0,00	0,00	1,00
Mutasi Tambah	**44.351.367.201.451,00**	**383.282.879.187,00**	**3.098.871.342.529,00**	**47.833.521.423.167,00**
Hibah Keluar	(21.302.682.453,00)	0,00	0,00	(21.302.682.453,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(171.520.372.019,00)	(4.104.390,00)	(48.258.340.921,00)	(219.782.817.330,00)
Reklasifikasi Keluar	(571.683.281.469,00)	0,00	0,00	(571.683.281.469,00)
Koreksi Pencatatan	(2.440.130.559.217,00)	(22.933.373.223,00)	(13.908.056.800,00)	(2.476.971.989.240,00)
Transfer Keluar	(34.818.274.810.240,00)	(286.952.349.276,00)	(2.886.060.080.531,00)	(37.991.287.240.047,00)
Mutasi Kurang	**(38.022.911.705.398,00)**	**(309.889.826.889,00)**	**(2.948.226.478.252,00)**	**(41.281.028.010.539,00)**
	6.328.455.496.053,00	**73.393.052.298,00**	**150.644.864.277,00**	**6.552.493.412.628,00**

Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perkeretaapian yang signifikan antara lain berupa:

a. Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan terdiri atas mutasi tambah transaksi tahun berjalan sebesar Rp47.833.521.423.167,00 dan mutasi kurang transaksi tahun berjalan sebesar Rp41.281.028.010.539,00

b. Mutasi tambah Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perkeretaapian paling signifikan antara lain berupa transfer masuk senilai Rp37.921.994.068.606,00 terdapat pada:
   1) Transfer Masuk Jalan dan Jembatan senilai Rp34.749.128.741.799,00 terdapat pada:
      - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp5.055.495.295.415,00 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton dari Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten Senilai Rp3.967.875.105.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Senilai Rp5.272.371.598.104,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Senilai Rp6.661.531.279.280,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Senilai Rp6.034.093.999.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat Senilai Rp2.022.430.300.000,00 Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Senilai Rp1.931.500.614.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Senilai Rp3.803.816.544.000,00 berupa Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp14.007.000,00 berupa Jembatan Penyebrangan Universitas Indonesia dari Pemprov DKI Jakarta

2) Transfer Masuk Irigasi senilai Rp286.805.246.276,00 terdapat pada:
   - Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta dan Banten senilai Rp5.301.765.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat senilai Rp8.600.761.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp52.052.061.276,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur senilai Rp31.178.463.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Barat senilai Rp84.029.502.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Selatan senilai Rp105.642.694.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

3) Transfer Masuk Jaringan senilai Rp2.886.060.080.531,00 terdapat pada
   - Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta dan Banten senilai Rp24.247.687.060,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp366.280.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur senilai Rp1.744.904,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Barat senilai Rp5.350.000,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp2.861.439.018.567,00 berupa:
     - Transfer Masuk Jaringan Telepon Lainnya dari Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp1.264.711.255.088,00
     - Transfer Masuk Jaringan Distribusi Lainnya dari Satker Pengembangan,Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp1.596.727.763.479,00

c. Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perkeretaapian paling signifikan antara lain berupa:

1) Transfer Keluar senilai Rp37.991.287.240.047,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a) Transfer Keluar Jalan dan Jembatan sebesar Rp34.818.274.810.240,00 terdapat pada:
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur sebesar Rp14.007.000,00 berupa Jembatan pada jalan Kereta Api Bantalan Beton ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp29.762.765.507.825,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 ke Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
      - Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp5.055.495.295.415,00 berupa Transfer Jalan dan Jembatan ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan LRT Sumatera Selatan berdasarkan BAST-SPPPPKA 1 Tahun 2022 Tanggal 28 Juni 2022
   b) Transfer Keluar Irigasi senilai Rp286.952.349.276,00 terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 Ke Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian
   c) Transfer Keluar Jaringan senilai Rp2.886.060.080.531,00 terdapat pada
      - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp24.621.061.964,00 berupa Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2010 ke Balai Teknik di Lingkungan Direktorat Perkeretaapian
      - Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp2.861.439.018.567,00 berupa:
        - Serah Terima ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel berupa Jaringan Distribusi Lainnya senilai Rp1.596.727.763.479,00
        - Serah Terima ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel Jaringan Telepon Lainnya senilai Rp1.264.711.255.088,00
2) Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.365.838.405.840,00 dengan perincian:
   a) Koreksi Pencatatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.328.996.975.817,00 terdapat pada:
      - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp76.081.114.651,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta dan Banten senilai Rp111.834.460.600,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah senilai Rp15.634.609.485,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur senilai Rp7.744.536.755,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat senilai Rp152.509.474.134,00
      - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara senilai Rp1.965.192.780.192,00
   b) Koreksi Pencatatan Irigasi senilai Rp22.933.373.223,00 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara berupa:

- Pembangunan *Box Culvert* sebanyak 15 buah Lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (Smt-27) dipecah menjadi 8 *Box Culvert* senilai Rp10.353.439.851,00
- Lanjutan Pembangunan Jembatan/ Box Culvert Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (6 unit) (Smt-29) dipecah menjadi 6 *Box Culvert* senilai Rp12.579.933.372,00

c) Koreksi Pencatatan Jaringan sebesar Rp13.908.056.800 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara sebesar Rp7.864.983.000,00 berupa kapitalisasi ke NUP Jaringan
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp2.795.000,00 berupa Jaringan Lainnya
- Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Barat senilai Rp6.040.278.800,00 berupa salah penginputan yang seharusnya dimulai dengan Perolehan KDP, namun diinput di Menu Pembelian. Kemudian dilakukan koreksi pencatatan dengan nilai pekerjaan adalah Rp6.045.628.800,00 (Pembangunan Sistem Radio Traindispatching Tahap II Lintas Padang - Naras dan Pengawasan Pembangunan Sistem Radio *Traindispatching* Tahap II Lintas Padang - Naras)

Terdapat transaksi BMN transfer Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal berupa Jalan Kompleks, Jembatan pada Jalan Kereta Api, serta jaringan air dan listrik pada kompleks Museum Transportasi di TMII senilai Rp3.994.865.100 yang dialihkan pengelolaannya kepada satker BLU Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor BA 273 Tahun 2022.

C.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp2,96 Triliun

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.950.468.974.056,00. Sedangkan nilai per 31 Desember 2021 *(Audited)* sebesar Rp2.848.293.517.447,00. Dengan perincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel C.40. Aset Tetap Lainnya Per Akun

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Aset Tetap Renovasi	2.652.724.901.406,00	2.554.475.979.257,00	98.248.922.149,00
2	Aset Tetap Lainnnya	297.744.072.650,00	293.817.538.190,00	3.926.534.460,00
	Nilai Bruto	2.950.468.974.056,00	2.848.293.517.447,00	102.175.456.609,00
	Akumulasi Penyusutan	(68.225.036.380,00)	(61.731.932.340,00)	(6.493.104.040,00)
	Total	2.882.243.937.676,00	2.786.561.585.107,00	95.682.352.569,00

Adapun perincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.41. Aset Tetap Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	3.805.592.849,00	3.654.257.649,00	151.335.200,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	235.601.757.898,00	292.310.019.918,00	(56.708.262.020,00)
4	Ditjen Hub. Laut	35.837.256.120,00	38.364.677.289,00	(2.527.421.169,00)

5	Ditjen Hub. Udara	1.970.955.800.007,00	1.815.455.671.971,00	155.500.128.036,00
6	Ditjen Perkeretaapian	547.630.360.492,00	547.630.360.492,00	0,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	3.522.153.447,00	3.522.153.447,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	153.068.904.493,00	147.309.227.931,00	5.759.676.562,00
9	BPTJ	47.148.750,00	47.148.750,00	0,00
	Nilai Bruto	**2.950.468.974.056,00**	**2.848.293.517.447,00**	**102.175.456.609,00**
	Akumulasi Penyusutan	(68.225.036.380,00)	(61.731.932.340,00)	(6.493.104.040,00)
	Total	**2.882.243.937.676,00**	**2.786.561.585.107,00**	**95.682.352.569,00**

Perincian Aset Tetap Lainnya per kelompok barang sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel C.42. Perincian Aset Tetap Lainnya Per Kelompok Barang

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Kuantitas	Saldo Per 31 Desember 2022 (*Audited*)
Aset Tetap Renovasi	447	2.652.724.901.406,00
Tanah Dalam Renovasi	250	980.646.726.501,00
Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	29	195.736.174.884,00
Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	26	43.726.764.611,00
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Renovasi	22	783.035.384.398,00
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	120	649.579.851.012,00
Aset Tetap Lainnya	188.734	297.744.072.650,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	142.403	199.768.270.651,00
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	219	13.879.023.282,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	38.862	8.867.479.610,00
Barang Bercorak Kesenian	6.996	45.618.036.566,00
Alat Bercorak Kebudayaan	248	29.552.854.361,00
Tanaman	1	52.893.180,00
Barang Koleksi Non Budaya	5	5.515.000,00
JUMLAH	189.181	2.950.468.974.056

Tabel C.43. Perincian Per Jenis Aset Tetap Lainnya Per Eselon I Tahun 2022

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Aset Tetap Renovasi	Aset Tetap Lainnya	Total Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat Jenderal	2.266.218.166,00	1.539.374.683,00	3.805.592.849,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	222.932.656.637,00	12.669.101.261,00	235.601.757.898,00
4	Ditjen Hub. Laut	7.862.148.000,00	27.975.108.120,00	35.837.256.120,00
5	Ditjen Hub. Udara	1.883.476.473.689,00	87.479.326.318,00	1.970.955.800.007,00
6	Ditjen Perkeretaapian	536.187.404.914,00	11.442.955.578,00	547.630.360.492,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	3.522.153.447,00	3.522.153.447,00
8	BPSDM Perhubungan	0,00	153.068.904.493,00	153.068.904.493,00
9	BPTJ	0,00	47.148.750,00	47.148.750,00
	Total	**2.652.724.901.406,00**	**297.744.072.650,00**	**2.950.468.974.056,00**

a. Saldo Aset Tetap Revovasi dengan nilai paling signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp1.883.476.473.689,00 pada 30 (tiga puluh) Satker Ditjen Perhubungan Udara yang merupakan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan) yang dibangun di atas tanah yang tidak berada dalam penguasaan.

b. Diantara nilai Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perhubungan Udara, terdapat pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan perincian adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*design and build*) Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/ Bandar udara Halim Perdana Kusuma senilai Rp573.589.883.000,00
- Pekerjaan Konsultasi Manajemen Konstruksi Revitalisasi Fasilitas TNI AU/Bandar Udara Halim Perdanakusuma senilai Rp7.090.493.520,00.

yang selanjutnya akan dilakukan pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Pertahanan/TNI c.q. TNI AU dhi. Lanud Halim Perdanakusuma.

c. Sementara itu, untuk saldo Aset Tetap Lainnya dengan nilai paling signifikan terdapat pada Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan senilai Rp153.068.904.493,00 pada 32 (tiga puluh dua) satker Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Diantara satker-satker tersebut, nilai paling signifikan yaitu pada satker Politeknik Penerbangan Curug sebesar Rp31.010.087.174,00 dan satker Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebesar Rp11.424.888.818,00 berupa buku-buku referensi pembelajaran, monografi/karya ilmiah serta Alat-alat pendukung kegiatan pengembangan Taruna BPSDM

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp30,97 Triliun

C.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing sebesar Rp30.970.455.120.230,00 dan Rp33.668.678.869.868,00. Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel C.44. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	1.132.891.332.577,00	1.117.789.445.907,00	15.101.886.670,00
4	Ditjen Hub. Laut	11.615.354.968.043,00	12.110.556.440.194,00	(495.201.472.151,00)
5	Ditjen Hub. Udara	2.887.093.896.238,00	2.251.398.065.867,00	635.695.830.371,00
6	Ditjen Perkeretaapian	15.210.644.559.951,00	18.155.772.052.985,00	(2.945.127.493.034,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	124.470.363.421,00	33.162.864.915,00	91.307.498.506,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Nilai Bruto	**30.970.455.120.230,00**	**33.668.678.869.868,00**	**(2.698.223.749.638,00)**

Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel C.45. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

NO	ESELON I	NILAI KDP	KLASIFIKASI		
			DILANJUTKAN	DIHENTIKAN	
				SEMENTARA	PERMANEN
3	Ditjen Hub. Darat	1.132.891.332.577,00	1.082.383.998.629,00	50.507.333.948,00	-
4	Ditjen Hub. Laut	11.615.354.968.043,00	11.064.577.215.346,00	520.505.994.697,00	30.271.758.000,00

5	Ditjen Hub. Udara	2.887.093.896.238,00	2.856.634.863.021,00	30.076.323.557,00	382.709.660,00
6	Ditjen Perkeretaapian	15.210.644.559.951,00	13.948.671.746.556,00	1.199.575.404.210,00	62.397.409.185,00
8	BPSDM Perhubungan	124.470.363.421,00	122.524.809.366,00	1.945.554.055,00	-
	Nilai Bruto	**30.970.455.120.230,00**	**29.074.792.632.918,00**	**1.802.610.610.467,00**	**93.051.876.845,00**

Adapun perincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker ditunjukkan pada **lampiran C.6**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp15.210.644.559.951,00 dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11.615.354.968.043,00.

Pada Ditjen Perkeretaapian merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca pada 14 (empat belas) satker diantaranya:

Tabel C.46. Konstruksi Dalam Pengerjaan Ditjen Perkeretaapian

(*dalam Rupiah*)

No	Nama Balai/Satker	Jumlah
1	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	2.294.549.890.901,00
2	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten	2.396.201.371.909,00
3	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah	824.968.114.620,00
4	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	787.767.803.571,00
5	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	4.147.273.288.802,00
6	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	141.860.882.659,00
7	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	153.292.340.148,00
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	1.504.600.000,00
9	Balai Pengujian Perkeretaapian	1.317.069.500,00
10	Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	219.961.724.142,00
11	Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	21.208.842.705,00
12	Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	1.609.563.365.022,00
13	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6.793.200.000,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	2.604.382.065.972,00
	Total	**15.210.644.559.951,00**

Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp11.615.354.968.043,- pada 48 satker dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel C.47. Konstruksi Dalam Pengerjaan Ditjen Perhubungan Laut

(*dalam Rupiah*)

No	Nama Balai/Satker	Jumlah
a.	Dilanjutkan	11.064.577.215.346,-
b.	Dihentikan Sementara	520.505.994.697,-
c.	Dihentikan Permanen	30.271.758.000,-
	Total KDP Ditjen Perhubungan Laut	**11.615.354.968.043,-**

Nilai KDP terbesar di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2022 yaitu pada KSOP Patimban senilai Rp9.631.272.131.977,- berupa pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Perincian KDP KSOP Patimban sebagai berikut:

a. Nilai KDP sebesar Rp6.101.082.236.570,- (enam triliun seratus satu milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 1 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Konstruksi Terminal sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 8 Desember 2021 dengan target penyelesaian 760 hari (25 Bulan) serta terdapat Extension of Time (EoT) 210 hari (7 bulan). Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Terminal sudah selesai pada tanggal 24 Juni 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
b. Nilai KDP sebesar Rp1.845.325.454.492,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 2 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works sesuai dengan kontrak addendum ke-5 nomor : PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 26 November 2021 dan sudah selesai pada tanggal 27 November 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
c. Nilai KDP sebesar Rp467.036.886.509,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 3 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor:PL.107/2/II/KSOP-PMB/2020 tanggal 09 Desember 2021 dengan target penyelesaian pada tanggal 23 Mei 2022.
d. Nilai KDP sebesar Rp381.757.589.336,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Supervisi dari Paket Pekerjaan Kontruksi Paket 1, 2 dan 3 Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-1, serta dilanjutkan dengan Supervisi Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-2 pada Pekerjaan Paket 5 dan 6.
e. Nilai KDP sebesar Rp43.896.272.780,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.107/03/IX/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 29 September 2021 dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.107/03/IX/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 29 September 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021.
f. Nilai KDP sebesar Rp15.354.181.298 ,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontuksi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor: PL. 107/4/II/KSOP-PMB/2020 tanggal : 18 Februari 2020 dan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-3 nomor: PL. 107/5/II/KSOP-

PMB/2020 tanggal : 18 Februari 2020, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020.

g. Nilai KDP sebesar Rp48.486.385.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontuksi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai kontrak addendum ke-5 nomor : PL.107/05/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 20 Oktober 2021 dan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor : PL. 107/06/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 20 Oktober 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021.
h. Nilai KDP sebesar Rp83.786.969.516 bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen I TA. 2021 sesuai dengan kontrak addendum ke-1 nomor: PL.107/01/XI/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 26 November 2021 dan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen I TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor: PL.107/02/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 15 Oktober 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022.
i. Nilai KDP sebesar Rp7.415.443.890,- bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Biaya Operasional Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban dari TA. 2017 s.d. 31 Desember 2022.
j. Nilai KDP sebesar Rp603.662.566.679,- merupakan pekerjaan paket 6.
k. Nilai KDP sebesar Rp18.779.158.907,- merupakan pekerjaan Pembangunan Gerbang Masuk Gate I dan Gate II Pelabuhan Patimban TA. 2022
l. Nilai KDP sebesar Rp14.688.987.000,- merupakan pekerjaan Pembangunan pagar pengaman Wilayah Backup Area ST0+000 s.d. STA 3+710 SBSN Tahun Anggaran 2022.

Akumulasi Penyusutan Rp132,64 Triliun

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing Rp132.643.201.406.654,00 dan Rp112.621.726.293.204,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.48. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	(788.149.848.141,00)	(790.906.811.786,00)	2.756.963.645,00
2	Inspektorat Jenderal	(19.558.103.788,00)	(17.353.293.860,00)	(2.204.809.928,00)
3	Ditjen Hub. Darat	(8.242.128.334.663,00)	(7.130.432.846.819,00)	(1.111.695.487.844,00)
4	Ditjen Hub. Laut	(19.628.756.334.751,00)	(16.865.679.209.852,00)	(2.763.077.124.899,00)
5	Ditjen Hub. Udara	(31.371.597.161.410,00)	(27.185.120.078.802,00)	(4.186.477.082.608,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	(63.745.217.064.150,00)	(52.214.483.779.011,00)	(11.530.733.285.139,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	(52.949.890.761,00)	(52.974.785.528,00)	24.894.767,00
8	BPSDM Perhubungan	(8.887.416.983.925,00)	(8.186.971.918.940,00)	(700.445.064.985,00)
9	BPTJ	(234.084.792.104,00)	(177.803.568.606,00)	(56.281.223.498,00)
	Nilai Bruto	**(132.969.858.513.693,00)**	**(112.621.726.293.204,00)**	**(20.348.132.220.489,00)**

Konsesi Jasa Rp119,88 Triliun

C.2.6. Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing Rp119.875.070.711.161,00 dan Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.49. Aset Konsesi Jasa Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Hub. Laut	29.316.019.140.545,00	0,00	29.316.019.140.545,00
2	Ditjen Perkeretaapian	90.559.051.570.616,00	0,00	90.559.051.570.616,00
	Nilai Bruto	**119.875.070.711.161,00**	**0,00**	**119.875.070.711.161,00**

Perincian Aset Konsesi Jasa per perjanjian ditunjukkan pada **lampiran C.7**

Menunjuk pada PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Kerja, Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, merupakan aset yang dimiliki oleh mitra dan/atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Aset Partisipasi Pemerintah, yaitu aset yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi dioperasikan oleh pihak swasta atau badan usaha tertentu yang mendapatkan hak konsesi tersebut.
2. Aset Partisipasi Mitra, yaitu aset yang dimiliki bersama antara pemerintah dan mitra kerja yang melakukan pengerjaan atau pengoperasian proyek atau infrastruktur yang diberikan hak konsesi.

Kedua jenis aset konsesi jasa ini dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada PSAP 16. Aset Partisipasi Pemerintah harus dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya, sedangkan Aset Partisipasi Mitra harus dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan diamortisasi sesuai dengan masa perjanjian yang ditetapkan.

Selain itu, ada juga jenis aset konsesi jasa yang masih dalam pengerjaan atau konstruksi, yang disebut Aset Konsesi Jasa Pertisipasi Mitra dalam Pengerjaan dimana aset tersebut dicatat dengan akun terpisah dalam laporan keuangan pemerintah tanpa dilakukan penyusutan, dan harus diakui sebagai aset tetap setelah selesai dan siap digunakan.

Secara bertahap, Kementerian Perhubungan telah melakukan identifikasi terhadap 61 perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha yang berpotensi untuk dapat dikategorikan sebagai aset konsesi jasa. Sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor: S-16/PB.6/2023 tanggal 22 Februari 2023 hal Masukan atas Hasil Identifikasi PSAP 16 tentang Konsesi Jasa pada Kementerian Perhubungan Tahun 2022, dan berdasarkan hasil diskusi lanjutan yang dilaksanakan dengan Direktorat APK, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perkembangan terakhir terkait pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Aset Konsesi Jasa paling signifikan terdapat pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp90.559.051.570.616,00 pada 3 (tiga) perjanjian dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel C.50. Perincian Akun Konsesi Jasa pada Ditjen Perkeretaapian

(*dalam Rupiah*)

No	Akun	Jumlah
a.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	2.414.560.953.619,00
b.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	86.820.016.717.970,00
c.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	1.324.473.899.027,00
	Total	**90.559.051.570.616,00**

a. Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak: HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan Nomor Kontrak: HK.222/VII/2/KA-2014 tanggal 10 Juli 2014. Konsesi berlangsung selama 30 Tahun sejak izin operasi ditetapkan yaitu pada Desember 2017. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Tanah, Jalur, Fasilitas Operasi) milik Mitra. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor:

PL.301/1/2/K1/DJKA/2023, aset konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta dengan nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp2.414.560.953.619,00.

b. Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak: HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan Nomor Kontrak: KL.705/XII/10/KA-2017 tanggal 19 Desember 2017. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Jalur LRT Jabodebek dan Fasilitas Pengoperasian), Peralatan Persinyalan, Aset Sarana, Aset Perawatan Prasarana, Aset Prasarana (17 Stasiun) dan Aset Depo. Konsesi berlangsung selama 50 Tahun sejak izin operasi ditetapkan. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/1/K1/DJKA/2023, aset konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.041.688.790.450,00. Selain itu, terdapat juga Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah berupa aset tanah yang dikonsesikan berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, yang dicatat pada satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp1.324.473.899.027,00.

c. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta – Bandung oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China dengan Adenddum Kontrak Kedua Nomor: PJ 22 TAHUN 2017 dan Nomor: 10100/HK.02/2017 tanggal Perjanjian: 4 Oktober 2017. Perjanjian Konsesi berlangsung dengan Masa Konsesi 80 Tahun Sejak Izin Operasi Ditetapkan. Aset yang Dikonsesikan berupa Jalur Kereta Api Cepat, Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Cepat, Stasiun dan Depo yang Dimiliki oleh Pihak Kedua. Sesuai dengan Surat Nomor PL.003/1/1/K1/DJKA/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Data Dukung Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor: 0026/HFF/HU/KCIC/02.2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Data Dukung Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, aset konsesi dicatat oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Jakarta sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp67.778.327.927.520,00.

2. Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan aset atas penyelenggaraan 11 (sebelas) perjanjian konsesi non eksisting sebesar Rp29.316.019.140.545,00 pada 10 (sepuluh) satker dengan perincian sebagai berikut:

Tabel C.51. Perincian Konsesi Jasa per Satker Ditjen Perhubungan Laut

(*dalam Rupiah*)

No	Nama Balai/Satker	Jumlah
1	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar	2.560.771.881.005
2	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kendari	821.213.850.082
3	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	8.190.159.988.185
4	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak	5.643.790.481.664
5	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Gresik	1.157.923.852.821

6	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Probolinggo	266.653.283.000
7	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan	3.013.270.399.818
8	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung	3.527.583.259.485
9	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak	3.275.788.931.913
10	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Marunda	858.863.212.572
	Total Konjas Ditjen Perhubungan Laut	**29.316.019.140.545**

3. Terdapat 4 (empat) Perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa, yaitu memenuhi fitur utama perjanjian, namun belum dapat dicatat sebagai aset konsesi jasa karena belum *financial close* dan/atau mitra belum memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, yaitu:
   a. Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi
   b. KSOP Patimban
   c. KPBU Kediri
   d. KPBU Anggrek (mitra belum memenuhi kewajiban penyediaan Peralatan dan Mesin)

4. Terdapat 18 (delapan belas) perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa, yaitu memenuhi fitur utama perjanjian, namun belum dapat dicatat sebagai aset konsesi jasa karena mitra tidak menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16: Konsesi Jasa – Mitra (ISAK 16) sehingga Pemerintah tidak memperoleh nilai yang andal untuk menyajikannya sebagai Aset Konsesi Jasa, yaitu:

   a. Perjanjian atas Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare oleh PT. Celebes Railway Indonesia dengan Addendum Kontrak Pertama Nomor: HK.201/A.250/DJKA/IV/19 dan Nomor: 01/EXT/IV/CRI-DU/2019 tanggal 5 April 2019. Konsesi berlangsung selama 16 Tahun Sejak Tanggal Operasi Komersial. Aset yang dikonsesikan berupa Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare yang mencakup pembangunan Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong dan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen F, serta Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Segmen B, Segmen C, Segmen D Tahap I, Segmen D Tahap II dan Segmen F. D. Namun, aset konsesi jasa tersebut tidak dapat dicatat menggunakan PSAP 16 karena PT Celebes Railway Indonesia tidak menggunakan ISAK 16.

   b. Sejumlah 17 (tujuh belas) perjanjian konsesi non eksisting pada Ditjen Perhubungan Laut masih dalam proses pembahasan dan rekonsiliasi nilai, yaitu:
      1) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Penajam Banua Taka;
      2) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Lestari Samudra SAKTI;
      3) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Indonesia Multi Purpose Terminal;
      4) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Ambang Barito Nusapersada;
      5) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Bandar Bakau Jaya;
      6) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Krakatau Bandar Samudera;
      7) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Batu Alam Makmur;
      8) KSOP Kelas II Gresik, Mitra Konsesi Terminal Siam Maspion;

9) Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Swangi Indah;
10) KSOP Kelas IV Marunda, Mitra Konsesi PT. Karya Citra Nusantara (KCN);
11) KSOP Kelas II Pontianak, Mitra Konsesi PT. Indo Container Sarana (ICS);
12) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT. PTB);
13) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT. Sarana Abadi Lestari (SAL);
14) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Mitra Konsesi PT Asinusa Putra Sekawan;
15) UPP Kelas II Rangga Ilung, Mitra Konsesi PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa;
16) UPP Kelas III Brondong, Mitra Konsesi PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS); dan
17) UPP Kelas III Satui, Mitra Konsesi PT. Bina Indo Raya (PT. BIR).

5. Sejumlah 24 (dua puluh empat) Perjanjian yang bersifat Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN tidak memenuhi ruang lingkup konsesi jasa, karena intensi awal perjanjian adalah sewa BMN. Adapun Perincian perjanjian yang dinilai tidak memenuhi kriteria ruang lingkup konsesi jasa adalah sebagai berikut:

Tabel C.52. Perincian Perjanjian yang tidak memenuhi Kriteria Konsesi Jasa

No	Unit Eselon I	Jenis Perjanjian	Jumlah (Perjanjian)	Keterangan
1.	Ditjen Perhubungan Darat	Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO)	1	KSPO Pelabuhan Penyeberangan Ajibata-Ambarita
2.	Ditjen Perhubungan Darat	Sewa KSPI Terminal Terpadu Merak	1	Sewa Lahan/Gedung Bangunan
3.	Ditjen Perhubungan Laut	Konsesi *Existing*	4	Otoritas Pelabuhan dan Pelindo
4.	Ditjen Perhubungan Laut	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	7	Saat ini dicatat pada aset kemiteraan pihak ketiga
5.	Ditjen Perhubungan Laut	Sewa – KSPI	2	Otoritas Pelabuhan Belawan – Pelindo I (tidak ada Penyerahan aset), UPP Nabire-PT Nabire Baru (Untuk Kepentingan Sendiri)
6.	Ditjen Perhubungan Udara	Kerja Sama Pemanfaatan	6	Saat ini dicatat pada aset kemiteraan pihak ketiga
7.	Ditjen Perhubungan Udara	Konsesi	1	PT Angkasa Pura Aviasi pada Bandara Kualanamu
8.	Ditjen Perkeretaapian	Konsesi	2	Angkutan Batubara Stasiun Sukacinta – Serdang (KAI), Stasiun Batu Cicayur-Parung (KAI)
			24	

6. Terdapat 1 (satu) perjanjian konsesi antara KSOP Kelas III Talang Duku Jambi dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Wahyusammudra Indah terkait Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Petikemas Muaro Jambi Pelabuhan Talang Duku Provinsi Jambi yang batal demi hukum sesuai dengan surat UM.001/05/13/KSOP.TLD-2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Data Mitra Konsesi dan KPBU, disebutkan bahwa sampai dengan berakhirnya surat izin pembangunan Terminal Muaro Jambi tanggal 26 Desember 2020, Mitra belum melaksanakan pembangunan Terminal Petikemas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian konsesi nomor WSI/KPS/KEMENHUB/HUBLA/66/150976/2026 dan Nomor PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016.

Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa Rp2,07 Triliun

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Tetap per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing Rp2.066.620.976.861,00 dan Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.53. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Hub. Laut	(1.684.047.220.550,00)	0,00	(1.684.047.220.550,00)
2	Ditjen Perkeretaapian	(382.573.756.311,00)	0,00	(382.573.756.311,00)
	Nilai Bruto	**(2.066.620.976.861,00)**	**0,00**	**(2.066.620.976.861,00)**

C.3. PROPERTI INVESTASI

C.3.1. Properti Investasi

Properti Investasi Rp1,55 Triliun

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp1.549.596.748.840,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan PSAP 17 tentang Properti Investasi halaman 9 paragraf 37, Properti Investasi merupakan properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau dtserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Properti Investasi per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.54. Aset Properti Investasi Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	84.279.840.500,00	0,00	84.279.840.500,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	43.167.732.400,00	0,00	43.167.732.400,00
3	Ditjen Perkeretaapian	1.422.000.778.000,00	0,00	1.422.000.778.000,00
4	BPSDM Perhubungan	148.397.940,00	0,00	148.397.940,00
	Nilai PI Bruto	**1.549.596.748.840,00**	**0,00**	**1.549.596.748.840,00**
	Akumulasi Penyusutan PI	(5.682.331.278,00)	0,00	(5.682.331.278,00)
	Total PI Neto	**1.543.914.417.562,00**	**0,00**	**1.543.914.417.562,00**

Perincian Aset yang memenuhi klasifikasi Properti Investasi ditunjukkan pada **lampiran C.8**

Saldo Properti Investasi paling signifikan terdapat pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.422.000.778.000,00 berupa tanah seluas 262.079 m^2 dan bangunan seluas 16.161,27 m^2 pada lokasi Depo Depok Jawa Barat yang disewakan kepada PT Kereta Commuter Indonesia untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek selama 1 Tahun.

Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset properti investasi pada 7 Satuan Kerja total 10 NUP BMN dengan nilai Rp84.279.840.500,00. Perincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel C.55. Aset Properti Investasi Eselon I Ditjen Perhubungan Laut

(*dalam Rupiah*)

No	Kose Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	413002	DISNAV SABANG	592.461.584,00	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahat Permanen NUP 3
2	413070	KSOP TELUK BAYUR	85.936.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 9
3	412817	KSOP CIREBON	65.372.211.000,00	Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 senilai Rp12.740.767.000,00; NUP 2 senilai Rp31.276.722.000,00; dan NUP 3 senilai Rp21.354.722.000,00. Nilai pada Berita Acara atas Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 sebesar Rp1.024.628.000,00, Namun berdasarkan history BMN dan daftar aset yang tercatat pada KSOP Cirebon sebesar Rp12.740.767.000,00
4	413080	KSOP KUALA TANJUNG	748.388.000,00	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1 senilai Rp388.706.000,00 dan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Permanen NUP 1 senilai Rp359.682.000,00
5	521836	UPP GARONGKONG	699.830.116,00	Bangunan Kantin NUP 1
6	413428	KSU TANJUNG PERAK	199.977.800,00	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen NUP 1
7	413293	DISNAV PALEMBANG	16.581.036.000,00	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan NUP 14
TOTAL			**84.279.840.500,00**	

Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perhubungan Udara dengan nilai sebesar Rp43.167.732.400,00 merupakan aset berupa Tanah senilai Rp41.835.120.000,00 dan Bangunan Gedung Kantor senilai Rp1.332.612.400,00 yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari Nomor 2 Jakarta Pusat yang disewakan kepada PT Magendra Shatra Pratama untuk Layanan SPBU.

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, saldo Properti Investasi senilai Rp148.397.940,00 merupakan Bangunan seluas 12 m^2 yang disewakan dan/atau digunakan oleh pihak ketiga untuk layanan ATM *Center* secara keseluruhan.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp5,68 Miliar

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 *(Audited)* masing-masing Rp5.682.331.278,00 dan Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.56. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	(333.814.305,00)	0,00	(333.814.305,00)
2	Ditjen Perhubungan Udara	(411.300.124,00)	0,00	(411.300.124,00)
3	Ditjen Perkeretaapian	(4.929.796.954,00)	0,00	(4.929.796.954,00)
4	BPSDM Perhubungan	(7.419.895,00)	0,00	(7.419.895,00)
	Nilai Akumulasi Penyusutan	**(5.682.331.278,00)**	**0,00**	**(5.682.331.278,00)**

C.4 PIUTANG JANGKA PANJANG

C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang TP/TGR Rp1,46 Miliar

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp1.455.392.629,00 dan Rp8.884.123.688,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 terdapat pada dua unit Eselon I dengan perincian sebagai berikut.

Tabel C.57. Perincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	1.393.392.629,00	8.798.123.688,00	(7.404.731.059,00)
2	BPSDM Perhubungan	62.000.000,00	86.000.000,00	(24.000.000,00)
	Total	**1.455.392.629,00**	**8.884.123.688,00**	**(7.428.731.059,00)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan temuan BPK tahun 2018 atas tuntutan ganti rugi pensiunan pegawai PPSDM Perhubungan Darat sebesar Rp184.000.000,00 sesuai SK Menteri Perhubungan Nomor KP 226 Tahun 2018 tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara RP (Purna Bakti) tanggal 6 Februari 2018. Berdasarkan SK tersebut, cara pembayaran tuntutan ganti rugi ialah dengan pemotongan gaji pensiun serendah-rendahnya 50% sampai tuntutan ganti rugi tersebut lunas. Saudara RP sudah membuat surat pernyataan bersedia membayar sebesar Rp2.000.000,00 per bulan sampai dengan lunas. Total TGR atas pegawai pada PPSDM Perhubungan Darat yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp122.000.000,00.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.393.392.629,00 dengan penurunan sebesar Rp7.404.731.059,00 dari saldo 31 Desember 2021. Penurunan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang signifikan dari tahun lalu tersebut dikarenakan ketika melakukan migrasi dari SAIBA ke SAKTI perlu dilakukan penginputan ulang di modul piutang aplikasi SAKTI dengan menginput akun 425793-Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp7.404.731.059,00, atas hal tersebut akan otomatis terbentuk Piutang Jangka Panjang Lainnya, sehingga Piutang Tagihan TP/TGR pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.404.731.059,00 pindah klasifikasi piutangnya menjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada 31 Desember 2022. Berikut ini merupakan

rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Ditjen Perhubungan Laut.

Tabel C.58. Perincian Piutang Tagihan TP/TGR per Satker pada Ditjen Perhubungan Laut

(*dalam Rupiah*)

No	Satker	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon	4.726.492,00
2	Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	6.700.000,00
3	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon	168.750.000,00
4	Unit Penyelenggara Pelabuhan Lapuko	1.213.216.137,00
	Total	**1.393.392.629,00**

C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR Rp7,27 Juta

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan per 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp7.269.963,00 dan Rp212.575.618,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I dan berdasarkan umur piutang (kualitas) sebagai berikut.

Tabel C.59. Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	6.959.963,00	212.145.618,00	(205.185.655,00)
2	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	310.000,00	430.000,00	(120.000,00)
	Total	**7.269.963,00**	**212.575.618,00**	**(205.305.655,00)**

Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat pengurangan dasar perhitungan penyisihan piutang TP-TGR pada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp1.400.000,00 berdasarkan SK Nomor KU.502/1/8/OP.TPK-2022 tanggal 17 Oktober 2022. Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak berdasarkan pengelompokan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Tabel C.60. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per Eselon I per Kualitas Piutang

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang
		0-30 hari (lancar)	31-60 hari (kurang lancar)	31-90 hari (Diragukan)	> 90 hari (macet)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	Ditjen Hubla	1.391.992.629,00	-	-	-	1.393.392.629,00
2	BPSDMP	62.000.000,00	-	-	-	62.000.000,00
	Total Piutang	**1.453.992.629,00**	**-**	**-**	**-**	**1.455.392.629,00**
	% Penyisihan	**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	**-**
	Total Penyisihan	**7.269.963,00**	**-**	**-**	**-**	**7.269.963,00**

C.4.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp7,26 Miliar

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp7.261.407.551,00 dan Rp0,00. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Adapun Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 terdapat pada Satker KSOP Palembang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp7.261.407.551,00. Saldo tersebut merupakan migrasi klasifikasi piutang dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.404.731.059,00. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran terhadap piutang tersebut sebesar Rp143.323.508,00, sehingga pada 31 Desember 2022 saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya menjadi sebesar Rp7.261.407.551,00.

C.4.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pjg. Lainnya 36,31 Juta

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp36.307.038,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 tedapat pada Satker KSOP Palembang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar 0,5% (Lancar) dari Piutang Jangka Panjang Lainnya yaitu Rp36.307.038,00.

C.5 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp14,93 Triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp14.933.473.143.432,00 dan Rp15.583.174.803.999,00 dengan perincian per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.61. Perincian Aset Lainnya Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 *(Audited)*	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	164.682.401.019,00	228.101.661.133,00	(63.419.260.114,00)
2	Inspektorat Jenderal	10.610.535.063,00	10.334.351.563,00	276.183.500,00
3	Ditjen Hub. Darat	2.023.061.559.873,00	2.648.618.321.058,00	(625.556.761.185,00)
4	Ditjen Hub. Laut	2.457.989.373.078,00	1.867.721.498.253,00	590.267.874.825,00
5	Ditjen Hub. Udara	15.039.270.522.625,00	15.069.024.737.584,00	(29.754.214.959,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	412.328.700.759,00	706.043.822.683,00	(293.715.121.924,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	2.841.267.500,00	6.753.153.330,00	(3.911.885.830,00)
8	BPSDM Perhubungan	401.628.214.594,00	469.873.722.078,00	(68.245.507.484,00)
9	BPTJ	143.387.459.000,00	138.097.465.500,00	5.289.993.500,00
	Total Bruto	**20.655.800.033.511,00**	**21.144.568.733.182,00**	**(488.768.699.671,00)**
	Ak. Penyusutan/Amortisasi	(5.722.326.890.079,00)	(5.561.393.929.183,00)	(160.701.660.567,00)
	Total Netto	**14.933.473.143.432,00**	**15.583.174.803.999,00**	**(649.701.660.567,00)**

Tabel C.62. Perincian Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

(*dalam Rupiah*)

No	Aset Lainnya	Nilai Bruto	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Netto
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	14.578.416.669.218,00	(3.210.942.262.564,00)	11.367.474.406.654,00
2	Aset Tak Berwujud	2.511.098.992.560,00	(589.799.667.650,00)	1.921.299.324.910,00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	287.057.697.628,00	0,00	287.057.697.628,00
4	Aset Lain-Lain	3.279.226.674.105,00	(1.921.584.959.865,00)	1.357.641.714.240,00
	Total	**20.655.800.033.511,00**	**-5.722.326.890.079,00**	**14.933.473.143.432,00**

C.5.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp14,58 Triliun

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Ketiga per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp14.578.416.669.218,00 dan Rp13.965.872.508.966,00. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan merupakan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan BMN. Nilai *netto* diperoleh dari nilai bruto dikurangi akumulasi penyusutan.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (*bruto*) terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.229.236.852.951,00 dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp13.349.179.816.267,00 dengan perincian sebagai berikut. Sedangkan nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (*netto*) Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.123.298.489.134,00 dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp10.244.175.917.520,00. Perincian kerja sama pemanfaatan BMN sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel C.63. Perincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 *(Audited)*	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	0,00	0,00	0,00
4	Ditjen Hub. Laut	1.229.236.852.951,00	751.108.546.822,00	478.128.306.129,00
5	Ditjen Hub. Udara	13.349.179.816.267,00	13.214.763.962.144,00	134.415.854.123,00
6	Ditjen Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	0,00	0,00	0,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	**14.578.416.669.218,00**	**13.965.872.508.966,00**	**612.544.160.252,00**

Tabel C.64. Perincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Akumulasi Amortisasi per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nilai *Bruto*	Akumulasi Amortisasi	Nilai *Netto*
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Hub. Darat	0,00	0,00	0,00
4	Ditjen Hub. Laut	1.229.236.852.951,00	(105.938.363.817,00)	1.123.298.489.134,00
5	Ditjen Hub. Udara	13.349.179.816.267,00	(3.105.003.898.747,00)	10.244.175.917.520,00
6	Ditjen Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00

8	BPSDM Perhubungan	0,00	0,00	0,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	**14.578.416.669.218,00**	**(3.210.942.262.564,00)**	**11.367.474.406.654,00**

Tabel C.65. Perincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Menurut Jenisnya

(*dalam Rupiah*)

No	Jenis Aset Kemitraan	Kuantitas		31 Desember 2022 (Audited)
1	Tanah	8.636.572	m2	9.293.099.472.699
2	Peralatan dan Mesin	11.975	unit	953.176.076.018
3	Gedung dan Bangunan	344	unit	988.542.244.215
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.563.714	m2	3.340.544.062.377
5	Aset Tetap Lainnya	12	unit	3.054.813.909
Total				**14.578.416.669.218**

C.5.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp2,51 Triliun

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pencatatan dan pengklasifikasian Aset Tak Berwujud telah menerapkan amortisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp2.511.098.992.560,00 dan Rp2.627.734.446.365,00. Nilai *netto* diperoleh dari nilai bruto dikurangi akumulasi amortisasi. Perincian atas Aset Tak Berwujud per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.66. Perincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	94.084.350.525,00	146.291.602.339,00	(52.207.251.814,00)
2	Inspektorat Jenderal	3.199.151.700,00	2.938.468.200,00	260.683.500,00
3	Ditjen Hub. Darat	860.934.350.143,00	987.312.585.138,00	(126.378.234.995,00)
4	Ditjen Hub. Laut	696.819.514.146,00	623.261.670.429,00	73.557.843.717,00
5	Ditjen Hub. Udara	253.943.372.652,00	292.301.299.556,00	(38.357.926.904,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	116.943.729.315,00	125.574.495.564,00	(8.630.766.249,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	2.361.619.000,00	2.263.384.000,00	98.235.000,00
8	BPSDM Perhubungan	339.775.499.079,00	309.906.578.639,00	29.868.920.440,00
9	BPTJ	143.037.406.000,00	137.884.362.500,00	5.153.043.500,00
	Total	**2.511.098.992.560,00**	**2.627.734.446.365,00**	**(116.635.453.805,00)**

Tabel C.67. Perincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nilai *Bruto*	Akumulasi Amortisasi	Nilai *Netto*
1	Sekretariat Jenderal	94.084.350.525,00	(40.787.241.559,00)	53.297.108.966,00
2	Inspektorat Jenderal	3.199.151.700,00	(2.316.920.045,00)	882.231.655,00
3	Ditjen Hub. Darat	860.934.350.143,00	(19.072.432.996,00)	841.861.917.147,00
4	Ditjen Hub. Laut	696.819.514.146,00	(145.272.527.163,00)	551.546.986.983,00
5	Ditjen Hub. Udara	253.943.372.652,00	(150.568.909.626,00)	103.374.463.026,00

6	Ditjen Perkeretaapian	116.943.729.315,00	(4.512.267.438,00)	112.431.461.877,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	2.361.619.000,00	(1.695.227.751,00)	666.391.249,00
8	BPSDM Perhubungan	339.775.499.079,00	(220.043.343.749,00)	119.732.155.330,00
9	BPTJ	143.037.406.000,00	(5.530.797.323,00)	137.506.608.677,00
	Total	2.511.098.992.560,00	**(589.799.667.650,00)**	**1.921.299.324.910,00**

Berdasarkan jenisnya, Aset Tak Berwujud dirinci sebagai berikut.

Tabel C.68. Perincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan (Penurunan)
Hak Cipta	181.447.000,00	181.447.000,00	0,00
Paten	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Software	678.049.044.486,00	741.927.053.327,00	(63.878.008.841,00)
Lisensi	17.270.334.514,00	24.196.204.594,00	(6.925.870.080,00)
Hasil Kajian	1.202.878.540.209,00	1.138.752.713.509,00	64.125.826.700,00
ATB Lainnya	612.669.626.351,00	722.627.027.935,00	(109.957.401.584,00)
Total	**2.511.098.992.560,00**	**2.627.734.446.365,00**	**(116.635.453.805,00)**

Berdasarkan jenisnya, Aset Tak Berwujud terdiri dari hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian, dan aset tak berwujud lainnya. Per 31 Desember 2022, tidak ada jenis ATB yang terkait sehubungan dengan penanganan pandemi COVID-19. Perincian Aset Tak Berwujud dan manfaatnya per Satker terdapat pada **Lampiran C.9.**

Sedangkan Aset Tak Berwujud Lainnya terdapat pada lima Eselon I dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.69. Perincian Aset Tak Berwujud Lainnya per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)
1	Sekretariat Jenderal	198.290.000,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	309.229.160.782,00	401.871.963.390,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	191.114.404.684,00	219.274.941.632,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	15.247.410.492,00	21.706.457.366,00
6	Ditjen Perkeretaapian	42.815.255.000,00	27.785.704.520,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	54.065.105.393,00	51.987.961.027,00
9	BPTJ	0,00	0,00
	Total	**612.669.626.351,00**	**722.627.027.935,00**

Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp612.669.626.351,00 dan Rp722.627.027.935,00. Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp612.669.626.351,00 antara lain berupa kajian kebijakan transportasi darat, perencanaan tatanan terminal barang, reviu desain *master plan*, kajian penerapan teknologi, supervisi peningkatan kinerja transportasi, *Detail Engineering Design* (DED) manajemen lalu lintas, survei dan analisa, studi kelayakan, studi dokumen AMDAL, rencana induk pelabuhan, pedoman teknis, DED pembangunan jalur transportasi, dan aplikasi *e-Learning*.

C.5.3. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp287,06 Miliar

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp287.057.697.628,00 dan Rp151.433.848.624,00.

Perincian mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.70. Perincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	0,00	434.000.000,00	(434.000.000,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	4.049.058.000,00	7.260.888.250,00	(3.211.830.250,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.336.161.750,00	0,00	1.336.161.750,00
6	Ditjen Perkeretaapian	281.672.477.878,00	143.738.960.374,00	137.933.517.504,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	0,00	0,00	0,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	**287.057.697.628,00**	**151.433.848.624,00**	**135.623.849.004,00**

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan antara lain berupa:

1. Pekerjaan Survei Investigasi dan Desain (SID).
2. Pekerjaan studi *Detail Engineering Design* (DED) pengembangan pelabuhan.
3. Pekerjaan *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas pelabuhan.
4. Pekerjaan studi lingkungan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
5. Pekerjaan Proyek Manajemen Unit dan pekerjaan Perencanaan Sistem Informasi.
6. Pekerjaan *Engineering Services*.
7. Pekerjaan DED Pembangunan *Double Double Track* (DDT).
8. Pekerjaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Jalan KA.
9. Pekerjaan Studi *Ability to Pay* (ATP) Angkutan Kereta Api Antarkota di Pulau Jawa.
10. Pekerjaan Studi *Wilingness to Pay* (WTP) Angkutan Kereta Api Antarkota di Pulau Jawa.

C.5.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp3,28 Triliun

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.279.226.674.105,00 dan Rp4.399.527.929.227,00. Nilai *netto*

diperoleh dari nilai bruto dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi. Aset Lain-Lain (bruto) per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp3.178.598.933.392,00 dan ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp100.627.740.713,00.

Perincian Aset Lain-Lain per Eselon I sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.71. Perincian Aset Lain-Lain Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	70.598.050.494,00	81.810.058.794,00	(11.212.008.300,00)
2	Inspektorat Jenderal	7.411.383.363,00	7.395.883.363,00	15.500.000,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.162.127.209.730,00	1.660.871.735.920,00	(498.744.526.190,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	527.883.947.981,00	486.090.392.752,00	41.793.555.229,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.434.811.171.956,00	1.561.959.475.884,00	(127.148.303.928,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	13.712.493.566,00	436.730.366.745,00	(423.017.873.179,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	479.648.500,00	4.489.769.330,00	(4.010.120.830,00)
8	BPSDM Perhubungan	61.852.715.515,00	159.967.143.439,00	(98.114.427.924,00)
9	BPTJ	350.053.000,00	213.103.000,00	136.950.000,00
	Total	**3.279.226.674.105,00**	**4.399.527.929.227,00**	**(1.120.301.255.122,00)**

Tabel C.72. Perincian Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	Nilai *Bruto*	Akumulasi Amortisasi	Nilai *Netto*
1	Sekretariat Jenderal	70.598.050.494,00	(70.204.797.254)	393.253.240,00
2	Inspektorat Jenderal	7.411.383.363,00	(6.877.949.979,00)	533.433.384,00
3	Ditjen Hub. Darat	1.162.127.209.730,00	(502.307.229.121,00)	659.819.980.609,00
4	Ditjen Hub. Laut	527.883.947.981,00	(383.605.218.004,00)	144.278.729.977,00
5	Ditjen Hub. Udara	1.434.811.171.956,00	(884.999.297.192,00)	549.811.874.764,00
6	Ditjen Perkeretaapian	13.712.493.566,00	(13.710.680.441,00)	1.813.125,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	479.648.500,00	(469.177.053,00)	10.471.447,00
8	BPSDM Perhubungan	61.852.715.515,00	(59.074.980.057,00)	2.777.735.458,00
9	BPTJ	350.053.000,00	(335.630.764,00)	14.422.236,00
	Total	**3.279.226.674.105,00**	**(1.921.584.959.865,00)**	**1.357.641.714.240,00**

Tabel C.73. Perincian Aset Lain-lain Menurut Jenisnya

(*dalam Rupiah*)

Jenis Aset Lain-Lain	Kuantitas		31 Desember 2022 (Audited)
Tanah	17.590	m2	598.574.713
Peralatan dan Mesin	33.960	unit	1.007.105.509.340
Gedung dan Bangunan	513	unit	263.388.350.006
Jalan Irigasi dan Jaringan	425.958	m2	1.816.199.836.094
Aset Tetap Lainnya	6.066	unit	91.306.663.239
Aset Tak Berwujud	231	unit	100.627.740.713
Total			**3.279.226.674.105**

Aset Lain-Lain dengan nilai signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp1.434.811.171.956,00 dan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp1.162.127.209.730,00.

Aset Lain-Lain Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp1.434.811.171.956,00 antara lain berupa:

1. Aset yang akan diserahkan kepada Badan Pengelola Batam (aset eks Bandara Hang Nadim);
2. Sisa aset yang akan di-PMN-kan kepada Angkasa Pura II dari satker inaktif Bandara Medan Baru;
3. Aset tetap pada Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Suku cadang (persediaan) terkait pelayanan navigasi penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan dan 8 (delapan) UPBU yang digunakan oleh Perum LPPNPI namun belum termasuk ke dalam dokumen serah terima aset sesuai BA 282 Tahun 2016 maupun BA 488 Tahun 2017;
5. Aset dalam proses PMN UPBU Blimbingsari-Banyuwangi kepada PT Angkasa Pura II; dan
6. Aset dalam proses PMN Bandara Internasional Kertajati kepada PT Angkasa Pura II.

Adapun Aset Lain-Lain (Bruto) Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp1.162.127.209.730,00 antara lain berupa Barang Milik Negara yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, BMN yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), dan BMN rusak berat yang akan dihapuskan.

C.5.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Rp5,72 Triliun

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp5.722.326.890.079,00 dan Rp5.561.393.929.183,00 merupakan penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya karena berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Sedangkan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.74. Perincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 *(Audited)*	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	110.992.038.813,00	163.057.679.325,00	(52.065.640.512)
2	Inspektorat Jenderal	9.194.870.024,00	8.790.953.085,00	403.916.939
3	Ditjen Hub. Darat	521.379.662.117,00	646.749.694.264,00	(125.370.032.147)
4	Ditjen Hub. Laut	634.816.108.984,00	515.824.158.981,00	118.991.950.003
5	Ditjen Hub. Udara	4.140.572.105.565,00	3.864.622.544.530,00	275.949.561.035
6	Ditjen Perkeretaapian	18.222.947.879,00	20.977.159.362,00	(2.754.211.483)
7	Badan Kebijakan Transportasi	2.164.404.804,00	5.775.042.750,00	(3.610.637.946)
8	BPSDM Perhubungan	279.118.323.806,00	331.030.582.848,00	(51.912.259.042)
9	BPTJ	5.866.428.087,00	4.566.114.038,00	1.300.314.049
	Total	**5.722.326.890.079,00**	**5.561.393.929.183,00**	**160.932.960.896**

Sedangkan perincian akumulasi penyusutan/amortisasi Aset Lainnya per jenis Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C.75. Perincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Menurut Jenisnya

(*dalam Rupiah*)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.210.942.262.564,00	2.927.014.773.069,00	283.927.489.495,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.919.812.022.497,00	1.991.800.331.563,00	(71.988.309.066,00)
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	26.249.955,00	23.641.585,00	2.608.370,00
Akumulasi Amortisasi Paten	12.941.177,00	7.647.059,00	5.294.118,00
Akumulasi Amortisasi Software	580.567.455.152,00	624.848.451.933,00	(44.280.996.781,00)
Akumulasi Amortisasi Lisensi	9.047.874.428,00	12.307.353.994,00	(3.259.479.566,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	145.146.938,00	1.039.884.995,00	(894.738.057,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	1.772.937.368,00	4.351.844.985,00	(2.578.907.617,00)
Total	**5.722.326.890.079,00**	**5.561.393.929.183,00**	**160.932.960.896,00**

C.6 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.6.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp195,45 Miliar

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp195.445.674.549,00 dan Rp171.196.107.245,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Perincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.76. Perincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	794.347.358,00	2.844.505.117,00	(2.050.157.759,00)
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	535.498.660,00	472.781.000,00	62.717.660,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	1.647.898.654,00	3.238.811.295,00	(1.590.912.641,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.824.678.281,00	61.178.085.465,00	(59.353.407.184,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	25.678.840.805,00	24.515.717.683,00	1.163.123.122,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	150.332.000,00	61.914.000,00	88.418.000,00
8	BPSDM Perhubungan	164.814.078.791,00	78.884.292.685,00	85.929.786.106,00

9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	**195.445.674.549,00**	**171.196.107.245,00**	**24.249.567.304,00**

Per 31 Desember 2022, tidak ada utang kepada pihak ketiga yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga yang signifikan terdapat pada BPSDM Perhubungan sebesar Rp164.814.078.791,00 merupakan rekening dana kelolaan berupa dana titipan dari peserta diklat yang belum dilaksanakan atas jasa layanan pendidikan.

C.6.2. Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan Rp0,00

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

C.6.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp36,73 Miliar

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp36.730.849.092,00 dan Rp37.463.190.572,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas negara namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Perincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.77. Perincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	2.096.823.485,00	829.006.805,00	1.267.816.680,00
2.	Ditjen Perhubungan Laut	282.839.071,00	448.970.250,00	(166.131.179,00)
3.	Ditjen Perhubungan Udara	5.666.296.966,00	12.370.910.109,00	(6.704.613.143,00)
4.	Ditjen Perkeretaapian	3.736.322.403,00	0,00	3.736.322.403,00
5.	BPSDM Perhubungan	24.907.538.167,00	23.814.303.408,00	1.093.234.759,00
6.	BPTJ	41.029.000,00	0,00	41.029.000,00
	Total	**36.730.849.092,00**	**37.463.190.572,00**	**(732.341.480,00)**

C.6.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp665,01 Miliar

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp665.013.496,00 dan Rp1.531.781.543,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2022. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.6.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp18.000

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp18.000,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain-lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan dan terdapat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

C.7 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

C.7.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa Rp116,40 Triliun

Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp116.404.817.497.945,00 dan Rp0,00. Kewajiban Konsesi merupakan kewajiban jangka panjang yang digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha). Perincian Kewajiban Konsesi Jasa per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.78. Kewajiban Konsesi Jasa Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 *(Audited)*	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	0,00	0,00	0,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	27.552.813.582.667,00	0,00	27.552.813.582.667,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	0,00	0,00	0,00
6	Ditjen Perkeretaapian	88.852.003.915.278,00	0,00	88.852.003.915.278,00
7	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	0,00	0,00	0,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	**116.404.817.497.945,00**	**0,00**	**116.404.817.497.945,00**

Ditjen Perhubungan Laut memiliki Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp27.552.813.582.667,00 yang merupakan Kewajiban Konsesi Jasa dengan Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.79. Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

No	Satker	Mitra	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra Tahun 2022
1	OP Belawan	PT PELINDO I - TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE II	2.887.961.850.216,00
2	KSOP Kuala Tanjung	PT PELINDO I - TERMINAL CURAH CAIR KUALA TANJUNG	3.363.509.619.509,00
3	OP Tanjung Priok	PT PELINDO II - TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK	7.720.231.872.257,00
4	KSOP Pontianak	PT PELINDO II - TERMINAL KIJING	3.250.590.555.514,00
5	OP Tanjung Perak	PT PELINDO III - TERMINAL MULTI PURPOSE TELUK LAMONG	4.266.808.347.300,00
6	OP Tanjung Perak	PT PELINDO III - ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA - APBS	664.769.937.258,00

7	KSOP Gresik	PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA - TERMINAL MANYAR GRESIK	1.091.868.074.290,00
8	OP Makassar	PT PELINDO IV - TERMINAL MAKASSAR NEWPORT	2.462.350.254.657,00
9	KSOP Kendari	PT PELINDO - KENDARI NEWPORT	815.085.388.514,00
10	KSOP Probolinggo	PT. DELTA ARTHA BAHARI NUSANTARA	249.309.980.042,00
11	KSOP Marunda	PT. PELABUHAN TEGAR INDONESIA	780.327.703.110,00
	Total		**27.552.813.582.667,00**

Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp88.852.003.915.278,00 pada Ditjen Perkeretaapian merupakan saldo kewajiban (pendapatan tangguhan) atas hak pengusahaan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta melalui Kota Tangerang oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kontrak Nomor HK.201/A.263/DJKA/7/14, HK.222/VII/2/KA-2014 tanggal 10 Juli 2014. Konsesi berlangsung selama 30 Tahun sejak izin operasi ditetapkan yaitu pada Desember 2017. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Tanah, Jalur, Fasilitas Operasi) Milik Mitra. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/2/K1/DJKA/2023 tanggal 19 Januari 2023, kewajiban konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta dengan nilai kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp2.414.560.953.619,00. Pada tahun 2022 dicatat Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa sebesar Rp382.573.756.311,00, sehingga saldo kewajiban yang diakui pada tahun 2022 sebesar Rp2.031.987.197.308,00.

2. Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kontrak Nomor HK.201/A/566/DJKA/12/17 dan Nomor KL.705/XII/10/KA-2017 tanggal 19 Desember 2017. Konsesi berlangsung selama 50 tahun sejak izin operasi ditetapkan. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), Aset Sarana, Aset Perawatan Prasarana, Aset Prasarana (stasiun), dan Aset Depo. Saat ini aset tersebut masih dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan dan belum dioperasikan. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa Nomor PL.301/1/1/K1/DJKA/2023 tanggal 19 Januari 2023, kewajiban konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta dengan nilai kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp19.041.688.790.450,00.

3. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sesuai dengan amandemen kontrak terakhir Nomor HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan Nomor KL.705/XII/10/KA-2017 tanggal 4 Oktober 2017. Kontrak konsesi berlangsung selama 50 tahun sejak ijin operasi ditetapkan. Aset yang dikonsesikan berupa Jalur Kereta Api Cepat, Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Cepat, serta stasiun dan depo yang dimiliki oleh pihak kedua. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa Nomor PL.301/1/16/K1.2/2023 tanggal 30 Maret 2023, kewajiban konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Bandung dengan nilai kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp67.778.327.927.520,90.

C.8 EKUITAS

Ekuitas Rp501,51 Triliun

Ekuitas per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp501.510.611.369.131,00 dan Rp512.142.042.910.783,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian Ekuitas per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.80. Perincian Ekuitas Per Eselon I

(*dalam Rupiah*)

No	Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	2.258.009.036.654,00	2.463.610.267.729,00	(205.601.231.075,00)
2	Inspektorat Jenderal	10.113.349.237,00	10.905.507.090,00	(792.157.853,00)
3	Ditjen Hub. Darat	19.655.203.097.831,00	22.026.261.145.825,00	(2.371.058.047.994,00)
4	Ditjen Hub. Laut	60.366.472.401.255,00	60.132.583.638.212,00	233.888.763.043,00
5	Ditjen Hub. Udara	159.750.992.389.315,00	161.331.802.955.666,00	(1.580.810.566.351,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	238.747.955.814.382,00	245.305.344.451.470,00	(6.557.388.637.088,00)
7	Badan Kebijakan Transportasi	72.113.083.391,00	77.605.138.689,00	(5.492.055.298,00)
8	BPSDM Perhubungan	20.029.769.658.593,00	20.194.233.860.593,00	(164.464.202.000,00)
9	BPTJ	619.982.538.473,00	599.695.945.509,00	20.286.592.964,00
	Total	**501.510.611.369.131,00**	**512.142.042.910.783,00**	**(10.631.431.541.652,00)**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Kegiatan Operasional

D.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp8,91 Triliun

Jumlah Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp8.909.857.557.720,00 dan Rp8.527.892.857.724,00. Pendapatan Operasional per Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri dari:

Tabel D.1 Perincian Pendapatan Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha			
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	116.156.273.408,00	121.069.010.277,00	(4,06)
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.496.435.600,00	4.029.186.000,00	(38,04)
Jumlah Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	**118.652.709.008,00**	**125.098.196.277**	**(5,15)**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Akreditasi Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi	141.225.940.602,00	153.145.700.037,00	(7,78)
Jumlah Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**141.225.940.602,00**	**153.145.700.037,00**	(7,78)
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi			
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	646.734.000,00	2.122.465.999,00	(69,53)
Pendapatan Biaya Pendidikan	1.843.920.000,00	2.729.784.001,00	(32,45)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	3.805.841.620,00	1.722.527.960,00	120,95
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	36.157.157.238,00	25.097.448.966,00	44,07
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.354.839.000,00	1.956.967.020,00	(30,77)
Jumlah Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	**43.808.491.858,00**	**33.629.193.946,00**	**30,27**
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika			
Pendapatan Jasa Transportasi	6.994.083.265.658,00	6.263.723.455.937,00	11,66
Jumlah Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	**6.994.083.265.658,00**	**6.263.723.455.937,00**	**11,66**

URAIAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Lainnya	17.137.828.280,00	1.017.278.000,00	1.584,68
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	**17.137.828.280,00**	**1.017.278.000,00**	**1.584,68**
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan			
Pendapatan Bunga Lainnya	54.888,00	5.885.024,00	(99,07)
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	**54.888,00**	**5.885.024,00**	**(99,07)**
Pendapatan Denda			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	37.322.391.419,00	129.427.462.962,00	(71,16)
Pendapatan Denda Lainnya	611.797.102,00	413.761.375,00	47,86
Jumlah Pendapatan Denda	**37.934.188.521,00**	**129.841.224.337,00**	**(70,78)**
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0,00	16.862.284,00	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.478.719.515,00	851.240.104,00	191,19
Jumlah Pendapatan Lain-lain	**2.478.719.515,00**	**868.102.388,00**	**185,53**
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	**7.355.321.198.330,00**	**6.707.329.035.946,00**	**9,66**
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.304.217.305.746,00	1.602.179.675.155,00	(18,60)
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	23.757.080.506,00	5.309.050.000,00	347,48
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	114.964.835.832,00	80.798.370.495,00	42,29
Pendapatan Alokasi APBN	9.581.101.148,00	36.810.089.988,00	(73,97)
Pendapatan BLU Lainnya	102.016.036.158,00	95.466.636.140,00	6,86
Jumlah Pendapatan BLU	**1.554.536.359.390,00**	**1.820.563.821.778,00**	**(14,61)**
Jumlah	**8.909.857.557.720,00**	**8.527.892.857.724,00**	**4,48**

Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan pendapatan sebesar 4,48% dari tahun 2021. Beberapa penyebab kenaikan realisasi PNBP tahun 2022 dibandingkan 2021, antara lain:

1. Dampak relaksasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pandemi (PPKM) COVID-19 berdampak pada meningkatnya layanan di sektor transportasi;
2. Kembali optimalnya penerimaan dari pemanfaatan aset/Barang Milik Negara; dan

3. Kembali optimalnya PNBP dari pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset.

Pendapatan yang memiliki nilai signifikan (di atas Rp2 triliun) adalah Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika sebesar Rp6.994.083.265.658,00, sedangkan pendapatan yang naik secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp17.137.828.280,00 dan Pendapatan dari Anggaran Lain-Lain sebesar Rp2.478.719.515,00. Rincian Pendapatan Operasional Per Jenis Pendapatan Per Eselon I Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.1**, Sedangkan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2022 (Audited) per Eselon I tersaji pada tabel berikut.

Tabel D.2 Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	2.115.427.047,00	1.322.400.499,00	59,97
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	1.205.669.222.860,00	1.434.666.571.630,00	(15,96)
Ditjen Perhubungan Laut	4.422.873.907.230,00	4.249.925.196.897,00	4,07
Ditjen Perhubungan Udara	1.233.013.846.743,00	1.346.533.167.451,00	(8,43)
Ditjen Perkeretaapian	784.504.938.679,00	435.057.170.971,00	80,32
Badan Kebijakan Transportasi	0,00	536.479.368,00	(100,00)
Badan PSDM Perhubungan	1.332.926.806.123,00	1.119.252.035.017,00	19,09
BPTJ	3.462.000.550,00	3.306.244.500,00	4,71
Satker Konsolidasi	(74.708.591.512,00)	(62.706.408.609,00)	19,14
Jumlah	**8.909.857.557.720,00**	**8.527.892.857.724,00**	**4,48**

D.1.2 Beban Operasional

Beban Operasional Rp41,16 Triliun

Jumlah Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp41.165.815.648.755,00 dan Rp37.407.539.939.635,00 .

Perincian per Jenis Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) tersebut terdiri dari:

Tabel D.3 Perincian per Jenis Beban Operasional Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Pegawai	4.287.773.407.778,00	3.938.418.143.717,00	8,87
Beban Persediaan	605.930.349.443,00	524.997.328.384,00	15,42
Beban Barang dan Jasa	8.884.932.961.930,00	7.887.701.345.900,00	12,64
Beban Pemeliharan	2.367.891.970.456,00	3.168.276.757.794,00	(25,26)
Beban Perjalanan Dinas	1.495.340.262.318,00	1.021.901.017.850,00	46,33

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.693.738.464.505,00	408.099.735.612,00	560,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.766.701.258.548,00	20.360.932.545.566,00	1,99
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	63.506.973.777,00	97.213.064.812,00	(34,67)
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**41.165.815.648.755,00**	**37.407.539.939.635,00**	**10,05**

Perincian Beban Operasional Per Jenis Beban Operasional Per Jenis Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.2**.

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp4,28 Triliun

Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp 4.287.773.407.778,00 dan Rp3.938.418.143.717,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) sebagai berikut.

Tabel D.4 Perincian Beban Pegawai untuk
Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.965.860.180.628,00	1.885.766.256.774,00	4,25
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3.667.860.000,00	672.351.800,00	445,53
Beban Honorarium	774.354.146,00	0,00	100
Beban Lembur	140.214.435.381,00	119.275.524.168,00	17,56
Beban Tunjangan Khusus Pegawai	1.641.212.870.264,00	1.475.764.630.429,00	11,21
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	536.043.707.359,00	456.939.380.546,00	17,31
Jumlah	**4.287.773.407.778,00**	**3.938.418.143.717,00**	**8,87**

Perincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.3.**

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp605,93 Miliar

Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp605.930.349.443,00 dan Rp524.997.328.384,00 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) Per Eselon I tersaji pada tabel berikut.

Tabel D.5 Beban Persediaan Per Eselon I untuk Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	467.936.477.306,00	359.292.156.604,00	30,24
Beban Persediaan amunisi	12.074.400,00	11.049.029,00	9,28
Beban Persediaan bahan baku	78.747.011.839,00	115.080.207.941,00	-31,57
Beban Persediaan barang dalam proses	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	109.699.750,00	1.080.260.304,00	-89,85
Beban Persediaan Lainnya	59.125.086.148,00	49.533.654.506,00	19,36
Jumlah	**605.930.349.443,00**	**524.997.328.384,00**	**15,42**

Perincian Beban Persediaan Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.4.**

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp8,89 Triliun

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp8.884.932.961.930,00 dan Rp7.887.701.345.900,00. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Perincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.6 Perincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Barang Operasional	1.878.663.748.411,00	1.755.077.816.322,00	7,04
Beban Barang Non Operasional	5.146.512.949.601,00	4.535.105.121.583,00	13,48
Beban Jasa	1.117.961.458.237,00	1.063.676.590.292,00	5,10
Beban Barang dan Jasa BLU	681.880.808.880,00	531.290.475.020,00	28,34
Beban Aset Ekstrakomptabel	59.913.996.801,00	2.551.342.683,00	2.248,33
Jumlah	**8.884.932.961.930,00**	**7.887.701.345.900,00**	**12,64**

Perincian Beban Barang dan Jasa Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.5**.

Perincian Beban Barang dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.7 Perincian Beban Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Per 31 Desember 2022 (Audited)

(dalam Rupiah)

MAK	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	92.466.131.556,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.267.801.260,00
525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.395.043.377,00
525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	65.716.439,00
	Jumlah	**108.194.692.632,00**

Adapun beban barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kementerian Perhubungan yang telah direalisasikan antara lain berupa:

1. Pembelian *handsanitizers*, *desinfectan*, sabun cair, suplemen vitamin, masker dan sejenisnya;
2. Pelaksanaan *Rapid Test* dan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) *Test* COVID-19;
3. Pembelian *thermogun*, sarung tangan, dan Alat Pengaman Diri (APD) Lainnya dalam rangka pencegahan virus COVID-19.

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp2,36 Triliun

Beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp2.367.891.970.456,00 dan Rp3.168.276.757.794,00. Beban pemeliharaan merupakan beban untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan, Beban Pemeliharaan Lainnya serta Beban Persediaan Suku Cadang untuk Pemeliharaan.

Tabel D.8 Perincian Beban Pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	523.965.982.603,00	474.444.961.838,00	10,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	817.333.711.347,00	829.232.844.785,00	(1,43)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	729.726.656.521,00	872.066.630.253,00	(16,32)
Beban Pemeliharaan Lainnya	30.596.492.789,00	24.647.351.398,00	24,14
Beban Pemeliharaan Badan Layanan Umum	74.041.956.102,00	74.748.640.992,00	(0,95)
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	14.345.294.037,00	17.176.558.610,00	(16,48)
Beban Persediaan Suku Cadang	176.366.026.787,00	871.311.895.006,00	(79,76)

Beban Aset Ekstrakomptabel	1.515.850.270,00	52.959.900,00	2.762,26
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penangan Pandemi COVID 19	0,00	4.594.915.012,00	(100,00)
Jumlah	**2.367.891.970.456,00**	**3.168.276.757.794,00**	**(25,26)**

Perincian Beban Pemeliharaan Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersaji pada **Lampiran D.6**.

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp1,49 Triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp1.495.340.262.318,00 dan Rp1.021.901.017.850,00. Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.9 Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	1.043.481.076.547,00	718.268.073.754,00	45,28
Beban Perjalanan Tetap	605.820.597,00	694.823.605,00	(12,81)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.447.202.841,00	62.542.946.670,00	27,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80.145.923.727,00	52.250.706.754,00	53,39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	225.024.456,00	133.703.778.692,00	(99,83)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	195.521.685.368,00	5.187.593.279,00	3.669,02
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	26.417.529.156,00	144.706.373,00	18.155,95
Beban Perjalanan BLU	4.454.850.021,00	47.335.533.717,00	(90,59)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	65.041.149.605,00	1.566.455.006,00	4.052,12
Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	206.400.000,00	(100,00)
Jumlah	**1.495.340.262.318,00**	**1.021.901.017.850,00**	**46,33**

Beban Perjalanan Dinas dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di Kementerian Perhubungan untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2022 (Audited) yaitu berupa perjalanan dinas dalam rangka kegiatan sosialisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan biaya transportasi kepada pegawai yang melaksanakan *work from office* saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebesar Rp65.041.149.605,00.

Perincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) tersaji dalam **Lampiran D.7.**

D.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp2.693.738.464.505,00 dan Rp408.099.735.612,00. Perincian Beban Barang

Masyarakat Rp2,69 Triliun

untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.10 Perincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	183.025.772.561,00	186.938.879.259,00	(2,09)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	80.115.851.560,00	188.158.895.521,00	(57,42)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	189.993.540,00	0,00	(100,00)
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	168.300.528.940,00	32.738.047.600,00	414,08
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.262.106.317.904,00	263.913.232,00	857.040,17
Jumlah	**2.693.738.464.505,00**	**408.099.735.612,00**	**560,07**

Perincian Beban Barag untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) tersaji dalam **Lampiran D.8.**

D.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp20,76 Triliun

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp20.766.701.258.548,00 dan Rp20.360.932.545.566,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Lainnya. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.11 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.292.255.312.867,00	4.482.974.281.004,00	(4,25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	869.720.377.700,00	824.429.966.445,00	5,49
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.250.134.426.064,00	13.027.196.170.477,00	1,71
Beban Penyusutan Irigasi	915.037.148.449,00	938.529.773.783,00	(2,50)
Beban Penyusutan Jaringan	550.084.503.412,00	527.094.705.955,00	4,36
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.501.194.040,00	10.521.345.547,00	(38,21)
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	415.515.494.741,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	659.431.712,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	241.126.181.039,00	292.105.746.555,00	(17,45)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	167.146.394.248,00	190.221.528.886,00	(12,13)
Jumlah Penyusutan	20.708.180.464.272,00	20.293.073.518.652,00	2,05

Beban Amortisasi Hak Cipta	2.608.370,00	2.608.370,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	5.294.118,00	2.647.059,00	100,00
Beban Amortisasi Software	56.383.248.741,00	64.856.621.496,00	(13,06)
Beban Amortisasi Lisensi	2.101.451.772,00	2.925.915.714,00	(28,18)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	28.191.275,00	36.853.775,00	(23,51)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	34.380.500,00	(100,00)
Jumlah Amortisasi	58.520.794.276,00	67.859.026.914,00	(13,76)
Jumlah	**20.766.701.258.548,00**	**20.360.932.545.566,00**	**1,99**

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per jenis beban per Eselon I sampai dengan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) tersaji pada **Lampiran D.9.**

D.1.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp63,51 Miliar

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp63.506.973.777,00 dan Rp97.213.064.812,00

Perincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.12 Perincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNBP	61.368.658.050,00	81.311.927.065,00	(24,53)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	138.967.003,00	81.564.908,00	70,38
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	12.500,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	8.250,00	744.575,00	(98,89)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	2.999.577,00	0,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	715.544.993,00	3.977.632.745,00	(82,01)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	288.930.754,00	1.187.799.126,00	(75,68)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	239.664.064,00	484.900.373,00	(50,57)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	308.241,00	0,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	141.820.567,00	330.495.380,00	(57,09)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	172.626.304,00	5.828.825.828,00	(97,04)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	47.607.991,00	3.343.557.944,00	(98,58)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	389.811.483,00	496.604.368,00	(21,50)

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	26.500,00	169.000.000,00	(99,98)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**63.506.973.777,00**	**97.213.064.812,00**	**(34,67)**

Perincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) tersaji pada **Lampiran D.10.**

D.1.2.9 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Rp0,00

Beban Lain-lain merupakan beban untuk mencatat pengeluaran lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis beban di atas. Jumlah Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.1.2.10 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional (Rp32,25) Triliun

Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

Tabel D.13 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Pendapatan Operasional	**8.909.857.557.720,00**	**8.527.892.857.724,00**	25,04
Pendapatan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.663.524.099.211,00	8.527.892.857.724,00	25,04
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Beban Operasional	**41.165.815.648.755,00**	**37.407.539.939.635,00**	10,34
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**(32.255.958.091.035,00)**	**(28.879.647.081.911,00)**	**11,69**

D.2 Kegiatan Non Operasional

D.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar (Rp2,35) Triliun

Pos Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp2.357.257.011.577,00) dan (Rp1.098.479.567.882,00). Perincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar adalah sebagai berikut.

Tabel D.14 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	96.414.567.322,00	29.400.290.126,00	227,94
Beban Pelepasan Aset Non lancar	2.453.671.578.899,00	1.127.879.858.008,00	117,55
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	**(2.357.257.011.577,00)**	**(1.098.479.567.882,00)**	**114,59**

Perincian Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar sebesar Rp96.414.567.322,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.15 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) Per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Pendapatan Dari Penjualan Tanah, Gedung, JIJ dan Bangunan	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN lainnya	Jumlah
Sekretariat Jenderal	**0,00**	**524.507.591,00**	**1.267.805.925,00**	**1.792.313.516,00**
Inspektorat Jenderal	**0,00**	**0,00**	**696.176.795,00**	**696.176.795,00**
Ditjen Perhubungan Darat	**68.888.888,00**	**645.716.991,00**	**1.646.779.029,00**	**2.361.384.908,00**
Ditjen Perhubungan Laut	**109.128.887,00**	**3.658.583.678,00**	**4.475.259.172,00**	**8.242.971.737,00**
Ditjen Perhubungan Udara	**32.601.000,00**	**2.430.923.863,00**	**1.823.634.583,00**	**4.287.159.446,00**
Ditjen Perkeretaapian	**0,00**	**1.809.040.478,00**	**75.117.981.972,00**	**76.927.022.450,00**
Badan Kebijakan Transportasi	**0,00**	**333.609.003,00**	**0,00**	**333.609.003,00**
Badan PSDM Perhubungan	**289.852.777,00**	**1.183.958.145,00**	**300.118.545,00**	**1.773.929.467,00**
BPTJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah	**500.471.552,00**	**10.586.339.749,00**	**85.327.756.021,00**	**96.414.567.322,00**

Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset Non lancar sebesar Rp2.453.671.578.899,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.16 Beban Pelepasan Aset Nonlancar
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	8.248.913.815,00	108.427.390.410,00	(92,39)
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	648.155.355.058,00	411.457.763.919,00	57,53
Ditjen Perhubungan Laut	235.865.050.749,00	328.784.480.786,00	(28,26)
Ditjen Perhubungan Udara	1.066.465.304.645,00	218.558.785.988,00	387,95
Ditjen Perkeretaapian	450.193.640.028,00	20.913.400,00	2.152.556,38
Badan Kebijakan Transportasi	183.235.250,00	74.266.500,00	146,73
Badan PSDM Perhubungan	44.545.641.854,00	43.804.816.805,00	1,69
BPTJ	14.437.500,00	16.751.440.200,00	(99,91)
Jumlah	**2.453.671.578.899,00**	**1.127.879.858.008,00**	**117,55**

D.2.2 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp837,04 Miliar

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp837.044.344.831,00 dan Rp150.798.655.024,00. Perincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel D.17 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	915.199.908.145,00	152.763.794.982,00	499,09
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	78.155.563.314,00	1.965.139.958,00	3.877,10
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**837.044.344.831,00**	**150.798.655.024,00**	**455,07**

Perincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp915.199.908.145,00 tersaji pada **Lampiran D.11**.
Sedangkan untuk Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I sebesar Rp 78.155.563.314,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.18 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam *Rupiah)*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	15.724.532,00	2.373.649,00	562,46
beban Penyesuaian Nilai Persediaan	70.566.527.259,00	0,00	100,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	4.857.196.952,00	1.641.220.090,00	195,95
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.716.114.571,00	321.546.219,00	744,70
Jumlah	**78.155.563.314,00**	**1.965.139.958,00**	**3.877,10**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terbentuk dari Akun Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan RI/Atase (521214) sebesar Rp15.724.532,00, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) sebesar Rp70.566.527.259,00, Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar Rp4.857.196.952,00, dan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) sebesar Rp2.716.114.571,00. Perincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I per Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) tersaji pada **Lampiran D.12.**

D.2.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (Rp1,52) Triliun

Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas, Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp 1.520.212.666.746) dan (Rp947.680.912.858,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel D.19 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	**(2.357.257.011.577,00)**	**(1.098.479.567.882,00)**	**114,59**
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	96.414.567.322,00	29.400.290.126,00	227,94
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	2.453.671.578.899,00	1.127.879.858.008,00	117,55
Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**837.044.344.831,00**	**150.798.655.024,00**	**455,07**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	915.199.908.145,00	152.763.794.982,00	499,09
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	78.155.563.314,00	1.965.139.958,00	3.877,10
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(1.520.212.666.746,00)**	**(947.680.912.858,00)**	**60,41**

D.3. Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit) – LO (Rp33,77) Triliun

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah (Rp33.776.170.757.781,00) dan (Rp29.827.327.994.769,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel D.20 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional
Per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (*Audited*)	31 Desember 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Surplus Defisit dari Kegiatan Operasional	(32.255.958.091.035,00)	(28.879.647.081.911,00)	11,69
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(1.520.212.666.746,00)	(947.680.912.858,00)	60,41
Surplus Defisit Laporan Operasional	**(33.776.170.757.781,00)**	**(29.827.327.994.769,00)**	**13,24**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp512,14 triliun

Nilai ekuitas Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing masing sebesar Rp512.142.042.910.783,00 dan Rp517.472.969.484.329,00. Rincian Ekuitas Awal per Eselon I Tersaji pada tabel berikut:

Tabel E.1. Ekuitas Awal Per Eselon I Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	2.463.610.267.729,00	2.693.525.670.397,00	(8,54)
Inspektorat Jenderal	10.905.507.090,00	9.762.544.956,00	11,71
Ditjen Perhubungan Darat	22.026.261.145.825,00	21.381.983.527.128,00	3,01
Ditjen Perhubungan Laut	60.132.583.638.212,00	59.894.096.563.455,00	0,40
Ditjen Perhubungan Udara	161.331.802.955.666,00	166.023.523.970.039,00	(2,83)
Ditjen Perkeretaapian	245.305.344.451.470,00	249.260.539.325.485,00	(1,59)
Badan Kebijakan Transportasi	77.605.138.689,00	71.253.603.288,00	8,91
Badan PSDM Perhubungan	20.194.233.860.593,00	17.604.119.425.186,00	14,71
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	599.695.945.509,00	534.164.854.395,00	12,27
Ekuitas Awal	**512.142.042.910.783,00**	**517.472.969.484.329,00**	**(1,03)**

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/ Defisit LO (Rp33,78) triliun

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebesar (Rp33.776.170.757.781,00) dan (Rp29.827.327.994.769,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian Surplus/Defisit LO per Eselon I Tersaji pada tabel berikut.

Tabel E.2. Surplus/Defisit Per Eselon I Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	(531.777.547.659,00)	(659.265.487.156,00)	(19,34)
Inspektorat Jenderal	(86.239.533.526,00)	(76.765.114.814,00)	12,34
Ditjen Perhubungan Darat	(6.539.537.769.812,00)	(3.571.012.363.492,00)	83,13
Ditjen Perhubungan Laut	(4.183.574.670.259,00)	(4.155.268.481.557,00)	0,68
Ditjen Perhubungan Udara	(7.649.559.410.185,00)	(6.804.866.420.824,00)	12,41
Ditjen Perkeretaapian	(12.007.634.754.122,00)	(12.204.553.254.686,00)	(1,61)
Badan Kebijakan Transportasi	(101.258.125.506,00)	(139.255.819.919,00)	(27,29)
Badan PSDM Perhubungan	(2.460.474.653.280,00)	(1.995.066.390.490,00)	23,33
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(216.114.293.432,00)	(221.274.661.831,00)	(2,33)
Surplus/Defisit LO	**(33.776.170.757.781,00)**	**(29.827.327.994.769,00)**	**13,24**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas (Rp1,24) triliun

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp1.236.138.206.150,00) dan (Rp2.028.445.125.180,00).

Tabel E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	77.090.109.398,00	(254.517.565.050,00)	(130,29)
Koreksi atas Reklasifikasi	7.536.400.947,00	973.732.066.800,00	(99,23)
Selisih Revaluasi Aset	0,00	34.684.707.171,00	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(3.078.705.342.988,00)	(2.557.734.885.646,00)	20,37
Lain-Lain	1.757.940.626.493,00	(224.609.448.455,00)	(882,67)
Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas	**(1.236.138.206.150,00)**	**(2.028.445.125.180,00)**	**(39,06)**

Tabel E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	(146.818.867,00)	(112.376.892.199,00)	(99,87)
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(139.008.456.686,00)	(35.089.265.005,00)	296,16
Ditjen Perhubungan Laut	(43.572.615.271,00)	(633.715.811.410,00)	(93,12)
Ditjen Perhubungan Udara	(146.887.558.267,00)	(1.269.202.624.612,00)	(88,43)
Ditjen Perkeretaapian	(942.019.629.279,00)	108.724.228.012,00	(966,43)
Badan Kebijakan Transportasi	(14.843.517,00)	(60.876.271,00)	(75,62)
Badan PSDM Perhubungan	36.222.996.184,00	(86.171.542.585,00)	(142,04)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(711.280.447,00)	(552.341.110,00)	28,78
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	**(1.236.138.206.150,00)**	**(2.028.445.125.180,00)**	**(39,06)**

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp77,09 miliar

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp77.090.109.398,00 dan (Rp254.517.565.050,00).

Tabel E.5. Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	28.602.210,00	880.000,00	3150,25
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	27.548.412.313,00	(341.638.622.549,00)	(108,06)
Ditjen Perhubungan Laut	23.104.115.850,00	15.965.203.308,00	44,72
Ditjen Perhubungan Udara	93.033.182,00	993.952.834,00	(90,64)
Ditjen Perkeretaapian	26.009.886.023,00	70.084.292.798,00	(62,89)
Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
Badan PSDM Perhubungan	306.059.820,00	76.728.559,00	298,89
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	**77.090.109.398,00**	**(254.517.565.050,00)**	**(130,29)**

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Rp7,54 miliar

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Aset

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset merupakan koreksi untuk mencatat reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya. Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp7.536.400.947,00 dan Rp973.732.066.800,00.

Tabel E.6. Koreksi Atas Reklasifikasi Aset per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	17.401.000,00	(503.000,00)	(3559,44)
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(6.933.253.954,00)	1.165.245.808.006,00	(100,60)
Ditjen Perhubungan Laut	92.502.325,00	(2.896.295.900,00)	(103,19)
Ditjen Perhubungan Udara	15.834.094.069,00	(108.952.172.903,00)	(114,53)
Ditjen Perkeretaapian	(1.922.226.324,00)	(39.962.469.041,00)	(95,19)
Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
Badan PSDM Perhubungan	447.883.831,00	(39.699.990.362,00)	(101,13)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	**7.536.400.947,00**	**973.732.066.800,00**	**(99,23)**

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset/koreksi atas revaluasi sebelumnya. Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.684.707.171,00.

Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan,

Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* telah disajikan hasil revaluasi BMN Tahun 2017-2018 dan revaluasi ulang BMN Tahun 2019 namun masih ditemukenali adanya barang tidak ditemukan. Penyelesaian perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020. Selisih Revaluasi Aset Tetap pada tahun 2021 merupakan hasil revaluasi kembali atas Barang Tidak Ditemukan (BTD) pada satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu dan UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa.

Tabel E.7. Selisih Revaluasi Aset Tetap per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Laut	0,00	34.645.546.250,00
Ditjen Perhubungan Udara	0,00	39.160.921,00
Ditjen Perkeretaapian	0,00	0,00
Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00
Badan PSDM Perhubungan	0,00	0,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	**0,00**	**34.684.707.171,00**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp3,08) triliun

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi penilaian aset Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp3.078.705.342.988,00) dan (Rp2.557.734.885.646,00). Koreksi tersebut antara lain karena pengembalian Belanja Modal yang mempengaruhi nilai Aset, proporsi supervisi ke aset kontruksinya, dan reklasifikasi akun menjadi aset yang sebenarnya Tahun Anggaran 2022 (*Audited*).

Tabel E.8. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	(52.326.677,00)	(111.531.201.450,00)	(99,95)
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(151.540.628.714,00)	(613.158.283.932,00)	(75,29)
Ditjen Perhubungan Laut	(1.395.138.810.725,00)	(678.971.537.758,00)	105,48
Ditjen Perhubungan Udara	(290.305.251.429,00)	(1.167.842.965.391,00)	(75,14)
Ditjen Perkeretaapian	(1.267.397.669.991,00)	61.813.189.711,00	(2150,37)
Badan Kebijakan Transportasi	(12.224.989,00)	(60.876.271,00)	(79,92)
Badan PSDM Perhubungan	26.452.849.984,00	(47.433.179.445,00)	(155,77)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(711.280.447,00)	(550.031.110,00)	29,32
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	**(3.078.705.342.988,00)**	**(2.557.734.885.646,00)**	**20,37**

Koreksi Lain-Lain Rp1,76 Triliun

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp1.757.940.626.493,00 dan (Rp224.609.448.455,00). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel E.9. Koreksi Lain-Lain per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	(140.495.400,00)	(846.067.749,00)	(83,39)
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(8.082.986.331,00)	(245.538.166.530,00)	(96,71)
Ditjen Perhubungan Laut	1.328.369.577.279,00	(2.458.727.310,00)	(54126,71)
Ditjen Perhubungan Udara	127.490.565.911,00	6.559.399.927,00	1843,63
Ditjen Perkeretaapian	301.290.381.013,00	16.789.214.544,00	1694,55
Badan Kebijakan Transportasi	(2.618.528,00)	0,00	0,00
Badan PSDM Perhubungan	9.016.202.549,00	884.898.663,00	918,90
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	**1.757.940.626.493,00**	**(224.609.448.455,00)**	**(882,67)**

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp24,38 triliun

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp24.380.877.422.279,00 dan Rp26.524.846.546.403,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Tabel E.10. Transaksi Antar Entitas per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	326.323.135.451,00	541.726.976.687,00	(39,76)
Inspektorat Jenderal	85.447.375.673,00	77.908.076.948,00	9,68
Ditjen Perhubungan Darat	4.307.488.178.504,00	4.250.379.247.194,00	1,34
Ditjen Perhubungan Laut	4.461.036.048.573,00	5.027.471.367.724,00	(11,27)
Ditjen Perhubungan Udara	6.215.636.402.101,00	3.382.348.031.063,00	83,77
Ditjen Perkeretaapian	6.392.265.746.313,00	8.140.634.152.659,00	(21,48)
Badan Kebijakan Transportasi	95.780.913.725,00	145.668.231.591,00	(34,25)
Badan PSDM Perhubungan	2.259.787.455.096,00	4.671.352.368.482,00	(51,62)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	237.112.166.843,00	287.358.094.055,00	(17,49)
Transaksi Antar Entitas	**24.380.877.422.279,00**	**26.524.846.546.403,00**	**(8,08)**

Tabel E.11. Transaksi Antar Entitas per Jenis Transaksi

(dalam Rupiah)

Transaksi	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Ditagihkan ke Entitas Lain		32.434.636.022.874,00	(3,72)
Diterima dari Entitas Lain	(7.348.647.418.840,00)	(6.674.742.050.411,00)	10,10
Transfer Masuk	20.726.633.661.872,00	17.259.624.056.892,00	20,09
Transfer Keluar	(20.727.700.358.059,00)	(17.298.557.398.903,00)	19,82
Pengesahan Hibah Langsung	478.656.852.281,00	789.624.381.080,00	(39,38)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	22.381.283.500,00	15.540.859.420,00	44,02
Setoran Surplus BLU	0,00	(1.279.324.549,00)	(100,00)
Jumlah	**24.380.877.422.279,00**	**26.524.846.546.403,00**	**(8,08)**

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (Rp7,35 triliun) Ditagihkan ke Entitas Lain Rp31,23 triliun

Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), DDEL sebesar (Rp7.348.647.418.840,00) sedangkan DKEL sebesar Rp31.229.553.401.525,00.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk Rp20,73 triliun Transfer Keluar Rp20,73 triliun

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp20.727.700.358.059,00 dan Transfer Keluar dengan total sebesar Rp20.726.633.661.872,00. Perincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk per Eselon I sebagai berikut.

Tabel E.12 Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per Eselon I

No	Eselon 1	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
1.	Sekretariat Jenderal	149.713.358.560,00	304.139.122,00	149.409.219.438,00
2.	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	1.328.479.021.155,00	1.289.851.415.913,00	38.627.605.242,00
4.	Ditjen Perhubungan Laut	355.790.940.904,00	397.562.262.694,00	(41.771.321.790,00)
5.	Ditjen Perhubungan Udara	234.297.859.930,00	383.596.800.279,00	(149.298.940.349,00)
6.	Ditjen Perkeretaapian	18.504.826.261.197,00	18.504.583.601.497,00	242.659.700,00
7.	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
8.	Badan PSDM Perhubungan	154.592.916.313,00	150.697.967.367,00	3.894.948.946,00
9.	BPTJ	0,00	37.475.000,00	(37.475.000,00)
Jumlah		**20.727.700.358.059,00**	**20.726.633.661.872,00**	**1.066.696.187,00**

Penjelasan mengenai Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk tersaji pada **Lampiran E.1**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp478,67 miliar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp478.656.852.281,00. Pengesahan Hibah Langsung per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.13 Pengesahan Hibah Langsung per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	306.199.642.919,00	102.572.019.724,00	198,52
Ditjen Perhubungan Laut	4.953.415.000,00	40.844.509.106,00	(87,87)
Ditjen Perhubungan Udara	163.509.778.462,00	645.840.705.955,00	(74,68)
Ditjen Perkeretaapian	3.938.885.900,00	0,00	0,00
Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00
Badan PSDM Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	55.130.000,00	367.146.295,00	(84,98)
Pengesahan Hibah Langsung	**478.656.852.281,00**	**789.624.381.080,00**	**(39,38)**

1. Pengesahan Hibah Langsung di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp306.199.642.919,00 berasal dari Hibah Masuk Aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Perincian Pengesahan Hibah Langsung pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4.953.415.000,00 sesuai dengan rincian tabel dibawah ini.

Tabel E.14. Perincian Pengesahan Hibah Langsung Pada DItjen Perhubungan Laut

(dalam Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Disnav Manado/Bitung	Tanah	15.107.500,00
KSOP Teluk Bayur	Tanah	2.430.720.000,00
KSOP Pulang Pisau	Barang	471.399.000,00
PPLP Tanjung Uban	Barang dan Tanah	88.630.000,00
UPP Ampana	Tanah	1.107.558.500,00
UPP Pomalaa	Barang	840.000.000,00
Total Pengesahan		**4.953.415.000,00**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00
Jumlah		**4.953.415.000,00**

3. Pengesahan Hibah Langsung pada Ditjen Perhubungan Udara dengan total Rp163.509.778.462,00 terdapat pada 14 (empat belas) satker, dengan nilai terbesar terdapat pada satker berikut:

   a) Kantor UPBU Rendani sebesar Rp54.492.463.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa Pembangunan *Box Cover* untuk Perpanjangan *Runway* Bandara Rendani 500 m Tahap I

   b) Kantor UPBU Lagaligo sebesar Rp20.717.761.127,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Luwu berupa tanah luas 871.200 m^2, bangunan gedung kantor bandara, bangunan pos jaga, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara permanen, bangunan tempat parkir, mess, landasan pacu, sumur resapan, jaringan listrik, dan instalasi listrik

   c) Kantor UPBU Soa sebesar Rp19.194.594.784,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Ngada berupa tanah seluas 111.379 m^2, alat kantor dan rumah tangga, gedung dan bangunan, jalan, instalasi, dan jaringan

   d) Kantor UPBU Morowali sebesar Rp18.110.901.720,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Morowali berupa Tanah Lapangan Terbang Perintis seluas 1.605.183 m^2

   e) Kantor UPBU Mulia sebesar Rp10.879.408.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berupa bangunan terminal penumpang

4. Pengesahan Hibah Langsung pada Ditjen Perkeretaapian yaitu di Kantor Pusat DJKA berupa Jalan dan Jembatan sebesar Rp1.249.790.000,00 dan Tanah sebesar Rp2.689.095.900,00 sehingga total pengesahan Hibah Langsung DJKA Tahun 2022 sebesar Rp3.938.995.900,00.

5. Pengesahan Hibah Langsung pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp55.130.000,00 berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel E.15. Perincian Pengesahan Hibah Langsung Pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

(dalam Rupiah)

No.	Deskripsi Barang	Qty.	Satuan	Harga	Total Harga
1.	Rambu 75 Peringatan Penyeberangan Pejalan Kaki	2	Unit	3.850.000,00	7.700.000,00
2.	Rambu 75 Larangan Berhenti	2	Unit	3.850.000,00	7.700.000,00
3.	Rambu 75 Larangan Parkir	1	Unit	3.850.000,00	3.850.000,00
4.	Rambu 75 Petunjuk Pejalan Kaki	2	Unit	3.850.000,00	7.700.000,00
5.	Rambu 75 Larangan Putar Balik	2	Unit	3.850.000,00	7.700.000,00
6.	Rambu 75 Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	1	Unit	3.850.000,00	3.850.000,00
7.	Rambu 75 Peringatan Hati-hati	2	Unit	3.850.000,00	7.700.000,00
8.	Marka Zebra Cross	13	M2	470.000,00	6.110.000,00
9.	Marka Pita Penggaduh	6	M2	470.000,00	2.820.000,00
Subtotal					**55.130.000,00**

E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL Rp22,38 miliar

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima pada tahun 2020 dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan baru dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah pada tahun 2021. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp22.381.283.500,00. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran yang Lalu ada di beberapa Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Terdapat pada 3 (tiga) Satker Ditjen Perhubungan Laut. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp8.031.190.000,00 sesuai dengan rincian tabel dibawah ini:

Tabel E.16. Perincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Pada DItjen Perhubungan Laut

(dalam Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
KSOP Kuala Tanjung	Gedung & Bangunan	3.954.170.000
UPP Ampana	Tanah	301.980.000
UPP Calang	Tanah	3.775.040.000
Total Pengesahan		**8.031.190.000**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00
Jumlah		**8.031.190.000**

2. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran yang lalu di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara berasal dari Kantor UPBU Buli sebesar Rp14.350.093.500,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berupa lahan bandara seluas 672.526 m^2, gedung VIP, gedung terminal, apron, runway strip, parkir terminal, fasilitas penunjang, mesin genset 50 KVA, taman halaman, dan pagar sesuai BAST nomor BA.270 Tahun 2018 dan 499.553/27/02/2018 tanggal 28 Februari 2018. Hibah tersebut baru dilakukan pencatatan tahun 2022 karena data dukung yang baru terlengkapi dan disahkan pada 31 Desember 2022 dengan nomor persetujuan MPHLBJS 87949106790960105.

E.5.5 Setoran Surplus BLU

Setoran Surplus BLU Rp0,00

Setoran surplus BLU digunakan untuk mencatat perubahan Ekuitas BLU atas transaksi setoran surplus Kas BLU ke Kas Negara atau pengembaliannya ke Kas BLU. Setoran Surplus BLU Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1.279.324.549,00).

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas (Rp10,63) triliun

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp10.631.431.541.652,00) dan (Rp5.330.926.573.546,00)

Tabel E.17 Kenaikan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit - LO	(33.776.170.757.781,00)	(29.827.327.994.769,00)	13,24
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(1.236.138.206.150,00)	(2.028.445.125.180,00)	(39,06)
Transaksi Antar Entitas	24.380.877.422.279,00	26.524.846.546.403,00	(8,08)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	**(10.631.431.541.652,00)**	**(5.330.926.573.546,00)**	**99,43**

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp501,51 triliun

Nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp501.510.611.369.131,00 dan Rp512.142.042.910.783,00

Tabel E.18 Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (*Audited*)	Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)	% Naik (turun)
Ekuitas Awal	**512.142.042.910.783,00**	**517.472.969.484.329,00**	**(1,03)**
Surplus/Defisit - LO	(33.776.170.757.781,00)	(29.827.327.994.769,00)	13,23
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(1.236.138.206.150,00)	(2.028.445.125.180,00)	(39,06)
Transaksi Antar Entitas	24.380.877.422.279,00	26.524.846.546.403,00	(8,08)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(10.631.431.541.652,00)	(5.330.926.573.546,00)	99,43
Ekuitas Akhir	**501.510.611.369.131,00**	**512.142.042.910.783,00**	**(2,08)**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Capaian *Output* Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Selama periode Tahun Anggaran 2022, *output* strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Perhubungan antara lain berupa layanan angkutan laut perintis, pembangunan bandar udara, layanan angkutan penyeberangan perintis, pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkeretaapian, peningkatan Terminal Tipe-A, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, pengadaan perlengkapan jalan, rehabilitasi pelabuhan sungai, dan pengadaan kapal penyeberangan perintis. Adapun perincian capaian *output* strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran F.1.**

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga diamanahi untuk melaksanakan *Major Project* Tahun 2022 sesuai Daftar Prioritas Proyek pada Lampiran Kepmen Bappenas Nomor: KEP.150/M.PPN/HK/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yaitu:

a. *Major Project* 10 Destinasi Wisata Baru
b. *Major Project* 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter
c. *Major Project* Pengembangan Kota Baru
d. *Major Project* Ibu Kota Negara yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara. Kegiatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan kegiatan telah masuk di dalam Program Riset dan Inovasi IPTEK, yang saat ini posisinya telah dialihkan ke BRIN (baik kegiatan dan anggaran)
e. *Major Project* Pengembangan Wilayah Metropolitan yang terdiri dari 8 kegiatan
f. *Major Project* Pemulihan pasca bencana
g. *Major Project* Sistem Angkutan Umum Massal
h. *Major Project* Wilayah Adat Papua
i. *Major Project* Jembatan Udara 37 Rute di Papua
j. *Major Project* Kereta Api Makassar-Pare-Pare
k. *Major Project* KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
l. *Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
m. *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional
n. *Major Project* Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan Transportasi
o. *Major Project* Food Estate
p. *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0
q. *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Rincian realisasi *major project* baik yang terlaksana maupun belum terlaksana secara rinci diuraikan dalam **Lampiran F.2.**

2. Pengungkapan Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2022

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp277.657.816.000,00 dimana untuk pagu Belanja Non BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp273.136.097.000,00 dan Belanja BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.521.719.000,00. Sedangkan total realisasi bersih Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp267.998.138.365,00 dengan realisasi Belanja Non BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp263.826.114.549,00 dan realisasi Belanja BLU Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.172.023.816,00.

Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 diantaranya adalah terkait pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh, biaya komunikasi pulsa atau paket internet Aparatur Sipil Negara (ASN), biaya pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan 1 tahun, biaya penyemprotan desinfektan/pengadaan bilik desinfektan, pengadaan masker, *hand sanitizer*, *thermogun,* APD, dan alat *rapid test* yang tidak memenuhi kriteria peralatan dan mesin/persediaan.

Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp597.238.000,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 seperti pengadaan alat kesehatan (yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin), pengadaan *thermogun*/*thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, serta pengadaan bilik desinfektan permanen/portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp39.709.586.992,00 pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muntok, sebesar Rp24.637.597.072,00 diantaranya merupakan belanja pembangunan fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Ular yang bersumber dari SBSN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinjai merupakan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kambuno. Perincian pagu dan realisasi penanganan COVID-19 per Satker Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran F.3.**

Dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu PEN sebesar Rp8.841.882.792.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.005.495.297.035,00 (90,54%) yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp2.319.668.343.552,00 (28,98%) dan belanja modal sebesar Rp5.685.826.953.483,00 (71,02%). Adapun perincian pagu anggaran dan realisasi PEN per Satker Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran F.4.**

Pada tahun 2022, masih terdapat beberapa akun yang masih terdampak pandemi COVID-19 antara lain:

a. Pendapatan atas kontribusi tetap perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN pada Ditjen Perhubungan Udara sehubungan penangguhan pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022

b. Pendapatan atas *Track Access Charge* (TAC) Perkeretaapian Tahun 2022 dari PT. KAI, PT. KCI, dan PT. Railink. TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian

3. Prioritas Nasional Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Kementerian Perhubungan melaksanakan Program Prioritas Nasional (PN) pada 3 bidang yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 02), meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 03), dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 05). Adapun perincian capaian *output* Prioritas Nasional per Satker Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran F.5.**

4. Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat empat fokus pembangunan sektor perhubungan atau transportasi yang menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi, yakni:

a. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung mobilitas perkotaan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, yang di dalamnya memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan kebutuhan anggarannya.

Adapun dalam pencapaian Sasaran Strategis sudah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional sebesar 100,865%. Pencapaian ini diukur berdasarkan indikator kinerja Rasio Konektivitas Nasional.
SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi sebesar 103,355%. Pencapaian ini diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi dan On Time Performance Layanan Transportasi.
SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi sebesar 114,643%, Pencapaian ini diukur berdasarkan indikator kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan.

Dalam mencapai target kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar 98,033% atau senilai Rp32.819.651.102.503,00 dari Rp33.478.235.915.000,00. Sepanjang 2022, Kementerian Perhubungan dan unit kerja telah menerima berbagai penghargaan, sebagai apresiasi dari pihak eksternal yang menilai kinerja Kementerian Perhubungan, diantaranya:

a. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (9 kali berturut-turut)
b. Penghargaan sebagai Kementerian dengan Indeks Kepatuhan Kategori Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
c. Peringkat Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi 2022 dari Kementerian Investasi/BKPM
d. Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Penyiaran Publik

e. Predikat Terbaik Kategori Pengelolaan Komunikasi dan Media Massa dalam ajang TMA 2022 yang diadakan oleh Tempo Group
f. Penghargaan Bhumandala Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022 Simpul Jaringan Terbaik kategori Kementerian/Lembaga (Bhumandala Ariti)
g. Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi atas penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir dan Berkepastian Hukum kategori K/L
h. Predikat WBK dari Kementerian PAN-RB kepada 3 UPT Terminal Guntur Melati Garut Jawa Barat, Kantor OP Utama Makassar, dan Poltrada Bali
i. Apresiasi dari berbagai pihak atas penyelenggaraan mudik yang aman dan lancar setelah 2 tahun tidak dilaksanakan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kepercayaan publik sektor transportasi, yakni konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi. Hal ini tercermin melalui upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan/penyederhanaan organisasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Perhubungan Tahun 2022 sebagaimana **Lampiran F.6.**

5. Kendala Penyerapan Anggaran dan Realisasi PNBP Tahun 2022

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.821.361.951.275,00 atau 98,04% dari anggaran belanja sebesar Rp33.478.235.915.000,00

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran periode Tahun 2022 antara lain:

a. Kenaikan PPN 11% berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% berakibat pada penyesuaian/addendum kontrak untuk menyesuaikan nilai potongan pajak;
b. Terdapat pekerjaan dalam proses penyusunan dokumen lelang serta proses e-katalog, sehingga tidak dapat segera dilaksanakan;
c. Terdapat pekerjaan yang belum dapat berkontrak karena sedang proses persetujuan Kontrak Tahun Jamak, karena proses persetujuan melibatkan proses administratif terkait persyaratan hukum, keuangan, dan teknis;
d. Masih ada sisa blokir *Automatic Adjustment* dan blokir selain *Automatic Adjustment* yang berpotensi menjadi kendala dalam penyerapan anggaran;
e. Terdapat kegiatan yang sedang dalam proses revisi *tagging* Rincian Output Pemulihan Ekonomi Nasional (RO PEN). Proses revisi melibatkan proses administratif yang cukup memakan waktu; dan
f. Adanya peralihan aplikasi keuangan ke SAKTI Kemenkeu sehingga masih perlu adaptasi atau penyesuaian. Peralihan ke aplikasi SAKTI berakibat pada perubahan tata cara dan proses bisnis, dimana jika terdapat kesalahan terkait aplikasi, penyelesaiannya harus diselesaikan secara sistem oleh pengembang aplikasi dari Kementerian Keuangan.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.029.493.587.448,00 00 atau mencapai 102,49% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.810.369.418.000,00. Dari capaian yang melebihi target tersebut, masih terdapat hal-hal yang masih menjadi perhatian dalam pencapaian target PNBP sampai dengan 31 Desember 2022 antara lain:

a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe A yang disebabkan masih dalam proses pengalihan aset dari Pemda dan revitalisasi pada beberapa terminal, dan pemanfaatan atas pengelolaan beberapa terminal tipe A masih dalam proses KPBU;
b. Pengalihan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan lokal kepada pemerintah daerah secara bertahap berdampak pada penurunan pendapatan;
c. Industri penerbangan di Indonesia belum sepenuhnya pulih sehingga penerimaan PNBP sektor kebandarudaraan juga belum optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah armada dan SDM maskapai penerbangan terbatas dalam melayani penumpang juga berpeengaruh terhadap penerimaan PNBP.

6. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

a. Dasar Hukum
   1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
   3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Mekanisme Pelaksanaan KSP

Pada Ditjen Perhubungan Laut, Kerjasama pemanfaatan BMN dilaksanakan pada KSOP Kelas IV Probolinggo, KSOP Kelas IV Sintete, KSOP Kelas III Labuan Bajo, KSOP Kelas IV Anggrek, KSOP Kelas IV Badas, KSOP Kelas IV Bima, KSOP Kelas IV Waingapu, dan UPP Kelas II Garongkong, dengan perincian sebagai berikut :

1) Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Kelas IV Probolinggo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan dengan penjelasan sebagai berikut.
   a) Obyek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m^2 dan dermaga seluas 24.161,5 m^2 dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,00.
   b) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara.
   c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
   d) Kontribusi kepada negara berupa:
      (1) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya, dan Kontribusi Tetap untuk tahun kedua adalah sebesar Rp4.553.879.380,00;.
      (2) Pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (*revenue*) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp42.300.000.000,00 tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.
   e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda

paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

2) Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Kelas IV Sintete dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI c.q. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete (Sekarang KSOP Kelas IV Sintete) dengan penjelasan sebagai berikut.
   a) Obyek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m^2 terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Desa Sintete, Kecamatan Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp8.115.306.000,00 (delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
   b) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.
   c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
   d) Kontribusi kepada negara berupa Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap untuk tahun pertama adalah sebesar Rp88.681.112,00.
   e) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari *net cash flow* dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000,00. *Net cash flow* dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.
   f) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
3) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada KSOP Kelas III Labuan Bajo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-427/MK.6/2021 Tanggal 31 Desember 2021 hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo (Sekarang KSOP Kelas III Labuan Bajo), dengan penjelasan sebagai berikut.
   a) Objek KSP BMN berupa Aset Pelabuhan Labuan Bajo yang dibiayai APBN yang terdiri dari:
      (1) Dermaga berukuran (120x20) m^2;
      (2) *Trestle* berukuran (60x12) m^2;
      (3) *Causeway* berukuran (690x20) m^2;
      (4) Tanah Hasil Reklamasi atau Tanah Lapangan Penimbunan *(Container Yard)* seluas (100x300) m^2.
   b) Mitra KSP adalah PT. Pelabuhan Indonesia.
   c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian.
   d) Kontribusi kepada negara berupa:
      (1) Kontribusi tetap per tahun yang dibayarkan dari nilai kewajaran aset Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp171.000.000,00 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2,95%.

(2) Memperoleh Keuntungan Bagi Hasil atas Perjanjian ini sebesar 16,81% dari Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp318.640.679.333,00. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi (AKB KOKI) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan hasil perjanjian pada waktu yang telah ditentukan dalam waktu perjanjian maka Mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayar oleh Mitra KSP.

4) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada KSOP Kelas IV Anggrek dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/MK.6/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan c.q. KUPP Kelas II Anggrek (Sekarang KSOP Kelas IV Anggrek) dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Objek KSP BMN berupa aset BMN KSOP Kelas IV Anggrek yang terdiri dari:
   (1) Satu bidang tanah dengan luas 184.932 m^2;
   (2) Sebelas unit bangunan;
   (3) Satu unit dermaga;
   (4) Empat unit irigasi.

b) Mitra KSP adalah PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal.

c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara ini diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("Periode Kerja Sama") di mana BUP diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan proyek sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

d) Kontribusi kepada negara berupa:
   (1) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebesar 50% disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap Tanggal 30 April tahun berikutnya.
   (2) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.

e) Mitra KSPI yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSPI yang bersangkutan

5) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada KSOP Kelas IV Badas dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-201/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas.

a) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Kelas IV Badas yang terdiri dari:
   (1) Tanah Hasil Reklamasi seluas 11.750 m^2;
   (2) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 800 m^2;
   (3) Dermaga seluas 880 m^2;

(4) Dermaga seluas 1.400 m^2;
(5) Dermaga seluas 185 m^2

b) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
c) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
d) Kontribusi Kepada Negara berupa :
(1) Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp916.390.500,00 (Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,88% per tahun.
(2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 46,55% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi dengan margin IRR sebesar 3,00%. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
(4) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

6) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada KSOP Kelas IV Bima dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-488/MK.6/2021 Tanggal 25 November 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima.
a) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Kelas IV Bima yang terdiri dari :
(1) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya seluas 27.539 m^2;
(2) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 19.316 m^2;
(3) Pagar Semi Permanen seluas 1.798 m^2;
(4) Jalan Khusus Komplek seluas 4.050 m^2;
(5) Jalan Lainnya seluas 800 m^2;
(6) Dermaga seluas 2.350 m^2;
(7) Dermaga seluas 1.100 m^2;
(8) Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 3 NUP ;
(9) Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya sebanyak 1 NUP;
(10) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya sebanyak 46 NUP.
b) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
c) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
d) Kontribusi Kepada Negara berupa :

(1) Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp759.982.028,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,12% per tahun.
(2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 28,81% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
(4) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

7) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada KSOP Kelas IV Waingapu dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-220/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu.

a) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Kelas IV Waingapu yang terdiri dari :
(1) Tanah Hasil Reklamasi seluas 23.510 m^2;
(2) Tanah Hasil Reklamasi seluas 10.000 m^2;
(3) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 540 m^2;
(4) Dermaga seluas 2.768 m^2;
(5) Dermaga seluas 782 m^2;

b) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

c) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

d) Kontribusi Kepada Negara berupa:
(1) Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp572.051.065,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) dengan kenaikan sebesar 1,93% per tahun.
(2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 44,29% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan

ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

(4) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

8) Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada UPP Kelas II Garongkong dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-588/MK.6/2021 Tanggal 23 Desember 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Kementerian Perhubungan.

a) Objek KSP BMN berupa Aset UPP Kelas II Garongkong yang terdiri dari :
   (1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 6.335 m^2;
   (2) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 13.840 m^2;
   (3) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 16.180 m^2;
   (4) Dermaga seluas 7.600 m^2;
   (5) Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen seluas 450 m^2;
   (6) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 600 m^2;
   (7) Bangunan Menara/ Bak Penampung/ Reservoir Air Minum seluas 45 m^2;
   (8) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 4 m^2;
   (9) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 16 m^2;
   (10) Tugu/ Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) / Gapura seluas 66 m^2;
   (11) Pagar Semi Permanen seluas 1.349 m;
   (12) Bangunan Pembawa Pengaman Pantai seluas 387 m^2;
   (13) Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) seluas 833 m^2;
   (14) Truck air sebanyak 1 unit;
   (15) Excavator lainnya sebanyak 1 unit;
   (16) Forklift sebanyak 1 unit;
   (17) Wheel Loader + Attachment sebanyak 1 unit;
   (18) Truck Crane sebanyak 1 unit;
   (19) Pintu Elektrik (yang memakai akses) sebanyak 1 unit;
   (20) Solar Cell sebanyak 82 unit;

b) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

c) Jangka waktu KSP BMN selama 50 (lima puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

d) Kontribusi Kepada Negara berupa :
   (1) Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp2.661.969.064,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun oleh mitra KSP hingga akhir jangka waktu pemanfaatan sesuai perjanjian.

(2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) dari pendapatan. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

(4) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

e) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

Adapun pada Ditjen Perhubungan Udara, mekanisme KSP adalah sebagai berikut.

1) KSP Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
   a) Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan (KSP) selama 30 Tahun (tahun 2018 s.d. tahun 2047).
   b) Besaran nilai wajar yang menjadi objek KSP yaitu Rp3.680.306.859.403,00 yang merupakan BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan minimal nilai investasi PT. Angkasa Pura II (Persero) yaitu Rp483.861.000.000,00.
   c) Besaran Konstribusi Tetap sebesar 0,25% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,95% setiap tahun.
   d) Pembagian Keuntungan sebesar 3,7% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

2) KSP UPBU Sentani, UPBU Hanandjoeddin, UPBU Fatmawati Soekarno, dan UPBU Radin Inten II

   Pada Tahun Anggaran 2019, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme kerjasama pemanfaatan (KSP) yang berada pada UPBU Kelas I (Utama) Sentani – Jayapura, UPBU Kelas I H. A. S. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan, UPBU Kelas I Fatmawati Soekarno – Bengkulu, dan UPBU Kelas I Radin Inten II – Lampung.

   PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa II (Persero) telah menyetorkan ke kas Negara atas pembayaran Kontribusi Tetap Tahun Pertama melalui Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara masing-masing sebesar Rp10.206.694.000,00 (sepuluh milyar dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Rp11.129.65.000,00 (sebelas milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

   Rekapitulasi KSP pada Kementerian Perhubungan disajikan sebagaimana terlampir pada **Lampiran F.7**

3) KSP Pada Otoritas Bandar Udara Wilayah III

a) Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan (KSP) selama 25 Tahun (Tahun 2022 s.d. tahun 2047)
b) Besaran nilai wajar yang menjadi objek KSP yaitu Rp134.834.394.800,00 yang merupakan BMN Ditjen Perhubungan Udara dengan minimal nilai inevstasi Rp98.407.155.500,00
c) Besaran kontribusi tetap sebesar Rp380.000.000,00 ditambah kenaikan sebesar 2,96% per tahunnya
d) Pembagian keuntungan sebesar 4,89% dari pendapatan per tahun.

7. Pelimpahan Kewenangan Personil Peralatan Pendanaan dan Dokumen (P3D)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 404 menyebutkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2018 yang antara lain menyebutkan agar mengoordinasikan dan mempercepat pengalihan dan penyiapan jembatan timbang dan terminal Tipe A dari Pemerintah Daerah, menjamin penyelenggaran jembatan timbang dan Terminal Tipe A yang telah dialihkan dan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perhubungan melalui mekanisme hibah masuk. Eselon I penerima pelimpahan kewenangan P3D yaitu:

a. Ditjen Perhubungan Darat

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1) Terminal Tipe A
   a) 107 Terminal Tipe A telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Daftar 107 terminal yang telah tercatat sebagai aset secara rinci terlampir pada **Lampiran F.8**
   b) 3 Terminal Tipe A dalam proses peralihan menjadi BMN yaitu Termnal Bareh di Solok Provinsi Sumatera Barat, Terminal Ir. Soekarno di Klaten Provinsi Jawa Tengah, dan Terminal Singkawang di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat,
   c) 2 Terminal Tipe A masih pada tahap proses verifikasi asset yaitu Terminal Kefamenanu di Kabupaen Timor Tengah Utara, Provinsi NTT dan Terminal Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Timur
   d) 4 Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan yaitu Terminal Gerbang Sari di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Terminal Sri Tanjung di

Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur, Terminal Oso Wilangun di Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan Terminal Daya di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

e) 29 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut :
   (1) 9 Terminal berada pada wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
   (2) 6 Terminal tidak termasuk dalam simpul terminal tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003
   (3) 8 Terminal bukan merupakan terminal Tipe A, atau telah di alih fungsikan menjadi terminal yang status nya bukan lagi terminal tipe A
   (4) 1 Terminal akan dikelola sendiri oleh pemda, dan
   (5) 5 Terminal di alih fungsikan penggunaannya tidak lagi sebagai terminal.

Daftar 29 Terminal Tipe A yang tidak diserahkan secara rinci terlampir pada **Lampiran F.9**

2) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
   a) 125 UPPKB telah selesai pelimpahannya dan tercatat sebagai BMN
   b) 7 UPPKB dalam tahap verifikasi akhir dan dalam proses peralihan sebagai BMN
   c) 2 UPPKB dalam tahap verifikasi, dengan status aset masih sebagai BMD
   d) 1 UPPKB dalam tahap verifikasi awal
   e) 6 UPPKB tidak diserahkan kepada Pemerintah Pusat

   Daftar 141 UPPKB tersebut secara rinci terlampir pada **Lampiran F.10**

b. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Pelaksanaan P3D juga dilaksanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan penandatanganan berita acara serah terima personil, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D) pada terminal Tipe A Baranangsiang Kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan dan Jatijajar Kota Depok. Penandatangan dilakukan oleh Pejabat Pemda Kota (Bupati/Walikota) tersebut dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun perincian Berita Acara Serah Terima tersebut adalah sebagai berikut.

1) Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Baranangsiang Kota Bogor dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor BA. 78 Tahun 2018 dan/atau 550/BA.108-BPKAD/2018.
2) Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Poris Plawad Kota Tangerag dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor BA.77 Tahun 2018 dan/atau 645/452-Dishub.
3) Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor BA.138 Tahun 2018 dan/atau BA/04/BKD/2018.
4) Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor BA. 46 Tahun 2018 dan/atau 551.22/1581/BPKAD/2018.

Atas hibah tersebut BPTJ telah mencatat sebagai BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan persetujuan register hibah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah DKI Jakarta dan Memo Persetujuan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta IV serta menginput aset dalam bentuk tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP.

Namun demikian, masih terdapat beberapa lahan terminal yang belum selesai proses pengalihan hak dan/atau proses sertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan dengan posisi sebagai berikut.

1) Lahan terminal Baranangsiang seluas 2,1 hektar, posisi sertifikat masih atas nama Pemerintah Kota Bogor dan telah dikerjasamakan dalam bentuk BGS (Bangun Guna Serah) oleh Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI sampai dengan tahun 2042. Posisi saat ini PT PGI sedang melakukan konsolidasi internal terkait akuisisi perusahaan dan pada prinsipnya PT PGI berkomitmen untuk melanjutkan BGS. Sertifikat belum dapat dilakukan proses balik nama karena status tanah adalah HGB diatas HPL dengan PT PGI, dan akan dilakukan balik nama menjadi a.n. Pemerintah RI s.q. Kementerian Perhubungan setelah addendum perjanjian BGS ditandatangani.
2) Lahan Terminal Pondok Cabe posisi saat ini telah diikutsertakan melalui program Sertifikasi Mandiri dan saat ini sedang proses validasi dan penghapusan hak (untuk 9 sertifikat alas hak dijadikan 1 sertifikat atas nama pemerintah RI c.q Kemenhub). Berdasarkan BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe Nomor 551.22/158/BPKAD/2018 dan BA.46 Tahun 2018, luasan Tanah Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe sebesar 25.995 m^2 dan sesuai pasal 4 dalam hal terjadinya perbedaan luas tanah antara surat pelepasan hak/dokumen penguasaan dan/atau pemilikan atas tanah dengan dengan hasil ukur Kantor Pertanahan, maka perhitungan luas yang digunakan adalah perhitungan hasil ukur Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil pengukuran peta bidang oleh BPN Kota Tangerang Selatan, terdapat perbedaan luasan Tanah Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe dari 25.995 m^2 menjadi 23.690 m^2 dan atas pengukuran luasan oleh BPN tersebut, telah dilakukan tindak lanjut perubahan kuantitas luasan tanah terminal pada Sakti Modul Aset.
3) Lahan Terminal Jatijajar berdasarkan hasil pembahasan dengan BPN Kota Depok, sertifikat tanah Terminal Jatijajar dipecah menjadi lima peta bidang, sehingga dilakukan perubahan KIB dari semula satu KIB menjadi lima KIB yang dicatat menjadi Reklasifikasi Masuk pada TA 2022. Dari kelima peta bidang tersebut, empat peta bidang telah dilakukan balik nama Pemerintah RI cq. Kementerian Perhubungan dan satu bidang telah diikutsertakan dalam program sertifikasi nasional tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
   a) 4 Bidang telah selesai pensertipikatan
      (1) Sertifikat Hak Pakai No. 00013 tanggal 23 September 2022 Terminal Jatijajar NUP 5 seluas 37.810 m^2 senilai Rp24.339.393.490,00
      (2) Sertifikat Hak Pakai No. 00011 tanggal 22 Juli 2022 Terminal Jatijajar NUP 6 seluas 2.985 m^2 senilai Rp1.921.531.065,00
      (3) Sertifikat Hak Pakai No. 00014 tanggal 23 September 2022 Terminal Jatijajar NUP 7 seluas 44.577 m^2 senilai Rp28.695.507.633,00
      (4) Sertifikat Hak Pakai No. 00012 tanggal 22 Juli 2022 Terminal Jatijajar NUP 8 seluas 671 m^2 senilai Rp431.942.159,00
   b) 1 Bidang belum selesai pensertipikatan yaitu Tanah Terminal Jatijajar NUP 9 seluas 17.678 m^2 senilai Rp11.379.793.059,00 telah diikutsertakan dalam program sertifikasi nasional Tahun Anggaran 2023.

8. Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kementerian Perhubungan melaksanakan perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. HK.201/1/21 Phb 2016 pada tanggal 16 Maret 2016 serta amandemen dan pernyataan kembali perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. PJ 22 Tahun 2017; 10100/HK.02/2017.

Adapun ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi Penyelenggaran Prasarana Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Fasilitas Penunjang Kereta Api Cepat meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan; Serah Terima Prasarana Perkeretaapian Kereta Api Cepat di akhir Masa Konsesi, serta Pengaturan penerbitan perizinan terkait pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian Kereta Cepat dengan nilai total konsesi sebesar USD 5.998.000.000,00 selama 50 tahun sejak tanggal izin operasi prasarana/sarana perkeretaapian. Pendanaan dilakukan melalui penerbitan obligasi, pinjaman konsorsium, pendanaan lain yang memungkinkan. Penugasan diberikan kepada BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang merupakan konsorsium 4 BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VII. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan telah mencapai Rp78,63 Trilyun. Direncanakan pembangunan jalur KCIC tersebut dapat diselesaikan pada akhir Juni 2023. Penyerahan Prasarana Perkeretaapian oleh KCIC kepada Kemenhub di akhir masa konsesi akan dilakukan dalam kondisi laik operasi dan tidak berada dalam penjaminan kepada pihak ketiga paling lambat pada tanggal penyerahan.
Adapun progres perizinan penyelenggaraan KCIC yang menjadi bagian tanggung jawab Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut.

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur KA Cepat Antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim – Tegalluar;
b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 32 Tahun 2016 tentang Penetapan PT KCIC sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung;
c. Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Konsesi/Perjanjian Kerjasama antara Kemenhub dengan PT KCIC Nomor: PJ 22 Tahun 2017; Nomor 10100/HK.02/2017 sebagai bagian dari perjanjian penyelenggaraan prasarana;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana PT KCIC;
e. Keputusan Dirjen Perkeretaapian Nomor: HK.601/SK.05/DJKA/3/16 tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana PT KCIC; dan
f. Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum yang efektif diterbitkan oleh Lembaga OSS pada 31 Desember 2019.

Sedangkan untuk ijin operasi sarana dan prasarana belum diterbitkan masih menunggu setelah pembangunan selesai dan telah dilakukan uji pertama serta mendapatkan sertifikat uji pertama.

9. Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP. Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih

memadai maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2022.

Pada tahun 2022, terdapat 6 kegiatan pada Kementerian Perhubungan yang didanai dari Pinjaman Luar Negeri dan satu kegiatan yang di danai dari hibah luar negeri, dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Luar Negeri :

1) *ADB Loan 3792-INO : Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)*, dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi Pelabuhan Pantoloan, Wani dan Donggala, serta Bandar Udara Sis Al Jufri Palu, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku *Executing Agency;*
2) *IBRD Loan IBRD9340-ID : Indonesian Mass Transit Project (MASTRAN)* dalam rangka penyediaan Bus Rapid Transit di Medan dan Bandung;
3) *JICA Loan IP569 : Engineering Services Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase I,* dalam rangka Penyiapan dokumen teknis persetujuan trase MRT *East West Line* Tahap 1 (±56 km), dimulai dari Balaraja - Kalideres - Cempaka Baru - Ujung Menteng - Cikarang sepanjang ±87,7 km, penyiapan dokumen *Basic Design*, hasil *basic engineering design Mass Rapid Transit Jakarta, East West* Line Tahap-1 dimulai dari Kalideres - Cempaka Baru sepanjang ±20,1 km, dan Membantu Pokja dalam penyiapan dokumen lelang pekerjaan konstruksi, dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku *Executing Agency;*
4) *JICA Loan IP-577 : Patimban Port Development Project*, dalam rangka mengatasi kelebihan kapasitas pelabuhan yang ada untuk menangani permintaan kargo yang meningkat, dan kemacetan lalu lintas yang berlebihan di dalam Wilayah Metropolitan dengan membangun pelabuhan komersial dan jalan akses di Wilayah Subang, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Executing Agency;*
5) *JICA Loan IP-563: Jabodebek Railway Capacity Enhancement Project Phase I,* dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas yang serius di wilayah Jabodetabek melalui peningkatan kapasitas KA Jabodeabek, dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Executing Agency;* dan
6) *ECDF Korea Loan INA.24 : Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project*, dalam rangka peningkatan layanan navigasi, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Excecuting Agency*.

Hibah Luar Negeri :

GA.29.10.2008 Grant : Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Excecuting Agency*

Ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban terlampir pada **Lampiran F.11.**

10. Konsesi Jasa

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa : Pemberi Konsesi (PSAP 16), yang dimulai efekif pada periode pelaporan keuangan tahun 2022, berimplikasi pada adanya kewajiban dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan PSAP 16 dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16 Paragraf 7 baris 1-7 adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Sebagai dampak dari penerapan PSAP 16, Kementerian Perhubungan mencatatkan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa yang merupakan *exchange transaction* dari penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No 16 – Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16) dari sisi Badan Usaha.

Dalam pelaksanaan identifikasi perjanjian yang masuk ke dalam kategori perjanjian konsesi jasa, krieria yang digunakan oleh perjanjian konsesi jasa adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik perjanjian memenuhi fitur perjanjian yang di atur dalam PSAP 16; dan
2) Penerapan ISAK 16 pada Laporan Keuangan Mitra untuk memenuhi prinsip *exchange transaction* antara pemerintah sebagai pemberi konsesi, dan mitra sebagai penerima konsesi.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, terdapat dua Eselon I yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa pada Tahun 2022 yaitu Direktorat Jenderal Pehubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Ditjen Perhubungan Laut untuk Perjanjian Konsesi dimana Kementerian Perhubungan memberikan hak kepada mitra untuk menyelenggarakan jasa publik berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan selama masa konsesi. Perjanjian Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan perjanjian dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Terdapat 11 Pejanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konses jasa pada Ditjen Perhubungan Laut, yaitu sebagai berikut:

1) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari *Newport* di Pelabuhan Kendari / Bungkutoko,
2) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung,
3) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase II Pelabuhan Utama Belawan,
4) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok,

5) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat,

6) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa APBS (Alur Pelayaran Barat Sumatera),

7) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal *Mulipurpose* Teluk Lamong di Surabaya,

8) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas *Makassar New Port* di Pelabuhan Makasssar,

9) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Berlian Manyar Sejahtera tentang Kegiatan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik,

10) Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Delta Artha Bahari Nusantara, dan

11) Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Tegar Beriman tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Marunda Center, Pelabuhan Marunda.

Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Ditjen Perkeretaapian untuk Perjanjian Konsesi dimana Kementerian Perhubungan memberikan hak kepada mitra untuk menyelenggarakan jasa publik berupa penyelenggaraan layanan perkereaapian. Perjanjian Konsesi Jasa pada Ditjen Perkeretaapian merupakan perjanjian dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Terdapat 3 Perjanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa, yaitu sebagai berikut:

1) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang,

2) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, dan

3) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penjelasan lebih rinci terkait Konsesi Jasa terkait dengan Aset Konsesi Jasa tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan Poin C.2.8 pada Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca, sedangkan penjelasan terkait Kewajiban Konsesi Jasa tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan Poin C.7.1 pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

Selain aset konsesi jasa yang dicatatkan pada Neraca Kementerian Perhubungan, terdapat 18 perjanjian Konsesi yang memenuhi fitur pengakuan aset konsesi jasa, namun Kementerian Perhubungan belum memiliki keyakinan yang memadai atas keandalan nilai konsesi jasa karena mitra konsesi tidak mengadopsi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor (ISAK) Nomor 16 : Konsesi Jasa – Mitra, dengan rincian sebagai berikut:

1) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Penajam Banua Taka dengan nilai realisasi investasi Rp187.906.334.674,00;
2) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Lestari Samudra SAKTI dengan nilai realisasi investasi Rp214.227.424.919,00;
3) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Indonesia Multi Purpose Terminal dengan nilai realisasi investasi Rp24.542.000.000,00;
4) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Ambang Barito Nusapersada dengan nilai realisasi investasi Rp135.000.000,00;
5) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Bandar Bakau Jaya dengan nilai realisasi investasi Rp358.064.703.644,00;
6) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Krakatau Bandar Samudera dengan nilai realisasi investasi Rp1.252.094.705.000,00;
7) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Batu Alam Makmur dengan nilai realisasi investasi Rp88.777.210.287,00;
8) KSOP Kelas II Gresik, Mitra Konsesi Terminal Siam Maspion dengan nilai realisasi investasi Rp465.524.800.000,00;
9) Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Swangi Indah dengan nilai realisasi investasi Rp29.060.786.666,00;
10) KSOP Kelas IV Marunda, Mitra Konsesi PT. Karya Citra Nusantara (KCN), belum terdapat realisasi Investasi. Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Karya Citra Nusantara Nomor 006/S-DIRUT/KCN-KSOP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 hal Laporan Keuangan Inhouse PT. KCN Per 31 Desember 2022 disampaikan bahwa sampai saat ini nilai investasi dermaga masih dalam proses penilaian oleh KJPP Romulo, Charlie dan Rekan yang mana hasil penilaian tersebut nantinya apabila disetujui oleh Kedua Pemegang saham PT. KCN akan dipakai untuk dasar nilai investasi di laporan keuangan;
11) KSOP Kelas II Pontianak, Mitra Konsesi PT. Indo Container Sarana (ICS) dengan nilai realisasi investasi Rp221.197.205.386,00;
12) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT. PTB dengan nilai realisasi investasi Rp563.378.093.402,00;
13) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT. Sarana Abadi Lestari (SAL) dengan nilai realisasi investasi Rp155.465.130.000,00;
14) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Mitra Konsesi PT Asinusa Putra Sekawan dengan nilai realisasi investasi Rp3.021.398.593,00;
15) UPP Kelas II Rangga Ilung, Mitra Konsesi PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa dengan nilai realisasi investasi Rp114.062.734.482,00;
16) UPP Kelas III Brondong, Mitra Konsesi PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS) dengan nilai realisasi investasi Rp150.853.060.981,00;
17) UPP Kelas III Satui, Mitra Konsesi PT. Bina Indo Raya (PT. BIR) dengan nilai realisasi investasi Rp188.151.502.974,00; dan
18) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Mitra Konsesi PT. Celebes Railway Indonesia dengan nilai realisasi investasi Rp826.530.470.593,00.

Sesuai dengan Juknis Akuntansi 03 (Revisi Kedua, Mei 2023), apabila sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan proses penyusunan berita acara kesepakatan nilai belum selesai, agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Properti Investasi

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 – Properti Invesasi (PSAP 17), yang dimulai efekif pada periode pelaporan keuangan tahun 2022, berimplikasi pada adanya kewajiban dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan PSAP 17 dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Sesuai PSAP 17 Paragraf 4 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan identifikasi perjanjian yang masuk ke dalam kategori Properti Invesasi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai;
2) dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya;
3) menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas;
4) aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah digunakan bukan untuk kegiatan operasional pemerintah;
5) dalam hal entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah;

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, terdapat empat Eselon I yang memiliki aset dengan karakteristik umum Properti Investasi yaitu Direkorat Jenderal Pehubungan Laut, Direktorat Jenderal Peerhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan. Satker pemilik aset, rincian aset, dan nominal aset properti investasi di uraikan sebagaimana tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan Poin C.3 pada Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.

12.Konsesi Pada Ditjen Perhubungan Udara

Ditjen Perhubungan Udara melaksanakan perjanjian konsesi penyelenggaraan jasa kebandarudaraan dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Konsesi dengan PT. Angkasa Pura I (Persero), nomor perjanjian HK.201.2/8/DRJU.KUM-2015 dan SP.333/HK.06.03/2015/DU tanggal 15 Desember 2015, jangka waktu perjanjian konsesi 2 Tahun tanpa opsi penyerahan aset hasil investasi kepada Pemerintah, aset BMN sebagian besar telah di-PMN-kan kepada Mitra Konsesi dan tercatat sebagai aset mitra.

b. Perjanjian Konsesi dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), nomor perjanjian HK.202.2/6/DRJU.KUM-2015 dan PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 tanggal 15 Desember 2015,

jangka waktu perjanjian konsesi 2 tahun tanpa opsi penyerahan aset hasil investasi kepada Pemerintah, aset BMN sebagian besar telah di-PMN-kan kepada Mitra Konsesi dan tercatat sebagai aset mitra.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian status konsesi pada Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Udara telah melaksanakan rapat pembahasan sesuai surat undangan Nomor: 40/DBU/UR/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, dengan hasil sebagai berikut:

a. Aset BUMN yang dihasilkan pada masa konsesi adalah aset perusahaan.
b. Konsesi merupakan pengalihan hak pengelolaan bandar udara di atas aset negara yang telah dipisahkan, aset yang dapat dikembalikan ke negara apabila skema kerjasama penyelenggaraan bandar udara dengan mekanisme KSP sementara pada konsesi yang dikembalikan ke Negara adalah hak pengelolaan bandar udaranya.
c. BUMN dapat dikenakan pembayaran konsesi, denda keterlambatan tetap harus dibayarkan dan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa tahap.

Rapat Pembahasan Perhitungan Biaya Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan oleh Biro LPPBMN sesuai surat undangan Nomor: KU.102/9/19 PHB 2020 tanggal 9 Maret 2020, dengan hasil sebagai berikut:

a. Perhitungan besaran konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan setelah Tahun 2017 yang dikelola oleh PT AP I dan PT AP II dilakukan setelah disepakatinya perjanjian konsesi antaran Ditjen Perhubungan Udara dengan PT AP I dan PT AP II;
b. Kemenhub akan menyampaikan surat balasan kepada KPK RI atas surat Pimpinan KPK Nomor: B/10119/KDP.00/01-16/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 perihal penyelesaian piutang pelayanan jasa bandara;
c. Ditjen Perhubungan Udara dan Biro Keuangan akan melakukan rekonsiliasi tagihan biaya dan potensi tagihan konsesi; dan
d. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan naskah perjanjian konsesi tahun 2018 dan 2019.

Pada tanggal 24 Mei 2021, telah diundangkan PM 33 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara yang menghapus PM 193 Tahun 2015. Pasal 7 ayat (2) PM ini menyebutkan Badan Hukum pemenang proses seleksi melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN/D dapat menyelenggarakan bandar udara dan dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) PM 33 Tahun 2021 tersebut PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) tidak diwajibkan untuk membuat perjanjian konsesi atau dikenakan tagihan pembayaran konsesi karena pendapatan negara dari aset kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk PMN berupa deviden.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan lebih lanjut ditemukenali bahwa kekayaan negara yang dipisahkan melalui PMN sudah bukan merupakan aset negara lagi melainkan sepenuhnya aset BUMN, apabila hal tersebut sudah dapat dipastikan maka dalam hal ini PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) tetap harus membuat perjanjian konsesi dan dapat ditagihkan pembayaran konsesi. Saat ini DBU sedang menunggu keputusan akhir terkait bunyi perubahan dari Pasal 7 ayat (2) PM 33 Tahun 2021 tersebut.

Progress Upaya Penagihan PNBP Konsesi Kebandarudaraan

Terdapat potensi PNBP atas pendapatan konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kemehub oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2018, bahwa masih terdapat kekurangan perhitungan pokok dan denda atas Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi sebesar total Rp626.119.159.629,56 dengan rincian sebagai berikut:

Perkembangan proses yang dilakukan oleh Kemenhub terkait upaya penagihan Konsesi :

a. Kekurangan penerimaan denda Pendapatan konsesi tahun 2016 sebesar Rp68.459.219.715,38

   1) Telah dilakukan penagihan denda konsesi kepada PT. AP I sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/4/17/DBU-2020 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I tanggal 10 Pebruari 2020 perihal Tagihan Denda Konsesi atas Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebesar Rp33.586.076.053,00, namun sampai saat ini belum dilakukan pelunasan karena PT. AP I meminta bisa dilakukan penghapusan denda.

   2) Telah dilakukan penagihan denda konsesi kepada PT. AP II sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/4/5/DBU-2020 kepada Direktur Utama PT. AP II (Persero) perihal Surat Tagihan Denda Konsesi sebesar Rp41.189.922.408,00, namun sampai saat ini belum dilakukan pelunasan karena PT. AP II meminta bisa dilakukan penghapusan denda.

b. Kekurangan penerimaan atas konsesi tahun 2017 sebesar Rp238.611.774.125,00 dan denda atas Pendapatan konsesi tahun 2017 sebesar Rp. 40.959.949.446,18

   1) Telah dilakukan penagihan konsesi Tahun 2017 sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/5/7/DBU-2020 kepada Direktur Utama PT. AP I (Persero) tanggal 4 Maret 2020 perihal Surat Tagihan Pertama Konsesi Tahun 2017 sebesar Rp113.146.392.500,00 .

   2) Telah dilakukan penagihan konsesi Tahun 2017 sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/5/18/DBU-2020 kepada Direktur Utama PT. AP II (Persero) tanggal 4 Maret 2020 perihal Surat Tagihan Pertama Konsesi Tahun 2017 sebesar Rp125.465.381.625,00,

c. Perkembangan pembayaran di tahun 2022 sebagai berikut :

   1) Pada PT Angkasa Pura I

      Terdapat selisih penghitungan pendapatan konsesi sebesar Rp2.437.723.045,00 antara PT Angkasa Pura I dengan penghitungan BPK RI sesuai LHP BPK RI atas LK Kemenhub Tahun 2020, dengan penjelasan sebagai berikut :

      a) Telah dilakukan penagihan konsesi Tahun 2017 sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/5/7/DBU-2020 kepada Direktur Utama PT. AP I (Persero) tanggal 4 Maret 2020 perihal Surat Tagihan Pertama Konsesi Tahun 2017 sebesar Rp113.146.392.500,00 sesuai dengan LHP BPK RI atas LK Kemenhub Tahun 2020.

      b) Atas Surat tersebut, PT AP I (Persero) mengajukan permohonan koreksi nilai tagihan melalui Surat Direksi PT Angkasa Pura I Nomor AP.1.1637/KB.08/2021/DK-B Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Permohonan Koreksi atas Pendapatan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan PT Angkasa Pura I (Persero) Periode Tahun 2017, berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra. Besaran konsesi yang harus dibayarkan sesuai hasil audit KAP adalah sebeasr Rp110.708.669.455,00.

c) Berdasarkan surat dari PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut, dilaksanakan veifikasi laporan keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) oleh Kementerian Perhubungan, yang di hadiri oleh perwakilan PT Angkasa Pura I (Persero), sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Laporan Keuangan per tanggal 2 September 2021 dengan nilai hasil verifikasi besaran konsesi yang harus dibayarkan sebesar Rp110.708.669.455,00. Dari berita acara tersebut, Direktur Bandar Udara menyampaikan kepada APIP Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor KU.102/13/18/DBU-2021, perihal Tindak Lanjut Perbedaan Terhadap Besaran Pendapatan Antara LHP BPK RI dengan Laporan Keuanga Audited PT Angkasa Pura I (Persero), untuk memperoleh arahan dalam rangka penerbitan tagihan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan kepada APIP Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor KU.501/1/3/DJPU/BAGKEU-2023, perihal Permohonan Reviu terhadap nilai konsesi PT. Angkasa Pura I (Persero), untuk melakukan reviu besaran nilai konsesi yang telah dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I sesuai dengan besaran nilai konsesi yang seharusnya ditagihkan berdasarkan Laporan Audited PT. Angkasa Pura I

d) Secara parallel sembari menunggu arahan dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Udara melakukan tagihan sesuai dengan hasil audit KAP dan hasil Verifikasi Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero), sebesar Rp110.708.669.455,00 dan denda konsesi sebesar Rp33.586.076.053,00. Atas surat tagihan tersebut telah dibayarkan PT. Angkasa Pura I sebesar Rp144.294.745.508,00 pada tanggal 1 Juli 2022 sesuai NTPN 6BAB88N3E178IOD9, sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp2.437.723.045,00 (Rp113.146.392.500,00 - Rp110.708.669.455,00). Selisih tersebut dicatatkan sebagai Piutang PNBP pada Satker Direktorat Bandar Udara, Direktoart Jendral Perhubungan Udara.

e) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan kepada APIP Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor KU.501/1/3/DJPU/BAGKEU-2023, perihal Permohonan Reviu terhadap nilai konsesi PT. Angkasa Pura I (Persero), untuk melakukan reviu besaran nilai konsesi yang telah dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I sesuai dengan besaran nilai konsesi yang seharusnya ditagihkan berdasarkan Laporan Audited PT. Angkasa Pura I.

2) Pada PT Angkasa Pura II

Atas penagihan konsesi 2017 sesuai Surat Direktur Bandar Udara Nomor: KU.102/5/18/DBU-2020 yang belum di bayar, telah dilakukan penagihan kembali sesuai surat Direktur Bandar Udara nomor KU.102/5/7/DBU-2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal tagihan pokok konsesi sebesar Rp128.897.856.719,00 dan denda konsesi sebesar Rp41.189.922.408,00. Atas surat tagihan tersebut telah dibayarkan PT. Angkasa Pura II sebesar Rp170.087.779.127,00 tanggal 19 Mei 2022 sesuai NTPN 0736A2G4V70UFFU2.

d. Kekurangan penerimaan denda atas Pendapatan konsesi tahun 2017 sebesar Rp112.319.478.191,00

Berdasarkan hasil penelusuran atas dokumen penerimaan negara (PNBP) konsesi jasa kebandarudaraan oleh BPK atas laporan keuangan 2022, mengungkapkan bahwa DBU belum sepenuhnya memperhitungkan denda keterlambatan pembayaran pokok konsesi Tahun 2017 setiap bulan sejak penagihan pertama pada tanggal 4 Maret 2020. Hasil perhitungan ulang

tersebut diperoleh nilai denda keterlambatan atas pokok Piutang Tahun 2017 pada PT AP I dan PT AP II dengan nilai total sebesar Rp112.319.478.191,00 dengan perincian Rp.52.096.095.011,00 atas konsesi PT. Angkasa Pura I dan Rp60.223.383.180,00 atas konsesi dengan PT. Angkasa Pura II. Pada laporan keuangan TA 2022 Audited telah disajikan pada akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima karena tagihan baru akan diberikan pada tahun 2023.

e. Potensi Kekurangan Penerimaan Atas Pendapatan Konsesi Tahun 2018 s.d. 2022.

Proses penagihan konsesi tahun 2018 bisa dilakukan apabila perpanjian konsesi telah ditandatangani bersama. Proses penandatanganan perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan Tahun 2018 dan 2019 akan dilakukan setelah dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 56 tahun 2015 tentang pengusahaan Bandar udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 193 tahun 2015 tentang konsesi dan kerjasama bentuk lainnya, saat ini proses perubahan PM tersebut sedang dievaluasi oleh Biro Hukum Kementerian Perhubungan.

13. Rekening Penampung Dana Ganti Kerugian Tanah Anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara

Terdapat rekening penampungan dana ganti kerugian pengadaan tanah dari anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp4.677.119.121,00. Pembukaan rekening tersebut dilakukan sehubungan ganti kerugian yang diminta bukan berupa uang tunai namun berupa fasilitas yang sama yang berdiri pada tanah yang dibebaskan. Rekening tersebut tidak termasuk dalam saldo kas di Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari:

a. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk relokasi fasilitas umum (fasum) milik pemerintah daerah dalam rangka pembangunan jalur KA Makassar - Parepare dengan rincian rekening sebagai berikut:

No Rekening	: 022301001488308
Nama Rekening	: RPL 054 PS BPKA SULSEL UNTUK PEMBEBASAN LAHAN
Izin Pembukaan Rekening	: S-2435/WPB.07/KP.01/2020 Tanggal 3 November 2020
Saldo	: Rp908.758.521,00

b. Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Tengah untuk pembangunan jalur KA akses Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) terutama pembayaran Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Wakaf dengan rincian rekening sebagai berikut:

No Rekening	: 015201001022303
Nama Rekening	: RPL 134 BTP KELAS
Izin Pembukaan Rekening	: S-2909/WPB.07/KP.01/2020 Tanggal 15 Desember 2020
Saldo	: Rp205.255.000,00

c. Kantor Kestahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban untuk ganti rugi dari LMAN untuk tanah makam kepemilikan dari Tanah Kas Desa (TKD) dengan rincian rekening sebagai berikut:

No Rekening	: 35501001463303
Nama Rekening	: RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI
Izin Pembukaan Rekening	: S-00014/WPB.13/KP.09/2021 17 Februari 2021
Saldo	: Rp3.698.410.287,00

14. Penyelesaian Tagihan Pemerintah terkait *Track Access Charge* (TAC) Tahun 2022

Pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (*Unaudited*), Kementerian Perhubungan mencatatkan tagihan terkait TAC Tahun 2022, dengan rincian sebaga berikut :

a. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.117.148.341.525,00, merupakan tagihan terkait TAC untuk triwulan I dan II yang telah dikeluarkan surat tagihannya karena layanan telah diberikan secara keseluruhan.

b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp1.181.392.546.847,00, merupakan tagihan terkait TAC untuk triwulan III dan IV yang tagihannya baru diterbitkan pada Januari 2023.

PT KAI telah menyampaikan permohonan keringanan berupa pembebasan PNBP TAC Tahun 2022 melalui Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KF.302/III/2/KA-2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal "Permohonan Keringanan Pokok dan Denda PNBP Terutang". Atas permohonan keringanan tersebut, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan keringanan berupa pengurangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-385/MK.02/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Persetujuan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak *Track Acces Charge* (TAC) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2023, dengan nilai persetujuan adalah sebesar selisih antara tagihan PNBP TAC PT KAI dikurangi dengan keringanan yang diberikan. Sehingga nilai tagihan terkait TAC Per 31 Desember 2022 pasca persetujuan Kemenkeu adalah sebagai berikut :

a. Piutang PNBP sebesar Rp427.194.137.755,00 dengan rincian :
    1) PT KAI sebesar Rp423.193.536.000,00
    2) PT Railink sebesar Rp4.000.601.755,00

b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Sebesar Rp 117.680.209.126,00 dengan rincian :
    1) PT KCI sebesar Rp 112.359.597.794,00
    2) PT Railink sebesar Rp5.320.611.332,00

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran B.1. Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Per 31 Desember 2022 *(Audited)*

Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

URAIAN	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	7.765.470.127	1.756.050.475	155.292.706.169	27.068.302.100	0	1.118.323.574.715	0	1.310.206.103.586
2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	0	0	6.424.771.000	15.124.344.909	4.016.003.935	0	89.469.223.814	0	115.034.343.658
3. Pendapatan Dari Alokasi APBN	0	0	0	0	50.961.690.376	0	0	30.362.230.819	0	81.323.921.195
4. Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	375.016.190	120.604.281.543	124.251.683	0	53.178.250.753	0	174.281.800.169
5. Pendapatan Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	4.982.920.806	696.176.795	8.387.425.160	31.800.600.278	70.039.857.588	112.316.018.154	333.609.003	2.282.580.297	41.474.500	230.880.662.581
6. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	70.643.900.000	0	44.953.910.602	25.628.130.000	0	0	0	141.225.940.602
7. Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	43.808.491.858	0	43.808.491.858
8. Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	0	0	1.111.799.725.122	4.432.189.415.960	969.140.532.880	144.427.592.202	0	0	3.461.000.000	6.661.018.266.164
9. Pendapatan Jasa Lainnya	153.269.000	0	9.507.280	43.200.000	15.162.150.000	1.769.702.000	0	0	0	17.137.828.280
10. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	0	0	54.888	204.158.892	15.200.000	0	0	24.000.000	0	243.413.780
11. Pendapatan Denda	88.477.328	0	7.546.039.380	22.432.374.552	2.767.377.643	4.567.209.577	0	451.050.041	0	37.852.528.521
12.Pendapatan Lain-lain	2.150.315.394	14.211.246	43.724.907.575	125.580.960.251	14.707.908.146	10.585.342.660	982.351.714	15.172.371.342	3.561.918.726	216.480.287.054
Jumlah Pendapatan (Netto)	**7.374.982.528**	**710.388.041**	**1.249.877.029.532**	**4.620.806.547.598**	**1.458.769.959.856**	**330.502.552.311**	**1.315.960.717**	**1.353.071.773.639**	**7.064.393.226**	**9.029.493.587.448**

Lampiran B.2. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited)*

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	66.970.787.964	20.445.594.098	260.529.186.526	888.187.075.577	437.061.225.170	62.052.716.980	14.992.831.685	202.853.441.949	13.210.377.871	1.966.303.237.820
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3.667.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.667.860.000
Belanja Honorarium	774.354.146	0	0	0	0	0	0	0	0	774.354.146
Belanja Lembur	672.184.000	152.940.000	15.159.774.000	95.255.202.750	17.421.679.131	402.378.000	0	11.045.400.500	115.630.000	140.225.188.381
Belanja Vakasi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tunj Khusus dan Belanja Peg Transito	60.897.127.974	21.049.784.076	224.205.298.559	767.329.792.892	401.151.616.380	59.878.718.305	15.951.303.128	77.472.988.855	13.796.690.505	1.641.733.320.674
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Transito	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	**132.982.314.084**	**41.648.318.174**	**499.894.259.085**	**1.750.772.071.219**	**855.634.520.681**	**122.333.813.285**	**30.944.134.813**	**291.371.831.304**	**27.122.698.376**	**3.752.703.961.021**
Pengembalian Belanja Pegawai	56.271.623	5.471.661	51.768.372	113.329.170	678.279.403	28.705.557	0	274.567.340	17.169.862	1.225.562.988
Jumlah Belanja Bersih	**132.926.042.461**	**41.642.846.513**	**499.842.490.713**	**1.750.658.742.049**	**854.956.241.278**	**122.305.107.728**	**30.944.134.813**	**291.097.263.964**	**27.105.528.514**	**3.751.478.398.033**

Lampiran B.3. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Barang Operasional	78.852.496.172	10.257.637.688	436.546.712.583	492.660.065.920	490.196.984.239	97.582.795.069	15.064.319.745	240.866.052.101	19.148.892.798	1.881.175.956.315
Belanja Barang Non Operasional	26.263.300.053	3.244.478.646	1.622.198.511.616	1.900.238.984.913	789.382.760.437	327.736.471.383	6.668.757.113	493.605.412.136	63.980.837.670	5.233.319.513.967
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	-	0	0	467.614.590	0	52.049.560.117	0	0	0	
Belanja Barang Persediaan	9.577.396.865	1.664.179.448	87.435.712.433	142.748.233.901	61.807.623.103	20.109.460.959	1.903.142.919	54.580.331.097	4.129.136.613	383.955.217.338
Belanja Jasa	73.646.754.034	2.814.252.107	149.320.223.533	290.250.644.232	143.177.729.124	303.417.529.171	11.452.214.926	134.154.010.512	24.219.864.362	1.132.453.222.001
Belanja Pemeliharaan	37.942.270.174	1.461.917.513	156.365.778.469	739.661.974.229	489.085.864.405	596.208.083.665	4.628.711.168	263.290.346.121	7.363.099.317	2.296.008.045.061
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	84.185.069.925	21.720.611.999	203.772.364.848	430.652.678.975	211.523.071.668	138.857.253.709	23.682.763.810	274.007.282.062	18.777.044.978	1.407.178.141.974
Belanja Perjalanan Luar Negeri	10.192.068.164	0	3.036.023.304	4.452.920.800	6.806.872.276	2.679.862.596	183.493.160	2.826.286.203	165.458.296	30.342.984.799
Belanja Barang BLU	-	0	915.421.900	3.750.850.515	245.010.155.736	17.649.226.721	0	1.168.529.266.157	0	1.435.854.921.029
Belanja Barang utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	0	243.581.280.481	12.211.952.944	0	0	0	0	14.257.525.900	270.050.759.325
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	962.042	0	3.218.507.984	150.980.000	0	0	0	0	0	3.370.450.026
Jumlah Belanja Kotor	**320.660.317.429**	**41.163.077.401**	**2.906.390.537.151**	**4.017.246.901.019**	**2.436.991.060.988**	**1.556.290.243.390**	**63.583.402.841**	**2.631.858.986.389**	**152.041.859.934**	**14.126.226.386.542**
Pengembalian Belanja	7.133.659	0	566.597.989	319.858.485	306.564.427	48.027.241	-	1.119.683.080	15.942.972	2.383.807.853
Jumlah Belanja Bersih	**320.653.183.770**	**41.163.077.401**	**2.905.823.939.162**	**4.016.927.042.534**	**2.436.684.496.561**	**1.556.242.216.149**	**63.583.402.841**	**2.630.739.303.309**	**152.025.916.962**	**14.123.842.578.689**

Lampiran B.4. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Modal Tanah	-	-	65.770.760	77.014.962.730	650.270.828.825	449.381.863.572	-	-	-	1.176.733.425.887
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.635.882.821	3.091.156.300	476.438.276.781	326.756.521.909	526.784.785.114	163.153.382.348	1.164.149.170	210.250.715.143	44.887.558.093	1.769.162.427.679
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.127.222.095	-	1.328.035.320.745	354.283.003.754	642.929.779.355	73.951.926.085	1.306.952.618	338.808.253.185	14.478.844.000	2.755.921.301.837
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	7.213.816.740	-	-	2.404.773.062.668	2.017.903.780.533	4.161.867.608.672		12.469.068.665	-	8.604.227.337.278
Belanja Modal Lainnya	3.551.189.530	260.683.500	72.772.699.397	109.908.942.823	121.907.291.759	178.834.755.603	98.235.000	10.571.857.771	5.586.107.500	503.491.762.883
Belanja Modal BLU	-	-	2.293.824.990	2.146.344.460	64.510.754.380	1.349.980.965		68.019.233.672	-	138.320.138.467
Jumlah Belanja Modal Bruto	**29.528.111.186**	**3.351.839.800**	**1.879.605.892.673**	**3.274.882.838.344**	**4.024.307.219.966**	**5.028.539.517.245**	**2.569.336.788**	**640.119.128.436**	**64.952.509.593**	**14.947.856.394.031**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	35.375.426	389.830.282	1.162.521.040	224.118.730	-	3.574.000	-	1.815.419.478
Jumlah Belanja Modal Netto	**29.528.111.186**	**3.351.839.800**	**1.879.570.517.247**	**3.274.493.008.062**	**4.023.144.698.926**	**5.028.315.398.515**	**2.569.336.788**	**640.115.554.436**	**64.952.509.593**	**14.946.040.974.553**

Lampiran C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 (A*udited*)

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
S.D. 31 DESEMBER 2022 (*AUDITED*)

NO	ESELON I	NAMA SATKER	SALDO
AKUN : 111819 Setara Kas Lainnya			**15.000.000.000,00**
1	BPSDMP	PIP MAKASSAR	15.000.000.000,00
AKUN : 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			**43.135.100,00**
1	DITJEN HUBDAT	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	43.117.100,00
2	DITJEN HUBLA	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PANDAN	18.000,00
AKUN : 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			**5.013.034.109,00**
1	DITJEN HUBLA	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	5.013.034.109
AKUN : 111826 Kas Lainnya di BLU			**142.907.399.798,00**
1	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI	26.566.454
2	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU KALIMARAU	219.760.000
3	DITJEN HUBUD	BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	319.163.806
4	BPSDMP	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	3.191.997.924
5	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	6.035.902.333
6	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	2.045.515.128
7	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	1.101.724.500
8	BPSDMP	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	3.943.336.414
9	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	20.748.120.856
10	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	41.020.788
11	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	1.119.025.607
12	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	18.068.937.785
13	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	35.825.782.183
14	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	119.075.693
15	BPSDMP	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	2.491.413.955
16	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	38.007.600
17	BPSDMP	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	1.851.588.912
18	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	45.720.459.860
SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS			**162.963.569.007,00**

Lampiran C.2. Kas pada Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
S.D. 31 DESEMBER 2022 (*AUDITED*)

NO	ESELON I	NAMA SATKER	SALDO
AKUN : 111911 KAS DAN BANK - BLU			**742.702.240.483,00**
1	DITJEN HUBDAT	BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI BEKASI	4.556.223.237
2	DITJEN HUBLA	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	2.658.642.690
3	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU JUWATA	6.659.408.594
4	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU JALALUDDIN	7.439.874.667
5	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI	18.400.217.417
6	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU KALIMARAU	926.147.670
7	DITJEN HUBUD	BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	36.708.091.968
8	DITJEN HUBUD	BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	193.695.216.895
9	DJKA	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	6.152.994.504
10	DJKA	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	10.050.227.100
11	BPSDMP	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	1.744.508.738
12	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	3.808.499.194
13	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	8.542.781.212
14	BPSDMP	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7.343.867.103
15	BPSDMP	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	61.625.267.723
16	BPSDMP	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN	71.611.116.874
17	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	7.322.698.598
18	BPSDMP	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	12.610.605.547
19	BPSDMP	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	7.568.335.549
20	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	21.814.551.008
21	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	4.768.990.725
22	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	4.787.658.774

NO	ESELON I	NAMA SATKER	SALDO
23	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	9.822.375.283
24	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	35.399.880.125
25	BPSDMP	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	8.642.768.587
26	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	14.062.074.881
27	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	2.218.636.005
28	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	9.429.418.510
29	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	33.031.866.222
30	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	5.850.978.620
31	BPSDMP	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	1.425.057.577
32	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	80.569.750.021
33	BPSDMP	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	16.019.261.183
34	BPSDMP	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	5.846.888.427
35	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	19.587.359.255
AKUN : 111921 SURAT BERHARGA - BLU			**30.000.000.000,00**
1	DITJEN HUBUD	BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	30.000.000.000,00
AKUN : 111929 SETARA KAS LAINNYA - BLU			**289.823.458.770,00**
1	DITJEN HUBUD	KANTOR UPBU JUWATA	5.000.000.000
2	BPSDMP	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	5.000.000.000
3	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	35.000.000.000
4	BPSDMP	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	20.000.000.000
5	BPSDMP	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	105.000.000.000
6	BPSDMP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	37.335.922.000
7	BPSDMP	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	28.966.224.669
8	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	6.900.000.000
9	BPSDMP	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	7.000.000.000
10	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	12.771.950.222
11	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	16.933.199.098
12	BPSDMP	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	1.351.796.006
13	BPSDMP	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	340.152.154
		POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	8.224.214.621
SALDO KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM			**1.062.525.699.253,00**

Lampiran C.3. Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (*Audited*)

INVESTASI JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2022 (*AUDITED*)

No	Eselon I	Nama Satker	No dan Nama Rekening	Jenis Investasi Jangka Pendek	Nilai (Rp)
1	DITJEN HUBLA	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	Bank BRI 018601015158400 senilai Rp3.672,566,846,00	Deposito	3.672.566.846,00
2	BPSDMP	PIP SEMARANG	Bank BRI 043501002688403 senilai Rp28.717.614.000,00	Deposito	28.717.614.000,00
3	BPSDMP	PIP MAKASSAR	-Bank Bukopin Nomor Rekening 2083100177 sejumlah Rp20.000.000.000,-; - Nomor Rekening 2083100171 sejumlah Rp35.000.000.000,00 yang ditempatkan selama 3,5 tahun roll over 3 bulan	Deposito	20.000.000.000,00
4	BPSDMP	POLTEKPEL BAROMBONG	-Nomor Rekening 0004.01.40.007441.5 sejumlah Rp15.000.000.000,00 - Nomor Rekening 0001.01.40.005648.2 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang ditempatkan selama 3,5 tahun roll over 3 bulan	Deposito	35.000.000.000,00
5	BPSDMP	PPI MADIUN	- BRI dengan nomor 0045010129661402 senilai 4M - BNI dengan nomor 1236627287 senilai 2M - BSI dengan nomor 7000000137737072 senilai 2M	Deposito	8.000.000.000,00
J U M L A H					**95.390.180.846,00**

Lampiran C.4. Belanja Dibayar Dimuka pada Ditjen Perhubungan Darat

REKAP BAST-BG (JAMINAN AKHIR TAHUN) PADA DITJEN PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2022 (*AUDITED*)

No	KODE	NAMA SATKER	NOMOR BAST	TANGGAL BAST		NILAI BAST	Rincian Pekerjaan	Keterangan
1	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	352600	19 Desember 2022	Barang	9.166.476.000	Termin 3 Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang RORO 500GT Lintas Bombanna-Tanjung Phising (KMP Oputa Yi Koo)	Pekerjaan masih berlanjut di tahun 2023
2	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/10/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	36.246.009	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Pelabuhan Balige	Selesai
3	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/11/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	34.693.248	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Pelabuhan Muara	Selesai
4	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/12/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	35.730.584	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Pelabuhan Simanindo	Selesai
5	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/13/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	35.397.455	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Pelabuhan Tigaras	Selesai
6	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/14/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	41.335.924	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Terminal Amplas	Selesai
7	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/14/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	30.047.500	Pemeliharaan Gedung Kantor BPTD Wil II Prov Sumut	Selesai
8	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/15/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	24.173.482	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Terminal Pinang Baris	Selesai
9	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/16/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	20.395.126	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Terminal Tanjung Pinggir	Selesai
10	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/16/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	45.000.000	Sewa Mesin Cuci Lantai	Selesai
11	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/17/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	20.482.146	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Terminal Madya Tapanuli	Selesai
12	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/18/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Barang	22.551.158	Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Operasional Terminal Sibolga	Selesai
13	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/29.c/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	21 Desember 2022	Barang	45.898.500	Pengadaan Jasa Pengangkutan Barang	Selesai
14	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/29.d/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	21 Desember 2022	Barang	49.994.633	Jasa Desain Interior Gedung Kantor BPTD	Selesai
15	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/31/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	3.387.395	Sewa Angkutan Karyawan untuk Operasional di UPPKB Aek Batu	Selesai
16	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/32/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	46.782.000	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Tigaras	Selesai
17	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/32/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	2.498.136	Sewa Angkutan Karyawan untuk Operasional di UPPKB Dolok Estate	Selesai
18	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/33/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	2.935.825	Sewa Angkutan Karyawan untuk Operasional di UPPKB Mambang Muda	Selesai
19	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/36/PPK.III/BPTD-II/XII/2022	22 Desember 2022	Barang	45.987.000	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Narkoba Bagi Supir di Terminal	Selesai
20	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/51/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	23 Desember 2022	Barang	46.831.250	Jasa Keamanan dan Kebersihan pada Terminal Amplas	Selesai
21	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/52/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	23 Desember 2022	Barang	45.108.750	Jasa Keamanan dan Kebersihan pada Terminal Pinang Baris	Selesai
22	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.001/12/53/PPK.IV/BPTD-II/XII/2022	23 Desember 2022	Barang	20.670.000	Jasa Keamanan pada Terminal Madya dan Sibolga	Selesai
23	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.375.1a/PPK.I/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	1.582.107.320	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	
24	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.375.1a/PPK.I/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	1.582.107.320	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	
25	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.375.1a/PPK.I/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	1.095.378.320	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	
26	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.375.1a/PPK.I/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	486.729.000	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	
27	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.385/PPK.II/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	131.173.700	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas BRT di KSPN Danau Toba	
28	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	BA.385/PPK.II/BPTD-II/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	131.173.700	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas BRT di KSPN Danau Toba	
29	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III			Modal	266.834.860	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus Tahap III	
30	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	BAST.205/403846/2022	20 Desember 2022	Barang	9.012.406.976	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap III	Selesai 21 Maret 2023
31	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	BAST.206/403846/2022	20 Desember 2022	Barang	311.850.276	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap III (Supervisi)	Selesai 21 Maret 2023
32	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII			Modal	1.136.921.451	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Pakupatan	
33	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	04/NGW/BAPP/BPTD-XI/XII/2022	22 Desember 2022	Modal	764.517.642	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kertonegoro Ngawi Tahap II (BAST Final 15 Januari 2023)	Selesai
34	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	KU.003/61/08/BPTDXIII-NTT/2022	20 Desember 2022	Modal	1.570.491.600	Pekerjaan Terminal Barang Motaain	Pemberian Kesempatan 50 hari kalender sesuai PMK 189/05/2022
35	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	KU.003/61/12/BPTDXIII-NTT/2022	20 Desember 2022	Modal	25.134.650	Supervisi Motaain	Pemberian Kesempatan 50 hari kalender sesuai PMK 189/05/2022
36	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	PL.108/9/10/BPTDXVI/XII/2022	16 Desember 2022	Modal	56.175.000	Pembangunan Pelabuhan Sei Ijum Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap III	
37	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	PL.108/9/9/BPTDXVI/XII/2022	16 Desember 2022	Modal	45.907.000	Pembangunan Pelabuhan Basirih Hulu - Bapinang Hulu Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap III	
38	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI			Barang	1.366.170	Selisih Nilai antara Jaminan Bank Garansi dengan Realisasi Pekerjaan Subsidi Operasional Angkutan Jalan Bus Perintis	Dikembalikan ke Kas Negara pada 12 Januari 2023 dengan NTPN:
39	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI			Modal	1.487.865.000	Pembangunan Dermaga Basirih	
40	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.108/II/12.1/BAPP.PROGRESS.KI.TSDP/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	9.900.000	Konsultan Individual Tenaga Ahli Bangunan Gedung	
41	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.108/VII/1.1/BAPP.S.KI.SARPRAS/BPTD-17/2022	05 Desember 2022	Modal	9.900.000	Pengawasan dan Reviu Desain Pembangunan UPPKB KM. 36 Samboja Kab. Kukar Tahap IV	
42	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/V/17.1/BAP.T5.SP.FISIK.LBUNYU/BPTD-17/2022	19 Desember 2022	Modal	164.632.217	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu Tahap 2	
43	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/V/19.1/BAP.RET.FISIK.LBUNYU/BPTD-17/2022	19 Desember 2022	Modal	669.236.657	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu Tahap 2	

44	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/11.1/BAP.RET.HS.KRDALAM/BPTD-17/2022	23 Desember 2022	Modal	141.947.089	Pembangunan Halte Sungai Desa Karang Dalam, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur	
45	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/15.1/BAP.T3.SP.HS.LSEGAR/BPTD-17/2022	23 Desember 2022	Modal	458.964.809	Pembangunan Halte Sungai Desa Long Segar, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur	
46	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/17.1/BAP.RET.HS.LSEGAR/BPTD-17/2022	23 Desember 2022	Modal	137.774.035	Pembangunan Halte Sungai Desa Long Segar, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur	
47	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/3.1/BAP.T5.SP.FISIK.SJEPUN/BPTD-17/2022	21 Desember 2022	Modal	891.724.562	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Tahap 2	
48	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/5.1/BAP.RET.FISIK.SJEPUN/BPTD-17/2022	21 Desember 2022	Modal	691.259.350	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Tahap 2	
49	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VI/9.1/BAP.T3.SP.HS.KRDALAM/BPTD-17/2022	23 Desember 2022	Modal	81.555.851	Pembangunan Halte Sungai Desa Karang Dalam, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur	
50	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/1.1/BAP.T3.SP.HS.SEMPAYAU/BPTD-17/2022	21 Desember 2022	Modal	266.378.915	Pembangunan Halte Sungai Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	
51	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/3.1/BAP.RET.HS.SEMPAYAU/BPTD-17/2022	21 Desember 2022	Modal	160.423.489	Pembangunan Halte Sungai Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	
52	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/5.1/BAPFISIK.UPPKB.SAMBOJA/BPTD-17/2022	16 Desember 2022	Modal	285.810.019	Pembangunan UPPKB KM. 36 Samboja Kab. Kukar (Tahap IV)	
53	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/6.1/BAP.FISIK.UPPKBSAMBOJA/BPTD-17/2022	16 Desember 2022	Modal	496.197.950	Pembangunan UPPKB KM. 36 Samboja Kab. Kukar (Tahap IV)	
54	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/8.1/BAP.FISIK.UPPKB.PASER/BPTD-17/2022	16 Desember 2022	Modal	45.304.006	Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Tahap III)	
55	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VII/9.1/BAP.FISIK.UPPKB.PASER/BPTD-17/2022	16 Desember 2022	Modal	492.434.850	Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Tahap III)	
56	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VIII/2.1/BAP.FISIK.TJ.KERAMAT/BPTD-17/2022	19 Desember 2022	Modal	136.345.585	Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Baru Ulu Kutai Timur (Tahap II)	
57	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	PL.109/VIII/3.1/BAP.FISIK.TJ.KERAMAT/BPTD-17/2022	19 Desember 2022	Modal	598.006.950	Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Baru Ulu Kutai Timur (Tahap II)	
58	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/10.1/SPTJM.SPV.HS.SEMPAYAU/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	9.010.000	Supervisi Pembangunan Halte Sungai Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	
59	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/10.1/SPTJM.SPV.UPPKB.SAMBOJA/BPTD-17/2022	09 Desember 2022	Modal	30.000.000	Pengawasan dan Reviu Desain Pembangunan UPPKB KM. 36 Samboja Kab. Kukar Tahap IV	
60	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/11.1/SPTJM.SPV.REHAB.SJEPUN/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	32.275.000	Pengawasan dan Reviu Desain Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun	
61	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/11.1/SPTJM.SPV.TJ.KERAMAT/BPTD-17/2022	09 Desember 2022	Modal	35.000.000	Pengawasan dan Reviu Desain Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Baru Ulu Kutai Timur (Tahap II)	
62	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/12.1/SPTJM.SPV.REHAB.LBUNYU/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	27.670.000	Pengawasan dan Reviu Desain Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu	
63	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/8.1/SPTJM.SPV.HS.KRDALAM/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	9.080.500	Supervisi Pembangunan Halte Sungai Desa Karang Dalam, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur	
64	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	KU.201/I/9.1/SPTJM.SPV.HS.LSEGAR/BPTD-17/2022	14 Desember 2022	Modal	9.044.750	Supervisi Pembangunan Halte Sungai Desa Long Segar, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur	
65	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX			Barang	1.666.754.556	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lindu Tahap II	
66	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	67/BAST/BG/BPTD-XXIV/XII/2022	19 Desember 2022	Modal	212.454.450	Subsidi Angkutan Jalan Perintis	
67	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	70/BAST/BG/BPTD-XXIV/XII/2022	20 Desember 2022	Modal	654.681.650	Pembangunan Kantor	
68	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	PL.109/12/23/BPTD-WIL.XXV/2022	22 Desember 2022	Modal	5.687.090.780	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kabupaten Raja Ampat Tahap II	
69	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	PL.109/12/10/BPTD-WIL.XXV/2022	16 Desember 2022	Modal	304.123.050	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kabupaten Raja Ampat Tahap II	
70	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV			Modal	2.843.545.390	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kabupaten Raja Ampat Tahap II	
71	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	PL.109/14/5/BPTD-WIL.XXV/2022	22 Desember 2022	Modal	3.126.445.717	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kabupaten Raja Ampat Tahap II	
72	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV			Barang	90.485.000	Subsidi Angkutan Jalan Perintis di Sarmi Provinsi Papua	
73	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA	001.5/BAPP/PPK5/BPTD-X/XII/2022	23 Desember 2022	Modal	3.402.703.800	Termin V Revitalisasi Terminal Tipe A Bobootsari	
74	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA	001.6/BAPP/PPK5/BPTD-X/XII/2022	23 Desember 2022	Modal	5.487.985.730	Termin VI Revitalisasi Terminal Tipe A Bobootsari	
75	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA	001.7/BAPP/PPK5/BPTD-X/XII/2022	23 Desember 2022	Modal	1.868.300.000	Retensi Revitalisasi Terminal Tipe A Bobootsari	
	JUMLAH					**60.745.208.813**		

Lampiran C.5 Perincian Peralatan dan Mesin Per Kelompok Barang

Perincian Peralatan dan Mesin Per Kelompok Barang

KODE	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
		KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
132111	**Peralatan Dan Mesin**	**1.108.738 unit**	**58.451.192.236.464,00**
30101	Alat Besar Darat	1.321 unit	2.077.416.403.717,00
30102	Alat Besar Apung	14 unit	2.441.020.200,00
30103	Alat Bantu	7.205 unit	939.383.488.170,00
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	14.120 unit	6.065.878.473.566,00
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.741 unit	159.401.982.091,00
30203	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.458 unit	14.713.202.636.577,00
30204	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	152 unit	73.849.425.975,00
30205	Alat Angkutan Bermotor Udara	125 unit	2.505.352.025.243,00
30301	Alat Bengkel Bermesin	4.344 unit	576.318.707.169,00
30302	Alat Bengkel Tak Bermesin	5.658 unit	141.512.654.948,00
30303	Alat Ukur	6.910 unit	958.522.438.598,00
30401	Alat Pengolahan	6.133 unit	84.777.906.045,00
30501	Alat Kantor	13.5131 unit	3.459.802.071.653,00
30502	Alat Rumah Tangga	38.6940 unit	1.857.421.646.931,00
30601	Alat Studio	21.261 unit	533.574.509.467,00
30602	Alat Komunikasi	23.070 unit	1.645.256.077.112,00
30603	Peralatan Pemancar	8.236 unit	972.787.271.476,00
30604	Peralatan Komunikasi Navigasi	4.326 unit	1.642.681.498.116,00
30701	Alat Kedokteran	20,231 unit	553.944.018.870,00
30702	Alat Kesehatan Umum	2.000 unit	31.149.705.478,00
30801	Unit Alat Laboratorium	31.355 unit	2.837.380.814.198,00
30802	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.628 unit	50.786.608.544,00
30803	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.768 unit	209.350.663.940,00
30804	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	448 unit	225.139.877.903,00
30805	Radiation Application & Non Destructive Testing	317 unit	200.485.532.775,00
30806	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	688 unit	110.847.727.142,00
30807	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.245 unit	502.357.811.545,00
30808	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi &	2.400 unit	241.706.889.697,00
30901	Senjata Api	263 unit	37.776.850.107,00
30902	Persenjataan Non Senjata Api	6.437 unit	391.519.534.074,00
30903	Senjata Sinar	42 unit	416.581.694.805,00
30904	Alat Khusus Kepolisian	4.409 unit	510.709.870.056,00
31001	Komputer Unit	4.4628 unit	858.948.593.860,00
31002	Peralatan Komputer	3.9609 unit	1.399.313.852.272,00
31101	Alat Eksplorasi Topografi	211 unit	8.704.346.039,00
31102	Alat Eksplorasi Geofisika	260 unit	62.177.638.412,00
31201	Alat Pengeboran Mesin	3 unit	2.339.000,00
31202	Alat Pengeboran Non Mesin	87 unit	15.721.679.379,00
31301	Sumur	81 unit	25.998.780.738,00
31302	Produksi	3 unit	110.880.000,00
31303	Pengolahan Dan Pemurnian	147 unit	160.292.916.438,00
31401	Alat Bantu Eksplorasi	2 unit	15.105.500,00
31402	Alat Bantu Produksi	2 unit	969.210.000,00
31501	Alat Deteksi	331 unit	39.454.167.205,00
31502	Alat Pelindung	5.073 unit	23.867.518.465,00
31503	Alat SAR	10.361 unit	95.061.617.659,00
31504	Alat Kerja Penerbangan	10.138 unit	1.964.801.695.942,00
31601	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	2.336 unit	2.071.652.194.600,00
31701	Unit Peralatan Proses/Produksi	2.084 unit	86.777.670.669,00
31801	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	27.8016 unit	6.161.144.751.760,00
31802	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	2.339 unit	475.399.252.622,00
31803	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	820 unit	142.552.431.382,00
31901	Peralatan Olah Raga	3.831 unit	128.907.758.334,00

Lampiran C.6. Perincian KDP Per Satker Tahun 2022

PERINCIAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) PER SATKER
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	DJPL	287579	KSOP B E N O A	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan		7010101004	1	1.391.984.400	280.552.896.662	280.552.896.662			
2	DJPL	287612	DISNAV B E N O A	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar Tanjung Batu Gendang	7010101004	1		32.562.014.899	32.562.014.899			Siap didefinitifkan
3	DJPL	521332	UPP KARIMUN JAWA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Mess Pegawai	7010101003	5	39.479.000	39.479.000		39.479.000		
4	DJPL	287139	KSOP SAMPIT	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	- Survey Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Replacement Dermaga Kapal Patroli Bagendengan	7010101004	1	295.000.000	295.000.000		295.000.000		OK
5	DJPL	287143	KSOP PULANG PISAU		Pembangunan Faspel Laut Bahaur TA. 2022-2023 (MYC)	7010101005	1	70.600.000.000	9.993.834.710	9.993.834.710			MYC
6	DJPL	413658	UPP BABANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan gedung Kantor Permanen	7010101003	2	2.702.162.000	2.702.162.000	2.702.162.000			
7	DJPL	413658	UPP BABANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Permanen	7010101003	2	75.674.500	75.674.500	75.674.500			
8	DJPL	413658	UPP BABANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Dokumen Lelang	7010101003	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
9	DJPL	413658	UPP BABANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Honor Penitia lelang Fisik	7010101003	2	6.960.000	6.960.000	6.960.000			
10	DJPL	413658	UPP BABANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Honor Penitia lelang Supervisi	7010101003	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
11	DJPL	413463	UPP M A M U J U	Tanah Dalam Pengerjaan	Sertifikat Tanah Pelabuhan Pulau Ambo dan Pelabuhan Popoongan	7010101001	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000			akan didefinitifkan sebagai kapitalisasi (sertifikat tanah)
12	DJPL	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Pembangunan Rambu Suar Kr Luar Anggrek dan Kr Siladen	7010101003	43	2.465.010.000	2.465.010.000	2.465.010.000			Siap didefinitifkan
13	DJPL	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontrak Supervisi Pembangunan Rambu Suar Kr Luar Anggrek dan Kr Siladen	7010101003	43	90.530.000	90.530.000	90.530.000			Siap didefinitifkan
14	DJPL	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontrak DED Pembangunan Rambu Suar Kr Luar Anggrek dan Kr Siladen	7010101003	43	93.692.000	92.400.000	92.400.000			Siap didefinitifkan
15	DJPL	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Honor	7010101003	43		4.560.000	4.560.000			Siap didefinitifkan
16	DJPL	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	ATK	7010101003	43		4.966.090	4.966.090			Siap didefinitifkan
17	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Lalanta Waya	7010101004	18	30.433.847.999	9.842.931.339	9.842.931.339			Siap didefinitifkan
18	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Supervisi Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Citra Pamungkas	7010101004	18	1.480.740.800	444.222.240	444.222.240			Siap didefinitifkan
19	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Koreksi Penambahan KDP karena Aset belum jadi tapi sudah ditarik menjadi aset (ada reviu itjen)	7010101004	18		1.487.419.995	1.487.419.995			Siap didefinitifkan
20	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Koreksi Penambahan KDP karena Aset belum jadi tapi sudah ditarik menjadi aset (ada reviu itjen)	7010101004	18		7.393.632.341	7.393.632.341			Siap didefinitifkan
21	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Realita Timur Perkasa	7010101004	19	19.420.478.560	2.184.803.838	2.184.803.838			Siap didefinitifkan
22	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Realita Timur Perkasa	7010101004	20		2.913.071.784	2.913.071.784			Siap didefinitifkan
23	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Realita Timur Perkasa	7010101004	21		2.913.071.784	2.913.071.784			Siap didefinitifkan
24	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Honor	7010101004	22		2 120.000	2.120.000			Siap didefinitifkan
25	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Honor	7010101004	23		2 120.000	2.120.000			Siap didefinitifkan
26	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Honor	7010101004	24		2.120.000	2.120.000			Siap didefinitifkan
27	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Realita Timur Perkasa	7010101004	25		1.756.917.449	1.756.917.449			Siap didefinitifkan
28	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Citra Pamungkas	7010101004	26		275.990.660	275.990.660			Siap didefinitifkan
29	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Honor				16.300.000	16.300.000			Siap didefinitifkan
30	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATK				28.200.000	28.200.000			Siap didefinitifkan
31	DJPL	559328	UPP LIKUPANG	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Likupang MYC 2021-2022 PT Realita Timur Perkasa			19.420.478.560	3.641.339.730	3.641.339.730			Siap didefinitifkan
32	DJPL	412772	KANPUS HUBLA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan rumah dinas jabatan eselon I dan eselon II Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	7010101004	51	230.240.146.834	230.240.146.834	230.240.146.834			Siap didefinitifkan
33	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas IV	7010101002	7		1.954.709.765		1.954.709.765		
34	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas IV	7010101002	10		1.935.075.012		1.935.075.012		
35	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas V	7010101002	11		3.039.304.600		3.039.304.600		
36	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan RIB 85 m	7010101002	41		2.371.165.000		2.371.165.000		
37	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas III	7010101002	145		5.026.101.297	5.026.101.297			
38	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas III	7010101002	146		5.039.539.489	5.039.539.489			
39	DJPL	439180	SATKER KPLP	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Kapal Kelas IV	7010101002	149		4.637.923.767	4.637.923.767			
40	DJPL	439200	SATKER KEPELABUHANAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	EARR Project Package CS2 Port: Desaign and Construction Supervision Consultant	7010101004	7	52.943.406.130	37.666.197.000	37.666.197.000			
41	DJPL	439200	SATKER KEPELABUHANAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	EARR Project Package CW3: Works for Reconstruction of Pantoloan Port	7010101004	8	48.352.654.782	35.724.732.770	35.724.732.770			
42	DJPL	439200	SATKER KEPELABUHANAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	EAAR Project Package CW1: Works for Reconstruction of Donggala Port	7010101004	9	344.326.698.441	164.976.515.082	164.976.515.082			
43	DJPL	439200	SATKER KEPELABUHANAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	CMO of Rehabilitation and Reconstruction of Port Facilities in Pantoloan Donggala and Wani Port/Project Implementation Unit EARR of PALU Bay Port	7010101004	10	171.980.331.577	48.104.873.843	48.104.873.843			
44	DJPL	439460	SATKER KENAVIGASIAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Pengembangan dan Peningkatan SBNP	7010101003		101.086.561.175	29.811.072.802	29.811.072.802			
45	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Tanah Dalam Pengerjaan	Merupakan BOPP Pengadaan Tanah	7010101001	1	-	7.415.443.890	7.415.443.890			
46	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Jalan Dalam Pengerjaan	Jalan Lingkungan Backup Area	7010101001	1	15.354.181.298	15.354.181.298	15.354.181.298			Siap didefinitifkan
47	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Jalan Dalam Pengerjaan	Jalan Lingkungan Backup Area	7010101001	2	48.486.385.000	48.486.385.000	48.486.385.000			Siap didefinitifkan
48	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Jalan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Paket 6	7010101001	4		603.662.566.679	603.662.566.679			Siap didefinitifkan
49	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Paket 1, 2, 3 dan 8	7010101003	1	3.525.132.815.417	8.795.202.166.907	8.795.202.166.907			Siap didefinitifkan
50	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Bangunan Mess	7010101003	2	43.896.272.780	43.896.272.780	43.896.272.780			Siap didefinitifkan
51	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontruksi Saluran Drainase dan Outer Road Segmen II	7010101003	3	83.786.969.516	83.786.969.516	83.786.969.516			Siap didefinitifkan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
52	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontruksi Pembangunan Gerbang Masuk, Gate I dan Gate II	7010101003	6	18.779.158.907	18.779.158.907	18.779.158.907			Siap didefinitifkan
53	DJPL	021140	KSOP PATIMBAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penyelesaian Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Wilayah Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen II TA 2022	7010101003	7	14.688.987.000	14.688.987.000	14.688.987.000			Siap didefinitifkan
54	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Faspel Tanjung Batu	7010101004	2		40.042.192.000		40.042.192.000		OK
55	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	3	74.644.511.606	74.644.511.606	74.644.511.606			Siap didefinitifkan
56	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	5	14.340.000	14.340.000	14.340.000			Siap didefinitifkan
57	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	7	50.846.900	50.846.900	50.846.900			Siap didefinitifkan
58	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	8	20.000.000	20.000.000	20.000.000			Siap didefinitifkan
59	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	9	13.468.200	13.468.200	13.468.200			Siap didefinitifkan
60	DJPL	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN		Faspel Marabatuan	7010101004	10	6.840.000	6.840.000	6.840.000			Siap didefinitifkan
61	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jaga Mensu TgPandaran	7010101003	143	48.588.100	38.870.480	38.870.480			OK
62	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangkalan Kenavigasian	7010101003	152	261.264.000	268.036.000	268.036.000			OK
63	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	7010101003	153	73.210.500	18.302.625	18.302.625			OK
64	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	7010101003	154		18.302.625	18.302.625			OK
65	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	7010101003	155		18.302.625	18.302.625			OK
66	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	7010101003	156		18.302.625	18.302.625			OK
67	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacment Rumah Jaga MsTgPadadatua	7010101003	157	98.560.000	98.560.000	98.560.000			OK
68	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Realokasi Pembangunan Ms TgPuting	7010101003	158	209.490.000	215.418.000	215.418.000			OK
69	DJPL	287192	DISNAV BANJARMASIN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Replacement Rumah Jaga Ms GnBelingkar	7010101003	159	98.334.500	98.334.500	98.334.500			OK
70	DJPL	287232	KSOP TARAKAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Faspel Dermaga Seisayap	7010101004	1	8.349.400.000	8.553.835.000			8.553.835.000	
71	DJPL	287232	KSOP TARAKAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Faspel Dermaga Seisayap	7010101004	1	49.775.000					
72	DJPL	287232	KSOP TARAKAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Faspel Dermaga Seisayap	7010101004	1	154.660.000					
73	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	34	199.000.000	199.000.000	199.000.000			Siap didefinitifkan
74	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	35	198.600.000	198.600.000	198.600.000			Siap didefinitifkan
75	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	38	197.000.000	197.000.000	197.000.000			Siap didefinitifkan
76	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	39	52.300.000	52.300.000	52.300.000			Siap didefinitifkan
77	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	40	69.500.000	69.500.000	69.500.000			Siap didefinitifkan
78	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	41	56.880.000	56.880.000	56.880.000			Siap didefinitifkan
79	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	42	8.306.214.000	8.306.214.000	8.306.214.000			Siap didefinitifkan
80	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	44	15.260.100.000	15.260.100.000	15.260.100.000			Siap didefinitifkan
81	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	45	197.000.000	197.000.000	197.000.000			Siap didefinitifkan
82	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	47	5.718.709.360	5.718.709.360	5.718.709.360			Siap didefinitifkan
83	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	48	225.919.155	225.919.155	225.919.155			Siap didefinitifkan
84	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	49	9.313.425.000	9.313.425.000	9.313.425.000			Siap didefinitifkan
85	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	50	18.072.580.547	18.072.580.547	18.072.580.547			Siap didefinitifkan
86	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	51	449.264.145	449.264.145	449.264.145			Siap didefinitifkan
87	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	52	199.500.000	199.500.000	199.500.000			Siap didefinitifkan
88	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	53	199.155.000	199.155.000	199.155.000			Siap didefinitifkan
89	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	54	1.888.587.000	1.888.587.000	1.888.587.000			Siap didefinitifkan
90	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	55	199.500.000	199.500.000	199.500.000			Siap didefinitifkan
91	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	56	196.500.000	196.500.000	196.500.000			Siap didefinitifkan
92	DJPL	289911	UPP SAUMLAKI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	57	5.644.500.000	5.644.500.000	5.644.500.000			Siap didefinitifkan
93	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pelerjaan	7010101003	27	702.740.990	702.740.990	702.740.990			
94	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pelerjaan	7010101003	29	19.500.000	19.500.000	19.500.000			
95	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pelerjaan	7010101003	30	19.300.000	19.300.000	19.300.000			
96	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pelerjaan	7010101003	31	1.388.000.000	1.388.000.000	1.388.000.000			
97	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pelerjaan	7010101003	32	33.500.000	33.500.000	33.500.000			
98	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	26	55.466.272.750	55.466.272.750	55.466.272.750			
99	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	27	1.874.268.000	1.874.268.000	1.874.268.000			
100	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	28	19.010.133.000	19.010.133.000	19.010.133.000			
101	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	29	822.607.500	822.607.500	822.607.500			
102	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	30	59.233.516.290	59.233.516.290	59.233.516.290			
103	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	31	1.746.741.600	1.746.741.600	1.746.741.600			
104	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	32	8.808.925.635	8.808.925.635	8.808.925.635			
105	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	33	300.428.000	300.428.000	300.428.000			

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
106	DJPL	413520	UPP T U A L	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan Jembatan Dalam Pekerjaan	7010101004	33	7.923.753.241	7.923.753.250	7.923.753.250			
107	DJPL	413627	UPP AMAHAI	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Bangunan Gedung Kantor	7010101004	15	7.690.000.000	3.328.517.961		3.328.517.961		OK
108	DJPL	521878	UPP T U L E H U	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	TKTM KDP	7010101004	10	22.904.300.000	22.904.300.000		22.904.300.000		
109	DJPL	521878	UPP T U L E H U	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	TKTM KDP	7010101004	22	91.417.646.000	91.417.646.000		91.417.646.000		
110	DJPL	521878	UPP T U L E H U	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	TKTM KDP	7010101004	23	15.638.250.000	15.638.250.000		15.638.250.000		
111	DJPL	521882	UPP KAIRATU	Tanah Dalam Pengerjaan	- Dokumen Lelang	7010101004	3	-	34.909.000		34.909.000		
112	DJPL	521882	UPP KAIRATU	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	- Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Faspel Laut Piru di Pelabuhan Ariate TA 2011	7010101004	3	2.340.075.000	2.340.075.000		2.340.075.000		Siap didefinitifkan
113	DJPL	521882	UPP KAIRATU	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	- Supervisi	7010101004	3	63.500.000	63.500.000		63.500.000		
114	DJPL	521882	UPP KAIRATU	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	- Honor Panitia	7010101004	3	-	4.375.000		4.375.000		
115	DJPL	521882	UPP KAIRATU	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	- Studi Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pelabuhan Kairatu	7010101004	19	167.000.000	167.000.000		167.000.000		
116	DJPL	559484	UPP BULA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Faspel Laut Wahai	7010101003	1	4.191.015.000	4.295.615.000	4.295.615.000			Siap didefinitifkan
117	DJPL	559484	UPP BULA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Faspel Laut Bula	7010101003	2	89.015.757.000	89.015.757.000	89.015.757.000			Siap didefinitifkan
118	DJPL	559484	UPP BULA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Faspel Laut Bula	7010101004	5	2.826.900.000	2.826.900.000	2.826.900.000			Siap didefinitifkan
119	DJPL	559484	UPP BULA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Faspel Laut Bula	7010101004	6	1.835.000.000	1.835.000.000	1.835.000.000			Siap didefinitifkan
120	DJPL	559484	UPP BULA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Faspel Laut Bula	7010101004	7	39.478.000	39.478.000	39.478.000			Siap didefinitifkan
121	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Merah_Hijau Sistim Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Tual-Kota Tual	7010101002	128	2.150.000.000	2.150.000.000		2.150.000.000		
122	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Merah_Hijau Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Kobroor Kab Kepulauan Aru	7010101002	129	2.215.000.000	2.215.000.000		2.215.000.000		
123	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Supervisi	7010101002	129	26.840.000	26.840.000		26.840.000		
124	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan ATK Lelang	7010101002	129	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
125	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Honor Pokja	7010101002	129	7.620.000	7.620.000		7.620.000		
126	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Supervisi	7010101002	129	27.800.080	27.800.080		27.800.080		
127	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan ATK Lelang	7010101002	129	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
128	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan ATK Lelang	7010101002	129	4.994.880	4.994.880		4.994.880		
129	DJPL	652570	DISNAV TUAL	Peralatan Mesin Dalam Pengerjaan	Honor Pokja	7010101002	129	3.810.000	3.810.000		3.810.000		
130	DJPL	287469	OP UTAMA MAKASAR	Tanah Dalam Pengerjaan	Sertifikasi Hak Pakai MNP Breakwater	7010101001	1	187.000.000	6.993.000	6.993.000			
131	DJPL	287469	OP UTAMA MAKASAR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Instalasi Air Bersih Mess Operasional	7010101003	2	121.677.000	126.583.200	126.583.200			
132	DJPL	289885	UPP BULU KUMBA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kajang	7010101004	16	20.085.694.000	12.866.203.187	12.866.203.187			
133	DJPL	289885	UPP BULU KUMBA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kajang	7010101004	17		14.440.000.000	14.440.000.000			
134	DJPL	559602	UPP MALAKONI-ENGGANO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Fisik Fasilitas Pelabuhan Malakoni Enggano	7010101003	3	29.453.073.800	12.496.939.213	12.496.939.213			
135	DJPL	559602	UPP MALAKONI-ENGGANO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Fasilitas Pelabuhan Malakoni Enggano	7010101003	3	869.770.000	401.830.800	401.830.800			
136	DJPL	559602	UPP MALAKONI-ENGGANO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Biaya Lelang	7010101003	3	15.850.000	15.850.000	15.850.000			
137	DJPL	521616	UPP NIPAH PANJANG	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Faspel Ujung Jabung	7010101004	30	214.167.221.733	214.167.221.733		214.167.221.733		-
138	DJPL	412920	KSOP PROBOLINGGO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Operasional Wilker Prigi	7010101003	5	49.634.000	49.634.000	49.634.000			
139	DJPL	412920	KSOP PROBOLINGGO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Operasional Wilker Sendang Biru	7010101003	6	199.871.650	207.481.650	207.481.650			
140	DJPL	412920	KSOP PROBOLINGGO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Operasional Probolinggo	7010101003	7	49.541.000	49.541.000	49.541.000			
141	DJPL	412951	DISNAV SURABAYA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pekerjaan	7010101003	1	79.200.000	79.200.000	79.200.000			
142	DJPL	412951	DISNAV SURABAYA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pekerjaan	7010101003	2	78.980.000	78.980.000	78.980.000			
143	DJPL	521395	UPP BRONDONG	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN	7010101004	4		19.905.186.000		19.905.186.000		riview studi
144	DJPL	287211	KSOP SAMARINDA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan jembatan dalam pengerjaan	7010101004		24.578.970.000	24.578.970.000		24.578.970.000		
145	DJPL	287211	KSOP SAMARINDA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan jembatan dalam pengerjaan	7010101004		24.275.034.457	24.275.034.457		24.275.034.457		
146	DJPL	287211	KSOP SAMARINDA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan dan jembatan dalam pengerjaan	7010101004		475.150.000	475.150.000		475.150.000		
147	DJPL	289822	UPP SANGKULIRANG	Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan	Jalan dan jembatan dalam pengerjaan	7010101004	11		22.650.213.000		22.650.213.000		
148	DJPL	289839	UPP SANGATA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Gedung Kantor	7010101005	1	99.132.000	99.132.000	99.132.000			
149	DJPL	289850	UPP TANA PASER	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	7010101006	1	84.971.193.700	13.768.664.512	13.768.664.512			
150	DJPL	289850	UPP TANA PASER	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	7010101006	2	2.285.423.400	731.335.488	731.335.488			
151	DJPL	287147	UPP LEWOLEBA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	7010101004	1	2.314.806.000	2.314.806.000	2.314.806.000			Siap didefinitifkan
152	DJPL	559527	UPP BARANUSA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL	7010101004	4	746.900.000	232.980.000		232.980.000		
153	DJPL	559527	UPP BARANUSA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL	7010101004	5		271.810.000		271.810.000		
154	DJPL	559527	UPP BARANUSA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL	7010101004	6		111.402.500		111.402.500		
155	DJPL	559527	UPP BARANUSA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL	7010101004	7		4.600.000		4.600.000		
156	DJPL	559531	UPP SEBA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DERMAGA RAIJUA-MULTIYEARS	7010101004	31	36.701.061.027	35.779.761.027	35.779.761.027			Siap didefinitifkan
157	DJPL	559531	UPP SEBA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI DERMAGA RAIJUA-MULTIYEARS	7010101004	32	712.502.379	712.502.379	712.502.379			Siap didefinitifkan
158	DJPL	521573	UPP PANIPAHAN	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	FASPEL	7010101004		7.490.625.000	7.490.625.000		7.490.625.000		belum ada akses jalan
159	DJPL	413721	SATKER BTKP	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Laboratorium		1	25.650.882.063	6.079.405.650	6.079.405.650			Siap didefinitifkan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
160	DJPL	287101	DISNAV PONTIANAK	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Trastel Mensu TG Dato	7010101004	4	1.484.795.000	1.089.572.909		1.089.572.909		OK
161	DJPL	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan	7010101003		14.960.000	14.960.000	14.960.000			
162	DJPL	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan	7010101003		14.960.000	14.960.000	14.960.000			
163	DJPL	413200	UPP TAREMPA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Faspel Terluar	7010101004	13	-	8.313.920.800		8.313.920.800		
164	DJPL	521594	KSOP KIJANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor	7010101003	1	34.665.300	34.665.300	34.665.300			
165	DJPL	287782	KSOP B I A K	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Owi	7010101004	9	6.917.745.000	6.917.745.000		6.917.745.000		
166	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	20	11.573.900.000	11.682.929.000			11.682.929.000	
167	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	21		194.600.000			194.600.000	
168	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	22	9.210.975.000	9.262.644.000			9.262.644.000	
169	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	23		217.750.000			217.750.000	
170	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	24		190.000.000			190.000.000	
171	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	25		90.000.000			90.000.000	
172	DJPL	413508	UPP KOLAKA	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pelabuhan Laut Watunohu	7010101004	26		80.000.000			80.000.000	
173	DJPL	559395	UPP LAPUKO	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Munse	7010101004	1	9.617.606.800	7.160.674.455	7.160.674.455			
174	DJPL	559395	UPP LAPUKO	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse	7010101004	2	317.608.740	96.101.580	96.101.580			
175	DJPL	559395	UPP LAPUKO	Jalan, Irigasi, dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse	7010101004	3		2.698.089.505	2.698.089.505			
176	DJPL	413293	DISNAV PALEMBANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Rambu Suar di Tanjung Api api	7010101003	61	2.797.631.500	447.575.236	447.575.236			
177	DJPL	413293	DISNAV PALEMBANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Rambu Suar di Tanjung Baginda	7010101003	62	2.797.631.500	460.576.574	460.576.574			
178	DJPL	413293	DISNAV PALEMBANG	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pembangunan SBNP 6 Unit Ramsu dan 1 Unit Peningkaan Mensu Tanjung Jabung	7010101005	3	1.716.489.000	1.801.157.300	1.801.157.300			
179	DJKA	467478	Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan 1 (satu) unit Railways Crane Untuk Wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022 - 2024)	7010101002	168	117.990.780.000	21.208.842.705	21.208.842.705	-	-	Dilanjutkan MYC 2022-2024
180	DJKA	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	Tanah dalam pengerjaan	Survei Lahan Citeras	7010101001	1	1.204.665.000	1.204.665.000	-	-	1.204.665.000	akan dihapuskan karena sudah tidak relevan, perubahan lokasi
181	DJKA	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	Tanah dalam pengerjaan	Pendataan Awal Untuk Mendukung Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	7010101001	2	13,850,000	13.850.000	-	-	13.850.000	akan dihapuskan karena sudah tidak relevan, perubahan lokasi
182	DJKA	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	Tanah dalam pengerjaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Balai Pengujian Perkeretaapian Dan Test Track Antara Maja-Citeras	7010101001	3	49,384,500	49.384.500	-	-	49.384.500	akan dihapuskan karena sudah tidak relevan, perubahan lokasi
183	DJKA	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design (DED) Gedung Balai Pengujian	7010101003	1	49.170.000	49.170.000	-	-	49.170.000	akan dihapuskan karena sudah tidak relevan, perubahan lokasi
184	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Tanah Dalam Pengerjaan	BOP Pengadaan Tanah untuk Jalan Kereta Api di Lintas Utara Jawa	7010101001	25		1.391.977.893	1.391.977.893			Akan dikapitalisasi ke nilai aset setelah selesai pensertifikatan
185	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.0+000 s.dKm.1+712 sepanjang 1.712 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	1	21.000.527.000	21.704.359.532		21.704.359.532		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
186	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.1+712 s.d Km. 3+425 sepanjang 1.713 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	2	21.719.297.000	22.447.219.104		22.447.219.104		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
187	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 3+425 s.d Km. 5+137 sepanjang 1.712 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungkati Tuntang	7010101004	3	21.794.040.000	22.524.467.115		22.524.467.115		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
188	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.5+317 s.d Km. 6+850 sepanjang 1.713 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	4	21.477.621.000	22.197.443.334		22.197.443.334		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
189	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.6+850 s.d Km. 8+233 sepanjang 1.383 M'sp antara Temputan-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	5	16.586.721.000	17.142.624.851		17.142.624.851		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
190	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 8+233 s.d Km. 9+617 sepanjang 1.384 M'sp antara Temputan-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	6	16.064.010.000	16.602.395.195		16.602.395.195		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
191	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 9+617 s.d Km. 11+000 sepanjang 1.383 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	7	14.773.412.000	15.268.542.811		15.268.542.811		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
192	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 11+000 s.d Km. 12+384 sepanjang 1.384 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	8	16.679.718.000	17.238.738.645		17.238.738.645		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
193	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 12+384 s.d Km. 13+767 sepanjang 1.383 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	9	16.804.088.000	17.367.276.905		17.367.276.905		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
194	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 13+767 s.d Km. 15+151 sepanjang 1.384 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	10	16.322.957.000	16.870.020.802		16.870.020.802		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
195	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 15+151 s.d Km. 16+451 sepanjang 1.300 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	11	15.936.726.000	16.470.845.273		16.470.845.273		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
196	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 16+451 s.d Km. 17+651 sepanjang 1.200 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedujjati - Tuntang	7010101004	12	14.566.600.000	15.054.799.508		15.054.799.508		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
197	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 17+651 s.d Km. 18+951 sepanjang 1.300 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	13	16.175.926.000	16.718.062.059		16.718.062.059		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
198	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 18+951 s.d Km. 20+151 sepanjang 1.200 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	14	15.948.778.000	16.483.301.195		16.483.301.195		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
199	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 20+151 s.d Km. 21+891 sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	15	21.908.919.000	22.643.196.284		22.643.196.284		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
200	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 21+891 s.d Km. 23+631 sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	16	21.580.290.000	22.303.553.285		22.303.553.285		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
201	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 23+631 s.d Km. 25+371 sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	17	21.772.479.000	22.502.183.498		22.502.183.498		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
202	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	18	21.903.382.000	22.637.473.711		22.637.473.711		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
203	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 27+111 s.d Km. 28+855 sepanjang 1.744 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	19	21.826.365.000	22.557.875.487		22.557.875.487		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
204	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 28+855 s.d Km. 30+600 sepanjang 1.745 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang	7010101004	20	22.055.950.000	22.795.155.027		22.795.155.027		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
205	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 18 buah antara Kedungjati-Gogodalem Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	21	15.677.615.000	16.207.631.649		16.207.631.649		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
206	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 24 buah antara Gogodalem-Beringin Tuntang Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	22	21.092.778.000	21.805.866.280		21.805.866.280		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
207	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 18 buah antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	23	15.578.846.000	16.105.523.543		16.105.523.543		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
208	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH. 7 Km.6+200 dan BH.13 Km.6+375 antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati -Tuntang	7010101004	24	11.132.590.000	11.508.951.969		11.508.951.969		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
209	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH. 42 Km.16+750 antara Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	25	13.628.299.000	14.089.033.963		14.089.033.963		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
210	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH.16 Km.7+355 antara Tempuran- Gogodalem Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	26	16.236.535.000	16.785.447.183		16.785.447.183		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
211	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH.50 Km.18+572 dan BH.61 Km.22+629 antara Gogodalem - Beringin Lintas Kedungjati-Tuntang	7010101004	27	10.641.465.000	11.001.223.396		11.001.223.396		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
212	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 0 + 350 sd Km. 6+900 Antara Kedungjati - Tempuran	7010101004	153	10.986.290.000	48.264.068		48.264.068		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
213	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 6+900 sd Km. 12+500 Antara Tempuran - Gogodalem	7010101004	154	18.671.900.000	112.201.471		112.201.471		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
214	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 20+600 - 24+600 Antara Beringin - Tuntang	7010101004	155	13.734.500.000	489.522.506		489.522.506		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
215	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 24+600 - 30+500 Antara Beringin - Tuntang	7010101004	156	20.489.800.000	510.301.316		510.301.316		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
216	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Design Bangunan Stasiun Tempuran, Gogodalem dan Beringin Antara Kedungjati - Tuntang	7010101004	194	805.574.000	805.574.000		805.574.000		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
217	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Monitoring RKL-RPL Reaktivasi Jalur KA Kedungjati - Tuntang	7010101004	254	228.470.000	228.470.000		228.470.000		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
218	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL-RPL Reaktivasi Jalur KA Kedungjati - Tuntang (Paket : RKL-6)	7010101004	289	417.800.000	417.800.000		417.800.000		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
219	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Review Desain Reaktivasi Jalur KA Lintas Kedungjati- Tuntang (Paket : RSKT-1)	7010101004	291	3.751.400.000	3.922.900.000		3.922.900.000		Sudah diajukan untuk pekerjaan lanjutan namun terkendala prioritas anggaran, menunggu kebijakan lanjutan pembangunan
220	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	STD Pembangunan Stasiun KA Bandara Ahmad Yani Semarang (Paket : SU-3.18)	7010101003	1	2.447.384.000	2.447.384.000		2.447.384.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, masuk dalam RIPNAS 2030
221	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penataan Track Layout di Stasiun Tegal	7010101004	193	907.775.000	907.775.000		907.775.000		masuk RENSTRA Balai MYC 2023-2024
222	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi penanganan perlintasan sebidang di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora	7010101004	196	693.159.000	693.159.000		693.159.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
223	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED 5 Lokasi Underpass Lks. Di Slamet Riyadi, Badran Pasar Nangka, Gilingan dan Antara Solo - Wonogiri	7010101004	205	2.497.831.149	2.497.831.149		2.497.831.149		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, masuk RENSTRA BTP JATENG 2020-2024
224	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penggantian Jembatan Rasuk Kembar Bentang 15+15+15+15 dan Penggantian Pangkal Pilar pada Posisi Lengkung (R=401) di BH. 2016 Menjadi Jembatan Beton	7010101004	207	832.570.000	832.752.906		832.752.906		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
225	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan DED Normalisasi Jembatan (BH) Kereta Api Lintas Tegal - Bojonegoro	7010101004	252	1.718.680.000	1.718.680.000		1.718.680.000		Masuk pagu kebutuhan 2023, masuk renstra 2023
226	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro Km. 104+700 sampai dengan Km. 107+000 (Tahap I)	7010101004	389	280.477.352.000	117.976.077.896	117.976.077.896			Menunggu konstruksi selanjutnya
227	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ELEVATED ANTARA SOLO BALAPAN - KADIPIRO KM.106+900 S.D. KM.107+914 TERMASUK BH.314A DAN BH.314B	7010101004	391	45.547.596.240	45.547.596.240	45.547.596.240			Multiyears 2022-2023
228	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ELEVATED ANTARA SOLO BALAPAN - KADIPIRO KM.104+900 SD KM.106+900	7010101004	392	27.579.583.800	27.579.583.800	27.579.583.800			Multiyears 2022-2023
229	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JALUR KA ELEVATED ANTARASOLO BALAPAN - KADIPIRO KM.104+900 SDKM.106+900 (TAHAP 2)	7010101004	393	63.272.432.260	67.143.216.351	67.143.216.351			Multiyears 2022-2023
230	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ANTARA SOLO BALAPAN - KADIPIRO - KALIOSO KM. 96+400 SD KM.104+900 (JGSS-6)	7010101004	395	24.677.343.000	24.677.343.000	24.677.343.000			Multiyears 2022-2023
231	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multiyears 2022-2023)(PKS.05-22)	7010101004	396	418.189.000	616.278.000	616.278.000			Multiyears 2022-2023
232	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multiyears 2022-2023)(PK.01-22)	7010101004	397	15.043.956.000	15.124.680.000	15.124.680.000			Multiyears 2022-2023
233	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Dokumen Pengawasan Lingkungan / RKL-RPL Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multiyears 2022 - 2023)(PKS.06-22)	7010101004	398	757.483.000	757.483.000	757.483.000			Multiyears 2022-2023
234	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Basic Engineering Design (BED) Peningkatan Jalur KA Antara Maos-Cilacap	7010101004	399	98.925.420	98.925.420	98.925.420			Menunggu konstruksi selanjutnya
235	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENANGANAN DARURAT LONGSORAN TANAH JALUR KERETA API PADA BH 385 KM 92+740 - KM 92+800 LINTAS CEPU - BOJONEGORO	7010101004	400	187.713.000	187.713.000	187.713.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
236	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENANGANAN DARURAT LONGSORAN TANAH JALUR KERETA API PADA BH 385 KM 92+740 - KM 92+800 LINTAS CEPU - BOJONEGORO	7010101004	401	11.447.000	11.447.000	11.447.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
237	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENGADAAN MATERIAL DAN PERSIAPAN AREA PEMBUATAN JEMBATAN DARURAT GUNA PENANGANAN LONGSORAN PADA KM.372+390 ANTARA STASIUN KAWUNGANTEN - STASIUN JERUKLEGI	7010101004	402	189.235.000	189.235.000	189.235.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
238	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMASANGAN DAN PEMBUATAN JEMBATAN DARURAT GUNA PENANGANAN LONGSORAN PADA KM.372+390 ANTARA STASIUN KAWUNGANTEN - STASIUN JERUKLEGI	7010101004	403	187.950.000	187.950.000	187.950.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
239	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERKUATAN STABILITAS BADAN JALAN KA PADA KM. 393+6/7 ANTARA STASIUN MAOS - STASIUN SIKAMPUH	7010101004	404	189.079.000	189.079.000	189.079.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
240	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMASANGAN PIPA PENGALIHAN AIR GUNA PENANGANAN SEMENTARA AMBLESAN KM.367+575 S.D KM.367+700 ANTARA STASIUN KAWUNGANTEN - STASIUN JERUKLEGI	7010101004	405	188.764.000	188.764.000	188.764.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
241	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERKUATAN LERENG PADA LOKASI AMBLESAN KM.367+575 S.D KM.367+700 ANTARA STASIUN KAWUNGANTEN - STASIUN JERUKLEGI	7010101004	406	188.290.000	188.290.000	188.290.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
242	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERKUATAN STABILITAS BADAN JALAN KA PADA KM. 392+7/8 ANTARA STASIUN MAOS - STASIUN SIKAMPUH	7010101004	407	187.648.000	187.648.000	187.648.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
243	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENANGANAN DARURAT LONGSORAN ANTARA BANJAR - KROYA	7010101004	408	59.000.000	59.000.000	59.000.000			Menunggu konstruksi selanjutnya
244	DJKA	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah	Jaringan dalam Pengerjaan	KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI JALUR GANDA KERETA API SOLO SEMARANG FASE I (SOLO BALAPAN KADIPIRO - KALIOSO) (JGSS Paket	7010101007	10	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000			Multiyears 2022-2023
245	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Study UKLUPL Perlintasan Tidak Sebidang Antara Tanjungkarang - Tarahan	7010101004	295	1.886.222.000	1.840.272.000			1.840.272.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
246	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Sta.KA Bandara Termasuk Jembatan Penghubung Antara Stasiun KA Bandara dengan Bandara Radin Inten II	7010101004	294	2.629.350.000	2.629.350.000		2.629.350.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
247	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Persinyalan KA Double Track Antara Cempaka - Rejosari	7010101004	293	1.048.135.000	948.075.000		948.075.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, sebagian lokasi DED sudah dibangun konstruksinya
248	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan KA Double Track Antara Cempaka - Rejosari	7010101004	292	2.711.936.000	2.711.936.000		2.711.936.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, sebagian lokasi DED sudah dibangun konstruksinya
249	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Amdal dan Larap Pembangunan jalur KA Antara Palembang-Betung - Jambi	7010101004	291	3.865.150.000	3.865.150.000			3.865.150.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jaringan Rel KA Trans Sumatera Antara Palembang - Betung - Jambi	7010101004	290	3.952.000.000	3.952.000.000		3.952.000.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
251	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Perlintasan tidak sebidang underpass/flyover antara Tanjungkarang-Tarahan Lintas TarahanTanjungenim	7010101004	289	3.335.354.000	3.335.354.000		3.335.354.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, akan dilanjutkan dengan skema KPBU
252	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Fasilitas operasi Stasiun Tanjungkarang	7010101004	288	1.209.250.000	1.209.250.000		1.209.250.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, sebagian lokasi DED sudah dibangun konstruksinya
253	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Cempaka - Rejosari	7010101004	287	5.287.474.500	5.287.474.500		5.287.474.500		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, sebagian lokasi DED sudah dibangun konstruksinya
254	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Amdal Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Cempaka - Rejosari	7010101004	286	1.692.300.000	1.692.300.000			1.692.300.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
255	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL Pembangunan Underpass Labuan Ratu	7010101004	285	926.808.000	926.808.000			926.808.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
256	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pemb.Persinyalan Elektrik di St. Muara Enim dan Baturaja	7010101004	284	1.229.200.000	1.229.200.000		1.229.200.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
257	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur ganda KA antara Muara Enim - Lahat	7010101004	283	1.963.200.000	1.963.200.000		1.963.200.000		akan dilanjutkan dengan skema investasi PT KAI
258	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Study Penyusunan Amdal dan Larap Pembangunan Shortcut Jalur KA Antara Rejosari - Tarahan (D.2013-5A)	7010101004	280	1.933.932.000	1.933.932.000			1.933.932.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
259	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Study Perkuatan Jalur KA Gunung Sangkaran KM.167+200 - KM.168 + 700	7010101004	279	1.073.053.000	1.073.053.000		1.073.053.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, akan dilanjutkan dengan skema KPBU
260	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Egineering Desain (DED) Shortcut Rejosari - Tarahan (Jembatan dan Sinyal)	7010101004	278	1.252.404.000	1.252.404.000		1.252.404.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, akan dilanjutkan dengan skema KPBU
261	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Egineering Desain (DED) Modifikasi Persinyalan Antara Negeriagung - Blambangan Umpu	7010101004	277	786.882.000	786.882.000		786.882.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan, akan dilanjutkan dengan skema KPBU
262	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Reaktivasi Jalur Ka Menuju Pelabuhan Panjang	7010101004	312	452.900.000	452.900.000			452.900.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
263	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalur Ka Lintas Jambi - Betung Palembang (SEGMEN I)	7010101004	314	1.455.000.000	1.455.000.000		1.455.000.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
264	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Jalur Ka Lintas Jambi - Betung Palembang (SEGMEN II)	7010101004	315	1.140.095.000	1.140.095.000		1.140.095.000		menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
265	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Basic Desain Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Tegineneng - KM.3 TAHAP I	7010101004	317	2.357.000.000	2.357.000.000		2.357.000.000		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
266	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	1	854.070.000	610.753.244	-	610.753.244	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
267	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	2	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
268	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	3	121.500.000	96.500.000	-	96.500.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
269	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	4	28.175.756	9.175.756	-	9.175.756	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
270	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	5	28.370.000	9.370.000	-	9.370.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
271	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	6	18.240.000	18.240.000	-	18.240.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
272	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	7	36.495.000	36.495.000	-	36.495.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
273	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	8	49.995.000	49.995.000	-	49.995.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
274	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	9	24.710.000	24.710.000	-	24.710.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
275	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	10	76.996.400	76.996.400	-	76.996.400	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
276	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Operasional Kegiatan DPPT Segmen 1 dan Segmen 2	7010101001	11	190.550.000	190.250.000	-	190.250.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
277	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Kegiatan Operasional Tanah - Plg	7010101001	12	40.150.000	40.150.000	-	40.150.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
278	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya Kegiatan Operasional Tanah - Jambil	7010101001	13	40.150.000	40.150.000	-	40.150.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
279	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya ATK Kegiatan Operasional Tanah - Plg	7010101001	14	35.200.000	35.200.000	-	35.200.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
280	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	Untuk Biaya ATK Kegiatan Operasional Tanah - Jambi	7010101001	15	35.200.000	35.200.000	-	35.200.000	-	menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan dan termasuk dalam renstra BTP Sumbagsel 2020-2024
281	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Sudi DED Pengembangan dan Penataan Gudang Payakabung	7010101003	15	438.800.000	438.800.000	-	438.800.000		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi
282	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Perbaikan Sruktur Dinding Penahan tanah BH.925 km.399++273 Antara Muara Enim - Banjarsari	7010101004	326	325.610.000	325.610.000	-	325.610.000		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi
283	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian Penataan Underpass KM.429+716 di Kabupaten Lahat	7010101004	325	556.635.613	556.635.613	-	556.635.613		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi
284	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Design Pembangunan Stasiun dan penataan emplasemen KA Bandara Radin Inten 2	7010101004	327	1.769.600.000	1.769.600.000	-	1.769.600.000		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi
285	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL-UPL Pembangunan Stasiun dan Penataan Emplasemen KA Bandara Radin Inten 2	7010101004	328	701.976.000	701.976.000	-	701.976.000		menunggu kebijakan pembangunan konstruksi
286	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Peningkatan Sistem Telekomunikasi dan Hubungan Blok Lintas Lahat - Lubuk Linggau	7010101007	1	85.244.924.000	85.244.924.000	85.244.924.000	-	-	
287	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan Sistem Telekomunikasi dan Hubungan Blok Lintas Lahat - Lubuk Linggau	7010101007	2	2.769.200.000	2.769.200.000	2.769.200.000	-	-	
288	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Untuk Optimalisasi Pengoperasian di Satasiun Lahat dan Lubuk Linggau	7010101007	3	11.828.313.635	11.828.313.635	11.828.313.635	-	-	
289	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Supervisi Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Untuk Optimalisasi Pengoperasian di Satasiun Lahat dan Lubuk Linggau	7010101007	4	283.286.000	283.286.000	283.286.000	-	-	
290	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan DED Peningkatan Jembatan BH 998 KM 419+893 Antara Banjar Sari - Sukacinta Lintas Muara Enim - Lahat	7010101004	342	1.753.504.000	1.753.504.000	1.753.504.000	-	-	
291	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan DED Peningkatan Jalur KA Antara Rejosari -Martapura Lintas Tarahan - Tanjung Enim	7010101004	343	2.332.119.000	2.332.119.000	2.332.119.000	-	-	
292	DJKA	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan DED Penanganan Daerah Rawan di Lintas Tarahan - Tanjung enim	7010101004	344	1.933.551.000	1.933.551.000	1.933.551.000	-	-	
293	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Engineering Services of Surabaya Railways Line	7010101002	63	20.800.646.449	20.800.646.449	20.800.646.449			Akan di kapitalisasi setelah Konstruksi Pekerjaan Fisik Selesai
294	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Pelabuhan Patimban	7010101002	62	1.638.491.250	1.638.491.250			1.638.491.250	Dikarenakan dampak perubahan trase dan penyusunan dokumen lingkungan hidup perlu dikaji ulang sehingga dokumen ini tidak dapat digunakan
295	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.06-18 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancang Dasar Pembangunan Jalur KA Antara Balikpapan - Samarinda	7010101002	58	3.357.072.400	3.357.072.400		3.357.072.400		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
296	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.07-18 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancang Dasar Pembangunan Jalur KA Menuju Pelabuhan Bakauheni	7010101002	59	1.974.885.000	1.974.885.000		1.974.885.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
297	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.01-18 Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalur KA Segmen Banjar - Banjar Baru - Banjarmasin	7010101002	56	1.587.630.000	1.587.630.000		1.587.630.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
298	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.02-18 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja	7010101002	54	1.431.958.000	1.431.958.000			1.431.958.000	Menindaklanjuti dari permintaan pemprov bali, studi SID pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja selanjutnya hingga pekerjaan konstruksi akan dilakukan oleh Pemprov Bali
299	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.04-18 Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalur KA Segmen Tanjung – Jaro	7010101002	55	1.354.540.000	1.354.540.000		1.354.540.000		menunggu kebijakan lanjut pembangunan
300	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.C.06-18 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya	7010101002	57	2.999.392.000	2.999.392.000	2.999.392.000			telah dilakukan reviu oleh Pemprov Jateng dengan hasil perlu dilakukan kajian ulang terhadap trase kereta api menuju KSPN Borobudur
301	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.C.07-18 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba (Pematang Siantar – Simalungun/Parapat)	7010101002	60	2.645.005.000	2.645.005.000	2.645.005.000			Trase akan ditetapkan jika telah dilakukan pengembangan dengan pola KPBU (sudah dilidak lanjutin dengan studi pendahuluan KPBU (Penyusunan Studi Pendahuluan dan Outline Business Case Proyek Proyek Perkeretaapian Siantar - Parapat dengan Skema KPBU) pada tahun 2018)
302	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta - Surabaya	7010101002	61	8.612.835.000	8.612.835.000	8.612.835.000			Sedang berproses untuk dilakukan kajian dari sisi akademisi terkait dengan kelayakan pembangunan Surabaya High Speed Railways (Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta - Surabaya)
303	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.08.17 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Segmen Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin	7010101002	52	1.789.425.000	1.789.425.000		1.789.425.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
304	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.01.17 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Sorong - Manokwari (Segmen III)	7010101002	51	3.986.191.000	3.986.191.000		3.986.191.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
305	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.02.17 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur KA Saketi - Bayah	7010101002	53	1.972.905.000	1.972.905.000		1.972.905.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
306	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.03.17 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Akses Jalur KA Menuju Pelabuhan Patimban	7010101002	50	1.762.332.000	1.762.332.000		1.762.332.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
307	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.07-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Palangkaraya - Pulang Pisau	7010101002	8	1.252.240.000	1.252.240.000		1.252.240.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
308	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.08-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Tanjung-Paringin-Kandangan-Rantau	7010101002	9	1.440.093.600	1.440.093.600		1.440.093.600		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
309	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.A.09-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Pontianak – Sanggau	7010101002	10	2.034.616.300	2.034.616.300		2.034.616.300		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
310	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.01-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Mamuju - Topoyo - Pasangkayu (300 Km)	7010101002	11	3.253.294.000	3.253.294.000		3.253.294.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
311	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.02-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Pasangkayu - Palu - Parigi (200 Km)	7010101002	12	2.667.000.000	2.667.000.000		2.667.000.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
312	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.03-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Parigi - Moutong (260 Km)	7010101002	13	3.256.991.100	3.256.991.100		3.256.991.100		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
313	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.04-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Moutong - Marisa - Isimu (200 Km)	7010101002	14	2.116.021.600	2.116.021.600		2.116.021.600		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
314	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.05-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Pulang Pisau-Kuala Kapuas-Andir Pasar	7010101002	15	1.398.977.000	1.398.977.000		1.398.977.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
315	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.06-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Muara Koman (Paser, Kaltim)-Samuntai (Paser, Kaltim)	7010101002	16	1.885.537.500	1.885.537.500		1.885.537.500		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
316	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.07-16 Studi Trase Jalur KA lintas Surabaya - Bandara Juanda	7010101002	17	893.406.800	893.406.800		893.406.800		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 & Mendukung KPBU (Perpres 80 Tahun 2019)
317	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.08-16 Studi Trase Jalur KA serta Kajian Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan KA Bandara Soetta	7010101002	18	2.288.605.000	2.288.605.000			2.288.605.000	Sudah Beroperasi Dengan Trase Batu Ceper - Bandara Soekarno Hatta (konstruksi dilakukan oleh KAI sehingga tidak dapat dilakukan kapitalisasi aset)

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
318	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.B.09-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Marabahan - Andir Pasar - Banjarmasin (74 Km)	7010101002	19	1.262.965.000	1.262.965.000		1.262.965.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
319	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.C.03-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Poso - Malili (190 Km)	7010101002	20	1.969.649.000	1.969.649.000		1.969.649.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
320	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.C.04-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Api antara Parigi – Poso	7010101002	21	1.476.816.000	1.476.816.000		1.476.816.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
321	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.C.06-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Semuntai (Paser, Kaltim) - Karang Joang (Balikpapan Kaltim) (114 Km)	7010101002	22	1.771.528.000	1.771.528.000		1.771.528.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
322	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.07.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Bireun-Lhokseumawe	7010101002	23	479.050.000	479.050.000		479.050.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
323	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.08.15 Studi Trase Jalur KA Lintas Bireun - Sigli	7010101002	24	1.322.464.000	1.322.464.000		1.322.464.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
324	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.09.15 Studi Trase Jalur KA Lintas Lhokseumawe-Langsa-Kuala Langsa	7010101002	25	1.924.425.800	1.924.425.800		1.924.425.800		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
325	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.10.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Rantau Prapat-Duri-Dumai	7010101002	26	768.526.000	768.526.000		768.526.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
326	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.11.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Duri-Pekanbaru-Muaro	7010101002	27	799.213.800	799.213.800		799.213.800		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
327	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.14.15 Studi Trase Reaktivitas Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	7010101002	28	955.026.600	955.026.600		955.026.600		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
328	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.15.15 Studi Trase Reaktivitas Jalur KA lintas Purwokerto-Wonosobo	7010101002	29	1.340.823.000	1.340.823.000		1.340.823.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
329	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.17.15 Studi Trase Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Jombang - Babat	7010101002	30	1.164.251.000	1.164.251.000		1.164.251.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
330	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.01.15 Kajian Trase Pembangunan Jalur KA Antara Pekanbaru– Rengat	7010101002	31	1.759.263.000	1.759.263.000		1.759.263.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
331	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.02.15 Kajian trase Pembangunan Jalur KA antara Rengat - Jambi	7010101002	32	2.101.198.000	2.101.198.000		2.101.198.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
332	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.03.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antara Jambi - Betung	7010101002	33	1.851.135.000	1.851.135.000		1.851.135.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
333	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.04.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antara Betung - Palembang	7010101002	34	924.861.300	924.861.300		924.861.300		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
334	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.06.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antara Polewali – Wonomulyo – Majene - Mamuju	7010101002	35	1.670.887.900	1.670.887.900		1.670.887.900		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
335	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.07.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antara Parepare – Pinrang - Polewali	7010101002	36	1.338.730.800	1.338.730.800		1.338.730.800		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
336	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.08.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antara Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin	7010101002	37	2.463.098.000	2.463.098.000		2.463.098.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
337	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.09.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antara Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan	7010101002	38	2.932.154.500	2.932.154.500		2.932.154.500		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
338	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.10.15 Review Pra Desain/Kajian Trase Pembangunan Jalur KA antara Pontianak - Sambas - Batas Negara	7010101002	39	2.798.768.500	2.798.768.500		2.798.768.500		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
339	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.11.15 Kajian kelayakan & Trase Pembangunan Jalur KA antara Sorong - Manokwari segmen 1 - 190 km	7010101002	40	2.938.397.000	2.938.397.000		2.938.397.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
340	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.12.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antara Sorong - Manokwari segmen 2 - 200 km	7010101002	41	3.171.069.000	3.171.069.000		3.171.069.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
341	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	APBNP.13.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antara Jayapura - Sarmi - 205 km	7010101002	42	2.672.406.000	2.672.406.000		2.672.406.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
342	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKT.13.14 Studi Trase Lingkar Luar Jabotabek (Nambo-Cikarang-Tj. Priok) Tahap II	7010101002	43	648.355.100	648.355.100		648.355.100		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
343	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKT.18.14 Studi AMDAL pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare	7010101002	44	1.510.367.000	1.510.367.000	1.510.367.000			Dalam Tahap Pembangunan (Konstruksi);
344	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PKTE.04.12 Penetapan Trase Pembangunan Jalan KA Lintas Makassar-Parepare	7010101002	45	1.453.273.342	1.453.273.342	1.453.273.342			Dalam Tahap Pembangunan (Konstruksi);
345	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	IP-536 (Mass Rapid Transit) (Studi-studi, Pindah dari Aset Tetap Lainnya)	7010101002	46	93.000.088.931	93.000.088.931		93.000.088.931		Perlu Pembahasan Dengan bagian Perencanaan Perihal Kepemilikan Aset Antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI
346	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD.1.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Cirebon - Kadipaten - Kertajati	7010101002	47	1.042.470.070	1.042.470.070		1.042.470.070		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
347	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD.2.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Komuter Medan dan Sekitarnya	7010101002	48	1.256.579.000	1.256.579.000		1.256.579.000		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
348	DJKA	467462	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD.3.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Bakauheni - KM3	7010101002	49	793.792.500	793.792.500		793.792.500		Masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030
349	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA dan Pemasangan Track termasuk pemasangan bantalan di KM. 8+500 s/d 13+600 antara Kr.Mane - Kuta Blang	7010101004	351	21.275.653.000	95.587.260.988		95.587.260.988		dihentikan sementara, sampai mendapat anggaran untuk kelanjutan pembangunan
350	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Layang Segmen A1-P2 arah Binjai antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - Kualanamu	7010101004	119	68.222.000.000	102.016.048.594	102.016.048.594			dilanjutkan pada tahun 2022 s.d 2024 lintas medan binjai
351	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Baru Stasiun dan Pemasangan Peralatan Pendukung Pelayanan di Stasiun Medan (STASIUN MANDALA (KONSEP RANCANG BANGUN)	7010101004	143	288.983.500.000	374.057.599			374.057.599	terjadi perubahan kebijakan dimana stasiun mandala tidak jadi dibangun karena 4 stasiun sudah dioperasikan
352	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan KA & Track antara Kuta Blang-Bireuen (Km 13+100 s/d 22+740) sepanjang 9,6 Km	7010101004	159	21.909.347.000	23.370.075.046		23.370.075.046		diusulkan tiap tahun, tapi ditolak karena bukan pekerjaan prioritas
353	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Underpass/Overpass Seksi matang Glp. Dua - Bireuen	7010101004	191	370.342.000	373.104.000		373.104.000		merupakan kelanjutan kegiatan pembangunan lintas lhoksumawe-bireun sepanjang 14km, tanah sudah dibebaskan, posisi overpass melintasi jalan nasional Balai sudah pernah mengajukan usulan anggaran sejak tahun 2017-2021 (menunggu kebijakan pembangunan)
354	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Desain Pembangunan Jalur KA antara Medan - Gabion	7010101004	179	1.710.923.000	1.710.923.000			1.710.923.000	perubahan kebijakan terkait angkutan barang dari belawan ke pelabuhan muara tanjung (dokumen masteplan MP3EI)
355	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Overpass Seksi Kr Mane -Lhokseumawe (2 lokasi)	7010101004	195	1.928.400.000	1.928.400.000			1.928.400.000	Lokasi overpass tidak lagi relevan dengan pembangunan jalur KA sessi Kr. Mane - Lhoksumawe yg dilakukan pada paket KGP-1 tahun 2021, karena di lokasi tsb dibangun perlintasan sebidang
356	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Dipo Induk Kutablang dan Sta Biereun	7010101004	196	1.066.420.000	1.066.420.000	1.066.420.000			karena sudah dilakukan pembebasan tanah seluas 41.412 m2 yang tercatat pada aset Tanah Jalan KA/Lori NUP 65 dan Balai sudah pernah mengajukan usulan anggaran pada tahun 2017
357	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jembatan KA 7 BH antara Lhokseumawe-Langsa Bentang > 100 m	7010101004	197	4.555.100.000	4.555.100.000		4.555.100.000		Masuk dalam Renstra dan RIPNAS (KP 296 tahun 2020), menunggu kebijakan pembangunan
358	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Desain Jalur KA antara Banda Aceh-Sigli	7010101004	198	2.485.942.000	2.485.942.000		2.485.942.000		Masuk dalam Renstra dan RIPNAS (KP 296 tahun 2020), menunggu kebijakan pembangunan
359	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Pekanbaru-Muaro	7010101004	185	2.511.200.000	2.511.200.000		2.511.200.000		Masuk dalam Renstra dan RIPNAS (KP 296 tahun 2020), menunggu kebijakan pembangunan
360	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	AMDAL Jalan KA Kr. Geukueh - Pelabuhan Kr. Keukeuh	7010101004	218	469.086.000	180.000.000			180.000.000	izin lingkungan sudah 6 tahun dan pembebasan tanah ke pelabuhan belum dilakukan
361	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan DED Short Cut Jalan KA Antara Lubuk Pakam - Kualanamu Dan Antara Bahlias - Kuala Tanjung	7010101004	228	3.388.581.000	3.388.581.000		3.388.581.000		akan dilanjutkan setelah jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung sudah beroperasi agar operasi KA dari Sei Mangke menuju Kuala Tanjung lebih efisien (tidak ada langsiran di st Bandar Tinggi yang mengganggu operasi KA lain)
362	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalur KA antara Medan-Binjai	7010101004	409	2.677.998.400	926.019.152	926.019.152			Multi years Kontrak dari Tahun 2022 s.d 2024
363	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Utilitas dan Penyempurnaan lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung KM 6+328 s/d KM 19+900	7010101004	370	2.620.139.500	2.106.979.000	2.106.979.000			
364	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Km 6+328 s/d Km 11+100	7010101004	371	46.649.742.301	34.365.978.739	34.365.978.739			
365	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Km 11+100 s/d Km 19+900	7010101004	369	47.675.027.795	35.760.989.225	35.760.989.225			
366	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung	7010101004	387	9.971.208.000	11.124.147.991	11.124.147.991			
367	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 414+000 S.D Km. 418+000	7010101004	243	84.994.126.000	103.085.076.604	103.085.076.604			
368	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 418+000 S.D Km. 420+500	7010101004	244	77.528.763.000	87.871.064.515	87.871.064.515			
369	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 420+500 S.D Km. 423+500	7010101004	245	82.829.267.000	93.833.282.010	93.833.282.010			
370	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 423+500 S.D Km. 426+000	7010101004	246	83.741.832.000	92.692.250.324	92.692.250.324			

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
371	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 426+000 S.D Km. 429+000	7010101004	247	79.523.487.000	93.960.897.558	93.960.897.558			
372	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 429+000 S.D Km. 431+500	7010101004	248	71.723.834.000	85.436.880.263	85.436.880.263			akan didefinitifkan
373	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 431+500 S.D Km. 434+000	7010101004	249	72.356.637.000	89.529.488.224	89.529.488.224			akan didefinitifkan
374	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 434+000 S.D Km. 438+000	7010101004	250	85.609.879.000	105.719.450.895	105.719.450.895			akan didefinitifkan
375	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 438+000 S.D Km. 441+000	7010101004	277	77.525.197.000	93.614.834.850	93.614.834.850			akan didefinitifkan
376	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 441+000 S.D Km. 444+000	7010101004	251	79.085.916.000	83.134.129.417	83.134.129.417			
377	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 444+000 S.D Km. 446+038	7010101004	252	63.372.795.000	69.257.833.538	69.257.833.538			akan didefinitifkan
378	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang KM. 411+000 s/d KM. 414+000	7010101004	310	113.383.146.000	127.507.704.197	127.507.704.197			
379	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stasiun KA Antara Sei Liput - Besitang sebanyak 3 Unit	7010101004	309	55.499.498.000	77.929.019.051	77.929.019.051			akan didefinitifkan
380	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Overpass, Jembatan Serta Penataan Track dan Final Tamping Antara Langsa-Besitang	7010101004	335	3.126.860.000	2.967.390.140	2.967.390.140			
381	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Sungai Besitang dan Sungai Liput (2 Unit) antara Langsa Besitang	7010101004	329	45.213.580.000	45.472.708.594	45.472.708.594			akan didefinitifkan
382	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Track dan Final Tamping Sepanjang 35 KM'SP Antara Langsa - Besitang	7010101004	330	30.022.539.000	22.668.795.975	22.668.795.975			
383	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Overpass Jalan Nasional 93 Unit) Antara Langsa-Besitang	7010101004	333	30.019.425.000	29.969.974.152	29.969.974.152			
384	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Radio Traindispatching Lintas Medan-Sei Liput	7010101004	331	34.365.617.000	37.843.492.604	37.843.492.604			akan didefinitifkan
385	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 0+000 S.D Km. 5+000	7010101004	258	83.355.244.000	98.511.556.628	98.511.556.628			akan didefinitifkan
386	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 5+000 S.D 10+000	7010101004	262	183.518.381.000	189.297.502.928	189.297.502.928			akan didefinitifkan
387	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 10+000 S.D 13+500	7010101004	276	129.544.672.000	149.077.670.215	149.077.670.215			akan didefinitifkan
388	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 13+500 S.D 17+000	7010101004	278	155.985.637.000	168.968.651.635	168.968.651.635			akan didefinitifkan
389	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 17+000 S.D Km. 20+500	7010101004	263	136.485.853.000	157.981.266.870	157.981.266.870			akan didefinitifkan
390	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 20+500 S.D Km. 25+500	7010101004	264	225.389.713.000	253.900.849.402	253.900.849.402			akan didefinitifkan
391	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 25+500 S.D Km. 29+000	7010101004	273	136.654.365.000	158.579.183.807	158.579.183.807			akan didefinitifkan
392	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 29+000 S.D Km. 33+000	7010101004	265	175.632.514.000	193.395.366.889	193.395.366.889			akan didefinitifkan
393	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stasiun KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang	7010101004	291	86.943.769.000	102.668.587.413	102.668.587.413			akan didefinitifkan
394	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemasangan Track Baru KA KM 000+000 s.d KM 10+000 Sepanjang 10.000 M'Sp antara Rantau Prapat-Kota Pinang	7010101004	328	37.403.424.760	66.003.443.464	66.003.443.464			akan didefinitifkan
395	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Kereta Api Bentang 140 m Antara Rantau Prapat-Kota Pinang KM 15+400	7010101004	325	53.627.451.259	61.087.554.221	61.087.554.221			akan didefinitifkan
396	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Kereta Api Bentang 140 m Antara Rantau Prapat-Kota Pinang KM 15+540	7010101004	326	54.900.879.473	62.466.337.091	62.466.337.091			akan didefinitifkan
397	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jalur KA Segmen Krueng Geukueh-Paloh Sepanjang 8 KM	7010101004	373	2.944.237.109	2.465.000.000	2.465.000.000			pekerjaan masih berlangsung
398	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalur KA Segmen Krueng Geukueh-Paloh Sepanjang 8 KM	7010101004	372	82.914.868.000	65.969.301.293	65.969.301.293			pekerjaan masih berlangsung
399	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R. 42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 0 + 000 s.d Km. 15 + 000 Sepanjang 15.000 MSp dan Pengamanan Tubuh baan di sekitar BH 10 KM 3 + 568 Antara Kisaran - Teluk Dalam Lintas Kisaran - Rantauprapat	7010101004	389	2.663.133.000	1.293.542.000	1.293.542.000			pekerjaan masih berlangsung
400	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54 Dari KM. 0+000 s.d KM. 8+000 Sepanjang 8.000 M'Sp Antara Kisaran - Henglo Lintas Kisaran - Rantau Prapat	7010101004	376	44.935.455.413	34.383.947.475	34.383.947.475			pekerjaan masih berlangsung
401	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54 Dari KM. 8+000 s.d KM. 15+000 Sepanjang 7.000 M'Sp Antara Kisaran - Henglo Lintas Kisaran - Rantau Prapat	7010101004	377	34.561.363.674	24.381.116.031	24.381.116.031			pekerjaan masih berlangsung
402	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R. 42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 15 + 000 s.d Km. 36 + 200 Sepanjang 21.200 MSp Antara Kisaran - Teluk Dalam Lintas Kisaran - Rantauprapat	7010101004	390	3.733.234.428	1.570.365.600	1.570.365.600			pekerjaan masih berlangsung
403	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54 Dari KM. 15+000 s.d KM. 19+000 Sepanjang 4.000 M'Sp Antara Kisaran - Henglo - Teluk Dalam Lintas Kisaran - Rantau Prapat	7010101004	378	38.211.035.463	21.302.909.294	21.302.909.294			pekerjaan masih berlangsung
404	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 19+000 s.d Km. 28+000 Sepanjang 9.000 MSp Antara Teluk Dalam-Pulau Raja Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	379	43.382.065.605	33.312.159.685	33.312.159.685			pekerjaan masih berlangsung
405	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian bantalan Beton dan Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 28+000 s.d Km. 36+200 Sepanjang 8.200 MSp Antara Teluk Dalam-Pulau Raja-Aek Loba Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	374	42.559.053.600	31.136.775.241	31.136.775.241			pekerjaan masih berlangsung
406	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R. 42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 36 + 200 s.d Km. 53 + 000 Sepanjang 16.800 MSp dan Antara Teluk Dalam - Mbambang Muda Lintas Kisaran - Rantauprapat, dan Penanganan Gogosan Track di Km 75+800 s.d Km 76+200 Antara Situngir - Pamingke Lintas Kisaran - Rantau Prapat	7010101004	386	2.996.642.000	1.306.115.000	1.306.115.000			pekerjaan masih berlangsung
407	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 36+200 s.d Km. 41+500 Sepanjang 5.300 MSp Antara Pulau Raja-Aek Loba Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	391	35.774.876.000	23.981.727.492	23.981.727.492			pekerjaan masih berlangsung
408	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton R.54 Dari Km. 41+500 s.d Km. 53+000 Sepanjang 11.500 MSp Antara Aek Loba-Mambanomuda Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	375	45.386.352.436	38.927.747.475	38.927.747.475			pekerjaan masih berlangsung
409	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pengamanan Tubuh Baan di sekitar BH.10 Km. 3+568 Antara Kisaran-Henglo Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	380	12.344.851.680	9.994.227.159	9.994.227.159			pekerjaan masih berlangsung
410	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Penanganan Gogosan Banjir pada Km. 75+800 s.d 76+400 Antara Situngir-Pamingke Lintas Kisaran-Rantauprapat	7010101004	392	14.036.350.970	4.020.922.064	4.020.922.064			pekerjaan masih berlangsung
411	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton Sebanyak 98.273 Batang Lengkap Dengan Alat Penambat	7010101004	381	87.163.237.350	47.712.168.000	47.712.168.000			pekerjaan masih berlangsung
412	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.33/42 Menjadi Bantalan Beton dan Rel R.54 Dari KM. 00+000 s.d 17+500 sepanjang 17.500 M'SP Antara Medan-Labuan Lintas Medan Belawan	7010101004	388	2.669.851.800	1.780.980.000	1.780.980.000			pekerjaan masih berlangsung
413	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.33/42 Menjadi Bantalan Beton dan Rel R.54 dari KM.00+000 s.d KM. 05+800 Sepanjang 5.800 M'sp Antara Medan-Pulu Brayan Lintas Medan-Belawan	7010101004	385	40.044.534.400	35.426.597.083	35.426.597.083			pekerjaan masih berlangsung
414	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.33/42 Menjadi Bantalan Beton dan Rel R.54 Dari KM.05+800 s.d KM. 13+000 Sepanjang 7.200 M'sp Antara Pulubrayan-Titi Papan Lintas Medan-Belawan	7010101004	383	44.074.384.886	34.086.222.360	34.086.222.360			pekerjaan masih berlangsung
415	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Beton dan Rel R.33/42 Menjadi Bantalan Beton dan Rel R.54 Dari KM.13+000 s.d KM. 17+500 Sepanjang 4.500 M'sp Antara Titi Papan-Labuan Lintas Medan-Belawan	7010101004	384	40.305.759.736	32.890.305.409	32.890.305.409			pekerjaan masih berlangsung
416	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton Sebanyak 28.740 Batang Lengkap Dengan Alat Penambat	7010101004	382	24.924.765.000	24.352.380.000	24.352.380.000			pekerjaan masih berlangsung
417	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur KA km. 0+000 s.d Km. 3+290 Lintas Medan Binjai dan Km. 0+000 s.d Km. 0+500 Lintas Medan - Araskabu	7010101004	402	18.506.700.000	5.375.850.584	5.375.850.584			pekerjaan masih berlangsung
418	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Km 0+000 s.d Km 1+745 (P0-P8) dan Km 0+000 s.d Km 0+500 Lintas Medan-Araskabu	7010101004	399	125.756.000.000	29.881.879.249	29.881.879.249			pekerjaan masih berlangsung
419	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Km. 1+745 s.d Km. 2+300 (P9-P23)	7010101004	404	172.412.587.000	40.968.320.478	40.968.320.478			pekerjaan masih berlangsung
420	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Km. 2+300 s.d Km. 2+850 (P24-P38)	7010101004	406	160.286.873.000	39.799.183.502	39.799.183.502			pekerjaan masih berlangsung

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
421	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Km. 2+850 s.d Km. 3+290 (P39-P50)	7010101004	405	136.196.144.000	32.362.644.522	32.362.644.522			pekerjaan masih berlangsung
422	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Km. 3+290 s.d Km. 6+400 dan Pembangunan Stasiun Helvetia serta Stasiun Sunggal termasuk Emplasemen	7010101004	398	5.130.075.060	1.505.115.636	1.505.115.636			pekerjaan masih berlangsung
423	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai Km. 3+290 s.d Km. 6+400 dan Pembangunan Stasiun Helvetia serta Stasiun Sunggal termasuk Emplasemen	7010101004	401	190.232.785.473	64.975.018.975	64.975.018.975			pekerjaan masih berlangsung
424	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Emplasemen Layang Dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II	7010101004	403	10.338.100.000	2.161.604.800	2.161.604.800			pekerjaan masih berlangsung
425	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II	7010101004	410	382.440.000.000	67.057.973.400	67.057.973.400			pekerjaan masih berlangsung
426	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur KA Medan-Binjai	7010101004	407	2.890.871.500	868.913.342	868.913.342			pekerjaan masih berlangsung
427	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur KA antara Medan-Binjai	7010101004	397	93.947.887.000	17.678.307.013	17.678.307.013			pekerjaan masih berlangsung
428	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	RKL RPL Peningkatan Jalur KA Medan -Belawan Tahap I Segmen Medan-Labuan	7010101004	412	1.541.587.980	373.738.000	373.738.000			Multi years Kontrak dari Tahun 2022 s.d 2023
429	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perbaikan Aspal Perlintasan Lintas Medan-Binjai, Medan-Tebing Tinggi, Tebing Tinggi-Siantar dan Perlintasan Jl. Mandala By Pass Lintas Medan-Araskabu	7010101004	414	1.698.894.000	1.768.794.000	1.768.794.000			menunggu rincian dari tim teknis
430	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Penambat E-Clip Sebanyak 104.992 Pcs Lintas Binjai Besitang	7010101004	415	3.891.318.496	3.891.318.496	3.891.318.496			menunggu rincian dari tim teknis
431	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemasangan Penambat E-Clip Lintas Binjai Besitang	7010101004	416	182.969.000	182.969.000	182.969.000			menunggu rincian dari tim teknis
432	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlintasan Lintas Serdang Bedagai	7010101004	413	4.600.000.000	4.693.347.729	4.693.347.729			menunggu rincian dari tim teknis
433	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai	7010101004	417	149.163.000	152.189.962	152.189.962			menunggu rincian dari tim teknis
434	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai	7010101004	418	149.525.000	152.559.309	152.559.309			menunggu rincian dari tim teknis
435	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Penertiban Lahan Lintas Medan-Binjai Segmen I (DPP-1)	7010101001	53	152.251.000	152.251.000	152.251.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
436	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Penertiban Lahan Lintas Medan-Binjai Segmen II (DPP-2)	7010101001	54	143.070.400	143.070.400	143.070.400			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
437	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Sewa Kendaraan Operasional Penertiban Lahan Lintas Medan-Binjai	7010101001	59	178.200.000	178.200.000	178.200.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
438	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	RAB Rapat Persiapan Pelaksanaan dan Penertiban & Perjadin Lintas Medan-Binjai	7010101001	66	45.878.000	185.230.000	185.230.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
439	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Honor Tim Terpadu & Honor Tim Satgas Lintas Medan-Binjai	7010101001	68	184.200.000	827.100.003	827.100.003			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
440	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penilaian Objek Penertiban Lahan Jalur Layang Kereta Api Lintas Medan-Binjai Segmen I	7010101001	73	99.620.000	99.620.000	99.620.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
441	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penilaian Objek Penertiban Lahan Jalur Layang Kereta Api Lintas Medan-Binjai Segmen II	7010101001	74	97.640.000	97.640.000	97.640.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
442	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penilaian Objek Penertiban Lahan Jalur Layang Kereta Api Lintas Medan-Binjai Segmen III	7010101001	75	99.484.000	99.484.000	99.484.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
443	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penilaian Objek Penertiban Lahan Jalur Layang Kereta Api Lintas Medan-Binjai Segmen IV	7010101001	76	97.504.000	97.504.000	97.504.000			akan dikapitalisasi ke NUP induknya yang ada di KANPUS
444	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Sewa Kendaraan Operasional Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Antara Bandar tinggi-Kuala Tanjung (Sertifikasi)	7010101001	77	165.000.000	165.000.000	165.000.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
445	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Sewa Kendaraan Operasional Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang	7010101001	79	159.720.000	159.720.000	159.720.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
446	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Sewa Kendaraan Operasional Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Lintas Medan-Binjai	7010101001	81	178.200.000	178.200.000	178.200.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
447	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Penertiban Lahan Lintas Medan-Binjai Segmen III (Km. 6+400 s.d 21+000)	7010101001	83	972.552.500	972.552.500	972.552.500			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
448	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Silalas II Lintas Medan Binjai	7010101001	84	25.429.220	1.260.134.573	1.260.134.573			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
449	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Sei Agul-1, 3, 4 Lintas Medan Binjai	7010101001	85	5.892.262.531	5.892.262.531	5.892.262.531			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
450	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Dwikora-1-9 Lintas Medan Binjai	7010101001	86	7.414.589.000	7.447.763.000	7.447.763.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
451	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Seiputih Barat, Timur, Tengah Lintas Medan Binjai	7010101001	87	5.596.946.807	5.565.592.487	5.565.592.487			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
452	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Sekip Lintas Medan Binjai	7010101001	88	1.501.117.720	1.501.117.720	1.501.117.720			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
453	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Honor Anggaran Tim Satgas Penangan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penertiban Lahan utk Pembangunan Jalur Layang KA Lintas Medan-Binjai	7010101001	89	727.600.000	727.600.000	727.600.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
454	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	UP ATK TANAH (ATK & Perjadin Tanah Lintas Medan-Binjai)	7010101001	90	167.166.500	167.166.500	167.166.500			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
455	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	UP ATK TANAH (ATK & Perjadin Tanah Lintas Rantau Prapat-Kota Pinang)	7010101001	91	260.130.000	260.130.000	260.130.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
456	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penertiban Lahan Bangunan Tanaman dan Benda Lainnya di Kel. Helvetia Lintas Medan Binjai	7010101001	92	5.801.774.700	5.801.774.700	5.801.774.700			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
457	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	UP ATK TANAH (ATK & Perjadin Tanah Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung)	7010101001	93	193.736.000	193.736.000	193.736.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
458	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Honor Tim Tanah Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung	7010101001	94	523.110.000	523.110.000	523.110.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
459	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Honor Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalur KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang	7010101001	96	756.800.000	756.800.000	756.800.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
460	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penilaian Objek Pengadaan Tanah Untuk Frontage Road Jalur KA Antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Segmen II	7010101001	97	343.489.000	343.489.000	343.489.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
461	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Antara Bahlias - Tanjung Gading	7010101001	98	495.022.000	495.022.000	495.022.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
462	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	Penerima Kerohiman Bangunan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Desa Lalang Kec. Medang Deras (3 Bidang Luas 225,1 m2)	7010101001	99	537.561.922	537.561.922	537.561.922			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
463	DJKA	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Tanah dalam Pengerjaan	BIAYA PANJAR GANTI KERUGIAN TANAH SEGMEN I ANTARA BANDAR TINGGI-KUALA TANJUNG 15 BIDANG	7010101001	100	36.750.000	36.750.000	36.750.000			akan dikapitalisasi jika aset tanahnya sudah ada
464	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Tanah dalam Pengerjaan	BOPP Tanah Jatim	7010101001	5	34.970.059.301	34.970.059.301	34.970.059.301			
465	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Tanah dalam Pengerjaan	Studi Perbaikan tanah jalur eksisting lintas Bojonegoro - Surabaya Pasarturi (Paket K-TJG)	7010101001	3	1.711.314.000	1.711.314.000			1.711.314.000	kondisi lingkungan mengalami perubahan dari pada saat penyusunan studi, studi lebih dari 5 tahun
466	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kajian dan desain pembangunan gudang dan kantor UPT/ Balai Perkeretaapian (Paket K-GB)	7010101003	45	1.096.205.000	1.096.205.000		1.096.205.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan untuk pekerjaan konstruksi
467	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perencanaan dan Perancangan lebar Spoor 1.435 mm Lintas Surabaya - Banyuwangi	7010101004	103	2.983.673.000	2.983.673.000			2.983.673.000	Lintas Surabaya - Banyuwangi telah dilakukan peningkatan rel R.42 menjadi rel R,54 di beberapa lokasi berdasarkan kondisi eksisting lebar spoor. Peningkatan tersebut telah dilakukan penilaian kembali dalam periode revaluasi 2017-2020
468	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan jalur Kereta Api dari Stasiun Waru ke Bandara Udara Juanda	7010101004	104	889.345.000	889.345.000		889.345.000		telah dilakukan reviu DED pada tahun 2019 dimana trase yang digunakan DED 2010
469	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED pembangunan Underpass/Overpass Lintas Madiun - Surabaya (4 Lokasi Jalan Propinsi)	7010101004	105	1.991.719.000	1.991.719.000		1.991.719.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan untuk pekerjaan konstruksi
470	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan jalur ganda Wonokromo - Mojokerto	7010101004	106	1.993.571.000	1.993.571.000		1.993.571.000		Reviu DED dilakukan tahun 2018 dan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pada jalur ganda Wonokromo - Mojokerto, akan dikapitalisasi dengan hasil reviu DED.
471	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan Pendampingan Teknis (Paket K-PT)	7010101004	107	965.800.000	965.800.000			965.800.000	Studi lebih dari 5 tahun dan NUP induk telah dilakukan penilaian kembali dalam periode revaluasi 2017-2020
472	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan KA Perkotaan Surabaya (Paket K-TSB)	7010101004	108	4.307.977.000	4.307.977.000		4.307.977.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
473	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Jembatan KA untuk RM 1921 Lintas Kalisat – Panarukan Km. 214+462 s/d Km. 284+016	7010101004	111	1.573.113.000	1.573.113.000		1.573.113.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
474	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian Kelayakan dan DED Peningkatan Jalan KA Lintas Kalisat – Panarukan Km. 214+462 s/d Km. 284+016	7010101004	112	1.486.571.000	1.486.571.000		1.486.571.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
475	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Stasiun, Persinyalan dan Telekomunikasi antara Kalisat – Panarukan Lintas Kalisat – Panarukan	7010101004	113	1.200.069.000	1.200.069.000		1.200.069.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
476	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jembatan antara Kalisat – Panarukan Lintas Surabaya – Panarukan	7010101004	114	1.489.529.000	1.489.529.000		1.489.529.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
477	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Jembatan antara Tapen - Panarukan Lintas Surabaya - Panarukan	7010101004	115	1.064.000.000	1.064.000.000		1.064.000.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
478	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Track Layout di Stasiun antara Bangil - Jember	7010101004	116	1.072.995.000	1.072.995.000		1.072.995.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
479	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Sistem Persinyalan antara Bangil - Banyuwangi (34 Stasiun)	7010101004	117	1.018.218.000	1.018.218.000		1.018.218.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
480	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Track Layout Tahap II antara Arjasa - Banyuwangi	7010101004	118	1.143.941.000	1.143.941.000		1.143.941.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
481	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Flyover/Underpass di JPL No.3 Jalan Jakarta di Emplasemen Kalimas	7010101004	119	1.408.500.000	1.408.500.000		1.408.500.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
482	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jembatan Penyebrangan Orang sebanyak 25 Lokasi dan Underpass sebanyak 10 Lokasi Lintas Surabaya - Solo	7010101004	120	2.516.600.000	2.516.600.000		2.516.600.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
483	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Track dan Jembatan untuk Jalur Ganda antara Wonokromo - Bangil	7010101004	121	4.067.100.000	4.067.100.000		4.067.100.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
484	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED pembangunan jalur KA Tulangan – Gununggangsir	7010101004	122	4.393.000.000	4.393.000.000		4.393.000.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
485	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi / Kajian Teknis Penanganan Amblesan Badan Jalan KA Antara Bangil - Banyuwangi	7010101004	123	3.342.350.000	3.342.350.000		3.342.350.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
486	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang Lintas Surabaya – Malang	7010101004	124	866.100.000	866.100.000		866.100.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
487	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang Lintas Surabaya - Banyuwangi	7010101004	125	855.600.000	855.600.000		855.600.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
488	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan UKL - UPL Dan Larap Pembangunan Jalur Ganda KA Surabaya Pasar Turi - Kalimas - Sidotopo	7010101004	126	413.700.000	413.700.000			413.700.000	1. Studi lebih dari 5 tahun; 2. Kondisi lingkungan mengalami perubahan dibandingkan pada saat penyusunan studi.
489	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Amdal Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Wonokromo - Probolinggo	7010101004	127	756.250.000	756.250.000			756.250.000	1. Studi lebih dari 5 tahun; 2. Kondisi lingkungan mengalami perubahan dibandingkan pada saat penyusunan studi.
490	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan UKL - UPL Pembangunan Jalur Kereta Api Menuju Teluk Lamong	7010101004	128	665.700.000	665.700.000			665.700.000	1. Studi lebih dari 5 tahun; 2. Kondisi lingkungan mengalami perubahan dibandingkan pada saat penyusunan studi.
491	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design Jembatan KA Sungai Porong Antara Tulangan Gunung gangsir	7010101004	181	970.600.000	970.600.000		970.600.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
492	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Inventarisasi Prasarana dan Penanganan Daerah Rawan Longsor Dan Amblesan Koridor Bangil - Blitar - Kertosono	7010101004	182	2.458.400.000	2.458.400.000		2.458.400.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
493	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur KA Menuju Teluk Lamong Track dan Jembatan	7010101004	183	2.301.300.000	2.301.300.000		2.301.300.000		masuk dalam RIPNAS 2030, menunggu kebijakan pembangunan
494	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Kajian Penanganan Dan Penutupan Perlintasan Sebidang Lintas Surabaya Pasarturi - Cepu (Paket KJPL)	7010101004	201	1.469.600.000	1.469.600.000	1.469.600.000			belum ada kegiatan/pekerjaan konstruksi
495	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Studi Larap Pembangunan Jalur KA Menuju Pelabuhan Teluk Lamong (Paket KSL)	7010101004	203	846.750.000	846.750.000	846.750.000			belum ada kegiatan/pekerjaan konstruksi
496	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultansi DED persinyalan KA Menuju Pelabuhan Teluk Lamong (Paket K-STL)	7010101004	204	1.255.810.000	1.255.810.000	1.255.810.000			belum ada kegiatan/pekerjaan konstruksi
497	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Review DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Wonokromo-Mojokerto (Paket KR-JG)	7010101004	205	2.841.500.000	2.841.500.000	2.841.500.000			belum ada kegiatan/pekerjaan konstruksi
498	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultansi DED persinyalan Jalur KA antara Tulangan - Gunuggangsir (Paket K-STG)	7010101004	206	1.239.256.000	1.239.256.000	1.239.256.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
499	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 23+000 sd Km 26+000 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	265	70.914.444.000	40.897.896.000	40.897.896.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
500	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 26+000 sd Km 29+000 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	260	44.178.000.000	41.517.698.000	41.517.698.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
501	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 29+000 sd Km 32+000 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	267	41.429.625.000	30.961.096.000	30.961.096.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
502	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 32+000 sd Km. 35+000 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	263	58.970.055.000	40.732.631.000	40.732.631.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
503	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 35+000 sd Km. 37+800 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	264	52.657.576.000	44.829.909.000	44.829.909.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
504	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 37+800 sd Km. 40+800 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	266	72.457.699.000	66.745.189.000	66.745.189.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
505	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 40+800 sd Km. 43+800 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	261	57.449.709.000	43.087.281.000	43.087.281.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
506	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 49+500 sd Km. 52+500 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	268	52.607.777.000	40.716.610.000	40.716.610.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
507	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 52+500 sd Km. 56+000 antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya - Solo	7010101004	262	49.232.132.000	35.056.338.000	35.056.338.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
508	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa KM. 43+800 s/d KM 49+500 antara Mojokerto - Sepanjang Lintas Surabaya – Solo	7010101004	270	146.161.697.000	112.792.272.000	112.792.272.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
509	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/ Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Km. 23+000 sd Km 56+000 antara Mojokerto - Sepanjang	7010101004	269	23.058.255.000	15.804.275.000	15.804.275.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
510	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Flyover Pengganti JPL 64 Km 38+897 Lintas Surabaya Solo	7010101004	276	157.113.547.000	42.658.351.000	42.658.351.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
511	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Flyover Pengganti JPL 79 Km 43+376 Lintas Surabaya Solo	7010101004	273	55.967.356.000	10.595.523.000	10.595.523.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
512	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi/Pengawasan Pembangunan Flyover Pengganti JPL 79 Km 43+376 Lintas Surabaya Solo	7010101004	274	6.630.586.000	2.291.470.000	2.291.470.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
513	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi/Pengawasan Pembangunan Flyover Pengganti JPL 64 Km 38+897 Lintas Surabaya Solo	7010101004	275	6.456.811.000	2.207.357.000	2.207.357.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
514	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Mojokerto - Surabaya Gubeng	7010101004	289	1.271.000.000	1.271.000.000	1.271.000.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
515	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi jalur ganda kereta api antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya Solo	7010101007	1	179.305.486.000	121.030.909.000	121.030.909.000			Pekerjaan Masih Brlangsung
516	DJKA	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	RKL-PL Pembangunan Jalur Ganda antara Sepanjang Mojokerto	7010101004	1	945.783.270	945.783.270	945.783.270			Pekerjaan Masih Brlangsung
517	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Short Cut Solok Padang Tahap I	7010101004	81	1.753.532.000	1.753.532.000		1.753.532.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
518	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Short Cut Solok Padang Tahap II	7010101004	83	1.697.437.267	1.697.437.267		1.697.437.267		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
519	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Terowongan KA Antara Kayu Tanam - Padang Panjang	7010101004	85	997.367.787	997.367.787		997.367.787		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
520	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jalan dan Jembatan KA Antara Naras - Sungai Limau	7010101004	86	1.589.645.869	1.589.645.869		1.589.645.869		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
521	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jalan dan Jembatan KA Antara Muaro Kalaban - Muaro Sijunjung	7010101004	87	2.359.476.897	2.359.476.897		2.359.476.897		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
522	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Sinyal Mekanik Pemasangan Saluran Blok Elektromekanik menggunakan FO Antara Stasiun Padang - Tabing	7010101004	88	876.724.123	876.724.123		876.724.123		Menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
523	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Mengganti 10 Unit Jembatan KA Menjadi RM. 1921 antara Bukit Putus – Padang (BH.8, BH.11, BH.15, BH.16, BH.18, BH.20, BH.21, BH.22, BH.25 dan BH.26)	7010101004	93	1.954.500.000	1.954.500.000	1.954.500.000			menunggu konstruksi 2022-2024 (pekerjaan padang - Bukit putus - Pauh Lima)
524	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Bangunan Operasional dan Gudang Balai Teknik Perkertaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	7010101003	9	983.000.000	983.000.000	983.000.000			Akan dilanjutkan dengan skema SBSN MYC
525	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Amdal untuk reaktivasi pembangunan Jalur KA antara Muaro-Muaro Kalaban	7010101004	96	1.076.500.000	1.076.500.000			1.076.500.000	amdal lebih dari 5 tahun
526	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian Aksi Pembebasan/Penertiban Lahan dan Bangunan untuk Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Muaro Kalaban-Muaro	7010101004	97	679.300.000	679.300.000			679.300.000	amdal lebih dari 5 tahun
527	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 151+400 s.d 153+400 (2 Km'sp)	7010101004	67	7.156.690.000	7.156.690.000		7.156.690.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
528	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 153+400 s.d 155+400 (2 km'sp)	7010101004	68	10.789.580.000	10.789.580.000		10.789.580.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
529	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 155+400 s.d 157+400 (2 km'sp)	7010101004	69	6.707.900.000	6.707.900.000		6.707.900.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
530	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 151+400 s.d 157+400	7010101004	63	778.525.000	778.525.000		778.525.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
531	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 157+400 s.d 159+400 (2 km'sp)	7010101004	70	9.025.163.000	9.025.163.000		9.025.163.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
532	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 159+400 s.d 161+400 (2 km'sp)	7010101004	71	6.371.400.000	6.371.400.000		6.371.400.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
533	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 161+400 s.d 163+400 (2 km'sp)	7010101004	58	5.550.200.000	5.550.200.000		5.550.200.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
534	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 163+400 s.d 164+400 (1 km'sp)	7010101004	57	3.671.413.000	3.671.413.000		3.671.413.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
535	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 157+400 s.d 164+400	7010101004	64	789.112.000	789.112.000		789.112.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
536	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningk. Jembatan KA Koridor Kayu Tanam-Padang Panjang-Batu Tabal (Segmen 1) 14 BH	7010101004	79	2.390.670.000	2.390.670.000		2.390.670.000		masuk dalam renstra BTP Sumbagbar
537	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningk. Jembatan KA Koridor Kayu Tanam-Padang Panjang -Batu Tabal (Segmen 2) 14 BH	7010101004	77	2.841.000.000	2.841.000.000		2.841.000.000		masuk dalam renstra BTP Sumbagbar
538	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningk. Jembatan KA Koridor Kayu Tanam-Pdg Panjang-Bt.Tabal (Segmen 3)12 BH dan Its Pdg–Lubuk Alung 3 BH	7010101004	80	3.084.173.000	3.084.173.000		3.084.173.000		masuk dalam renstra BTP Sumbagbar
539	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Persinyalan Elektrik Lintas Padang-Lubuk Alung-Pariaman	7010101004	76	1.951.200.000	1.951.200.000		1.951.200.000		Menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
540	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Penetapan Trase Jalur KA Padangpanjang-Payahkumbuh	7010101004	75	1.783.000.000	1.783.000.000		1.783.000.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
541	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Penetapan Trase dan Desain Pembangunan Jalur KA Muaro-Logas	7010101004	78	2.550.700.000	2.550.700.000		2.550.700.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
542	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan UKL/UPL untuk pembangunan Jalur KA antara Naras-Sungai Limau	7010101004	74	693.200.000	693.200.000	693.200.000			masuk dalam renstra 2020-2024 dan RKA 2023, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
543	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 164+400 s.d 165+400 pengawasan	7010101004	99	3.945.260.000	3.945.260.000		3.945.260.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
544	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Stasiun Kereta Api sebanyak 4 buah termasuk 2 Halte antara Muaro Kalaban-Muaro	7010101003	10	1.005.502.000	1.005.502.000		1.005.502.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
545	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Jalur KA Kacang-Muara Kalaban-Sawahlunto dan Sterilisasi Jalur KA Kacang-Muara Kalaban-Sawahlunto	7010101004	114	2.739.000.000	2.739.000.000		2.739.000.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
546	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Terowongan BH. 10a Km. 153+705 antara Muaro Kalaban-Muaro	7010101004	113	1.248.900.000	1.248.900.000		1.248.900.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
547	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Telaah RKL-RPL Pembangunan Muaro Kalaban-Muaro	7010101004	111	478.193.000	478.193.000			478.193.000	amdal lebih dari 5 tahun
548	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Badan Jalan Muaro Kalaban - Muaro Km. 165+400 s.d Km. 166+400 sepanjang 1.000 m'sp	7010101004	116	3.157.560.000	3.157.560.000		3.157.560.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
549	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Badan Jalan Muaro Kalaban - Muaro Km. 165+400 s.d Km. 166+400 sepanjang 1.000 m'sp	7010101004	117	77.495.000	77.495.000		77.495.000		masuk dalam RIPNAS, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
550	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian Aksi Pembebasan/Penertiban Lahan dan Bangunan untuk Rencana Reaktivasi Jalur KA Antara Muaro - Logas	7010101004	128	736.725.000	736.725.000			736.725.000	amdal lebih dari 5 tahun
551	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Amdal Reaktivasi Jalur KA Padang Panjang - Bukittinggi	7010101004	129	1.304.534.000	1.304.534.000			1.304.534.000	amdal lebih dari 5 tahun
552	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Telaah RKL-RPL Pembangunan Muaro Kalaban - Muaro	7010101004	130	383.400.000	383.400.000			383.400.000	amdal lebih dari 5 tahun
553	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Laporan Monitoring AMDAL (RKL-RPL) Pembangunan Muaro Kalaban - Muaro	7010101004	138	95.589.230	95.589.230			95.589.230	amdal lebih dari 5 tahun
554	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Laporan Monitoring RKL-RPL Pembangunan Jalur Kereta Api Naras - Sungai Limau	7010101004	139	95.589.230	95.589.230	95.589.230			masuk dalam renstra 2020-2024 dan RKA 2023, menunggu kebijakan kelanjutan pembangunan
555	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Peningkatan Jalur KA Padang - Bukit Putus	7010101004	140	4.889.724.150	4.889.724.150	4.889.724.150			Sedang proses pembangunan
556	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan + Pengawasan Pembangunan Bangunan Operasional	7010101003	16	9.066.137.895	9.066.137.895	9.066.137.895			
557	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penanganan + Pengawasan Penanganan Perlintasan Sebidang dengan Pemasangan Level Crossing Pracetak di Wilayah Padang - Pariaman	7010101004	158	9.021.361.000	9.021.361.000	9.021.361.000			
558	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan + Pengawasan Penanganan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun kecil (Shelter) Alai	7010101004	159	1.303.692.000	1.303.692.000	1.303.692.000			
559	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan + Pengawasan Peningkatan Jembatan KA BH. 8 bentang 25 m Km. 2+772 Antara Bukit Putus - Padang	7010101004	142	2.377.336.950	2.377.336.950	2.377.336.950			
560	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan + Pengawasan Peningkatan Jembatan KA BH. 15 bentang 20+60+20 m Antara Bukit Putus - Padang	7010101004	142	7.618.567.500	7.618.567.500	7.618.567.500			
561	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan + Pengawasan Peningkatan Jembatan KA BH. 11 bentang 25 m Km. 3+344 dan BH. 16 bentang 20+20 m Km. 5+105 Antara Bukit Putus - Padang	7010101004	144	4.180.121.550	4.180.121.550	4.180.121.550			
562	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan + Pengawasan Peningkatan Jembatan KA BH. 18 bentang 15 m Km. 5+585 dan BH. 20 bentang 15 m Km. 5+841 Antara Bukit Putus - Padang	7010101004	143	3.769.997.400	3.769.997.400	3.769.997.400			
563	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton R.54 dan Aksesoris	7010101004	141	3.008.094.000	3.008.094.000	3.008.094.000			
564	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan + Pengawasan Pembangunan Stasiun Kampung Juar	7010101003	13	513.861.537	513.861.537	513.861.537			
565	DJKA	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengembangan + Pengawasan Pengembangan Fasilitas Stasiun Pauhlima	7010101003	15	742.831.274	742.831.274	742.831.274			
566	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Biaya Rapat Penertiban Lahan)	7010101001	2	3.853.317.619	3.853.317.619	3.853.317.619			akan dikapitalisasi ke NUP induk
567	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Perjalanan Dinas penertiban)	7010101001	3	3.669.562.615	3.669.562.615	3.669.562.615			akan dikapitalisasi ke NUP induk
568	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pengadaan Penilaian Terhadap Objek Penertiban Lahan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi yaitu Kelurahan Benda Tenjoayu dan Cicurug	7010101001	4	474.630.000	474.630.000	474.630.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
569	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Bayar ke warga)	7010101001	5	16.538.838.032	16.538.838.032	16.538.838.032			akan dikapitalisasi ke NUP induk
570	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (honor tim penertiban)	7010101001	6	717.450.000	717.450.000	717.450.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
571	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (konsultan penertiban KJPP)	7010101001	7	164.312.500	285.888.000	285.888.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
572	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Ciomas - Maseng	7010101001	8	193.620.000	193.620.000	193.620.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
573	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Parungkuda - Cibadak	7010101001	9	196.460.000	196.460.000	196.460.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
574	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan daftar nominatif warga untuk penertiban lahan dalam batas ROW untuk pembangunan jalur ganda KA antara Karang Tengah-Pondok Leungsir	7010101001	10	192.990.000	192.990.000	192.990.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
575	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cisaat - Sukabumi	7010101001	11	196.070.000	196.070.000	196.070.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
576	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maseng - Cigombong	7010101001	12	196.350.000	196.350.000	196.350.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
577	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Batutulis - Ciomas	7010101001	13	194.370.000	194.370.000	194.370.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
578	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Bogor - Batutulis	7010101001	14	195.210.000	195.210.000	195.210.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
579	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cicurug - Parungkuda	7010101001	15	195.050.000	195.050.000	195.050.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
580	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cibadak - Karang Tengah	7010101001	16	193.490.000	193.490.000	193.490.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
581	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pendataan dan Penyusunan Daftar Nominatif Warga untuk Penertiban Lahan dalam batas ROW untuk Pembangunan Jalur Ganda KA antara Pondok Leungsir - Cisaat	7010101001	17	194.640.000	194.640.000	194.640.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
582	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Bayar ke warga)	7010101001	18	5.945.648.904	5.945.648.904	5.945.648.904			akan dikapitalisasi ke NUP induk

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
583	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Appraisal penertiban)	7010101001	19	302.746.000	302.746.000	302.746.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
584	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Appraisal penertiban)	7010101001	20	190.641.000	190.641.000	190.641.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
585	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Honor tim penertiban)	7010101001	21	4.455 900.000	4.455.900.000	4.455.900.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
586	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Bayar ke warga penertiban)	7010101001	22	102.452.462.891	102.452.462.891	102.452.462.891			akan dikapitalisasi ke NUP induk
587	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Appraisal Penertiban lahan)	7010101001	26	487.195.000	487.195.000	487.195.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
588	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Appraisal Penertiban lahan)	7010101001	27	485.848.000	485.848.000	485.848.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
589	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Appraisal Penertiban lahan)	7010101001	28	342.573.000	342.573.000	342.573.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
590	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Tanah (Honor Tim Penertiban)	7010101001	32	8.878.862.250	8.878.862.250	8.878.862.250			Akan dijadikan aset definitif
591	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pengadaan jasa penilai/appraisal terhadapobjek penertiban lahan antara st.kiaracondong-st.cicalengka	7010101001	33	394.900.000	394.900.000	394.900.000			Akan dijadikan aset definitif
592	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	BOPP (Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadan)	7010101001	53	179.419.000	179.419.000	179.419.000			akan dikapitalisasi ke NUP induk
593	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Tanah Dalam Pengerjaan	BOPP (Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadan)	7010101001	54	12.448.056.849	12.448.056.849	12.448.056.849			akan dikapitalisasi ke NUP induk
594	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Detail Rinci untuk pengembangan Gedebage (Master Plan)	7010101003	4	746.561.000	746.561.000			746.561.000	Masterplan Gedebage diusulkan untuk dihapus karena saat ini gedebage telah beralih fungsi sebagai stasiun campuran (stasiun barang dan angkutan penumpang) serta terdapat bangunan fasilitas di area gedebage
595	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penetapan lokasi dan detail enginering desain (DED) Pembangunan Gudang Peralatan dan Logistik Cicalengka	7010101003	5	1.278.600.000	1.278.600.000	1.278.600.000			Akan dilakukan Kapitalisasi setelah pekerjaan fisiknya selesai. Kapitalisasi dilakukan di tahun 2023
596	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	7010101003	6	714.306.000	714.306.000			714.306.000	diusulkan untuk dihapuskan, DED sudah tidak dapat digunakan karena terjadi perubahan layout serta kebutuhan fungsi gedung kantor menjadi gedung operasional. DED gedung operasional di review dan saat ini sudah persiapan
597	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penggantian Sistem Persinyalan Lintas Bandung - Ciroyom	7010101003	8	3.624.547.300	2.842.607.672	2.842.607.672			akan di kapitalisasi ke kontruksinya
598	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 6+100 s/d 6+500 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	1	2.876.586.000	1.150.634.400		1.150.634.400		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
599	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 6+500 s/d 7+000 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (500 M'sp)	7010101004	2	2.875.392.000	605.078.400		605.078.400		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
600	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 7+000 s/d 7+400 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	3	3.120.864.000	624.172.800		624.172.800		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
601	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 7+400 s/d 7+800 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	4	3.163.959.000	632.791.800		632.791.800		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
602	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 7+800 s/d 8+200 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	5	3.453.120.000	690.624.000		690.624.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
603	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 8+200 s/d 8+600 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	6	3.834.298.000	766.859.600		766.859.600		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
604	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 8+600 s/d 9+000 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	7	3.741.504.000	3.285.040.512		3.285.040.512		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
605	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa di km.0+000-km.1+500 (1350 msp)	7010101004	8	16.763.548.000	16.763.548.000		16.763.548.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
606	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa di km.1+500-km.3+500 (1080 msp)	7010101004	9	9.087.534.000	9.087.534.000		9.087.534.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
607	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa di km.3+500-km.4+900 (950 msp)	7010101004	10	12.822.803.000	12.822.803.000		12.822.803.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
608	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	11	846.428.000	846.428.000		846.428.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
609	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Badan Jalan KA Jalur Ganda KA antara Cibungur - Tanjungrasa di Km.4+900 s.d Km.6+100	7010101004	26	8.267.888.000	8.311.340.428		8.311.340.428		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
610	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Badan Jalan KA Jalur Ganda KA di Km.4+900 s.d Km.6+100 antara Cibungur - Tanjungrasa (KTR.9)	7010101004	34	258.533.000	258.533.000		258.533.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
611	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian AMDAL dan Larap untuk Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi antara Padalarang-Bandung-Cicalengka	7010101004	58	1.189.200.000	1.238.106.000	1.238.106.000			Akan dilakukan Kapitalisasi setelah pekerjaan fisiknya selesai. Kapitalisasi dilakukan di tahun 2023
612	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Desain BH.1034 dan BH 1043 antara Stasiun Babakan- Stasiun Waruduwur Lintas Semarang Cirebon	7010101004	59	492.000.000	492.000.000			492.000.000	Urgensi daripada pekerjaan DED pada tahun 2015 akan dilakukan penanganan daerah longsor dengan hasil DED merekomendasikan dilakukan kontruksi. Namun pada tahun 2016 sampai dengan saat ini belum ada pembiayaan kontruksi. Serta urgensi penanganan jembatan/longsoran ini hasil desain tersebut tidak dapat lagi digunakan karena kondisi di lapangan sudah berbeda/terjadi perubahan yang disebabkan faktor lingkungan sehingga Review Desain BH.1034 dan BH 1043 antara Stasiun Babakan- Stasiun Waruduwur Lintas Semarang Cirebon diusulkan untuk dihapuskan. Untuk kedepannya akan diusulkan studi DED untuk memetakan kondisi terkini.
613	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Kembali Jalur KA Antara Rancaekek-Tanjungsari Lintas Rancaekek-Kertajati	7010101004	60	442.270.000	470.399.200			470.399.200	Jalur Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati merupakan jalur reaktivasi maka diperlukan penertiban lahan. Telah dianggarkan penertiban lahan namun terkendala pandemi. Pradesain tidak dapat digunakan kembali karena sudah dilakukan perubahan trase oleh pemda, pradesain diusulkan dihapuskan karena proyek jalur ini telah dimasukkan dalam proyek KPBU. Sehubungan pekerjaan pradesainnya dimasukkan dalam proyek KPBU sehingga UKL-UPL ini diusulkan penghapusan
614	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Review Desain Pembangunan Jalur KA dari Pasoso ke Dermaga Jakarta Tanjung Priok	7010101004	61	999.181.300	999.181.300			999.181.300	Diusulkan dihapuskan karena masterplan pelabuhan Tanjung Priok sudah mengalami perubahan dan sampai saat ini belum ada anggaran pembangunan jalur KA Pasoso - Tanjung Priok
615	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL/UPL Jalan KA Pasoso ke Dermaga JICT	7010101004	62	490.200.000	490.200.000			490.200.000	Diusulkan dihapuskan karena konstruksi dilakukan oleh PT KAI, maka UKP-UPL dihentikan permanen
616	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Kembali Lintas Bandung-Ciwidey sepanjang 38 KM termasuk dan 10 Jembatan Bentang >20 m	7010101004	63	2.480.000.000	2.508.129.200			2.508.129.200	Program reaktivasi Bandung-Ciwidwey direncanakan pada Tahun 2015, namun sampai saat ini belum ada anggaran konstruksi untuk reaktivasi hal ini disebabkan karena program prioritas BTP JABAR pada lintas utama. DED pembangunanan kembali lintas Bandung-Ciwidey sepanjang 38 KM termasuk dan 10 jembatan Bentang >20 m ini diusulkan dihapuskan karena telah terjadi perubahan kondisi di lapangan sehubungan dengan kondisi lingkungan di mana bangunan tersebut tidak ada perawatan. Kemudian saat ini setditjen KA melakukan survey ulang trase jalur KA lintas mati di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung-Ciwidey.
617	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Mengangkat Jembatan BH 1042 antara Waruduwur-Babakan	7010101004	64	747.500.000	775.629.200			775.629.200	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi lintas utara existing dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Diusulkan Penghapusan KDP dikarenakan telah melewati masa manfaat 5 (Lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
618	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penanganan Daerah rawan Longsor di 3 Lokasi pada lintas Cikampek-Padalarang	7010101004	66	1.477.200.000	1.504.908.200			1.504.908.200	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi lintas utara existing dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Diusulkan Penghapusan KDP dikarenakan telah melewati masa manfaat 5 (Lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
619	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Pradesain Pembangunan Jalan KA Lintas Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati	7010101004	67	581.256.248	581.256.248			581.256.248	Jalur Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati merupakan jalur reaktivasi maka diperlukan pembebasan lahan. Telah dianggarkan penertiban lahan namun terkendala pandemi. Pradesain tidak dapat digunakan kembali karena sudah dilakukan perubahan trase oleh pemda, pradesain diusulkan dihapuskan karena proyek jalur ini telah dimasukkan dalam proyek KPBU
620	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Pengembangan Transportasi Kereta Api yang Efisien dan Ramah Lingkungan Jawa Barat	7010101004	68	979.200.000	984.696.248			984.696.248	Studi Pengembangan Transportasi Kereta Api yang Efisien dan Ramah Lingkungan Jawa Barat ini diusulkan untuk dihapuskan dikarenakan terdapat kesalahan pencatatan akun.
621	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penghilangan Perlintasan Sebidang Lintas Cikampek - Cirebon Tahap I	7010101004	69	1.927.665.000	1.927.665.000			1.927.665.000	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi lintas utara existing dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Diusulkan Penghapusan KDP dikarenakan telah melewati masa manfaat 5 (Lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
622	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penghilangan Perlintasan Sebidang Lintas Cirebon - Brebes Tahap I	7010101004	70	1.986.312.000	1.986.312.000			1.986.312.000	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi lintas utara existing dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Diusulkan Penghapusan KDP dikarenakan telah melewati masa manfaat 5 (Lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
623	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Perbaikan Hidrolika Sungai pada Jembatan Antara Purwakarta - Padalarang	7010101004	71	2.980.571.000	2.980.571.000			2.980.571.000	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi lintas utara existing dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Diusulkan Penghapusan KDP dikarenakan telah melewati masa manfaat 5 (Lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
624	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review DED Jalur Ganda Antara Purwakarta – Padalarang Termasuk Desain 16 Jembatan	7010101004	73	7.981.394.000	7.981.394.000	7.981.394.000			Akan dilanjutkan karena pekerjaan dilakukan secara parsial
625	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Kecepatan Kereta Api Antara Cirebon - Brebes	7010101004	74	1.320.867.000	1.388.930.000	1.388.930.000			akan dikapitalisasi ke proyek lintas utara
626	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED 4 Jembatan KA Antara Purwakarta-Ciganea untuk Jalur Ganda	7010101004	75	1.515.047.000	1.515.047.000	1.515.047.000			Akan dilanjutkan karena pekerjaan dilakukan secara parsial
627	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api Antara Cicalengka-Cipendeuy (9 BH) Lintas Bandung-Kroya (Tahap I)	7010101004	76	1.765.079.000	1.765.079.000	1.765.079.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
628	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL-UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Antara Cikampek-Cirebon	7010101004	77	774.771.000	774.771.000			774.771.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Belum ada pembiayaan konstruksi lintas Cikampek - Cirebon
629	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Cicalengka-Cipendeuy Lintas Bandung-Kroya (Tahap I)	7010101004	78	1.363.671.000	1.363.671.000	1.363.671.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
630	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL-UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Antara Cirebon-Brebes	7010101004	79	767.423.000	767.423.000			767.423.000	Diusulkan penghapusan dikarenakan telah melewati masa manfaat 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PP. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Belum ada pembiayaan konstruksi lintas Cirebon - Brebes
631	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	UKL-UPL Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	7010101004	80	650.149.000	650.149.000			650.149.000	Kebutuhan UKL-UPL sangat terbatas pada waktu tertentu karena perubahan lingkungan sangat dinamis dan banyak faktor yang mengakibatkan tidak valid lagi. Dalam hal ini pembangunan Kantor Gedung BTP Jabar sudah berjalan 5 (lima) tahun, sehingga UKL-UPL ini tidak dapat digunakan lagi. Diusulkan untuk dihapuskan bersamaan dengan DED karena pembangunan Gedung Kantor BTP mengalami perubahan layout.
632	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km.7+400 s/d Km.8+600 antara St.Cibungur - St.Tanjungrasa lintas Cibungur-Tanjungrasa (1200 M'sp)	7010101004	81	117.457.837	117.457.837		117.457.837		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
633	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Teknik dan Desain Perbaikan Geometri dan Penanganan Daerah Rawan Longsor Antara Cianjur - Padalarang	7010101004	84	1.861.728.000	2.029.979.000	2.029.979.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
634	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kegiatan pendukung Grounbreaking Double Track lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	85	278.165.780	278.165.780	278.165.780			Akan dilakukan Kapitalisasi setelah pekerjaan fisiknya selesai. Kapitalisasi dilakukan di tahun 2023
635	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review DED Jalur Ganda Antara Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	86	4.571.338.000	4.571.338.000		4.571.338.000		Proses lanjut melalui skema KPBU sesuai Outline Business Case (OBC) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
636	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Desain Jalur Ganda Antara Gedebage – Cicalengka Termasuk Desain 4 Jembatan	7010101004	87	3.363.945.000	3.363.945.000	3.363.945.000			Akan dilakukan Kapitalisasi setelah pekerjaan fisiknya selesai. Kapitalisasi dilakukan di tahun 2023
637	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Terowongan Sasaksaat	7010101004	88	4.333.010.000	4.333.010.000	4.333.010.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
638	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Desain Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Bogor-Sukabumi (DED-03)	7010101004	101	958.457.000	958.457.000	958.457.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
639	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Desain Pembangunan Jalan dan Jembatan KA (Jalur Ganda) Antara Bogor-Cigombong Lintas Bogor-Yogyakarta (DED-1)	7010101004	102	3.458.194.000	3.520.190.000	3.520.190.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
640	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Desain Pembangunan Jalan dan Jembatan KA (Jalur Ganda) Antara Cicurug-Sukabumi Lintas Bogor-Yogyakarta (DED-2)	7010101004	103	4.031.430.000	4.031.430.000	4.031.430.000			Masuk dalam Rencana Strategis Nasional untuk Jalur Lintas Selatan
641	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur Ganda Antara Cicurug-Sukabumi Lintas Bogor-Yogyakarta dan LARAP Bogor-Sukabumi (AMDAL)	7010101004	104	2.028.783.000	2.028.783.000	2.028.783.000			akan dikapitalisasi ke proyek lintas Bogor
642	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Jalur Ganda Antara Bogor - Cigombong Lintas Bogor - Yogyakarta (DED-04)	7010101004	106	834.890.000	333.956.000	333.956.000			Akan dilakukan Kapitalisasi setelah pekerjaan fisiknya selesai. Kapitalisasi dilakukan di tahun 2023
643	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Operasi Bogor - Sukabumi	7010101004	118	3.347.329.700	3.611.647.380	3.611.647.380			Pekerjaan sedang berjalan
644	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Km. 9+600 termasuk penataan Emplasemen St. Maseng antara Ciomas - Maseng Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	148	14.263.456.000	15.462.798.872	15.462.798.872			Pekerjaan sedang berjalan
645	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA Km. 13+800 s/d 19+300 antara Maseng - Cigombong Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	154	2.770.121.000	3.039.140.000	3.039.140.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
646	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jembatan BH. 89 BH. 107 dan BH. Km. 13+798 antara Ciomas-Cigombong	7010101004	155	1.820.921.000	2.225.306.042	2.225.306.042			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
647	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalaur ganda KA Km. 9+300 s/d Km. 13+800 antara Ciomas - Maseng	7010101004	156	3.490.256.000	3.838.606.195	3.838.606.195			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
648	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Superivsi Pembangunan Jembatan BH. 61 BH 68 BH 75 Jembatan Km. 9+798 JPO Km. 9+600 Termasuk Penataan Emplasemen St. Maseng antara Ciomas - Maseng Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	157	2.568.661.000	2.427.488.673	2.427.488.673			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
649	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (2 Unit) Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	160	10.348.530.000	11.084.600.000	11.084.600.000			Pekerjaan sedang berjalan
650	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM.0+600 Pembangunan BH.16 BH.19 dan Penataan Emplasement St.Bogor Paledang Antara Bogor Paledang-Batu Tulis Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	161	92.050.738.000	112.234.617.737	112.234.617.737			Pekerjaan sedang berjalan
651	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA KM.0+200 s.d KM.4+200 Antara Bogor Paledang-Batu Tulis Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	162	5.975.260.000	6.569.585.000	6.569.585.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
652	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA KM.4+200 s.d 9+300 antara Batu Tulis_Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	163	3.962.235.000	4.358.279.000	4.358.279.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
653	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM.4+200 s.d KM.6+800 dan Pembangunan BH.37 dan Penataan Emplasemen St.Batu Tulis antara Batu Tulis-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	164	88.866.099.000	102.229.022.886	102.229.022.886			Pekerjaan sedang berjalan
654	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM.6+800 s.d KM. 8+500 antara Batu Tulis-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	165	91.330.774.069	103.454.227.955	103.454.227.955			Pekerjaan sedang berjalan
655	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM.8+500 s.d KM.9+300 dan Penataan emplasemen St.Ciomas antara Batu Tulis-Ciomas lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	166	93.354.259.303	104.056.714.248	104.056.714.248			Pekerjaan sedang berjalan
656	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM.1+600 s.d KM.4+200 dan Pembangunan BH.21 BH.22 antara Bogor Paledang-Batu Tulis lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	167	101.907.014.000	116.625.999.784	116.625.999.784			Pekerjaan sedang berjalan
657	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan beton R.54 Lengkap dengan Alat penambat untuk kebutuhan Paledang-Ciomas lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	168	16.817.776.140	16.817.776.140	16.817.776.140			Kontruksi selesai dilaksanakan
658	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA Km 164+500 - 166+500 dan Penataan Emplasemen Sta. Gedebage antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage - Haurpugur	7010101004	169	72.438.738.000	42.420.419.729	42.420.419.729			Pekerjaan sedang berjalan
659	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA Km 166+500 - 168+500 dan Penataan Emplasemen Stasiun antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage - Haurpugur	7010101004	170	20.141.693.092	70.055.281.936	70.055.281.936			Pekerjaan sedang berjalan
660	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur ganda KA 168+500 - 172+350 antara Kiaracondong-Cicalengka tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	171	17.120.906.466	69.102.622.811	69.102.622.811			Pekerjaan sedang berjalan
661	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan jalur ganda KA KM 172+350-173+850 dan penataan emplasemen st. Rancaekek antara Kiara Condong-Cicalengka tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	172	24.876.959.050	103.505.032.560	103.505.032.560			Kontruksi selesai dilaksanakan
662	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan jalur ganda KA Km 173+850-176+500 antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	173	49.776.275.000	52.935.419.321	52.935.419.321			Pekerjaan sedang berjalan
663	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA km 176+500-178+500 dan penataan Emplasemen st. Haurpugur antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	174	20.654.148.438	56.990.989.910	56.990.989.910			Pekerjaan sedang berjalan
664	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan bantalan beton untuk pembangunan jalur ganda lintas St. Gedenage- St. Haurpugur sebanyak 31.000 unit	7010101004	175	20.207.660.000	20.207.660.000	20.207.660.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
665	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	pembangunan jembatan BH 799BH dan JPO antara Kiaracondong-Cicalengka tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	176	29.609.075.000	28.765.456.938	28.765.456.938			Pekerjaan sedang berjalan
666	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	pembangunan overpass KA tahap II antara Bogor-Paledang-Cicurug lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	177	11.932.742.000	13.126.016.200	13.126.016.200			Pekerjaan sedang berjalan
667	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Overpass KA tahap III antara Bogor-Paledang-Cicurug lintas Bogot-Sukabumi	7010101004	178	11.456.556.000	11.682.025.000	11.682.025.000			Pekerjaan sedang berjalan
668	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan pemagaran strelisasi bangunan Stasiun Ciomas dan sterlisasi jalur KA antara Batutulis-Ciomas lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	179	11.282.085.000	18.756.768.063	18.756.768.063			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
669	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	pemagaran Sterilisasi Bangunan stasiun maseng dan sterilisasi antara Ciomas-Maseng lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	180	11.346.244.000	13.333.773.460	13.333.773.460			Pekerjaan sedang berjalan
670	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan pemagaran sterilisasi stasiun Cigombong dan sterilisasi jalur KA antara Maseng-Cigombong lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	181	1.886.571.185	5.845.715.000	5.845.715.000			Pekerjaan sedang berjalan
671	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	pembangunan jembatan BH 775BH 780 BH 781BH 784 abtara Kiaracondong-Cicalengka tahap I segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	182	21.769.947.000	23.911.005.000	23.911.005.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
672	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	penanganan perlintasan sebidang jalur KA di KM.259+770 antara Rajapolah-Indihiang koridor Bandung-Banjar	7010101004	183	7.256.719.000	7.965.400.000	7.965.400.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
673	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	penanganan perlintasan sebidang jalur KA di KM.26+350 dan KM 286+210 antara Rajapolah-Ciamis Koridor Bandung-Banjar	7010101004	184	16.363.800.000	17.888.800.000	17.888.800.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
674	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan jembatan penyebrangan Orang (JPO) antara Bogor Paledang-Cicutug lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	185	13.137.770.000	14.451.547.000	14.451.547.000			telah selesai konstruksinya menunggu masa pemellharaan
675	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas pendukung antara Stasiun Ciomas-Stasiun Maseng lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	186	10.973.190.000	11.822.516.000	11.822.516.000			telah selesai konstruksinya menunggu masa pemellharaan
676	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemagaran Sterilisasi Bangunan Stasiun dan Sterilisasi Jalur KA antara Paledang-Batutulis Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	187	12.949.789.000	14.244.767.900	14.244.767.900			Pekerjaan sedang berjalan
677	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL/RPL Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	188	870.817.645	2.443.654.000	2.443.654.000			Pekerjaan sedang berjalan
678	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Pendukung Antara Stasiun Cigombong - Stasiun Cicurug Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	190	19.698.263.000	43.956.392.789	43.956.392.789			Pekerjaan sedang berjalan
679	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemagaran Sterilisasi Bangunan Stasiun Cicurug dan Sterilisasi Jalur KA antara Cigombong-Cicurug Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	191	10.366.372.000	19.589.055.773	19.589.055.773			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
680	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 164+500 - 166+500 dan Penataan Emplasmen Sta. Gedebage Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	192	31.836.820.920	62.261.645.068	62.261.645.068			Pekerjaan sedang berjalan
681	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pemagaran Sterilisasi Stasiun dan Jalur KA antara Bogor Paledang - Sukabumi Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	193	1.628.908.000	1.791.798.800	1.791.798.800			Pekerjaan sedang berjalan
682	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penanganan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api di Km. 260+900 dan Km. 300+200 antara Rajapolah - Banjar Koridor Bandung - Banjar	7010101004	194	8.623.537.000	9.477.346.000	9.477.346.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
683	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jembatan dan JPO Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	195	4.239.378.000	4.663.315.000	4.663.315.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
684	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penanganan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api antara Ciawi - Banjar Koridor Bandung - Banjar	7010101004	196	922.278.000	922.278.000	922.278.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
685	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap I Km. 9+000 s/d 9+400 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur - Tanjungrasa (400 M'sp)	7010101004	197	3.847.133.837	3.847.133.837		3.847.133.837		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
686	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Shortcut Lanjutan dengan Pembangunan Badan Jalan KA berikut Drainase dan Tembok Penahan di km. 5+400 s.d. km. 5+700 sepanjang 03 km'sp antara Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	198	3.588.235.500	3.588.235.500		3.588.235.500		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
687	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Shortcut Lanjutan dengan Pembangunan Badan Jalan KA berikut Drainase dan Tembok Penahan di km. 5+700 s.d. km. 6+100 sepanjang 04 km'sp antara Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	199	2.352.935.500	2.352.935.500		2.352.935.500		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
688	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Shortcut Lanjutan dengan Pembangunan Jalan KA berikut Drainase dan Tembok Penahan di Km.4+900 s.d. Km.5+400 antara Cibungur-Tanjungrasa	7010101004	200	2.002.328.500	2.002.328.500		2.002.328.500		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
689	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Sepur KA berikut drainase dan peron emplasemen Tanjungrasa Lintas Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	201	10.137.418.981	10.137.418.981		10.137.418.981		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
690	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan KA di km.0+300 - km.0+450 antara Cibungur - Tanjungrasa	7010101004	202	34.930.200.334	34.930.200.334		34.930.200.334		direnanakan akan dilanjutkan dengan KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha)
691	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jembatan dan Fasilitas Pendukung antara Cigombong - Cicurug Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	204	1.505.042.000	8.681.599.210	8.681.599.210			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
692	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Kiaracondong Cicalengka Tahap I Segmen	7010101004	206	1.617.983.855	3.537.020.240	3.537.020.240			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
693	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage - Haurpugur	7010101004	207	81.004.807.207	128.473.917.000	128.473.917.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
694	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta api atara kiaracondong - cicalengka tahap I Segmen gedebage-haurpugur	7010101004	208	3.036.985.930	4.531.767.000	4.531.767.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
695	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan bantalan beton R.54 untuk jalur eksisting pada pembangunan jalur ganda KA antara kiaracondong-cicalengka segmen gedebage-haurpugur	7010101004	209	15.271.124.220	14.751.905.997	14.751.905.997			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
696	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan BH Jalur KA KM 166+075-KM 166+450 Antara Stasiun Gedebage-Stasiun Cimekar	7010101004	210	33.329.896.535	49.734.632.000	49.734.632.000			Pekerjaan sedang berjalan
697	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi pembangunan BH jalur KA KM 166+075-KM 166+450 antara stasiun Gedebage -Stasiun Cimekar	7010101004	211	16.989.202.120	17.022.896.727	17.022.896.727			Pekerjaan sedang berjalan
698	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik dan Telekomunikasi Kereta Api Emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung (MYC 2022-2023)	7010101004	212	968.009.900	1.064.479.900	1.064.479.900			akan dikapitalisasi ke konstruksinya (konstruksi dalam pengerjaan)
699	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan		7010101004	214	475.629.000	475.629.000	475.629.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
700	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik dan Telekomunikasi Kereta Api Emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung	7010101004	224	77.399.291.010	27.253.007.000	27.253.007.000			Pekerjaan sedang berjalan
701	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL/RPL Pembangunan Konektivitas Perkeretaapian KCJB antara Stasiun Padalarang - Stasiun Bandung	7010101004	226	2.284.951.650	2.284.951.650	2.284.951.650			Aset akan didefinitifkan
702	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik dan Telekomunikasi Kereta Api Emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung (MYC 2022-2023)	7010101004	227	1.158.873.000	1.158.873.000	1.158.873.000			akan dikapitalisasi ke konstruksinya di tahun 2023
703	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Emplasemen Stasiun Bandung untuk Konektivitas KCJB antara Stasiun Padalarang - Stasiun Bandung	7010101004	231	16.924.261.000	19.551.520.336	19.551.520.336			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
704	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penataan Emplasemen Stasiun Bandung untuk Konektivitas KCJB antara Stasiun Padalarang - Stasiun Bandung	7010101004	219	1.351.385.040	1.351.385.040	1.351.385.040			Aset akan didefinitifkan
705	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Penanganan Perlintasan Sebidang	7010101004	220	1.933.158.000	1.933.158.000	1.933.158.000			Pekerjaan sedang berjalan
706	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Desain (DED) Penanganan Perlintasan Sebidang JPL.12F Maseng Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	223	314.904.000	314.904.000	314.904.000			Pekerjaan sedang berjalan
707	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton R.54 Untuk Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap II Segmen Haurpugur-Cicalengka	7010101004	233	6.760.418.000	6.760.418.000	6.760.418.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
708	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton R.54 Untuk Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap II Segmen Kiaracondong-Gedebage	7010101004	234	14.645.748.000	14.645.748.000	14.645.748.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
709	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan		7010101004	236	67.276.342.000	75.200.839.672	75.200.839.672			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
710	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat Penunjang Kegiatan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Kiaracondong-Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	237	31 Desember 2022	1.587.577.000	1.587.577.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
711	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat Penunjang Kegiatan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Kiaracondong-Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage-Haurpugur	7010101004	238	41.455.898.000	41.455.898.000	41.455.898.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
712	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penataan Emplasemen Stasiun Padalarang Untuk Konektivitas KCJB Antara Stasiun Padalarang-Stasiun Bandung	7010101004	240	1.950.164.273	1.950.164.273	1.950.164.273			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
713	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang dan Overpass Antara Paledang-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	245	9.336.356.160	9.336.356.160	9.336.356.160			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
714	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan BH.107 Eksisting Termasuk Perbaikan Hidrolika Sungai Antara Maseng-Cigombong Lintas Bogor Sukabumi	7010101004	248	7.532.115.545	7.532.115.545	7.532.115.545			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
715	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Skybridge Termasuk Pembangunan Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	249	28.191.861.440	28.191.861.440	28.191.861.440			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
716	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pedestrian di Sekitar Skybridge Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	250	2.640.677.097	2.640.677.097	2.640.677.097			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
717	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Konstruksi Penanganan Longsoran Jalur Eksisting Antara Batutulis-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	252	9.919.656.817	9.919.656.817	9.919.656.817			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
718	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan BH.89 Eksisting Termasuk Perbaikan Hidrolika Sungai Antara Maseng-Cigombong Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	253	7.360.000.000	7.360.000.000	7.360.000.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
719	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jembatan BH.89 Eksisting, BH.107 Eksisting termasuk Perbaikan Hidrolika Sungai antara Maseng-Cigombong Lintas Bogor-Sukabumi	7010101004	256	483.462.720	483.462.720	483.462.720			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
720	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG DAN OVERPASS ANTARA PALEDANG - CIOMAS LINTAS BOGOR - SUKABUMI	7010101004	257	330.827.200	330.827.200	330.827.200			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
721	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Konstruksi Penanganan Longsoran Jalur Eksisting antara Batutulis - Ciomas Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	258	258.931.520	258.931.520	258.931.520			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
722	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Skybridge termasuk Pembangunan Stasiun Paledang, Modifikasi dan Normalisasi Jaringan LAA Stagging 2, dan Pekerjaan Pedestrian antara Bogor - Paledang Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	259	813.214.400	813.214.400	813.214.400			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
723	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penggantian Jembatan Kereta Api BH.433 dan Perbaikan Geometri Untuk Peningkatan Jalur KA Antara Lampegan Cianjur	7010101004	260	495.726.000	495.726.000	495.726.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
724	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERUBAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANTAUAN RKL - RPL PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API ANTARA BOGOR - SUKABUMI	7010101004	261	649.096.320	649.096.320	649.096.320			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
725	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 162+000 s/d KM 163+150 antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	262	48.933.251.589	23.760.343.825	23.760.343.825			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
726	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 163+150 s/d KM 164+500 antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	263	46.336.651.718	22.704.959.341	22.704.959.341			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
727	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 160+500 s/d KM 162+000 antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	264	48.489.343.210	23.759.778.172	23.759.778.172			Kontruksi telah selesai dilaksanakan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
728	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat	7010101004	265	277.665.500	277.665.500	277.665.500			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
729	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat	7010101004	266	3.658.791.000	3.658.791.000	3.658.791.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
730	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Furniture Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat	7010101004	267	2.649.148.000	2.649.148.000	2.649.148.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
731	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penanganan Perlintasan Sebidang Pembangunan Fly Over JPL 157B antara Padalarang - Bandung	7010101004	268	511.348.558	511.348.558	511.348.558			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
732	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL/RPL Penanganan Perlintasan Sebidang Pembangunan Fly Over pada JPL 157B antara Padalarang - Bandung	7010101004	269	521.255.306	521.255.306	521.255.306			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
733	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi pada Jalur Ganda Kereta Api antara Stasiun Padalarang – Stasiun Bandung	7010101004	270	43.173.403.352	43.173.403.352	43.173.403.352			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
734	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stasiun Cimahi antara Padalarang - Bandung	7010101004	271	27.835.897.960	42.539.011.510	42.539.011.510			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
735	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA Antara Padalarang-Bandung untuk Penataan Emplasemen Pembangunan Stasiun termasuk Fasilitas Operasi KA	7010101004	272	1.758.781.125	1.758.781.125	1.758.781.125			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
736	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL/RPL Pembangunan Konektivitas Perkeretaapian KCJB antara Stasiun Padalarang - Stasiun Bandung	7010101004	273	1.107.200.000	1.107.200.000	1.107.200.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
737	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stasiun Gadobangkong antara Padalarang - Bandung	7010101004	274	9.992.473.690	11.701.260.250	11.701.260.250			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
738	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Emplasemen dan Pembangunan Shelter Stasiun Ciroyom antara Padalarang - Bandung	7010101004	275	9.377.172.955	17.763.914.321	17.763.914.321			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
739	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Emplasemen dan Pembangunan Shelter Stasiun Andir antara Padalarang - Bandung	7010101004	276	7.732.538.541	12.298.939.023	12.298.939.023			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
740	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Emplasemen dan Pembangunan Shelter Stasiun Cimindi antara Padalarang - Bandung	7010101004	277	7.899.675.000	16.434.400.668	16.434.400.668			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
741	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penataan Stasiun Batutulis dan Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang JPL.10 Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	278	17.472.819.170	17.472.819.170	17.472.819.170			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
742	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penanganan Perlintasan Sebidang JPL.12F Maseng Lintas Bogor Sukabumi	7010101004	279	14.975.700.327	14.975.700.327	14.975.700.327			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
743	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penanganan Perlintasan Sebidang JPL 157B Ciroyom antara Padalarang - Bandung	7010101004	280	28.375.693.380	28.375.693.380	28.375.693.380			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
744	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton R.54 Untuk Jalur Eksisting Pada Pembangunan Jakur Ganda KA Antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage - Haurpugur	7010101004	281	12.076.837.500	12.076.837.500	12.076.837.500			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
745	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sky Bridge Di stasiun Padalarang	7010101004	282	3.714.411.000	3.714.411.000	3.714.411.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
746	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Monitoring RKL-RPL Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) Stasiun Antara Padalarang - Bandung	7010101004	283	873.113.790	873.113.790	873.113.790			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
747	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG JPL.10 DAN PENATAAN STASIUN BATUTULIS LINTAS BOGOR – SUKABUMI	7010101004	284	421.821.475	421.821.475	421.821.475			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
748	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Penanganan Perlintasan Sebidang JPL.12F Maseng Lintas Bogor Sukabumi	7010101004	285	388.253.991	388.253.991	388.253.991			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
749	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Perbaikan Perlintasan Sebidang Jalur KA Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	286	120.729.648	120.729.648	120.729.648			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
750	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan dan Penataan Stasiun Parungkuda - Sukabumi Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	287	204.225.265	204.225.265	204.225.265			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
751	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Bantalan Beton R.54 untuk Penataan Emplasemen 5 Stasiun Antara Padalarang – Bandung Tahap II	7010101004	288	5.871.803.840	5.871.803.840	5.871.803.840			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
752	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan		7010101004	289	195.000.000	195.000.000	195.000.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
753	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENATAAN STASIUN CIOMAS - STASIUN CICURUG LINTAS BOGOR – SUKABUMI	7010101004	290	217.559.612	5.658.562.989	5.658.562.989			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
754	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sky Bridge Di stasiun Bandung	7010101004	291	2.580.000.000	2.580.000.000	2.580.000.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
755	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perbaikan Perlintasan Sebidang Jalur KA Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	292	2.229.352.449	2.229.352.449	2.229.352.449			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
756	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Survey Teknik Desain Penanganan Tanah Dasar	7010101004	293	484.026.000	484.026.000	484.026.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
757	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Reviu Desain Perubahan Struktur Bawah Jembatan	7010101004	294	495.304.000	495.304.000	495.304.000			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
758	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kajian Perkuatan Lereng Jalur KA Antara Batutulis - Ciomas Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	295	252.496.300	252.496.300	252.496.300			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
759	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap II Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur-Cicalengka	7010101004	296	14.276.748.300	14.276.748.300	14.276.748.300			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
760	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap II Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur-Cicalengka	7010101004	297	525.754.200	525.754.200	525.754.200			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
761	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 159+500 s/d KM 160+500 dan Penataan Emplasemen Stasiun Kiaracondong antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	298	16.069.519.659	16.069.519.659	16.069.519.659			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
762	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 178+500 s/d KM 180+000 antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	299	59.335.840.572	18.987.468.982	18.987.468.982			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
763	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 180+000 s/d KM 181+900 antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	300	50.951.079.670	16.304.345.494	16.304.345.494			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
764	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Ganda KA KM 181+900 s/d KM 182+800 dan Penataan Emplasemen Stasiun Cicalengka antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	301	59.067.307.933	16.391.177.950	16.391.177.950			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
765	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan dan Penataan Stasiun Parungkuda - Sukabumi Lintas Bogor - Sukabumi	7010101004	302	5.053.656.536	5.053.656.536	5.053.656.536			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
766	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENATAAN STASIUN CIOMAS - STASIUN CICURUG LINTAS BOGOR – SUKABUMI	7010101004	303	36.273.355.846	1.541.617.625	1.541.617.625			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
767	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Haurpugur - Cicalengka	7010101004	304	3.979.140.000	1.104.211.350	1.104.211.350			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
768	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage	7010101004	305	2.774.715.020	804.124.705	804.124.705			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
769	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda antara Kiaracondong-Gedebage	7010101005	129	1.107.391.280	1.107.391.280	1.107.391.280			Kontruksi telah selesai dilaksanakan
770	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pengadaan bantalan beton untuk pembangunan jalur ganda lintas St. Gedenage- St. Haurpugur sebanyak 31.000 unit	7010101005	138	8.268.836.745	1.638.868.544	1.638.868.544			Pekerjaan sedang berjalan
771	DJKA	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pengadaan bantalan beton untuk penataan emplasemen stasiun padalarang dan stasiun bandung	7010101005	171	8.268.836.745	6.629.968.201	6.629.968.201			Pekerjaan sedang berjalan
772	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	Jasa Konsultansi Track Maintenance Improvement Programme	7010101002	7		30.680.617.786	30.680.617.786			Akan ditransfer ke Balai Perawatan Perkeretaapian
773	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Jembatan Kereta Api Dengan Perangkat Structure Health Monitoring System BH. 1290 KM.283+745 Antara Manonjaya - Ciamis	7010101002	22	2.828.100.000	2.828.100.000	2.828.100.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
774	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	PENGADAAN, PEMASANGAN DAN MONITORING TEROWONGAN KERETA API DENGAN PERANGKAT STRUCTURE HEALTH MONITORING SYSTEM BH. 152A KM. 30+777 ANTARA MRAWAN - KALIBARU	7010101002	24	2.917.364.000	2.917.364.000	2.917.364.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
775	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Bangunan Stasiun Lintas Pekanbaru-Duri	7010101003	3	1.636.000.000	1.636.000.000	1.636.000.000			KDP kurang dari 5 Tahun dan tercantum dalam RIPNAS 2011 - 2030. menunggu pekerjaan fisik
776	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (Tahap 1)	7010101004	56	2.667.000.000	2.667.000.000	2.667.000.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
777	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Pekanbaru - Muaro (Tahap 1)	7010101004	57	1.758.700.000	1.758.700.000	1.758.700.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
778	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pekanbaru - Rengat - Jambi (Tahap 2)	7010101004	58	2.789.620.000	2.789.620.000	2.789.620.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
779	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pekanbaru - Rengat - Jambi (Tahap 1)	7010101004	59	2.721.700.000	2.721.700.000	2.721.700.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
780	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (Tahap 2)	7010101004	60	2.681.200.000	2.681.200.000		2.681.200.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
781	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Pekanbaru - Duri (Tahap 1)	7010101004	61	1.971.670.000	1.971.670.000	1.971.670.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
782	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (Tahap 2)	7010101004	62	2.757.400.000	2.757.400.000	2.757.400.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
783	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (Tahap 1)	7010101004	63	2.761.200.000	2.761.200.000	2.761.200.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
784	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pontianak - Sambas - Batas Negara (Tahap 1)	7010101004	64	2.563.700.000	2.563.700.000		2.563.700.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030
785	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Sorong - Manokwari (Tahap 1)	7010101004	65	2.779.460.000	2.779.460.000		2.779.460.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030
786	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design Pembangunan Test Track dan Balai Penelitian Kereta Api di Serpong	7010101004	68	1.137.702.000	1.137.702.000			1.137.702.000	sudah terdapat DED baru di lokasi berbeda perpindahan lokasi karena lahan untuk tesr track tidak mencukupi dan melewati pemukiman padat
787	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (10 BH) Antara Cikeusal - Karangantu Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen II)	7010101004	70	1.661.400.000	1.661.400.000	1.661.400.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
788	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (10 BH) Antara Rangkasbitung - Walantaka Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen I)	7010101004	71	1.483.900.000	1.483.900.000	1.483.900.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
789	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (11 BH) Antara Karangantu - Tonjong Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen III)	7010101004	72	1.548.800.000	1.548.800.000	1.548.800.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
790	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD Penggantian Persinyalan Elektrik DRS-60 dan Penataan Layout Stasiun Solo Balapan	7010101004	73	535.140.000	535.140.000	535.140.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
791	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Rangkasbitung - Merak	7010101004	76	1.148.040.000	1.148.040.000	1.148.040.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
792	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Solo - Semarang	7010101004	78	2.454.400.000	2.454.400.000	2.454.400.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
793	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (9 BH) Antara Tonjong - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen IV)	7010101004	79	1.562.900.000	1.562.900.000	1.562.900.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
794	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD Peningkatan Sistem Remote pada Gardu Listrik Perkeretaapian Lintas Jabodetabek	7010101004	81	990.300.000	990.300.000	990.300.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
795	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Cipendeuy-Banjar Lintas Bandung-Kroya (Segmen-2)	7010101004	84	2.034.700.000	2.034.700.000		2.034.700.000		menunggu kebijakan pembangunan dan justifikasi
796	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Banjar-Jeruk Legi Lintas Bandung-Kroya (Segmen-3)	7010101004	85	2.013.940.000	2.013.940.000		2.013.940.000		menunggu kebijakan pembangunan dan justifikasi
797	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan KA antara Makassar-Pare-Pare (tahap 2)	7010101004	86	3.006.600.000	3.006.600.000	3.006.600.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
798	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (8 BH) antara Telawah-Solo Balapan Lintas Semarang-Solo (Segmen-2)	7010101004	87	1.766.900.000	1.766.900.000		1.766.900.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030 dan renstra
799	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (6 BH) antara Saksasaat-Cilame Lintas Cikampek-Padalarang (Segmen-3)	7010101004	88	1.866.320.000	1.866.320.000		1.866.320.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030 dan renstra
800	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (8 BH) antara Brumbung-Karangsono Lintas Semarang-Solo (Segmen-1)	7010101004	89	1.645.100.000	1.645.100.000		1.645.100.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030 dan renstra
801	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Bangunan Stasiun KA antara Makassar-Pare-Pare (23 unit)	7010101004	90	2.025.716.000	2.025.716.000	2.025.716.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
802	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Tanjung-Paringin Lintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 1)	7010101004	91	1.978.360.000	1.978.360.000		1.978.360.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030 dan renstra
803	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Kandangan-Rantau Lintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 3)	7010101004	92	2.813.780.000	2.813.780.000	2.813.780.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
804	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Manado-Bitung	7010101004	93	2.793.500.000	2.793.500.000	2.793.500.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
805	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Paringin-Kandangan Lintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 2)	7010101004	94	2.963.980.000	2.963.980.000	2.963.980.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
806	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Underpass/Flyover untuk Penanganan Perlintasan Sebidang Lintas Makassar-Pare-Pare (3 lokasi)	7010101004	95	1.592.400.000	1.592.400.000	1.592.400.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
807	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Kota Gorontalo-Bilungala Lintas Isimu–Bitung (Segmen 2)	7010101004	97	2.039.829.000	2.039.829.000	2.039.829.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
808	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Isimu-Kota Gorontalo Lintas Isimu-Bitung (Segmen 1)	7010101004	98	2.372.710.000	2.372.710.000	2.372.710.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
809	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Takalar-Jeneponto Lintas Makassar-Watampone (Segmen 2)	7010101004	99	1.800.670.000	1.800.670.000	1.800.670.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
810	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jembatan (7 BH) Pembangunan Jalur Ganda Segmen I antara Cikadondong-Sasaksaat Lintas Jakarta-Padalarang	7010101004	102	1.323.300.000	1.323.300.000		1.323.300.000		menunggu kebijakan pembangunan, masuk dalam ripnas 2011-2030 dan renstra
811	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan KA Lintas Babat-Tuban sebanyak 6 BH	7010101004	103	1.230.755.000	1.230.755.000	1.230.755.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai Terkait
812	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD Pembangunan Jembatan KA di DAOP V Purwokerto 2 BH dan Jembatan KA di DAOP IV Semarang 1 BH	7010101004	104	1.129.920.000	753.280.000		753.280.000		Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai Terkait
813	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jalan KA Muaro-Pekanbaru	7010101004	105	1.600.450.000	1.600.450.000	1.600.450.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
814	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Jalan KA Pekanbaru-Duri	7010101004	106	1.609.000.000	1.609.000.000	1.609.000.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
815	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Design Besitang-Kuala Langsa-Langsa sepanjang 82,116 km	7010101004	107	1.840.000.000	1.066.107.034		1.066.107.034		Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai Terkait
816	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalan KA Muaro Pekan Baru (Segmen II)	7010101004	108	2.619.800.000	2.619.800.000	2.619.800.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
817	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Rangkas Bitung - Merak	7010101004	109	1.991.300.000	1.991.300.000		1.991.300.000		menunggu kebijakan pembangunan dan justifikasi
818	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Elektrifikasi Lintas Yogyakarta - Solo	7010101004	110	2.024.300.000	2.024.300.000	2.024.300.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
819	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STD Peningkatan Jalan, Jembatan dan Persinyalan Lintas Semarang - Solo	7010101004	111	2.926.600.000	2.926.600.000		2.926.600.000		Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai Terkait
820	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalan KA Bakauheni - Rejosari	7010101004	112	2.333.200.000	2.333.200.000	2.333.200.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
821	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Manado-Bitung (Tahap 1)	7010101004	114	1.636.500.000	1.636.500.000	1.636.500.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
822	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Sorong-Manokwari (Tahap 2)	7010101004	115	2.790.200.000	2.790.200.000	2.790.200.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
823	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Jayapura-Sarmi (Tahap 1)	7010101004	116	2.811.700.000	2.811.700.000	2.811.700.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
824	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Evaluasi Struktur Jembatan Kereta Api Antara Purwakarta-Sukatani Lintas Purwakarta-Padalarang	7010101004	117	2.448.300.000	2.448.300.000	2.448.300.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
825	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Kereta Api antara Cipeundeuy-Banjar Lintas Bandung-Kroya	7010101004	118	2.027.500.000	2.027.500.000	2.027.500.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
826	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur KA Tanjungsari - Kertajati	7010101004	122	2.838.290.000	2.838.290.000	2.838.290.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
827	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Jayapura-Sarmi (Tahap 2)	7010101004	123	2.888.700.000	2.888.700.000	2.888.700.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
828	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Sorong-Manokwari (Tahap 3)	7010101004	124	2.203.600.000	2.203.600.000	2.203.600.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
829	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanjung-Tanah Grogot-Balikpapan (Tahap 3) sepanjang 34 km	7010101004	125	1.812.990.000	1.812.990.000	1.812.990.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
830	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Bangunan Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Patimban	7010101004	126	1.739.200.000	1.739.200.000	1.739.200.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
831	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalan Rel dan Jembatan Kereta Api Menuju Pelabuhan Patimban	7010101004	127	2.857.500.000	2.857.500.000	2.857.500.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
832	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED penanganan longsoran Gundih - Gambringan	7010101004	128	1.730.789.500	1.860.915.100	1.860.915.100			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
833	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan 5 stasiun Lintas Rangkasbitung - Labuan	7010101004	129	1.688.720.000	1.688.720.000	1.688.720.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
834	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED elektrifikasi Yogyakarta - Kutoarjo termasuk menuju bandara NYIA	7010101004	130	1.245.326.500	1.245.326.500	1.245.326.500			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
835	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED peningkatan persinyalan stasiun KA Yogyakarta - Lempuyangan	7010101004	131	1.036.007.500	1.036.007.500	1.036.007.500			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
836	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED pembangunan jembatan 16 unit lintas Rangkas Bitung Labuan	7010101004	132	3.194.373.600	3.194.373.600	3.194.373.600			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
837	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan 10 stasiun KA Lintas Rangkasbitung - Merak	7010101004	133	2.015.214.300	2.015.214.300	2.015.214.300			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
838	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Reviu DED Jalur KA antara Waru - Bandara Juanda	7010101004	134	1.368.379.100	1.368.379.100	1.368.379.100			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
839	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Desain Jembatan Matraman	7010101004	135	1.218.734.000	1.332.214.400	1.332.214.400			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
840	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Menuju KSPN Borobudur dan Sekitarnya	7010101004	136	2.357.950.100	2.357.950.100	2.357.950.100			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
841	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penataan Emplasemen dan Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Berikut Depo	7010101004	137	1.430.073.700	1.430.073.700	1.430.073.700			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
842	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	BASIC DESAIN REAKTIVASI JALUR KA LINTAS PURWOKERTO-WONOSOBO (96 KMSP)	7010101004	145	2.609.800.000	2.609.800.000	2.609.800.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
843	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PEMBANGUNAN JALUR KERETA API MENUJU KSPN DANAU TOBA (PEMANTANG SIANTAR-SIMALUNGUN/PARAPAT)	7010101004	151	2.541.450.000	2.541.450.000	2.541.450.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
844	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN JALUR KERETA API ANTARA BRUMBUNG - TANGGUNG LINTAS SEMARANG - SOLO DI WILAYAH JAWA TENGAH (10.732 m'sp)	7010101004	157	15.167.520.600	16.680.999.120	16.680.999.120			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
845	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN JALUR KERETA API ANTARA TANGGUNG - KEDUNGJATI LINTAS SEMARANG - SOLO DI WILAYAH JAWA TENGAH (9.426 m'sp)	7010101004	158	15.693.377.000	16.922.558.000	16.922.558.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
846	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENINGKATAN JALUR KERETA API DI WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH (20.168 m'sp)	7010101004	160	1.147.049.200	1.258.064.840	1.258.064.840			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
847	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBAYARAN RINJA PERBAIKAN LERENG AKIBAT LONGSORAN KM. 19+0/1 ANTARA KEBAYORAN – PONDOK RANJI	7010101004	161	194.562.200	194.562.200	194.562.200			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
848	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PERSINYALAN TELEKOMUNIKASI DAN ELEKTRIFIKASI JALUR GANDA PADALARANG - CICALENGKA	7010101004	162	1.224.285.700	1.224.285.700	1.224.285.700			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
849	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ANTARA KARANGSARI - CIPENDEUY LINTAS BANDUNG - KROYA (TAHAP 2)	7010101004	164	1.699.370.200	1.699.370.200	1.699.370.200			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
850	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PEMBANGUNAN JEMBATAN UNTUK DOUBLE TRACK DI BH 1549 ANTARA KESUGIHAN - MAOS LINTAS BANJAR - KROYA	7010101004	165	1.375.067.100	1.375.067.100	1.375.067.100			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
851	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED REAKTIVASI JALUR KA NARAS - SUNGAI LIMAU, SUMBAR	7010101004	166	1.279.980.900	1.279.980.900	1.279.980.900			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
852	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED INTERMODA KA KE PELABUHAN GARONGKONG DAN MAKASSAR NEW PORT	7010101004	167	1.127.705.700	1.127.705.700	1.127.705.700			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
853	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PEMBANGUNAN JEMBATAN KA ANTARA RAJAPOLAH - BANJAR LINTAS BANDUNG - KROYA (TAHAP 3)	7010101004	168	2.374.938.500	2.374.938.500	2.374.938.500			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
854	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ANTARA CICALENGKA - KARANGSARI LINTAS BANDUNG -KROYA (TAHAP I)	7010101004	169	1.603.041.000	1.423.433.000	1.423.433.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
855	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN SUPERVISI PENINGKATAN FASILITAS OPERASI PERKERETAAPIAN PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI - JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101004	170	19.014.208.426	11.576.756.600	11.576.756.600			
856	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101004	171	1.041.208.426.000	546.634.421.000	546.634.421.000			
857	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN PENINGKATAN GARDU TRAKSI DAN LISTRIK ALIRAN ATAS PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI - JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101004	172	194.414.884.919	127.584.767.800	127.584.767.800			
858	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBAYARAN BIAYA PERBAIKAN ATAS RINTANG JALAN ANGKATAN TINGGI DI KM. 9+700 S/D KM 10+200 JALUR HULU DAN HILIR ANTARA RW - BPR WILAYAH DAOP 1 JAKARTA	7010101004	173	497.681.000	497.681.000	497.681.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
859	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DIVISI REGIONAL IV TANJUNGKARANG	7010101004	174	1.063.606.000	1.063.606.000	1.063.606.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
860	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT	7010101004	175	1.038.456.000	1.038.456.000	1.038.456.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
861	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA	7010101004	176	1.842.339.000	1.842.339.000	1.842.339.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
862	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DIVISI REGIONAL III PALEMBANG	7010101004	177	1.863.049.000	1.863.049.000	1.863.049.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
863	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 2 BANDUNG	7010101004	178	2.402.584.000	2.402.584.000	2.402.584.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
864	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 3 CIREBON	7010101004	179	1.065.242.000	1.065.242.000	1.065.242.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
865	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA	7010101004	180	1.091.390.000	1.091.390.000	1.091.390.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
866	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI I JAKARTA	7010101004	181	6.478.338.000	6.478.338.000	6.478.338.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
867	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 8 SURABAYA	7010101004	182	3.304.577.000	3.304.577.000	3.304.577.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
868	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 4 SEMARANG	7010101004	183	2.450.991.000	2.450.991.000	2.450.991.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
869	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 7 MADIUN	7010101004	184	1.038.153.000	1.038.153.000	1.038.153.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
870	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 5 PURWOKERTO	7010101004	185	1.029.100.000	1.029.100.000	1.029.100.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
871	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBONGKARAN RUCAT JEMBATAN EKSISTING BH. 44 KM.19+192 LINTAS BINJAI - BESITANG	7010101004	186	6.248.093.000	6.248.093.000	6.248.093.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
872	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI WILAYAH DAERAH OPERASI 9 JEMBER	7010101004	187	1.023.728.000	1.023.728.000	1.023.728.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
873	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN BERUPA PENGGANTIAN REL R.41/42 BANTALAN BESI MENJADI R.54 BANTALAN BETON ANTARA KARANGSONO - GUNDIH	7010101004	195	13.782.139.000	13.782.139.000	13.782.139.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
874	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN BERUPA PENGGANTIAN REL R.41/42 BANTALAN BESI MENJADI R.54 BANTALAN BETON ANTARA TELAWA - KARANGSONO	7010101004	196	13.413.677.000	14.755.044.000	14.755.044.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
875	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JPO STASIUN ASRAMA HAJI LRT SUMATERA SELATAN	7010101004	197	10.217.175.000	10.217.175.000	10.217.175.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
876	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN BERUPA PENGGANTIAN REL.R.41/42 BANTALAN BESI MENJADI R.54 BANTALAN BETON ANTARA KEDUNGJATI - TELAWA	7010101004	198	24.126.936.000	24.126.936.000	24.126.936.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
877	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN JEMBATAN BH 1120 KM 305+5/6 JALUR HULU TERMASUK PERBAIKAN HIDROLIKA SUNGAI ANTARA LINGGAPURA - BUMIAYU LINTAS CIREBON KROYA TAHUN ANGGARAN 2021 - 2022	7010101004	199	92.357.052.000	93.894.959.904	93.894.959.904			pekerjaan masih berlangsung
878	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN JPO STASIUN ASRAMA HAJI LRT SUMATRA SELATAN	7010101004	200	279.353.800	274.406.000	274.406.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
879	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN JALUR KA R42 LINTAS KERTAPATI - PRABUMULIH SEGMEN PRABUMULIH - X5	7010101004	201	16.255.445.000	16.255.445.000	16.255.445.000			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
880	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN JEMBATAN BH 1120 KM 305+5/6 JALUR HULU TERMASUK PERBAIKAN HIDROLIKA SUNGAI ANTARA LINGGAPURA - BUMIAYU LINTAS CIREBON KROYA TAHUN ANGGARAN 2021-2022	7010101004	202	3.611.272.500	3.611.272.500	3.611.272.500			
881	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN BERUPA PENGGANTIAN REL R.41/42 BANTALAN BESI MENJADI R.54 BANTALAN BETON ANTARA SUMBERWADUNG - TEMPURUH	7010101004	204	24.251.446.956	24.251.446.956	24.251.446.956			Akan ditransfer ke Kantor Pusat atau Balai terkait
882	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI JALUR GANDA KERETA API LINTAS TEGAL-PEKALONGAN DAN TEGAL-PURWOKERTO	7010101004	205	2.214.132.800	2.214.132.800	2.214.132.800			
883	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENANGANAN DAERAH RAWAN LONGSOR LINTAS LAHAT-LUBUK LINGGAU	7010101004	206	3.005.222.000	3.005.222.000	3.005.222.000			
884	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED STASIUN LINTAS MEDAN-BINJAI	7010101004	207	1.801.632.580	1.801.632.580	1.801.632.580			
885	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENANGANAN ROB PADA JALUR KERETA API ANTARA LABUAN-BELAWAN LINTAS MEDAN-BELAWAN	7010101004	208	2.078.918.325	2.078.918.325	2.078.918.325			
886	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED JEMBATAN DAN UTILITAS PENDUKUNG JALUR KERETA API LINTAS PERLANAAN-KISARAN-RANTAU PRAPAT	7010101004	209	2.450.179.400	2.540.179.400	2.540.179.400			
887	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG WILAYAH JAWA DAN SUMATERA	7010101004	210	20.752.776.802	22.620.527.000	22.620.527.000			
888	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	JASA KONSULTANSI MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN PERAWATAN PERLINTASAN SEBIDANG WILAYAH JAWA DAN SUMATERA	7010101004	211	2.968.284.000	2.991.938.400	2.991.938.400			

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
889	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Pada DAOP 1, DAOP 2, DAOP 3, DAOP 4, DAN DAOP 5	7010101004	212	3.378.007.500	3.378.007.500	3.378.007.500			
890	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENINGKATAN JEMBATAN KERETA API PADA DAOP 7, DAOP 8, DAN DAOP 9	7010101004	213	3.120.049.938	3.120.049.938	3.120.049.938			
891	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENINGKATAN JEMBATAN KERETA API PADA DIVRE III dan DIVRE IV	7010101004	214	1.814.312.000	1.814.312 000	1.814.312 000			
892	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENANGANAN UNDERPASS PADA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	7010101004	215	1.177.754.000	1.177.754.000	1.177.754.000			
893	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PERANCANGAN PENANGANAN AMBLESAN PADA JALUR KA DI LINTAS BESITANG - LANGSA (SEGMEN BESITANG - SEI LIPUT)	7010101004	216	876.193.000	876.193.000	876.193.000			
894	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED PENINGKATAN JALUR KERETA API ANTARA KERTASEMAYA-ARJAWINANGUN LINTAS CIKAMPEK-CIREBON	7010101004	217	1.283.770.500	1.283.770.500	1.283.770.500			
895	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Normalisasi Sungai di BH. 1077 KM. 294+913 antara Prupuk - Linggapura Koridor Prupuk - Purwokerto	7010101004	218	194.045.202	194.045.202	194.045.202			
896	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penanganan Sementara BH. 1077 KM. 294+913 antara Prupuk - Linggapura Koridor Prupuk - Purwokerto	7010101004	219	194.745.885	194.745.885	194.745.885			
897	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Perkuatan Lereng dan Track Jalur Hulu di Lokasi BH 1120 KM. 305+5/6 antara Linggapura - Bumiayu Lintas Cirebon - Kroya	7010101004	220	91.075.500	91.075.500	91.075.500			
898	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Normalisasi Sungai dan Penanganan Sementara BH. 1077 KM.294913 antara Prupuk-Linggapura Koridor Prupuk - Purwokerto	7010101004	221	61.386.552	61.386.552	61.386.552			
899	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PERKUATAN LERENG ABUTMENT 1 DAN 2 HULU - HILIR SERTA PERKUATAN LERENG AREA SUNGAI GLAGAH BH 1120 (MYC 2022 - 2023)	7010101004	222	8.637.958.000	8.637.958.000	8.637.958.000			Kegiatan Tahun Anggaran MYC 2022 - 2023
900	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Perancangan Penanganan Daerah Rawan Longsor Jalur Kereta Api Lintas Doplang - Randublatung	7010101004	223	676.000.000	676.000.000	676.000.000			Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sedang Dalam Pengerjaan
901	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PERKUATAN LERENG ABUTMENT 1 DAN 2 HULU - HILIR SERTA PERKUATAN LERENG AREA SUNGAI GLAGAH BH 1120 (MYC 2022 - 2023)	7010101004	224	484.551.000	484.551.000	484.551.000			Kegiatan Tahun Anggaran MYC 2022 - 2023
902	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN JASA KONSULTANSI REVIU DETAIL ENGINEERING DESAIN (DED) SHORTCUT JALAN KA ANTARA LUBUK PAKAM - KUALANAMU DAN ANTARA BAHLIAS - KUALA TANJUNG	7010101004	225	750.000.000	750.000.000	750.000.000			Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sedang Dalam Pengerjaan
903	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Madiun - Mojokerto	7010101004	113	2.699.800.000	589.804.000	589.804.000			Perolehan Lainnya dari DED 2912 (Sisa yang belum diserahterimakan ke BTP Jatim)
904	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	REVIU DED JALUR KA ANTARA KUTABLANG - MATANG GLUMPANG LINTAS KUTABLANG - BIREUN	7010101004	227	500.000.000	500.000.000	500.000.000			Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sedang Dalam Pengerjaan
905	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Tagihan Penyesuaian Harga Jasa Konsultansi Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Provinsi Sumater	7010101004	228	2.350.231.000	2.350.231.000	2.350.231.000			Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sedang Dalam Pengerjaan
906	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jaringan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101007	1	376.404.087.000	376.404.087.000	376.404.087.000			
907	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jaringan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENINGKATAN FASILITAS OPERASI PERKERETAAPIAN PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI - JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101007	2	6.414.329.000	6.414.329.000	6.414.329.000			
908	DJKA	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jaringan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN GARDU TRAKSI DAN LISTRIK ALIRAN ATAS PADA LINTAS JATINEGARA - BOGOR DAN MANGGARAI - JAKARTAKOTA (MYC 2020-2022)	7010101007	3	66.830.117.119	21.385.637.300	21.385.637.300			
909								JPY 1,288,729,189					
910	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	24	176.708.000	176.708.000	176.708.000			
911	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	25	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
912	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	KEGIATAN PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI TANAM TUMBUH PENANGANAN DAMPAK SOSIAL REAKTIVASI JALUR KERETA API RANGKASBITUNG-LABUAN SEGMEN I	7010101001	26	135.530.000	135.530.000	135.530.000			
913	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	SPP NO 50008 TGL 23 JUNI	7010101001	27	190.000.000	190.000.000	190.000.000			
914	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	28	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
915	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	29	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
916	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendataan,Verifikasi dan validasi Penertiban lahan untuk reaktivasi antara Rangkasbitung-Labuan	7010101001	30	39.985.000	39.985.000	39.985.000			
917	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	31	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
918	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Wilayah Cikarang	7010101001	32	103.880.820	103.880.820	103.880.820			
919	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Pengawasan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan/ditertibkan di Cikarang Utara kabupaten bekasi	7010101001	33	64.000.000	64.000.000	64.000.000			
920	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	SPP NO 50014 TGL 16 AGUSTUS 2021	7010101001	34	150.000.000	150.000.000	150.000.000			
921	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pensertifikatan tanah Bantar jati, gunung putri dan citeurep Kabupaten Bogor	7010101001	35	39.803.500	39.803.500	39.803.500			
922	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Pengawasan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan/ditertibkan di Kalijaya kabupaten bekasi	7010101001	36	57.810.000	57.810.000	57.810.000			
923	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Sosialisasi KJPP	7010101001	37	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
924	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Pembayaran KJPP Anas Karim Rivai untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penilai Publik	7010101001	38	49.720.000	49.720.000	49.720.000			
925	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	SPP NO 50027 TGL 1 OKT 2021	7010101001	39	124.891.250	124.891.250	124.891.250			
926	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Pembayaran Warga di Kelurahan Kali Baru	7010101001	40	53.561.000	53.561.000	53.561.000			
927	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops verifikasi pensertifikatan dengan BPN Bogor dan BPN Bogor Timur	7010101001	41	32.989.000	32.989.000	32.989.000			
928	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	42	16.769.000	16.769.000	16.769.000			
929	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	43	18.339.000	18.339.000	18.339.000			
930	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	44	19.036.000	19.036.000	19.036.000			
931	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	45	15.848.000	15.848.000	15.848.000			
932	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	46	15.293.000	15.293.000	15.293.000			
933	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Persertifikatan Perumahan Taman Juanda	7010101001	47	19.105.000	19.105.000	19.105.000			
934	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendampingan Pemetaan kelengkapan legalitas persil lahan antara Tanah Abang - Parung Panjang	7010101001	48	41.910.000	41.910.000	41.910.000			
935	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendampingan Pemetaan kelengkapan legalitas persil lahan antara Manggarai-Cikarang	7010101001	49	34.995.400	34.995.400	34.995.400			
936	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendampingan Pemetaan kelengkapan legalitas persil lahan antara Rangkasbitung - Merak	7010101001	50	41.992.500	41.992.500	41.992.500			
937	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendampingan Pemetaan kelengkapan legalitas persil lahan antara Parung Panjang - Rangkasbitung	7010101001	51	41.915.500	41.915.500	41.915.500			
938	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Revaluasi BMN antara Stasiun Parung Panjang - Stasiun Rangkasbitung	7010101001	52	30.074.000	30.074.000	30.074.000			
939	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Pendampingan Pengukuran dan Pematokan dari Stasiun Manggarai - Stasiun Bogor	7010101001	53	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
940	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Revaluasi BMN antara Stasiun Rangkasbitung-Stasiun Serang	7010101001	54	30.046.500	30.046.500	30.046.500			
941	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Penggabungan data hasil ukur bangunan dan tanaman untuk reaktivasi di Kecamatan Rangkasbitung dan Cibadak	7010101001	55	44.203.500	44.203.500	44.203.500			
942	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Revaluasi BMN antara Stasiun Manggarai-Stasiun Bekasi	7010101001	56	35.167.000	35.167.000	35.167.000			
943	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Revaluasi BMN antara Stasiun Manggarai-Stasiun Bogor	7010101001	57	35.139.500	35.139.500	35.139.500			

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
944	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Ops Penggabungan data hasil ukur bangunan dan tanaman untuk reaktivasi di Kecamatan Warung Gunung dan Pandeglang	7010101001	58	43.186.000	43.186.000	43.186.000			
945	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Pengukuran lahan yang akan disertifikatkan dengan BPN di Kabupaten Lebak	7010101001	59	35.200.000	35.200.000	35.200.000			
946	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Operasional Kegiatan Revaluasi BMN antara Stasiun Bekasi-Stasiun Cikarang	7010101001	60	35.150.500	35.150.500	35.150.500			
947	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Validasi data bangunan dan tanaman oleh Pemda Banten terkait jalur reaktivasi jalur KA di Kecamatan Rangkasbitung dan Cibadak	7010101001	61	35.145.000	35.145.000	35.145.000			
948	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Verifikasi akhir Data Pensertifikatan denganBPN Bogor Timur di Kelurahan Kota Baru, Kali Baru dan Harapan Mulya	7010101001	62	40.205.000	40.205.000	40.205.000			
949	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Verifikasi akhir Data Pensertifikatan denganBPN Bogor Timur di Kelurahan Bantar Jati dan Gunung Putri	7010101001	63	35.167.000	35.167.000	35.167.000			
950	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Verifikasi akhir Data Pensertifikatan denganBPN Bogor Timur di Kelurahan Bekasi Jaya dan Duren Jaya	7010101001	64	35.117.500	35.117.500	35.117.500			
951	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Biaya Pensertifikatan antara Maja s/d rangkasbitung	7010101001	65	40.260.000	40.260.000	40.260.000			
952	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	tanah dalam Pengerjaan	Validasi data bangunan dan tanaman oleh Pemda Banten terkait jalur reaktivasi jalur KA di Kecamatan Pandeglang dan Warung Gunung	7010101001	66	35.139.500	35.139.500	35.139.500			
953	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Sterilisasi Jalur KA antara Pasar Minggu - Tanjung Barat di Km. 18+850 - Km. 21+300 sepanjang = 4900 m lintas Mri - Bogor	7010101004	36	618.475.000	573.777.600	573.777.600			akan dilakukan kapitalisasi aset
954	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemb.badan Jln KA termasuk saluran & perbaikan tanah dasar di Km.77+700-Km.80 +300ant.Maja-Rangkasbitung (2.600 Km'Sp)	7010101004	58	17.864.730.000	17.678.288.100	17.678.288.100			akan dilakukan kapitalisasi aset
955	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Reaktivasi Jalur KA antara Rangkasbitung - Pandeglang	7010101004	130	2.837.739.000	2.837.739.000		2.837.739.000		masuk dalam rencana strategis (RENSTRA)
956	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Reaktivasi Jalur KA antara Saketi - Labuan	7010101004	131	2.822.624.000	2.822.624.000		2.822.624.000		masuk dalam rencana strategis (RENSTRA)
957	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Reaktivasi Jalur KA antara Pandeglang - Saketi	7010101004	132	2.676.420.000	2.676.420.000		2.676.420.000		masuk dalam rencana strategis (RENSTRA)
958	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Dokumen Pemantauan RKL / RPL Pembangunan Jalur Ganda KA lintas Maja - Rangkasbitung	7010101004	133	252.066.000	252.066.000	252.066.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
959	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Detail Desain Pembangunan Teriminal Bongkar Muat Batubara di Lintas Tanah Abang - serpong	7010101004	161	722.315.000	722.315.000			722.315.000	dihapuskan, terminal bongkar muat sudah dipindahkan ke Stasiun Nambo
960	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan amdal pembangunan jalan kereta api jalur ganda antara Maja - Rangkasbitung	7010101004	162	680.681.000	680.681.000	680.681.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
961	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Detail Desain Pembangunan Jalan KA Jembatan dan Sintelis Jalur Ganda Antara Maja - Rangkasbitung	7010101004	163	3.562.438.000	3.562.438.000	3.562.438.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
962	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	MANAJEMEN KONSTRUKSI SERPONG	7010101004	164	481.808.000	481.808.000			481.808.000	Dihapuskan karena NUP induk konstruksi sudah direvaluasi tahun 2017
963	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Stasiun Cisauk, parungpanjang, tenjo, tigaraksa dan maja	7010101004	165	1.035.274.467	1.035.274.467	1.035.274.467			akan dikapitalisasi parungpanjang, maja dan tigaraksa
964	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan AMDAL Pembangunan Underpass Permata Hijau Lintas Tanah Abang - serpong	7010101004	166	436.466.445	436.466.445			436.466.445	dihapuskan, sudah dibangun flyover oleh Pemda DKI Tahun 2015
965	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Basic Design Pembangunan Jalan, Jembatan KA dan Sintelis Jalur Ganda antara Parungpanjang - Citayam	7010101004	167	1.441.423.445	1.441.423.445		1.441.423.445		masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional (RIPNAS) 2030
966	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	MANAJEMEN KONSTRUKSI SERPONG	7010101004	168	489.761.470	489.761.470			489.761.470	Dihapuskan karena NUP induk konstruksi sudah direvaluasi tahun 2017
967	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Underpass Permata Hijau Lintas Tanah Abang - serpong	7010101004	169	569.786.445	729.484.445			729.484.445	dihapuskan, sudah dibangun flyover oleh Pemda DKI Tahun 2015
968	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Project management service	7010101004	170	449.790.000	449.790.000			449.790.000	dihapuskan, sudah dibangun flyover oleh Pemda DKI Tahun 2015
969	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Telaah RKL-RPL Pembangunan Jalan KA lintas Maja - Rangkasbitung	7010101004	171	285.100.000	285.100.000	285.100.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
970	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATB SERPONG (biaya pelelangan satker PTM)	7010101004	172	66.188.700	66.188.700			66.188.700	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya pelelangan, penggandaan dan lainnya (berdasarkan laporan bulanan Desember 2013)
971	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATK LELANG SERPONG	7010101004	173	38.687.000	38.687.000			38.687.000	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
972	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATK LELANG SERPONG	7010101004	174	94.300.000	94.300.000			94.300.000	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
973	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATB SERPONG	7010101004	175	7.600.000	7.600.000			7.600.000	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
974	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATK LELANG SERPONG	7010101004	176	4.379.300	4.379.300			4.379.300	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
975	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATK LELANG SERPONG	7010101004	177	38.082.000	38.082.000			38.082.000	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
976	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATB JABOTABEK	7010101004	178	2.428.263.200	2.428.263.200			2.428.263.200	Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
977	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	KOORDINASI KONSULTASI JABOTABEK	7010101004	179	487.674.000	487.674.000			487.674.000	Dihapuskan karena NUP induk konstruksi sudah direvaluasi tahun 2017
978	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Desain Pembangunan Underpass di Perlintasan Stasiun Citayam	7010101004	180	564.464.818	564.464.818		564.464.818		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
979	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	7010101004	181	720.751.050	720.751.050			720.751.050	Dihapuskan, Salah Judul (DED Underpass Tanjung Barat) dan Revisi nilai Rp 720.341.160, sekarang sudah dibangun flyover oleh Pemda DKI Tahun 2019
980	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	STUDY DESAIN JABOTABEK (Underpass Poris)	7010101004	182	1.159.702.010	1.159.702.010		1.159.702.010		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
981	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Manajemen Konstruksi	7010101004	183	480.154.400	480.154.400			480.154.400	Dihapuskan karena NUP induk konstruksi sudah direvaluasi tahun 2017
982	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED JABOTABEK	7010101004	184	667.398.203	667.398.203		667.398.203		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030 dan DED perlintasan Bojong Gede, Diriview BPTJ 2020
983	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DETAIL DESAIN ST. TANGERANG JABOTABEK	7010101004	185	605.247.000	605.247.000		605.247.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
984	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DETAIL DESAIN NAMBO CITAYAM JABOTABEK (DED pembangunan jalur KA di emplasemen Nambo-Citayam , Lenteng Agung)	7010101004	186	1.826.866.000	1.826.866.000		1.826.866.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
985	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	AMDAL NAMBO CITAYAM DAN LA JABOTABEK (AMDAL Pembangunan jalur KA di emplasemen stasiun Nambo - Citayam , Lenteng Agung)	7010101004	187	87.107.000	87.107.000		87.107.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
986	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PELELANGAN JABOTABEK	7010101004	188	99.999.500	99.999.500		99.999.500		Dihapuskan karena salah akun. Merupakan biaya Belanja Barang
987	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Amdal Depo Cipinang	7010101004	189	495.000.000	495.000.000	495.000.000			Akan dilakukan kapitalisasi aset
988	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Amdal Lalu Lintas Antara Manggarai-Cikarang	7010101004	190	442.000.000	442.000.000	442.000.000			Akan dilakukan kapitalisasi aset
989	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	ATB DDT (Manajemen Konstruksi)	7010101004	191	398.300.000	398.300.000			398.300.000	Dihapuskan karena NUP induk konstruksi sudah direvaluasi tahun 2017
990	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Desain Elektrifikasi dan Gedung Antara Cikarang-Cikampek	7010101004	192	2.962.800.000	2.962.800.000		2.962.800.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
991	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Desain Pembangunan/Relokasi Perlintasan Tidak Sebidang (Underpass) di Emplasemen Stasiun Tambun, Cibitung, Cikarang dan Lemah Abang	7010101004	193	2.267.598.000	2.267.598.000	2.267.598.000			Stasiun tambun dan cibitung sdh dibangun, pemda bekasi proses pembebasan pemda bekasi
992	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen RKL-RPL "Telaah RKL-RPL Pemb Jalan KA Jatinegara-Bekasi"	7010101004	195	276.100.000	276.100.000	276.100.000			Akan dilakukan kapitalisasi aset
993	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Desain Pembangunan Dipo KRL Cikarang	7010101004	196	2.988.800.000	2.988.800.000		2.988.800.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
994	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENYUSUNAN STUDY AMDAL DDT	7010101004	197	980.500.000	980.500.000		980.500.000		Akan dilakukan kapitalisasi aset
995	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan AMDAL / UKL / UPL-Dokumen pemantauan RKL / RPL pembangunan jalur ganda KA lintas Maja - Rangkasbitung	7010101004	198	288.970.000	288.970.000		288.970.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
996	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail desain pembangunan jalur ganda KA antara Citayam - Nambo	7010101004	199	4.696.725.000	4.696.725.000		4.696.725.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
997	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	RKL RPL PAKET B1	7010101004	200	896.880.600	896.880.600	896.880.600			Akan dilakukan kapitalisasi aset

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
998	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengujian struktur jalan layang KA lintas Jakarta Kota - Manggarai tahap pertama	7010101004	201	9.657.173.000	9.657.173.000		9.657.173.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
999	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Basic Desain Pembangunan Jalur KA Layang Jabodetabek Pd. Jati - Manggarai - Tn. Abang - Kp. Bandan - Rajawali - Pd. Jati	7010101004	202	8.196.023.000	8.196.023.000		8.196.023.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030 DAN sudah dilakukan DED oleh BPTJ Tahun 2020
1000	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	penyusunan amdal pembangunan jalan KA, jembatan, dan sintelis jalur ganda antara parung panjang citayam	7010101004	203	792.600.000	792.600.000		792.600.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1001	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Detail Desain Pembangunan Jalan KA, Jembatan dan Sintelis Jalur Ganda antara Parungpanjang - Citayam	7010101004	204	4.835.804.000	4.835.804.000		4.835.804.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1002	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Penanganan Longsoran pada Km.59+700 ant. Tigaraksa - Maja 59+600 - Km. 59+800	7010101004	205	659.899.000	659.899.000		659.899.000		Akan dilakukan kapitalisasi aset ke proyek 2015
1003	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED STASIUN KA MERAK BARU	7010101004	206	1.401.323.000	1.401.323.000		1.401.323.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1004	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED FLY OVER TIGARAKSA SERPONG	7010101004	207	1.779.360.000	1.779.360.000		1.779.360.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1005	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Stasiun KA Merak Baru (P-60.14)	7010101004	208	714.818.000	714.818.000	714.818.000			Sudah direview tahun 2019
1006	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Desain Persinyalan, Telekomunikasi dan Listrik Jalur Ganda KA antara citayam-nambo	7010101004	209	1.622.604.000	1.622.604.000	1.622.604.000			akan dikapitalisasi ke dalam pekerjaan fisik setelah selesai (sedang berjalan MYC)
1007	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi Perkuatan Jalur KA Lintas Jak.Kota-Tj.Priok	7010101004	210	1.303.615.000	1.825.061.000	1.825.061.000			Selesai, akan dikapitalisasi ke dalam pekerjaan fisiknya
1008	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Desain Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakban	7010101004	211	707.223.000	990.111.400		990.111.400		menunggu pekerjaan konstruksi
1009	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan UKL/UPL Pemb. Gedung BTPWJB	7010101004	212	350.295.000	546.459.400		546.459.400		menunggu pekerjaan konstruksi
1010	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan UKL/UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang di Lintas Mri-Bogor	7010101004	213	522.390.000	940.302.000		940.302.000		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1011	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DD Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pemb.Tidak Sebidang di Lintas Duri-Tangerang	7010101004	215	3.975.747.000	5.071.068.080		5.071.068.080		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1012	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DD Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pemb Tidak Sebidang di Lintas Manggarai-Bogor	7010101004	216	3.911.861.000	4.866.040.280		4.866.040.280		Merupakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030
1013	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pemb. Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) km. 69+925-km.79+550 antara maja-rangkasbitung	7010101004	237	42.379.273.000	69.375.223.561	69.375.223.561			akan dilakukan kapitalisasi aset
1014	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) KM.11+800 Lintas Jakarta Kota - Bogor	7010101004	240	5.568.011.000	5.677.546.000	5.677.546.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
1015	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Cikarang	7010101004	247	512.400.000	397.000.000	397.000.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
1016	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Sipil di Emplasemen Stasiun Tambun	7010101004	248	17.604.159.000	17.420.885.157	17.420.885.157			akan dilakukan kapitalisasi aset
1017	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Sipil di Emplasemen Stasiun Cikarang	7010101004	249	8.394.260.000	8.049.490.000	8.049.490.000			Akan dilakukan kapitalisasi aset total proyek selesai tahun 2021 (sumber APBN dan SBSN)
1018	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jalan Rel di Emplasemen Stasiun Tambun	7010101004	250	9.524.222.000	10.967.133.346	10.967.133.346			akan dilakukan kapitalisasi aset
1019	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jalan Rel di Emplasemen Stasiun Cikarang	7010101004	251	22.093.380.000	18.027.162.915	18.027.162.915			akan dilakukan kapitalisasi aset
1020	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan pembangunan Fasilitas operasi di Emplasemen Stasiun Tambun	7010101004	254	35.703.452.000	19.075.722.307	19.075.722.307			akan dilakukan kapitalisasi aset
1021	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara (Paket A)(Tahap II)"Pekerjaan Main Line I"	7010101004	255	370.037.688.971	298.017.272.795	298.017.272.795			selesai, menunggu rincian kapitalisasi
1022	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara (Paket A)(Tahap II)"Pekerjaan Main Line II"	7010101004	256	378.556.465.845	301.756.083.310	301.756.083.310			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1023	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara (Paket A)(Tahap II)"Pekerjaan Fasilitas Operasi"	7010101004	257	252.039.416.000	253.683.692.027	253.683.692.027			selesai, menunggu rincian kapitalisasi
1024	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara (Paket A)(Tahap II)"Pekerjaan Supervisi"	7010101004	259	16.224.593.000	15.615.400.593	15.615.400.593			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1025	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN JALUR KA LINTAS RANGKAS BIYUNG-SERANG "PEKERJAAN PENGADAAN BANTALAN BETON R.54 LINTAS RANGKAS BITUNG-SERANG"	7010101004	261	37.255.902.000	38.676.516.000	38.676.516.000			
1026	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENGGANTIAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI STASIUN CIKARANG - STASIUN CIKAMPEK	7010101004	269	275.973.335.000	161.663.783.692	161.663.783.692			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1027	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENGGANTIAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI STASIUN CIKARANG - STASIUN CIKAMPEK	7010101004	268	5.368.556.000	4.006.552.615	4.006.552.615			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1028	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN JALUR ANTARA SERANG-MERAK LINTAS RANGKASBITUNG-MERAK (MYC 2020-2021)	7010101004	267	18.281.379.118	185.955.458.787	185.955.458.787			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1029	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENINGKATAN JALUR ANTARA SERANG-MERAK LINTAS RANGKASBITUNG - MERAK	7010101004	266	2.164.542.600	2.376.238.150	2.376.238.150			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1030	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PENGADAAN BANTALAN BETON 54 UNTUK PENINGKATAN JALUR KA ANTARA SERANG MERAK LINTAS RANGKASBITUNG-MERAK	7010101004	264	38.529.552.000	31.872.858.000	31.872.858.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1031	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyempurnaan area stasiun jatinegara, matraman dan manggarai sisi barat	7010101004	270	60.688.558.460	66.453.971.500	66.453.971.500			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1032	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Supervisi penyempurnaan area stasiun jatinegara, matraman dan manggarai sisi barat	7010101004	271	1.780.564.500	1.950.465.000	1.950.465.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1033	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan jalur KA antara serang-merak lintas rangkasbitung-merak "Penyempurnaan jalur KA antara rangkasbitung-merak"	7010101004	272	34.281.555.759	37.366.895.000	37.366.895.000			akan dikapitalisasi
1034	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan wesel R.54 lengkap dengan bantalan beton untuk pekerjaan DDT Paket A pengembangan fasilitas perkeretaapian untuk manggarai s/d jatinegara	7010101004	273	11.639.332.727	8.380.319.564	8.380.319.564			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1035	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Peningkatan jalur KA antara serang-merak dan penyempurnaan jalur KA antara rangkasbitung-serang "Pengadaan bantalan beton R.54 untuk jalur KA antara rrangkasbitung-pandeglang"	7010101004	274	6.440.127.000	6.440.127.000	6.440.127.000			akan dikapitalisasi
1036	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengadaan wesel R.54 lengkap dengan bantalan beton untuk pekerjaan DDT Paket A pengembangan fasilitas perkeretaapian untuk manggarai s/d jatinegara	7010101004	275	11.639.332.727	3.259.013.163	3.259.013.163			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1037	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Tahap I	7010101004	278	12.273.767.000	12.273.767.000	12.273.767.000			Pekerjaan belum selesai
1038	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Supervisi Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Tahap I	7010101004	279	723.109.000	434.025.600	434.025.600			Pekerjaan belum selesai
1039	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Supervisi Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Tahap I	7010101004	280	723.109.000	289.083.400	289.083.400			Pekerjaan belum selesai
1040	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Peron lintas Manggarai, Bogor dan Ancol	7010101003	13	486.656.000	486.656.000	486.656.000			akan dilakukan kapitalisasi aset
1041	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Biaya Supervisi Pembuatan Perpanjangan Peron Tinggi dan Shelter Cicayur termasuk Area Jalan Masuk dan Parkir	7010101003	20	136.621.000	27.324.200	27.324.200			akan dilakukan kapitalisasi aset
1042	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Sipil Stasiun Cikarang"	7010101003	25	16.160.175.838	17.999.522.223	17.999.522.223			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1043	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun Cikarang"	7010101003	26	55.996.245.943	206.677.410.693	206.677.410.693			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1044	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Supervisi Pekerjaan Bangunan Stasiun Cikarang"	7010101003	23	2.541.264.000	2.541.264.000	2.541.264.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1045	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Jalan Rel Stasiun Cikarang"	7010101003	24	29.307.850.770	34.331.520.516	34.331.520.516			akan dihapus karena terdapat kesalahan dari KPPN (terdapat surat)
1046	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Sistem Persinyalan KA Area Stasiun Bekasi"	7010101003	32	60.713.445.000	65.936.482.000	65.936.482.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1047	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Listrik Aliran Atas Area Stasiun Bekasi"	7010101003	30	27.330.523.440	29.966.069.320	29.966.069.320			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1048	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Supervisi Pekerjaan Fasilitas Operasi KA Area Stasiun Bekasi"	7010101003	28	1.742.884.000	1.742.884.000	1.742.884.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1049	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Sistem Persinyalan KA Area Stasiun Cikarang"	7010101003	31	40.334.362.000	40.334.362.000	40.334.362.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1050	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Listrik Aliran Atas Area Stasiun Cikarang dan Underpass Cibitung"	7010101003	29	6.511.632.380	6.511.632.380	6.511.632.380			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1051	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Supervisi Pekerjaan Fasilitas Operasi KA Area Stasiun Cikarang dan Underpass Cibitung"	7010101003	27	1.223.794.000	1.223.794.000	1.223.794.000			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1052	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun Bekasi"	7010101003	34	104.217.375.759	114.038.845.824	114.038.845.824			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1053	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Supervisi Pekerjaan Bangunan Stasiun Bekasi"	7010101003	35	4.176.371.760	4.176.371.760	4.176.371.760			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1054	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Jalan Rel Stasiun Bekasi"	7010101003	36	23.029.930.669	76.177.976.111	76.177.976.111			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1055	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Jalan Rel KM. 21+200 s/d KM. 25+000"	7010101003	37	16.044.706.150	16.044.706.150	16.044.706.150			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1056	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Sipil Stasiun Bekasi"	7010101003	38	44.364.880.049	44.364.880.049	44.364.880.049			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1057	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s/d Cikarang "Pekerjaan Jalan Rel Stasiun Cikarang"	7010101003	40	29.307.850.770	11.063.713.668	11.063.713.668			Pekerjaan belum selesai karena merupakan MYC
1058	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Penyempurnaan LAA atas area Bekasi-Cikarang	7010101003	41	8.224.128.000	9.020.625.680	9.020.625.680			
1059	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Penyempurnaan Stasiun dan Track di Tambun	7010101003	42	21.545.156.000	22.570.427.936	22.570.427.936			
1060	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Supervisi Finishing Stasiun dan Track Tambun	7010101003	43	872.682.000	872.682.000	872.682.000			
1061	DJKA	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PAKET PEKERJAAN KONTRUKSI JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG STASIUN TAMBUN	7010101003	46	1.281.411.034	1.281.411.034	1.281.411.034			
1062	DJKA	467504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Server Kantor BKT Merdeka Timur	7010101002	3	6.793.200.000	6.793.200.000	6.793.200.000			
1063	DJKA	467373	Balai Perawatan Perkeretaapian	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Fasilitas Perawatan Tahap II Balai Perawatan Perkeretaapian	7010101004	1	1.504.600.000	1.504.600.000	1.504.600.000			Menunggu Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi di Tahun 2023
1064	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	1	8.434.774.473	8.434.774.473	8.434.774.473			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1065	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	2	6.539.379.973	6.539.379.973	6.539.379.973			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1066	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	3	715.066.100	715.066.100	715.066.100			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1067	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	4	141.565.000	141.565.000	141.565.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1068	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	5	4.614.599.745	4.614.599.745	4.614.599.745			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1069	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	6	461.045.000	461.045.000	461.045.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1070	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	7	1.104.396.000	1.104.396.000	1.104.396.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1071	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	8	261.703.500	261.703.500	261.703.500			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1072	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	9	1.972.663.787	1.972.663.787	1.972.663.787			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1073	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	10	94.953.000	94.953.000	94.953.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1074	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	11	27.060.000	27.060.000	27.060.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1075	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	12	2.075.461.609	2.075.461.609	2.075.461.609			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1076	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	13	17.308.581.849	17.308.581.849	17.308.581.849			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1077	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	14	134.537.800	134.537.800	134.537.800			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1078	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	15	214.965.000	214.965.000	214.965.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1079	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	16	132.722.000	132.722.000	132.722.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1080	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	17	92.600.000	92.600.000	92.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1081	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	18	134.406.001	134.406.001	134.406.001			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1082	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	19	65.750.000	65.750.000	65.750.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1083	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	20	985.975.640	985.975.640	985.975.640			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1084	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	25	46.504.700	46.504.700	46.504.700			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1085	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	29	2.880.000	2.880.000	2.880.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1086	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	30	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1087	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	33	65.480.000	65.480.000	65.480.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1088	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	35	4.095.000	4.095.000	4.095.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1089	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	36	231.964.000	231.964.000	231.964.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1090	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	37	168.564.000	168.564.000	168.564.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1091	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	38	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1092	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	39	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1093	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	40	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1094	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	41	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1095	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	42	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1096	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	43	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1097	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	44	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1098	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	45	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1099	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	46	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1100	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	47	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1101	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	48	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1102	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	49	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1103	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	50	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1104	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	51	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1105	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	52	6.147.100	6.147.100	6.147.100			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1106	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	53	1.000.000	1.000.000	1.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1107	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	54	4.350.000	4.350.000	4.350.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1108	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	55	6.947.100	6.947.100	6.947.100			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1109	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	56	5.050.000	5.050.000	5.050.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1110	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	57	1.000.000	1.000.000	1.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1111	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	58	2.606.900	2.606.900	2.606.900			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1112	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	59	500.000	500.000	500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1113	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	60	500.000	500.000	500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1114	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	65	20.580.000	20.580.000	20.580.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1115	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	68	13.187.000	13.187.000	13.187.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1116	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	71	750.000	750.000	750.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1117	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	72	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1118	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	73	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1119	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	74	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1120	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	75	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1121	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	76	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1122	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	77	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1123	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	78	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1124	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	79	4.105.000	4.105.000	4.105.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1125	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	80	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1126	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	81	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1127	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	82	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1128	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	83	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1129	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	84	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1130	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	85	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1131	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	86	4.055.000	4.055.000	4.055.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1132	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	88	6.305.600	6.305.600	6.305.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1133	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	89	1.400.000	1.400.000	1.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1134	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	90	5.156.900	5.156.900	5.156.900			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1135	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	91	1.750.000	1.750.000	1.750.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1136	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	93	320.000	320.000	320.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1137	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	95	11.344.000	11.344.000	11.344.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1138	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	96	5.760.000	5.760.000	5.760.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1139	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	104	49.400.000	49.400.000	49.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1140	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	106	960.000	960.000	960.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1141	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	107	1.500.000	1.500.000	1.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1142	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	109	24.000.000	24.000.000	24.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1143	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	110	24.000.000	24.000.000	24.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1144	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	114	23.171.400	23.171.400	23.171.400			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1145	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	115	25.990.000	25.990.000	25.990.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1146	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	118	3.536.768	3.536.768	3.536.768			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1147	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	119	938.000	938.000	938.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1148	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	123	730.000	730.000	730.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1149	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	124	100.000	100.000	100.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1150	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	127	25.310.000	25.310.000	25.310.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1151	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	128	18.399.200	18.399.200	18.399.200			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1152	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	131	21.978.000	21.978.000	21.978.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1153	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	132	21.978.000	21.978.000	21.978.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1154	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	139	24.244.000	24.244.000	24.244.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1155	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	141	89.722.326	89.722.326	89.722.326			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1156	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	142	687.053.399	687.053.399	687.053.399			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1157	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	143	8.619.634	8.619.634	8.619.634			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1158	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	144	18.260.000	18.260.000	18.260.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1159	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	146	3.249.600	3.249.600	3.249.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1160	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	147	22.840.000	22.840.000	22.840.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1161	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	148	210.000	210.000	210.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1162	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	149	210.000	210.000	210.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1163	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	150	100.000	100.000	100.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1164	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	153	17.650.000	17.650.000	17.650.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1165	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	154	24.187.000	24.187.000	24.187.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1166	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	155	43.208.000	43.208.000	43.208.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1167	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	157	18.449.600	18.449.600	18.449.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1168	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	159	24.107.000	24.107.000	24.107.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1169	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	161	7.680.000	7.680.000	7.680.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1170	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	163	26.500.000	26.500.000	26.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1171	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	166	3.000.000	3.000.000	3.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1172	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	167	149.950.000	149.950.000	149.950.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1173	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	170	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1174	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	172	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1175	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	173	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1176	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	174	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1177	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	175	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1178	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	176	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1179	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	177	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1180	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	178	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1181	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	179	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1182	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	180	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1183	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	181	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1184	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	182	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1185	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	183	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1186	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	184	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1187	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	185	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1188	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	186	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1189	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	187	143.190	143.190	143.190			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1190	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	188	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1191	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	189	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1192	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	190	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1193	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	191	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1194	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	192	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1195	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	193	234.210	234.210	234.210			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1196	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	194	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1197	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	195	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1198	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	196	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1199	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	197	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1200	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	198	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1201	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	199	71.040	71.040	71.040			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1202	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	200	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1203	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	201	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1204	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	202	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1205	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	203	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1206	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	204	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1207	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	205	188.145	188.145	188.145			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1208	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	206	196.470	196.470	196.470			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1209	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	207	79.920	79.920	79.920			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1210	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	208	26.640	26.640	26.640			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1211	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	209	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1212	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	210	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1213	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	211	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1214	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	212	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1215	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	213	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1216	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	214	31.080	31.080	31.080			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1217	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	215	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1218	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	216	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1219	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	217	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1220	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	218	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1221	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	219	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1222	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	220	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1223	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	221	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1224	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	222	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1225	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	223	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1226	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	224	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1227	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	225	150.960	150.960	150.960			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1228	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	226	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1229	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	227	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1230	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	228	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1231	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	229	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1232	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	230	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1233	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	231	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1234	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	232	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1235	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	233	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1236	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	234	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1237	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	235	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1238	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	236	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1239	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	237	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1240	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	238	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1241	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	239	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1242	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	240	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1243	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	241	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1244	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	242	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1245	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	243	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1246	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	244	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1247	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	245	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1248	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	246	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1249	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	247	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1250	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	248	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1251	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	249	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1252	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	250	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1253	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	251	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1254	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	252	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1255	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	253	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1256	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	254	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1257	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	255	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1258	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	256	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1259	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	257	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1260	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	258	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1261	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	259	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1262	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	260	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1263	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	261	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1264	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	262	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1265	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	263	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1266	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	264	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1267	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	265	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1268	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	266	269.730	269.730	269.730			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1269	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	267	269.730	269.730	269.730			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1270	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	268	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1271	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	269	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1272	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	270	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1273	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	271	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1274	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	272	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1275	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	273	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1276	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	274	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1277	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	275	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1278	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	276	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1279	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	277	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1280	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	278	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1281	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	279	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1282	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	280	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1283	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	281	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1284	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	282	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1285	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	283	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1286	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	284	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1287	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	285	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1288	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	286	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1289	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	287	108.225	108.225	108.225			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1290	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	288	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1291	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	289	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1292	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	290	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1293	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	291	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1294	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	292	74.370	74.370	74.370			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1295	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	293	143.190	143.190	143.190			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1296	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	294	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1297	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	295	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1298	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	296	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1299	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	297	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1300	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	298	89.910	89.910	89.910			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1301	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	299	234.210	234.210	234.210			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1302	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	300	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1303	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	301	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1304	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	302	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1305	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	303	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1306	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	304	36.630	36.630	36.630			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1307	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	305	71.040	71.040	71.040			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1308	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	306	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1309	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	307	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1310	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	308	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1311	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	309	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1312	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	310	84.915	84.915	84.915			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1313	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	311	188.145	188.145	188.145			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1314	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	312	196.470	196.470	196.470			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1315	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	313	79.920	79.920	79.920			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1316	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	314	26.640	26.640	26.640			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1317	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	315	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1318	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	316	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1319	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	317	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1320	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	318	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1321	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	319	43.290	43.290	43.290			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1322	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	320	31.080	31.080	31.080			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1323	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	321	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1324	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	322	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1325	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	323	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1326	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	324	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1327	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	325	61.050	61.050	61.050			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1328	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	326	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1329	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	327	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1330	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	328	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1331	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	329	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1332	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	330	34.965	34.965	34.965			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1333	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	331	150.960	150.960	150.960			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1334	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	332	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1335	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	333	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1336	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	334	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1337	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	335	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1338	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	336	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1339	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	337	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1340	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	338	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1341	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	339	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1342	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	340	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1343	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	341	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1344	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	342	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1345	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	343	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1346	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	344	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1347	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	345	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1348	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	346	227.550	227.550	227.550			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1349	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	347	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1350	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	348	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1351	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	349	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1352	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	350	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1353	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	351	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1354	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	352	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1355	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	353	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1356	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	354	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1357	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	355	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1358	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	356	68.265	68.265	68.265			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1359	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	357	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1360	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	358	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1361	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	359	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1362	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	360	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1363	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	361	88.245	88.245	88.245			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1364	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	362	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1365	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	363	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1366	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	364	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1367	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	365	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1368	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	366	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1369	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	367	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1370	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	368	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1371	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	369	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1372	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	370	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1373	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	371	357.975	357.975	357.975			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1374	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	372	269.730	269.730	269.730			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1375	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	373	269.730	269.730	269.730			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1376	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	374	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1377	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	375	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1378	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	376	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1379	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	377	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1380	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	378	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1381	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	379	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1382	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	380	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1383	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	381	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1384	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	382	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1385	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	383	666.000	666.000	666.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1386	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	384	8.240.000	8.240.000	8.240.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1387	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	386	1.456.960	1.456.960	1.456.960			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1388	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	387	10.027.600	10.027.600	10.027.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1389	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	390	24.640.000	24.640.000	24.640.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1390	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	391	18.432.000	18.432.000	18.432.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1391	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	393	3.609.000	3.609.000	3.609.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1392	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	394	7.500.000	7.500.000	7.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1393	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	395	7.500.000	7.500.000	7.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1394	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	396	32.380.000	32.380.000	32.380.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1395	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	397	14.650.200	14.650.200	14.650.200			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1396	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	398	2.733.400	2.733.400	2.733.400			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1397	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	399	8.500.000	8.500.000	8.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1398	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	403	21.920.000	21.920.000	21.920.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1399	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	404	15.300.000	15.300.000	15.300.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1400	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	405	36.000.000	36.000.000	36.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1401	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	406	1.600.000	1.600.000	1.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1402	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	407	22.939.800	22.939.800	22.939.800			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1403	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	412	43.200	43.200	43.200			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1404	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	413	108.610.000	108.610.000	108.610.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1405	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	414	32.292.000	32.292.000	32.292.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1406	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	416	15.734.600	15.734.600	15.734.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1407	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	420	21.120.000	21.120.000	21.120.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1408	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	422	19.645.890	19.645.890	19.645.890			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1409	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	423	19.645.890	19.645.890	19.645.890			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1410	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	424	8.000.000	8.000.000	8.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1411	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	425	1.520.300	1.520.300	1.520.300			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1412	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	430	35.653.000	35.653.000	35.653.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1413	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	431	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1414	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	432	32.900.000	32.900.000	32.900.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1415	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	433	18.800.000	18.800.000	18.800.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1416	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	434	120.000.000	120.000.000	120.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1417	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	435	66.560.000	66.560.000	66.560.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1418	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	436	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1419	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	437	22.200.000	22.200.000	22.200.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1420	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	438	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1421	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	439	21.110.000	21.110.000	21.110.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1422	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	440	49.101.072	49.101.072	49.101.072			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1423	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	441	48.437.237	48.437.237	48.437.237			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1424	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	442	10.642.000	10.642.000	10.642.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1425	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	443	6.180.000	6.180.000	6.180.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1426	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	444	13.335.540	13.335.540	13.335.540			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1427	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	445	19.840.000	19.840.000	19.840.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1428	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	446	22.600.000	22.600.000	22.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1429	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	447	1.050.000	1.050.000	1.050.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1430	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	448	2.800.600	2.800.600	2.800.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1431	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	449	2.399.998	2.399.998	2.399.998			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1432	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	450	40.500.000	40.500.000	40.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1433	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	451	11.500.000	11.500.000	11.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1434	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	452	40.500.000	40.500.000	40.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1435	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	453	40.500.000	40.500.000	40.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1436	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	454	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1437	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	455	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1438	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	456	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1439	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	457	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1440	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	458	48.951.000	48.951.000	48.951.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1441	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	459	30.000.000	30.000.000	30.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1442	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	460	40.000.000	40.000.000	40.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1443	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	461	23.722.000	23.722.000	23.722.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1444	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	462	45.000.000	45.000.000	45.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1445	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	463	45.000.000	45.000.000	45.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1446	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	464	8.639.991	8.639.991	8.639.991			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1447	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	465	5.400.000	5.400.000	5.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1448	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	466	39.199.650	39.199.650	39.199.650			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1449	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	467	1.519.998	1.519.998	1.519.998			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1450	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	468	30.000.000	30.000.000	30.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1451	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	469	21.091.425	21.091.425	21.091.425			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1452	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	470	48.951.000	48.951.000	48.951.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1453	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	471	8.400.000	8.400.000	8.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1454	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	472	47.695.587	47.695.587	47.695.587			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1455	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	473	44.999.955	44.999.955	44.999.955			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1456	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	474	47.499.953	47.499.953	47.499.953			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1457	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	475	42.499.958	42.499.958	42.499.958			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1458	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	476	189.000.000	189.000.000	189.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1459	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	477	90.480.000	90.480.000	90.480.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1460	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	478	180.960.000	180.960.000	180.960.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1461	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	479	189.000.000	189.000.000	189.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1462	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	480	90.480.000	90.480.000	90.480.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1463	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	481	126.000.000	126.000.000	126.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1464	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	482	70.000.000	70.000.000	70.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1465	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	483	23.500.000	23.500.000	23.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1466	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	484	4.898.700	4.898.700	4.898.700			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1467	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	485	45.140.000	45.140.000	45.140.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1468	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	486	40.792.500	40.792.500	40.792.500			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1469	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	487	1.670.000	1.670.000	1.670.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1470	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	488	1.600.000	1.600.000	1.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1471	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	489	24.000.000	24.000.000	24.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1472	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	490	16.200.000	16.200.000	16.200.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1473	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	491	13.350.000	13.350.000	13.350.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1474	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	492	13.350.000	13.350.000	13.350.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1475	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	493	12.000.000	12.000.000	12.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1476	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	494	37.800.000	37.800.000	37.800.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1477	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	495	110.250.000	110.250.000	110.250.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1478	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	496	19.700.000	19.700.000	19.700.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1479	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	497	18.000.000	18.000.000	18.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1480	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	498	15.850.000	15.850.000	15.850.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1481	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	499	18.880.000	18.880.000	18.880.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1482	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	500	111.950.000	111.950.000	111.950.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1483	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	501	48.951.000	48.951.000	48.951.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1484	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	502	22.600.000	22.600.000	22.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1485	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	503	22.600.000	22.600.000	22.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1486	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	504	37.800.000	37.800.000	37.800.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1487	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	505	37.800.000	37.800.000	37.800.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1488	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	506	37.800.000	37.800.000	37.800.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1489	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	507	122.610.000	122.610.000	122.610.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1490	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	508	48.951.000	48.951.000	48.951.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1491	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	509	36.000.000	36.000.000	36.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1492	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	510	9.520.300	9.520.300	9.520.300			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1493	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	511	9.520.300	9.520.300	9.520.300			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1494	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	512	7.520.300	7.520.300	7.520.300			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1495	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	513	34.055.477	34.055.477	34.055.477			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1496	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	514	11.320.000	11.320.000	11.320.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1497	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	515	36.000.000	36.000.000	36.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1498	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	516	108.000.000	108.000.000	108.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1499	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	517	36.000.000	36.000.000	36.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1500	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	518	7.400.000	7.400.000	7.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1501	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	519	20.040.000	20.040.000	20.040.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1502	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	520	105.700.000	105.700.000	105.700.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1503	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	521	29.500.000	29.500.000	29.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1504	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	522	4.319.996	4.319.996	4.319.996			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1505	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	523	4.319.996	4.319.996	4.319.996			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1506	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	524	7.999.992	7.999.992	7.999.992			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1507	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	525	44.351.604	44.351.604	44.351.604			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1508	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	526	19.008.333	19.008.333	19.008.333			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1509	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	527	10.500.000	10.500.000	10.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1510	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	528	15.999.984	15.999.984	15.999.984			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1511	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	529	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1512	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	530	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1513	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	531	8.000.000	8.000.000	8.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1514	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	532	27.000.000	27.000.000	27.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1515	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	533	2.025.000	2.025.000	2.025.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1516	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	534	14.140.000	14.140.000	14.140.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1517	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	535	48.560.280	48.560.280	48.560.280			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1518	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	536	49.023.150	49.023.150	49.023.150			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1519	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	537	24.000.000	24.000.000	24.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1520	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	538	28.000.000	28.000.000	28.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1521	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	539	28.000.000	28.000.000	28.000.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1522	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	540	25.333.400	25.333.400	25.333.400			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1523	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	541	50.600.000	50.600.000	50.600.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1524	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	542	8.700.000	8.700.000	8.700.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1525	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	543	10.500.000	10.500.000	10.500.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1526	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	544	29.999.970	29.999.970	29.999.970			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1527	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	545	23.999.976	23.999.976	23.999.976			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1528	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	546	2.400.000	2.400.000	2.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1529	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	547	29.400.000	29.400.000	29.400.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1530	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	548	50.000	50.000	50.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1531	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	549	29.880.000	29.880.000	29.880.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1532	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	550	64.945.600	64.945.600	64.945.600			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1533	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	551	2.700.000	2.700.000	2.700.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1534	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	BOBP Pengadaan Tanah Untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101001	552	912.960	912.960	912.960			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1535	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	TANAH DALAM PENGERJAAN	Jasa Konsultansi Penilaian (Appraisal) Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api di Kabupaten Maros	7010101001	553	445.005.000	445.005.000	445.005.000			Akan di kapitalisasi pada saat pengadaan tanah telah selesai
1536	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	MAROS - GARONGKONG	7010101002	1	840.419.740	168.083.748	168.083.748			
1537	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Konsultan jembatan Km.95 barru	7010101002	2	840.419.740	336.167.496	336.167.496			

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1538	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan dan pemasangan CCTV Makpar	7010101002	3	840.419.740	294.146.559	294.146.559			
1539	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan dan pemasangan cctv	7010101002	4	840.419.740	42.020.937	42.020.937			
1540	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan bongkar muat stokyard Maros	7010101002	5	4.674.610.710	4.674.610.710	4.674.610.710			
1541	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design Pembangunan Balai Yasa Lintas Makasar - Pare-pare	7010101003	1	1.466.025.000	1.466.025.000	1.466.025.000			akan di kapitalisasi pada saat pekerjaan selesai
1542	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Depo Sarana KA Lintas Makasar - Pare-pare	7010101003	2	2.356.100.000	2.356.100.000	2.356.100.000			akan di kapitalisasi pada saat pekerjaan selesai
1543	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	DED Stasiun KA Lintas Makassar - Parepare (Lanjutan)	7010101003	3	2.548.200.000	2.548.200.000	2.548.200.000			akan di kapitalisasi pada saat pekerjaan selesai
1544	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design Pembangunan Elevated Track antara Makassar – Parepare	7010101004	1	1.422.500.000	1.422.500.000	1.422.500.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1545	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Desain Terowongan KA antara Makassar – Parepare	7010101004	2	3.080.000.000	3.080.000.000	3.080.000.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1546	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Detail Engineering Design Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Kereta Api Makasar - Pare-Pare	7010101004	3	750.000.000	750.000.000	750.000.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1547	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Review Desain Stasiun Km.73+600 - Km.142+000 untuk Jalur KA Makassar-Parepare	7010101004	4	4.063.702.500	4.063.702.500	4.063.702.500			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1548	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.14+000 - Km.15+500 Antara Maros - Barru CT.401	7010101004	5	8.159.687.000	8.159.687.000	8.159.687.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1549	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.22+500 - Km.25+000 Antara Maros - Barru CT.404	7010101004	6	1.963.090.000	1.963.090.000	1.963.090.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1550	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.29+600 - Km.32+600 Antara Maros - Barru CT.406	7010101004	7	49.100.000	49.100.000	49.100.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1551	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.32+600 - Km.36+600 Antara Maros - Barru CT.407	7010101004	8	31.125.636.480	121.352.826.459	121.352.826.459			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1552	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.36+600 - Km.40+400 Antara Maros - Barru CT.408	7010101004	11	111.399.262.000	148.124.390.916	148.124.390.916			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1553	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.40+400 - Km.44+100 Antara Maros - Barru CT.409	7010101004	13	159.103.860.000	164.321.870.255	164.321.870.255			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1554	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.52+300 - Km.56+500 Antara Maros - Barru CT.412	7010101004	14	15.259.930.700	109.109.262.809	109.109.262.809			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1555	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.66+5 00 - Km.71+900 Antara Maros - Barru CT.415	7010101004	15	114.261.103.000	115.556.966.775	115.556.966.775			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1556	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.71+900 - Km.73+600 Antara Maros - Barru CT.416	7010101004	16	131.721.713.869	131.721.713.869	131.721.713.869			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1557	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.52+300 - Km.56+500 Antara Maros - Barru CT.412	7010101004	19	100.573.618.000	116.017.501.004	116.017.501.004			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1558	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.44+100 - Km.73+600 Antara Maros - Barru SC.402	7010101004	22	154.180.583.000	168.814.685.779	168.814.685.779			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1559	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.71+900 - Km.73+600 Antara Maros - Barru CT.416	7010101004	23	198.746.960.000	206.874.892.995	206.874.892.995			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1560	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.14+000 - Km.44+100 Antara Maros - Barru SC.401	7010101004	24	24.722.667.000	17.349.240.000	17.349.240.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1561	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur KA Lintas Maksar - Parepare Km.44+100 - Km.73+600 Antara Maros - Barru SC.402	7010101004	25	19.439.293.896	17.226.297.000	17.226.297.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1562	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Maros - Pangkep	7010101004	28	20.642.848.500	6.880.950.000	6.880.950.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1563	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan jalan jembatan SC.501 Tomang	7010101004	32	788.543.290	788.543.290	788.543.290			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1564	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.501 pangkep	7010101004	36	80.695.182.000	24.208.554.600	24.208.554.600			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1565	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan maros - mandai	7010101004	37	59.505.755.000	20.648.771.272	20.648.771.272			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1566	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Stok yard ramang-ramang	7010101004	38	23.945.391.000	3.591.808.650	3.591.808.650			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1567	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Sinyal st. mandai	7010101004	39	26.613.723.000	3.629.144.106	3.629.144.106			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1568	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	overpass tonasa 2 pangkep	7010101004	40	23.163.138.000	12.143.780.400	12.143.780.400			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1569	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan jalan akses ramang - ramang, pangkajene, barru	7010101004	41	1.093.069.104	651.515.400	651.515.400			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1570	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jembatan Km.95 Barru	7010101004	42	28.834.257.933	7.863.888.527	7.863.888.527			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1571	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan akses maros 1	7010101004	44	17.169.402.000	7.464.957.450	7.464.957.450			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1572	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan akses maros 2	7010101004	45	10.693.857.000	7.129.238.310	7.129.238.310			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1573	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan akses stasiun ramang - ramang	7010101004	46	14.079.882.000	2.133.315.450	2.133.315.450			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1574	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Jalan akses stasiun pangkajene	7010101004	47	12.270.479.745	7.362.287.847	7.362.287.847			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1575	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan maros	7010101004	48	15.259.930.700	5.086.643.700	5.086.643.700			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1576	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan stok yard ramang ramang	7010101004	49	23.945.391.000	7.782.252.000	7.782.252.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1577	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan maros	7010101004	50	28.890.343.200	7.222.585.800	7.222.585.800			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1578	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan maros mandai	7010101004	51	59.505.755.000	16.364.082.000	16.364.082.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1579	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan jalan jembatan maros-mandai	7010101004	52	1.479.552.600	290.732.086	290.732.086			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1580	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan tomang pangkep	7010101004	53	80.695.182.000	16.139.036.400	16.139.036.400			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1581	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan SC.501	7010101004	54	2.545.220.590	809.754.701	809.754.701			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1582	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan SC.502 KM.95	7010101004	55	936.345.000	291.226.900	291.226.900			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1583	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi CT.408 maros	7010101004	56	11.426.110.300	5.713.055.150	5.713.055.150			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1584	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi CT.415 pangkep	7010101004	58	8.599.825.214	890.796.064	890.796.064			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1585	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi ST.501 maros	7010101004	59	26.613.723.000	11.492.289.447	11.492.289.447			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1586	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi SY.101 maros	7010101004	61	26.292.039.000	6.584.982.000	6.584.982.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1587	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi JA.103 maros	7010101004	62	14.079.882.000	5.688.841.000	5.688.841.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1588	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi OP.101 operpass tonasa 2	7010101004	63	23.163.138.000	11.019.357.600	11.019.357.600			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1589	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.406 maros	7010101004	64	15.910.386.000	7.955.193.000	7.955.193.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1590	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.501 pangkep	7010101004	65	28.834.257.933	20.970.369.406	20.970.369.406			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1591	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan stokyard SC.501 maros	7010101004	66	563.900.700	169.170.210	169.170.210			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1592	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Studi perawatan sarana STD.502 maros	7010101004	67	540.423.900	351.275.535	351.275.535			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1593	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.408 maros	7010101004	68	11.426.110.300	5.713.055.150	5.713.055.150			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1594	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi JA.101 maros	7010101004	69	17.342.298.000	9.877.340.550	9.877.340.550			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1595	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi JA.102 Maros	7010101004	70	11.873.585.000	4.744.346.690	4.744.346.690			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1596	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi JA.103 maros	7010101004	71	14.079.882.000	6.257.725.550	6.257.725.550			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1597	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan SC.508 maros	7010101004	72	591.727.000	177.518.100	177.518.100			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1598	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan Jalan akses Sc.505 maros	7010101004	73	1.093.069.104	441.553.704	441.553.704			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1599	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan akses CT.502 pangkep	7010101004	74	22.086.863.541	14.724.575.694	14.724.575.694			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1600	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.415 pangkep	7010101004	75	8.599.825.214	7.709.029.150	7.709.029.150			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1601	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.501 pangkep	7010101004	76	84.729.941.000	8.547.233.586	8.547.233.586			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1602	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi jalan jembatan CT.502 maros	7010101004	77	59.505.755.000	28.265.234.250	28.265.234.250			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1603	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi persinyalan ST.501 maros	7010101004	78	26.613.723.000	7.500.230.997	7.500.230.997			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1604	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Kontruksi stokyard SY.101 maros	7010101004	79	26.292.039.000	5.703.792.450	5.703.792.450			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1605	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Konsultan operpass tonasa 2 maros	7010101004	80	925.938.622	500.545.687	500.545.687			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1606	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Stock Yard Rammangrammang (SY.101)	7010101004	81	26.292.039.000	2.629.203.900	2.629.203.900			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1607	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur Siding KA MangiluTonasa (SC.501)	7010101004	82	2.545.220.590	197.764.682	197.764.682			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1608	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur Kereta Api Segmen III Tahap 2 Antara Mandai-Maros (SC.506)	7010101004	83	843.088.952	552.356.866	552.356.866			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1609	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Stockyard Rammangrammang (SC.507)	7010101004	84	563.900.700	394.730.490	394.730.490			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1610	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan di Stasiun Mandai (SC.508)	7010101004	85	591.727.000	414.208.900	414.208.900			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1611	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Pemantauan RKA-RPL Jalur KA Segmen 3 Lintas Makassar-Parepare (PL.501)	7010101004	86	182.347.000	182.347.000	182.347.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1612	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Siding KA MangiluTonasa (CT.501)	7010101004	87	3.355.305.664	3.355.305.664	3.355.305.664			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1613	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalur Siding KA MangiluTonasa (CT.501)	7010101004	88	84.729.941.000	4.236.497.050	4.236.497.050			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1614	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Makassar - Parepare antara Makassar - Barru (MYC 2017-2018) ST.401	7010101007	26	333.595.120.000	334.842.329.148	334.842.329.148			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1615	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Makassar - Parepare antara Makassar - Barru (MYC 2017-2018) SC.405	7010101007	27	6.651.177.500	6.651.177.500	6.651.177.500			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1616	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pemb. Sistem Persinyalan & Telekomunikasi Lts Makasar-Parepare Ant Mandalle-Palarno (MYC 2018-2020)	7010101007	28	4.092.503.333	3.558.698.550	3.558.698.550			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1617	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Makasar-Parepare Antara Mandalle - Palanro (MYC 2018-2020)	7010101007	29	205.822.678.961	178.976.242.575	178.976.242.575			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1618	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Kontruksi ST.401 pangkep	7010101007	32	49.972.446.600	11.609.007.800	11.609.007.800			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1619	DJKA	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Jaringan Dalam Pengerjaan	Kontruksi sinyal ST.401 pangkep	7010101007	33	49.972.446.600	16.679.756.000	16.679.756.000			Masih Dilanjutkan Pembangunan Konstruksi
1620	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli Kabupaten Nias	7010101003	59	9.764.057.000	9.764.057.000	9.764.057.000	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1621	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli Kabupaten Nias	7010101003		235.943.000	235.943.000	235.943.000	-	-	
1622	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap IV	7010101003	60	9.758.340.000	9.758.340.000	9.758.340.000	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1623	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap IV	7010101003		241.660.000	241.660.000	241.660.000	-	-	
1624	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap III	7010101003	61	29.917.142.000	29.917.142.000	29.917.142.000	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1625	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap III	7010101003		850.482.000	850.482.000	850.482.000	-	-	
1626	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap III	7010101003	62	9.757.000.000	9.757.000.000	9.757.000.000	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1627	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap III	7010101003		242.992.000	242.992.000	242.992.000	-	-	
1628	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas BRT di KSPN Danau Toba	7010101003	63	2.623.474.000	2.432.683.600	2.432.683.600	-	-	BAST Bank Garansi Tahun 2023
1629	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	7010101003	68	9.734.580.000	5.210.218.040	5.210.218.040	-	-	BAST Bank Garansi Tahun 2023
1630	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap II	7010101003	69	14.124.255.000	14.124.255.000	14.124.255.000	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1631	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap II	7010101003		332.900.000	332.900.000	332.900.000	-	-	
1632	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Aek Batu	7010101003	72	3.364.130.736	3.364.130.736	3.364.130.736	-	-	Dilanjutkan Pembangunannya pada tahun 2023
1633	DJPD	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Aek Batu	7010101003		85.869.264	85.869.264	85.869.264	-	-	
1634	DJPD	403843	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus	7010101003	2	13.678.461.500	13.411.626.640	13.411.626.640	-	-	BAST Bank Garansi Tahun 2023
1635	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEDANAU TAHAP V (MYC)	7010101003	13	12.753.900.000	12.753.900.000	12.753.900.000	-	-	
1636	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEDANAU TAHAP V (MYC)	7010101003		146.100.000	146.100.000	146.100.000	-	-	
1637	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REVIEW DESAIN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEDANAU TAHAP V	7010101003		99.800.100	99.800.100	99.800.100	-	-	
1638	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SAGU-SAGU LUKIT TAHAP V (MYC)	7010101003	14	9.854.331.000	9.854.331.000	9.854.331.000	-	-	
1639	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SAGU-SAGU LUKIT TAHAP V (MYC)	7010101003		145.669.000	145.669.000	145.669.000	-	-	
1640	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN FASILITAS DARAT PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN (MYC)	7010101003	15	7.660.007.037	7.660.007.037	7.660.007.037	-	-	
1641	DJPD	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN FASILITAS DARAT PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN (MYC)	7010101003		176.360.962	176.360.962	176.360.962	-	-	
1642	DJPD	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	UPPKB Pelawan Sarolangun	7010101003	1	19.694.400.000	3.018.010.710	3.018.010.710	-	-	
1643	DJPD	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Tanah Dalam Pengerjaan	PENYUSUNAN STUDI PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (DUKUNGAN KPBU AP) DI RUAS JALAN PALEMBANG-BETUNG TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN	7010101001	2	98.500.000	197.300.000	197.300.000	-	-	
1644	DJPD	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN DERMAGA II PELABUHAN TANJUNG API-API	7010101003	5	11.850.350.000	90.662.193.837	90.662.193.837	-	-	
1645	DJPD	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI 7 ULU KOTA PALEMBANG (PROGRAM QUICK WINS) TAHUN 2021 - 2023	7010101003	8	14.907.525.317	15.281.706.875	15.281.706.875	-	-	

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1646	DJPD	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN TERMINAL TIPE A ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG TAHUN 2022-2023	7010101003	9	1.974.234.800	2.109.263.000	2.109.263.000	-	-	
1647	DJPD	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Aset Tetap Lainnya dalam Pengerjaan	PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL PELABUHAN SUNGAI 7 ULU KOTA PALEMBANG TAHUN 2022	7010101005	1	400.488.000	400.488.000	400.488.000	-	-	AKAN DIKAPITALISASI DENGAN ASET FISIK JIKA PEMBANGUNAN SUDAH SELESAI
1648	DJPD	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalilasi Terminal Tipe A Pakupatan Volume 1 (satu) Paket	7010101003	2	25.798.161.968	25.180.666.517	25.180.666.517	-	-	Bank Garansi
1649	DJPD	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Bangkalan, Madura	7010101003	1	26.980.749.248	26.980.749.248	-	26.980.749.248	-	Hasil Pembangunan Terminal oleh satker PLLAJ Jatim, belum dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan (Di Reklas kembali ke KDP sesuai Rekomdasi BPK 2023)
1650	DJPD	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A KERTONEGORO, NGAWI	7010101003	3	4.070.259.124	4.070.259.124	4.070.259.124	-	-	Bank Garansi, BAST 15 Januari 2023
1651	DJPD	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Purboyo Kota Madiun	7010101003	4	5.428.219.186	5.428.219.186	5.428.219.186	-	-	Dilanjutkan tahap II pada tahun 2023
1652	DJPD	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023	7010101003	6	4.982.662.900	4.982.662.900	4.982.662.900	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1653	DJPD	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Revitalisasi TTA Purabaya, Sidoarjo	7010101003	11	98.830.000	98.830.000	98.830.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023, Revitalisasi TTA Purabaya
1654	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	2.730.892.000	2.730.892.000	-	2.730.892.000	-	
1655	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	72.323.000	72.323.000	-	72.323.000	-	
1656	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	6.936.889.000	6.936.889.000	-	6.936.889.000	-	
1657	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	145.304.000	145.304.000	-	145.304.000	-	
1658	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	10.531.305.000	10.531.305.000	-	10.531.305.000	-	
1659	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sape	7010101003	1	276.646.700	276.646.700	-	276.646.700	-	
1660	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk Tahap I	7010101004	1	2.757.185.000	2.757.185.000	-	2.757.185.000	-	
1661	DJPD	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk Tahap I (Supervisi)	7010101004	1	76.040.000	76.040.000	-	76.040.000	-	
1662	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Tipe A Kupang NTT Tahap I	7010101003	4	3.175.094.599	3.175.094.599	3.175.094.599	-	-	KONTRAK SELESAI BULAN JULI 2023 MENGGUNAKAN MEKANISME MYC
1663	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Terminal Tipe A Kupang NTT Tahap I	7010101003	4	76.688.000	76.688.000	76.688.000	-	-	
1664	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap II	7010101003	4	10.264.830.000	10.264.830.000	10.264.830.000	-	-	
1665	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap II (Supervisi)	7010101003	4	229.900.000	229.900.000	229.900.000	-	-	
1666	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap III	7010101003	14	9.594.500.000	9.594.500.000	9.594.500.000	-	-	
1667	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap III (Supervisi)	7010101003	14	382.563.000	382.563.000	382.563.000	-	-	
1668	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap IV	7010101003	14	4.218.300.000	4.218.300.000	4.218.300.000	-	-	
1669	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap IV (Supervisi)	7010101003	14	281.700.000	281.700.000	281.700.000	-	-	
1670	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap V	7010101003	14	29.640.000.000	29.640.000.000	29.640.000.000	-	-	
1671	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT Tahap V (Supervisi)	7010101003	14	360.000.000	360.000.000	360.000.000	-	-	
1672	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap I (Termasuk Supervisi)	7010101003	5	7.020.362.000	7.020.362.000	7.020.362.000	-	-	Dilanjutkan TA. 2024
1673	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap I (Supervisi)	7010101003	5	202.171.000	202.171.000	202.171.000	-	-	
1674	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap II	7010101003	12	4.533.800.000	4.533.800.000	4.533.800.000	-	-	
1675	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap II (Supervisi)	7010101003	12	244.000.000	244.000.000	244.000.000	-	-	
1676	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap I (Termasuk Supervisi)	7010101003	6	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	Dilanjutkan TA. 2024
1677	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap I (Termasuk Supervisi)	7010101003	6	4.385.420.000	4.385.420.000	4.385.420.000	-	-	
1678	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap I (Supervisi)	7010101003	6	208.880.000	208.880.000	208.880.000	-	-	
1679	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap II	7010101003	13	4.603.000.000	4.603.000.000	4.603.000.000	-	-	
1680	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap II (Supervisi)	7010101003	13	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-	
1681	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap I	7010101003	7	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	-	-	Menunggu pencairan BG
1682	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap I	7010101003	7	1.037.662.000	1.037.662.000	1.037.662.000	-	-	
1683	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap I (Supervisi)	7010101003	7	209.000.000	209.000.000	209.000.000	-	-	
1684	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap II	7010101003	11	16.569.590.000	16.569.590.000	16.569.590.000	-	-	Menunggu pencairan BG
1685	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap II (Supervisi)	7010101003	11	389.000.000	389.000.000	389.000.000	-	-	
1686	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap III	7010101003	11	15.615.100.000	15.615.100.000	15.615.100.000	-	-	
1687	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap III (Supervisi)	7010101003	11	384.900.000	384.900.000	384.900.000	-	-	
1688	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV	7010101003	11	31.409.832.000	29.839.340.400	29.839.340.400	-	-	
1689	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Supervisi)	7010101003	11	502.693.000	477.558.350	477.558.350	-	-	
1690	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo. Kab. Ende	7010101003	15	14.500.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000	-	-	Pembangunan Sisi Darat Diselesaikan TA. 2023
1691	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo. Kab. Ende	7010101003	15	499.339.000	499.339.000	499.339.000	-	-	
1692	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo. Kab. Ende Tahap II	7010101003	15	18.495.900.000	16.533.929.597	16.533.929.597	-	-	Koreksi Penggunaan Sisa Tiang Pancang
1693	DJPD	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo. Kab. Ende Tahap II (Supervisi)	7010101003	15	521.950.000	521.950.000	521.950.000	-	-	
1694	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK	7010101003	8	27.416.276.713	27.416.276.713	27.416.276.713	-	-	
1695	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK TAHAP III	7010101003		34.480.865.000	22.012.584.216	22.012.584.216	-	-	
1696	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK TAHAP III (Supervisi)	7010101003		836.275.000	836.275.000	836.275.000	-	-	
1697	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK KALBAR TAHAP IV	7010101003		16.245.370.310	16.245.370.310	16.245.370.310	-	-	
1698	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK KALBAR TAHAP IV (Supervisi)	7010101003		447.381.000	447.381.000	447.381.000	-	-	
1699	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK TAHAP V	7010101003		200.000.000	130.203.000	130.203.000	-	-	

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1700	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SIANTAN	7010101003		3.950.000.000	3.950.000.000	3.950.000.000	-	-	
1701	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SIANTAN (Supervisi)	7010101003	10	99.770.000	99.770.000	99.770.000	-	-	
1702	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SIANTAN	7010101003		4.294.090.000	4.294.090.000	4.294.090.000	-	-	
1703	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SIANTAN TAHAP IV	7010101003		6.951.999.000	6.951.999.000	6.951.999.000	-	-	
1704	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SIANTAN TAHAP IV (Supervisi)	7010101003	15	99.650.000	99.650.000	99.650.000	-	-	
1705	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SINTANG TAHAP II	7010101003		15.887.510.000	15.887.510.000	15.887.510.000	-	-	
1706	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	REHABILITASI UPPKB SINTANG TAHAP II (Supervisi)	7010101003	16	395.128.800	395.128.800	395.128.800	-	-	
1707	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI RASAU JAYA	7010101003		10.213.859.000	10.213.859.000	10.213.859.000	-	-	
1708	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI RASAU JAYA (Supervisi)	7010101003	17	307.964.000	307.964.000	307.964.000	-	-	
1709	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI RASAU JAYA TAHAP II	7010101003	21,22,23, 24	7.509.184.000	7.509.184.000	7.509.184.000	-	-	
1710	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI RASAU JAYA TAHAP II	7010101003	25 dan 27	99.846.971	99.846.971	99.846.971	-	-	
1711	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA	7010101003		9.074.182.000	9.074.181.600	9.074.181.600	-	-	
1712	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA (Supervisi)	7010101003	18	227.000.000	227.000.000	227.000.000	-	-	
1713	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA TAHAP II	7010101003		7.243.846.000	7.243.846.000	7.243.846.000	-	-	
1714	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PENINGKATAN PELABUHAN SUNGAI TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA TAHAP II (Supervisi)	7010101003		98.263.971	98.263.971	98.263.971	-	-	
1715	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	PERBAIKAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN/LRK (PENGADAAN DAN PEMASANGAN APJ SOLAR CELL LENGAN TUNGGAL) RUAS 016, 012, DAN 028	7010101002		5.223.859.200	5.223.859.200	5.223.859.200	-	-	
1716	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN RUAS 028 Sp.SEJIRAM - NANGA TEPUAI (42,11 KM)	7010101002	11	98.350.000	98.350.000	98.350.000	-	-	
1717	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN RUAS 016 AUR KUNING - SANDAI (39,86 KM)	7010101002		98.600.000	98.600.000	98.600.000	-	-	
1718	DJPD	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	SUPERVISI PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN RUAS 012 BTS. KOTA PONTIANAK - SP. AMPAR / TAYAN (98,30 KM)	7010101002		97.400.000	97.400.000	97.400.000	-	-	
1719	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Gampa Kabupaten Barito Kuala Tahap I	7010101003		9.564.044.000	9.564.044.000	9.564.044.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1720	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Gampa Kabupaten Barito Kuala Tahap I (Supervisi)	7010101003	19	383.369.000	383.369.000	383.369.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1721	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Pasar Lima Tahap II	7010101003		7.000.783.000	7.000.783.000	7.000.783.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1722	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Pasar Lima Tahap II (Supervisi)	7010101003	20	499.217.000	499.217.000	499.217.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1723	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Pedalaman Baru Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahap I	7010101003		3.300.047.000	3.300.047.000	3.300.047.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1724	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan Dermaga Sungai Pedalaman Baru Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahap I (Supervisi)	7010101003	21	197.496.000	197.496.000	197.496.000	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1725	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN UPPKB TABALONG TAHAP II (SELESAI) MYC 2022-2023	7010101003	24	36.692.371.500	9.979.774.575	9.979.774.575	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1726	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN UPPKB TABALONG TAHAP II (SELESAI) MYC 2022-2023	7010101003	25	1.400.249.500	210.037.425	210.037.425	-	-	Dilanjutkan ke tahun 2023
1727	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Rambu ChevronUK.75CM X 90CM DI RUAS 017,018,019,024	7010101002		195.994.382	195.994.382	195.994.382	-	-	
1728	DJPD	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimatan Selatan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Rambu ChevronUK.75CM X 90CM DI RUAS 017,018,019,024	7010101002	27	39.909.711	39.909.711	39.909.711	-	-	
1729	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Basirih Hulu - Bapinang Hulu Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap III	7010101003		3.820.631.000	3.820.631.000	3.820.631.000	-	-	
1730	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Basirih Hulu - Bapinang Hulu Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap III	7010101003	2	224.700.000	122.618.000	122.618.000	-	-	
1731	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lupak Dalam TA. 2021	7010101003	5	6.090.150.000	6.090.150.000	6.090.150.000	-	-	
1732	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lupak - Lupak Dalam Kabupaten Kapuas Tahap II (dukungan Food Estate)	7010101003	5	3.633.053.000	3.633.053.000	3.633.053.000	-	-	
1733	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi UPPKB Anjir Serapat	7010101003	6	22.927.612.000	22.927.612.000	22.927.612.000	-	-	
1734	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Kumai Hilir (Kobar) TA. 2020	7010101003	7	9.097.363.873	9.097.363.873	9.097.363.873	-	-	
1735	DJPD	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dermaga Sei Kapitan (Kobar) TA. 2020	7010101003	7	8.650.538.866	8.650.538.866	8.650.538.866	-	-	
1736	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan UPPKB KM.36 Samboja	7010101003	1	1.945.721.756	27.433.065.442	27.433.065.442	-	-	Dilanjutkan di Tahun Anggaran 2023
1737	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser	7010101003	4	4.415.603.200	23.746.807.178	23.746.807.178	-	-	Dilanjutkan di Tahun Anggaran 2023
1738	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Baru Ulu Kutai Timur	7010101003	7	12.363.585.000	26.012.073.300	26.012.073.300	-	-	Dilanjutkan di Tahun Anggaran 2023
1739	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Tahap II	7010101003	30	13.825.187.018	12.884.973.892	12.884.973.892	-	-	Pekerjaan Selesai tinggal melakukan pendefinitipan aset
1740	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu Tahap II	7010101003	32	13.384.733.131	13.159.525.761	13.159.525.761	-	-	Pekerjaan Selesai tinggal melakukan pendefinitipan aset
1741	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Pembangunan Halte Sungai Desa Karang Dalam, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur	7010101003	33	2.838.941.775	2.961.292.135	2.961.292.135	-	-	Pekerjaan Selesai tinggal melakukan pendefinitipan aset
1742	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Pembangunan Halte Sungai Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	7010101003	34	3.208.469.783	2.870.947.379	2.870.947.379	-	-	Pekerjaan Selesai tinggal melakukan pendefinitipan aset
1743	DJPD	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(Fisik) Pembangunan Halte Sungai Desa Long Segar, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur	7010101003	35	2.755.480.695	2.256.867.101	2.256.867.101	-	-	Pekerjaan Selesai tinggal melakukan pendefinitipan aset
1744	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Tipe A Palopo Tahap I	7010101003		2.002.590.600	2.002.590.600	2.002.590.600	-	-	DILANJUTKAN
1745	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Terminal Tipe A Palopo Tahap I	7010101003		54.030.000	54.030.000	54.030.000	-	-	DILANJUTKAN
1746	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Tipe A Palopo Tahap II	7010101003	3	8.692.000.000	8.692.000.000	8.692.000.000	-	-	DILANJUTKAN
1747	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Terminal Tipe A Palopo Tahap II	7010101003		363.200.000	363.200.000	363.200.000	-	-	DILANJUTKAN
1748	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Lingkungan Terminal Induk Tipe A Songka Palopo	7010101003		99.500.000	99.500.000	99.500.000	-	-	DILANJUTKAN
1749	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan peningkatan/Revitalisasi UPPKB Palangga	7010101003		3.955.462.500	3.955.462.500	3.955.462.500	-	-	DILANJUTKAN
1750	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Supervisi Peningkatan/Revitalisasi UPPKB Palangga	7010101003		162.822.000	162.822.000	162.822.000	-	-	DILANJUTKAN
1751	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan perlengkapan dalam bangunan utama UPPKB Palangga	7010101003		114.716.000	114.716.000	114.716.000	-	-	DILANJUTKAN

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1752	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan kelengkapan platform UPPKB Palangga	7010101003	5	143.583.000	143.583.000	143.583.000	-	-	DILANJUTKAN
1753	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pintu Jendela Plafond dan penerangan UPPKB Palangga	7010101003		188.842.000	188.842.000	188.842.000	-	-	DILANJUTKAN
1754	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Infrastruktur Jalan UPPKB Palangga	7010101003		195.550.000	195.550.000	195.550.000	-	-	DILANJUTKAN
1755	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Kanstein dan Paving Blok UPPKB Palangga	7010101003		37.135.000	37.135.000	37.135.000	-	-	DILANJUTKAN
1756	DJPD	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Seatan dan Sulawesi Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan kelengkapan bangunan utama UPPKB Pallanga	7010101003		158.661.000	158.661.000	158.661.000	-	-	DILANJUTKAN
1757	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap I Elat	7010101003	3	5.315.000.000	5.444.480.000	5.444.480.000	-	-	
1758	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap II Elat	7010101003	6	16.972.930.000	16.972.930.000	16.972.930.000	-	-	
1759	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap II Elat	7010101003	8	387.007.060	387.007.060	387.007.060	-	-	
1760	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Elat Tahap III	7010101003	9	14.020.390.000	13.605.750.500	13.605.750.500	-	-	
1761	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	13	3.687.005.700	1.106.101.710	1.106.101.710	-	-	masih dilanjutkan di 2023
1762	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	17		645.225.997	645.225.997	-	-	
1763	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	23		645.225.997	645.225.997	-	-	
1764	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	25		645.225.997	645.225.997	-	-	
1765	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	32		460.875.712	460.875.712	-	-	
1766	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	33		184.350.285	184.350.285	-	-	
1767	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	16	271.800.150	54.360.030	54.360.030	-	-	
1768	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	18		54.360.030	54.360.030	-	-	
1769	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	24		54.360.030	54.360.030	-	-	
1770	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	28		54.360.030	54.360.030	-	-	
1771	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	SUPERVISI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ELAT TAHAP V	7010101003	34		54.360.030	54.360.030	-	-	
1772	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap I Moa	7010101003	4	5.212.320.000	5.212.320.000	5.212.320.000	-	-	
1773	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap I Moa (Supervisi)	7010101003		118.920.000	118.920.000	118.920.000	-	-	
1774	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap II Moa	7010101003	5	14.716.825.000	14.716.825.000	14.716.825.000	-	-	
1775	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap II Moa	7010101003	7	371.009.560	371.009.560	371.009.560	-	-	
1776	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa Tahap III	7010101003	10	9.603.500.000	7.873.760.000	7.873.760.000	-	-	
1777	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Leti	7010101003	12	3.900.022.073	4.000.022.073	4.000.022.073	-	-	
1778	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	14	8.642.573.993	2.592.772.198	2.592.772.198	-	-	
1779	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	19		1.512.450.449	1.512.450.449	-	-	
1780	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	20		1.512.450.449	1.512.450.449	-	-	
1781	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	26		1.512.450.449	1.512.450.449	-	-	
1782	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	29		1.080.321.748	1.080.321.748	-	-	
1783	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN LETI TAHAP III	7010101003	30		432.128.700	432.128.700	-	-	
1784	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III	7010101003	15	374.703.000	74.940.600	74.940.600	-	-	
1785	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III	7010101003	21		74.940.600	74.940.600	-	-	
1786	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III	7010101003	22		74.940.600	74.940.600	-	-	
1787	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III	7010101003	31		43.643.607	43.643.607	-	-	
1788	DJPD	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III	7010101003	27		74.940.600	74.940.600	-	-	
1789	DJPD	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor	7010101003	3	13.093.633.000	12.438.951.350	12.438.951.350	-	-	
1790	DJPD	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor (Supervisi)	7010101003		318.987.000	318.987.000	318.987.000	-	-	
1791	DJPD	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Mendukung Sail Tidore	7010101003	6	5.314.514.000	1.275.483.360	1.275.483.360	-	-	
1792	DJPD	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Mendukung Sail Tidore (Supervisi)	7010101003	5	99.104.500	49.552.250	49.552.250	-	-	
1793	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Salawati Tahap 1	7010101003	68	6.460.000.000	6.460.000.000	6.460.000.000	-	-	
1794	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Salawati Tahap II	7010101003		64.021.032.000	60.894.586.283	60.894.586.283	-	-	
1795	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Salawati Tahap II (Supervisi)	7010101003		928.092.000	618.728.000	618.728.000	-	-	
1796	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Salawati Tahap 1 (Supervisi)	7010101003	69	172.500.000	129.375.000	129.375.000	-	-	
1797	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	7010101003	73	4.629.828.800	4.629.828.720	4.629.828.720	-	-	
1798	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Tahap II	7010101003		56.729.762.000	48.340.271.630	48.340.271.630	-	-	
1799	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Tahap II (Supervisi)	7010101003		1.216.492.200	912.369.150	912.369.150	-	-	
1800	DJPD	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta (Supervisi)	7010101003	74	122.500.000	122.500.000	122.500.000	0	0	
1801	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	7010101003	23	17.000.000.600	17.000.000.600	17.000.000.600	0	0	
1802	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	7010101003		4.587.479.140	4.587.479.140	4.587.479.140	0	0	
1803	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	7010101003		5.439.489.610	5.439.489.610	5.439.489.610	0	0	
1804	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	7010101003		241.192.600	241.192.600	241.192.600	0	0	
1805	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	7010101003			473.872.520	473.872.520	0	0	

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1806	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Wanareja	7010101003	28	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	
1807	DJPD	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Wanareja	7010101003		300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	
1808	BPSDMP	526200	Poltekbang Palembang	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Konsultansi Perencanaan Gedung General Workshop	7010101003	4	99.592.000	99.592.000	99.592.000			
1809	BPSDMP	440006	PPSDM Aparatur Perhubungan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Konsultan Perencanaan Disabilitas	7010101003	20	96.244.500	96.244.500	96.244.500			
1810	BPSDMP	414298	PKTJ Tegal	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Penyusunan DED Kios	7010101003	133	20.000.000	20.000.000	20.000.000			
1811	BPSDMP	414298	PKTJ Tegal	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan DED Lapangan Sepakbola Kampus II	7010101003	134	86.000.000	86.000.000	86.000.000			
1812	BPSDMP	414298	PKTJ Tegal	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Review DED Laboratorium MKTJ	7010101003	136	98.000.000	98.000.000	98.000.000			
1813	BPSDMP	414355	PTDI-STTD	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Asrama Baru	7010101003	4	20.956.146.806	19.049.738.297	19.049.738.297			
1814	BPSDMP	526217	Poltekbang Makassar	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Ruang Makan	7010101003	80	5.679.671.420	1.945.554.055		1.945.554.055		Nilai KDP Renovasi Ruang Makan TA. 2021 adalah Nilai setelah dikurangi Pengembalian Belanja Uang Muka oleh Pihak ke 3 sebesar Rp. 795.153.999,-
1815	BPSDMP	526217	Poltekbang Makassar	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan									
1816	BPSDMP	526222	PPI Madiun	Tanah Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Jembatan Rel	7010101001	9	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
1817	BPSDMP	419171	Poltekpel Sulut	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Kadet Pembangunan Cadet Dormitory Building 5 Lantai Type Barak	7010101003	3	42.474.663.769	42.474.663.769	42.474.663.769			
1818	BPSDMP	287494	PIP Makassar	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Penunjang Akademik PIP Makassar	7010101003	1	139.513.740.000	60.454.578.000	60.454.578.000			
1819	BPSDMP	414302	STIP Jakarta	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Profesi Perencana Auditorium	7010101003	1	95.992.800	95.992.800	95.992.800			
1820	DJPU	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Penyiapan Badan Runway Bandara Pohuwato	7010101001		74.663.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	-	-	MULTI YEARS
1821	DJPU	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Pemenuhan Runway Strip Bandar Udara Pohuwato	7010101001		71.545.423.000	29.500.000.000	29.500.000.000	-	-	MULTI YEARS
1822	DJPU	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Infrastruktur Sisi Darat Bandar Udara Pohuwato	7010101001		78.411.045.000	35.498.000.000	35.498.000.000	-	-	MULTI YEARS
1823	DJPU	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	Tanah dalam pengerjaan	Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Bandar Udara Pohuwato	7010101001		6.992.014.320	2.445.456.987	2.445.456.987	-	-	MULTI YEARS
1824	DJPU	413984	KANTOR UPBU SYUKURAN AMINUDIN AMIR	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU BANGGAI LAUT	7010101004	1	215.011.132.175	21.501.113.218	21.501.113.218	-	-	MULTI YEARS
1825	DJPU	413984	KANTOR UPBU SYUKURAN AMINUDIN AMIR	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU BANGGAI LAUT	7010101004	2	7.726.266.000	1.158.939.900	1.158.939.900	-	-	MULTI YEARS
1826	DJPU	413990	KANTOR UPBU SULTAN BANTILAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang	7010101003		15.673.300.000	15.673.300.000	15.673.300.000	-	-	MULTIYEARS
1827	DJPU	413990	KANTOR UPBU SULTAN BANTILAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN PENGAWASAN GEDUNG TERMINAL	7010101003		326.700.000	326.700.000	326.700.000	-	-	MULTIYEARS
1828	DJPU	465493	KANTOR UPBU LASONDRE	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan pemotongan bukit sisi selatan	7010101001	1	8.996.603.000	7.651.769.258	-	7651769258	-	Tidak ada pekerjaan lanjutan karena sudah tidak menjadi obstacle/penghalang pandangan ATC. Pekerjaan dihentikan sementara. Akan dilakukan permohonan dan pertimbangan pendefinitifan aset berteknis dari Direktur Bandar Udara terkait aspek teknis atas kelayakan operasional pekerjaan tersebut
1829	DJPU	465493	KANTOR UPBU LASONDRE	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	pengawasan pekerjaan drainase, pembuatan pagar pengaman bandara, pekrjaan pemotongan bukit	7010101004	23	589.352.000	442.014.000	-	442014000	-	Tidak ada pekerjaan lanjutan karena sudah tidak menjadi obstacle/penghalang pandangan ATC. Pekerjaan dihentikan sementara. Akan dilakukan permohonan dan pertimbangan pendefinitifan aset berteknis dari Direktur Bandar Udara terkait aspek teknis atas kelayakan operasional pekerjaan tersebut
1830	DJPU	465493	KANTOR UPBU LASONDRE	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC Hotmix termasuk marking volume 45608 m2	7010101004	17	26.900.000.000	12.139.997.284	-	12139997284	-	Pekerjaan dihentikan sementara. Akan dilakukan permohonan dan pertimbangan pendefinitifan aset berteknis dari Direktur Bandar Udara terkait aspek teknis atas kelayakan operasional pekerjaan tersebut
1831	DJPU	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	Jaringan dalam Pengerjaan	Manajemen Konstruksi Pembangunan Bandara Mandailing Natal Tahap II	7010101007	1	5,507,870,000	826.180.500	826.180.500	-	-	MULTI YEARS
1832	DJPU	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	Jaringan dalam Pengerjaan	Fasilitas Sisi Udara Bandara Mandailing Natal	7010101007	2	164,234,245,235	22.500.091.597	22.500.091.597	-	-	MULTI YEARS
1833	DJPU	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	Jaringan dalam Pengerjaan	Fasilitas Sisi Darat Bandara Mandailing Natal	7010101007	3	100,988,370,000	13.652.493.333	13.652.493.333	-	-	MULTI YEARS
1834	DJPU	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Rencana Tekhnik Terinci Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Mandailing Natal	7010101001	6	1.665.895.000	1.665.895.000	1.665.895.000	-	-	Akan Didefenitifkan Setelah Adanya Aset Induk baik pada Sisi Udara dan Sisi Darat
1835	DJPU	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Study Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bandara Mandailing Natal	7010101001	7	935.699.000	935.699.000	935.699.000	-	-	Akan Didefenitifkan Setelah Adanya Aset Induk baik pada Sisi Udara dan Sisi Darat
1836	DJPU	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Study Review Master Plan Bandar Udara Dewadaru	7010101005	2	850.520.000	850.520.000	850.520.000	-	-	Masterplan Dewadaru, belum menjadi aset karena belum ada KM yang menetapkan
1837	DJPU	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Terminal	7010101003	1	42.903.990.000	39.855.232.000	39.855.232.000	-	-	Bank Garansi : 3.048.758.000 Diberikan tambahan waktu 90 hari, hingga 31 Maret 2023.
1838	DJPU	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal	7010101003	2	956.740.520	839.630.696	839.630.696	-	-	Bank Garansi : 117.109.824 Menunggu Selesainya Pekerjaan Pembangunan Terminal
1839	DJPU	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Operasi	7010101003	5	714.768.000	464.598.800	464.598.800	-	-	Bank Garansi : 250.168.800 Dilanjutkan 2023 dengan denda
1840	DJPU	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembuatan jalan akses Menuju gedung PKP-PK	7010101004	1	1.497.236.000	449.170.800	449.170.800	-	-	Bank Garansi : 1.048.065.200 Dilanjutkan 2023 dengan denda
1841	DJPU	413978	KANTOR UPBU NAHA	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Timbunan Sisi Udara	7010101007	1	50.063.252.000	50.063.252.000	50.063.252.000	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1842	DJPU	413978	KANTOR UPBU NAHA	Jaringan dalam Pengerjaan	Manajemen Kontruksi (MK)	7010101007	1	2.805.000.000	2.805.000.000	2.805.000.000	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1843	DJPU	413978	KANTOR UPBU NAHA	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Timbunan Sisi Darat	7010101007	2	35.211.499.000	35.211.499.000	35.211.499.000	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1844	DJPU	413978	KANTOR UPBU NAHA	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Perkerasan Sisi Udara dan Sisi Darat	7010101007	3	32.920.249.000	32.920.249.000	32.920.249.000	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1845	DJPU	512802	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Pembangunan Gedung Kantor	7010101003	17	253.969.100	253.969.100	-	253969100	-	Kegiatan tersebut di hentikan sementara dikarenakan menunggu tersedianya pagu alokasi pembangunan di tahun berikutnya.
1846	DJPU	559683	BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Pesawat Udara Surveillance Tipe Medium Jet	7010101002	139	538.207.696.000	299.559.228.870	299.559.228.870	-	-	Penyelesaian pada Tahun 2023
1847	DJPU	288042	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	Tanah dalam pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	7010101001	2	3.063.595.474	3.063.595.474	-	3063595474	-	
1848	DJPU	288042	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	Tanah dalam pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	7010101001	2	3.031.337.924					Terdapat perbedaan selisih nilai sebesar Rp3.063.595.474,- yang tercatat pada Laporan SIMAK BMN Rp193.632.904.845,40,- dengan PP Penyertaan Modal Negara ke Aceksera Pura Rp190.569.309.371,40,- Selisih terjadi karena adanya biaya
1849	DJPU	288042	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	Tanah dalam pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	7010101001	2	19.077.000					
1850	DJPU	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Operasional di Rawa Sari	7010101003	2	1.897.048.300	382.709.660	-	-	382709660	KDP dihentikan karena adanya protes dari warga pada saat pelaksanaan pekerjaan
1851	DJPU	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Consulting Services (CS) 1 Airport : Design and Construction Supervision (DSC), Emergency Assistance for Reconstruction and Rehabilitation (EARR) – Mutiara Sis Al Jufrie Airport - Palu	7010101004	17	15.749.485.195	14.333.069.999	14.333.069.999	-	-	Multiyears Jasa Konsultansi
1852	DJPU	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	CIVIL WORKS (CW) AIRPORT 1: WORKS – RECONSTRUCTION OF RUNWAY EMERGENCY ASSISTANCE FOR REHABILITATION AND RECONSTRUCTION (EARR) MUTIARA SIS AL JUFRI A4N NO . 3792 - INO	7010101004	18	174.212.171.754	127.512.696.718	127.512.696.718	-	-	Multiyears Konstruksi Runway
1853	DJPU	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Civil Works (CW) Airport 2: Works – Reconstruction of Terminal And Other Buildings Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Asian Development Bank (ADB) Loan No . 3792 – INO	7010101003	5	273.738.095.115	151.197.559.485	151.197.559.485	-	-	Multiyears Konstruksi Gedung
1854	DJPU	465626	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	LANJUTAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM MONITORING FASILITAS SURVEILLANCE DAN NAVIGASI PENERBANGAN TERINTEGRASI (MULTI YEARS 2021-2023)	7010101002	70	230.624.808.920	134.131.388.868	134.131.388.868	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1855	DJPU	465626	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	PENGADAAN AIR TRAFFIC SITUATIONAL AWARENESS DNP (ATSA)	7010101002	73	290.858.480.000	178.877.965.200	178.877.965.200	-	-	
1856	DJPU	465626	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	KAJIAN UNTUK KEBUTUHAN AIR TRAFFIC SITUATIONAL AWARENESS	7010101005	1	99.220.000	99.220.000	99.220.000	-	-	

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1857	DJPU	518138	KANTOR UPBU KEPI	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengembangan Fasilitas Sisi Darat	7010101003	1	44.556.828.341	34.610.894.390	34.610.894.390	-	-	Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Kepi T.A. 2022 dengan Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhitung sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai sebesar 75% progres fisik. penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 25% dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 9,945,933,951,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023 dan/ atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 6/PMK.05/2019 dengan menggunakan mekanisme DIPA Luncuran Tahun 2023. Garansi Bank telah disetorkan kembali ke kas negara.
1858	DJPU	414205	KANTOR UPBU PONGTIKU	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembuatan Dinding Penahan Longsor	7010101007	1	4,400,000,000	4.400.000.000	4.400.000.000	-	-	Belum tersedia anggaran Tahun 2023
1859	DJPU	414205	KANTOR UPBU PONGTIKU	Jaringan dalam Pengerjaan	Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Dinding Penahan Longsor	7010101007	3	99,493,740	99.493.740	99.493.740	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1860	DJPU	419220	KANTOR UPBU SEKO	Tanah dalam pengerjaan	Pembuatan Lanscape Taman	7010101001	1	99.953.000	49.976.500	49.976.500	-	-	Akan Didefinitifkan Tahun 2023
1861	DJPU	606364	KANTOR UPBU BABO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 Unit) Type 54 (1 Unit)	7010101003	18	1.123.290.000	630.509.500	630.509.500	-	-	Pekerjaan dilanjutkan kembali setelah tersedia anggaran
1862	DJPU	518163	KANTOR UPBU WASIOR	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pekerjaan penyusunan master plane bandara baru	7010101005	2	1.404.156.000	1.404.156.000	-	1404156000	-	Menunggu Hibah Lahan oleh Pemda setempat untuk Pembangunan Bandara Baru
1863	DJPU	518163	KANTOR UPBU WASIOR	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pekejaan Penyusunan Study RTT Bandar Baru	7010101005	3	1.447.000.000	1.447.000.000	-	1447000000	-	
1864	DJPU	518163	KANTOR UPBU WASIOR	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pekerjaan penyusuna Dokumen AMDAL Bandara Baru	7010101005	4	1.261.095.000	1.261.095.000	-	1261095000	-	
1865	DJPU	288571	KANTOR UPBU RENDANI		Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Tahap I dan II	7010101006	2		154.873.030.990	154.873.030.990			Hibah Pemda senilai 54.492.463.000,- Box Tahap I senilai 63.337.039.780,- Box Tahap II senilai 35.043.528.210
1866	DJPU	288571	KANTOR UPBU RENDANI	Tanah dalam pengerjaan		7010101001	1	128.568.337.437	61.587.003.426	61.587.003.426		-	MULTI YEARS
1867	DJPU	288571	KANTOR UPBU RENDANI	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Pembuatan Runway Strip dan Resa Volume 1 (satu) Paket	7010101001	2	75.300.200.000	6.494.642.250	6.494.642.250	-	-	
1868	DJPU	288571	KANTOR UPBU RENDANI	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pengembangan Bandar Udara Rendani Volume 1 (Satu) Paket	7010101001	3	5.296.335.000	476.670.150	476.670.150	-	-	
1869	DJPU	288571	KANTOR UPBU RENDANI	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Box Culvert Volume 1 Paket	7010101001	4	15.683.718.648	4.323.076.294	4.323.076.294	-	-	
1870	DJPU	413871	KANTOR UPBU TOREA	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Bandar Udara Siboru	7010101001	1	9.769.380.450	9.294.300.440	9.294.300.440	-	-	MULTI YEARS
1871	DJPU	413871	KANTOR UPBU TOREA	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Siboru	7010101001	2	591.275.579.000	522.211.211.606	522.211.211.606	-	-	
1872	DJPU	413871	KANTOR UPBU TOREA	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Siboru	7010101001	3	241.248.901.394	221.174.269.300	221.174.269.300	-	-	
1873	DJPU	413871	KANTOR UPBU TOREA	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Bangunan Penunjang Bandar Udara Siboru	7010101001	4	4.637.593.235	4.350.526.214	4.350.526.214	-	-	
1874	DJPU	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA		PEMBANGUNAN TERMINAL TAHAP 1	4010118001	98-98	7.324.425.000	6.586.168.000	6.586.168.000	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pekerjaan fisik selesai dikerjakan (Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan masuk dalam DIPA luncuran TA.2023 dengan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender)
1875	DJPU	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA		PEMBANGUNAN TERMINAL TAHAP 2	4010118001	98-98	15.279.999.000	15.279.999.000	15.279.999.000	-	-	
1876	DJPU	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA		PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN BANDARA	8020101001	98-98	346.000.000	346.000.000	346.000.000	-	-	
1877	DJPU	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Terminal Baru termasuk Interior	7010101003	98	992,837,000	992.837.000	992.837.000	-	-	
1878	DJPU	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Baru termasuk Interior	7010101003	98	74,599,000,000	67.139.100.000	67.139.100.000	-	-	
1879	DJPU	414242	KANTOR UPBU GEWAYANTANA		Lanjutan pekerjaan leveling untuk perbaikan permukaan runway dan apron		1	2,100,000,000	4.486.350.000	4.486.350.000	-	-	KDP Belum Menjadi Aser(nilai KDP menjadi lebih besar dikarenakan ada pembayaran honorarium pengawas pekerjaan dan honorarium pokja)
1880	DJPU	414242	KANTOR UPBU GEWAYANTANA		Pembayaran uang muka CV. EVELINE		3	630,000,000	630.000.000	630.000.000	-	-	KDP belum menjadi ASET
1881	DJPU	414242	KANTOR UPBU GEWAYANTANA		Pemenuhan Standar Runway Strip TH10 Volume 45000 M2 dan Pemenuhan standar Runway Strip dan RESA TH28 Volume 11400 M		1	3,689,000,000	5.196.000.000	5.196.000.000	-	-	Nilai KDP menjadi lebih besar dikarenakan masih ada pekerjaan yang menjadi KDP di TA.2021 yang belum dijadikan aset dikarenakan masih terkendala masalah lahan yang belum dihibahkan ke Kementerian Perhubungan)
1882	DJPU	465663	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembuatan Jalan dan Reinstalasi Jaringan Air Bersih Dilingkungan Perumahan Operasional	7010101004	1	32.081.000	32.081.000	32.081.000	-	-	Pekerjaan fisik tidak jadi dilaksanakan karena penghematan anggaran yang mengakibatkan anggaran pekerjaan fisik dialokasikan untuk yang lain, pada TA 2021 dan 2022 telah diusulkan kembali akan tetapi anggaran belum tersedia
1883	DJPU	414154	KANTOR UPBU ROKOT	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Amdal	7010101003	3	968.900.000	968.900.000	968.900.000	-	-	Amdal (ATB) yang direklas ke GB untuk pembangunan bandara baru (belum bisa di asetkan karena aset induk belum di bangun)
1884	DJPU	414154	KANTOR UPBU ROKOT	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Master Plan	7010101003	20	1.476.000.000	1.476.000.000	1.476.000.000	-	-	Master Plan (ATB) yang direklas ke GB untuk pembangunan bandara baru (belum bisa di asetkan karena aset induk belum di bangun)
1885	DJPU	414154	KANTOR UPBU ROKOT	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bandar Udara Mentawai Baru	7010101001	3	8.081.441.500	7.737.976.700	7.737.976.700	-	-	Multy Years Contract
1886	DJPU	414154	KANTOR UPBU ROKOT	Tanah dalam pengerjaan	Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Pembangunan Bandar Udara Mentawai Baru	7010101001	4 & 6	308.159.767.226	292.751.777.976	292.751.777.976	-	-	Multy Years Contract
1887	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pek. Pelapisan Runway Bandara Gatot Subroto	7010101004	57 dan 59	16.914.097.000	4.228.524.250	4.228.524.250	-	-	Pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun 2023
1888	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Bandar Udara Gatot Subroto (MYC)	7010101004	58 dan 60	930.452.550	68.483.850	68.483.850	-	-	Pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun 2023
1889	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pek. Pelapisan Runway, Turning Area, dan Taxiway Bandara Gatot Subroto	7010101004	57	23.665.375.452	37.691.597.753	37.691.597.753	-	-	Pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun 2023
1890	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Bandar Udara Gatot Subroto	7010101004	58	534.694.992	1.075.846.697	1.075.846.697	-	-	Pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun 2023
1891	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Operasional 36 (4 unit) dan Type 70 (1 unit) Di Pagaralam	7010101003	27	732.029.000	237.906.056	237.906.056	-	-	Belum Tersedia Anggaran
1892	DJPU	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembuatan Drainase Di Pagaralam	7010101004	52	2.297.413.000	853.745.024	853.745.024	-	-	Belum Tersedia Anggaran
1893	DJPU	512769	KANTOR UPBU MUKO-MUKO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	RTT	7010101003	1	986.095.000	986.095.000	-	986095000	-	Didalam RTT terdapat rencana pembangunan gedung terminal dan perpanjangan landasan tetapi dua pekerjaan tersebut belum dikerjakan karena masih terkendala dengan jalan nasional yang belum dipindahkan sehingga belum bisa dikapitalisasi ke aset.
1894	DJPU	512769	KANTOR UPBU MUKO-MUKO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Penunjang/Mushola Enggano	7010101003	48	1.086.398.322	706.016.959	-	706016959	-	Pekerjaan pembuatan mushola Bandara Enggano putus kontrak dengan realisasi fisik dan keuangan 62,09% dikarenakan penyedia terlambat dalam pengerjaan sampai dengan batas pelaksanaan pekerjaan.
1895	DJPU	512769	KANTOR UPBU MUKO-MUKO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Operasional type 36 (6 unit) termasuk meubelair	7010101003	49	1.594.999.958	720.615.482	-	720615482	-	Pekerjaan pembuatan Gedung Operasional type 36 (6 unit) termasuk meubelair Bandara Enggano putus kontrak dengan realisasi fisik dan keuangan 42,19% dikarenakan penyedia terlambat dalam pengerjaan sampai dengan batas pelaksanaan pekerjaan.
1896	DJPU	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembuatan Masjid	7010101003	1	3.185.821.000	3.185.821.000	3.185.821.000	-	-	Bangunan Fisik sudah 100% namun belum bisa digunakan secara fungsi dan akan Dianggarkan kembali pada Tahun 2023
1897	DJPU	288745	KANTOR UPBU APT PRANOTO	Jaringan dalam Pengerjaan	Rekonstruksi Taxiway A Bandar Udara A.P.T.Pranoto	7010101007	1	49,750,834,290	47.792.610.000	47.792.610.000	-	-	Multiyears
1898	DJPU	288745	KANTOR UPBU APT PRANOTO	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Rekontruksi, Levelling dan Overlay Runway Bandar Udara	7010101007		96,821,285,107	49.464.405.000	49.464.405.000	-	-	Multiyears
1899	DJPU	288745	KANTOR UPBU APT PRANOTO	Jaringan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Managemen Kontruksi Pengembangan Bandar Udara	7010101007	1	5,209,390,950	2.742.985.000	2.742.985.000	-	-	Multiyears
1900	DJPU	417706	KANTOR UPBU SELUWING	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung Terminal dan Halaman Parkir Tahap 3	7010101003	1	4,594,434,240	4.272.823.844	4.272.823.844	-	-	Dilanjutkan 2023 dengan Bank Garansi
1901	DJPU	417706	KANTOR UPBU SELUWING	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pengembangan Bandara	7010101003	1	98,841,600	98.841.600	98.841.600	-	-	
1902	DJPU	449514	KANTOR UPBU DOBO	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Terminal Baru Tahap I	7010101003	28	18.611.000.000	18.611.000.000	18.611.000.000	-	-	TA 2019 Pembangunan Terminal Tahap I dan belum bisa digunakan. Di TA 2021 kelanjutan pekerjaan sampai dengan bisa digunakan
1903	DJPU	449514	KANTOR UPBU DOBO	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Pengawasan Pembangunan Bandara Dobo Sisi Darat	7010101005	29	178.788.500	178.788.500	178.788.500	-	-	Pengawasan Pekerjaan TA 2019
1904	DJPU	449514	KANTOR UPBU DOBO	Tanah dalam pengerjaan	Penyempurnaan Lahan (2.426 M2) serta pembuatan jalan akses, jalan GSE dan Parkir Terminal termasuk Landscape	7010101001	3	9.178.621.000	9.178.621.000	9.178.621.000	-	-	TA 2020 & 2021 (MYC) Penyiapan Lahan (2.426 M2) serta Pembuatan Jalan Akses, Jalan GSE dan Parkir Terminal termasuk Landscape yang belum bisa digunakan karena masih ada pekerjaan Lanjutan

NO	ESELON 1	KODE SATKER	UPT/SATKER	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	NO KDP	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Rp)			KETERANGAN
										DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
1905	DJPU	449467	KANTOR UPBU WAHAI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembuatan Dokumen AMDAL Bandara Gorom	7010101004	1	1.188.900.000	1.188.900.000	1.188.900.000	-	-	Menunggu Hibah Lahan oleh Pemda setempat untuk Pembangunan Bandara Baru
1906	DJPU	449467	KANTOR UPBU WAHAI	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	Pembuatan RTT Sisi Udara Bandara Gorom (jalan dan jembatan dalam pengerjaan)	7010101004	6	711.018.000	711.018.000	711.018.000	-	-	
			TOTAL KDP					**28.737.193.960.983**	**30.970.455.120.230**	**29.074.792.632.918**	**1.802.610.610.467**	**93.051.876.845**	

Lampiran C.6. Perincian Aset Konsesi Jasa Kementerian Perhubungan

DAFTAR KATEGORI REALISASI INVESTASI ATAS KONSESI JASA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2022

No	Satker	Mitra	Masa Konsesi	Nilai Investasi s.d. 31 Desember 2022	Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	Konsesi Jasa Partisipasi Mitra				Saldo Aplikasi TA 2022				Keterangan Realisasi Non Aset
						Aset Tanah	Aset Non Tanah	Realisasi Non Aset	KDP	Pengakuan Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra TA 2022	Saldo Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra TA 2022	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT													
1	OP Belawan	PT PELINDO I - TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE II	70 Tahun	3.013.270.399.818		613.157.129.577	2.294.985.866.594	105.127.403.647		125.308.549.602	2.887.961.850.216	33.966.461.625	118.882.615.687	Kolam Pelabuhan
2	KSOP Kuala Tanjung	PT PELINDO I - TERMINAL CURAH CAIR KUALA TANJUNG	69 Tahun	3.527.583.259.485		-	3.527.583.259.485	-		164.073.639.976	3.363.509.619.509	53.856.232.969	215.424.931.877	
3	OP Tanjung Priok	PT PELINDO II - TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK	70 Tahun	8.190.159.988.185		1.614.186.026.341	5.592.210.060.678	983.763.901.166		469.928.115.928	7.720.231.872.257	62.283.072.262	404.839.969.704	Pengerukan
4	KSOP Pontianak	PT PELINDO II - TERMINAL KIJING	69 Tahun	3.275.788.931.913		-	3.275.788.931.913	-		25.198.376.399	3.250.590.555.514	50.012.044.762	50.012.044.762	
5	OP Tanjung Perak	PT PELINDO III - TERMINAL MULTI PURPOSE TELUK LAMONG	72 Tahun	4.682.286.098.287		182.961.972.044	4.277.550.651.976	221.773.474.267		415.477.750.987	4.266.808.347.300	48.376.356.024	411.199.026.201	Penanaman Pohon, Pengerukan, dan Kolam Dermaga
6	OP Tanjung Perak	PT PELINDO III - ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA - APBS	25 Tahun	961.504.383.377		-	8.909.600.000	952.594.783.377		296.734.446.119	664.769.937.258	39.564.592.816	296.734.446.120	Pengerukan Alur pelayaran
7	KSOP Gresik	PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA - TERMINAL MANYAR GRESIK	76 Tahun	1.157.923.852.821		427.158.683.000	730.765.169.821	-		66.055.778.531	1.091.868.074.290	6.383.270.554	35.107.988.047	
8	OP Makassar	PT PELINDO IV - TERMINAL MAKASSAR NEWPORT	70 Tahun	2.560.771.881.005		760.416.879.585	1.800.355.001.420	-		98.421.626.348	2.462.350.254.657	27.669.929.315	69.174.823.287	
9	KSOP Kendari	PT PELINDO - KENDARI NEWPORT	67 Tahun	821.213.850.082		64.638.320.953	756.575.529.129	-		6.128.461.568	815.085.388.514	5.646.086.038	5.646.086.038	
10	KSOP Probolinggo	PT. DELTA ARTHA BAHARI NUSANTARA	64 Tahun	266.653.283.000		200.025.400.000	66.627.883.000	-		17.343.302.958	249.309.980.042	1.041.060.672	5.725.833.696	
11	KSOP Marunda	PT. PELABUHAN TEGAR INDONESIA	67 Tahun	858.863.212.572		79.527.630.000	757.997.202.940	21.338.379.632		78.535.509.462	780.327.703.110	11.883.242.522	71.299.455.131	Pengerukan
		Subtotal		**29.316.019.140.545**	-	**3.942.072.041.500**	**23.089.349.156.956**	**2.284.597.942.089**	-	**1.763.205.557.878**	**27.552.813.582.667**	**340.682.349.559**	**1.684.047.220.550**	
	DITJEN PERKERETAAPIAN													
12	BTP Wil. Jakarta dan Banten	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	50 Tahun	21.456.249.744.069			2.414.560.953.619		19.041.688.790.450		21.073.675.987.758	74.833.145.182	382.573.756.311	
13	BTP Wil. Jawa Bagian Barat	PT. Kereta Cepat Indonesia China	80 tahun	67.778.327.927.520					67.778.327.927.520		67.778.327.927.520			
14	Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana KA	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)		1.324.473.899.027	1.324.473.899.027									
		Subtotal		**90.559.051.570.616**	**1.324.473.899.027**	-	**2.414.560.953.619**	-	**86.820.016.717.970**	-	**88.852.003.915.278**	**74.833.145.182**	**382.573.756.311**	
TOTAL				**119.875.070.711.161**	**1.324.473.899.027**	**3.942.072.041.500**	**25.503.910.110.575**	**2.284.597.942.089**	**86.820.016.717.970**	**1.763.205.557.878**	**116.404.817.497.945**	**415.515.494.741**	**2.066.620.976.861**	

Lampiran C.8. Daftar Aset Kemenhub yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi

DAFTAR BMN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL KEMENHUB DAN MEMENUHI KARAKTERISTIK PROPERTI INVESTASI (PI)

No	Nama Eselon I	Nama Satker	Aset Properti Investasi						Tujuan Penggunaan (Aset yang belum ditentukan penggunaannya/ Disewakan/ Peningkatan Nilai)	Aset PI Memiliki NUP Tersendiri	Jika Tergabung dengan Aset Lain, Apakah Aset PI Memiliki Porsi Signifikan atas Keseluruhan Luas Aset (min.75%)?	Frekuensi Penggunaan PI oleh Pihak Ketiga atau Kemenhub	Keterangan	Dokumen Perjanjian Sewa	Keterangan
			Kode BMN	Uraian BMN	NUP	Akun	Uraian Akun	Nilai Perolehan (Rp)							
1	Ditjen Hubla	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	133111	Gedung dan Bangunan	388.706.000	Disewakan untuk Jualan Usaha Kecil	Ya	-	Pihak Ketiga	Disewakan seluas 207 m2 untuk Jualan Usaha Kecil oleh Perorangan Sdr. Abdul Azzuari	√	-
2	Ditjen Hubla	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	4010118001	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Permanen	1	133111	Gedung dan Bangunan	359.682.000	Disewakan untuk Kantin oleh Perorangan Sdr. Usman	Ya	-	Pihak Ketiga	Disewakan seluas 180 m2 untuk KANTIN guna mendukung UMKM oleh Perorangan Sdr. Usman.	√	-
3	Ditjen Hubla	Distrik Navigasi Sabang	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahat Permanen	3	133111	Gedung dan Bangunan	592.461.584	Disewakan sebagai kantor dari pihak ketiga	Ya	-	Pihak Ketiga	Disewakan sebagai kantor dari pihak ketiga yang bergerak di bidang perusahaan pelayaran	√	-
4	Ditjen Hubla	Syahbandar Utama Tg. Perak	4010112002	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1	133111	Gedung dan Bangunan	199.977.800	Disewakan untuk kantin koperasi	Ya	-	Pihak Ketiga	Luas bangunan keseluruhan 120 m2 dan disewakan keseluruhan. Lahan kepemilikan PT Pelindo	√	-
5	Ditjen Hubla	KSOP Cirebon	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	131111	Tanah	12.740.767.000	Disewakan kepada PT Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Galangan Kapal	Ya	-	Pihak Ketiga	Tanah dengan Luas Keseluruhan 21.585 M2 disewakan seluruhnya kepada PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Industri Galangan Kapal	√	-
6	Ditjen Hubla	KSOP Cirebon	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	2	131111	Tanah	31.276.722.000	Disewakan kepada PT Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Galangan Kapal	Ya	-	Pihak Ketiga	Tanah dengan Luas Keseluruhan 48.900 M2 disewakan seluruhnya kepada PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Industri Galangan Kapal	√	-
7	Ditjen Hubla	KSOP Cirebon	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	3	131111	Tanah	21.354.722.000	Disewakan kepada PT Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Galangan Kapal	Ya	-	Pihak Ketiga	Tanah dengan Luas Keseluruhan 32.185 M2 disewakan seluruhnya kepada PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard untuk Industri Galangan Kapal	√	Masih Draft Perjanjian
8	Ditjen Hubla	KANTOR UPP GARONGKONG	401011204	Bangunan Kantin	1	133111	Gedung dan Bangunan	699.830.116	Disewakan untuk Kantin kepada CV Mitra Celebes	Ya	-	Pihak Ketiga	Luas bangunan keseluruhan 145 m2, disewakan seluruhnya	√	-
9	Ditjen Hubla	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	14	131111	Tanah	16.581.036.000	Rencana disewakan sebagai Gedung Pertemuan	Ya	-	Pihak Ketiga	Sesuai dengan kajian KPKNL	-	Rencana akan dilakukan pemanfaatan
10	Ditjen Hubla	KANTOR KSOP KELAS II TELUK BAYUR	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	133111	Bangunan Gedung Kantor Permanen	85.936.000	Disewakan keseluruhan untuk Rumah Makan Kepada Koperasi Pegawai Negeri Bima Sakti (Tanah HPL PT. Pelindo)	Ya	-	Pihak Ketiga	Luas Aset Keseluruhan 60 M2, disewakan ke seluruhan untuk Rumah Makan Kepada Koperasi Pegawai Negeri Bima Sakti (Tanah HPL PT. Pelindo)	√	-
11	Ditjen Hubud	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2.01.01.99.999	Tanah Persil Lainnya	1	131111	Tanah	41.835.120.000	Disewakan untuk layanan SPBU	Ya	-	Pihak Ketiga	BMN Disewakan kepada PT Magendra Shatra Pratama untuk Layanan SPBU, berlokasi di Jl. Gunung Sahari No. 2 Jakarta Pusat	√	-
12	Ditjen Hubud	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	103	133111	Gedung dan Bangunan	1.332.612.400	Disewakan untuk layanan SPBU	Ya	-	Pihak Ketiga	BMN Disewakan kepada PT Magendra Shatra Pratama untuk Layanan SPBU, berlokasi di Jl. Gunung Sahari No. 2 Jakarta Pusat	√	-
13	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	1	131111	Tanah	23.676.688.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
14	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	2	131111	Tanah	6.486.933.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
15	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	3	131111	Tanah	7.447.048.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
16	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	4	131111	Tanah	7.927.105.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	5	131111	Tanah	101.544.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
18	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	6	131111	Tanah	3.648.806.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
19	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	7	131111	Tanah	118.426.525.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
20	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	8	131111	Tanah	3.625.831.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
21	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	9	131111	Tanah	354.460.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
22	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	10	131111	Tanah	1.044.780.381.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
23	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	11	131111	Tanah	38.007.231.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
24	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	12	131111	Tanah	24.808.937.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
25	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	2010307007	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	13	131111	Tanah	81.086.827.000	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
26	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanan	2	133111	Gedung dan Bangunan	250.677.746	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
27	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010104002	Gedung Instalasi Pemancar	1	133111	Gedung dan Bangunan	1.774.078.430	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
28	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010104999	Bangunan Gedung Instansi Lainnya	1	133111	Gedung dan Bangunan	187.967.914	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
29	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010104999	Bangunan Gedung Instansi Lainnya	2	133111	Gedung dan Bangunan	1.136.484.048	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
30	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	17	133111	Gedung dan Bangunan	317.326.973	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
31	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	18	133111	Gedung dan Bangunan	729.052.797	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-

DAFTAR BMN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL KEMENHUB DAN MEMENUHI KARAKTERISTIK PROPERTI INVESTASI (PI)

No	Nama Eselon I	Nama Satker	Aset Properti Investasi						Tujuan Penggunaan (Aset yang belum ditentukan penggunaannya/ Disewakan/ Peningkatan Nilai)	Aset PI Memiliki NUP Tersendiri	Jika Tergabung dengan Aset Lain, Apakah Aset PI Memiliki Porsi Signifikan atas Keseluruhan Luas Aset (min.75%)?	Frekuensi Penggunaan PI oleh Pihak Ketiga atau Kemenhub	Keterangan	Dokumen Perjanjian Sewa	Keterangan
			Kode BMN	Uraian BMN	NUP	Akun	Uraian Akun	Nilai Perolehan (Rp)							
32	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	19	133111	Gedung dan Bangunan	950.869.240	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
33	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	20	133111	Gedung dan Bangunan	161.097.201	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
34	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	133111	Gedung dan Bangunan	9.225.537.202	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
35	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	133111	Gedung dan Bangunan	1.278.603.230	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
36	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	11	133111	Gedung dan Bangunan	3.482.302.335	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
37	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	12	133111	Gedung dan Bangunan	1.227.417.733	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
38	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	13	133111	Gedung dan Bangunan	395.927.776	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
39	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	14	133111	Gedung dan Bangunan	4.238.588.069	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
40	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	15	133111	Gedung dan Bangunan	827.849.228	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
41	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	16	133111	Gedung dan Bangunan	777.233.057	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	-
42	BPSDM Perhubungan	Poltekpel Banten	4010130999	Bangunan Lainnya	3	133111	Gedung dan Bangunan	148.397.940	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	Bangunan total seluas 12 m2 tersebut di gunakan pihak ketiga untuk ATM Center seluruhnya	√	
43	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	21	133111	Gedung dan Bangunan	3.911.813.564	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	Tambahan dari data awal surat Kepala Biro LPPBMN Nomor PL.101/1/1/PHB 2023 tanggal 3 Januari 2023
44	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	22	133111	Gedung dan Bangunan	574.602.405	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	Tambahan dari data awal surat Kepala Biro LPPBMN Nomor PL.101/1/1/PHB 2023 tanggal 3 Januari 2023
45	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	23	133111	Gedung dan Bangunan	294.846.574	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	Tambahan dari data awal surat Kepala Biro LPPBMN Nomor PL.101/1/1/PHB 2023 tanggal 3 Januari 2023
46	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	24	133111	Gedung dan Bangunan	29.497.128.505	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	Tambahan dari data awal surat Kepala Biro LPPBMN Nomor PL.101/1/1/PHB 2023 tanggal 3 Januari 2023
47	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	4010130999	Bangunan Lainnya	25	133111	Gedung dan Bangunan	383.057.973	Disewakan	Ya	-	Pihak Ketiga	PT Kereta Commuter Indonesia digunakan untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek	√	Tambahan dari data awal surat Kepala Biro LPPBMN Nomor PL.101/1/1/PHB 2023 tanggal 3 Januari 2023
TOTAL								**1.549.596.748.840**							

REKAPITULASI ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2022
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Lampiran Surat
No :
Tanggal :

No	Kode Satker	Nama UPT/Satker	Uraian BMN			Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis ATB	Manfaat Aset Tak Berwujud				Waktu dirasakannya manfaat	Durasi kemanfaatan Aset Tak Berwujud	Relevansi saat ini (Bermanfaat/ Tidak)	Unit kerja yang memanfaatkan	Keterangan
			Kode Barang	NUP	Nama Barang				Memiliki nilai ekonomi	Manfaat keilmuan	Manfaat Sosial	Manfaat Lainnya					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
SEKRETARIAT JENDERAL PERHUBUNGAN																	
1	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	1	Software Aplikasi E-Kearsipan	2015	Rp1.097.200.000	Software Komputer	-	-	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
2	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	11	APLIKASI PERJALANAN DINAS	2010	Rp288.777.500	Software Komputer	-	-	-	√	2010	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
3	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	33	Software EKearsipan	2013	Rp2.710.885.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
4	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	34	Security Survelience System	2013	Rp459.800.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
5	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	36	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
6	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	37	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
7	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	38	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
8	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	39	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
9	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	40	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
10	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	41	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
11	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	42	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
12	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	43	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
13	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	44	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
14	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	45	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
15	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	46	Software Absensi SETJEN	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
16	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	47	Software Absensi HUBDAT	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
17	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	48	Software Absensi HUBLA	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
18	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	49	Software Absensi HUBLA	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
19	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	50	Software Absensi HUBUD	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
20	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	51	Software Absensi HUBUD	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
21	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	52	Software Absensi HUBUD	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
22	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	53	Software Absensi BPSDM	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
23	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	54	Software Absensi LITBANG	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
24	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	55	Software Absesnsi KNKT	2013	Rp72.633.000	Software Komputer	-	-	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
25	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	68	Windows 2019 BAS Server	2021	Rp379.500.000	Software Komputer	-	-	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
26	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	69	Windows 2019 BAS BU Server	2021	Rp181.500.000	Software Komputer	-	-	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
27	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	70	Windows 2019 EMS Server	2021	Rp192.500.000	Software Komputer	-	-	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
28	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	71	Windows 2019 EMS Server	2021	Rp459.103.700	Software Komputer	-	-	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
29	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	72	SIM KLINIK UPK	2022	Rp195.000.000	Software Komputer	-	-	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
30	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	4	Digitalisasi AS Build Gd.	2014	Rp538.890.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2014	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
31	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	5	Kajian Rencana Pembangunan	2015	Rp985.533.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
32	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	6	Basic Design pengganti Gd.	2016	Rp1.276.143.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2016	Tidak Terbatas	Tidak	BIRO UMUM	

No	Kode Satker	Nama UPT/Satker	Uraian BMN			Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis ATB	Manfaat Aset Tak Berwujud				Waktu dirasakannya manfaat	Durasi kemanfaatan Aset Tak Berwujud	Relevansi saat ini (Bermanfaat/ Tidak)	Unit kerja yang memanfaatkan	Keterangan
			Kode Barang	NUP	Nama Barang				Memiliki nilai ekonomi	Manfaat keilmuan	Manfaat Sosial	Manfaat Lainnya					
33	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	10	**SPM. 1340 Revitalisasi Graha Tugu**	2019	Rp96.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
34	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	11	**SPM.1347 Perencanaan Teknis Pagar dan Gerbang Kanp**	2019	Rp93.500.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
35	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	12	SPM. Perencanaan Jembatan Darurat	2019	Rp376.035.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
36	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	13	**SPM. 1350 Perencanaan Teknis Air Bersih dan Kotor**	2019	Rp49.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
37	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	14	**SPM. 1350 Perencanaan Teknis Air Bersih dan Kotor**	2019	Rp49.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
38	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	15	SPM. 1345 Perencanaan Sistem Keamanan	2019	Rp93.555.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
39	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	16	SPM. 1354 Perencanaan Teknis Penggantian Sistem Tata Udara Gd. Cipta	2019	Rp92.700.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
40	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	17	**SPM. 1353 Perncanaan Lobby Karsa**	2019	Rp95.800.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
41	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	18	SPM. 1356 Perencanaan Teknis Proteksi Kebakaran	2019	Rp92.350.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
42	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	20	**SPM. 2043 Perencanaan Rnv. RN Gol 2**	2020	Rp70.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
43	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	21	SPM. 20043 Perencanaan Rnv Roof Top Karsa 10	2020	Rp98.700.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
44	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.001	67	SPM. 20042 Aplikasi Manj. Pemeliharaan Si PEPENG	2020	Rp104.500.000	Software Komputer	-	-	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
45	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	1	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	2014	Rp48.950.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2014	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
46	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	2	Analisa Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas	2014	Rp48.950.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2014	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
47	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	3	**Mastr Plan Gd.Arsip Bandung**	2013	Rp711.205.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2014	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
48	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	7	Kajian Pemanfaatan Aset	2017	Rp49.170.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2017	Tidak Terbatas	TIDAK	BIRO UMUM	
49	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	8	Kajian Pemanfaatan Aset	2017	Rp49.775.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2017	Tidak Terbatas	Tidak	BIRO UMUM	
50	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	9	Kajian Pemanfaatan Aset	2017	Rp49.940.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2017	Tidak Terbatas	Tidak	BIRO UMUM	
51	412631	BIRO UMUM	8.01.01.01.007	19	**SPM. 20042 Perencanaan Teknis Selasar Gd Karsa Cip**	2020	Rp97.800.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	BIRO UMUM	
52	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.001	1	Software Komputer	2019	Rp599.500.000	Software Komputer	-	-	-	-	2019	3	Bermanfaat	Biro Perencanaan	
53	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.002	1	Lisensi	2020	Rp1.870.000	Lisensi	-	-	-	-	2020	17	Bermanfaat	Biro Perencanaan	
54	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.002	2	Lisensi	2020	Rp4.510.000	Lisensi	-	-	-	-	2020	17	Bermanfaat	Biro Perencanaan	
55	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.002	3	Lisensi	2020	Rp1.978.900	Lisensi	-	-	-	-	2020	17	Bermanfaat	Biro Perencanaan	
56	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	2	Hasil Kajian/Penelitian	2006	Rp492.200.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2006	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
57	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	3	Hasil Kajian/Penelitian	2006	Rp488.785.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2006	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
58	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	4	Hasil Kajian/Penelitian	2006	Rp487.200.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2006	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
59	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	5	Hasil Kajian/Penelitian	2006	Rp464.167.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2006	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
60	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	6	Hasil Kajian/Penelitian	2007	Rp428.285.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2007	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
61	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	7	Hasil Kajian/Penelitian	2007	Rp539.880.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2007	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
62	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	8	Hasil Kajian/Penelitian	2007	Rp633.311.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2007	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
63	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	9	Hasil Kajian/Penelitian	2007	Rp431.875.400	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2007	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
64	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	12	Hasil Kajian/Penelitian	2008	Rp600.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2008	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
65	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	14	Hasil Kajian/Penelitian	2008	Rp870.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2008	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
66	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	15	Hasil Kajian/Penelitian	2008	Rp443.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2008	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
67	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	16	Hasil Kajian/Penelitian	2008	Rp627.000.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2008	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
68	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	26	Hasil Kajian/Penelitian	2010	Rp575.712.450	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2010	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
69	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	28	Hasil Kajian/Penelitian	2010	Rp584.138.500	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2010	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
70	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	29	Hasil Kajian/Penelitian	2010	Rp459.877.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2010	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
71	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	30	Hasil Kajian/Penelitian	2010	Rp587.125.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2010	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
72	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	31	Hasil Kajian/Penelitian	2010	Rp655.957.500	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2010	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
73	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	35	Hasil Kajian/Penelitian	2011	Rp785.900.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2011	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
74	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	38	Hasil Kajian/Penelitian	2011	Rp768.515.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2011	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
75	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	39	Hasil Kajian/Penelitian	2011	Rp757.845.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2011	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
76	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	41	Hasil Kajian/Penelitian	2011	Rp780.357.600	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2011	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
77	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	52	Hasil Kajian/Penelitian	2013	Rp1.251.800.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2013	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
78	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	53	Hasil Kajian/Penelitian	2013	Rp809.369.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2013	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
79	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	57	Hasil Kajian/Penelitian	2013	Rp814.055.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2013	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
80	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	58	Hasil Kajian/Penelitian	2013	Rp823.570.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2013	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
81	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	60	Hasil Kajian/Penelitian	2013	Rp867.020.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2013	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
82	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	70	Hasil Kajian/Penelitian	2015	Rp800.250.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2015	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
83	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	71	Hasil Kajian/Penelitian	2015	Rp864.077.500	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2015	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
84	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	78	Hasil Kajian/Penelitian	2016	Rp785.147.500	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2016	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
85	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	80	Hasil Kajian/Penelitian	2016	Rp948.354.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2016	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
86	466301	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	8.01.01.01.007	81	Hasil Kajian/Penelitian	2016	Rp945.648.000	Hasil Kajian/Penelitian	-	√	√	-	2016	Tidak terbatas	Tidak Bermanfaat	Biro Perencanaan	
87	418880	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	8.01.01.01.001	1	Software	2021	Rp198.000.000	Software	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Bagian Humas Sub Sektor/Badan	
88	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	14	SDM Berbasis WEB	2008	Rp665.399.900	Software Komputer	-	√	-	√	2008	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
89	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	21	-	2008	Rp1.736.321.807	Software Komputer	-	√	-	√	2008	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
90	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	24	-	2008	Rp1.555.503.307	Software Komputer	-	√	-	√	2008	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
91	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	189	Aplikasi Pembangunan SIMPITIP	2013	Rp1.902.878.120	Software Komputer	-	√	-	√	2013	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
92	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	191	PEMBUATAN APLIKASI MULTIMEDIA	2015	Rp406.340.000	Software Komputer	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
93	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	192	Aplikasi EPlanning Kemenhub	2016	Rp1.153.225.700	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
94	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	198	Apl Siasati yg terintegrasi	2016	Rp882.860.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
95	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	199	Apl Maintnce Supp Email	2016	Rp191.730.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
96	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	200	Pembangunan SOA	2016	Rp1.207.800.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
97	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	201	SI Kepeg n Monitoring keu	2016	Rp1.218.940.200	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
98	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	202	Apl Perijinan Angkutan Jln	2017	Rp379.775.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
99	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	203	Web dan Reg Online ASEM	2017	Rp96.250.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
100	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	204	Apl Mudik Gratis TA 20	2017	Rp88.000.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
101	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	205	Aplikasi Persuratan	2017	Rp565.301.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
102	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	206	Apl Perijinan Angk Orang	2017	Rp193.985.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
103	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	207	Aplikasi SIRIU ONLINE	2017	Rp186.505.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
104	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	208	Aplikasi INAPORTNET PUSTIKOMHUB	2017	Rp1.662.289.100	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	

No	Kode Satker	Nama UPT/Satker	Uraian BMN			Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis ATB	Manfaat Aset Tak Berwujud				Waktu dirasakannya manfaat	Durasi kemanfaatan Aset Tak Berwujud	Relevansi saat ini (Bermanfaat/ Tidak)	Unit kerja yang memanfaatkan	Keterangan
			Kode Barang	NUP	Nama Barang				Memiliki nilai ekonomi	Manfaat keilmuan	Manfaat Sosial	Manfaat Lainnya					
105	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	209	Apl Sertifikasi Kecakapan	2017	Rp364.155.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
106	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	210	Apli PENILAIAN KINERJA PEGA	2017	Rp395.983.500	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
107	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	211	Apl Helpdesk Pustikomhub	2017	Rp195.690.000	Software Komputer	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
108	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	212	Aplikasi EASIY	2018	Rp1.070.326.300	Software Komputer	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
109	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	213	Aplikasi E-ADVOKASI	2018	Rp188.265.000	Software Komputer	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
110	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	214	Aplikasi E-TARIF	2018	Rp189.695.000	Software Komputer	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
111	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	215	Pembangunan Aplikasi Sistem Intern Pemerintah (E-S	2019	Rp194.573.500	Software Komputer	-	√	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
112	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	216	Aplikasi WFH	2020	Rp191.950.000	Software Komputer	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
113	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	217	PEMBANGUNAN APLIKASI MANAGEMENT TIK	2020	Rp292.842.200	Software Komputer	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
114	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	218	MODUL APLIKASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS	2020	Rp396.742.500	Software Komputer	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
115	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	219	Sistem analitic dan visualisasi data	2021	Rp1.992.540.000	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
116	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	220	APLIKASI ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) KEMENHUB	2021	Rp454.117.900	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
117	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	221	aplikasi E-Renstra	2021	Rp198.412.500	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
118	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	222	Data Center Management Software Configuration Suit	2021	Rp360.800.000	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
119	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	223	Aplikasi Pendaftaran Kapal Online	2016	Rp385.550.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
120	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	224	Pengembangan Aplikasi E-Performance	2016	Rp580.800.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
121	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	226	Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor	2016	Rp763.708.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
122	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	227	Aplikasi ID Pass Bandara	2016	Rp197.450.000	Software Komputer	-	√	-	√	2016	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
123	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	228	APLIKASI DASHBOARD STRATEGIS KEMENHUB	2021	Rp299.649.999	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
124	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	229	INTRAWEB KEMENHUB	2021	Rp299.550.000	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
125	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	230	Aplikasi CBT (computer based training)	2021	Rp45.925.000	Software Komputer	-	√	-	√	2021	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
126	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	231	APLIKASI PORTAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2022	Rp99.888.900	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
127	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	232	SOFTWARE KOMPUTER	2022	Rp49.911.150	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
128	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	233	Software Komputer	2022	Rp49.911.150	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
129	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	234	Software Komputer	2022	Rp97.999.999	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
130	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	235	Software Komputer	2022	Rp97.569.000	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
131	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	236	Software Komputer	2022	Rp97.902.000	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
132	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	237	Software Komputer	2022	Rp77.949.750	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
133	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	238	Hubpayment	2022	Rp99.900.000	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
134	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	239	Data Lake Kementerian Perhubungan	2022	Rp99.995.460	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
135	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	240	Gateway Online Single Submission	2022	Rp99.844.500	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
136	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.001	241	Integrasi Data Kinerja	2022	Rp98.235.000	Software Komputer	-	√	-	√	2022	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Satuan Kerja Kemenhub	
137	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	105	IBM SAN SWICTH 12 Port Activation	2015	Rp126.500.000	Lisensi	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
138	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	106	IBM SAN SWICTH 12 Port Activation	2015	Rp126.500.000	Lisensi	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
139	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	107	LIsensi SOA	2015	Rp651.426.930	Lisensi	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
140	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	108	LIsensi SOA	2015	Rp651.426.930	Lisensi	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
141	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	134	APPLICATION WEBSCANNER ACUNETIX WEB	2015	Rp88.000.000	Lisensi	-	√	-	√	2015	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
142	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2582	Domino enterprise CAL V9.0.1 Social	2017	Rp3.168.000	Lisensi	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
143	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2583	Domino enterprise CAL V9.0.1 Social	2017	Rp1.540.000	Lisensi	-	√	-	√	2017	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
144	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2585	Renewal License Support Allot netenforced sbc1440l	2018	Rp295.684.684	Lisensi	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
145	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2586	End Point protection bussiness	2018	Rp1.025.409.000	Lisensi	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
146	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2587	Software BI	2018	Rp445.830.000	Lisensi	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
147	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2589	Software Monitoring Infrastruktur	2018	Rp467.060.000	Lisensi	-	√	-	√	2018	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
148	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2590	Lisensi utk mendukung Aplikasi di Lingkungan Kemen	2019	Rp2.871.000.000	Lisensi	-	√	-	√	2019	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
149	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2591	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
150	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2592	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
151	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2593	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
152	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2594	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
153	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2595	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
154	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2596	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
155	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2597	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
156	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2598	TABLEAU DESKTOP PROFESIONAL	2020	Rp39.090.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
157	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2599	TABLEAU server web client interactor	2020	Rp19.290.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
158	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2600	TABLEAU server web client interactor	2020	Rp19.290.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
159	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2601	TABLEAU server web client interactor	2020	Rp19.290.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
160	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2602	TABLEAU server web client interactor	2020	Rp19.290.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
161	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2603	TABLEAU server web client interactor	2020	Rp19.290.300	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
162	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2604	Lisensi SOA Hubnet Servive Oriented Architecture (	2020	Rp267.850.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
163	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2605	Lisensi SOA Hubnet Servive Oriented Architecture (	2020	Rp267.850.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	

No	Kode Satker	Nama UPT/Satker	Uraian BMN			Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis ATB	Manfaat Aset Tak Berwujud				Waktu dirasakannya manfaat	Durasi kemanfaatan Aset Tak Berwujud	Relevansi saat ini (Bermanfaat/ Tidak)	Unit kerja yang memanfaatkan	Keterangan
			Kode Barang	NUP	Nama Barang				Memiliki nilai ekonomi	Manfaat keilmuan	Manfaat Sosial	Manfaat Lainnya					
164	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2606	Lisensi SOA Hubnet Servive Oriented Architecture (	2020	Rp267.850.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
165	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2607	Lisensi SOA Hubnet Servive Oriented Architecture (	2020	Rp267.850.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
166	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2608	Lisensi Perangkat secure web gateway appliance (sa	2020	Rp93.500.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
167	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2609	Lisensi Perangkat secure web gateway appliance (sa	2020	Rp93.100.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
168	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2610	Lisensi Perangkat secure web gateway appliance (sa	2020	Rp99.000.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
169	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2611	Lisensi Perangkat secure web gateway appliance (sa	2020	Rp99.000.000	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
170	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2612	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
171	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2613	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
172	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2614	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
173	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2615	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
174	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2616	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
175	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2617	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
176	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2618	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
177	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2619	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
178	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2620	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
179	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2621	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
180	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2622	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
181	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2623	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
182	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2624	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
183	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2625	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
184	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2626	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
185	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2627	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
186	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2628	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
187	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2629	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
188	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2630	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
189	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2631	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
190	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2632	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
191	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2633	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
192	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2634	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
193	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2635	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
194	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2636	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
195	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2637	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
196	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2638	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
197	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2639	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
198	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2640	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
199	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2641	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
200	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2642	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
201	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2643	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
202	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2644	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
203	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2645	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
204	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2646	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
205	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2647	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
206	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2648	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
207	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2649	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
208	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2650	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
209	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2651	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	

No	Kode Satker	Nama UPT/Satker	Uraian BMN			Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis ATB	Manfaat Aset Tak Berwujud				Waktu dirasakannya manfaat	Durasi kemanfaatan Aset Tak Berwujud	Relevansi saat ini (Bermanfaat/ Tidak)	Unit kerja yang memanfaatkan	Keterangan
			Kode Barang	NUP	Nama Barang				Memiliki nilai ekonomi	Manfaat keilmuan	Manfaat Sosial	Manfaat Lainnya					
210	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2652	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
211	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2653	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
212	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2654	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
213	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2655	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
214	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2656	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
215	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2657	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
216	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2658	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
217	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2659	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
218	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2660	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
219	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2661	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
220	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2662	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
221	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2663	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
222	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2664	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
223	412710	Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.01.01.01.002	2665	Web Filter and antivirus (kerio)	2020	Rp434.500	Lisensi	-	√	-	√	2020	Tidak Terbatas	Bermanfaat	Pusat Data dan Teknologi Informasi	

Lampiran D.1

Rincian Pendapatan Operasional Per Jenis Pendapatan Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN											
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.873.675.185,00	0,00	5.936.611.458,00	14.098.296.571,00	24.418.237.575,00	32.675.336.943,00	0,00	468.076.294,00	445.500,00	0,00	79.470.679.526,00
425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	382.480,00	311.162.100,00	101.700.000,00	1.031.796.761,00	0,00	6.291.000,00	0,00	0,00	1.451.332.341,00
425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	73.963.814,00	9.302.097.663,00	24.195.158.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.571.219.605,00
425135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425136 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425138 Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0,00	0,00	15.082.500,00	0,00	1.647.959.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.041.936,00
Jumlah Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	**1.873.675.185,00**	**0,00**	**6.026.040.252,00**	**23.711.556.334,00**	**50.363.055.139,00**	**33.707.133.704,00**	**0,00**	**474.367.294,00**	**445.500,00**	**0,00**	**116.156.273.408,00**
42515 Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi											
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	0,00	0,00	0,00	798.293.600,00	1.681.862.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00	0,00	2.496.435.600,00
Jumlah Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798.293.600,00**	**1.681.862.000,00**	**0,00**	**16.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496.435.600,00**

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
Jumlah Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	**1.873.675.185,00**	**0,00**	**6.026.040.252,00**	**23.711.556.334,00**	**51.161.348.739,00**	**35.388.995.704,00**	**0,00**	**490.647.294,00**	**445.500,00**	**0,00**	**118.652.709.008,00**
4252 Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang	0,00	0,00	70.643.900.000,00	0,00	44.953.910.602,00	25.628.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.225.940.602,00
Jumlah Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**0,00**	**0,00**	**70.643.900.000,00**	**0,00**	**44.953.910.602,00**	**25.628.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.225.940.602,00**
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi											
425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.734.000,00	0,00	0,00	646.734.000,00
425412 Pendapatan Biaya Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.920.000,00	0,00	0,00	1.843.920.000,00
425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.841.620,00	0,00	0,00	3.805.841.620,00
425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.157.157.238,00	0,00	0,00	36.157.157.238,00
425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.839.000,00	0,00	0,00	1.354.839.000,00
Jumlah Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.808.491.858,00**	**0,00**	**0,00**	**43.808.491.858,00**
4255 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika											
425511 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	1.082.672.615.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.672.615.068,00
425512 Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.763.939.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.763.939.083,00
425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0,00	0,00	5.021.646.252,00	2.695.798.469.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.820.115.961,00
425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	0,00	0,00	13.035.500,00	695.391.995.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.405.031.260,00
425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0,00	0,00	3.039.755.000,00	294.685.114.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.724.869.503,00
425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	277.201.713.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.201.713.439,00

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	413.023.471.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.023.471.477,00
425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	598.894.847.112,00	117.966.330.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.861.177.411,00
425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0,00	0,00	21.268.210.502,00	82.623.875.874,00	13.719.246.080,00	1.538.000.000,00	0,00	0,00	3.461.000.000,00	0,00	122.610.332.456,00
Jumlah Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	**0,00**	**0,00**	**1.112.015.262.322,00**	**4.367.394.302.958,00**	**821.910.761.295,00**	**689.301.939.083,00**	**0,00**	**0,00**	**3.461.000.000,00**	**0,00**	**6.994.083.265.658,00**
4256 Pendapatan Jasa Lainnya											
425699 Pendapatan Jasa Lainnya	153.269.000,00	0,00	9.507.280,00	43.200.000,00	15.162.150.000,00	1.769.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137.828.280,00
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	**153.269.000,00**	**0,00**	**9.507.280,00**	**43.200.000,00**	**15.162.150.000,00**	**1.769.702.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.137.828.280,00**
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan											
425719 Pendapatan Bunga Lainnya	0,00	0,00	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.888,00
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.888,00
4258 Pendapatan Denda											
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	88.477.328,00	0,00	7.627.699.380,00	22.382.066.832,00	2.205.888.261,00	4.567.209.577,00	0,00	451.050.041,00	0,00	0,00	37.322.391.419,00
425839 Pendapatan Denda Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.307.720,00	561.489.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.797.102,00
Jumlah Pendapatan Denda	88.477.328,00	0,00	7.627.699.380,00	22.432.374.552,00	2.767.377.643,00	4.567.209.577,00	0,00	451.050.041,00	0,00	0,00	37.934.188.521,00
4259 Pendapatan Lain-Lain											
425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.534,00	0,00	1.581.288.611,00	778.020.721,00	97.476.199,00	0,00	0,00	21.373.400,00	555.050,00	0,00	2.478.719.515,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	5.534,00	0,00	1.581.288.611,00	778.020.721,00	97.476.199,00	0,00	0,00	21.373.400,00	555.050,00	0,00	2.478.719.515,00
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	**2.115.427.047,00**	**0,00**	**1.197.903.752.733,00**	**4.414.359.454.565,00**	**936.053.024.478,00**	**756.655.976.364,00**	**0,00**	**44.771.562.593,00**	**3.462.000.550,00**	**0,00**	**7.355.321.198.330,00**
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum											
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	1.694.665.475,00	37.966.997.000,00	0,00	0,00	4.341.812.196,00	0,00	(36.967.500,00)	43.966.507.171,00
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.496.283.502,00	0,00	(5.154.389.100,00)	1.091.341.894.402,00
424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819.861.118,00	0,00	0,00	838.502.490,00	0,00	0,00	68.658.363.608,00
424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816.889.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816.889.889,00
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	7.765.470.127,00	0,00	114.458.961,00	27.445.029.100,00	0,00	5.108.692.488,00	0,00	0,00	40.433.650.676,00
424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424243 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Umum	**0,00**	**0,00**	**7.765.470.127,00**	**1.694.665.475,00**	**165.718.206.968,00**	**27.445.029.100,00**	**0,00**	**1.106.785.290.676,00**	**0,00**	**(5.191.356.600,00)**	**1.304.217.305.746,00**
4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum											
424231 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837.586.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837.586.786,00
424242 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.493.720,00	0,00	0,00	919.493.720,00

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
Jumlah Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.837.586.786,00**	**0,00**	**0,00**	**919.493.720,00**	**0,00**	**0,00**	**23.757.080.506,00**
4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU											
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0,00	0,00	0,00	6.424.771.000,00	17.111.616.969,00	279.681.532,00	0,00	80.566.737.253,00	0,00	(6.336.572.673,00)	98.046.234.081,00
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	5.568.168.800,00	0,00	0,00	5.581.368.800,00
424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337.232.951,00	0,00	0,00	11.337.232.951,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.424.771.000,00**	**17.124.816.969,00**	**279.681.532,00**	**0,00**	**97.472.139.004,00**	**0,00**	**(6.336.572.673,00)**	**114.964.835.832,00**
4244 Pendapatan dari Alokasi APBN											
424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373.089.714,00	0,00	0,00	24.355.288.299,00	0,00	(63.094.364.772,00)	(2.365.986.759,00)
424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652.469.943,00	0,00	0,00	5.323.000.000,00	0,00	(28.382.036,00)	11.947.087.907,00
Jumlah Pendapatan dari Alokasi APBN	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025.559.657,00	0,00	0,00	29.678.288.299,00	0,00	(63.122.746.808,00)	9.581.101.148,00
4249 Pendapatan BLU Lainnya											
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895.106.450,00	124.251.683,00	0,00	23.267.157.344,00	0,00	0,00	30.286.515.477,00
424913 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	0,00	0,00	395.016.190,00	5.407.669.808,00	0,00	0,00	13.146.859.046,00	0,00	(2.400.000,00)	18.947.145.044,00

	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENTERIAN
	01	02	03	04	05	08	11	12	13	55	022
424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.991.744,00	0,00	0,00	437.329.275,00	0,00	0,00	5.503.321.019,00
424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	83.023.981,00	0,00	0,00	3.972.038.330,00	0,00	(25.315.431,00)	4.029.746.880,00
424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.551.946,00	0,00	0,00	6.885.203.736,00	0,00	(30.200.000,00)	12.275.555.682,00
424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574.223.374,00	0,00	0,00	2.752.182.600,00	0,00	0,00	26.326.405.974,00
424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.559.264,00	0,00	0,00	2.603.144.500,00	0,00	0,00	4.350.703.764,00
424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	60.525.318,00	0,00	0,00	236.117.000,00	0,00	0,00	296.642.318,00
424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan BLU Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.016.190,00**	**48.254.651.885,00**	**124.251.683,00**	**0,00**	**53.300.031.831,00**	**0,00**	**(57.915.431,00)**	**102.016.036.158,00**
Jumlah Pendapatan BLU	**0,00**	**0,00**	**7.765.470.127,00**	**8.514.452.665,00**	**296.960.822.265,00**	**27.848.962.315,00**	**0,00**	**1.288.155.243.530,00**	**0,00**	**(74.708.591.512,00)**	**1.554.536.359.390,00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**2.115.427.047,00**	**0,00**	**1.205.669.222.860,00**	**4.422.873.907.230,00**	**1.233.013.846.743,00**	**784.504.938.679,00**	**0,00**	**1.332.926.806.123,00**	**3.462.000.550,00**	**(74.708.591.512,00)**	**8.909.857.557.720,00**

Lampiran D.2.

Rincian Beban Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

Uraian	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	**KEMENHUB**
Beban Pegawai	132.926.042.461,00	41.642.846.513,00	499.842.490.713,00	1.749.389.433.081,00	941.987.757.062,00	123.434.159.700,00	31.032.552.813,00	740.412.596.921,00	27.105.528.514,00	0,00	**4.287.773.407.778,00**
Beban Persediaan	10.654.638.968,00	1.562.648.696,00	79.726.979.516,00	241.027.247.060,00	104.423.827.262,00	41.682.977.220,00	1.913.687.188,00	121.286.977.311,00	3.656.266.222,00	(4.900.000,00)	**605.930.349.443,00**
Beban Barang dan Jasa	176.375.934.739,00	16.316.368.441,00	2.200.391.296.984,00	2.686.962.490.320,00	1.492.140.210.418,00	793.861.395.107,00	33.185.291.784,00	1.445.496.987.126,00	107.404.562.080,00	(67.201.575.069,00)	**8.884.932.961.930,00**
Beban Pemeliharaan	38.384.330.985,00	1.462.560.376,00	136.536.489.704,00	685.318.123.771,00	512.718.208.638,00	685.788.437.975,00	4.628.711.168,00	294.718.400.706,00	8.336.707.133,00	0,00	**2.367.891.970.456,00**
Beban Perjalanan Dinas	94.717.793.212,00	21.720.611.999,00	207.445.713.666,00	436.107.200.711,00	231.613.538.710,00	145.450.780.394,00	23.866.256.970,00	322.993.922.797,00	18.926.560.302,00	(7.502.116.443,00)	**1.495.340.262.318,00**
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	2.693.738.464.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.693.738.464.505,00**
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Beban Penyusutan dan dan Amortisasi	76.556.913.149,00	4.244.885.542,00	1.323.300.264.122,00	3.172.580.799.255,00	4.578.177.111.378,00	10.718.149.082.701,00	7.766.969.578,00	828.261.490.916,00	57.663.741.907,00	0,00	**20.766.701.258.548,00**
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	166.233,00	0,00	408.300,00	348.373.798,00	59.533.609.942,00	2.516.029.356,00	0,00	1.108.386.148,00	0,00	0,00	**63.506.973.777,00**
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Jumlah	**529.615.819.747,00**	**86.949.921.567,00**	**7.140.982.107.510,00**	**8.971.733.667.996,00**	**7.920.594.263.410,00**	**12.510.882.862.453,00**	**102.393.469.501,00**	**3.754.278.761.925,00**	**223.093.366.158,00**	**(74.708.591.512,00)**	**41.165.815.648.755,00**

Lampiran D.3

Rincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	KEMENHUB
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	66.915.000.391,00	20.440.122.437,00	260.499.727.444,00	887.964.673.405,00	437.011.594.486,00	62.029.801.565,00	15.081.249.685,00	202.722.453.636,00	13.195.557.579,00	1.965.860.180.628,00
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3.667.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.860.000,00
Beban Honorarium	774.354.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.354.146,00
Beban Lembur	672.184.000,00	152.940.000,00	15.159.774.000,00	95.244.449.750,00	17.421.679.131,00	402.378.000,00	0,00	11.045.400.500,00	115.630.000,00	140.214.435.381,00
Beban Tunjangan Khusus Pegawai	60.896.643.924,00	21.049.784.076,00	224.182.989.269,00	766.180.309.926,00	400.589.684.067,00	61.001.980.135,00	15.951.303.128,00	77.565.834.804,00	13.794.340.935,00	1.641.212.870.264,00
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	86.964.799.378,00	0,00	0,00	449.078.907.981,00	0,00	536.043.707.359,00
Jumlah	**132.926.042.461,00**	**41.642.846.513,00**	**499.842.490.713,00**	**1.749.389.433.081,00**	**941.987.757.062,00**	**123.434.159.700,00**	**31.032.552.813,00**	**740.412.596.921,00**	**27.105.528.514,00**	**4.287.773.407.778,00**

Lampiran D.4

Rincian Beban Persediaan Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Persediaan konsumsi	10.540.427.846,00	1.562.648.696,00	74.707.951.427,00	176.927.341.126,00	81.251.308.546,00	20.066.096.220,00	1.913.687.188,00	97.315.650.035,00	3.656.266.222,00	(4.900.000,00)	467.936.477.306,00
Beban Persediaan amunisi	0,00	0,00	0,00	12.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074.400,00
Beban Persediaan bahan baku	290.000,00	0,00	4.860.791.107,00	38.462.756.240,00	22.206.109.598,00	0,00	0,00	13.217.064.894,00	0,00	0,00	78.747.011.839,00
Beban Persediaan barang dalam proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga0,00jaga	0,00	0,00	0,00	109.699.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.699.750,00
Beban Persediaan Lainnya	113.921.122,00	0,00	158.236.982,00	25.515.375.544,00	966.409.118,00	21.616.881.000,00	0,00	10.754.262.382,00	0,00	0,00	59.125.086.148,00
Jumlah Beban Persediaan	**10.654.638.968,00**	**1.562.648.696,00**	**79.726.979.516,00**	**241.027.247.060,00**	**104.423.827.262,00**	**41.682.977.220,00**	**1.913.687.188,00**	**121.286.977.311,00**	**3.656.266.222,00**	**(4.900.000,00)**	**605.930.349.443,00**

Lampiran D.5

Rincian Beban Barang dan Jasa Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Barang Operasional											
beban Keperluan Perkantoran	59.361.152.717,00	2.895.793.215,00	231.454.648.339,00	392.694.367.298,00	246.453.034.718,00	33.445.264.602,00	10.570.306.091,00	146.518.104.231,00	17.742.272.125,00	0,00	1.141.134.943.336,00
beban Pengadaan Bahan Makanan	0,00	0,00	0,00	19.567.902.105,00	0,00	0,00	0,00	1.313.548.880,00	0,00	0,00	20.881.450.985,00
beban Penambah Daya Tahan Tubuh	252.711.050,00	0,00	19.394.380.001,00	2.084.673.726,00	3.093.605.274,00	2.592.972.425,00	531.122.933,00	1.781.725.860,00	778.230.673,00	0,00	30.509.421.942,00
beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	273.368.177,00	7.999.550,00	1.436.855.304,00	2.703.801.605,00	980.072.413,00	4.406.800,00	143.750,00	991.432.206,00	0,00	0,00	6.398.079.805,00
beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.127.482.661,00	202.440.000,00	16.702.663.531,00	47.991.998.000,00	63.305.177.464,00	38.298.748.102,00	907.455.000,00	7.563.245.625,00	628.390.000,00	0,00	181.727.600.383,00
beban Barang Operasional Lainnya	7.932.014.108,00	2.188.631.116,00	133.976.658.175,00	14.782.958.109,00	167.151.066.969,00	13.761.014.680,00	492.412.080,00	66.456.817.816,00	0,00	(1.195.452.649,00)	405.546.120.404,00
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00	0,00	(9.540.000,00)	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.893.291.429,00	4.962.773.807,00	32.935.901.857,00	12.446.456.624,00	8.976.218.654,00	9.444.196.560,00	2.562.879.891,00	16.253.827.734,00	0,00	(9.415.000,00)	92.466.131.556,00
Jumlah Beban Barang Operasional	**78.840.020.142,00**	**10.257.637.688,00**	**435.901.107.207,00**	**492.272.157.467,00**	**489.959.175.492,00**	**97.546.603.169,00**	**15.064.319.745,00**	**240.888.242.352,00**	**19.148.892.798,00**	**(1.214.407.649,00)**	**1.878.663.748.411,00**
Beban Barang Non Operasional											
beban Bahan	5.596.441.690,00	2.508.675.954,00	14.082.260.844,00	46.097.179.826,00	14.267.591.352,00	2.032.845.857,00	3.475.271.646,00	131.487.612.689,00	6.025.446.611,00	(621.926.000,00)	224.951.400.469,00
Beban Barang Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
beban Honor Output Kegiatan	2.030.504.000,00	564.740.000,00	81.490.398.293,00	15.874.357.500,00	22.162.421.431,00	3.286.335.000,00	482.770.000,00	137.592.801.260,00	71.400.000,00	(65.280.000,00)	263.490.447.484,00
beban Barang Non Operasional Lainnya	17.232.601.535,00	171.062.692,00	1.507.638.267.718,00	1.833.988.633.734,00	703.580.743.036,00	316.155.978.340,00	2.685.140.467,00	217.572.337.342,00	56.644.693.680,00	(48.640.814.827,00)	4.607.028.643.717,00
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu	0,00	0,00	0,00	2.771.908.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	0,00	(2.875.908.000,00)	0,00
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	1.398.267.172,00	0,00	10.862.561.113,00	652.544.993,00	25.262.308.028,00	6.261.312.186,00	25.575.000,00	5.340.592.060,00	1.239.297.379,00	0,00	51.042.457.931,00
Jumlah Beban Barang Npn Operasional	**26.257.814.397,00**	**3.244.478.646,00**	**1.614.073.487.968,00**	**1.899.384.624.053,00**	**765.273.063.847,00**	**327.736.471.383,00**	**6.668.757.113,00**	**492.097.343.351,00**	**63.980.837.670,00**	**(52.203.928.827,00)**	**5.146.512.949.601,00**

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Jasa											
beban Langganan Listrik	11.529.111.578,00	0,00	23.902.712.405,00	50.691.795.732,00	81.611.291.272,00	64.114.506.455,00	3.305.393.159,00	50.898.484.818,00	2.742.689.748,00	(94.572.000,00)	288.701.413.167,00
beban Langganan Telepon	553.969.966,00	19.294.600,00	3.590.031.494,00	3.986.794.134,00	2.911.232.789,00	554.437.106,00	85.891.775,00	1.972.736.767,00	0,00	0,00	13.674.388.631,00
beban Langganan Air	1.587.652.118,00	0,00	1.733.687.511,00	5.469.344.666,00	3.081.822.595,00	184.133.578,00	232.672.023,00	4.448.034.231,00	0,00	0,00	16.737.346.722,00
beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.495.623.858,00	0,00	15.538.481.335,00	25.871.664.360,00	20.414.771.905,00	2.065.955.380,00	62.966.250,00	19.344.867.481,00	423.805.459,00	0,00	92.218.136.028,00
beban Jasa Pos dan Giro	0,00	0,00	0,00	3.129.203.136,00	61.111.350,00	0,00	0,00	150.975.213,00	0,00	(6.030.000,00)	3.335.259.699,00
beban Jasa Konsultan	5.689.375.365,00	0,00	1.704.438.168,00	81.282.673.586,00	7.025.459.761,00	194.689.304.620,00	3.607.465.950,00	6.660.717.731,00	12.560.149.736,00	0,00	313.219.584.917,00
beban Sewa	14.485.989.310,00	1.857.873.200,00	80.179.444.171,00	18.647.965.716,00	24.598.498.298,00	25.003.310.019,00	991.725.490,00	10.026.211.154,00	4.502.458.701,00	(10.383.617.786,00)	169.909.858.273,00
beban Jasa Profesi	3.493.131.612,00	764.092.000,00	6.043.831.753,00	4.722.149.000,00	1.577.949.045,00	3.632.276.468,00	1.372.580.000,00	19.564.522.860,00	927.197.218,00	(25.500.000,00)	42.072.229.956,00
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.376.700,00	0,00	(233.196.700,00)	239.180.000,00
beban Jasa Lainnya	23.571.069.701,00	0,00	12.668.506.103,00	95.753.037.544,00	1.073.362.138,00	11.058.648.350,00	1.213.299.279,00	18.442.736.793,00	2.726.716.000,00	(921.116.324,00)	165.586.259.584,00
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	1.787.553.478,00	172.992.307,00	3.170.748.590,00	791.714.681,00	1.086.120.753,00	2.139.705.773,00	580.221.000,00	2.192.967.178,00	345.777.500,00	0,00	12.267.801.260,00
Jumlah Beban Jasa	**71.193.476.986,00**	**2.814.252.107,00**	**148.531.881.530,00**	**290.346.342.555,00**	**143.441.619.906,00**	**303.442.277.749,00**	**11.452.214.926,00**	**134.174.630.926,00**	**24.228.794.362,00**	**(11.664.032.810,00)**	**1.117.961.458.237,00**
Beban Barang dan Jasa BLU											
beban Barang	0,00	0,00	0,00	1.698.073.209,00	46.371.245.181,00	5.366.132.654,00	0,00	423.576.095.012,00	0,00	(1.849.926.183,00)	475.161.619.873,00
beban Jasa	0,00	0,00	12.000.000,00	1.184.458.950,00	23.038.371.385,00	4.090.436.559,00	0,00	77.699.738.412,00	0,00	(241.079.600,00)	105.783.925.706,00
Beban Ketersediaan Layanan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	413.997.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.997.874,00
beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754.919.347,00	3.386.978.955,00	0,00	72.823.467.809,00	0,00	(28.200.000,00)	96.937.166.111,00
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	0,00	0,00	0,00	0,00	123.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.339.500,00
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.159.693,00	0,00	0,00	1.949.883.684,00	0,00	0,00	3.395.043.377,00
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	64.616.439,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	65.716.439,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLU	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**2.882.532.159,00**	**92.211.649.419,00**	**12.843.548.168,00**	**0,00**	**576.050.284.917,00**	**0,00**	**(2.119.205.783,00)**	**681.880.808.880,00**
Beban Aset Ekstrakomptabel											
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17.959.800,00	0,00	500.066.000,00	140.619.361,00	35.340.000,00	0,00	0,00	40.535.060,00	0,00	0,00	734.520.221,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00	83.361.000,00	0,00	0,00	0,00	33.573.400,00	0,00	0,00	116.934.400,00
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500.000,00
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	0,00	0,00	0,00	467.896.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.896.780,00
Beban Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.049.560.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.049.560.117,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	74.675.250,00	0,00	724.241.018,00	0,00	0,00	800.376.268,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	48.463.305,00	0,00	0,00	13.374.500,00	0,00	0,00	61.837.805,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	0,00	0,00	86.913.000,00	385.000,00	95.700.879,00	0,00	0,00	426.299.427,00	0,00	0,00	609.298.306,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.200,00	0,00	0,00	11.219.275,00	0,00	0,00	13.683.475,00
beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	66.663.414,00	0,00	1.285.841.279,00	1.384.571.945,00	674.773.370,00	151.259.271,00	0,00	1.037.242.900,00	46.037.250,00	0,00	4.646.389.429,00
Jumlah Beban Aset Ekstrakomptabel	**84.623.214,00**	**0,00**	**1.872.820.279,00**	**2.076.834.086,00**	**1.254.701.754,00**	**52.292.494.638,00**	**0,00**	**2.286.485.580,00**	**46.037.250,00**	**0,00**	**59.913.996.801,00**
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**176.375.934.739,00**	**16.316.368.441,00**	**2.200.391.296.984,00**	**2.686.962.490.320,00**	**1.492.140.210.418,00**	**793.861.395.107,00**	**33.185.291.784,00**	**1.445.496.987.126,00**	**107.404.562.080,00**	**(67.201.575.069,00)**	**8.884.932.961.930,00**

Lampiran D.6

Rincian Beban Pemeliharaan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	Kementerian
Beban Pemeliharaan										
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.776.852.248,00	467.640.059,00	68.629.093.569,00	122.770.212.280,00	138.925.371.292,00	29.758.803.826,00	2.582.954.575,00	142.077.273.714,00	2.127.448.307,00	521.115.649.870,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	39.624.500,00	0,00	977.350.978,00	0,00	1.039.475.478,00
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	531.650.560,00	0,00	0,00	1.224.206.695,00	0,00	1.810.857.255,00
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.663.767.194,00	994.277.454,00	62.642.704.630,00	461.983.507.338,00	138.116.591.843,00	23.649.948.416,00	2.045.756.593,00	92.545.408.054,00	5.235.651.010,00	809.877.612.532,00
beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0,00	0,00	1.980.822.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.822.445,00
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.495.185.784,00	0,00	0,00	1.079.742.357,00	2.389.092.869,00	511.255.360,00	0,00	0,00	0,00	5.475.276.370,00
beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	146.793.000,00	41.637.243.236,00	30.082.669.914,00	515.730.181.200,00	0,00	0,00	0,00	587.596.887.350,00
beban Pemeliharaan Irigasi	0,00	0,00	0,00	47.550.000,00	736.089.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.639.494,00
beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.001.161.717,00	133.161.502.665,00	0,00	0,00	5.183.465.295,00	0,00	141.346.129.677,00
beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	1.184.285.295,00	0,00	821.176.950,00	26.416.990.714,00	0,00	2.174.039.830,00	0,00	30.596.492.789,00
beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	35.308.673.286,00	753.471.973,00	0,00	37.979.810.843,00	0,00	74.041.956.102,00
beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59.698.200,00	642.863,00	1.423.615.945,00	6.537.825.611,00	4.605.946.721,00	7.150.000,00	0,00	1.704.182.507,00	6.232.190,00	14.345.294.037,00
beban Persediaan suku cadang	388.827.559,00	0,00	257.523.907,00	47.447.557.185,00	27.740.290.984,00	88.921.011.986,00	0,00	10.643.439.540,00	967.375.626,00	176.366.026.787,00
beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	216.650.913,00	790.824.047,00	299.152.060,00	0,00	0,00	209.223.250,00	0,00	1.515.850.270,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	**38.384.330.985,00**	**1.462.560.376,00**	**136.536.489.704,00**	**685.318.123.771,00**	**512.718.208.638,00**	**685.788.437.975,00**	**4.628.711.168,00**	**294.718.400.706,00**	**8.336.707.133,00**	**2.367.891.970.456,00**

Lampiran D.7

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 *(Audited)*

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	KEMENHUB
Beban Perjalanan Biasa	49.390.583.264	14.427.467.674	161.628.597.633	311.634.865.576	189.911.846.723	110.208.350.826	11.843.831.088	184.201.726.858	11.062.136.010	(828.329.105)	**1.043.481.076.547**
Beban Perjalanan Tetap	0,00	0,00	584.910.597	0,00	20.910.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**605.820.597**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.563.650	170.185.540	2.623.414.358	69.427.994.021	1.754.357.000	1.606.563.500	127.888.494	2.874.276.278	111.960.000	0,00	**79.447.202.841**
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.403.480.898	4.916.858.800	13.994.812.646	23.624.000.629	3.607.154.340	4.306.548.392	2.235.240.792	18.151.087.291	1.227.621.895	(1.320.881.956)	**80.145.923.727**
Beban Perjalanan Dinas Paket Meering Dalam Kota - Penanganan Pandemi C19	0,00	0,00	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	222.924.456	0,00	0,00	**225.024.456**
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.992.171.836	2.206.099.985	24.672.433.228	26.099.101.329	16.136.289.260	22.689.223.750	9.475.803.436	68.224.312.773	6.359.477.653	(5.333.227.882)	**195.521.685.368**
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	8.970.715.722	0,00	3.036.023.304	4.452.920.800	3.905.342.176	2.679.862.596	183.493.160	3.023.806.654	165.364.744	0,00	**26.417.529.156**
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	1.210.277.842	0,00	0,00	0,00	2.901.530.100	0,00	0,00	343.042.079	0,00	0,00	**4.454.850.021**
Beban Perjalanan BLU	0,00	0,00	903.421.900	868.318.356	13.376.109.111	3.960.231.330	0,00	45.952.746.408	0,00	(19.677.500)	**65.041.149.605**
Beban Perjalanan Dinas BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Jumlah	**94.717.793.212**	**21.720.611.999**	**207.445.713.666**	**436.107.200.711**	**231.613.538.710**	**145.450.780.394**	**23.866.256.970**	**322.993.922.797**	**18.926.560.302**	**(7.502.116.443)**	**1.495.340.262.318**

Lampiran D.8

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	183.025.772.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.025.772.561,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	80.115.851.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.115.851.560,00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	0,00	0,00	189.993.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.993.540,00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	168.300.528.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300.528.940,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	2.262.106.317.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.106.317.904,00
Jumlah Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**0,00**	**0,00**	**2.693.738.464.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.693.738.464.505,00**

Lampiran D.9

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Penyusutan dan Amortisasi											
Beban Penyusutan											
beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.421.758.137,00	3.847.611.461,00	990.367.588.681,00	1.621.367.404.026,00	797.431.289.056,00	303.508.136.416,00	5.747.929.237,00	473.132.367.309,00	50.431.228.544,00	0,00	4.292.255.312.867,00
beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.351.509.196,00	0,00	94.882.017.726,00	287.958.164.736,00	212.187.482.339,00	113.995.294.158,00	1.235.624.984,00	132.128.180.885,00	3.982.103.676,00	0,00	869.720.377.700,00
beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	401.219.461,00	0,00	42.117.219.906,00	551.321.235.759,00	2.981.942.642.071,00	9.637.364.250.497,00	0,00	35.114.114.898,00	1.873.743.472,00	0,00	13.250.134.426.064,00
beban Penyusutan Irigasi	14.091.442,00	0,00	131.007.684.624,00	336.100.970.394,00	204.130.577.046,00	76.407.857.798,00	0,00	167.375.967.145,00	0,00	0,00	915.037.148.449,00
beban Penyusutan Jaringan	1.437.989.196,00	0,00	2.175.963.922,00	3.019.049.332,00	23.708.083.959,00	510.915.454.106,00	383.932.473,00	8.439.040.758,00	4.989.666,00	0,00	550.084.503.412,00
beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.219.032,00	6.027.980.432,00	0,00	0,00	453.994.576,00	0,00	0,00	6.501.194.040,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0,00	0,00	0,00	340.682.349.559,00	0,00	74.833.145.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.515.494.741,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	25.271.109,00	16.452.005,00	616.224.619,00	0,00	1.483.979,00	0,00	0,00	659.431.712,00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	18.664.351.822,00	222.461.829.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.126.181.039,00
beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13.860.985,00	6.628.043,00	57.795.958.513,00	8.670.372.322,00	99.298.193.853,00	1.827.025,00	1.550.634,00	1.351.260.704,00	6.742.169,00	0,00	167.146.394.248,00
Jumlah Beban Penyusutan	**71.640.428.417,00**	**3.854.239.504,00**	**1.318.346.433.372,00**	**3.167.828.388.091,00**	**4.547.204.529.978,00**	**10.717.642.189.801,00**	**7.369.037.328,00**	**817.996.410.254,00**	**56.298.807.527,00**	**0,00**	**20.708.180.464.272,00**
Beban Amortisasi											
beban Amortisasi Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.370,00	0,00	0,00	2.608.370,00
beban Amortisasi Paten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.118,00	0,00	0,00	5.294.118,00
beban Amortisasi Software	3.381.760.144,00	390.646.038,00	4.875.434.350,00	4.752.411.164,00	30.961.168.900,00	506.892.900,00	397.932.250,00	9.752.068.615,00	1.364.934.380,00	0,00	56.383.248.741,00
beban Amortisasi Lisensi	1.534.724.588,00	0,00	58.867.625,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	505.109.559,00	0,00	0,00	2.101.451.772,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	19.528.775,00	0,00	8.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.191.275,00
beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	KERETA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Operasional Pemerintahan - BLU											
Jumlah Beban Amortisasi	**4.916.484.732,00**	**390.646.038,00**	**4.953.830.750,00**	**4.752.411.164,00**	**30.972.581.400,00**	**506.892.900,00**	**397.932.250,00**	**10.265.080.662,00**	**1.364.934.380,00**	**0,00**	**58.520.794.276,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**76.556.913.149,00**	**4.244.885.542,00**	**1.323.300.264.122,00**	**3.172.580.799.255,00**	**4.578.177.111.378,00**	**10.718.149.082.701,00**	**7.766.969.578,00**	**828.261.490.916,00**	**57.663.741.907,00**	**0,00**	**20.766.701.258.548,00**

Lampiran D.10

Rincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih											
beban Penyisihan Piutang PNBP	166.233,00	0,00	408.300,00	345.314.471,00	58.506.741.190,00	2.516.027.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.368.658.050,00
beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	57.234.552,00	0,00	0,00	81.732.451,00	0,00	0,00	138.967.003,00
beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	0,00	0,00	0,00	2.999.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.577,00
beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.544.993,00	0,00	0,00	715.544.993,00
beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.930.754,00	0,00	0,00	288.930.754,00
beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	239.502.679,00	0,00	0,00	161.385,00	0,00	0,00	239.664.064,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.241,00	0,00	0,00	308.241,00
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	141.378.900,00	0,00	0,00	416.667,00	0,00	0,00	141.820.567,00
beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	154.959.694,00	0,00	0,00	17.666.610,00	0,00	0,00	172.626.304,00
Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	45.061.081,00	0,00	0,00	2.546.910,00	0,00	0,00	47.607.991,00
beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	388.731.846,00	1.500,00	0,00	1.078.137,00	0,00	0,00	389.811.483,00
beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	**166.233,00**	**0,00**	**408.300,00**	**348.373.798,00**	**59.533.609.942,00**	**2.516.029.356,00**	**0,00**	**1.108.386.148,00**	**0,00**	**0,00**	**63.506.973.777,00**

Lampiran D.11

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Pendapatan Lain-lain										
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481.023,00	0,00	29.481.023,00
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	17.144.092,00	12.341.246,00	26.739.371,00	533.292.253,00	58.779.755,00	6.344,00	9.317.203,00	316.970.098,00	24.524.669,00	999.115.031,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.566.259.085,00	1.870.000,00	35.050.815.375,00	120.493.363.282,00	12.052.087.695,00	5.487.336.267,00	975.653.039,00	3.075.827.802,00	2.814.716.701,00	181.517.929.246,00

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	180.670.000,00	0,00	7.018.475.152,00	1.852.816.067,00	2.368.443.056,00	5.098.000.049,00	0,00	1.148.288.226,00	722.122.306,00	18.388.814.856,00
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	386.236.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.236.683,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	65.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	11.015.700.010,00
Pendapatan BLU Lainnya										
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	426.089.680,00	0,00	0,00	314.065.704,00	0,00	740.155.384,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.821,00
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	73.551.900.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.551.900.500,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha										
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50.777.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.777.754,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan										
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	27.750.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950.000,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi										
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	376.099.796,00	0,00	0,00	36.021.780.199,00	7.529.958,00	2.407.979.147,00	0,00	5.716.954,00	0,00	38.819.106.054,00
Pendapatan Penyesuaian Lainnya										
Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	434.639.529.611,00	0,00	81.279.487.892,00	0,00	0,00	0,00	515.919.017.503,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	1.762.614.280,00	65.994.404.798,00	5.725.113.852,00	0,00	0,00	249.530.350,00	0,00	73.731.663.280,00
JUMLAH	**2.642.887.410,00**	**14.211.246,00**	**43.858.644.178,00**	**659.562.936.210,00**	**105.162.205.317,00**	**94.272.809.699,00**	**984.970.242,00**	**5.139.880.167,00**	**3.561.363.676,00**	**915.199.908.145,00**

Lampiran D.12

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I Tahun 2022 (*Audited*)

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	SEKJEN	ITJEN	DJPD	DJPL	DJPU	DJKA	BKT	BPSDM	BPTJ	KONSOL	Kementerian
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	15.724.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724.532,00
beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	2.267.524.694,00	65.808.730.053,00	974.454.518,00	0,00	0,00	1.485.963.994,00	29.854.000,00	0,00	70.566.527.259,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	0,00	22.034.496,00	847.036.638,00	3.988.125.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857.196.952,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	447.717.538,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00	2.263.022.469,00	0,00	4.901.264,00	0,00	0,00	2.716.114.571,00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	**463.442.070,00**	**0,00**	**2.289.559.190,00**	**66.655.766.691,00**	**4.963.053.636,00**	**2.263.022.469,00**	**0,00**	**1.490.865.258,00**	**29.854.000,00**	**0,00**	**78.155.563.314,00**

Lampiran E.1 Rekap Penjelasan Selisih Transfer Keluar - Transfer Masuk Tahun Anggaran 2022

Rekap Penjelasan Selisih Transfer Keluar - Transfer Masuk Tahun Anggaran 2022

KODE	ESELON I	TOTAL TRANSFER KELUAR (RP)	TOTAL TRANSFER MASUK (RP)	SELISIH (RP)	PENJELASAN			
					KETERANGAN	JUMLAH		Jumlah
						Selisih Transfer Keluar	Selisih Transfer Masuk	
TRANSFER KELUAR-TRANSFER MASUK ANTAR ESELON I KEMENHUB								
01	Sekretariat Jenderal	149.713.358.560,00	(304.139.122,00)	149.409.219.438,00	*Transfer Keluar kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	148.397.263.243,00		
					Transfer Keluar dari Mahkamah Pelayaran ke Direktorat Bina Penataan Bangunan	1.037.554.195		
					Transfer Masuk dari Kanpus Ditjen Hubla kepada Perwakilan Kemenhub Singapura		25.598.000	
					Jumlah	**149.434.817.438,00**	**25.598.000**	**149.409.219.438,00**
02	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	**Jumlah**			**0,00**
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.289.851.415.913,00	(1.328.479.021.155,00)	38.627.605.424,00	*Transfer Keluar Alih Status Rak Parkiran Sepeda Listrik dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan ke 17 Kementerian di Liingkungan Jakarta Pusat	36,400,000,00		
					*Transfer Keluar berupa Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada 6 Kampus di Lingkungan Kemendikbud	2.674.245.523,00		

KODE	ESELON I	TOTAL TRANSFER KELUAR (RP)	TOTAL TRANSFER MASUK (RP)	SELISIH (RP)	PENJELASAN			
					KETERANGAN	JUMLAH		Jumlah
						Selisih Transfer Keluar	Selisih Transfer Masuk	
					* Transfer Keluar berupa Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada 2 Kampus di Lingkungan Kemenag	649.804.537,00		
					*Transfer Keluar Blangko Tilang dari Direktorat Lalu Lintas Jalan kepada BPTJ	37.475.000,00		
					* Transfer Keluar Pelabuhan Penyeberangan Bahaur dari BPTD Wilayah XVI Prov. Kalimantan Tengah kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Pisang	35.229.680.182,00		
					Jumlah	**38.627.605.242,00**		**38.627.605.242,00**
04	Ditjen Perhubungan Laut	355.790.940.904,00	(397.562.262.694,00)	(41.711.321.790,00)	*Transfer Keluar ke KSOP Samarinda kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok	253.000.000,00		
					*Transfer Keluar ke Perwakilan Kementerian Perhubungan Di Singapura	25.598.000,00		
					*Transfer Masuk dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI		35.229.680.182,00	

KODE	ESELON I	TOTAL TRANSFER KELUAR (RP)	TOTAL TRANSFER MASUK (RP)	SELISIH (RP)	PENJELASAN			
					KETERANGAN	JUMLAH		Jumlah
						Selisih Transfer Keluar	Selisih Transfer Masuk	
					*Transfer Masuk dari KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK		253.000.000,00	
					*Transfer Masuk dari KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUPANG		581.158.170,00	
					*Transfer Masuk dari KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC LABUAN BAJO		5.347.439.681,00	
					*Transfer Masuk dari KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PANTOLOAN		418.348.757,00	
					*Transfer Masuk dariKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SIBOLGA		220.293.000,00	
					Jumlah	**278.598.000,00**	**42.049.919.790,00**	**(41.771.321.790,00)**
05	Ditjen Perhubungan Udara	234.297.859.930,00	(383.596.800.279,00)	(149.298.940.349,00)	*Transfer Keluar berupa alat pemancar pesawat sebesar Dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan kepada Poltekbang Medan	995.962.725,00		
					*Transfer Masuk berupa helikopter		150.294.903.074,00	

KODE	ESELON I	TOTAL TRANSFER KELUAR (RP)	TOTAL TRANSFER MASUK (RP)	SELISIH (RP)	PENJELASAN			
					KETERANGAN	JUMLAH		Jumlah
						Selisih Transfer Keluar	Selisih Transfer Masuk	
					dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) ke BBKFP			
					Jumlah	**995.962.725,00**	**150.294.903.074,00**	**(149.298.940.349,00)**
08	Ditjen Perkeretaapian	18.504.826.261.197,00	(18.504.583.601.497,00)	242.659.700,00	*Transfer Keluar ke PPI Madiun berupa Barang Konsumsi, Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			**242.659.700,00**
					Jumlah	**242.659.700,00**	**0,00**	**242.659.700,00**
11	Badan Kebijakan Transportasi	0,00	0,00	0,00			**Jumlah**	**0,00**
12	Badan PSDM Perhubungan	154.592.916.313,00	150.697.967.367,00	3.894.948.946,00	*Transfer Masuk dari Kantor Pusat Setjen berupa Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Software, dan Hasil Kajian kepada PTDI-STTD		148.397.263.243,00	
					*Transfer Masuk dari BBKFP ke Poltekbang Medan berupa Suku Cadang		995.962.725,00	
					*Transfer Keluar dari PPI Curug kepada BBKFP berupa Helikopter (Peralatan & Mesin)	149.592.976.125,00		

KODE	ESELON I	TOTAL TRANSFER KELUAR (RP)	TOTAL TRANSFER MASUK (RP)	SELISIH (RP)	PENJELASAN			
					KETERANGAN	JUMLAH		Jumlah
						Selisih Transfer Keluar	Selisih Transfer Masuk	
					* Transfer Keluar dari PPI Curug kepada BBKFP berupa Suku Cadang Helikopter	701.926.949,00		
					*Transfer Masuk dari PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN kepada PPI Madiun berupa barang konsumsi		242.659.700,00	
					*Transfer keluar kepada LANUD SRI MULYONO HERLAMBANG dari Poltekbang Palembang gedung dan bangunan)	1.178.061.540,00		
					*Transfer keluar kepada LANUD SRI MULYONO HERLAMBANG dari Poltekbang Palembang (Aset Tetap Renovasi)	2.057.870.000,00		
					Jumlah	**153.530.834.614,00**	**149.635.885.668,00**	**3.894.948.946,00**
13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	(37.475.000,00)	(37.475.000,00)	Transfer Masuk Blangko Tilang dari Direktorat Lalu Lintas Jalan kepada BPTJ		37.475.000,00	
					Jumlah		**37.475.000,00**	**(37.475.000,00)**
JUMLAH		**20.727.390.219.775,00**	**20.726.323.523.588,00**	**1.066.696.187,00**	**Jumlah**	**343.110.477.719,00**	**342.043.781.532,00**	**1.066.696.187,00**

Lampiran F.1. Capaian *Output* Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dengan nilai di atas Rp50 Miliar

No	Kode *Output* Strategis		Uraian *Output*	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi *Volume* Keluaran	Progres Capaian *Output*
1	GA	4659.QAH.001	Layanan Angkutan Laut Perintis	1.650.144.032.000	1.269.175.586.283	76,91	231 layanan	245,46 layanan	106,26
2	GA	4645.CBE.005	Pembangunan Bandar Udara	573.569.883.000	573.569.883.000	100,00	1 unit	1 unit	100,00
3	GA	4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	469.434.657.000	468.433.589.465	99,79	3 layanan	3 layanan	100,00
4	GA	4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	404.204.054.000	404.204.053.300	100,00	77,29 km	77,29 km	100,00
5	GA	4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	389.346.300.000	389.346.300.000	100,00	66 km	66 km	100,00
6	GA	4637.RBP.022	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	657.673.418.000	317.084.616.627	48,21	11 Unit	8,64 Unit	78,55
7	GA	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	314.611.691.000	314.611.659.888	100,00	13,09 km	13,09 km	100,00
8	GA	4643.RBA.005	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	283.483.213.000	283.320.484.838	99,94	178,8 km	178,8 km	100,00
9	GA	4643.RBA.012	Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai	280.448.196.000	278.611.820.334	99,35	6,8 km	6,8 km	100,00
10	GA	4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	239.673.621.000	239.670.162.616	100,00	26,8 km	26,8 km	100,00
11	GA	4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	216.477.037.000	216.477.032.438	100,00	53,5 km	53,5 km	100,00
12	GA	4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan	186.972.428.000	186.347.096.387	99,67	385 Unit	371 Unit	96,36
13	GA	4641.RBA.005	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Haurpugur - Cicalengka	178.109.468.000	178.109.462.698	100,00	9,08 km	9,08 km	100,00
14	GA	4641.RBA.003	Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap I (Kisaran - Mambangmuda)	176.955.014.000	176.955.013.358	100,00	64,4 km	64,4 km	100,00
15	GA	4641.RBA.008	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan - Kalioso	164.950.779.000	164.947.739.391	100,00	1,83 km	1,83 km	100,00
16	GA	4638.RBP.032	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe-A	136.617.007.000	136.580.964.817	99,97	6 Unit	6,4 Unit	106,67
17	GA	4641.CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	119.979.359.000	119.715.101.512	99,78	0,101 km	1,001 km	991,09
18	GA	4642.CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	118.698.704.000	118.683.406.986	99,99	0,04 km	0,04 km	100,00
19	GA	4641.RBA.007	Peningkatan Sistem Telekomunikasi dan Hubungan Blok Lintas Lahat - Lubuklinggau	100.767.990.000	100.195.154.035	99,43	114,289 km	23,369 km	20,45
20	GA	4639.RAC.053	Pengadaan Perlengkapan Jalan	92.987.059.000	92.363.666.353	99,33	174 Unit	175,932 Unit	101,11
21	GA	4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	91.627.616.000	91.627.611.079	100,00	2,453 km	0,5009 km	20,42
22	GA	4641.RBA.025	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro	90.804.445.000	90.804.444.901	100,00	3,42 km	2,308 km	67,49
23	GA	4638.RBP.032	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe-A	87.635.555.000	87.629.389.935	99,99	9 Unit	9 Unit	100,00
24	GA	4641.RBA.002	Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I (Medan - Labuan)	92.079.000.000	86.033.136.040	93,43	22,9 km	22,9 km	100,00
25	GA	4638.RBP.153	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tj Api-Api	68.526.568.000	68.526.568.000	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00
26	GA	4639.CAC.052	Perlengkapan Jalan	68.207.656.000	67.976.708.843	99,66	42 Unit	41 Unit	97,62
27	GA	4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	67.686.441.000	67.181.393.463	99,25	37 layanan	39 layanan	105,41
28	GA	4638.CDP.043	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	122.751.509.000	61.395.811.370	50,02	7 Unit	7 Unit	100,00
29	GA	4637.RAC.013	Kapal Penyeberangan Perintis	59.270.532.000	59.270.531.050	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00
30	GA	4637.RBP.022	Pelabuhan Penyeberangan	56.165.434.000	56.165.358.080	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00

Lampiran F.2 - Rincian Major Project Tahun 2022

MP 10 Destinasi Pariwisata

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas termasuk supervisi - Provinsi Jawa Tengah	0.55 km	Provinsi Jawa Tengah	27,00%	16.498.441.000	100,00	Penertiban lahan telah selesai dan paket kegiatan konstruksi telah berkontrak pada September 2022
2.	Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap I (Kisaran - Mambangmuda) - Provinsi Sumatera Utara	64.4 km	Provinsi Sumatera Utara	65,00%	176.955.014.000	100,00	Kontrak tahun jamak 2022-2024
3.	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres - Kota Surakarta	3.5 km	Kota Surakarta	100,00%	115.087.712.000	99,81	Telah dilakukan pengoperasian KRL sampai Palur pada Agustus 2022
4.	Pembangunan Pelabuhan Silalahi Tahap II - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	100,00%	4.923.327.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
5.	Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap II - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	100,00%	14.457.155.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
6.	Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap III - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	100,00%	30.990.978.000	99,92%	Kegiatan telah selesai
7.	Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III – Pusat	1 Unit	Pusat	47,99%	9.956.540.000	100,00%	DJPD-BPTD Sumut: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 6.814.206.000
8.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu Tahap II - SBSN - Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	Provinsi Sulawesi Tenggara	100,00%	33.380.154.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
9.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua Tahap II - SBSN - Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	Provinsi Sulawesi Tenggara	100,00%	34.431.350.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
10.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	100,00%	47.229.950.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
11.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	87,76%	64.639.760.000	100,00%	DJPD-BPTD Papua-Pabar: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 3.126.445.717
12.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	86,00%	58.087.400.000	100,00%	DJPD-BPTD Papua-Pabar: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 8.834.759.220

MP 10 Destinasi Pariwisata

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
13.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap IV - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	100,00%	10.000.000.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
14.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap III - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	100,00%	10.000.000.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
15.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tanjung Pinggir - SBSN (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	90,62%	30.626.761.000	100,00%	DJPD-BPTD Sumut: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 1.738.013.143
16.	Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Utara	1 Unit	Kab. Minahasa Utara	95,50%	29.079.563.000	100,00%	DJPD-BPTD Sulut: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 1.738.013.143
17.	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang - Kab. Minahasa Utara	1 unit	Kab. Minahasa Utara	97,54%	25.000.000.000	99,05	-
18.	Perkuatan Dermaga Pelabuhan Wanci - Kab. Wakatobi	1 unit	Kab. Wakatobi	100,00%	68.000.000.000	97,44	-
19.	Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN - Kab. Toba	1 unit	Kab. Toba	100,00%	56.614.512.000	99,61%	-
20.	Pengembangan Bandar Udara Dewadaru - PN - Kab. Jepara	1 unit	Kab. Jepara	100,00%	53.433.500.000	99,80%	-
21.	Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN - Kota Sorong	1 unit	Kota Sorong	100,00%	23.176.444.000	99,90%	-
22.	Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional – Pusat	4 Rekomendasi Kebijakan	Pusat	-	-	-	Sebanyak 4 kegiatan masuk di dalam Program Riset dan Inovasi IPTEK, yang saat ini posisinya telah dialihkan ke BRIN (baik kegiatan dan anggaran). Berdasarkan BA Notulensi Rapat 2 Pihak Kemenhub dan BRIN pada tanggal 23 Juni 2022, dokumen DIPA penetapan kegiatan sudah tidak ada, dan Surat DJA Kemenkeu terkait Pengesahan Revisi Anggaran Balitbang TA 2022 (revisi IV) tanggal 3 Agustus 2022.

MP 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas termasuk supervisi - Provinsi Jawa Tengah	0.55 km	Provinsi Jawa Tengah	27,00%	16.498.441.000	100,00	Penertiban lahan telah selesai dan paket kegiatan konstruksi telah berkontrak pada September 2022
2.	Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani - Pusat	3 unit	Pusat	*Paket Konsultansi : 79,1%* *Donggala : 66,83%* *Pantoloan : 100%* *Wani : 56,82%*	246.716.176.026	*100,00*	Kegiatan telah selesai
3.	Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Back Up Area Pelabuhan Patimban - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Saluran Drainase dan Outer Road : 90,27% Gerbang Masuk, Gate I dan Gate II : 80,27%	84.724.138.000,00	*86,16*	terdiri dari 2 (dua) paket : • Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Wilayah Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen II • Pembangunan Gerbang Masuk Gate I dan Gate II Pelabuhan Patimban
4.	Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Pkt 1 : 100% Pkt 2 : 100% Pkt 3 : 100% Pkt 8 : 69,45%	293.849.340.000	*100,00*	• 3 paket konstruksi sudah mencapai 100% (Paket 1, Paket 2 dan Paket 3) • 1 paket masih berjalan
5.	Patimban Port Development Project Phase (I-2) - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Pkt 5 : Kontrak tgl 30 Des 2022 Pkt 6 : dalam Proses Persiapan	621.079.100.000	*97,20*	-
6.	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu	1 unit	Kota Palu	Paket CS 1 : 83,50% Paket CW1: 73,687% Paket CW 2 : 65,069%	242.000.000.000	99,19%	Percepatan Penarikan 100 M
7.	Pengembangan Bandar Udara Babo - PN - Kab. Teluk Bintuni	1 unit	Kab. Teluk Bintuni	100,00%	2.021.059.000	100,00%	Kegiatan telah selesai

MP Pengembangan Kota Baru

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	100,00%	47.229.950.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
2.	Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN - Kota Sorong	1 unit	Kota Sorong	100,00%	23.176.444.000	99,90%	-
3.	Pengembangan Bandar Udara Kuabang Kao - PN - Kab. Halmahera Utara	1 unit	Kab. Halmahera Utara	100,00%	37.000.000.000	100,00%	Kegiatan telah selesai

MP Ibu Kota Negara

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara - Pusat	8 Rekomendasi Kebijakan	Pusat	-	-	-	Sebanyak 8 kegiatan masuk di dalam Program Riset dan Inovasi IPTEK, yang saat ini posisinya telah dialihkan ke BRIN (baik kegiatan dan anggaran). Berdasarkan BA Notulensi Rapat 2 Pihak Kemenhub dan BRIN pada tanggal 23 Juni 2022, dokumen DIPA penetapan kegiatan sudah tidak ada, dan Surat DJA Kemenkeu terkait Pengesahan Revisi Anggaran Balitbang TA 2022 (revisi IV) tanggal 3 Agustus 2022.

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru) - Provinsi Sulawesi Selatan	59.6 km	Provinsi Sulawesi Selatan	100,00%	283.483.213.000	99,94	• Rincian progres per-segmen antara lain : Barru – Palanro 100%, Barru – Pangkep 100%, Pangkep-Maros 100%, Akses Garongkong 100%, Akses Mangilu 100%, Siding Mangilu – Tonasa 85% • Telah dilaksanakan pengoperasian terbatas lintas St.Garongkong-St.Maros pada 30 November 2022)
2.	Subsidi Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang	1 layanan	Kota Palembang	100,00%	122.749.857.000	100,00	• Dilakukan upaya peningkatan okupansi melalui program Edu-Trip. • Operasi sesuai ketentuan protokol kesehatan • Telah terealisasi 100%
3.	Subsidi Perintis lintas Kertapati - Indralaya - Kab. Ogan Ilir	1 layanan	Kab. Ogan Ilir	100,00%	427.080.000	99,98	Telah terealisasi 100%
4.	Subsidi Perintis KA Makassar - Parepare - Pusat	1 layanan	Pusat	100,00%	31.119.982.000	86,81	Telah dilaksanakan uji coba operasi KA Perintis Makassar-Parepare pada 28 Oktober 2022
5.	Pembangunan Dermaga Bedugul Tabanan Tahap V - Provinsi Bali	1 Unit	Provinsi Bali	100,00%	4.345.374.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
6.	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional) - Pusat	16 layanan	Pusat	100,00%	589.241.164.000	99,26%	Selesai
7.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-Alang Lebar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	Provinsi Sumatera Selatan	100,00%	2.109.263.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
8.	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) - Pusat	10 Unit	Pusat	100,00%	2.757.163.000	100,00%	Kegiatan telah selesai

MP Pemulihan Pasca Bencana

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani - Pusat	3 unit	Pusat	*Paket Konsultansi : 79,1%* *Donggala : 66,83%* *Pantoloan : 100%* *Wani : 56,82%*	246.716.176.026	*100,00*	-
2.	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu	1 unit	Kota Palu	Paket CS 1 : 83,50% Paket CW1: 73,687% Paket CW 2 : 65,069%	242.000.000.000	99,19%	Percepatan Penarikan 100 M

MP Sistem Angkutan Umum Massal

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat - Kab. Bogor	1 Unit	Kab. Bogor	94,92%	14.133.349.000	100,00%	Terlaksananya pekerjaan yang menghubungkan antara Staisun Bojonggede ke Terminal Bojonggede yang terdiri dari pekerjaan berikut: • Telah terbangunnya Entrance terminal • Telah terbangunnya Entrance stasiun • Telah terbangunan koridor penghubung sepanjang 243m. Saat ini sedang dilakukan penyelesaian pengecoran dan pemasangan atap Koridor penghubung Percepatan pekerjaan finishing saat ini: • percepatan penyelesaian pekerjaan finishing pengecoran koridor penghubung pada pilar 14 ke pilar 15 dan pemasangan atap koridor. • Telah dilakukan pemasangan cincin koridor pada pilar 1 s.d pilar 9, saat ini sedang dilakukan penyelesaian pekerjaan finishing untuk pemasangan cincin koridor pada pilar 10 s.d pilar 15 • Sedang dilakukan pekerjaan finishing pengecoran peron penghubung ke stasiun Bojonggede • Sedang dilakukan pengerjaan finishing entrance terminal • Sedang dilakukan pengerjaan finishing entrance stasiun
2.	Stasiun Kereta Api Jabodetabek - Kab. Bogor	1 Unit	Kab. Bogor	100,00%	14.352.598.000	100,00%	Telah terlaksananya pembangunan Stasiun Pondok Rajeg tahap 1 dengan lingkup pekerjaan yaitu sebagai berikut : • Pekerjaan Angkat Track Jalan KA (untuk memenuhi persyaratan emplasemen 1.15 permil dan di lintas 9.5 permil) • Pekerjaan penyesuaian ketinggian jaringan LAA • Pekerjaan Struktur Peron (peron sepanjang 240 meter untuk memenuhi SF 12 Kereta) • Pekerjaan Struktur Bawah Gedung Stasiun
3.	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Haurpugur - Cicalengka - Provinsi Jawa Barat	9.08 km	Provinsi Jawa Barat	28,00%	178.109.468.000	100,00	Kontrak tahun jamak 2022-2024

MP Sistem Angkutan Umum Massal

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
4.	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur - Kab. Bandung	13.09 km	Kab. Bandung	100,00%	314.611.691.000	100,00	Kegiatan telah selesai
5.	Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I (Medan - Labuan) - Kota Medan	22.9 km	Kota Medan	82,00%	92.079.000.000	100,00	• Kontrak tahun jamak 2022-2023 • Progress on shcedule dan tidak ada kendala berarti di lapangan
6.	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I - Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	Pusat	76,00%	72.940.000.000	100,45	Tender Document Fase I Stage I akan difinalisasi pada Februari 2023, dimana pengadaan untuk Stage I diharapkan dilakukan pada pertengahan 2023.
7.	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota - Pusat	77 km	Pusat	90,00%	404.204.054.000	100,00	Kontrak tahun jamak 2021-2023
8.	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I - Provinsi DKI Jakarta	1 km	Provinsi DKI Jakarta	68,00%	44.861.367.000	88,59	APBN - PHLN
9.	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) - Provinsi DKI Jakarta	1 km	Provinsi DKI Jakarta	76,00%	264.235.561.000	100,00	Telah dilaksanakan Switch Over 6 pada 9 s.d 10 Desember 2022
10.	Surabaya Regional Railway Line (Phase I) - Provinsi Jawa Timur	27 km	Provinsi Jawa Timur	0%	100.000.000	0,00	Proses penyelesaian revisi Andalalin dan proses penyiapan Loan Agreement.
11.	Penertiban Lahan untuk Pembangunan Jalan KA antara Medan - Binjai - Kota Medan	1 km	Kota Medan	100,00%	27.500.000.000	100,00	Telah terealisasi 100%
12.	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II - Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00%	200.000.000	0,00	• Proses penetapan/persetujuan trase • Direncanakan pelaksanaan kegiatan pada 2023
13.	Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai - Kota Medan	6.8 km	Kota Medan	14,00%	280.448.196.000	99,35	MYC 2022-2024
14.	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional) - Pusat	16 layanan	Pusat	100,00%	589.241.164.000	99,26%	Kegiatan telah selesai

MP Sistem Angkutan Umum Massal

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
15.	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional) - Pusat	2 Unit	Pusat	2,77%	50.000.000.000	2,77%	DJPD-Dit. AJ: Penyerapan tidak dapat dilakukan 100% dikarenakan Loan Agreement yang baru ditandatangani pada 29 Juni 2022 dan Effective pada 21 September 2022. Proses lelang ICB (lelang internasional terbuka) membutuhkan waktu yang panjang dan harus menunggu evaluasi dan persetujuan dari World Bank di setiap tahapannya. Proses lelang ICB (lelang internasional terbuka) membutuhkan waktu yang panjang dan harus menunggu evaluasi dan persetujuan dari World Bank di setiap tahapannya sehingga mengakibatkan tidak terkejarnya berkontrak di Desember 2022.

MP Wilayah Adat Papua

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	100,00%	47.229.950.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
2.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	87,76%	64.639.760.000	100,00%	DJPD-BPTD Papua-Pabar: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 3.126.445.717
3.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	1 Unit	Provinsi Papua Barat	86,00%	58.087.400.000	100,00%	DJPD-BPTD Papua-Pabar: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 8.834.759.220
4.	Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN - Kota Sorong	1 unit	Kota Sorong	100,00%	23.176.444.000	99,90%	-
5.	Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN - Kab. Jayawijaya	1 unit	Kab. Jayawijaya	100,00%	107.000.000.000	96,11%	-
6.	Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN - Kab. Pegunungan Arfak	1 unit	Kab. Pegunungan Arfak	100,00%	10.311.605.000	96,15%	-
7.	Pengembangan Bandar Udara Agandugume - PN - Kab. Puncak	1 unit	Kab. Puncak	-	-	-	Pengurangan pagu blokir Automatic Adjustment sesuai Surat DJA No S-939/AG/AG.3/2022 tgl 8 Des 2022
8.	Pengembangan Bandar Udara Rendani - PN - Kab. Manokwari	1 unit	Kab. Manokwari	100,00%	92.647.202.000	99,76%	-

MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru - PN - Kab. Nabire	1 unit	Kab. Nabire	100,00%	79.392.664.000	99,99%	-
2.	Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN - Kab. Jayawijaya	1 unit	Kab. Jayawijaya	100,00%	107.000.000.000	96,11%	-
3.	Pengembangan Bandar Udara Agandugume - PN - Kab. Puncak	1 unit	Kab. Puncak		0		Pengurangan pagu blokir Automatic Adjustment sesuai Surat DJA No S-939/AG/AG.3/2022 tgl 8 Des 2022
4.	Pengembangan Bandar Udara Kepi III - PN - Kab. Mappi	1 unit	Kab. Mappi	Pengembangan sisi udara 100% Pengembangan sisi darat 75%	100.500.000.000	99,91%	Pekerjaan pengembangan sisi darat akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan.
5.	Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) - Kab. Mimika	1 layanan	Kab. Mimika	100,00%	12.115.201.000	99,98%	-
6.	Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Boven Digoel	4 layanan	Kab. Boven Digoel	89,52%	3.359.151.000	99,93%	Terdapat sisa 28 penerbangan yang tidak tercapai karna tidak tersedianya barang
7.	Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Mimika	9 layanan	Kab. Mimika	100,00%	25.985.302.000	99,96%	-
8.	Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo	10 layanan	Kab. Yahukimo	100,00%	10.269.593.000	99,93%	-
9.	Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	11 layanan	Kab. Pegunungan Bintang	95,83%	27.013.210.000	99,33%	Terdapat sisa 26 penerhangan yang tidak tercapai karna tidak tersedianya harang
10.	Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Boven Digoel	216 layanan	Kab. Boven Digoel	97,29%	765.386.000	97,29%	-
11.	Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo	651 layanan	Kab. Yahukimo	100,00%	1.398.199.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
12.	Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	491 layanan	Kab. Pegunungan Bintang	100,00%	3.437.104.000	99,89%	-

MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
13.	Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN - Kab. Boven Digoel	1 unit	Kab. Boven Digoel	100,00%	1.808.000.000	99,76%	-
14.	Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - PN - Kab. Mimika	1 unit	Kab. Mimika	100,00%	20.665.000.000	99,75%	-
15.	Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN - Kab. Yahukimo	1 unit	Kab. Yahukimo	100,00%	10.000.000.000	99,96%	-

MP Kereta Api Makassar-Pare-Pare

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Subsidi Perintis KA Makassar - Parepare - Pusat	1 layanan	Pusat	100,00%	31.119.982.000	86,81	Telah dilaksanakan uji coba operasi KA Perintis Makassar-Parepare pada 28 Oktober 2022
2.	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - Kota Makassar	0.1 km	Kota Makassar	100,00%	52.987.193.000	98,23	Telah terealisasi 100%

MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta - Surabaya - Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00%	1.500.000.000	99,50	- Telah dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama swakelola tipe II dengan UGM pada tanggal 26 Agustus 2022 - Penyusunan draft laporan akhir oleh pihak UGM

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Back Up Area Pelabuhan Patimban - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Saluran Drainase dan Outer Road : 90,27% Gerbang Masuk, Gate I dan Gate II : 80,27%	84.724.138.000,00	*86,16*	terdiri dari 2 (dua) paket : • Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Wilayah Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen • Pembangunan Gerbang Masuk Gate I dan Gate II Pelabuhan Patimban
2.	Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Pkt 1 : 100% Pkt 2 : 100% Pkt 3 : 100% Pkt 8 : 69,45%	293.849.340.000	*100,00*	3 paket konstruksi sudah mencapai 100% (Paket 1, Paket 2 dan Paket 3) 1 paket masih berjalan
3.	Patimban Port Development Project Phase (I-2) - Kab. Subang	1 unit	Kab. Subang	Pkt 5 : Kontrak tgl 30 Des 2022 Pkt 6 : dalam Proses Persiapan	621.079.100.000	*97,20*	-
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	2 layanan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	95,00%	27.021.709.000	*90,78*	Sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pembayaran dengan bank garansi.

MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Termasuk Supervisi) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	85,00%	31.912.525.000	100,00%	DJPD-BPTD NTT Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 1.570.491.600
2.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi) - Provinsi Kalimantan Barat	1 Unit	Provinsi Kalimantan Barat	0,00%	5.000.000.000	0,00%	DJPD-BPTD Kalbar Penyedia tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022
3.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw - Provinsi Papua	1 Unit	Provinsi Papua	98,38%	31.122.136.000	100,00%	DJPD-BPTD Papua & Pabar Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp 3.131.433.270
4.	Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN - Kab. Nunukan	1 unit	Kab. Nunukan	100,00%	11.973.945.000	99,95%	-

MP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan Transportasi

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	8400 Orang	Kab. Aceh Besar	100,00%	13.563.800.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	250 Orang	Kab. Banyuwangi	100,00%	625.000.000	99,99	-
3.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi	700 Orang	Kab. Bekasi	100,00%	2.100.000.000	92,49	Telah dilaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi jumlah peserta sesuai target sebesar 700 orang
4.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Gianyar	2275 Orang	Kab. Gianyar	100,00%	5.196.568.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
5.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	5280 Orang	Kab. Gowa	125,85%	14.035.382.000	100,00	-
6.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Mempawah	1600 Orang	Kab. Mempawah	100,00%	4.800.000.000	97,24	Kegiatan telah selesai
7.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan	3447 Orang	Kab. Minahasa Selatan	100,00%	7.673.100.000	100,00	Kegiatan telah selesai
8.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Musi Banyuasin	300 Orang	Kab. Musi Banyuasin	100,00%	900.000.000	99,98	Kegiatan telah selesai
9.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman	3600 Orang	Kab. Padang Pariaman	100,00%	7.294.500.000	98,04	-
10.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	900 Orang	Kab. Tangerang	75,60%	2.250.000.000	99,10	-
11.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	765 Orang Setelah refocusing mjd 956	Kab. Tangerang	100,00%	1.912.500.000	99,96	-
12.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Utara	13700 Orang	Kota Administrasi Jakarta Pusat	144,32%	12.130.408.000	99,77	-

MP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan Transportasi

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
13.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Selatan	510 Orang	Kota Administrasi Jakarta Selatan	117,65%	1.583.033.000	99,52	-
14.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	1000 Orang	Kota Jayapura	101,00%	2.500.000.000	99,93	-
15.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun	720 Orang	Kota Madiun	100,00%	2.160.000.000	99,98	DPM TELAH SELESAI
16.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Makassar	5688 Orang	Kota Makassar	103,45%	13.817.342.000	100,00	-
17.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	900 Orang	Kota Makassar	100,00%	2.250.000.000	99,99	-
18.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan	492 Orang	Kota Medan	101,63%	1.230.000.000	100,00	-
19.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	400 Orang	Kota Palembang	100,00%	1.000.000.000	98,01	-
20.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Semarang	5675 Orang	Kota Semarang	100,00%	11.482.232.000	99,83	Kegiatan Telah Dilaksanakan
21.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Sorong	3600 Orang	Kota Sorong	100,00%	7.142.994.000	99,99	Kegiatan Telah Dilaksanakan
22.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	9555 Orang	Kota Surabaya	114,55%	19.410.914.000	99,22	-
23.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	680 Orang	Kota Surabaya	100,00%	1.700.000.000	98,53	-
24.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - Kota Tangerang	8800 Orang	Kota Tangerang	106,07%	19.573.531.000	100,00	-
25.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal	690 Orang	Kota Tegal	100,00%	2.070.000.000	99,88	Kegiatan DPM Selesai

MP Food Estate

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Dermaga Sei Ijum Kabupaten Kotim Termasuk Supervisi - Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	63,17%	5.915.784.000	100,00%	DJPD-BPTD Kalteng: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 2.091.291.600
2.	Pembangunan Dermaga Basirih dan Bapinang Tahap III Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	54,00%	3.655.770.000	95,73%	DJPD-BPTD Kalteng: Pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan Mekanisme PMK 189 tahun 2022 dengan menerapkan garansi bank dan denda kepada penyedia terhadap keterlambatan. Nilai Bank Garansi sebesar Rp. 1.589.947.000
3.	Pembangunan Dermaga Lupak Dalam Kapuas Kuala termasuk supervisi - Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	100,00%	3.633.053.000	100,00%	Kegiatan telah selesai
4.	Pembangunan Pelabuhan Bahaur - Kab. Pulang Pisau	1 unit	Kab. Pulang Pisau	17,50%	10.000.000.000	*99,94*	Realisasi Keu terhadap Penarikan 2022 sudah 100%Pekerjaan Bahaur termasuk Pekerjaan MYC dengan kontrak pada Agustus, sehingga progres fisik pekerjaan masih sedikit karena masih dalam proses persiapan

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	513 Orang	Kab. Aceh Besar	60,00%	12.490.127.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2.	Diklat Pembentukan Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	83 Orang	Kab. Aceh Besar	299,00%	3.549.371.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
3.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	216 Orang	Kab. Aceh Besar	89,00%	2.762.034.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
4.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	4 Paket	Kab. Aceh Besar	100,00%	6.168.000.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
5.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar	1 unit	Kab. Aceh Besar	100,00%	2.936.918.000	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan
6.	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	12 Orang	Kab. Banyuwangi	100,00%	627.780.000	99,95	Kegiatan Telah Dilaksanakan
7.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	150 Orang	Kab. Banyuwangi	94,00%	13.741.275.000	99,90	-
8.	Diklat Pembentukan Non Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	12 Orang	Kab. Banyuwangi	383,00%	29.295.656.000	99,99	Realisasi anggaran dari kegiatan pada komponen Dukungan Penyelenggaraan Diklat
9.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	2 Paket	Kab. Banyuwangi	100,00%	8.187.496.000	100,0	Kegiatan Telah Dilaksanakan
10.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi	1 unit	Kab. Banyuwangi	100,00%	9.288.679.000	100,0	Kegiatan Telah Dilaksanakan
11.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi	3585 Orang	Kab. Bekasi	88,15%	82.491.254.000	99,60	Telah diwisuda 807 taruna dan diterima 907 taruna baru
12.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi	1 Paket	Kab. Bekasi	100,00%	6.500.000.000	99,99	Kegiatan sudah terealisasi 100%
13.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi	2 unit	Kab. Bekasi	0,00%	46.511.297.000	98,08	Gedung Asrama Maleo dan Rajawali telah selesai direnovasi
14.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Gianyar	456 Orang	Kab. Gianyar	97,50	14.264.104.000	93,01	-
15.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Gianyar	2 paket	Kab. Gianyar	100,00%	6.348.100.750	100,00	Kegiatan Telah Dilaksanakan

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
16.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	747 Orang	Kab. Gowa	168,81	44.271.083.000	79,50	-
17.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	1134 Orang	Kab. Gowa	76,71	27.117.349.000	44,29	-
18.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	96 Orang	Kab. Gowa	100%	4.026.391.000	164,10	-
19.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	3 Paket	Kab. Gowa	66,67	3.500.000.000	30,53	-
20.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Gowa	2 unit	Kab. Gowa		720.261.000	0,00	*Automatic Adjustment*
21.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Mempawah	480 Orang	Kab. Mempawah	100,00%	14.106.827.000	95,86	Kegiatan sudah dilaksanakan
22.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan	234 Orang	Kab. Minahasa Selatan	98,29%	5.019.600.000	49,83	Kegiatan sedang berlangsung
23.	Diklat Pembentukan Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan	72 Orang	Kab. Minahasa Selatan	100,00%	1.911.400.000	33,94	Kegiatan sedang berlangsung
24.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan	120 Orang	Kab. Minahasa Selatan	99,17%	5.093.000.000	25,13	Kegiatan sedang berlangsung
25.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa selatan	1 unit	Kab. Minahasa Selatan	46,96%	47.884.989.000	100,00	Kegiatan sedang berlangsung
26.	Layanan Prasarana Internal - Kab. Minahasa selatan	1 Paket	Kab. Minahasa Selatan	97,80%	11.213.618.000	100,00	Kegiatan sudah selesai
27.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Musi Banyuasin	226 Orang	Kab. Musi Banyuasin	66,37%	5.001.868.000	99,99	Kegiatan sudah dilaksanakan
28.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Musi Banyuasin	676 Orang	Kab. Musi Banyuasin	94,67%	18.347.360.000	99,97	Kegiatan sudah dilaksanakan
29.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	Kab. Musi Banyuasin	100,00%	6.742.423.000	100,00	Kegiatan sudah terealisasi 100%
30.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman	680 Orang	Kab. Padang Pariaman	85,00%	8.913.300.000	97,82	

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
31.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman	240 Orang	Kab. Padang Pariaman	84,58%	8.025.810.000	99,29	-
32.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab.Padang Pariaman	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	100,00%	1.454.512.000	99,69	-
33.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Semarang	721 Orang	Kab. Semarang	79,89%	36.258.446.000	97,59	Kegiatan telah selesai
34.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Semarang	1016 Orang	Kab. Semarang	96,06%	3.721.384.000	98,73	Kegiatan telah selesai
35.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Semarang	596 Orang	Kab. Semarang	108,05%	6.863.356.000	93,03	Kegiatan telah selesai
36.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Semarang	1 Paket	Kab. Semarang	100,00%	24.000.000.000	99,95	Kegiatan telah selesai
37.	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	24 Orang	Kab. Tangerang	91,70%	1.307.990.000	98,80	-
38.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	94 Orang	Kab. Tangerang	100,00%	1.804.663.000	98,97	-
39.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	423 Orang	Kab. Tangerang	49,60%	9.877.170.000	96,81	-
40.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	910 Orang	Kab. Tangerang	122,50%	28.902.522.000	99,21	-
41.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang	2 unit	Kab. Tangerang	0,00%	38.588.317.000	99,98	-
42.	Layanan Sarana Internal - Kab. Tangerang	1 unit	Kab. Tangerang	0,00%	3.706.860.000	99,94	-
43.	Layanan Sarana Internal - Kab. Tangerang	1 unit	Kab. Tangerang	100,00%	2.628.420.000	100,00	-
44.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Utara	1326 Orang	Kota Administrasi Jakarta Utara	62,14%	21.828.275.000	99,49	-
45.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Utara	254 Orang	Kota Administrasi Jakarta Utara	142,91%	4.931.839.000	100,56	-

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
46.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Utara	780 Orang	Kota Administrasi Jakarta Utara	80,51%	34.735.901.000	99,74	-
47.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	Kota Administrasi Jakarta Utara	100,00%	4.280.001.000	100,00	-
48.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura	116 Orang	Kota Jayapura	58,62%	7.254.075.000	99,68	-
49.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura	44 Orang	Kota Jayapura	45,45%	1.123.075.000	99,58	-
50.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura	168 Orang	Kota Jayapura	101,79%	2.896.284.000	99,90	-
51.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura	1 Paket	Kota Jayapura	100,00%	3.525.386.000	100,00	-
52.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura	1 unit	Kota Jayapura	100,00%	6.286.327.000	99,99	-
53.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun	70 Orang	Kota Madiun	280,00%	1.215.200.000	99,97	SIPENCATAR TELASAI SELESAI
54.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun	528 Orang	Kota Madiun	90,15%	8.643.920.000	99,94	SIPENCATAR TELASAI SELESAI
55.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun	1 Paket	Kota Madiun	100,00%	700.000.000	99,65	TELAH SELESAI DILAKSANAKAN
56.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	1090 Orang	Kota Makassar	64,50%	32.526.140.200	100,00	-
57.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	1134 Orang	Kota Makassar	72,31%	23.735.885.000	100,00	-
58.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	528 Orang	Kota Makassar	57,20%	9.449.599.000	100,00	-
59.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	72 Orang	Kota Makassar	97,22%	8.059.158.000	99,93	-
60.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	120 Orang	Kota Makassar	103,33%	2.421.849.000	98,06	-

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
61.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	619 Orang	Kota Makassar	61,71%	9.392.812.000	99,86	-
62.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	1 Paket	Kota Makassar	100,00%	6.690.049.000	100,00	Kegiatan sudah selesai
63.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	2 unit	Kota Makassar	100,00%	60.750.000.000	100,00	Kegiatan sudah selesai
64.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan	22 Orang	Kota Medan	100,00%	508.948.000	99,95	-
65.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan	86 Orang	Kota Medan	50,00%	711.156.000	100,00	-
66.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan	360 Orang	Kota Medan	93,33%	11.492.688.000	99,99	-
67.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	91 Orang	Kota Palembang	71,43	4.203.771.000	100,00	-
68.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	96 Orang	Kota Palembang	100,00%	2.847.809.000	97,01	-
69.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	168 Orang	Kota Palembang	100,00%	4.130.920.000	99,56	-
70.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Sorong	812 Orang	Kota Sorong	70,69%	20.259.791.000	99,82	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan
71.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Sorong	2 Paket	Kota Sorong	100,00%	24.607.288.000	97,81	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan
72.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	691 Orang	Kota Surabaya	89,00%	40.784.918.000	99,61	-
73.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	613 Orang	Kota Surabaya	152,53%	11.613.948.000	100,00	-
74.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	600 Orang	Kota Surabaya	205,83%	12.931.597.000	99,10	-
75.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	431 Orang	Kota Surabaya	33,41%	5.422.983.000	99,83	-

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.0

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
76.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	486 Orang	Kota Surabaya	46,09%	4.098.919.000	99,53	-
77.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	551 Orang	Kota Surabaya	107,80%	17.903.295.000	98,84	-
78.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	1 Paket	Kota Surabaya	100,00%	10.000.000.000	97,32	-
79.	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang	1406 Orang	Kota Tangerang	36,27%	8.091.684.000	99,79	-
80.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang	937 Orang	Kota Tangerang	56,46%	7.162.320.000	100,00	-
81.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang	216 Orang	Kota Tangerang	126,85%	17.510.570.000	100,00	-
82.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang	2 Paket	Kota Tangerang	100,00%	1.995.729.000	100,00	-
83.	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal	82 Orang	Kota Tegal	100,00%	1.545.082.000	100,00	Kegiatan sudah dilaksanakan
84.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal	806 Orang	Kota Tegal	100,00%	18.236.457.000	99,99	Kegiatan sudah dilaksanakan

Lampiran F.3. Pagu dan Realisasi Penanganan COVID-19 per Satker Tahun 2022

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
1	412622	MAHKAMAH PELAYARAN	02201	256.265.000,00	256.197.377,00	99,97%
2	412631	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL	02201	2.653.434.000,00	2.484.566.475,00	93,64%
3	412647	PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI DEN HAAG	02201	4.304.000,00	962.042,00	22,35%
4	412684	PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI SINGAPURA	02201	52.520.000,00	52.483.578,00	99,93%
5	412690	PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI ICAO / MONTREAL	02201	5.715.000,00	5.698.079,00	99,70%
6	412704	PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI IMCO / LONDON	02201	1.799.000,00	1.793.196,00	99,68%
7	412710	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	02201	1.111.702.000,00	1.111.557.817,00	99,99%
8	418878	BIRO HUKUM	02201	346.550.000,00	345.409.122,00	99,67%
9	418879	PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	02201	270.000.000,00	269.975.454,00	99,99%
10	418880	BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	02201	825.869.000,00	825.666.624,00	99,98%
11	466301	BIRO PERENCANAAN SETJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02201	223.831.000,00	223.830.340,00	100,00%
12	466317	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	02201	600.100.000,00	598.629.794,00	99,76%
13	466348	BIRO KEUANGAN	02201	1.021.053.000,00	1.021.051.268,00	100,00%
14	521251	BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	02201	964.569.000,00	964.567.625,00	100,00%
15	649174	PUSAT PENGELOLAANTRANSPORTASI BERKELANJUTAN	02201	917.830.000,00	917.829.076,00	100,00%
16	901274	KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	02201	640.000.000,00	639.899.618,00	99,98%
17	412729	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02202	5.135.945.000,00	5.135.766.114,00	100,00%
18	025734	BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI BEKASI	02203	447.100.000,00	440.214.751,00	98,46%
19	352596	DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN	02203	764.821.000,00	764.811.909,00	100,00%
20	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	02203	486.647.000,00	464.036.347,00	95,35%
21	352598	DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN	02203	1.677.417.000,00	1.677.414.014,00	100,00%
22	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	02203	450.182.000,00	449.891.235,00	99,94%
23	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	02203	1.042.176.000,00	1.042.160.964,00	100,00%
24	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	02203	768.127.000,00	768.126.000,00	100,00%
25	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	02203	1.034.000.000,00	1.033.995.653,00	100,00%
26	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	02203	1.855.628.000,00	1.855.205.152,00	99,98%
27	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	02203	99.721.000,00	99.720.000,00	100,00%
28	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	02203	545.000.000,00	544.743.432,00	99,95%
29	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02203	955.000.000,00	954.978.030,00	100,00%
30	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02203	1.233.860.000,00	1.233.236.241,00	99,95%
31	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02203	6.437.026.000,00	6.436.652.289,00	99,99%
32	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02203	5.265.934.000,00	5.265.781.298,00	100,00%
33	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02203	3.032.252.000,00	3.031.619.007,00	99,98%
34	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	02203	373.000.000,00	372.988.000,00	100,00%
35	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	02203	415.000.000,00	414.920.628,00	99,98%
36	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	02203	279.000.000,00	278.644.610,00	99,87%
37	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	02203	920.922.000,00	920.920.546,00	100,00%
38	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	02203	137.000.000,00	136.927.750,00	99,95%
39	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	02203	287.467.000,00	287.458.000,00	100,00%
40	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	02203	1.072.000.000,00	1.071.940.000,00	99,99%
41	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	02203	1.346.041.000,00	1.346.039.000,00	100,00%
42	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	02203	289.300.000,00	289.190.150,00	99,96%
43	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	02203	1.483.071.000,00	1.483.051.990,00	100,00%
44	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	02203	298.660.000,00	298.660.000,00	100,00%
45	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	02203	412.450.000,00	412.450.000,00	100,00%
46	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	02203	121.389.000,00	121.388.227,00	100,00%
47	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA	02203	2.294.812.000,00	2.294.808.015,00	100,00%
48	412735	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	02203	13.555.314.000,00	13.555.125.822,00	100,00%
49	021140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	02204	125.775.000,00	118.247.334,00	94,01%
50	287101	DISTRIK NAVIGASI PONTIANAK	02204	482.043.000,00	481.952.419,00	99,98%
51	287139	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMPIT	02204	263.905.000,00	263.539.935,00	99,86%
52	287141	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MOLAWE	02204	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00%
53	287143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	02204	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00%
54	287145	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WANCI	02204	30.002.000,00	30.000.000,00	99,99%
55	287147	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LEWOLEBA	02204	250.080.000,00	250.080.000,00	100,00%
56	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	02204	185.022.000,00	184.270.030,00	99,59%
57	287185	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTABARU - BATULICIN	02204	390.577.000,00	390.577.000,00	100,00%
58	287192	DISTRIK NAVIGASI BANJARMASIN	02204	119.319.000,00	118.039.000,00	98,93%
59	287232	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TARAKAN	02204	126.800.000,00	126.688.207,00	99,91%
60	287249	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN NUNUKAN	02204	45.000.000,00	30.389.000,00	67,53%
61	287253	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SANTAN	02204	45.550.000,00	45.328.392,00	99,51%
62	287260	DISTRIK NAVIGASI SAMARINDA	02204	235.150.000,00	234.631.400,00	99,78%
63	287317	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MANADO	02204	275.320.000,00	275.220.000,00	99,96%
64	287321	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GORONTALO	02204	103.400.000,00	96.559.050,00	93,38%
65	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	02204	274.000.000,00	273.725.000,00	99,90%
66	287342	DISTRIK NAVIGASI MANADO/BITUNG	02204	1.065.480.000,00	1.054.910.614,00	99,01%
67	287370	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK PALU	02204	632.900.000,00	619.397.500,00	97,87%
68	287384	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P O S O	02204	256.930.000,00	256.840.000,00	99,96%
69	287391	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN L U W U K	02204	140.250.000,00	140.219.800,00	99,98%
70	287406	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P A R I G I	02204	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00%
71	287469	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	02204	241.100.000,00	240.677.450,00	99,82%
72	287473	DISTRIK NAVIGASI UJUNG PANDANG	02204	1.011.650.000,00	1.011.559.304,00	99,99%
73	287502	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	02204	259.164.000,00	258.871.200,00	99,89%
74	287516	DISTRIK NAVIGASI KENDARI	02204	475.025.000,00	473.204.056,00	99,62%
75	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	02204	65.668.000,00	65.600.000,00	99,90%
76	287541	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE	02204	132.578.000,00	132.578.000,00	100,00%
77	287558	DISTRIK NAVIGASI A M B O N	02204	721.200.000,00	510.255.460,00	70,75%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
78	287579	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN B E N O A	02204	282.751.000,00	277.962.605,00	98,31%
79	287590	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PADANG BAI	02204	57.069.000,00	57.060.420,00	99,98%
80	287612	DISTRIK NAVIGASI B E N O A	02204	484.500.000,00	484.354.320,00	99,97%
81	287626	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CELUKAN BAWANG	02204	109.951.000,00	109.948.107,00	100,00%
82	287647	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA	02204	65.040.000,00	50.040.000,00	76,94%
83	287651	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BADAS	02204	31.480.000,00	30.868.930,00	98,06%
84	287701	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LAURENTIUS SAY	02204	83.850.000,00	83.850.000,00	100,00%
85	287722	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN E N D E	02204	31.600.000,00	31.600.000,00	100,00%
86	287736	DISTRIK NAVIGASI K U P A N G	02204	302.400.000,00	295.315.900,00	97,66%
87	287778	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	02204	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00%
88	287782	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN B I A K	02204	6.000.000,00	-	0,00%
89	287799	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MANOKWARI	02204	50.000.000,00	49.531.990,00	99,06%
90	287804	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SORONG	02204	443.690.000,00	437.989.000,00	98,72%
91	287811	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN FAK-FAK	02204	118.500.000,00	117.392.000,00	99,06%
92	287825	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MERAUKE	02204	64.220.000,00	63.466.470,00	98,83%
93	287892	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S E R U I	02204	11.000.000,00	7.800.000,00	70,91%
94	287900	DISTRIK NAVIGASI JAYAPURA	02204	589.262.000,00	565.063.190,00	95,89%
95	287935	DISTRIK NAVIGASI S O R O N G	02204	256.046.000,00	256.041.000,00	100,00%
96	287956	DISTRIK NAVIGASI MERAUKE	02204	107.090.000,00	105.373.926,00	98,40%
97	288021	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULAU BAAI	02204	137.694.000,00	136.968.970,00	99,47%
98	288841	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN N A B I R E	02204	11.677.000,00	11.675.000,00	99,98%
99	289445	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUSOH	02204	13.075.000,00	13.075.000,00	100,00%
100	289452	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SINGKIL	02204	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00%
101	289470	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN SUSU	02204	173.562.000,00	171.268.787,00	98,68%
102	289534	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BUTON	02204	33.450.000,00	33.363.620,00	99,74%
103	289712	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOTA AGUNG	02204	20.000.000,00	19.187.000,00	95,94%
104	289782	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN B U N	02204	77.225.000,00	71.978.000,00	93,21%
105	289796	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN K U M A I	02204	158.048.000,00	158.028.600,00	99,99%
106	289801	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELUK SIGINTUNG	02204	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00%
107	289818	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SUKAMARA	02204	69.626.000,00	69.618.000,00	99,99%
108	289822	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANGKULIRANG	02204	21.180.000,00	21.167.700,00	99,94%
109	289839	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANGATA	02204	85.778.000,00	85.533.021,00	99,71%
110	289843	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG REDEP	02204	70.143.000,00	70.080.000,00	99,91%
111	289850	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANA PASER	02204	34.774.000,00	34.764.150,00	99,97%
112	289864	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PARE-PARE	02204	63.500.000,00	55.814.050,00	87,90%
113	289871	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BAJOE	02204	54.357.000,00	54.357.000,00	100,00%
114	289885	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULU KUMBA	02204	26.706.000,00	26.614.000,00	99,66%
115	289949	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	02204	93.466.000,00	92.500.000,00	98,97%
116	289953	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ATAPUPU	02204	96.220.000,00	96.220.000,00	100,00%
117	289960	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REO	02204	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
118	289974	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S A R M I	02204	21.081.000,00	8.581.000,00	40,70%
119	289981	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K A I M A N A	02204	60.600.000,00	60.582.500,00	99,97%
120	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	02204	5.092.435.000,00	5.090.155.106,00	99,96%
121	412781	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	02204	369.143.000,00	368.898.147,00	99,93%
122	412797	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SUNDA KELAPA	02204	163.584.000,00	163.028.320,00	99,66%
123	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	02204	194.445.000,00	190.196.450,00	97,82%
124	412817	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CIREBON	02204	60.000.000,00	57.974.887,00	96,62%
125	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	02204	544.220.000,00	541.025.540,00	99,41%
126	412832	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEGAL	02204	111.500.000,00	109.889.445,00	98,56%
127	412848	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JEPARA	02204	136.420.000,00	136.420.000,00	100,00%
128	412854	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JUWANA	02204	86.550.000,00	86.040.000,00	99,41%
129	412860	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	02204	99.209.000,00	98.180.194,00	98,96%
130	412879	DISTRIK NAVIGASI SEMARANG	02204	246.080.000,00	245.570.000,00	99,79%
131	412885	DISTRIK NAVIGASI CILACAP	02204	213.005.000,00	212.917.300,00	99,96%
132	412891	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	02204	443.225.000,00	442.935.570,00	99,93%
133	412905	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GRESIK	02204	54.600.000,00	54.343.200,00	99,53%
134	412911	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANARUKAN	02204	237.047.000,00	148.456.100,00	62,63%
135	412920	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PROBOLINGGO	02204	376.444.000,00	376.288.000,00	99,96%
136	412942	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALIANGET	02204	188.000.000,00	187.932.000,00	99,96%
137	412951	DISTRIK NAVIGASI SURABAYA	02204	774.324.000,00	747.797.337,00	96,57%
138	412967	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SABANG	02204	18.600.000,00	18.599.000,00	99,99%
139	412973	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA LANGSA	02204	51.770.000,00	43.100.000,00	83,25%
140	412982	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LHOKSEUMAWE	02204	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00%
141	412998	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MEULABOH	02204	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00%
142	413018	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN	02204	168.850.000,00	167.958.340,00	99,47%
143	413024	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SIBOLGA	02204	122.665.000,00	116.993.290,00	95,38%
144	413030	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN	02204	30.530.000,00	30.514.000,00	99,95%
145	413049	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GUNUNG SITOLI	02204	242.334.000,00	241.746.000,00	99,76%
146	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	02204	936.756.000,00	935.664.406,00	99,88%
147	413061	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	02204	414.260.000,00	413.643.886,00	99,85%
148	413070	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	02204	98.092.000,00	97.542.830,00	99,44%
149	413080	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA TANJUNG	02204	106.608.000,00	106.276.000,00	99,69%
150	413086	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	02204	110.540.000,00	110.176.300,00	99,67%
151	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	02204	132.682.000,00	126.881.560,00	95,63%
152	413106	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PEKANBARU	02204	84.240.000,00	84.140.160,00	99,88%
153	413112	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BENGKALIS	02204	42.294.000,00	41.427.000,00	97,95%
154	413121	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BAGAN SIAPI-API	02204	115.293.000,00	113.293.000,00	98,27%
155	413137	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELAT PANJANG	02204	5.000.000,00	4.885.025,00	97,70%
156	413143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA CINAKU	02204	52.170.000,00	51.556.650,00	98,82%
157	413152	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEMBILAHAN	02204	16.085.000,00	16.027.000,00	99,64%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
158	413168	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PINANG	02204	88.546.000,00	82.696.781,00	93,39%
159	413180	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	02204	89.000.000,00	88.964.392,00	99,96%
160	413199	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG UBAN	02204	42.900.000,00	41.107.340,00	95,82%
161	413200	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAREMPA	02204	24.000.000,00	23.990.000,00	99,96%
162	413225	DISTRIK NAVIGASI D U M A I	02204	158.707.000,00	158.664.500,00	99,97%
163	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	02204	9.480.000,00	8.626.000,00	90,99%
164	413240	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TALANG DUKUH	02204	35.784.000,00	35.727.156,00	99,84%
165	413256	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PALEMBANG	02204	172.486.000,00	169.934.576,00	98,52%
166	413262	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKAL BALAM	02204	249.991.000,00	249.974.600,00	99,99%
167	413271	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUNTOK	02204	27.228.111.000,00	24.665.172.072,00	90,59%
168	413287	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PANDAN	02204	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00%
169	413293	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	02204	440.632.000,00	431.526.599,00	97,93%
170	413307	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANJANG	02204	4.760.000,00	4.728.600,00	99,34%
171	413322	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	02204	93.735.000,00	93.608.000,00	99,86%
172	413338	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TEMINABUAN	02204	95.447.000,00	95.447.000,00	100,00%
173	413344	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAPAK TUAN	02204	9.900.000,00	9.700.000,00	97,98%
174	413350	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LEIDONG	02204	97.200.000,00	96.624.600,00	99,41%
175	413369	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU TELLO	02204	134.400.000,00	134.400.000,00	100,00%
176	413375	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELUK DALAM NIAS	02204	19.760.000,00	19.760.000,00	100,00%
177	413381	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MANGGAR	02204	68.256.000,00	68.037.000,00	99,68%
178	413410	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KINTAP	02204	262.712.000,00	262.707.495,00	100,00%
179	413417	KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN	02204	644.600.000,00	643.702.728,00	99,86%
180	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK	02204	100.000.000,00	99.555.767,00	99,56%
181	413426	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA SEMBOJA	02204	54.447.000,00	53.547.000,00	98,35%
182	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PERAK	02204	520.236.000,00	474.270.905,00	91,16%
183	413432	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TOLI-TOLI	02204	55.000.000,00	54.900.000,00	99,82%
184	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASAR	02204	683.695.000,00	683.669.665,00	100,00%
185	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S E L A Y A R	02204	135.160.000,00	135.153.472,00	100,00%
186	413457	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SILOPO	02204	98.200.000,00	98.200.000,00	100,00%
187	413463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN M A M U J U	02204	40.250.000,00	40.249.999,00	100,00%
188	413472	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P A L O P O	02204	57.642.000,00	50.881.000,00	88,27%
189	413488	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MALILI	02204	122.750.000,00	120.775.174,00	98,39%
190	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	02204	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00%
191	413508	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLAKA	02204	145.181.000,00	145.181.000,00	100,00%
192	413514	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN R A H A	02204	65.592.000,00	65.270.000,00	99,51%
193	413520	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U A L	02204	20.180.000,00	-	0,00%
194	413545	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KETAPANG	02204	3.990.000,00	3.035.500,00	76,08%
195	413576	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN U L U S I A U	02204	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
196	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	02204	228.900.000,00	109.300.000,00	47,75%
197	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	02204	192.500.000,00	192.500.000,00	100,00%
198	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN A M P A N A	02204	96.805.000,00	96.605.000,00	99,79%
199	413611	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B U N T A	02204	31.075.000,00	31.075.000,00	100,00%
200	413627	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMAHAI	02204	361.300.000,00	361.300.000,00	100,00%
201	413633	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN D O B O	02204	152.950.000,00	152.950.000,00	100,00%
202	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	02204	769.500.000,00	769.500.000,00	100,00%
203	413664	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA	02204	70.000.000,00	69.811.500,00	99,73%
204	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	02204	156.007.000,00	155.985.054,00	99,99%
205	413689	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BAWEAN	02204	15.240.000,00	15.240.000,00	100,00%
206	413695	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAHEWA	02204	105.828.000,00	105.816.000,00	99,99%
207	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	02204	126.587.000,00	123.120.000,00	97,26%
208	413715	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN LOMBOK	02204	76.970.000,00	76.821.950,00	99,81%
209	413721	BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN	02204	230.265.000,00	222.804.700,00	96,76%
210	413730	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG WANGI	02204	107.795.000,00	107.784.663,00	99,99%
211	413746	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MALAHAYATI	02204	166.980.000,00	166.976.000,00	100,00%
212	413752	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K W A N D A N G	02204	117.559.000,00	117.549.500,00	99,99%
213	413761	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELAGA BIRU	02204	55.350.000,00	53.333.000,00	96,36%
214	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BITUNG	02204	845.220.000,00	844.361.900,00	99,90%
215	413792	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LEMBAR	02204	81.910.000,00	81.910.000,00	100,00%
216	413803	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SINABANG	02204	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00%
217	413812	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN N A M L E A	02204	55.090.000,00	54.390.000,00	98,73%
218	417693	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SELOR	02204	42.600.000,00	42.519.000,00	99,81%
219	417707	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	02204	58.690.000,00	58.668.900,00	99,96%
220	417874	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN	02204	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86%
221	439180	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	02204	100.000.000,00	93.157.700,00	93,16%
222	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	02204	4.280.000,00	4.275.000,00	99,88%
223	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	02204	98.460.000,00	38.719.000,00	39,32%
224	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	02204	250.500.000,00	12.403.500,00	4,95%
225	517882	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BONTANG	02204	59.160.000,00	59.156.350,00	99,99%
226	517904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	02204	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00%
227	517911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B I N T U N I	02204	15.240.000,00	15.160.700,00	99,48%
228	517925	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ORANSBARI	02204	89.860.000,00	73.165.320,00	81,42%
229	517946	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN A G A T S	02204	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00%
230	517950	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B A D E	02204	88.330.000,00	88.330.000,00	100,00%
231	517971	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K O K A S	02204	69.065.000,00	69.000.000,00	99,91%
232	520454	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG PRIOK	02204	1.451.665.000,00	1.418.592.743,00	97,72%
233	521285	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANGANDARAN	02204	24.000.000,00	23.790.500,00	99,13%
234	521292	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PELABUHAN RATU	02204	69.500.000,00	65.071.500,00	93,63%
235	521307	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN INDRAMAYU	02204	210.700.000,00	210.100.500,00	99,72%
236	521332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KARIMUN JAWA	02204	68.450.000,00	68.438.700,00	99,98%
237	521349	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRANTA	02204	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
238	521353	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPEKEN	02204	36.115.000,00	36.115.000,00	100,00%
239	521360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MASALEMBU	02204	62.990.000,00	62.941.100,00	99,92%
240	521395	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRONDONG	02204	112.150.000,00	112.150.000,00	100,00%
241	521417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN C A L A N G	02204	18.600.000,00	18.397.000,00	98,91%
242	521459	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BARUS	02204	74.780.000,00	74.780.000,00	100,00%
243	521510	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIUBAN	02204	57.750.000,00	6.346.000,00	10,99%
244	521527	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	02204	74.008.000,00	73.903.700,00	99,86%
245	521548	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA ENOK	02204	47.240.000,00	44.277.000,00	93,73%
246	521552	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA GAUNG	02204	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00%
247	521573	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANIPAHAN	02204	15.764.000,00	15.762.000,00	99,99%
248	521594	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KIJANG	02204	106.422.000,00	105.280.631,00	98,93%
249	521602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SENAYANG	02204	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
250	521616	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NIPAH PANJANG	02204	6.696.000,00	1.900.000,00	28,38%
251	521620	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI LUMPUR	02204	59.347.000,00	59.317.000,00	99,95%
252	521637	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SADAI	02204	58.000.000,00	48.549.000,00	83,71%
253	521641	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MENGGALA	02204	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
254	521658	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN MARINGGAI	02204	18.740.000,00	18.540.000,00	98,93%
255	521662	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MESUJI	02204	34.200.000,00	34.151.000,00	99,86%
256	521683	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOH	02204	32.532.000,00	32.260.500,00	99,17%
257	521730	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMURANG	02204	164.517.000,00	164.517.000,00	100,00%
258	521747	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOTABUNAN	02204	142.000.000,00	142.000.000,00	100,00%
259	521751	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN UKI/ INEBONTO	02204	55.000.000,00	47.500.000,00	86,36%
260	521768	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TILAMUTA	02204	23.790.000,00	23.480.000,00	98,70%
261	521789	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PAGIMANA	02204	67.625.000,00	62.825.000,00	92,90%
262	521793	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN L E O K	02204	67.932.000,00	64.560.000,00	95,04%
263	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	02204	135.588.000,00	135.588.000,00	100,00%
264	521822	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN M A J E N E	02204	26.800.000,00	26.800.000,00	100,00%
265	521836	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GARONGKONG	02204	93.267.000,00	93.220.020,00	99,95%
266	521840	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S I N J A I	02204	15.141.286.000,00	15.138.631.913,00	99,98%
267	521857	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PATIRO BAJO	02204	100.000.000,00	99.987.200,00	99,99%
268	521861	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMALA'A	02204	232.400.000,00	220.450.000,00	94,86%
269	521878	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U L E H U	02204	105.000.000,00	104.795.000,00	99,80%
270	521882	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KAIRATU	02204	114.500.000,00	114.500.000,00	100,00%
271	521899	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WEDA	02204	417.500.000,00	417.500.000,00	100,00%
272	521904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	02204	38.150.000,00	38.116.000,00	99,91%
273	521946	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S A P E	02204	52.750.000,00	52.325.000,00	99,19%
274	521950	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BA'A	02204	6.170.000,00	6.170.000,00	100,00%
275	521967	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	02204	176.600.000,00	123.590.000,00	69,98%
276	522582	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUPANG	02204	303.410.000,00	303.305.745,00	99,97%
277	528895	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	02204	98.517.000,00	98.442.000,00	99,92%
278	535457	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI BITUNG	02204	223.698.000,00	223.696.412,00	100,00%
279	535841	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	02204	108.000.000,00	94.196.298,00	87,22%
280	559140	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REMBANG	02204	34.450.000,00	34.450.000,00	100,00%
281	559154	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BATANG	02204	53.480.000,00	52.744.600,00	98,62%
282	559161	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPUDI	02204	59.110.000,00	58.774.000,00	99,43%
283	559182	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIROMBU	02204	15.320.000,00	15.320.000,00	100,00%
284	559196	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG BERINGIN	02204	22.360.000,00	21.700.000,00	97,05%
285	559218	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SARANG ELANG	02204	105.210.000,00	104.600.000,00	99,42%
286	559222	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BATAHAN	02204	26.700.000,00	8.499.000,00	31,83%
287	559239	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MUARA SIBERUT	02204	10.000.000,00	8.490.000,00	84,90%
288	559243	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	02204	72.100.000,00	72.100.000,00	100,00%
289	559250	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI GUNTUNG	02204	10.682.000,00	10.682.000,00	100,00%
290	559264	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG MEDANG	02204	20.000.000,00	19.928.000,00	99,64%
291	559271	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA MENDAHARA	02204	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00%
292	559285	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN RANGGA ILUNG	02204	47.200.000,00	46.798.250,00	99,15%
293	559292	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SATUI	02204	108.100.000,00	106.410.800,00	98,44%
294	559311	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	02204	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
295	559328	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LIKUPANG	02204	158.333.000,00	158.115.000,00	99,86%
296	559332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN OGOAMAS	02204	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00%
297	559353	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI	02204	43.320.000,00	38.407.900,00	88,66%
298	559360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	02204	50.250.000,00	50.250.000,00	100,00%
299	559374	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BELANG-BELANG	02204	120.800.000,00	120.800.000,00	100,00%
300	559381	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIWA	02204	110.000.000,00	109.999.843,00	100,00%
301	559395	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAPUKO	02204	215.889.000,00	215.777.478,00	99,95%
302	559400	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SOA-SIU	02204	101.500.000,00	101.500.000,00	100,00%
303	559417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	02204	137.750.000,00	137.439.500,00	99,77%
304	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	02204	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
305	559438	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA	02204	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00%
306	559442	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI	02204	109.800.000,00	104.800.000,00	95,45%
307	559459	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NAMROLE	02204	227.040.000,00	225.923.000,00	99,51%
308	559463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	02204	138.320.000,00	131.572.000,00	95,12%
309	559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	02204	77.700.000,00	77.700.000,00	100,00%
310	559484	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULA	02204	26.850.000,00	26.850.000,00	100,00%
311	559491	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GILIMANUK	02204	13.155.000,00	12.765.000,00	97,04%
312	559506	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI	02204	32.440.000,00	32.440.000,00	100,00%
313	559510	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PEMENANG	02204	35.000.000,00	32.356.500,00	92,45%
314	559527	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BARANUSA	02204	21.585.000,00	21.585.000,00	100,00%
315	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	02204	114.000.000,00	33.000.000,00	28,95%
316	559548	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MARAPOKOT	02204	93.743.000,00	93.643.000,00	99,89%
317	559552	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LABUHAN BAJO	02204	14.551.000,00	13.602.420,00	93,48%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
318	559569	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAREN	02204	36.660.000,00	36.660.000,00	100,00%
319	559573	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KORIDO	02204	5.605.000,00	5.605.000,00	100,00%
320	559580	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WASIOR	02204	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
321	559594	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN RAJA AMPAT	02204	507.350.000,00	502.107.900,00	98,97%
322	559616	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LINAU BINTUHAN	02204	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
323	561712	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	02204	220.980.000,00	220.803.817,00	99,92%
324	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	02204	988.800.000,00	976.436.386,00	98,75%
325	622042	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA TUNGKAL	02204	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00%
326	652474	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KEPULAUAN SERIBU	02204	249.926.000,00	247.455.366,00	99,01%
327	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	02204	304.500.000,00	304.214.066,00	99,91%
328	652517	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MARUNDA	02204	43.987.000,00	43.952.527,00	99,92%
329	652521	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BAKAUHEUNI	02204	28.250.000,00	28.250.000,00	100,00%
330	652538	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA SABAK	02204	68.640.000,00	68.627.489,00	99,98%
331	652542	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANDANAIRE	02204	19.843.000,00	18.423.000,00	92,84%
332	652559	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BENETE	02204	15.000.000,00	14.997.027,00	99,98%
333	652563	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV ANGGREK	02204	151.520.000,00	150.395.000,00	99,26%
334	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	02204	581.714.000,00	577.011.100,00	99,19%
335	652584	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	02204	730.037.000,00	728.560.700,00	99,80%
336	180945	KANTOR UPBU TANJUNG API	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
337	288042	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	02205	3.276.340.000,00	2.723.792.061,00	83,14%
338	288216	KANTOR UPBU FL TOBING	02205	150.000.000,00	137.038.890,00	91,36%
339	288241	KANTOR UPBU JAPURA	02205	150.000.000,00	149.700.000,00	99,80%
340	288262	KANTOR UPBU DABO	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
341	288372	KANTOR UPBU JUWATA	02205	462.200.000,00	458.304.439,00	99,16%
342	288393	KANTOR UPBU JALALUDDIN	02205	79.000.000,00	78.700.000,00	99,62%
343	288401	KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI	02205	150.000.000,00	149.915.000,00	99,94%
344	288436	KANTOR UPBU HALUOLEO	02205	300.000.000,00	298.532.835,00	99,51%
345	288457	KANTOR UPBU SULTAN BABULLAH	02205	377.500.000,00	377.500.000,00	100,00%
346	288482	KANTOR UPBU SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN	02205	137.000.000,00	137.000.000,00	100,00%
347	288499	KANTOR UPBUA MUHAMMAD SALAHUDDIN	02205	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
348	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA	02205	250.000.000,00	150.000.000,00	60,00%
349	288525	KANTOR UPBU TAMBOLAKA	02205	377.000.000,00	377.000.000,00	100,00%
350	288532	KANTOR UPBU FRANSISKUS XAVERIUS SEDA	02205	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
351	288571	KANTOR UPBU RENDANI	02205	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
352	288588	KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK	02205	650.000.000,00	592.422.296,00	91,14%
353	288592	KANTOR UPBU MOPAH	02205	300.000.000,00	298.600.000,00	99,53%
354	288600	KANTOR UPBU WAMENA	02205	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
355	288614	KANTOR UPBU NABIRE	02205	250.000.000,00	248.831.000,00	99,53%
356	288745	KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO	02205	800.000.000,00	689.098.039,00	86,14%
357	320344	KANTOR UPBU RANAI	02205	150.000.000,00	149.720.000,00	99,81%
358	413828	KANTOR UPBU BUDIARTO	02205	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67%
359	413834	KANTOR UPBU FRANS SALES LEGA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
360	413840	KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM	02205	250.000.000,00	249.995.920,00	100,00%
361	413859	KANTOR UPBU KASIGUNCU	02205	250.000.000,00	249.940.000,00	99,98%
362	413865	KANTOR UPBU CUT NYAK DHIEN NAGAN RAYA	02205	150.000.000,00	93.545.000,00	62,36%
363	413871	KANTOR UPBU TOREA	02205	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33%
364	413880	KANTOR UPBU ISKANDAR	02205	250.000.000,00	249.575.000,00	99,83%
365	413900	KANTOR UPBU TUNGGUL WULUNG	02205	360.175.000,00	359.910.300,00	99,93%
366	413916	KANTOR UPBU BINAKA	02205	930.000.000,00	929.985.000,00	100,00%
367	413922	KANTOR UPBU RAHADI OESMAN	02205	250.000.000,00	213.025.000,00	85,21%
368	413931	KANTOR UPBU TEBELIAN	02205	250.000.000,00	214.940.000,00	85,98%
369	413947	KANTOR UPBU H. ASAN	02205	423.745.000,00	423.443.617,00	99,93%
370	413953	KANTOR UPBU BERINGIN	02205	150.000.000,00	149.350.000,00	99,57%
371	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	02205	228.500.000,00	228.300.000,00	99,91%
372	413978	KANTOR UPBU NAHA	02205	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25%
373	413990	KANTOR UPBU SULTAN BANTILAN	02205	150.000.000,00	149.980.600,00	99,99%
374	414004	KANTOR UPBU BETO AMBARI	02205	5.537.000,00	5.536.125,00	99,98%
375	414010	KANTOR UPBU BANDANEIRA	02205	150.000.000,00	149.938.000,00	99,96%
376	414029	KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN	02205	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
377	414035	KANTOR UPBU SUDJARWO TJONDRONEGORO	02205	150.000.000,00	140.000.000,00	93,33%
378	414041	KANTOR UPBU BINTUNI	02205	150.000.000,00	148.641.800,00	99,09%
379	414050	KANTOR UPBU TANAH MERAH	02205	150.000.000,00	149.767.500,00	99,85%
380	414066	KANTOR UPBU MARARENA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
381	414072	KANTOR UPBU MINDIPTANAH	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
382	414081	KANTOR UPBU OKSIBIL	02205	150.000.000,00	148.500.000,00	99,00%
383	414097	KANTOR UPBU ENAROTALI	02205	150.000.000,00	149.588.000,00	99,73%
384	414101	KANTOR UPBU WAGHETE	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
385	414117	KANTOR UPBU MULIA	02205	150.000.000,00	107.099.455,00	71,40%
386	414123	KANTOR UPBU UTAROM	02205	150.000.000,00	149.140.000,00	99,43%
387	414132	KANTOR UPBU TEUKU CUT ALI	02205	180.000.000,00	179.961.000,00	99,98%
388	414148	KANTOR UPBU LASIKIN	02205	150.000.000,00	127.240.000,00	84,83%
389	414154	KANTOR UPBU ROKOT	02205	128.532.000,00	127.680.000,00	99,34%
390	414160	KANTOR UPBU RAJA HAJI ABDULLAH	02205	150.000.000,00	148.153.365,00	98,77%
391	414179	KANTOR UPBU DEPATI PARBO	02205	150.000.000,00	-	0,00%
392	414185	KANTOR UPBU PANGSUMA	02205	216.000.000,00	215.527.590,00	99,78%
393	414191	KANTOR UPBU TAMPA PADANG	02205	320.940.000,00	320.700.000,00	99,93%
394	414205	KANTOR UPBU PONGTIKU	02205	50.000.000,00	49.775.507,00	99,55%
395	414211	KANTOR UPBU OESMAN SADIK	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
396	414220	KANTOR UPBU GAMAR MALAMO	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
397	414236	KANTOR UPBU MALI	02205	150.000.000,00	149.971.250,00	99,98%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
398	414242	KANTOR UPBU GEWAYANTANA	02205	150.000.000,00	149.950.000,00	99,97%
399	414251	KANTOR UPBU KOMODO	02205	247.900.000,00	247.900.000,00	100,00%
400	417706	KANTOR UPBU SELUWING	02205	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%
401	417708	KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN	02205	273.611.000,00	273.484.250,00	99,95%
402	417720	KANTOR UPBU LONG APUNG	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
403	419220	KANTOR UPBU SEKO	02205	150.000.000,00	149.945.000,00	99,96%
404	419221	KANTOR UPBU RAMPI	02205	91.400.000,00	90.000.000,00	98,47%
405	447786	KANTOR UPBU TIOM	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
406	447899	KANTOR UPBU BULI	02205	150.000.000,00	149.745.250,00	99,83%
407	449005	KANTOR UPBU ELELIM	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
408	449461	BANDAR UDARA ARUNG PALAKA	02205	143.400.000,00	142.739.650,00	99,54%
409	449462	KANTOR UPBU LAGALIGO	02205	150.000.000,00	149.991.000,00	99,99%
410	449464	KANTOR UPBU MATAHORA	02205	536.490.000,00	536.487.000,00	100,00%
411	449465	KANTOR UPBU SANGIA NI BANDERA	02205	150.000.000,00	149.676.600,00	99,78%
412	449466	KANTOR UPBU AMAHAI	02205	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67%
413	449467	KANTOR UPBU WAHAI	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
414	449468	KANTOR UPBU NAMROLE	02205	180.989.000,00	180.980.000,00	100,00%
415	449469	KANTOR UPBU JOHN BECKER	02205	150.000.000,00	149.924.000,00	99,95%
416	449470	KANTOR UPBU LARAT	02205	150.000.000,00	143.766.000,00	95,84%
417	449482	KANTOR UPBU KIWIROK	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
418	449484	KANTOR UPBU AKIMUGA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
419	449487	KANTOR UPBU MARINDA	02205	150.000.000,00	149.908.830,00	99,94%
420	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	02205	150.000.000,00	149.650.000,00	99,77%
421	449491	KANTOR UPBU EMALAMO	02205	150.000.000,00	149.803.380,00	99,87%
422	449493	KANTOR UPBU PITU	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
423	449508	KANTOR UPBU H. AROEPALA	02205	150.000.000,00	149.184.000,00	99,46%
424	449514	KANTOR UPBU DOBO	02205	150.000.000,00	149.700.000,00	99,80%
425	465487	KANTOR UPBU REMBELE	02205	150.000.000,00	144.130.000,00	96,09%
426	465493	KANTOR UPBU LASONDRE	02205	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00%
427	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	02205	25.155.360.000,00	23.922.358.191,00	95,10%
428	465601	DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA	02205	348.898.000,00	345.762.602,00	99,10%
429	465610	DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN	02205	541.708.000,00	541.702.400,00	100,00%
430	465626	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	02205	213.750.000,00	213.352.000,00	99,81%
431	465632	DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	02205	382.018.000,00	377.083.671,00	98,71%
432	465641	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II	02205	250.000.000,00	150.986.500,00	60,39%
433	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	02205	687.660.000,00	678.919.642,00	98,73%
434	465663	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV	02205	164.102.000,00	163.492.400,00	99,63%
435	465672	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V	02205	420.000.000,00	419.661.320,00	99,92%
436	465675	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX	02205	158.025.000,00	158.025.000,00	100,00%
437	465676	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X	02205	500.000.000,00	499.985.690,00	100,00%
438	465677	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI	02205	424.906.000,00	422.245.318,00	99,37%
439	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	02205	1.180.089.000,00	640.956.750,00	54,31%
440	465679	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII	02205	261.275.000,00	261.270.200,00	100,00%
441	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	02205	150.000.000,00	80.242.500,00	53,50%
442	466266	KANTOR UPBU MATHILDA BATLAYERI	02205	150.000.000,00	90.000.000,00	60,00%
443	466272	KANTOR UPBU MOZES KILANGIN	02205	300.000.000,00	294.500.000,00	98,17%
444	499295	KANTOR UPBU NAMLEA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
445	499522	KANTOR UPBU PASIR PANGARAIAN	02205	150.000.000,00	49.084.000,00	32,72%
446	499531	KANTOR UPBU TRUNOJOYO	02205	155.000.000,00	152.104.000,00	98,13%
447	499562	KANTOR UPBU MELAK	02205	170.000.000,00	168.765.855,00	99,27%
448	499578	KANTOR UPBU KIMAM	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
449	499590	KANTOR UPBU KAMUR	02205	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67%
450	499604	KANTOR UPBU BOMAKIA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
451	499635	KANTOR UPBU DABRA	02205	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67%
452	499641	KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA	02205	429.000.000,00	428.725.030,00	99,94%
453	512769	KANTOR UPBU MUKO-MUKO	02205	150.000.000,00	127.390.905,00	84,93%
454	512802	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I	02205	1.000.000.000,00	637.597.145,00	63,76%
455	517658	KANTOR UPBU NANGAPINOH	02205	150.000.000,00	149.980.000,00	99,99%
456	517662	KANTOR UPBU BOKONDINI	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
457	518138	KANTOR UPBU KEPI	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
458	518142	KANTOR UPBU OKABA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
459	518159	KANTOR UPBU MOANAMANI	02205	150.000.000,00	98.945.000,00	65,96%
460	518163	KANTOR UPBU WASIOR	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
461	518170	KANTOR UPBU INANWATAN	02205	150.000.000,00	149.192.400,00	99,46%
462	518184	KANTOR UPBU TEMINABUAN	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
463	518191	KANTOR UPBU MERDEY	02205	150.000.000,00	148.500.000,00	99,00%
464	518206	KANTOR UPBU KOKONAO	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
465	521992	KANTOR UPBU KUABANG	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
466	522007	KANTOR UPBU MELONGGUANE	02205	150.000.000,00	149.999.000,00	100,00%
467	522011	KANTOR UPBU A.A BERE TALLO	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
468	522028	KANTOR UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE	02205	150.000.000,00	75.000.000,00	50,00%
469	522032	KANTOR UPBU TARDAMU	02205	150.000.000,00	50.000.000,00	33,33%
470	538992	KANTOR UPBU SANGGU	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
471	539011	KANTOR UPBU ANDI JEMMA	02205	145.470.000,00	145.470.000,00	100,00%
472	539028	KANTOR UPBU KAREL SADSUITUBUN	02205	250.000.000,00	145.200.000,00	58,08%
473	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	02205	60.000.000,00	59.298.300,00	98,83%
474	559662	BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	02205	1.950.000.000,00	1.636.844.055,00	83,94%
475	559679	BALAI TEKNIK PENERBANGAN	02205	205.000.000,00	202.881.000,00	98,97%
476	559683	BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	02205	300.000.000,00	297.076.638,00	99,03%
477	568601	KANTOR UPBU CAKRABHUANA	02205	150.000.000,00	55.841.660,00	37,23%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
478	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
479	568622	KANTOR UPBU WONOPITO	02205	350.000.000,00	349.540.000,00	99,87%
480	568636	KANTOR UPBU KUALA PEMBUANG	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
481	568640	KANTOR UPBU KUALA KURUN	02205	150.000.000,00	149.951.125,00	99,97%
482	568657	KANTOR UPBU UDARA YUVAI SEMARING	02205	150.000.000,00	149.368.000,00	99,58%
483	568661	KANTOR UPBU NUNUKAN	02205	150.000.000,00	149.984.550,00	99,99%
484	568678	KANTOR UPBU NUMFOOR	02205	150.500.000,00	107.319.000,00	71,31%
485	568681	KANTOR UPBU MUARA BUNGO	02205	154.060.000,00	150.664.310,00	97,80%
486	606339	KANTOR UPBU KARUBAGA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
487	606343	KANTOR UPBU EWER	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
488	606350	KANTOR UPBU ILLU	02205	150.000.000,00	149.930.000,00	99,95%
489	606364	KANTOR UPBU BABO	02205	150.000.000,00	148.805.750,00	99,20%
490	606371	KANTOR UPBU KAMBUAYA	02205	150.000.000,00	149.060.235,00	99,37%
491	649045	KANTOR UPBU MOROWALI	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
492	649046	KANTOR UPBU LETUNG	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
493	649047	KANTOR UPBU HARUN THOHIR	02205	95.400.000,00	95.400.000,00	100,00%
494	649048	KANTOR UPBU MARATUA	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
495	649049	KANTOR UPBU MALIKUSSALEH	02205	150.000.000,00	149.245.730,00	99,50%
496	649821	KANTOR UPBU BADE	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
497	649835	KANTOR UPBU SENGGEH	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
498	649842	KANTOR UPBU BATOM	02205	150.000.000,00	45.172.093,00	30,11%
499	649856	KANTOR UPBU BILORAI	02205	150.000.000,00	108.994.000,00	72,66%
500	652591	KANTOR UPBU ILAGA	02205	150.000.000,00	149.870.000,00	99,91%
501	652606	KANTOR UPBU KEBAR	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
502	652610	KANTOR UPBU AYAWASI	02205	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00%
503	652627	KANTOR UPBU MAIMUN SALEH	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
504	662815	KANTOR UPBU SOA	02205	250.000.000,00	247.900.000,00	99,16%
505	662816	KANTOR UPBU NOP GOLIAT DEKAI	02205	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
506	662855	KANTOR UPBU DATAH DAWAI	02205	150.000.000,00	149.962.718,00	99,98%
507	662862	KANTOR UPBU SUGIMANURU	02205	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%
508	445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	02208	64.932.000,00	17.863.418,00	27,51%
509	467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	02208	561.815.000,00	558.977.541,00	99,49%
510	467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	02208	376.369.000,00	376.142.489,00	99,94%
511	467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	02208	487.068.000,00	442.112.229,00	90,77%
512	467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	02208	1.069.082.000,00	1.064.476.285,00	99,57%
513	467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	02208	892.611.000,00	892.250.339,00	99,96%
514	467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	02208	752.658.000,00	715.489.916,00	95,06%
515	467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT	02208	294.919.000,00	291.621.000,00	98,88%
516	467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	02208	940.195.000,00	936.970.999,00	99,66%
517	467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	02208	529.098.000,00	524.760.433,00	99,18%
518	467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	02208	618.866.000,00	615.852.670,00	99,51%
519	467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	02208	21.800.000,00	19.985.698,00	91,68%
520	467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	02208	1.463.119.000,00	1.361.684.973,00	93,07%
521	467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	02208	11.425.571.000,00	11.422.292.406,00	99,97%
522	467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	02208	762.337.000,00	759.751.960,00	99,66%
523	288752	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	02211	1.100.205.000,00	1.100.204.000,00	100,00%
524	288944	PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	02211	569.792.000,00	559.886.252,00	98,26%
525	288951	PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	02211	418.836.000,00	416.712.461,00	99,49%
526	414267	PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	02211	614.400.000,00	604.605.877,00	98,41%
527	634171	PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	02211	488.040.000,00	487.267.301,00	99,84%
528	051159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	02212	217.919.000,00	217.876.936,00	99,98%
529	130470	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) MEMPAWAH	02212	874.707.000,00	873.508.060,00	99,86%
530	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	02212	792.476.000,00	792.475.340,00	100,00%
531	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	02212	1.194.690.000,00	1.194.470.645,00	99,98%
532	288965	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	02212	275.055.000,00	274.931.640,00	99,96%
533	414273	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	02212	1.851.654.000,00	1.628.782.951,00	87,96%
534	414282	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT	02212	214.255.000,00	214.107.570,00	99,93%
535	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	02212	262.048.000,00	262.046.860,00	100,00%
536	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	02212	1.656.419.000,00	1.656.282.693,00	99,99%
537	414318	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT	02212	992.428.000,00	992.302.169,00	99,99%
538	414324	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)	02212	896.580.000,00	896.580.000,00	100,00%
539	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	02212	4.081.104.000,00	4.080.858.212,00	99,99%
540	414349	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	02212	1.439.144.000,00	1.436.013.650,00	99,78%
541	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	02212	1.337.350.000,00	1.312.140.302,00	98,11%
542	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	02212	1.237.735.000,00	1.231.787.435,00	99,52%
543	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	02212	681.854.000,00	681.172.746,00	99,90%
544	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	02212	962.179.000,00	909.251.336,00	94,50%
545	419173	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI	02212	229.623.000,00	229.623.000,00	100,00%
546	440006	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN	02212	675.720.000,00	675.660.207,00	99,99%
547	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	02212	870.559.000,00	856.597.583,00	98,40%
548	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	02212	520.411.000,00	520.407.535,00	100,00%
549	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	02212	656.778.000,00	656.657.016,00	99,98%
550	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	02212	1.400.037.000,00	1.383.782.937,00	98,84%
551	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	02212	881.599.000,00	881.596.156,00	100,00%
552	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	02212	2.103.058.000,00	2.098.111.335,00	99,76%
553	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	02212	580.184.000,00	580.124.464,00	99,99%
554	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	02212	697.806.000,00	697.305.070,00	99,93%
555	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	02212	1.345.059.000,00	1.344.596.095,00	99,97%

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon I	Pagu	Realisasi	Persentase
556	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	02212	218.582.000,00	208.513.800,00	95,39%
557	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	02212	504.438.000,00	504.418.659,00	100,00%
558	649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	02212	766.010.000,00	765.878.468,00	99,98%
559	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	02212	1.029.287.000,00	1.029.281.013,00	100,00%
560	015413	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	02213	2.502.373.000,00	2.502.187.105,00	99,99%
JUMLAH				**277.657.816.000,00**	**267.998.138.365,00**	**96,52%**

Keterangan:
Tidak ada realisasi belanja COVID-19 yang menggunakan akun non COVID-19

MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

No.	Rincian Output / Proyek	Target	Lokasi	Realisasi Fisik	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Simeulue	4 layanan	Kab. Simeulue	100,00%	10.224.296.000	99,76%	-
2.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Nias Barat	14 layanan	Kab. Nias Barat	100,00%	26.313.602.000	99,91%	-
3.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Lingga	9 layanan	Kab. Lingga	100,00%	23.093.401.000	99,66%	-
4.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Seruyan	6 layanan	Kab. Seruyan	100,00%	9.371.782.000	99,99%	-
5.	Angkutan Udara Perintis - Kota Tarakan	16 layanan	Kota Tarakan	100,00%	29.363.572.000	99,99%	-
6.	Angkutan Udara Perintis - Kota Samarinda	6 layanan	Kota Samarinda	100,00%	19.313.084.000	98,94%	-
7.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Sumba Timur	6 layanan	Kab. Sumba Timur	100,00%	11.623.040.000	80,45%	-
8.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Luwu Utara	5 layanan	Kab. Luwu Utara	100,00%	5.749.418.000	100,00%	-
9.	Angkutan Udara Perintis - Kota Ternate	5 layanan	Kota Ternate	100,00%	15.220.806.000	99,51%	-
10.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Maluku Tenggara	10 layanan	Kab. Maluku Tenggara	100,00%	26.390.840.000	100,00%	-
11.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Manokwari	12 layanan	Kab. Manokwari	100,00%	20.487.286.000	98,97%	-
12.	Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong	6 layanan	Kota Sorong	100,00%	8.744.717.000	98,67%	-
13.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Yalimo	17 layanan	Kab. Yalimo	98,79%	33.933.784.000	99,98%	terdapat 31 penerbangan (akibat kondisi cuaca dll) yang tidak dilaksanakan karena akibat masa kontrak sudah selesai.
14.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Merauke	12 layanan	Kab. Merauke	100,00%	40.666.261.000	99,17%	-
15.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Boven Digoel	7 layanan	Kab. Boven Digoel	100,00%	9.125.787.000	99,79%	-
16.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Nabire	11 layanan	Kab. Nabire	99,77%	24.118.544.000	99,58%	Terdapat 5 penerbangan RTB yang tidak dibayarkan
17.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Mimika	29 layanan	Kab. Mimika	100,00%	49.825.324.000	99,98%	-
18.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya	14 layanan	Kab. Jayawijaya	100,00%	16.521.063.000	99,99%	-
19.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo	36 layanan	Kab. Yahukimo	100,00%	30.400.026.000	100,00%	-
20.	Angkutan Udara Perintis - Kab. Sumenep	4 layanan	Kab. Sumenep	100,00%	13.259.326.000	100,00%	-

Lampiran F.4. Pagu dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Satker Tahun 2022

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
3	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	19.375.139.000,00	-	19.375.139.000,00	-	19.357.151.749,00	-	19.357.151.749,00
03	352598	DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN	-	22.707.695.000,00	-	22.707.695.000,00	-	22.701.400.173,00	-	22.701.400.173,00
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	2.952.073.000,00	-	-	2.952.073.000,00	2.872.014.781,00	-	-	2.872.014.781,00
03	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	508.614.622.000,00	-	-	508.614.622.000,00	507.613.553.515,00	-	-	507.613.553.515,00
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	21.649.742.000,00	17.150.478.000,00	-	38.800.220.000,00	21.613.786.558,00	17.150.436.000,00	-	38.764.222.558,00
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	3.846.663.000,00	159.690.559.000,00	-	163.537.222.000,00	3.501.670.785,00	159.508.609.000,00	-	163.010.279.785,00
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	5.721.427.000,00	30.128.083.000,00	-	35.849.510.000,00	5.719.578.107,00	29.358.131.700,00	-	35.077.709.807,00
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	9.821.725.000,00	109.844.495.000,00	-	119.666.220.000,00	7.743.943.221,00	93.445.180.700,00	-	101.189.123.921,00
03	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	13.075.715.000,00	9.427.113.000,00	-	22.502.828.000,00	12.973.780.431,00	8.936.849.142,00	-	21.910.629.573,00
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	25.292.350.000,00	9.701.010.000,00	-	34.993.360.000,00	25.289.402.880,00	9.681.754.900,00	-	34.971.157.780,00
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	113.177.552.000,00	86.139.585.000,00	-	199.317.137.000,00	71.787.928.314,00	86.139.342.640,00	-	157.927.270.954,00
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	9.287.926.000,00	31.633.867.000,00	-	40.921.793.000,00	9.274.288.500,00	31.607.766.344,00	-	40.882.054.844,00
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	4.867.361.000,00	62.535.877.000,00	-	67.403.238.000,00	4.866.780.976,00	62.535.208.257,00	-	67.401.989.233,00
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	11.834.053.000,00	90.117.892.000,00	-	101.951.945.000,00	11.808.366.510,00	89.730.542.150,00	-	101.538.908.660,00
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	57.214.525.000,00	66.499.987.000,00	-	123.714.512.000,00	57.159.150.548,00	66.375.620.692,00	-	123.534.771.240,00
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	22.204.426.000,00	93.721.829.000,00	-	115.926.255.000,00	22.187.554.900,00	93.578.397.358,00	-	115.765.952.258,00
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	29.717.624.000,00	58.229.804.000,00	-	87.947.428.000,00	27.595.430.207,00	52.521.609.265,00	-	80.117.039.472,00
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	2.684.141.000,00	66.050.562.000,00	-	68.734.703.000,00	2.671.590.127,00	46.036.268.437,00	-	48.707.858.564,00
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	4.906.119.000,00	24.383.447.000,00	-	29.289.566.000,00	4.841.515.928,00	24.195.298.050,00	-	29.036.813.978,00
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	7.958.389.000,00	117.416.544.000,00	-	125.374.933.000,00	7.958.147.000,00	117.365.675.550,00	-	125.323.822.550,00
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	10.775.331.000,00	93.861.920.000,00	-	104.637.251.000,00	10.772.862.874,00	93.751.115.123,00	-	104.523.977.997,00
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	8.144.037.000,00	20.449.958.000,00	-	28.593.995.000,00	8.141.260.959,00	20.429.176.743,00	-	28.570.437.702,00
03	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	5.669.794.000,00	25.004.712.000,00	-	30.674.506.000,00	5.669.469.300,00	25.001.670.000,00	-	30.671.139.300,00
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	17.315.611.000,00	8.998.931.000,00	-	26.314.542.000,00	9.449.199.000,00	8.950.628.000,00	-	18.399.827.000,00
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	49.247.241.000,00	45.046.417.000,00	-	94.293.658.000,00	49.006.504.649,00	45.029.664.902,00	-	94.036.169.551,00
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	29.665.220.000,00	19.479.264.000,00	-	49.144.484.000,00	29.365.368.553,00	19.442.201.534,00	-	48.807.570.087,00
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	536.400.000,00	55.716.124.000,00	-	56.252.524.000,00	522.931.000,00	55.714.376.067,00	-	56.237.307.067,00
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	1.085.131.000,00	560.250.642.000,00	-	561.335.773.000,00	1.068.674.214,00	219.664.062.363,00	-	220.732.736.577,00
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA	16.042.370.000,00	116.844.454.000,00	-	132.886.824.000,00	16.008.804.894,00	116.644.309.145,00	-	132.653.114.039,00
04	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	73.537.000,00	-	-	73.537.000,00	21.924.000,00	-	-	21.924.000,00
04	287139	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMPIT	33.945.000,00	-	-	33.945.000,00	28.730.375,00	-	-	28.730.375,00
04	287141	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MOLAWE	455.430.000,00	-	-	455.430.000,00	426.446.818,00	-	-	426.446.818,00
04	287145	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WANCI	411.120.000,00	-	-	411.120.000,00	410.528.000,00	-	-	410.528.000,00
04	287147	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LEWOLEBA	646.950.000,00	-	-	646.950.000,00	642.825.000,00	-	-	642.825.000,00
04	287185	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTABARU - BATULICIN	25.329.228.000,00	-	-	25.329.228.000,00	12.641.662.439,00	-	-	12.641.662.439,00
04	287228	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	134.999.588,00	-	-	134.999.588,00
04	287232	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TARAKAN	24.714.754.000,00	-	-	24.714.754.000,00	12.418.331.389,00	-	-	12.418.331.389,00
04	287260	DISTRIK NAVIGASI SAMARINDA	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	349.305.000,00	-	-	349.305.000,00
04	287317	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MANADO	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00
04	287321	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GORONTALO	76.949.910.000,00	-	-	76.949.910.000,00	38.952.730.219,00	-	-	38.952.730.219,00
04	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	22.357.720.000,00	-	-	22.357.720.000,00	12.495.360.000,00	-	-	12.495.360.000,00
04	287342	DISTRIK NAVIGASI MANADO/BITUNG	1.972.890.000,00	-	-	1.972.890.000,00	1.942.040.110,00	-	-	1.942.040.110,00
04	287370	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK PALU	47.422.469.000,00	-	-	47.422.469.000,00	23.655.625.600,00	-	-	23.655.625.600,00
04	287384	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P O S O	17.541.148.000,00	-	-	17.541.148.000,00	17.540.017.725,00	-	-	17.540.017.725,00
04	287391	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN L U W U K	386.011.000,00	-	-	386.011.000,00	385.704.900,00	-	-	385.704.900,00
04	287406	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P A R I G I	20.217.640.000,00	-	-	20.217.640.000,00	10.358.485.486,00	-	-	10.358.485.486,00
04	287473	DISTRIK NAVIGASI UJUNG PANDANG	279.425.000,00	-	-	279.425.000,00	278.921.000,00	-	-	278.921.000,00
04	287502	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	74.136.910.000,00	-	-	74.136.910.000,00	37.063.955.000,00	-	-	37.063.955.000,00
04	287516	DISTRIK NAVIGASI KENDARI	569.477.000,00	-	-	569.477.000,00	562.167.900,00	-	-	562.167.900,00
04	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	34.612.570.000,00	-	-	34.612.570.000,00	34.578.969.207,00	-	-	34.578.969.207,00
04	287541	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE	28.354.694.000,00	-	-	28.354.694.000,00	13.523.973.043,00	-	-	13.523.973.043,00
04	287558	DISTRIK NAVIGASI A M B O N	46.500.000,00	-	-	46.500.000,00	45.791.500,00	-	-	45.791.500,00
04	287579	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN B E N O A	34.336.000,00	-	-	34.336.000,00	33.508.000,00	-	-	33.508.000,00
04	287590	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PADANG BAI	98.839.000,00	-	-	98.839.000,00	98.814.224,00	-	-	98.814.224,00
04	287612	DISTRIK NAVIGASI B E N O A	1.133.680.000,00	-	-	1.133.680.000,00	1.133.200.000,00	-	-	1.133.200.000,00
04	287647	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA	108.072.710.000,00	-	-	108.072.710.000,00	54.320.308.305,00	-	-	54.320.308.305,00
04	287701	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LAURENTIUS SAY	60.910.036.000,00	-	-	60.910.036.000,00	60.907.200.415,00	-	-	60.907.200.415,00
04	287715	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN WAINGAPU	64.356.714.000,00	-	-	64.356.714.000,00	32.178.357.000,00	-	-	32.178.357.000,00
04	287736	DISTRIK NAVIGASI K U P A N G	461.380.000,00	-	-	461.380.000,00	461.380.000,00	-	-	461.380.000,00
04	287778	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	12.483.968.000,00	-	-	12.483.968.000,00	12.477.881.001,00	-	-	12.477.881.001,00
04	287782	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN B I A K	18.257.438.000,00	-	-	18.257.438.000,00	8.954.737.390,00	-	-	8.954.737.390,00
04	287799	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MANOKWARI	6.741.589.000,00	-	-	6.741.589.000,00	6.708.203.314,00	-	-	6.708.203.314,00
04	287804	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SORONG	43.827.881.000,00	-	-	43.827.881.000,00	42.801.695.792,00	-	-	42.801.695.792,00
04	287811	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN FAK-FAK	398.338.000,00	-	-	398.338.000,00	398.315.000,00	-	-	398.315.000,00
04	287825	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MERAUKE	34.049.466.000,00	-	-	34.049.466.000,00	31.694.203.113,00	-	-	31.694.203.113,00
04	287892	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S E R U I	51.600.000,00	-	-	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	51.600.000,00
04	287900	DISTRIK NAVIGASI JAYAPURA	103.244.000,00	-	-	103.244.000,00	103.239.990,00	-	-	103.239.990,00
04	289445	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUSOH	56.221.000,00	-	-	56.221.000,00	56.221.000,00	-	-	56.221.000,00

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
04	289452	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SINGKIL	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00	94.999.999,00	-	-	94.999.999,00
04	289470	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN SUSU	38.575.000,00	-	-	38.575.000,00	38.144.000,00	-	-	38.144.000,00
04	289712	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOTA AGUNG	164.247.000,00	-	-	164.247.000,00	164.072.000,00	-	-	164.072.000,00
04	289796	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN K U M A I	78.981.000,00	-	-	78.981.000,00	78.925.000,00	-	-	78.925.000,00
04	289801	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELUK SIGINTUNG	278.166.000,00	-	-	278.166.000,00	278.100.000,00	-	-	278.100.000,00
04	289818	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SUKAMARA	107.943.000,00	-	-	107.943.000,00	107.846.381,00	-	-	107.846.381,00
04	289822	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANGKULIRANG	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.948.000,00	-	-	149.948.000,00
04	289843	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG REDEP	98.521.000,00	-	-	98.521.000,00	98.521.000,00	-	-	98.521.000,00
04	289850	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANA PASER	323.749.000,00	-	-	323.749.000,00	275.169.700,00	-	-	275.169.700,00
04	289864	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PARE-PARE	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.827.911,00	-	-	149.827.911,00
04	289871	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BAJOE	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
04	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	59.215.675.000,00	-	-	59.215.675.000,00	54.322.989.227,00	-	-	54.322.989.227,00
04	289949	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	283.466.000,00	-	-	283.466.000,00	283.466.000,00	-	-	283.466.000,00
04	289960	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REO	673.257.000,00	-	-	673.257.000,00	673.100.000,00	-	-	673.100.000,00
04	289981	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K A I M A N A	134.250.000,00	-	-	134.250.000,00	117.750.000,00	-	-	117.750.000,00
04	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	1.594.967.000,00	-	-	1.594.967.000,00	1.591.279.549,00	-	-	1.591.279.549,00
04	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	9.115.974.000,00	-	-	9.115.974.000,00	9.114.140.600,00	-	-	9.114.140.600,00
04	412848	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JEPARA	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
04	412854	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JUWANA	53.460.000,00	-	-	53.460.000,00	52.851.000,00	-	-	52.851.000,00
04	412879	DISTRIK NAVIGASI SEMARANG	555.420.000,00	-	-	555.420.000,00	550.641.000,00	-	-	550.641.000,00
04	412885	DISTRIK NAVIGASI CILACAP	1.713.087.000,00	-	-	1.713.087.000,00	1.709.694.599,00	-	-	1.709.694.599,00
04	412911	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANARUKAN	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.814.800,00	-	-	149.814.800,00
04	412942	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALIANGET	8.804.061.000,00	-	-	8.804.061.000,00	8.739.890.305,00	-	-	8.739.890.305,00
04	413002	DISTRIK NAVIGASI S A B A NG	571.359.000,00	-	-	571.359.000,00	569.519.206,00	-	-	569.519.206,00
04	413030	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN	34.200.000,00	-	-	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	34.200.000,00
04	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	72.000.000,00	-	-	72.000.000,00	71.779.678,00	-	-	71.779.678,00
04	413061	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	299.799.000,00	-	-	299.799.000,00	299.799.000,00	-	-	299.799.000,00
04	413070	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	20.622.216.000,00	-	-	20.622.216.000,00	10.336.622.700,00	-	-	10.336.622.700,00
04	413080	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA TANJUNG	138.602.000,00	-	-	138.602.000,00	138.602.000,00	-	-	138.602.000,00
04	413086	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	1.238.924.000,00	-	-	1.238.924.000,00	1.237.895.931,00	-	-	1.237.895.931,00
04	413143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA CINAKU	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	64.975.000,00	-	-	64.975.000,00
04	413180	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	160.634.000,00	-	-	160.634.000,00	159.919.800,00	-	-	159.919.800,00
04	413200	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAREMPA	1.713.133.000,00	-	-	1.713.133.000,00	1.713.133.000,00	-	-	1.713.133.000,00
04	413219	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DABO SINGKEP	159.226.000,00	-	-	159.226.000,00	159.224.750,00	-	-	159.224.750,00
04	413225	DISTRIK NAVIGASI D U M A I	560.000.000,00	-	-	560.000.000,00	559.849.458,00	-	-	559.849.458,00
04	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	695.391.000,00	-	-	695.391.000,00	685.451.900,00	-	-	685.451.900,00
04	413293	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	290.710.000,00	-	-	290.710.000,00	290.672.839,00	-	-	290.672.839,00
04	413313	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK	25.114.674.000,00	-	-	25.114.674.000,00	12.562.322.400,00	-	-	12.562.322.400,00
04	413322	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	15.256.566.000,00	-	-	15.256.566.000,00	7.238.256.505,00	-	-	7.238.256.505,00
04	413344	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAPAK TUAN	173.644.000,00	-	-	173.644.000,00	173.644.000,00	-	-	173.644.000,00
04	413350	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LEIDONG	44.515.000,00	-	-	44.515.000,00	44.373.250,00	-	-	44.373.250,00
04	413381	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MANGGAR	151.664.000,00	-	-	151.664.000,00	150.500.600,00	-	-	150.500.600,00
04	413390	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PADANG TIKAR	515.181.000,00	-	-	515.181.000,00	511.120.000,00	-	-	511.120.000,00
04	413426	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA SEMBOJA	28.600.000,00	-	-	28.600.000,00	28.349.000,00	-	-	28.349.000,00
04	413432	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TOLI-TOLI	95.880.000,00	-	-	95.880.000,00	95.830.000,00	-	-	95.830.000,00
04	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S E L A Y A R	180.459.000,00	-	-	180.459.000,00	180.407.000,00	-	-	180.407.000,00
04	413457	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SILOPO	152.560.000,00	-	-	152.560.000,00	152.343.000,00	-	-	152.343.000,00
04	413463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN M A M U J U	8.590.503.000,00	-	-	8.590.503.000,00	7.355.724.324,00	-	-	7.355.724.324,00
04	413472	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P A L O P O	156.674.000,00	-	-	156.674.000,00	122.800.000,00	-	-	122.800.000,00
04	413488	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MALILI	900.000.000,00	-	-	900.000.000,00	896.966.246,00	-	-	896.966.246,00
04	413494	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BAU - BAU	2.915.478.000,00	478.975.000,00	-	3.394.453.000,00	1.928.377.000,00	476.725.000,00	-	2.405.102.000,00
04	413508	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLAKA	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
04	413514	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN R A H A	3.135.372.000,00	-	-	3.135.372.000,00	3.132.649.100,00	-	-	3.132.649.100,00
04	413520	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U A L	55.788.747.000,00	-	-	55.788.747.000,00	52.928.011.700,00	-	-	52.928.011.700,00
04	413576	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN U L U S I A U	2.234.550.000,00	-	-	2.234.550.000,00	2.372.257.000,00	-	-	2.372.257.000,00
04	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	2.285.060.000,00	-	-	2.285.060.000,00	1.143.360.000,00	-	-	1.143.360.000,00
04	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	12.264.145.000,00	-	-	12.264.145.000,00	12.191.756.983,00	-	-	12.191.756.983,00
04	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN A M P A N A	19.407.270.000,00	-	-	19.407.270.000,00	10.108.871.778,00	-	-	10.108.871.778,00
04	413611	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B U N T A	307.600.000,00	-	-	307.600.000,00	307.600.000,00	-	-	307.600.000,00
04	413627	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMAHAI	307.500.000,00	-	-	307.500.000,00	307.500.000,00	-	-	307.500.000,00
04	413633	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN D O B O	156.000.000,00	-	-	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	156.000.000,00
04	413642	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T O B E L O	392.200.000,00	-	-	392.200.000,00	392.200.000,00	-	-	392.200.000,00
04	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	40.066.030.000,00	-	-	40.066.030.000,00	20.064.738.285,00	-	-	20.064.738.285,00
04	413664	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA	45.359.094.000,00	-	-	45.359.094.000,00	22.376.525.757,00	-	-	22.376.525.757,00
04	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	460.604.000,00	-	-	460.604.000,00	459.119.070,00	-	-	459.119.070,00
04	413695	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAHEWA	73.595.000,00	-	-	73.595.000,00	73.595.000,00	-	-	73.595.000,00
04	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.940.000,00	-	-	199.940.000,00
04	413715	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN LOMBOK	272.516.000,00	-	-	272.516.000,00	272.511.440,00	-	-	272.511.440,00
04	413730	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG WANGI	72.800.000,00	-	-	72.800.000,00	72.627.000,00	-	-	72.627.000,00
04	413746	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MALAHAYATI	99.840.000,00	-	-	99.840.000,00	99.840.000,00	-	-	99.840.000,00
04	413752	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K W A N D A N G	506.860.000,00	-	-	506.860.000,00	505.764.000,00	-	-	505.764.000,00

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
04	413761	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELAGA BIRU	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	89.565.000,00	-	-	89.565.000,00
04	413792	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LEMBAR	119.085.000,00	-	-	119.085.000,00	118.769.000,00	-	-	118.769.000,00
04	413803	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SINABANG	270.842.000,00	-	-	270.842.000,00	252.802.000,00	-	-	252.802.000,00
04	413812	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN N A M L E A	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	49.921.200,00	-	-	49.921.200,00
04	417707	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	43.200.000,00	-	-	43.200.000,00	43.200.000,00	-	-	43.200.000,00
04	417874	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
04	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	524.047.613.000,00	-	-	524.047.613.000,00	524.035.026.120,00	-	-	524.035.026.120,00
04	517882	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BONTANG	155.100.000,00	-	-	155.100.000,00	155.088.240,00	-	-	155.088.240,00
04	517904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	325.149.000,00	-	-	325.149.000,00	325.149.000,00	-	-	325.149.000,00
04	517925	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ORANSBARI	404.800.000,00	-	-	404.800.000,00	404.676.000,00	-	-	404.676.000,00
04	517946	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN A G A T S	232.500.000,00	-	-	232.500.000,00	226.810.000,00	-	-	226.810.000,00
04	517971	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K O K A S	35.700.000,00	-	-	35.700.000,00	35.700.000,00	-	-	35.700.000,00
04	521307	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN INDRAMAYU	46.000.000,00	-	-	46.000.000,00	45.937.000,00	-	-	45.937.000,00
04	521332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KARIMUN JAWA	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.500.000,00	-	-	149.500.000,00
04	521349	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRANTA	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	179.984.200,00	-	-	179.984.200,00
04	521360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MASALEMBU	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00
04	521395	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRONDONG	156.930.000,00	-	-	156.930.000,00	51.930.000,00	-	-	51.930.000,00
04	521417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN C A L A N G	10.771.710.000,00	-	-	10.771.710.000,00	10.698.249.612,00	-	-	10.698.249.612,00
04	521527	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	77.942.000,00	-	-	77.942.000,00	77.700.000,00	-	-	77.700.000,00
04	521552	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA GAUNG	34.072.000,00	-	-	34.072.000,00	34.044.000,00	-	-	34.044.000,00
04	521573	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANIPAHAN	12.700.000,00	-	-	12.700.000,00	12.695.000,00	-	-	12.695.000,00
04	521602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SENAYANG	107.000.000,00	-	-	107.000.000,00	106.762.000,00	-	-	106.762.000,00
04	521616	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NIPAH PANJANG	18.668.000,00	-	-	18.668.000,00	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00
04	521620	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI LUMPUR	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	49.180.000,00	-	-	49.180.000,00
04	521637	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SADAI	304.064.000,00	-	-	304.064.000,00	146.713.000,00	-	-	146.713.000,00
04	521641	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MENGGALA	66.600.000,00	-	-	66.600.000,00	66.600.000,00	-	-	66.600.000,00
04	521658	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN MARINGGAI	55.200.000,00	-	-	55.200.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00
04	521683	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOH	35.100.000,00	-	-	35.100.000,00	34.075.000,00	-	-	34.075.000,00
04	521690	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELOK MELANO	131.920.000,00	-	-	131.920.000,00	131.896.000,00	-	-	131.896.000,00
04	521705	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KENDAWANGAN	379.558.000,00	-	-	379.558.000,00	374.710.200,00	-	-	374.710.200,00
04	521730	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMURANG	341.448.000,00	-	-	341.448.000,00	341.446.000,00	-	-	341.446.000,00
04	521747	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOTABUNAN	94.000.000,00	-	-	94.000.000,00	93.850.000,00	-	-	93.850.000,00
04	521751	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN UKI/ INEBONTO	291.210.000,00	-	-	291.210.000,00	291.210.000,00	-	-	291.210.000,00
04	521768	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TILAMUTA	25.837.935.000,00	-	-	25.837.935.000,00	13.233.308.170,00	-	-	13.233.308.170,00
04	521789	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PAGIMANA	39.793.596.000,00	-	-	39.793.596.000,00	19.884.787.358,00	-	-	19.884.787.358,00
04	521793	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN L E O K	464.582.000,00	-	-	464.582.000,00	464.207.000,00	-	-	464.207.000,00
04	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	164.442.000,00	-	-	164.442.000,00	164.395.000,00	-	-	164.395.000,00
04	521822	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN M A J E N E	69.260.000,00	-	-	69.260.000,00	69.260.000,00	-	-	69.260.000,00
04	521836	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GARONGKONG	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	124.863.900,00	-	-	124.863.900,00
04	521840	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S I N J A I	122.380.000,00	-	-	122.380.000,00	122.360.000,00	-	-	122.360.000,00
04	521857	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PATIRO BAJO	92.344.000,00	-	-	92.344.000,00	92.194.265,00	-	-	92.194.265,00
04	521861	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMALA'A	279.304.000,00	-	-	279.304.000,00	277.605.000,00	-	-	277.605.000,00
04	521878	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U L E H U	550.000.000,00	-	-	550.000.000,00	549.838.000,00	-	-	549.838.000,00
04	521882	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KAIRATU	115.585.000,00	-	-	115.585.000,00	115.585.000,00	-	-	115.585.000,00
04	521899	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WEDA	80.900.000,00	-	-	80.900.000,00	80.900.000,00	-	-	80.900.000,00
04	521904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	79.052.000,00	-	-	79.052.000,00	79.052.000,00	-	-	79.052.000,00
04	521946	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S A P E	522.850.000,00	-	-	522.850.000,00	522.706.000,00	-	-	522.706.000,00
04	522578	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALABAHI	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	124.950.000,00	-	-	124.950.000,00
04	522582	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUPANG	21.084.669.000,00	-	-	21.084.669.000,00	21.082.832.547,00	-	-	21.082.832.547,00
04	528895	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	243.132.000,00	-	-	243.132.000,00	241.642.685,00	-	-	241.642.685,00
04	559140	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REMBANG	170.155.000,00	-	-	170.155.000,00	169.794.000,00	-	-	169.794.000,00
04	559154	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BATANG	127.050.000,00	-	-	127.050.000,00	126.700.000,00	-	-	126.700.000,00
04	559161	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPUDI	298.330.000,00	-	-	298.330.000,00	298.200.000,00	-	-	298.200.000,00
04	559196	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG BERINGIN	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
04	559218	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG SARANG ELANG	327.625.000,00	-	-	327.625.000,00	326.805.242,00	-	-	326.805.242,00
04	559222	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BATAHAN	122.810.000,00	-	-	122.810.000,00	122.810.000,00	-	-	122.810.000,00
04	559239	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MUARA SIBERUT	335.153.000,00	-	-	335.153.000,00	335.153.000,00	-	-	335.153.000,00
04	559243	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	838.300.000,00	-	-	838.300.000,00	838.300.000,00	-	-	838.300.000,00
04	559250	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI GUNTUNG	166.090.000,00	-	-	166.090.000,00	166.090.000,00	-	-	166.090.000,00
04	559271	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA MENDAHARA	66.181.000,00	-	-	66.181.000,00	66.158.000,00	-	-	66.158.000,00
04	559285	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN RANGGA ILUNG	52.800.000,00	-	-	52.800.000,00	52.800.000,00	-	-	52.800.000,00
04	559292	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SATUI	16.280.000,00	-	-	16.280.000,00	16.280.000,00	-	-	16.280.000,00
04	559311	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	12.555.000,00	-	-	12.555.000,00	12.555.000,00	-	-	12.555.000,00
04	559328	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LIKUPANG	60.995.000,00	-	-	60.995.000,00	60.980.000,00	-	-	60.980.000,00
04	559332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN OGOAMAS	517.241.000,00	-	-	517.241.000,00	515.610.000,00	-	-	515.610.000,00
04	559353	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI	430.545.000,00	-	-	430.545.000,00	427.416.100,00	-	-	427.416.100,00
04	559360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	399.610.000,00	-	-	399.610.000,00	199.430.000,00	-	-	199.430.000,00
04	559374	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BELANG-BELANG	898.000.000,00	-	-	898.000.000,00	896.950.000,00	-	-	896.950.000,00
04	559381	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIWA	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	198.675.343,00	-	-	198.675.343,00
04	559395	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAPUKO	320.600.000,00	-	-	320.600.000,00	320.491.000,00	-	-	320.491.000,00
04	559417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	36.930.000,00	-	-	36.930.000,00	36.930.000,00	-	-	36.930.000,00

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
04	559438	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA	687.630.000,00	-	-	687.630.000,00	687.630.000,00	-	-	687.630.000,00
04	559442	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI	168.884.000,00	-	-	168.884.000,00	168.884.000,00	-	-	168.884.000,00
04	559463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	187.610.000,00	-	-	187.610.000,00	185.724.750,00	-	-	185.724.750,00
04	559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	344.097.000,00	-	-	344.097.000,00	342.508.000,00	-	-	342.508.000,00
04	559484	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULA	377.070.000,00	-	-	377.070.000,00	376.900.000,00	-	-	376.900.000,00
04	559506	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI	83.250.000,00	-	-	83.250.000,00	83.250.000,00	-	-	83.250.000,00
04	559510	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PEMENANG	1.545.187.000,00	-	-	1.545.187.000,00	1.543.116.000,00	-	-	1.543.116.000,00
04	559527	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BARANUSA	112.347.000,00	-	-	112.347.000,00	112.347.000,00	-	-	112.347.000,00
04	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	215.664.000,00	-	-	215.664.000,00	215.664.000,00	-	-	215.664.000,00
04	559569	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAREN	88.710.000,00	-	-	88.710.000,00	88.150.000,00	-	-	88.150.000,00
04	559594	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN RAJA AMPAT	349.516.000,00	-	-	349.516.000,00	349.470.000,00	-	-	349.470.000,00
04	559602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MALAKONI-ENGGANO	51.840.000,00	-	-	51.840.000,00	51.840.000,00	-	-	51.840.000,00
04	559616	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LINAU BINTUHAN	294.000.000,00	-	-	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	294.000.000,00
04	652542	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANDANAIRE	113.550.000,00	-	-	113.550.000,00	113.550.000,00	-	-	113.550.000,00
04	652559	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BENETE	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	64.891.000,00	-	-	64.891.000,00
05	180945	KANTOR UPBU TANJUNG API	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00	112.300.000,00	-	-	112.300.000,00
05	288216	KANTOR UPBU FL TOBING	294.450.000,00	-	-	294.450.000,00	294.270.474,00	-	-	294.270.474,00
05	288241	KANTOR UPBU JAPURA	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	399.639.291,00	-	-	399.639.291,00
05	288262	KANTOR UPBU DABO	255.840.000,00	-	-	255.840.000,00	255.832.000,00	-	-	255.832.000,00
05	288372	KANTOR UPBU JUWATA	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.637.912,00	-	-	199.637.912,00
05	288393	KANTOR UPBU JALALUDDIN	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	247.800.000,00	-	-	247.800.000,00
05	288436	KANTOR UPBU HALUOLEO	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	297.949.086,00	-	-	297.949.086,00
05	288457	KANTOR UPBU SULTAN BABULLAH	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	197.000.000,00	-	-	197.000.000,00
05	288482	KANTOR UPBU SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
05	288499	KANTOR UPBUA MUHAMMAD SALAHUDDIN	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00	169.275.000,00	-	-	169.275.000,00
05	288511	KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	288525	KANTOR UPBU TAMBOLAKA	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	109.885.000,00	-	-	109.885.000,00
05	288532	KANTOR UPBU FRANSISKUS XAVERIUS SEDA	171.979.000,00	-	-	171.979.000,00	171.979.000,00	-	-	171.979.000,00
05	288571	KANTOR UPBU RENDANI	562.500.000,00	-	-	562.500.000,00	562.292.500,00	-	-	562.292.500,00
05	288588	KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK	310.600.000,00	-	-	310.600.000,00	303.860.000,00	-	-	303.860.000,00
05	288592	KANTOR UPBU MOPAH	325.000.000,00	-	-	325.000.000,00	323.694.000,00	-	-	323.694.000,00
05	288600	KANTOR UPBU WAMENA	294.000.000,00	-	-	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	294.000.000,00
05	288614	KANTOR UPBU NABIRE	199.800.000,00	-	-	199.800.000,00	198.135.000,00	-	-	198.135.000,00
05	320344	KANTOR UPBU RANAI	200.542.000,00	-	-	200.542.000,00	200.542.000,00	-	-	200.542.000,00
05	413828	KANTOR UPBU BUDIARTO	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00
05	413834	KANTOR UPBU FRANS SALES LEGA	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00	209.900.000,00	-	-	209.900.000,00
05	413840	KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM	271.280.000,00	-	-	271.280.000,00	269.279.000,00	-	-	269.279.000,00
05	413859	KANTOR UPBU KASIGUNCU	191.527.000,00	-	-	191.527.000,00	190.993.000,00	-	-	190.993.000,00
05	413865	KANTOR UPBU CUT NYAK DHIEN NAGAN RAYA	122.870.000,00	-	-	122.870.000,00	119.884.000,00	-	-	119.884.000,00
05	413871	KANTOR UPBU TOREA	345.000.000,00	-	-	345.000.000,00	344.000.000,00	-	-	344.000.000,00
05	413880	KANTOR UPBU ISKANDAR	202.000.000,00	-	-	202.000.000,00	201.367.500,00	-	-	201.367.500,00
05	413900	KANTOR UPBU TUNGGUL WULUNG	71.000.000,00	-	-	71.000.000,00	70.953.000,00	-	-	70.953.000,00
05	413916	KANTOR UPBU BINAKA	349.220.000,00	-	-	349.220.000,00	349.073.900,00	-	-	349.073.900,00
05	413922	KANTOR UPBU RAHADI OESMAN	84.750.000,00	-	-	84.750.000,00	84.384.000,00	-	-	84.384.000,00
05	413931	KANTOR UPBU TEBELIAN	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	393.866.000,00	-	-	393.866.000,00
05	413947	KANTOR UPBU H. ASAN	100.859.000,00	-	-	100.859.000,00	100.600.000,00	-	-	100.600.000,00
05	413978	KANTOR UPBU NAHA	225.760.000,00	-	-	225.760.000,00	225.760.000,00	-	-	225.760.000,00
05	413984	KANTOR UPBU SYUKURAN AMINUDIN AMIR	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
05	413990	KANTOR UPBU SULTAN BANTILAN	71.500.000,00	-	-	71.500.000,00	71.497.818,00	-	-	71.497.818,00
05	414004	KANTOR UPBU BETO AMBARI	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00	168.617.562,00	-	-	168.617.562,00
05	414010	KANTOR UPBU BANDANEIRA	156.750.000,00	-	-	156.750.000,00	156.750.000,00	-	-	156.750.000,00
05	414029	KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN	281.120.000,00	-	-	281.120.000,00	280.970.000,00	-	-	280.970.000,00
05	414035	KANTOR UPBU SUDJARWO TJONDRONEGORO	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
05	414041	KANTOR UPBU BINTUNI	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	414050	KANTOR UPBU TANAH MERAH	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00	239.400.000,00	-	-	239.400.000,00
05	414066	KANTOR UPBU MARARENA	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00
05	414072	KANTOR UPBU MINDIPTANAH	98.100.000,00	-	-	98.100.000,00	98.100.000,00	-	-	98.100.000,00
05	414081	KANTOR UPBU OKSIBIL	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	297.900.000,00	-	-	297.900.000,00
05	414097	KANTOR UPBU ENAROTALI	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
05	414101	KANTOR UPBU WAGHETE	1.624.650.000,00	-	-	1.624.650.000,00	842.300.000,00	-	-	842.300.000,00
05	414117	KANTOR UPBU MULIA	132.500.000,00	-	-	132.500.000,00	132.500.000,00	-	-	132.500.000,00
05	414123	KANTOR UPBU UTAROM	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	147.160.000,00	-	-	147.160.000,00
05	414132	KANTOR UPBU TEUKU CUT ALI	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	99.900.000,00	-	-	99.900.000,00
05	414148	KANTOR UPBU LASIKIN	305.810.000,00	-	-	305.810.000,00	305.808.000,00	-	-	305.808.000,00
05	414154	KANTOR UPBU ROKOT	349.000.000,00	-	-	349.000.000,00	348.504.286,00	-	-	348.504.286,00
05	414160	KANTOR UPBU RAJA HAJI ABDULLAH	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	299.035.400,00	-	-	299.035.400,00
05	414179	KANTOR UPBU DEPATI PARBO	266.365.000,00	-	-	266.365.000,00	264.330.000,00	-	-	264.330.000,00
05	414185	KANTOR UPBU PANGSUMA	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	178.959.530,00	-	-	178.959.530,00
05	414191	KANTOR UPBU TAMPA PADANG	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00
05	414205	KANTOR UPBU PONGTIKU	147.500.000,00	-	-	147.500.000,00	146.494.408,00	-	-	146.494.408,00
05	414211	KANTOR UPBU OESMAN SADIK	99.590.000,00	-	-	99.590.000,00	99.500.000,00	-	-	99.500.000,00

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
05	414220	KANTOR UPBU GAMAR MALAMO	108.000.000,00	-	-	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	108.000.000,00
05	414236	KANTOR UPBU MALI	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.985.500,00	-	-	199.985.500,00
05	414242	KANTOR UPBU GEWAYANTANA	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
05	414251	KANTOR UPBU KOMODO	200.080.000,00	-	-	200.080.000,00	199.850.000,00	-	-	199.850.000,00
05	417706	KANTOR UPBU SELUWING	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
05	417708	KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
05	417720	KANTOR UPBU LONG APUNG	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	249.000.000,00	-	-	249.000.000,00
05	419220	KANTOR UPBU SEKO	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	99.722.000,00	-	-	99.722.000,00
05	419221	KANTOR UPBU RAMPI	344.500.000,00	-	-	344.500.000,00	344.300.000,00	-	-	344.300.000,00
05	447786	KANTOR UPBU TIOM	195.000.000,00	-	-	195.000.000,00	195.000.000,00	-	-	195.000.000,00
05	447899	KANTOR UPBU BULI	165.400.000,00	-	-	165.400.000,00	162.740.400,00	-	-	162.740.400,00
05	449005	KANTOR UPBU ELELIM	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
05	449461	BANDAR UDARA ARUNG PALAKA	158.500.000,00	-	-	158.500.000,00	158.106.450,00	-	-	158.106.450,00
05	449462	KANTOR UPBU LAGALIGO	227.500.000,00	-	-	227.500.000,00	226.900.000,00	-	-	226.900.000,00
05	449464	KANTOR UPBU MATAHORA	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.993.000,00	-	-	149.993.000,00
05	449465	KANTOR UPBU SANGIA NI BANDERA	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00	169.337.000,00	-	-	169.337.000,00
05	449466	KANTOR UPBU AMAHAI	578.834.000,00	-	-	578.834.000,00	577.400.000,00	-	-	577.400.000,00
05	449467	KANTOR UPBU WAHAI	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
05	449468	KANTOR UPBU NAMROLE	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	499.999.800,00	-	-	499.999.800,00
05	449469	KANTOR UPBU JOHN BECKER	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	196.173.000,00	-	-	196.173.000,00
05	449470	KANTOR UPBU LARAT	41.800.000,00	-	-	41.800.000,00	41.625.000,00	-	-	41.625.000,00
05	449484	KANTOR UPBU AKIMUGA	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00	112.110.000,00	-	-	112.110.000,00
05	449487	KANTOR UPBU MARINDA	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	179.970.000,00	-	-	179.970.000,00
05	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	299.140.000,00	-	-	299.140.000,00
05	449491	KANTOR UPBU EMALAMO	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.757.000,00	-	-	199.757.000,00
05	449493	KANTOR UPBU PITU	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	449508	KANTOR UPBU H. AROEPALA	175.100.000,00	-	-	175.100.000,00	174.765.000,00	-	-	174.765.000,00
05	449514	KANTOR UPBU DOBO	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00
05	465487	KANTOR UPBU REMBELE	832.770.000,00	-	-	832.770.000,00	832.168.000,00	-	-	832.168.000,00
05	465493	KANTOR UPBU LASONDRE	230.000.000,00	-	-	230.000.000,00	230.000.000,00	-	-	230.000.000,00
05	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	-	573.569.883.000,00	-	573.569.883.000,00	-	573.569.883.000,00	-	573.569.883.000,00
05	466250	KANTOR UPBU POGOGUL	195.000.000,00	-	-	195.000.000,00	194.717.160,00	-	-	194.717.160,00
05	466266	KANTOR UPBU MATHILDA BATLAYERI	157.030.000,00	-	-	157.030.000,00	157.030.000,00	-	-	157.030.000,00
05	466272	KANTOR UPBU MOZES KILANGIN	265.625.000,00	-	-	265.625.000,00	260.800.000,00	-	-	260.800.000,00
05	499295	KANTOR UPBU NAMLEA	293.375.000,00	-	-	293.375.000,00	293.281.000,00	-	-	293.281.000,00
05	499522	KANTOR UPBU PASIR PANGARAIAN	271.016.000,00	-	-	271.016.000,00	187.628.000,00	-	-	187.628.000,00
05	499531	KANTOR UPBU TRUNOJOYO	131.124.000,00	-	-	131.124.000,00	131.124.000,00	-	-	131.124.000,00
05	499578	KANTOR UPBU KIMAM	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	74.100.000,00	-	-	74.100.000,00
05	499590	KANTOR UPBU KAMUR	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
05	499604	KANTOR UPBU BOMAKIA	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
05	499635	KANTOR UPBU DABRA	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	499641	KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA	101.864.000,00	-	-	101.864.000,00	101.400.000,00	-	-	101.400.000,00
05	512769	KANTOR UPBU MUKO-MUKO	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	21.669.500,00	-	-	21.669.500,00
05	517658	KANTOR UPBU NANGAPINOH	213.463.000,00	-	-	213.463.000,00	213.429.000,00	-	-	213.429.000,00
05	517662	KANTOR UPBU BOKONDINI	162.000.000,00	-	-	162.000.000,00	162.000.000,00	-	-	162.000.000,00
05	518138	KANTOR UPBU KEPI	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
05	518142	KANTOR UPBU OKABA	172.500.000,00	-	-	172.500.000,00	172.500.000,00	-	-	172.500.000,00
05	518159	KANTOR UPBU MOANAMANI	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
05	518163	KANTOR UPBU WASIOR	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
05	518170	KANTOR UPBU INANWATAN	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.989.000,00	-	-	149.989.000,00
05	518184	KANTOR UPBU TEMINABUAN	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
05	518191	KANTOR UPBU MERDEY	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00
05	518206	KANTOR UPBU KOKONAO	108.000.000,00	-	-	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	108.000.000,00
05	521992	KANTOR UPBU KUABANG	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
05	522007	KANTOR UPBU MELONGGUANE	224.000.000,00	-	-	224.000.000,00	222.438.820,00	-	-	222.438.820,00
05	522011	KANTOR UPBU A.A BERE TALLO	42.500.000,00	-	-	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	42.500.000,00
05	522028	KANTOR UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
05	522032	KANTOR UPBU TARDAMU	64.610.000,00	-	-	64.610.000,00	64.610.000,00	-	-	64.610.000,00
05	539011	KANTOR UPBU ANDI JEMMA	126.000.000,00	-	-	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	126.000.000,00
05	539028	KANTOR UPBU KAREL SADSUITUBUN	365.600.000,00	-	-	365.600.000,00	365.600.000,00	-	-	365.600.000,00
05	547924	KANTOR UPBU AEK GODANG	213.600.000,00	-	-	213.600.000,00	212.075.600,00	-	-	212.075.600,00
05	568601	KANTOR UPBU CAKRABHUANA	591.410.000,00	-	-	591.410.000,00	584.877.420,00	-	-	584.877.420,00
05	568615	KANTOR UPBU DEWA DARU	108.587.000,00	-	-	108.587.000,00	108.587.000,00	-	-	108.587.000,00
05	568622	KANTOR UPBU WONOPITO	76.440.000,00	-	-	76.440.000,00	76.440.000,00	-	-	76.440.000,00
05	568636	KANTOR UPBU KUALA PEMBUANG	165.000.000,00	-	-	165.000.000,00	164.800.000,00	-	-	164.800.000,00
05	568640	KANTOR UPBU KUALA KURUN	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	99.850.000,00	-	-	99.850.000,00
05	568661	KANTOR UPBU NUNUKAN	245.000.000,00	-	-	245.000.000,00	244.134.000,00	-	-	244.134.000,00
05	568678	KANTOR UPBU NUMFOOR	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00	129.690.000,00	-	-	129.690.000,00
05	568681	KANTOR UPBU MUARA BUNGO	239.000.000,00	-	-	239.000.000,00	237.580.000,00	-	-	237.580.000,00
05	606339	KANTOR UPBU KARUBAGA	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
05	606343	KANTOR UPBU EWER	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.500.000,00	-	-	149.500.000,00

Kode BA ES I	Kode Satker	Uraian Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
			Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belana Bansos	Total Realisasi
05	606350	KANTOR UPBU ILLU	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	606364	KANTOR UPBU BABO	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00
05	606371	KANTOR UPBU KAMBUAYA	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	149.950.000,00	-	-	149.950.000,00
05	649045	KANTOR UPBU MOROWALI	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00
05	649046	KANTOR UPBU LETUNG	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00
05	649047	KANTOR UPBU HARUN THOHIR	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00
05	649048	KANTOR UPBU MARATUA	76.800.000,00	-	-	76.800.000,00	76.799.600,00	-	-	76.799.600,00
05	649049	KANTOR UPBU MALIKUSSALEH	291.605.000,00	-	-	291.605.000,00	290.632.000,00	-	-	290.632.000,00
05	649821	KANTOR UPBU BADE	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	649835	KANTOR UPBU SENGGEH	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
05	649842	KANTOR UPBU BATOM	242.800.000,00	-	-	242.800.000,00	238.993.926,00	-	-	238.993.926,00
05	649856	KANTOR UPBU BILORAI	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	198.395.000,00	-	-	198.395.000,00
05	652591	KANTOR UPBU ILAGA	347.000.000,00	-	-	347.000.000,00	342.670.000,00	-	-	342.670.000,00
05	652606	KANTOR UPBU KEBAR	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
05	652610	KANTOR UPBU AYAWASI	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
05	652627	KANTOR UPBU MAIMUN SALEH	343.000.000,00	-	-	343.000.000,00	342.934.000,00	-	-	342.934.000,00
05	662815	KANTOR UPBU SOA	113.652.000,00	-	-	113.652.000,00	113.600.000,00	-	-	113.600.000,00
05	662816	KANTOR UPBU NOP GOLIAT DEKAI	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
05	662855	KANTOR UPBU DATAH DAWAI	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00	139.100.000,00	-	-	139.100.000,00
05	662862	KANTOR UPBU SUGIMANURU	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	49.500.000,00	-	-	49.500.000,00
08	467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	-	283.483.213.000,00	-	283.483.213.000,00	-	283.320.484.838,00	-	283.320.484.838,00
08	467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	-	37.010.683.000,00	-	37.010.683.000,00	-	36.791.729.334,00	-	36.791.729.334,00
08	467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	-	381.600.237.000,00	-	381.600.237.000,00	-	381.332.937.825,00	-	381.332.937.825,00
08	467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	-	419.272.071.000,00	-	419.272.071.000,00	-	419.272.070.700,00	-	419.272.070.700,00
08	467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	-	627.907.249.000,00	-	627.907.249.000,00	-	620.025.008.232,00	-	620.025.008.232,00
08	467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT	-	247.880.352.000,00	-	247.880.352.000,00	-	247.880.343.844,00	-	247.880.343.844,00
08	467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	-	100.767.990.000,00	-	100.767.990.000,00	-	100.195.154.035,00	-	100.195.154.035,00
08	467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	16.074.290.000,00	506.828.468.000,00	-	522.902.758.000,00	16.073.122.400,00	506.814.337.886,00	-	522.887.460.286,00
08	467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	-	863.067.063.000,00	-	863.067.063.000,00	-	863.063.565.260,00	-	863.063.565.260,00
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	134.531.653,00	-	-	134.531.653,00
12	130470	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) MEMPAWAH	310.921.000,00	-	-	310.921.000,00	310.921.000,00	-	-	310.921.000,00
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	695.000.000,00	-	-	695.000.000,00	635.150.091,00	-	-	635.150.091,00
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	348.801.136,00	-	-	348.801.136,00
12	288965	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	-	8.199.909.000,00	-	8.199.909.000,00	-	8.199.307.545,00	-	8.199.307.545,00
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	49.402.000,00	-	-	49.402.000,00
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	134.500.000,00	-	-	134.500.000,00	134.280.040,00	-	-	134.280.040,00
12	414324	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)	219.598.000,00	-	-	219.598.000,00	217.682.000,00	-	-	217.682.000,00
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	332.550.000,00	-	-	332.550.000,00	332.528.984,00	-	-	332.528.984,00
12	414349	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	126.501.000,00	-	-	126.501.000,00	72.322.226,00	-	-	72.322.226,00
12	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	520.000.000,00	-	-	520.000.000,00	518.694.104,00	-	-	518.694.104,00
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	192.192.000,00	-	-	192.192.000,00	191.070.000,00	-	-	191.070.000,00
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00	197.990.400,00	-	-	197.990.400,00
12	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	177.000.000,00	-	-	177.000.000,00	164.816.730,00	-	-	164.816.730,00
12	419173	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
12	440006	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN	119.000.000,00	-	-	119.000.000,00	118.940.150,00	-	-	118.940.150,00
12	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	148.400.000,00	-	-	148.400.000,00	148.400.000,00	-	-	148.400.000,00
12	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	278.748.000,00	-	-	278.748.000,00	278.706.834,00	-	-	278.706.834,00
12	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.752.000,00	-	-	199.752.000,00
12	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	199.993.296,00	-	-	199.993.296,00
12	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	119.991.000,00	-	-	119.991.000,00
12	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	179.952.464,00	-	-	179.952.464,00
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	101.035.000,00	-	-	101.035.000,00	101.035.000,00	-	-	101.035.000,00
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	499.578.480,00	-	-	499.578.480,00
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	118.863.800,00	-	-	118.863.800,00
12	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	113.000.000,00	-	-	113.000.000,00	113.000.000,00	-	-	113.000.000,00
12	649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	122.872.000,00	-	-	122.872.000,00	122.872.000,00	-	-	122.872.000,00
13	15413	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	110.858.000,00	10.033.142.000,00	-	10.144.000.000,00	110.857.644,00	10.032.960.000,00	-	10.143.817.644,00
		TOTAL	**2.761.377.169.000,00**	**6.080.505.623.000,00**	**-**	**8.841.882.792.000,00**	**2.319.668.343.552,00**	**5.685.826.953.483,00**	**-**	**8.005.495.297.035,00**

Lampiran F.5. Capaian *Output* Prioritas Nasional Kementerian Perhubungan Per Satker Tahun 2022

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
03	352596	DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	1.914.711.000,00	1.913.343.853,00	100%	layanan	1	1	100
03	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.672.035.000,00	-	0%	layanan	1	0	0
03	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	3.041.464.000,00	3.026.645.716,00	100%	layanan	1	1	99,62
03	352598	DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	3.605.304.000,00	2.945.722.240,00	82%	layanan	2	2	100
03	352598	DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.722.358.000,00	2.712.603.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	5.958.559.000,00	5.958.559.000,00	100%	layanan	2	2	100
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	6.544.014.000,00	6.536.986.700,00	100%	layanan	2	1	99,89
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.865.000.000,00	2.863.423.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	5.511.486.000,00	5.510.773.307,00	100%	layanan	1	1	100
03	352599	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	3.368.248.000,00	3.366.393.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	10.891.948.000,00	10.891.204.000,00	100%	layanan	3	3	100
03	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	6.126.956.000,00	6.081.391.840,00	99%	layanan	1	1	100
03	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.254.253.000,00	2.254.253.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	352600	DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.603.338.000,00	2.600.000.000,00	100%	layanan	13	13	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	4.341.542.000,00	4.048.551.129,00	93%	layanan	1	1	92
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	6.931.229.000,00	6.931.117.479,00	100%	layanan	2	2	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	3.595.354.000,00	3.595.000.000,00	100%	layanan	1	1	99,99
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	6.287.031.000,00	6.285.794.235,00	100%	layanan	10	10	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.810.744.000,00	2.803.030.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.577.000.000,00	2.576.997.716,00	100%	layanan	1	1	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	4.740.500.000,00	4.740.056.638,00	100%	layanan	11	11	100
03	403841	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	4.963.569.000,00	4.819.014.517,00	97%	layanan	1	3	97,09
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	5.529.768.000,00	5.527.444.000,00	100%	layanan	1	2,64	100
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	37.110.008.000,00	34.636.881.728,00	93%	layanan	2	2	183,88
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	2.128.807.000,00	2.117.423.996,00	99%	layanan	4	4	100
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	64.733.276.000,00	61.841.116.585,00	96%	unit	4	4	184,2
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	12.394.617.000,00	12.393.331.389,00	100%	layanan	1	1	100
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	38.634.580.000,00	38.634.502.833,00	100%	layanan	2	2	100
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	9.862.360.000,00	9.862.360.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	403842	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	23.686.234.000,00	23.605.713.000,00	100%	layanan	2	2	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	17.190.546.000,00	17.190.144.725,00	100%	layanan	2	2	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	9.813.265.000,00	9.772.163.200,00	100%	layanan	1	2	99,58
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	37.068.455.000,00	36.649.024.300,00	99%	layanan	3	3	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	34.612.570.000,00	34.578.969.207,00	100%	layanan	4	4	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	14.177.347.000,00	13.523.973.043,00	95%	layanan	2	2	99,39
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	53.767.695.000,00	53.538.568.305,00	100%	layanan	4	4	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	60.572.486.000,00	60.570.755.415,00	100%	layanan	5	11,63	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	32.178.357.000,00	32.178.357.000,00	100%	layanan	2	2	100
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	12.507.457.000,00	12.501.045.001,00	100%	unit	3	3	99,95
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	9.128.719.000,00	8.954.737.390,00	98%	layanan	1	1	98,09
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	13.071.978.000,00	11.764.764.028,00	90%	layanan	2	1	191,63
03	403843	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	43.827.881.000,00	42.801.695.792,00	98%	Unit	5	5	99,96
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	68.098.932.000,00	57.625.617.448,00	85%	layanan	10	10	183,8
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	95.646.884.000,00	90.731.524.074,00	95%	unit	12	12	100
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	9.050.974.000,00	9.049.368.500,00	100%	layanan	1	1	100
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	8.804.061.000,00	8.739.890.305,00	99%	layanan	1	1	94,44
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	10.279.332.000,00	10.273.350.700,00	100%	layanan	1	1	100
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	25.104.354.000,00	21.212.620.026,00	84%	layanan	2	1,92	191,67
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	15.256.566.000,00	13.329.803.964,00	87%	layanan	2	1,9164	191,63
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	8.455.325.000,00	7.221.553.324,00	85%	Unit	4	4,2	99,99
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	113.667.146.000,00	111.607.546.200,00	98%	Unit	11	11	100
03	403844	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	10.655.161.000,00	10.587.628.983,00	99%	layanan	1	1	99,99
03	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	29.848.323.000,00	29.807.612.807,00	100%	unit	2	2	100
03	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	20.229.083.000,00	20.228.038.285,00	100%	layanan	6	6	100
03	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	22.646.262.000,00	22.309.955.757,00	99%	layanan	2	2	100
03	403845	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V	01	Teknologi Informasi dan Komunikasi Prioritas Nasional	1.313.910.160.000,00	1.143.890.211.152,00	87%	NSPK	198	137	180
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	1.313.910.160.000,00	1.143.890.211.152,00	87%	NSPK	198	137	190
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	10.350.321.000,00	10.340.070.652,00	100%	layanan	2	2	100
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	12.598.117.000,00	12.593.876.920,00	100%	layanan	1	1	100
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	39.529.666.000,00	34.713.552.046,00	88%	layanan	6	4,848	190,84
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	21.084.669.000,00	21.082.832.547,00	100%	layanan	2	2	100
03	403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI	01	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	36.858.138.000,00	32.983.981.804,00	89%	unit	271	283	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	91.474.867.000,00	91.170.266.278,00	100%	Paket	115	121	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	91.474.867.000,00	91.170.266.278,00	100%	Paket	115	121	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	8.769.754.000,00	-	0%	Orang	84	0	0
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	38.456.535.000,00	38.442.438.419,00	100%	Paket	302	190	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	38.456.535.000,00	38.442.438.419,00	100%	Paket	302	190	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	9.068.580.000,00	9.051.846.945,00	100%	NSPK	17	17	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	01	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	9.068.580.000,00	9.051.846.945,00	100%	NSPK	17	17	100

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	2.952.073.000,00	2.872.014.781,00	97%	layanan	1	1	100
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	2.952.073.000,00	2.872.014.781,00	97%	layanan	1	1	0
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	3.477.105.000,00	-	0%	layanan	1	0	0
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	3.477.105.000,00	-	0%	layanan	1	0	0
03	403847	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1.508.168.000,00	1.508.167.997,00	100%	layanan	1	1	0
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	1.508.168.000,00	1.508.167.997,00	100%	layanan	1	1	100
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	2.099.256.000,00	2.097.935.390,00	100%	layanan	1	1	99,94
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	2.099.256.000,00	2.097.935.390,00	100%	layanan	1	1	0
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	1.499.676.000,00	1.498.661.634,00	100%	layanan	1	1	100
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1.499.676.000,00	1.498.661.634,00	100%	layanan	1	1	0
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	4.461.799.000,00	4.458.614.500,00	100%	layanan	1	1	0
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	4.461.799.000,00	4.458.614.500,00	100%	layanan	1	1	100
03	403848	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	4.740.601.000,00	4.740.000.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	4.740.601.000,00	4.740.000.000,00	100%	layanan	1	1	0
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	1.123.632.000,00	1.118.400.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1.123.632.000,00	1.118.400.000,00	100%	layanan	1	1	0
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1.695.000.000,00	1.694.750.186,00	100%	layanan	1	1	0
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	1.695.000.000,00	1.694.750.186,00	100%	layanan	1	1	100
03	403849	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) (PEN)	4.235.781.000,00	4.209.561.366,00	99%	layanan	1	1	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	4.235.781.000,00	4.209.561.366,00	99%	layanan	1	1	0
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional	907.018.528.000,00	767.423.138.886,00	85%	layanan	72	49	180
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	71.961.003.000,00	71.023.257.187,00	99%	Kesepakatan	15	15	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	71.961.003.000,00	71.023.257.187,00	99%	Kesepakatan	15	15	99,98
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1.545.082.000,00	1.294.871.730,00	84%	Orang	82	82	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	20.258.851.000,00	19.992.435.441,00	99%	Kesepakatan	23	46	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	24.693.304.000,00	24.605.112.282,00	100%	NSPK	15	13	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	4.454.476.000,00	4.431.057.495,00	99%	Kesepakatan	39	39	0
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	4.454.476.000,00	4.431.057.495,00	99%	Kesepakatan	39	39	100
03	403851	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI	02	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	48.170.731.000,00	48.169.753.669,00	100%	Kesepakatan	9	9	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	2.337.755.000,00	2.327.856.900,00	100%	layanan	10	10	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	26.156.562.000,00	25.990.316.344,00	99%	unit	29	30	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	11.190.287.000,00	11.190.235.520,00	100%	Kesepakatan	33	36	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	11.190.287.000,00	11.190.235.520,00	100%	Kesepakatan	33	36	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	5.001.868.000,00	-	0%	Orang	226	0	0
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1.215.200.000,00	1.214.811.391,00	100%	Orang	70	70	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	15.470.810.000,00	15.148.140.956,00	98%	Kesepakatan	43	43	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	02	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	11.537.682.000,00	11.537.365.162,00	100%	layanan	40	40	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	03	Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)	18.460.830.000,00	18.460.830.000,00	100%	layanan	2	2	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	03	Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional	123.084.016.000,00	101.430.272.479,00	82%	layanan	12	8	168
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	03	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	28.132.630.000,00	28.128.609.203,00	100%	unit	42	42	100
03	403852	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XII	03	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	28.132.630.000,00	28.128.609.203,00	100%	unit	42	42	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	28.132.630.000,00	28.128.609.203,00	100%	unit	42	42	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	14.106.827.000,00	13.491.592.906,00	96%	Orang	480	480	95,64
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	52.219.538.000,00	49.308.893.043,00	94%	Orang	56	59	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	52.219.538.000,00	49.308.893.043,00	94%	Orang	56	59	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	18.236.457.000,00	15.720.309.946,00	86%	Orang	806	806	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	82.491.254.000,00	82.164.558.306,00	100%	Orang	3585	3161	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	20.938.795.000,00	-	0%	Orang	676	0	0
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	12.830.038.000,00	12.827.914.405,00	100%	NSPK	33	32	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	12.830.038.000,00	12.827.914.405,00	100%	NSPK	33	32	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	8.643.920.000,00	8.638.846.344,00	100%	Orang	528	503	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	03	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	13.266.824.000,00	19.429.976.509,00	146%	Orang	360	448	100
03	403853	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII	04	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	589.241.164.000,00	584.893.092.438,00	99%	layanan	10	10	100
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	5.410.290.000,00	5.189.930.716,00	96%	Orang	1601	1601	97,55
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	48.467.809.000,00	47.101.715.900,00	97%	Orang	2250	1990	95,8
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	2.270.000.000,00	2.157.031.932,00	95%	Orang	692	902	100
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	35.136.338.000,00	35.047.654.556,00	100%	Orang	3156	3156	100
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	38.445.766.000,00	37.572.748.946,00	98%	Orang	1153	980	98,39
03	403854	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	2.365.850.000,00	2.131.470.866,00	90%	Orang	702	702	100
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	44.707.507.000,00	44.493.933.048,00	100%	Orang	1419	1915	100
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	13.112.999.000,00	13.108.836.621,00	100%	Orang	474	474	99,92
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	10.211.068.000,00	10.160.373.858,00	100%	Orang	920	920	100
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	28.802.078.000,00	28.754.398.271,00	100%	Orang	1148	1148	99,69
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	17.888.400.000,00	17.888.134.628,00	100%	Orang	1842	2164	100
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1.653.903.000,00	-	0%	layanan	302	0	0
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	2.170.000.000,00	2.169.662.619,00	100%	Orang	722	722	100
03	403855	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	53.011.646.000,00	49.515.501.679,00	93%	Orang	1939	1863	89,01
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	04	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	5.475.112.000,00	5.474.982.921,00	100%	layanan	2278	2278	100
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	04	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	12.233.873.000,00	12.233.783.674,00	100%	Orang	2723	8261,5	100
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	38.068.036.000,00	38.021.780.528,00	100%	Orang	7474	7474	99,81
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	38.068.036.000,00	38.021.780.528,00	100%	Orang	7474	7474	100

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	19.362.305.000,00	19.227.238.529,00	99%	Orang	10031	13732	100
03	403857	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVI	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	19.362.305.000,00	19.227.238.529,00	99%	Orang	10031	13732	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	15.498.483.000,00	15.427.935.479,00	100%	layanan	7994	7678	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	15.498.483.000,00	15.427.935.479,00	100%	layanan	7994	7678	99,9
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	1.866.783.000,00	1.859.226.812,00	100%	Orang	3840	3880	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	28.711.627.000,00	28.469.863.189,00	99%	Orang	10113	8944	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	28.711.627.000,00	28.469.863.189,00	99%	Orang	10113	8944	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	9.756.466.000,00	9.725.284.167,00	100%	Orang	3520	3562	99,6
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	9.756.466.000,00	9.725.284.167,00	100%	Orang	3520	3562	99,97
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	7.633.084.000,00	7.488.916.363,00	98%	Orang	5561	5561	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	7.258.021.000,00	7.234.008.278,00	100%	Orang	3889	3889	99
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	17.240.786.000,00	17.271.728.392,00	100%	Orang	9307	9972	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	17.240.786.000,00	17.271.728.392,00	100%	Orang	9307	9972	100
03	403858	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	31.864.311.000,00	31.597.036.362,00	99%	layanan	11081	10650	100
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	31.864.311.000,00	31.597.036.362,00	99%	layanan	11081	10650	100
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	05	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	27.224.169.000,00	27.224.080.620,00	100%	Orang	10411	10411	100
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	05	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	27.224.169.000,00	27.224.080.620,00	100%	Orang	10411	10411	100
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	688.192.000,00	688.059.827,00	100%	Orang	251	251	100
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	11.801.898.000,00	11.787.322.391,00	100%	Orang	20528	8828	99,89
03	403859	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.279.640.000,00	2.259.440.394,00	99%	layanan	901	901	100
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	34.786.110.000,00	34.650.190.509,00	100%	Orang	2033	2123	100
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	7.367.386.000,00	6.831.804.779,00	93%	Orang	23916	17703	100
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	7.668.239.000,00	7.655.655.280,00	100%	Orang	11396	65890	100
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	5.092.972.000,00	5.068.231.624,00	100%	Orang	144	144	99,51
03	403860	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	8.025.810.000,00	7.969.116.266,00	99%	Orang	240	240	100
03	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	2.202.125.000,00	2.177.019.088,00	99%	Orang	119	119	100
03	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	2.946.310.000,00	2.946.247.723,00	100%	Orang	2716	3614	100
03	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	3.023.500.000,00	2.800.835.944,00	93%	layanan	683	683	100
03	403861	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XX	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1.340.906.000,00	1.340.880.691,00	100%	Orang	494	494	100
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1.053.200.000,00	1.034.597.200,00	98%	Orang	401	401	100
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.364.055.000,00	2.363.821.345,00	100%	Orang	901	901	100
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.524.298.000,00	2.522.334.453,00	100%	layanan	1004	1014	100
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	13.701.082.000,00	9.346.840.380,00	68%	Orang	5172	5172	100
03	403863	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXI	06	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1.912.500.000,00	1.846.593.713,00	97%	Orang	956	956	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	06	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	17.555.090.000,00	17.554.527.047,00	100%	Orang	2536	2536	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.141.115.000,00	2.074.331.740,00	97%	Orang	118	118	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	5.422.983.000,00	5.413.913.459,00	100%	Orang	141	141	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	508.948.000,00	444.194.807,00	87%	Orang	22	22	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	4.203.771.000,00	4.175.753.860,00	99%	Orang	91	91	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	8.059.158.000,00	8.007.830.996,00	99%	Orang	72	72	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	07	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	7.254.075.000,00	7.231.198.556,00	100%	Orang	116	68	99,68
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) (PEN)	449.344.090.000,00	448.343.022.465,00	100%	layanan	1	1	100
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	449.344.090.000,00	448.343.022.465,00	100%	layanan	1	1	0
03	403864	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	20.090.567.000,00	20.090.567.000,00	100%	layanan	1	1	0
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) (PEN)	20.090.567.000,00	20.090.567.000,00	100%	layanan	1	1	100
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) (PEN)	42.539.540.000,00	42.335.661.557,00	100%	layanan	6	6	100
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	42.539.540.000,00	42.335.661.557,00	100%	layanan	6	6	0
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) (PEN)	25.146.901.000,00	24.881.255.000,00	99%	layanan	1	3	98,94
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	25.146.901.000,00	24.881.255.000,00	99%	layanan	1	3	0
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	13.741.275.000,00	13.528.457.707,00	98%	Orang	150	141	95
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	10.944.063.000,00	9.401.113.492,00	86%	Orang	208	210	100
03	403865	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	4.098.919.000,00	3.989.227.039,00	97%	Orang	231	231	100
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	711.156.000,00	541.407.260,00	76%	Orang	86	86	100
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.847.809.000,00	2.762.770.572,00	97%	Orang	96	96	100
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2.421.849.000,00	2.374.776.001,00	98%	Orang	124	124	100
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	08	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1.123.075.000,00	1.118.404.659,00	100%	Orang	44	20	99,58
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	30.035.717.000,00	29.807.594.699,00	99%	layanan	47	47	100
03	403866	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	29.208.200.000,00	28.757.870.895,00	98%	Orang	1127	1127	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	19.483.996.000,00	19.276.585.151,00	99%	Orang	606	606	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	11.596.717.000,00	11.212.591.537,00	97%	layanan	361	361	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	5.130.920.000,00	5.111.411.027,00	100%	layanan	171	171	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	10.591.742.000,00	10.591.428.440,00	100%	layanan	383	383	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	09	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	6.178.014.000,00	6.173.161.061,00	100%	layanan	170	173	99,93
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	13	Kapal Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) (PEN)	59.270.532.000,00	59.270.531.050,00	100%	Unit	3	3	100
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	13	Kapal Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	59.270.532.000,00	59.270.531.050,00	100%	Unit	3	3	0
03	403867	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV	19	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional)	26.813.951.000,00	21.938.934.000,00	82%	Unit	2	1,8	0
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	19	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional) (PEN)	26.813.951.000,00	21.938.934.000,00	82%	Unit	2	1,8	81,9
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	19	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional) (PEN)	62.244.272.000,00	52.720.204.000,00	85%	Unit	2	1	193,3
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	19	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional)	62.244.272.000,00	52.720.204.000,00	85%	Unit	2	1	0
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	13.678.462.000,00	13.678.461.500,00	100%	Unit	1	1	0
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	13.678.462.000,00	13.678.461.500,00	100%	Unit	1	1	100

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	23.000.000.000,00	18.398.175.600,00	80%	Unit	2	2	100
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	23.000.000.000,00	18.398.175.600,00	80%	Unit	2	2	0
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	42.486.972.000,00	42.486.896.580,00	100%	Unit	2	2	0
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	42.486.972.000,00	42.486.896.580,00	100%	Unit	2	2	100
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	67.811.504.000,00	67.811.504.000,00	100%	Unit	4	4	100
03	403869	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH X PROVINSI JAWA TEN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	67.811.504.000,00	67.811.504.000,00	100%	Unit	4	4	0
04	287185	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTABARU - BATULICIN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	12.976.425.000,00	12.512.657.148,00	96%	Unit	3	0	99,34
04	287232	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TARAKAN	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	12.976.425.000,00	12.512.657.148,00	96%	Unit	3	0	0
04	287321	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GORONTALO	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	43.050.082.000,00	43.050.082.000,00	100%	Unit	1	1,64	100
04	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	43.050.082.000,00	43.050.082.000,00	100%	Unit	1	1,64	0
04	287370	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK PALU	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	340.556.938.000,00	292.091.714.512,00	86%	Unit	2	1	191,63
04	287384	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P O S O	22	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	340.556.938.000,00	292.091.714.512,00	86%	Unit	2	1	0
04	287406	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN P A R I G I	24	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional) (PEN)	9.449.742.000,00	9.449.741.472,00	100%	Unit	1	1	100
04	287502	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	24	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	9.449.742.000,00	9.449.741.472,00	100%	Unit	1	1	0
04	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	24	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	13.204.607.000,00	13.048.607.000,00	99%	Unit	4	35805	0
04	287541	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE	24	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional) (PEN)	13.204.607.000,00	13.048.607.000,00	99%	Unit	4	35805	89,67
04	287647	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA	26	Pelabuhan Danau (Prioritas Nasional) (PEN)	39.818.533.000,00	39.818.473.000,00	100%	Unit	4	4	100
04	287701	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LAURENTIUS SAY	26	Pelabuhan Danau (Prioritas Nasional)	39.818.533.000,00	39.818.473.000,00	100%	Unit	4	4	0
04	287715	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN WAINGAPU	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	4.999.282.000,00	-	0%	Unit	1	0	0
04	287778	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	4.999.282.000,00	-	0%	Unit	1	0	74,65
04	287782	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN B I A K	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	175.000.000,00	-	0%	Unit	1	0	0
04	287799	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MANOKWARI	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	175.000.000,00	-	0%	Unit	1	0	67
04	287804	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SORONG	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	5.482.436.000,00	5.482.435.700,00	100%	Unit	1	1	0
04	287825	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MERAUKE	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	5.482.436.000,00	5.482.435.700,00	100%	Unit	1	1	100
04	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	2.757.163.000,00	2.757.161.200,00	100%	Unit	2	2	100
04	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	2.757.163.000,00	2.757.161.200,00	100%	Unit	2	2	0
04	412942	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALIANGET	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	75.000.000,00	-	0%	Unit	1	0,1	0
04	413070	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	75.000.000,00	-	0%	Unit	1	0,1	21,66
04	413313	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	10.098.811.000,00	-	0%	Unit	1	0	55
04	413322	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	250.000.000,00	-	0%	Unit	1	0	50
04	413463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN M A M U J U	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	57.300.000,00	-	0%	Unit	5	0	0
04	413520	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U A L	30	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	57.300.000,00	-	0%	Unit	5	0	0
04	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	19.375.139.000,00	19.357.151.749,00	100%	Unit	2	2,4	0
04	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN A M P A N A	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	19.375.139.000,00	19.357.151.749,00	100%	Unit	2	2,4	100
04	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	12.250.000.000,00	12.249.998.999,00	100%	Unit	2	2	100
04	413664	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	12.250.000.000,00	12.249.998.999,00	100%	Unit	2	2	0
04	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	51.336.312.000,00	-	0%	Unit	2	0	0
04	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	51.336.312.000,00	-	0%	Unit	2	0	0
04	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	26.527.018.000,00	26.421.840.068,00	100%	Unit	1	1	0
04	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	26.527.018.000,00	26.421.840.068,00	100%	Unit	1	1	100
04	521417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN C A L A N G	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	39.378.538.000,00	39.378.538.000,00	100%	Unit	1	1	100
04	521768	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TILAMUTA	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	39.378.538.000,00	39.378.538.000,00	100%	Unit	1	1	0
04	521789	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PAGIMANA	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	42.938.182.000,00	42.932.131.811,00	100%	Unit	2	2	100
04	522582	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUPANG	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	42.938.182.000,00	42.932.131.811,00	100%	Unit	2	2	0
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional) (PEN)	32.447.373.000,00	32.447.259.125,00	100%	Unit	1	1	100
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	32	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	32.447.373.000,00	32.447.259.125,00	100%	Unit	1	1	0
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	3.040.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	7
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	75
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	0
12	51159	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	66,04
12	130470	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) MEMPAWAH	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	499.585.430,00	100%	promosi	1	1	100
12	130470	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) MEMPAWAH	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	299.748.000,00	100%	promosi	1	1	100
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	499.973.288,00	100%	promosi	1	1	99,99
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	20
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0,415	4
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	4,6
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	298.290.300,00	99%	promosi	1	1	100
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	15,72
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	299.557.500,00	100%	promosi	1	1	100
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	149.964.800,00	100%	promosi	1	1	100
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	5
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	165.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	0
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	500.000.000,00	100%	promosi	1	1	100
12	288127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	150.000.000,00	100%	promosi	1	1	100
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	70
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	15.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	79,66
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	80
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	150.000.000,00	100%	promosi	1	1	100
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	149.780.000,00	100%	promosi	1	0	99,85
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	150.000.000,00	-	0%	promosi	1	0	50
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	-	0%	promosi	2	0	141,61

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	49	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	500.000.000,00	-	0%	promosi	2	0	0
12	414324	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	10.268.728.000,00	10.259.540.600,00	100%	Unit	1	1	100
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	10.268.728.000,00	10.259.540.600,00	100%	Unit	1	1	0
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	8.881.216.000,00	-	0%	Unit	17	0	0
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	8.881.216.000,00	-	0%	Unit	17	0	0
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	5.026.608.000,00	5.025.139.110,00	100%	Unit	8	8	99,97
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	5.026.608.000,00	5.025.139.110,00	100%	Unit	8	8	0
12	414349	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	11.851.894.000,00	10.899.399.075,00	92%	Unit	19	19	0
12	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	11.851.894.000,00	10.899.399.075,00	92%	Unit	19	19	100
12	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	10.683.018.000,00	10.436.165.784,00	98%	Unit	9	10	100
12	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	10.683.018.000,00	10.436.165.784,00	98%	Unit	9	10	0
12	414355	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	11.985.556.000,00	11.964.546.060,00	100%	Unit	20	20	0
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	11.985.556.000,00	11.964.546.060,00	100%	Unit	20	20	99,82
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	20.755.127.000,00	20.752.724.902,00	100%	Unit	2	2	100
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	20.755.127.000,00	20.752.724.902,00	100%	Unit	2	2	0
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	4.979.579.000,00	4.972.915.460,00	100%	Unit	1	1	99,99
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	4.979.579.000,00	4.972.915.460,00	100%	Unit	1	1	0
12	414361	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	14.914.924.000,00	14.914.921.065,00	100%	Unit	1	1	100
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	14.914.924.000,00	14.914.921.065,00	100%	Unit	1	1	0
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	13.856.342.000,00	13.536.433.800,00	98%	Unit	20	20	100
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	13.856.342.000,00	13.536.433.800,00	98%	Unit	20	20	0
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	19.030.600.000,00	18.983.908.740,00	100%	Unit	1	1	0
12	419171	POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	19.030.600.000,00	18.983.908.740,00	100%	Unit	1	1	100
12	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	9.609.304.000,00	9.466.006.108,00	99%	Unit	1	1	100
12	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	9.609.304.000,00	9.466.006.108,00	99%	Unit	1	1	0
12	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	8.797.501.000,00	8.683.103.186,00	99%	Unit	5	4966	98,7
12	419172	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	8.797.501.000,00	8.683.103.186,00	99%	Unit	5	4966	0
12	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	5.481.323.000,00	5.447.965.838,00	99%	Unit	1	1	100
12	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	5.481.323.000,00	5.447.965.838,00	99%	Unit	1	1	0
12	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	8.146.290.000,00	8.128.905.972,00	100%	Unit	1	1	0
12	449730	POLITEKNIK PELAYARAN SORONG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	8.146.290.000,00	8.128.905.972,00	100%	Unit	1	1	100
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	14.431.524.000,00	14.430.294.993,00	100%	Unit	20	20	99,99
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	14.431.524.000,00	14.430.294.993,00	100%	Unit	20	20	0
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	11.631.828.000,00	11.550.025.630,00	99%	Unit	11	10	0
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	11.631.828.000,00	11.550.025.630,00	99%	Unit	11	10	99,3
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	14.509.499.000,00	14.487.727.748,00	100%	Unit	2	2	100
12	449731	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	14.509.499.000,00	14.487.727.748,00	100%	Unit	2	2	0
12	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	13.281.274.000,00	13.278.233.000,00	100%	Unit	15	15	100
12	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	13.281.274.000,00	13.278.233.000,00	100%	Unit	15	15	0
12	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	6.798.931.000,00	6.753.159.000,00	99%	Unit	5	5	99,33
12	517988	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	6.798.931.000,00	6.753.159.000,00	99%	Unit	5	5	0
12	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	9.494.725.000,00	9.490.327.273,00	100%	Unit	18	18	0
12	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	9.494.725.000,00	9.490.327.273,00	100%	Unit	18	18	100
12	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	5.475.547.000,00	5.473.540.686,00	100%	Unit	11	0	0
12	526181	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	5.475.547.000,00	5.473.540.686,00	100%	Unit	11	0	99,96
12	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	11.166.042.000,00	11.164.464.500,00	100%	Unit	9	9	100
12	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	11.166.042.000,00	11.164.464.500,00	100%	Unit	9	9	0
12	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	34.644.270.000,00	29.871.077.485,00	86%	Unit	34	22	191,53
12	526195	POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	34.644.270.000,00	29.871.077.485,00	86%	Unit	34	22	0
12	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	11.579.972.000,00	11.527.607.034,00	100%	Unit	45	45	100
12	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	53	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	11.579.972.000,00	11.527.607.034,00	100%	Unit	45	45	0
12	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	68	Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Prioritas Nasional)(PEN)	10.383.537.000,00	10.383.506.250,00	100%	Unit	1	1	100
12	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	68	Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Prioritas Nasional)	10.383.537.000,00	10.383.506.250,00	100%	Unit	1	1	0
12	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	69	Pembangunan UPPKB Km. 36 Samboja - Kab. Kukar (Prioritas Nasional) (PEN)	10.500.000.000,00	10.499.979.250,00	100%	Unit	1	1	100
12	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	69	Pembangunan UPPKB Km. 36 Samboja - Kab. Kukar (Prioritas Nasional)	10.500.000.000,00	10.499.979.250,00	100%	Unit	1	1	0
12	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	70	Revitalisasi UPPKB Lubuk Selasih (Prioritas Nasional) (PEN)	13.601.511.000,00	12.831.561.200,00	94%	Unit	1	1	95,01
12	526217	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	70	Revitalisasi UPPKB Lubuk Selasih (Prioritas Nasional)	13.601.511.000,00	12.831.561.200,00	94%	Unit	1	1	0
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	71	Revitalisasi UPPKB Muara Lembu Provinsi Riau (Prioritas Nasional) (PEN)	27.791.648.000,00	25.024.163.363,00	90%	Unit	1	1	100
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	71	Revitalisasi UPPKB Muara Lembu Provinsi Riau (Prioritas Nasional)	27.791.648.000,00	25.024.163.363,00	90%	Unit	1	1	0
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	76	Pembangunan UPPKB Tabalong (Prioritas Nasional) (PEN)	14.096.057.000,00	14.096.056.700,00	100%	Unit	2	2	100
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	76	Pembangunan UPPKB Tabalong (Prioritas Nasional)	14.096.057.000,00	14.096.056.700,00	100%	Unit	2	2	0
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	90	Pembangunan Arterial Transport Management System (AtMS) (Prioritas Nasional) (PEN)	15.657.700.000,00	15.651.405.524,00	100%	Unit	1	1	100
12	526221	POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA	90	Pembangunan Arterial Transport Management System (AtMS) (Prioritas Nasional)	15.657.700.000,00	15.651.405.524,00	100%	Unit	1	1	0
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	94	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	94	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional) (PEN)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100%	Unit	1	1	100
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	138	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-Alang Lebar (Prioritas Nasional)	5.000.000.000,00	4.997.822.016,00	100%	Unit	1	1	0
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	138	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-Alang Lebar (Prioritas Nasional) (PEN)	5.000.000.000,00	4.997.822.016,00	100%	Unit	1	1	100
12	526222	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	143	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Bobotsari - SBSN (Prioritas Nasional)	21.626.355.000,00	21.501.023.400,00	99%	Unit	1	1	0
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	149	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tingkir, Salatiga - SBSN (Prioritas Nasional)	30.641.209.000,00	30.641.209.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	150	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tegal - SBSN (Prioritas Nasional)	30.202.863.000,00	30.202.863.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	151	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan - Prioritas Nasional (PEN)	16.122.500.000,00	16.122.499.999,00	100%	Unit	1	1	100

KODE BA ES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Rincian *Output*	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi Angaran	Satuan *Output*	Target *Output*	Realisasi *Output*	Persen Progress Penyelesaian Output
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	151	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Prioritas Nasional)	16.122.500.000,00	16.122.499.999,00	100%	Unit	1	1	0
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	152	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano (Prioritas Nasional)	19.323.239.000,00	19.323.215.920,00	100%	Unit	1	1	0
12	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	152	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano - Prioritas Nasional (PEN)	19.323.239.000,00	19.323.215.920,00	100%	Unit	1	1	100
12	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	153	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tj Api-Api (Prioritas Nasional)	68.526.568.000,00	68.526.568.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	153	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tj Api-Api - Prioritas Nasional (PEN)	68.526.568.000,00	68.526.568.000,00	100%	Unit	1	1	100
12	649910	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	154	Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang - Prioritas Nasional (PEN)	29.079.563.000,00	29.079.562.429,00	100%	Unit	1	1	100
12	649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	154	Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang (Prioritas Nasional)	29.079.563.000,00	29.079.562.429,00	100%	Unit	1	1	0
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	155	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget, Sumenep (Prioritas Nasional)	15.000.000.000,00	14.995.427.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	155	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) - Prioritas Nasional (PEN)	15.000.000.000,00	14.995.427.000,00	100%	Unit	1	1	100
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	156	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo Kab. Ende - Prioritas Nasional (PEN)	19.017.850.000,00	19.017.850.000,00	100%	Unit	1	1	100
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	156	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo Kab. Ende (Prioritas Nasional)	19.017.850.000,00	19.017.850.000,00	100%	Unit	1	1	0
12	654603	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	176	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	50.000.000.000,00	1.382.777.589,00	3%	Unit	3	3	100

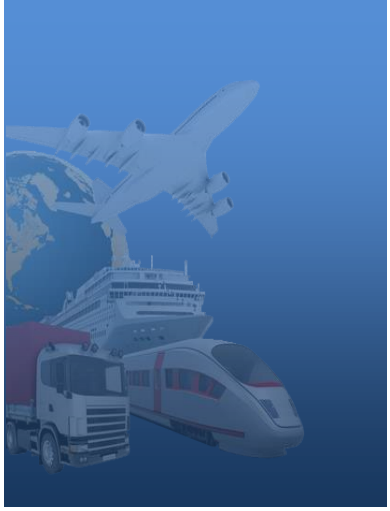

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019–2024, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat empat fokus pembangunan sektor perhubungan atau transportasi yang menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi, yakni:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung mobilitas perkotaan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, yang di dalamnya memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan kebutuhan anggarannya.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022, Kementerian Perhubungan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan dimaksud memuat berbagai capaian yang diperoleh Kementerian Perhubungan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan capaian lainnya, meliputi: capaian sasaran program, penghargaan yang diperoleh, capaian infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024, dan capaian sarana prasarana transportasi.

Meskipun kasus *COVID-19* relatif mulai melandai menjelang akhir Tahun 2022, berbagai tantangan dan peluang, terutama ketidakpastian kondisi nasional, mempengaruhi kinerja secara signifikan. Penerapan kebijakan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sepanjang Tahun 2022, mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi karena terhambatnya mobilitas masyarakat dan arus barang.

Namun demikian, secara umum, pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan pada Tahun 2022 cukup baik, dikarenakan seluruh Sasaran Strategis (SS) yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 telah tercapai bahkan melebihi target. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terlihat dari pencapaian target sasaran strategis yang lebih besar dari realisasi anggaran, sehingga terlihat nilai manfaat dari pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan dirasakan masyarakat.

Jika dilihat dari status Indikator Kinerja, dari empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terdapat satu IKSS yang belum mencapai target, yaitu OTP Layanan Transportasi. Dari lima Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) terdapat satu IKSP yang belum mencapai target yaitu Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi dan dua IKSP yang belum terdefinisi pencapaiannya, dikarenakan hasil penilaian pihak eksternal Tahun 2022 belum terbit, yaitu Opini WTP dari BPK dan Indeks RB Kemenhub dari Kementerian PAN-RB.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

100,865%	**SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional**
	IKSS 1. Rasio Konektivitas Nasional (100,865%)
103,355%	**SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**
	IKSS 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (110,494%) IKSS 2.2. *On Time Performance* Layanan Transportasi (96,216%)
114,643%	**SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi**
	IKSS 3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan (114,643%)

Dalam mencapai target kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar 98,033% atau senilai Rp32.819.651.102.503,00 (Tiga Puluh Dua Triliun Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), dari Rp33.478.235.915.000,00 (Tiga Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

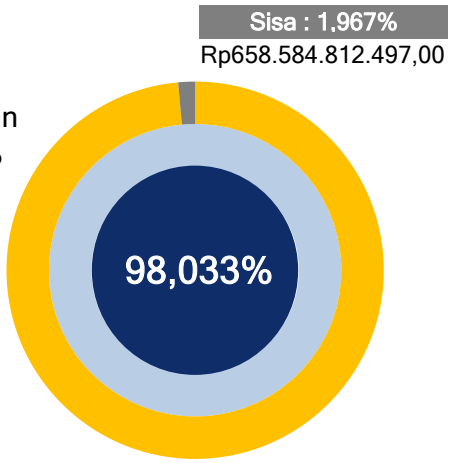

Sepanjang 2022, Kementerian Perhubungan dan unit kerja telah menerima berbagai penghargaan, sebagai apresiasi dari pihak eksternal yang menilai kinerja Kementerian Perhubungan, diantaranya:

1. Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (9 kali berturut-turut)
2. Penghargaan sebagai Kementerian dengan Indeks Kepatuhan Kategori Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

3. Peringkat Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi 2022 dari Kementerian Investasi/BKPM

4. Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Penyiaran Publik

5. Predikat Terbaik Kategori Pengelolaan Komunikasi dan Media Massa dalam ajang TMA 2022 yang diadakan oleh Tempo Group

6. Penghargaan Bhumandala Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022 Simpul Jaringan Terbaik kategori Kementerian/Lembaga (Bhumandala Ariti)

7. Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi atas penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir dan Berkepastian Hukum kategori K/L

8. Predikat WBK dari Kementerian PAN-RB kepada 3 UPT Terminal Guntur Melati Garut Jawa Barat, Kantor OP Utama Makassar, dan Poltrada Bali

Apresiasi dari berbagai pihak atas penyelenggaraan mudik yang aman dan lancar setelah 2 tahun tidak dilaksanakan

Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kepercayaan publik sektor transportasi, yakni konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi. Hal ini tercermin melalui upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan/penyederhanaan organisasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Lampiran F.7 – Rekapitulasi KSP pada Kementerian Perhubungan

Ditjen Perhubungan Laut

No	Satuan Kerja	Mitra	Obyek KSP dan Nilai BMN (Rp)	No dan Tanggal Persetujuan	Jangka Waktu	No dan Tanggal Perjanjian	Kontribusi
1	KSOP Probolinggo	PT Delta Artha Bahari Nusantara	Tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m2 dan dermaga seluas 24.161,5 m2 yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,00	S-215/MK.6/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017	30 Tahun	Nomor: PP.002/1/13/KSOP.Pbl-17 dan Nomor: DIR.003/DABN/PERJ/VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017	Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya, dan pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (*revenue*) per tahun
2	KSOP Sintete	PT. Pelindo II Cabang Pontianak	Bangunan dermaga seluas 280 m2 terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Desa Sintete, Kecamatan Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp.8.115.306.000,00	S-06/MK.6/WKN. 11/2017 tanggal 31 Juli 2017	15 Tahun	Nomor: PP.002/1/1/KSOP.STT-17 dan Nomor: HK.01/20/8/1/D4.1/D5/C.PTK-17 tanggal 20 Agustus 2017	Kontribusi kepada negara berupa Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama. Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari *net cash flow* dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000
3	UPP Labuhan Bajo	PT. Pelabuhan Indonesia	Objek KSP BMN berupa Aset Pelabuhan Labuan Bajo yang dibiayai APBN yang terdiri dari Dermaga berukuran (120x20) m2, Trestle berukuran (60x12) m2, Causeway berukuran (690x20) m2, dan Tanah Hasil Reklamasi atau Tanah Lapangan Penimbunan (Container Yard) seluas (100x300) m2.	S-427/MK.6/2021 Tanggal 31 Desember 2021	50 Tahun	Nomor: HK.201/4/9/DJPL/2021 dan Nomor HK.05.01/5/REG3-2021 tanggal 08 November 2021	Kontribusi tetap per tahun yang dibayarkan dari nilai kewajaran aset Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp171.000.000,00 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2.95% Keuntungan Bagi Hasil atas Perjanjian ini sebesar 16,81% (enam belas koma delapan puluh satu persen) dari Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi
4	UPP Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal	Objek KSP BMN berupa aset BMN KUPP Kelas II Anggrek yang terdiri dari Satu bidang tanah dengan luas 184.932 m2, Sebelas unit bangunan, Satu unit dermaga, dan Empat unit irigasi.	S-107/MK.6/2021 Tanggal 04 Maret 2021	30 Tahun	Nomor: HK.201/2/13/DJPL/2021 dan Nomor: 004/PERJ/HST-AGIT/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021	Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebesar 50% disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap Tanggal 30 April tahun berikutnya, dan Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.
5	KSOP Badas	PT.Pelabuhan Indonesia	Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang terdiri dari Tanah Hasil Reklamasi seluas 11.750 m2, Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 800 m2, Dermaga seluas 880 m2, Dermaga seluas 1.400 m2, dan Dermaga seluas 185 m2	S-201/MK.6 /KN.5/2021 Tanggal 5 Oktober 2021	30 Tahun	HK.201/8/19/DJPL/2021 dan KS.02/7/4/1/RH3/REG.3-22	Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp916.390.500,00 (Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,88% per tahun. Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 46,55% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi dengan margin IRR sebesar 3,00%. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

No	Satuan Kerja	Mitra	Obyek KSP dan Nilai BMN (Rp)	No dan Tanggal Persetujuan	Jangka Waktu	No dan Tanggal Perjanjian	Kontribusi
6	KSOP Bima	PT Pelabuhan Indonesia	Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Bima yang terdiri dari. Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya seluas 27.539 m2; Bangunan Terbuka Lainnya seluas 19.316 m2; Pagar Semi Permanen seluas 1.798 m2; Jalan Khusus Komplek seluas 4.050 m2; Jalan Lainnya seluas 800 m2; Dermaga seluas 2.350 m2; Dermaga seluas 1.100 m2; Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 3 NUP ; Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya sebanyak 1 NUP; Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya sebanyak 46 NUP.	S-488/MK.6/2021 Tanggal 25 November 2021	30 Tahun	HK.201/12/20/DJPL.2021 dan PD.05.02/	Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp759.982.028,00 (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,12% per tahun. Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 28,81% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
7	KSOP Waingapu	PT Pelabuhan Indonesia	Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang terdiri dari Tanah Hasil Reklamasi seluas 23.510 m2; Tanah Hasil Reklamasi seluas 10.000 m2; Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 540 m2; Dermaga seluas 2.768 m2; Dermaga seluas 782 m2;	S-220/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 28 Oktober 2021	30 Tahun	HK.201/8/20/DJPL/2022 dan KS.02/7/4/2/HKHM/RH3/REG. 3-22	(Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp572.051.065,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) dengan kenaikan sebesar 1,93% per tahun. Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 44,29% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
8	UPP Garangkong	PT Pelabuhan Indonesia	Objek KSP BMN berupa Aset UPP Garongkong yang terdiri dari :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 6.335 m2; Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 13.840 m2; Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 16.180 m2; Dermaga seluas 7.600 m2; Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen seluas 450 m2; Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 600 m2; Bangunan Menara/ Bak Penampung/ Reservoir Air Minum seluas 45 m2; Gedung Pos Jaga Permanen seluas 4 m2 Gedung Pos Jaga Permanen seluas 16 m2; Tugu/ Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) / Gapura seluas 66 m2; Pagar Semi Permanen seluas 1.349 m; Bangunan Pembawa Pengaman Pantai seluas 387 m2; Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) seluas 833 m2; Truck air sebanyak 1 unit; Excavator lainnya sebanyak 1 unit; Forklift sebanyak 1 unit; Wheel Loader + Attachment sebanyak 1 unit; Truck Crane sebanyak 1 unit; Pintu Elektrik (yang memakai akses) sebanyak 1 unit; Solar Cell sebanyak 82 unit;	S-588/MK.6/2021 Tanggal 23 Desember 2021	50 Tahun	HK.201/9/15/DJPL/2022 dan KS 01/14/6/1/KMRL/RH4/REG.4-22	Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp2.661.969.064,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun oleh mitra KSP hingga akhir jangka waktu pemanfaatan sesuai perjanjian. Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) dari pendapatan. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Ditjen Perhubungan Udara

No	Satuan Kerja	Mitra	Obyek KSP dan Nilai BMN (Rp)	No dan Tanggal Persetujuan	Jangka Waktu	No dan Tanggal Perjanjian	Kontribusi
8	**Bandara Tjilik Riwut**	**Angkasa Pura II**	BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp3.680.306.859.403,00	S-404/MK.6/2018 tanggal 28 Agustus 2018	30 Tahun	AU.2136.KUM/DJU/XII/2018 PJJ.04.04/00/12/2018/1246 tanggal 19 Desember 2018	Konstribusi Tetap sebesar 0,25% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,95% setiap tahun, dan Pembagian Keuntungan sebesar 3,7% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
9	**Bandara Sentani**	**Angkasapura I**	BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp6.804.462.564.000	S-466/MK.6/2019	30 Tahun	HK.201/0027/KUM/DRJU/X/2019	Pertama sebesar Rp10.206.694.000 dengan kenaikan sebesar 3,6% setiap tahun, dan Pembagian Keuntungan sebesar 7,43% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
10	**Otoritas Bandar Udara Wilayah III**	**PT Komersial Logistik Nusantaar**	BMN milik Ditjen Perhubungan Udara SenilaiRp134.834.394.800,00	S-113/MK.6/2021	25 Tahun	Akta Notaris No 38, Notaris Surjadi SH. M.Kn Keputusan Menhub No. KP 65 Tahun 2022	Besaran kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp380.000.000,00 dan ditambah kenaikan sebesar 2,96% per tahunnya untuk tahun-tahun berikutnya, dan Pembagian keuntungan sebesar 4,89% dari pendapatan per tahun.
11	**Bandara Radin Inten II**	**Angkasa Pura II**	BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1.926.775.606000	S-691/MK.6/2019	30 Tahun	HK.201/0030/KUM/DRJU/X/2019	Konstribusi Tetap Tahun Pertama sebesar Rp6.358.360.000 dengan kenaikan sebesar 5,39% setiap tahun, dan Pembagian Keuntungan sebesar 10,26% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
12	**Bandara Hanandjoeddin**	**Angkasa Pura II**	BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1.759.630.298.000	S-692/MK.6/2019	30 Tahun	HK.201/0029/KUM/DRJU/X/2019	Konstribusi Tetap Tahun Pertama sebesar Rp3.519.261.000 dengan kenaikan sebesar 4,36% setiap tahun, dan Pembagian Keuntungan sebesar 11,05% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
13	**Bandara Fatmawati**	**Angkasa Pura II**	BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp2.504.148.336.468	S-463/MK.6/2019	30 Tahun	HK.201/0028/KUM/DRJU/X/2019	Konstribusi Tetap Tahun Pertama sebesar Rp1.252.074.000 dengan kenaikan sebesar 4,36% setiap tahun, dan Pembagian Keuntungan sebesar 3,23% dari Pendapatan pertahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah mendapatkan keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Lampiran F.8 – Terminal Yang Statusnya Sudah BMN

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
1	Provinsi NAD	Kota Meulaboh	Meulaboh	Rehab 2019	25,000	Sertipikat	Sudah	
2	Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Batoh	Rehab 2018-2019	31,166	Sertipikat	Sudah	Sewa
3	Provinsi NAD	Kabupaten Aceh Tengah	Paya iIang	-	9,800	Sertipikat	Sudah	
4	Provinsi NAD	Kota Langsa	Langsa	-	20,080	Sertipikat	Sudah	
5	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	Tanjung Pinggir	Rehab 2019-2020	32,891	Proses Sertifikasi (BPTD)	Sudah	
6	Provinsi Sumatera Utara	Kota Sibolga	Sibolga	Rehab 2020	2,712	Sertipikat	Sudah	
7	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Madya Tarutung	Rehab 2019-2020	10,410	Proses Sertifikasi (KPKNL)	Sudah	KPBU
8	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Amplas	Revitalisasi 2020	20,163	Proses Sertifikasi (BPTD)	Sudah	
9	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Pinang Baris	Revitalisasi 2020	18,052	Proses Sertifikasi (BPTD)	Sudah	
10	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	Anak Air	Rehab 2018-2019	27,385	Sertipikat	Sudah	
11	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	Simpang Aur	Rehab 2018, 2020	11,574	Sertipikat	Sudah	Sewa, KPBU
12	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	Kiliran Jao		19,000	Sertipikat		
13	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	Payung Sekaki	Rehab 2018-2020	37,470	Sertipikat	Sudah	Sewa
14	Provinsi Riau	Kota Dumai	Dumai	Rehab 2018, 2020	40,000	Proses Sertifikasi (KPKNL)	Sudah	
15	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	Bangkinang	Rehab 2018, 2020	2,080	Sertipikat	Sudah	

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
16	Provinsi Jambi	Kota Jambi	Alam Barajo	Rehab 2019	44,456	Sertipikat	Sudah	KPBU
17	Provinsi Jambi	Kabupaten Sarolangun,	Sarolangun,	Rehab tahun 2016-2017	25,004	Sertipikat	Sudah	
18	Provinsi Jambi	Kabupaten Marangin	Bangko	-	20,000	Sertipikat	Sudah	
19	Provinsi Bengkulu	Kebupaten Rejang Lebong	Simpang Nangka	Rehab 2019-2020	42,972	Sertipikat	Sudah	
20	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	Air Sebakul	-	66,207	Sertipikat		
21	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	Betan Subing	Rehab 2019-2020	54,795	Sertipikat		KPBU
22	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	Rajabasa	Rehab 2018, 2020	40,780	Sertipikat	Sudah	KPBU
23	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	Betung	Rehab 2019-2020	60,710	Sertipikat	Sudah	
24	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	Lahat	Rehab 2020	21,744	Sertipikat	Sudah	
25	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lubuk Linggau (Kab. Musi Rawas)	Simpang Periuk	Rehab 2020	55,559	Sertipikat	Sudah	KPBU
26	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKI	Kayuagung	Rehab 2018-2020	20,000	Sertipikat		
27	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKU	Batu Kuning	-	200	Proses Sertifikasi (BPTD)		
28	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Karya Jaya	-	55,420	Sertipikat		
29	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Alang-Alang Lebar	-	35,605	Sertipikat		
30	Provinsi Banten	Kota Cilegon	Merak	Rehab tahun 2016-2017	20,000	Proses Sertifikasi (BPTD)	Sudah	Sewa

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
31	Provinsi Banten	Kota Serang	Pakupatan	Rehab 2019-2020	30,500	Sertipikat	Sudah	Sewa
32	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	Lebak	Rehab 2019-2020	9,930	Sertipikat	Sudah	Sewa
33	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	Labuan	Rehab 2019-2020	16,861	Sertipikat	Sudah	Sewa
34	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	Harjamukti	Rehab 2018-2020	37,240	Sertipikat	Sudah	Sewa
35	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Ciakar	Rehab 2018-2019	9,410	Sertipikat	Sudah	
36	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Rehab 2019	22,206	Sertipikat		
37	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	Guntur Melati	Rehab 2018, 2020	12,360	Sertipikat	Sudah	
38	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	Subang	Rehab 2018-2019	10,750	Sertipikat	Sudah	
39	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	Sudirman	Rehab 2018-2019	36,487	Sertipikat	Sudah	KSP
40	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	Kuningan	Rehab 2018, 2020	4,200	Sertipikat		
41	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Indihiang	Rehab 2019	96,126	Sertipikat		
42	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Leuwipanjang	-	31,291	Proses Sertifikasi (BPTD)	Sudah	
43	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Demak	Pembangunan 2018-2020	50,369	Sertipikat	Sudah	KPBU
44	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Blora	Cepu	Rehab 2019-2020	17,819	Sertipikat	Sudah	Sewa
45	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Bawen	Rehab tahun 2016-2017	31,000	Sertipikat	Sudah	Sewa

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
46	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Pemalang	Induk Pemalang	Rehab tahun 2016-2017	39,200	Sertipikat	Sudah	Sewa
47	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	Bobot Sari	Rehab 2019-2020	13,140	Sertipikat	Sudah	Sewa, KPBU
48	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	Tirtonadi	Rehab tahun 2016-2017	48,881	Sertipikat	Sudah	Sewa
49	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	Tingkir	Rehab 2018, 2020	5,425	Sertipikat	Sudah	Sewa, KPBU
50	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Gunung Simping	-	9,855	Sertipikat	Sudah	
51	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Purworejo	Purworejo	Rehab 2019-2020	2,917	Sertipikat	Sudah	Sewa
52	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	Rehab 2018-2020	61,561	Sertipikat		
53	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan	Rehab tahun 2016-2017	33,218	Sertipikat	Sudah	Sewa, KSP
54	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Mendolo	Rehab 2019-2020	29,319	Proses Sertipikasi (BPTD)		
55	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Jati	-	-	Tanah Sewa		
56	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	Tidar	-	22,350	Sertipikat		KPBU
57	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal	-	38,400	Sertipikat		KPBU
58	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	Kebumen		35,050	Sertipikat		
59	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Mangkang		80,000	44.220 Sertipikat, 35.780 Proses Sertipikasi (BPTD)		Pinjam Pakai (Mall Pelayanan Publik)
60	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	Dhaksinarga	Rehab 2018, 2020	49,300	Sertipikat	Sudah	Pinjam Pakai (Mall Pelayanan Publik)

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
61	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	Pacitan	Rehab 2019-2020	17,230	8.824 Sertipikat, 8.406 Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	Sewa
62	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	Pembangunan 2019-2020	79,029	Sertipikat		
63	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jember	Tawangalun	Rehab 2019-2020	27,550	Sertipikat	Sudah	Sewa
64	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Arjosari	Rehab tahun 2016-2017, 2020	28,150	Sertipikat	Sudah	
65	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tuban	kembang Putih	Rehab 2019-2020	51,970	Sertipikat	Sudah	KPBU
66	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	Kertonegoro	Rehab 2020	44,710	Sertipikat	Sudah	Sewa
67	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	Selo Aji	Rehab 2018-2020	29,652	Sertipikat	Sudah	
68	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	Arya Wiraraja	Rehab 2020	8,661	Sertipikat	Sudah	
69	Provinsi Jawa Timur	Kota Kediri	Tamanan	Rehab 2019-2020	18,125	Sertipikat	Sudah	Sewa
70	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Surodakan	Rehab 2019-2020	11,669	Sertipikat	Sudah	Sewa
71	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Patria	Rehab 2018, 2020	14,775	Sertipikat	Sudah	Sewa
72	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Purboyo	Rehab 2019-2020	27,330	Sertipikat	Sudah	
73	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	Banyuangga	Rehab 2020	25,517	Proses Sertifikasi (KPKNL)	Sudah	
74	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	Rajekwesi	Rehab 2019-2020	29,215	Sertipikat	Sudah	
75	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan	-	1,097	Sertipikat	Sudah	

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
76	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	Gayatri	Rehab 2018, 2020	10,400	Sertipikat		
77	Provinsi Bali	Kabupaten Badung	Mengwi	Rehab 2019-2020	50,000	Sertipikat	Sudah	Sewa
78	Provinsi NTB	Kabupaten Sumbawa	Sumer Payung	Rehab 2020	25,090	Sertipikat	Sudah	Sewa
79	Provinsi NTB	Kota Bima	Dara	Rehab 2020	7,967	Sertipikat	Sudah	
80	Provinsi NTB	Kota Mataram	Mandalika	Rehab 2018, 2020	30,435	Sertipikat	Sudah	
81	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Sei Ambawang		5,685	Sertipikat	Sudah	KPBU
82	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	Gambut Barakat	Rehab 2019-2020	41,893	Proses Sertiifikasi (KPKNL)	Sudah	Sewa, KPBU
83	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	W.A Gara	Rehab 2019	40,740	Sertipikat	Sudah	Sewa
84	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Samarinda Seberang	Rehab 2020	7,270	Sertipikat	Sudah	KPBU
85	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Batu Ampar	Rehab 2016-2020	777	Sertipikat		
86	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Puuwatu	-	21,372	Sertipikat		
87	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	Induk Lumpue	Rehab 2020	33,130	Sertipikat	Sudah	Sewa
88	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	Latenri Sessu Pekkae	-	15,845	Sertipikat		
89	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Watampone	Rehab 2019	40,649	Sertipikat		
90	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Poliwalimandar	Tipalayo	Rehab 2019	34,218	Sertipikat		

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
91	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	Mamboro	Rehab 2020	30,000	Sertipikat	Sudah	
92	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	Siwagilemba	Rehab 2020	20,279	Sertipikat	Sudah	
93	Provinsi Gorontalo	Kota. Gorontalo	Dungingi	-	38,750	Sertipikat	Sudah	Sewa
94	Provinsi Gorontalo	Kabupaten. Gorontalo	Isimu	Rehab 2020	25,940	Sertipikat	Sudah	Sewa
95	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Liwas	-	53,659	Sertipikat		
96	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolang Mongondow Utara	Boroko	-	37,091	Sertipikat	Sudah	
97	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	Bolaang Mongondow	Pembangunan 2018-2020	94,900	Sertipikat	Sudah	
98	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bitung	Tangkoko	-	18,850	Sertipikat		
99	Provinsi Papua	Kota Jayapura	Entrop	Pembangunan 2018-2020	25,057	Sertipikat		
100	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	Terminal Jati		14.768	Sertipikat		
101	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Terminal Simbuang		33.420	Sertipikat		
102	Provinsi NAD	Kota Lhokseumawe	Terminal Lhoksumawe		11.705	Sertipikat		
103	Provinsi Jambi	Kabupaten Bungo	Terminal Muara Bungo	Rehab 2019	36.317	Sertipikat		
104	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Terminal Giwangan		26.563	Sertipikat		
105	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	Terminal Purabaya		119.950	Sertipikat		

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Terminal	Rehabilitasi	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
106	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	Terminal Giri Adipura					
107	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Terminal Cikampek (Klari)					

Lampiran F.9 - Terminal Tidak Dapat Diambil Alih

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang		Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres		Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Barangnangsiang		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
6	Provinsi Jawa Barat	Kab Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
9	Provinsi Banten	Kota Tangsel	Terminal Pondok Cabe		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan	Tindak Lanjut
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kab Majene	Terminal Majene	tidak termasuk dalam simpul Terminal Tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tahun 2003 dan tidak termasuk dalam rencana penetapan lokasi Terminal Tipe A	digantikan dengan Terminal Tipe A Tipalayo di Polewali Mandar
11	Provinsi Bali	Kab Gianyar	Terminal Gianyar		digantikan dengan Terminal Tipe A Mengwi di Kabupaten Badung
12	Provinsi Bali	Kab Buleleng	Terminal Banyuasri		
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kab Kutai Kertanegara	Terminal Kota Bangun		digantikan dengan Terminal Tipe A
14	Provinsi Bengkulu	Kab Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur		digantikan dengan Terminal Tipe A Air Sebakul
15	Provinsi Sumatera Utara	Kab Mandailing Natal	Terminal Penyabungan		digantikan dengan Terminal Tipe A Madya Tarutung
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C	digantikan dengan Terminal Tipe A Mengwi di Kabupaten Badung
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh	digantikan dengan Terminal Tipe A Muaro Bungo
18	Provinsi Jawa Tengah	Kab Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU	digantikan dengan Terminal Tipe A Mendolo, Woosobo
19	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Cicahem	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C	Pelayanan AKAP dilaksanakan di Terminal Leuwipanjang
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang	digantikan dengan Terminal Tipe A Mangkang
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C	digantikan dengan Terminal Tipe A Mengwi di Kabupaten Badung

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan	Tindak Lanjut
21	Provinsi Jawa Tengah	Kab Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Teminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	digantikan dengan Terminal Tipe A Purbalingga
22	Provinsi Jawa Timur	Kab Situbondo	Terminal Situbondo	Teminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	digantikan dengan Terminal Tipe A Jember
23	Provinsi Jawa Timur	Kab Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Teminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Prrovinsi Jawa Timur	digantikan dengan Terminal Tipe A Sumenep
24	Provinsi NTB	Kab Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong	digantikan dengan Terminal Tipe A Mandalika di Mataram
25	Provinsi NTT	Kab Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN	Terminal Menjadi Kantor PLBN
26	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B	digantikkan dengan Terminal Tipe A Liwas
27	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C	digantikan dengan Terminal Tipe A Mengwi di Kabupaten Badung
28	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir	digantikan dengan Terminal Tipe A Ogan Komering Ulu
29	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu akan melakukan pengelolaan Terminal Sendiri	Terminal dikelola Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Lampiran F.10 – Rincian UPPKB Pada Ditjen Hubdat

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
1	Aceh	Kota Subulussalam	Jontor	5,600	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	
2	Aceh	Kabupaten Seumadam	Seumadam	4,014	Sertipikat	Sudah	
3	Sumatera Utara	Kabupaten Dili Serdang	Tanjung Morawa I	1,300	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	
4	Sumatera Utara	Kabupaten Dili Serdang	Tanjung Morawa II			Sudah	
5	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	Dolok Melangir			Sudah	
6	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	Simpang Dua	598	Sertipikat	Sudah	
7	Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Begadai	Simpang Runding			Sudah	
8	Sumatera Utara	Kabupaten Dili Serdang	Sibolangit			Sudah	
9	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	Gebang	1,484	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	
10	Sumatera Utara	Kabupaten Batu Bara	Dolok Estate			Sudah	
11	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Mambang Muda			Sudah	
12	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Aek Batu	9,000	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	
13	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sabungan	4,097	Sertipikat	Sudah	
14	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	PAL XI	2,400	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	
15	Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Jembatan Merah	1,800	Proses Sertipikasi (KPKNL)	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
16	Sumatera Barat	Kota Padang	Lubuk Buaya	2,400	Sertipikat	Sudah	
17	Sumatera Barat	Kabupaten Tanah Datar	Sitangkai	2,400	Sertipikat	Sudah	
18	Sumatera Barat	Kabupaten Tanah Datar	Kubu Kerambil	2,400	Sertipikat	Sudah	
19	Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	Sungai Langsek	2,400	Sertipikat	Sudah	
20	Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	Kamang	5,010	Sertipikat	Sudah	
21	Sumatera Barat	Kabupaten Solok	Lubuk Selasih	4,770	Sertipikat	Sudah	
22	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tanjung Balik	8,900	Sertipikat	Sudah	
23	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman	Beringin pasaman	2,400	Sertipikat	Sudah	
24	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	Air Haji	15,628	Sertipikat	Sudah	
25	Riau	Kabupaten Bengkalis	Balai Raja	3,870	Sertipikat		
26	Riau	Kabupaten Bangkinang Barat	Rantau Berangin	1,200	Proses Sertipikasi (KPKNL)		
27	Riau	Kabupaten Muara Lembu	Logas	10,000	Proses Sertipikasi (KPKNL)		
28	Jambi	Kota Jambi	Jambi - Merlung	24,056	Sertipikat	Sudah	
29	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	Muara Tembesi	20,000	Sertipikat	Sudah	KPBU Pembangunan
30	Jambi	Kabupaten Sarolangun	Pelawan	10,000	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
31	Jambi	Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh	2,590	Sertipikat	Sudah	
32	Bengkulu	Bengkulu	Padang Ulak	2,924	Sertipikat		
33	Bengkulu	Bengkulu	Taisn	5,530	Sertipikat		
34	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	Way Urang	19,620	Sertipikat		
35	Lampung	Kabupaten mesuji	Simpang Pematang	10,000	Sertipikat		
36	Lampung	Kabupaten Way Kanan	Balambang Umpu	9,460	Sertipikat		KPBU Pembangunan
37	Banten	Banten	Cikande	3,150	Proses Sertipikasi (BPTD)		
38	Banten	Banten	Cimanuk	4,481	Sertipikat	Sudah	
39	Banten	Banten	Batuceper	2,950	Proses Sertipikasi (BPTD)		
40	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	Gentong	2,400	Sertipikat	Sudah	
41	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	Sindang Rasa	4,630	Sertipikat	Sudah	
42	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Tomo	4,491	Sertipikat	Sudah	
43	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	Losarang	9,750	Sertipikat	Sudah	
44	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Balonggandu	10,620	Proses Sertipikasi (BPTD)		
45	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	Cibaragalan	2,310	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
46	Jawa Barat	Kaupaten Cianjur	Bojong	4,009	Sertipikat	Sudah	
47	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Kemang	4,400	Sertipikat	Sudah	
48	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	Banyudono	3,000	Sertipikat	Sudah	
49	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	Toyogo	3,975	Sertipikat	Sudah	
50	Jawa Tengah	Kabupaten Purwodadi	Gubug	3,870	Sertipikat	Sudah	
51	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	Tanjung	5,000	Sertipikat	Sudah	KPBU Pembangunan
52	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Wanareja	5,910	Sertipikat	Sudah	
53	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Ajibarang	2,990	Sertipikat	Sudah	
54	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Klepu	3,130	Sertipikat	Sudah	
55	Jawa Tengah	Kabupaten Batang	Subah	3,000	Sertipikat	Sudah	KPBU Pembangunan
56	Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	Lebuawu	2,360	Sertipikat	Sudah	
57	Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	Selogiri	5,250	Sertipikat	Sudah	
58	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Pringsurat	4,000	Sertipikat	Sudah	
59	Jawa Tengah	Kabupaten Rembang	Sarang	17,835	Sertipikat	Sudah	
60	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Salam	1,651	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
61	Jawa Tengah	Kabupaten Blora	Sambong	4,350	Sertipikat	Sudah	
62	DI Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kulwaru	4,015	Sertipikat	Sudah	
63	DI Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kalitirto	4,211	Sertipikat	Sudah	
64	DI Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Martani	4,733	Sertipikat	Sudah	
65	Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	Socah	2,297	Sertipikat	Sudah	
66	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Kalibiru Manis	16,600	Sertipikat	Sudah	
67	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Watudodol	4,880	Sertipikat	Sudah	
68	Jawa Timur	Kabupaten Blitar	Talun	10,200	Sertipikat	Sudah	
69	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	Baureno	9,760	Sertipikat	Sudah	
70	Jawa Timur	kabupaten Jember	Rambi Gundam	6,590	Sertipikat	Sudah	
71	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Mojoangung	2,900	Sertipikat	Sudah	
72	Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	Lamongan	6,045	Sertipikat	Sudah	
73	Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Klakah	8,091	Sertipikat	Sudah	
74	Jawa Timur	Kabupaten Malang	Singosari	7,570	Sertipikat		
75	Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	Trowulan	6,000	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
76	Jawa Timur	kabupaten Nganjuk	Guyangan	10,615	Sertipikat	Sudah	Sewa Tanah, KPBU
77	Jawa Timur	kabupaten Ngawi	Widodaren	9,850	Sertipikat	Sudah	
78	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	Rejoso	8,905	Sertipikat	Sudah	
79	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	Sedarum	7,105	Sertipikat	Sudah	
80	Jawa Timur	Kabupaten Sampang	Jrengkik	7,200	Sertipikat	Sudah	
81	Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	Trosobo	9,720	Sertipikat	Sudah	
82	Jawa Timur	Kabupaten Sitobondo	Besuki	10,180	Sertipikat	Sudah	
83	Jawa Timur	Kabupaten Tuban	Widang	9,440	Sertipikat	Sudah	
84	Jawa Timur	Kabupaten Tulung Agung	Pojok	17,000	Sertipikat	Sudah	
85	Bali	Kabupaten Jembrana	Cekik			Sudah	
86	Bali	Kabupaten Buleleng	Seririt	3,600	Sertipikat	Sudah	
87	NTT	Kota Kupang	Oesapa	4,215	Sertipikat	Sudah	
88	NTT	Kota Kupang	Nun Baun Sabu	2,120	Sertipikat	Sudah	
89	NTT	Kabupaten Manggarai Barat	Nggorang	3,059	Sertipikat	Sudah	
90	NTT	Kabupaten Manggarai	Watualo	8,255	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
91	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Siantan	3,480	Sertipikat	Sudah	
92	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Sedau	6,659	Proses Sertipikasi (BPTD)	Sudah	
93	Kalimantan Barat		Satong	12,600	Sertipikat	Sudah	
94	Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	Sosok	8,000	Sertipikat	Sudah	
95	Kalimantan Barat		Sekadau	9,584	Sertipikat	Sudah	
96	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	Sintang (Sei Ukoi)	8,986	Sertipikat	Sudah	
100	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	Kintap	9,940	Sertipikat		
99	Kalimantan Selatan	Kota Banjar Baru	Liang Anggang	2,240	Sertipikat	Sudah	
97	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	Anjir Serapat	24,924	Sertipikat	Sudah	
98	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito timur	Pasar Panas	7,347	Sertipikat	Sudah	
101	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	Sambilambo	4,808	Sertipikat		
102	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Beru Beru	6,335	Sertipikat		
103	Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	Paku	3,695	Sertipikat		
104	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Utara	Sarjo	7,463	Sertipikat		
105	Sulawesi Tengah	Kabupaten Palu Utara	Kayumalue	2,400	Sertipikat	Sudah	

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
106	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parimon	Toboli	2,400	Proses Sertipikasi (BPTD)	Sudah	
107	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi Moutong	Mountong	5,000	Proses Sertipikasi (BPTD)	Sudah	
108	Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	Mayoa	3,000	Proses Sertipikasi (BPTD)	Sudah	
109	Gorontalo	Kabupaten Boalemo	Marisa	2,500	Sertipikat	Sudah	
110	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Molotabu	4,378	Sertipikat	Sudah	
111	Sulawesi Selatan		Palangga				
112	Sulawesi Selatan		Somba Opu				
113	Sulawesi Selatan		Maccopa				
114	Sulawesi Selatan		Lumpue				
115	Sulawesi Selatan		Datae				
116	Sulawesi Selatan		Walenrang				
117	Sulawesi Selatan		Larompong				
118	Sulawesi Selatan		Buntu Datu				
119	Sulawesi Selatan		Sajoanging				
120	Sulawesi Selatan		Tana Batue				

UPPKB YANG SUDAH REGISTER MENJADI BMN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama UPPKB	Luas Tanah (m2)	Bukti Kepemilikan Tanah	PSP	Pemanfaatan BMN
121	Sulawesi Selatan		Bulu Dua				
122	Sulawesi Selatan		Tonrokasi				
123	Sulawesi Utara		Inobonto				
124	Sulawesi Utara		Pineleng				
125	Sulawesi Utara		Wangurer - Bitung				

DALAM PROSES PERALIHAN MENJADI BMN

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	OPERASIONAL	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Sumatera Selatan	Pematang Panggang		Proses Finalisasi Naskah Perjanjian dan BAST oleh Pemerintah Provinsi	Register di Triwulan II 2022
2	Sumatera Selatan	Kota Baru	Beroperasi		
3	Sumatera Selatan	Merapi	Beroperasi		
4	Sumatera Selatan	Simpang Nibung			
5	Sumatera Selatan	Senawar Jaya	Beroperasi		
6	Kalimantan Timur	Karang Joang	Beroperasi	Proses TTD Pihak Pemprov	Register di Triwulan II 2022
7	Maluku	Passo	Beroperasi	Proses TTD Pihak Pemprov	Register Triwulan II 2022

DALAM PROSES VERIFIKASI ASET (BMD)

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	KETERANGAN
1	NTB	Bertais	Beroperasi
2	NTB	Poto Tamo	Beroperasi

DALAM PROSES VERIFIKASI AWAL DAN TIDAK DISERAHKAN

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB		POSISI	Target Penyelesaian
1	Papua	1	Waena	Proses Verifikasi Awal	Semester II Tahun Anggaran 2021
2	Riau	1	Tarantang Manuk	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)
3	Jawa Tengah	2	Butuh	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)
4	Jawa Tengah	3	Tugu	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)
5	Jawa Tengah	4	Katon Sari	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)
6	Bengkulu	5	Air Sebakul	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)
7	Sulawesi Utara	6	Amurang	Tidak Diambil Alih	Surat ke Dir Teknis dan Kemendagri terkait Penyeelsaian untuk UPPKB yang tidak diambil alih (Semester I 2019)

Lampiran F.11 – Ikhtisar LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri

NO	Uraian	LK PLN 1	LK PLN 2	LK PLN 3	LK PLN 4	LK PLN 5	LK PLN 6	JUMLAH
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	Loan 3792 - INO : Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)	Loan IP-577 : Japan International Cooperation Agency (JICA)	IP-563: Jabodebek Railway Capacity Enhancement Project Phase I	IP-569 : Engineering Services Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase 1	IBRD 9340-ID: Indonesia Mass Transit Project	INA.24 : Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project	
2	Pemberi Pinjaman	Asian Development Bank (ADB)	JICA	JICA	JICA	World Bank	EDCF Korea	
3	Nama Proyek	Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Teluk Palu	Patimban Port Development Project (I)	Jabodebek Railway Capacity Enhancement Project Phase I	Engineering Services Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase 1	Indonesia Mass Transit Project	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	
4	*Loan ID*	L3792-INO	IP-577	IP-563	IP-569	IBRD 9340-ID	NO. INA.24	
5	No. Register	156H3E5A	1AVH2LAA dan 1YSFCJAA	21679501	1LZT4FLA	1NQ2EH7A	12VL64MA	
6	*Date Sign*	30-Sep-19	15-Nov-17	24 Februari 2014	4 Desember 2015	29 Juni 2022	27 April 2021	
7	*Date Effective*	04-Nov-19	13-Mar-18	23 Juli 2014	31 Maret 2016	21 September 2022	27 April 2021	
8	*Closing Date*	23-Sep-23	13-Mar-26	23 Juni 2026	31 Desember 2023	30 Juni 2027	25 Juni 2025	
9	*Loan Amount*	109,75 Juta USD	JPY 118.906.000.000	JPY 16.332.000.000	JPY 1.919.000.000	USD 223.996.591	USD 67.255.000	
10	*Disbursement* s.d 2021	IDR 87.253.043.658	IDR 8.526.294.938.897	IDR. 37.662.270.871	IDR 78.548.552.371	-	-	IDR 8.692.096.534.926
11	*Disbursement* pada tahun 2022	IDR 486.759.503.906	IDR 869.078.064.586	IDR 36.066.878.257	IDR 72.639.793.840	IDR 1.382.777.589	IDR 29.264.010.235	IDR 1.495.191.028.413
12	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)							
	a. Belanja Barang	-	-	-	IDR 72.639.793.840	IDR 1.382.777.589		IDR 74.022.571.429?
	b. Belanja Modal	IDR 486.759.503.906	IDR 869.078.064.586	IDR 36.066.878.257	-	-	IDR 29.264.010.235	IDR 1.421.168.456.984
13	Neraca (Rupiah)							
	a. Aset Lancar	……	-	-	-	-	-	
	b. Aset Tetap	IDR 579.515.644.897	IDR 9.635.321.189.977	-	-	-	IDR 29.264.010.235	IDR 10.244.100.845.109
	c. Aset Lainnya	……	-	IDR 73.729.149.128	-	-	-	IDR 73.729.149.128
	d. Kewajiban		-	-	-	-	-	
14	*Executing Agency*	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	BPK	-	-	-	BPK	-	

Hibah Luar Negeri

No	Uraian	LK HLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
2	Pemberi Hibah	Aids to Navigation Fund / ANF
3	Nama Proyek	Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
4	*Grant ID*	GA.29.10.2008
5	No. Register	70878801
6	*Date Sign*	29 Oktober 2008
7	*Date Effective*	2009
8	*Closing Date*	31 Desember 2023
9	*Grant Amount*	USD 32,038,213
10	*Disbursement* s.d 2021	IDR 104.925.487.517
11	***Disbursement pada tahun 2022:***	IDR 17.650.765.954
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	
	a. Belanja Barang	IDR 3.540.783.000
	b. Belanja Modal	IDR 14.109.982.954
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	
	b. Aset Tetap	IDR 14.109.982.954
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban:	
14	*Executing Agency*	Ditjen Perhubungan Laut
15	Pemeriksa	-